

ECONOMIC & SOCIAL

Tata Kelola Pemerintahan dan Potensi Sumber Daya Bojonegoro untuk Peningkatan Kesejahteraan

Sri Suryaningsum – UPN "Veteran" Yogyakarta

Moch. Irhas Effendy – UPN "Veteran" Yogyakarta

Raden Hendry Gusaptono – UPN "Veteran" Yogyakarta

suryaningsumsri@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan tentang perkembangan pemerintahan Bojonegoro. Perkembangan pemerintahan Bojonegoro yang diteliti difokuskan sejak tahun 2008 hingga sekarang, sesuai dengan masa pemerintahan bupati saat ini, Suyoto. Hal lain yang dibahas yaitu adanya potensi sumber daya Bojonegoro yang hendaknya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dari berbagai sumber. Informasi difokuskan pada masa pemerintahan Suyoto. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan acuan untuk melihat perkembangan Bojonegoro.

Berdasarkan analisis berbagai sumber yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Bojonegoro berkembang dari waktu ke waktu di bawah kepemimpinan Suyoto. Suyoto dianggap berhasil memimpin Bojonegoro dengan menerapkan sistem demokrasi terbuka, dengan didasari enam pilar pembangunan Bojonegoro. Sumber daya yang ada di Bojonegoro juga dimanfaatkan dan diberdayakan dengan baik. Sehingga seluruh aspek di Bojonegoro dapat berkembang dengan baik.

Kata kunci : Bojonegoro, Suyoto, tata kelola pemerintahan, sistem demokrasi terbuka, sumber daya.

Abstract

This writing discusses the development of Bojonegoro. It is limited into the measure of time from 2008 until today, as the era of Suyoto's leadership. Another thing to be discussed in this paper is about Bojonegoro potential resources.

This writing uses the method of data collecting from any sources. The information is focused on the leadership era of Suyoto. This information is used as data to identify the development of Bojonegoro.

According to the analysis of this writing, can be concluded that the governance of Bojonegoro develops from time to time under Suyoto's control. He is claimed to be successful in controlling Bojonegoro by applying open democratic system with six pillars for continuous and sustainable development Bojonegoro. Bojonegoro resource also be maintained and empowered well, for the wealthiness of Bojonegoro.

Keywords : Bojonegoro, Suyoto, good governance, democratic system, resources.

Pendahuluan

Latar belakang penulisan artikel ini mengacu pada Kabupaten Bojonegoro yang mampu bangkit dari keterpurukan. Hal yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai cara pemimpin Bojonegoro, Bupati Suyoto, dalam mewujudkan dan memenuhi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro, dengan melibatkannya secara nyata. Suyoto memiliki inovasi dan kreativitas dalam mengemban amanah rakyatnya (Suryaningsum, dkk. 2015).

Hal lain yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Bojonegoro demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Suyoto memiliki cara bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Suyoto dianggap berhasil memimpin Bojonegoro dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya Bojonegoro. Otto Scharmer (2013) berpendapat bahwa Suyoto merupakan pemimpin yang berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menuliskan nama Suyoto dalam bukunya yang berjudul "Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economics". Scharmer berpendapat bahwa perubahan sosial yang terjadi di Bojonegoro dimungkinkan karena pembangunan ekonomi dan demokrasi yang dilakukan mewakili fenomena model pemerintahan 4D, yakni *direct*, *dialogic*, *distribute* dan *digital* (Suryaningsum, dkk. 2015).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pengumpulan data. Penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, mengenai tata kelola pemerintahan dan potensi sumber daya Bojonegoro guna penulisan artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

a. Kondisi Fisik Bojonegoro

Data mengenai kondisi fisik Bojonegoro diperoleh dari Laporan Akhir Bojonegoro (Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tahun 2013. Kabupaten Bojonegoro berjarak kurang lebih 110 km dari ibukota Provinsi Jawa Timur, tepatnya di 111°25' - 112°09' Bujur Timur dan 6°59' - 7°37' Lintang Selatan. Luas wilayahnya 230.706 Ha, dengan 1.472.865 jiwa penduduk (pada tahun 2012). 40,15% wilayah tersebut merupakan hutan negara, 35,58% merupakan wilayah yang dipergunakan sebagai lahan pertanian/sawah, dan sisanya merupakan wilayah yang berpenduduk atau dihuni. Batas-batas wilayah (administrasi) Kabupaten Bojonegoro yaitu :

- Bagian Utara : Kabupaten Tuban
- Bagian Timur : Kabupaten Lamongan
- Bagian Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang
- Bagian Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

b. Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro merupakan kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alam. Namun demikian pengelolaan dan pemanfaatannya belum maksimal dan masih tingginya angka perusakan lingkungan yang belum disertai dengan penegakan hukum secara tegas (Suryaningsum, 2015), sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Sumber Daya Alam Air

Sumber daya alam air Bojonegoro diantaranya berupa sungai, mata air dan air tanah. Sumber daya alam air tersebut dimanfaatkan dalam bentuk waduk dan saluran irigasi. Sumber air baku di Bojonegoro diperoleh dari 18 sungai, 25 waduk, 25 mata air dan beberapa embung (Ibrohim, 2012). Untuk dapat mencegah terganggunya fungsi sumber daya alam air maka dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan budidaya di sekitar sungai, sempadan mata air, waduk dan embung.

Sumber Daya Alam Hutan

Sumber daya alam hutan di Bojonegoro terbagi dalam dua kategori berdasarkan status pengelolaan dan wewenang yang dimiliki. Kedua kategori satu pengelolaan dan wewenang tersebut yaitu hutan negara (Perhutani) dan hutan rakyat.

Sumber Daya Alam Mineral

Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi dan gas, sebagai sumber deposit terbesar di Indonesia (Subroto, 2013). Sebagian besar tambangnya ada di Kecamatan Ngasem (Desa Mojodelik, Brobohan dan Wonorejo) dan diperkirakan menghasilkan 126 juta barel (Ibrohim, 2012).

c. Terobosan Mandiri

Suyoto dianggap mampu membangkitkan semangat masyarakat Bojonegoro, memanfaatkan kekurangan yang ada menjadi hal positif yang menguntungkan. Selain menerapkan tata kelola pemerintahan demokratis dan terbuka, Suyoto juga memanfaatkan dengan baik segala potensi Bojonegoro, termasuk sumber daya alamnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Suryaningsum (2015), bahwa pemerintah yang baik dan dapat menyejahterakan masyarakatnya yaitu pemerintah yang memberdayakan sumber daya manusianya terutama pemuda.

Bojonegoro melakukan terobosan mandiri dalam rangka memajukan diri, menyejahterakan masyarakatnya, serta menjadi kabupaten yang mandiri. Dikutip dari artikel berjudul "Petinggi Embung yang Doyan Ngetrail" dalam koran-sindo.com, Suyoto menyadari potensi yang dimiliki Bojonegoro. Oleh karena itu Suyoto membuat program pranavigasi guna mengoptimalkan seluruh potensi Bojonegoro demi maju dan sejahteranya Bojonegoro.

Dalam terobosan mandiri, Bojonegoro berusaha memperbaharui jalan desa dan kecamatan dengan materi, tenaga dan usaha mandiri Bojonegoro. Pembangunan jalan tersebut menggunakan paving blok yang dibuat dengan material yang dimiliki Bojonegoro, dikerjakan pula oleh masyarakat Bojonegoro. Pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan oleh masyarakat sekitar dimana sedang dilaksanakan pembangunan jalan. Pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu menyokong kegiatan ekonomi Bojonegoro, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Usaha lain yang dilakukan yaitu program 1.000 embung guna mengatasi permasalahan air yang dimiliki Bojonegoro. Diharapkan dengan adanya embung air yang berlebih pada musim hujan dapat ditampung di embung-embung yang ada, dan pada musim kemarau dapat dimanfaatkan terutama untuk pengairan pertanian di sekitarnya.

d. Pemerintahan Demokratis

Dikutip dari kompasiana.com dengan artikel berjudul "Demokrasi ala Bojonegoro", disampaikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Suyoto menerapkan sistem demokrasi dengan rakyat yang bebas bersuara, berhak menyampaikan aspirasi secara langsung. Suyoto menginisiasi dialog publik setiap Jumat setelah sholat Jumat. Dialog publik ini dilaksanakan di pendopo Malowopati di depan rumah inas Bupati Suyoto. Scharmer menyatakan bahwa Bojonegoro merupakan model demokrasi terbaik di dunia, yaitu "Demokrasi 4.0" yang tidak lagi menggunakan "ego" tetapi lebih menggunakan "eco".

Bojonegoro juga menerapkan beberapa transformasi dalam rangka membangun dan memajukan daerah. Beberapa diantaranya yaitu transformasi visi, transformasi strategi, transformasi pengaturan, transformasi level operasional, transformasi budaya, dan transformasi niat. Hal ini sesuai dengan artikel tulisan Suryaningsum 2014a dan b, dan juga Suyoto 2015, bahwa sebaiknya ada pengelolaan kemiskinan yang baik dan benar supaya masyarakatnya terjamin kesejahteraannya, salah satunya dengan melaksanakan transformasi di berbagai bidang.

e. Enam Pilar Pembangunan Bojonegoro

Bupati Suyoto mengaplikasikan enam pilar pembangunan berkelanjutan yang disampaikan dalam power poin berjudul "Bojonegoro: Melawan Kutukan Sumberdaya Alam, Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan".

1. Pilar Pembangunan Ekonomi

Bidang ekonomi menjadi urutan pertama dengan harapan kesejahteraan ekonomi Bojonegoro dapat terwujud, segenap rakyat Bojonegoro memiliki pendapatan yang meningkat secara berkelanjutan.

2. Pilar Lingkungan hidup

Aktifitas ekonomi memerlukan dukungan lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan Hidup yang sehat dan berkualitas serta SDM yang produktif merupakan faktor utama.

3. Pilar Modal Manusia dan Modal Sosial

Perubahan dari pertanian ke sektor lainnya memerlukan dukungan sosial dan sumberdaya manusia. Manusia Bojonegoro harus menjadi SDM produktif, sehingga harus sehat lahir batin.

4. Pilar Kebijakan Fiskal Berkelanjutan

Bojonegoro memperoleh kenaikan pendapatan dari dana bagi hasil migas dan bagian hasil bisnis *Participating Interest*. Untuk menjamin efektifitas penggunaan dana maka harus diawasi oleh badan pengawas yang mewakili kekuatan rakyat Bojonegoro.

5. Pilar Pemerintahan

Pemerintah yang cerdas, baik dan bersih (*Smart, Good dan Clean Governance*) guna mewujudkan pilar ekonomi, lingkungan hidup, modal manusia/modal sosial dan mengelola kebijakan fiskal yang benar.

6. Pilar Kepemimpinan Transformatif

Pilar kepemimpinan ini mewujudkan kepemimpinan transformatif pada kepemimpinan politik, sosial, bisnis dan birokrasi. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang menggerakkan dan mengelola perubahan secara terus menerus.

Kesimpulan

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan potensi sumber daya yang mumpuni. Pemerintahan saat ini di bawah kontrol Suyoto dianggap berhasil membawa Bojonegoro bangkit dari keterpurukan. Suyoto menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang terbuka, melibatkan andil seluruh masyarakat Bojonegoro dalam pelaksanaan pemerintahan. Suyoto juga mengungkapkan enam pilar sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Bojonegoro yang bersifat berkelanjutan. Sehingga setelah pemerintahan Suyoto, pemerintahan selanjutnya dapat meneruskan program-program yang telah dirancang demi perkembangan dan kemajuan Bojonegoro. Diharapkan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Bojonegoro mampu menjadi contoh bagi daerah lain demi kemajuan daerah-daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ibrohim, Ali. 2012. <http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/15/potensi-bojonegoro-516181.html> (diakses pada tanggal 28 Mei 2015)
- Kang Yoto. Bojonegoro: Melawan Kutukan Sumberdaya Alam, Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
- Laporan Akhir (Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bojonegoro), 2013
- Roqib, Muhammad. 2014 <http://www.koran-sindo.com/read/932217/149/petinggi-embung-yang-doyan-ngetrail-1417577276>

- Scharmer, C. Otto, Katrin Kaufer. *Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economics*. 2013
- Subroto, Arif. 2013. <http://softandtrik.blogspot.com/2013/10/mengenal-potensi-alam-yang-dimiliki-bojonegoro.html> (diakses pada tanggal 28 Mei 2015)
- Suryaningsum, Sri. dkk. 2014. *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pro-Poor Government dengan Sisi Transformasional* dalam Ekonomi dan Keindonesiaan: Membangun Ekonomi Pro-Rakyat.
- Suryaningsum, Sri. dkk. 2014. *Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Suryaningsum, Sri, dkk. *Bojonegoro, The Best Governance Role*. 2015
- Suryaningsum, dkk. *Potensi Sumber Daya Alam Bojonegoro*. 2015
- Suryaningsum, Sri. et al. *Bojonegoro District, The Best Governance Role in Economic Development and Poverty Alleviation in USM-ICOSS*. 2015
- Suyoto. 2015. Strategi Pengelolaan Pemerintah Daerah. Semnas Pembangunan Indonesia UPN "Veteran" Yogyakarta. 17 April 2015

MODEL CORPORATE SUPPLY CHAIN DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP DIMENSI EKONOMIK¹

Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, Akt., M.B.A. -- UGM
Dr. Sri Suryaningsum – UPNVY
Dr. Efraim Ferdinan Giri – STIE YKPN

RINGKASAN

Dalam pelaksanaannya, implementasi *Good Corporate Governance* membutuhkan komitmen semua pihak, oleh karena itu diperlukan suatu model penerapan GCG yang melibatkan stakeholdernya. Model ini disebut dengan model *corporate supply chain*. Dalam model *corporate supply chain* ini akan dapat diketahui seberapa besar hubungan semua pihak dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak regulator, pihak investor, pihak publik, pihak perusahaan, dan pihak profesi.

Dimensi ekonomik dalam penelitian ini mengacu pada Global Reporting Initiative (2000) dalam hal kategori *profit* (5 indikator), *intangible assets* (1 indikator), *investments* (2 indikator), *taxes* (1 indikator), dan struktur modal (3 indikator). Lima kategori dengan dua belas indikator ini peneliti pilih sebagai variabel dependen berdasarkan kemampuan untuk diteliti dengan waktu penelitian yang disediakan oleh CGCG. Sebenarnya dimensi ekonomik menurut Global Reporting Initiative (2000) meliputi sembilan kategori *profit*, *intangible assets*, *investments*, *wages and benefits*, *labour productivity*, *taxes*, *community development*, *suppliers*, *products and services*, namun berdasarkan survei awal yang telah dilakukan di penelitian ini ternyata banyak perusahaan yang tidak mencantumkan data (indikator-indikator) berdasarkan kategori-kategori yang dibutuhkan tersebut.

Penelitian ini sangat penting dan ditujukan untuk menambah khasanah pengetahuan berkaitan dengan implementasi *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian ini memiliki implikasi dalam kebijakan nasional maupun internasional karena mampu memetakan kondisi masing-masing sektor industri secara rinci.

A. PENDAHULUAN

Tahun amatan untuk penelitian ini adalah 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. Kurun waktu ini peneliti pilih berdasarkan pertimbangan data terbaru dan konsistensi data selama lima tahun serta sudah diterapkannya GCG karena aturan GCG di Indonesia yang dipersyaratkan oleh Bapepam ada sejak tahun 2001. Data diperoleh dari Osiris dan berbagai laporan tahunan.

B. LANDASAN TEORETIS

Menurut Dipiazza dan Eccles (2002), rerangka *Corporate Responsibility Supply Chain* akan efektif jika semua komponen melakukan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik dan benar. Ada enam elemen penting dalam CRSC yaitu: eksekutif perusahaan yang menyediakan laporan keuangan, persetujuan oleh dewan direksi independen, diuji oleh auditor independen, dikomunikasikan oleh distributor informasi, dianalisis oleh analis pihak ketiga dan interpretasi oleh pemakai informasi, investor, kreditor, dan *stakeholder* lainnya. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada dua elemen penting pertama yaitu:

¹ Artikel bagian dari Hibah Kompetensi 2010 DP2M DIKTI

managemen yang baik (termasuk dewan direksi independen), dan auditor independen. Interaksi antara perusahaan atau managemen dengan *stakeholder* difasilitasi oleh informasi keuangan yang dilaporkan. Keinginan menyampaikan informasi yang baik akan dihasilkan oleh managemen yang memiliki keinginan dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, *good management* merupakan kriteria yang baik bagi penciptaan *good corporate governance*. Dipiazza & Eccles, (2002, p.3-6) menyatakan bahwa ada tiga elemen kunci untuk meningkatkan *public trust*, yaitu: a) *spirit of transparency*, b) *culture of accountability*, dan c) *people of integrity*. Transparansi dan akuntabilitas berbagai pihak yang terlibat dalam *Corporate Responsibility Supply Chain* tidak cukup untuk meningkatkan *public trust*, tetapi pada akhirnya efektivitas ke dua elemen ini sangat tergantung pada integritas dari setiap pihak yang terkait dalam CRSC. Tanpa integritas manusia yang merupakan pondasi sistem pelaporan keuangan, maka tidak akan ada *public trust* (Dipiazza & Eccles, 2002, p.6).

C. METODA PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bursa saham Indonesia. Digunakannya tahun amatan 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, dan 2002 ini untuk dapat melihat konsistensi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, tahun 2002 dianggap semua unsur kelengkapan GCG telah terbentuk karena aturan-aturan mengenai GCG di Indonesia mulai ada pada tahun 2001.

Pemilihan Variabel

Variabel yang dijelaskan adalah dimensi ekonomik oleh Global Reporting Initiative (2000) yang telah dimodifikasi dan ditambah (struktur modal, struktur modal dianggap penting karena berkaitan dengan GCG) oleh peneliti:

No.	Kategori	Indikator
1.	<i>Profit</i>	<i>Net profit/ earnings/ income</i> <i>Earnings before interest and tax</i> <i>Gross margin</i> <i>Dividends</i>
2.	<i>Intangible Assets</i>	<i>Nilai intangible aset</i>
3.	<i>Investments</i>	<i>Research and development</i> <i>Other capital investments</i>
4.	<i>Taxes</i>	<i>Taxes paid to all taxing authorities</i>
5.	<i>Struktur Modal</i>	<i>Shareholder Liquidity</i> <i>Solvensi</i> <i>Gearing</i>

Variabel penjelas yang dipilih adalah implementasi GCG ditinjau dari *Corporate Supply Chain*:

1. Pihak Publik diproksi dengan kepemilikan saham oleh publik yaitu indikator independensi kepemilikan publik oleh BvDEP, tipe kepemilikan, dan tipe kepemilikan berdasarkan geografi.
2. Pihak Investor diproksi dengan rating skor risiko bisnis oleh WVB.
3. Pihak Managemen diproksi dengan kualitas laporan auditan dan ROA.
4. Pihak Regulator diproksi dengan standar akuntansi yang digunakan dan jumlah struktur organisasi GCG.
5. Pihak Kantor Akuntan Publik diproksi dengan reputasi auditor.

Definisi Operasional Variabel

1. Indikator independensi kepemilikan publik oleh BvDEP:

Pihak Publik diproksi dengan kepemilikan saham oleh publik yaitu indikator independensi oleh BvDEP indikator kepemilikan yang sudah dilakukan oleh BvIDEP yang ditandai dengan penetapan nilai yang telah dilakukan oleh Osiris untuk negara-negara ASEAN, berupa A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan U. Variabel ini diukur berdasarkan nilai yang peneliti lekatkan untuk simbol huruf tersebut, nilai tertinggi dilekatkan pada A+ sebesar 11 sampai yang terendah sebesar 1, dengan uraian sebagaiberikut:

 - 11, jika indikator independensi BvDEP adalah A+, yang berarti tidak ada shareholder dengan kepemilikan total atau langsung yang lebih besar dari 25%
 - 10, jika indikator independensi BvDEP adalah A, yang berarti sama dengan perusahaan independen
 - 9, jika indikator independensi BvDEP adalah A-, yang berarti sama dengan perusahaan independen
 - 8, jika indikator independensi BvDEP adalah B+, yang berarti sama dengan perusahaan indepenen,
 - 7, jika indikator independensi BvDEP adalah B, yang berarti tidak ada shareholder tercatat dengan kepemilikan total, tidaklangsung, langsung, lebih dari 50%
 - 6, jika indikator independensi BvDEP adalah B-, yang berarti satu atau lebih shareholder tercatat dengan lebih dari 50% kepemilikan total atau langsung.
 - 5, jika indikator independensi BvDEP adalah C+, yang berarti tidak ada shareholder tercatat dengan kepemilikan langsung lebih dari 50%.
 - 4 jika indikator independensi BvDEP adalah C, yang berarti satu shareholder tercatat dengan kepemilikan total lebih dari 50% (=dimiliki mayoritas secara tidaklangsung)
 - 3, jika indikator independensi BvDEP adalah C-, yang berarti satu shareholder tercatat dengan kepemilikan total lebih dari 50% (= dimiliki mayoritas secara tidaklangsung)
 - 2, jika indikator independensi BvDEP adalah D, yang berarti satu shareholder tecatat dengan kepemilikan langsung lebih dari 50% (= dimiliki mayoritas secara langsung).
 - 1, jika indikator independensi BvDEP adalah U, yang berarti tidak diketahui
2. Tipe kepemilikan: level pertama kepemilikan terbesar berdasarkan tipe kepemilikan dengan berbagai kriteria,
Pelekatan nilai 11 untuk tipe kepemilikan bank dan perusahaan keuangan.
3. Geografi kepemilikan: level pertama kepemilikan terbesar berdasar kedudukan geografinya, yaitu luar negeri, dalam negeri, tidak terdefiniskan karena tidak ada kepemilikan terbesar pada level pertama.
4. Rating risiko bisnis oleh WVB: rating corporate berdasarkan skor risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan sudah berupa besaran angka.
5. Kualitas laporan audit (pelekatan nilai dari 6 sampai 0;
6. Standar akuntansi yang digunakan:
Pelekatan nilai 3 untuk penggunaan IFRS
Pelekatan nilai 2 untuk penggunaan Local GAAP
Pelekatan nilai 1 untuk penggunaan Standar Akuntansi n.a.
7. Rasio jumlah struktur kelengkapan GCG Jumlah struktur organisasi GCG dalam hal ini merupakan kelengkapan struktur organisasi sebagai implementasi GCG yang telah dipersyaratkan oleh pihak regulator.
8. Reputasi auditor: peneliti melekatkan nilai 4 untuk KAP big four, nilai 3 untuk KAP yang berafiliasi dengan big four, nilai 2 untuk KAP lokal, dan nilai 1 untuk data KAP yang tidak dijelaskan, misalnya diaudit oleh auditor independent.

9. Shareholders Liquidity Ratios: shareholders funds/Non-current liabilities
10. Solvency ratio (%) : (shareholders funds/ total assets) * 100
11. Gearing (%) : (Non-current liabilities + loans)/ sareholders funds

Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara empiris untuk dugaan peneliti yaitu variabel-variabel independen yaitu:

1. independensi kepemilikan publik
2. tipe kepemilikan
3. geografi kepemilikan
4. kualitas laporan keuangan
5. ROA
6. reputasi KAP
7. standar akuntansi
8. jumlah struktur kelengkapan GCG
9. rating skor risiko bisnis mempunyai hubungan korelasi mempengaruhi variabel dependen (dimensi ekonomik).

SISTEMATIKA:

1. Mengklasifikasikan semua sektor industri berdasarkan *Industry Classification Benchmark* di negara Indonesia
2. Mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan pada masing-masing sektor industri berdasarkan *Industry Classification Benchmark* di negara Indonesia
3. Meneliti proksi-proksi yang berkaitan dengan *good corporate governance* berdasarkan model *corporate supply chain*
4. Meneliti proksi-proksi yang berkaitan dengan indikator-indikator dalam kategori-kategori dimensi ekonomik
5. Melakukan uji hipotesis berdasarkan hasil penelitian atas proksi-proksi yang berkaitan dengan *good corporate governance* berdasarkan model *corporate supply chain*
6. Melakukan analisis pembahasan, telaah mendalam, dan penyimpulan atas hasil penelitian dan pengujian empiris

D. HASIL

Jumlah sampel yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh sebanyak 1757 perusahaan selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dengan rincian sebagaiberikut ini:

Tabel Perusahaan Yang Menjadi Sampel

Sektor Industri berdasarkan Industry Classification Benchmark:		Tahun						Jumlah
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
0	Oil & Gas	2	2	3	3	4	6	20
1	Basic Materials	41	41	42	43	43	46	256
2	Industrials	41	45	47	51	55	62	301
3	Consumers goods	71	73	76	81	82	83	466
4	Health care	11	11	11	11	11	11	66
5	Consumer services	33	33	36	39	40	47	228
6	Telecommunication	3	3	3	5	6	6	26
7	Utilities	-	1	1	1	1	1	5

8	Financials	61	67	65	68	69	81	411
9	Technology	6	6	6	7	7	8	40
	Jumlah	270	283	291	309	318	351	1757

Peer Group Name	Company name	Peer Group Description
6535	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	Fixed Line Telecommunications
6535	INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL TBK	Fixed Line Telecommunications
6575	PT INDOSAT TBK	Mobile Telecommunications
6575	PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK	Mobile Telecommunications
6575	PT BAKRIE TELECOM TBK	Mobile Telecommunications
6575	MOBILE-8 TELECOM TBK	Mobile Telecommunications
9533	CENTRAL KORPORINDO INTERNASIONAL TBK.	Computer Services
9535	CENTRIN ONLINE TBK	Internet
9535	DYVIACOM INTRABUMI TBK	Internet
9535	INDOEXCHANGE TBK	Internet
9537	MYOH TECHNOLOGY TBK	Software
9572	METRODATA ELECTRONICS TBK	Computer Hardware
9572	NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK	Computer Hardware

a. Seluruh Sektor Industri

Dalam seluruh sektor industri yang merupakan gabungan dari masing-masing sektor industri (sektor industri minyak dan gas sebanyak 20, *basic materials* sebanyak 256, *industrials* sebanyak 301, *consumers goods* sebanyak 404, *health care* sebanyak 66, *consumers services* sebanyak 228, teknologi & telekomunikasi sebanyak 66, dan finansial sebanyak 270) dengan basis template industri total berjumlah 1340 perusahaan dilakukan pengolahan dengan alat analisis regresi dan *missing values* yang dipilih adalah berdasarkan *exclude cases listwise* dengan pertimbangan jumlah data yang sangat banyak.

Ringkasan hasil uji dengan alat analisis regresi akan dibahas dalam dua tahap yaitu tahap awal adalah pembahasan statistika deskriptif, model summary, dan model regresi dari masing-masing variabel dan untuk tahap selanjutnya adalah pembahasan ringkasan besaran nilai signifikansi koefisien. Tabel di bawah ini merupakan tabel yang berisi ringkasan masing-masing pengujian dengan variabel dependen Net Profit, Earning Before Interest and Taxes, Gross Margin, Ordinary Dividen, Intangible Assets, Pajak Penghasilan, Research and Development, Investment, Shareholder Liquidity, Solvensi, dan Gearing. Ringkasan tabel ini berisi nilai mean, jumlah data, adjusted R square, dan signifikansi model regresi. Nilai mean akan dibahas dengan mencermati besarnya nilai deviasi standarnya untuk masing-masing variabel dengan maksud menentukan apakah variabel tersebut akan diikuti dengan pengolahan lebih lanjut ataukah dihapus dalam pengolahan regresinya. Deviasi Standar bernilai 0 maka variabel tersebut tidak akan diikutsertakan dalam pengolahan lebih lanjut. Jumlah data menunjukkan seberapa banyaknya transparansi dalam penyajian informasi untuk item variabel-variabel yang diujikan, *adjusted R square* menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan mengendalikan pengaruh jumlah banyaknya variabel independen.

Tabel Nilai Mean Untuk Berbagai Variabel Independen Pada Pengujian Net Profit, Intangible Assets, dan Pajak Untuk Seluruh Sektor Industri

(Untuk tabel, lebih jelasnya dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Tabel Nilai Adjusted R Square dan Sig. Model Regresi Pada Pengujian Net Profit, Intangible Assets, dan Pajak Untuk Seluruh Sektor Industri

(Untuk tabel, lebih jelasnya dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Tabel Nilai Mean Berbagai Variabel Independen Pada Pengujian Investasi dan Struktur Modal Untuk Seluruh Sektor Industri

(Untuk tabel, lebih jelasnya dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Tabel Nilai Adjusted R Square dan Sig. Model Regresi Pada Pengujian Investasi dan Struktur Modal Untuk Seluruh Sektor Industri

(Untuk tabel, lebih jelasnya dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Tabel Ringkasan Nilai Signifikansi Koefisien Dengan Variabel Dependen Profit, Intangible Assets, dan Pajak Untuk Seluruh Sektor Industri

(Untuk tabel, lebih jelasnya dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Tabel Ringkasan Nilai Signifikansi Koefisien Dengan Variabel Dependen Investasi dan Struktur Modal Untuk Seluruh Sektor Industri

(Untuk tabel, lebih jelasnya dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Standar akuntansi sebagai salah satu cerminan pihak regulator untuk 12 pengujian hampir sebagian besar (10 pengujian) secara statistika tidak signifikan. Hal yang dapat dijustifikasi adalah adanya keseragaman dalam pelaporan keuangan di Indonesia (hal ini sangat jelas jika jumlah data untuk pengujian relatif sedikit, misalnya pengujian dengan variabel dependen Riset dan Development dengan jumlah data 51 dari jumlah total keseluruhan data (1340). Dalam pengujian dengan variabel dependen Riset dan development tersebut nilai deviasi standar sebesar 0.00 yang berarti dapat dinyatakan bahwa dalam jumlah data yang relatif sedikit nilai standar akuntansi adalah benar-benar seragam yaitu menggunakan Local GAAP, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi ketaatan pada pihak regulator dengan menggunakan Local GAAP yang diajarkan oleh pihak regulator walaupun secara statistika tidak mampu mempengaruhi penciptaan laba bersih.

Rasio jumlah kelengkapan struktur GCG secara statistika mempengaruhi hampir semua pengujian (11 pengujian dari total 12 pengujian). Hal yang dapat dijustifikasi adalah bahwa kelengkapan unsur GCG mengandung peranan penting dalam tata kelola perusahaan, namun demikian untuk studi di Indonesia ini perlu transparansi yang lebih memadai. Rating skor bisnis yang dilakukan oleh WVB menunjukkan secara statistika berpengaruh terhadap penciptaan laba bersih, riset dan development, **SIMPULAN DAN DISKUSI**

PUSTAKA ACUAN

- Carslaw, C.A.P.N., and Kaplan, S.E. 1991. "An Examination of Audit Delay: Further Evidnece from New Zealand". *Accounting and Business Research*. Vol.22 (82), (Winter): pp:21-32.
- Claessens, Stijin; Djankov, Simeon; dan Lang, Larry H.P. (2000a). "The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations." *Journal of Financial Economics*. Vol. 58: 81-112.
- Claessens, Stijin; Djankov, Simeon; Fan, Joseph; dan Lang, Larry (2000b). "Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia. Policy Research Working Paper 2088, The World Bank.

- Claessens, Stijin; Djankov, Simeon; Fan, Joseph P.H.; dan Lang, Larry H.P. (2002). "Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings." *Journal of Finance*. Vol. 57, No. 6: 2741-1771.
- Denis, D.K. dan McConnell, J.J. (2002). "International Corporate Governance." Working Paper of Purdue University.
- Dipiazza, Samuel A. And Eccles, Robert G. (2002). *Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Dyers, J. C, and A.J. Mc Hugh, 1975. "The Timeliness of the Australian Annual Report". *Journal of Accounting Research*. Autumn: 204-219.
- Global Reporting Initiative [http://www.globalreporting.org/guidelines/june2000/june2000guidelinesdownload](http://www.globalreporting.org/guidelines/june2000/june2000guidelinesdownload.htm). htm.
- Hartono, Jogiyanto. Giri, Efraim Ferdinan. Suryaningsum, Sri. 2008a. "Model Penentuan Indeks dan Peningkatan GCG di Indonesia. CGCG UGM.
- Hartono, Jogiyanto. Giri, Efraim Ferdinan. Suryaningsum, Sri. 2008b. Evaluasi atas Peningkatan GCG di Indonesia (Penetapan Bobot untuk Kriteria Utama Penskoran GCG untuk masing-masing Industri)". Proses publikasi.
- Hartono, Jogiyanto. Giri, Efraim Ferdinan. Suryaningsum, Sri. 2008c. Model system pelaporan keuangan yang mendukung pencapaian GCG dengan menggunakan Corporate Reporting Supply Chain di Indonesia." Proses publikasi.
- Hartono, Jogiyanto. Horizon Problem In The Management-Controlled Firms, *Journal of Indonesian Economy & Business*, 2002.
- Hartono, Jogiyanto. The Simultaneity of Dividend and Capital Structure Decisions: The Case of Indonesian Capital Market, IJB, 1999 (co-author dengan Ignatius Roni Setyawan).
- Hartono, Jogiyanto. Conflict of Interest Problem in the Management-Controlled Firms, 2000 (co-author with Dewi Ratnaningsih), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 2001.
- Hartono, Jogiyanto. Penelitian Tentang Informasi Laba dan Dividen Kas yang dibawa oleh Pengumuman Pemecahan Saham, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, April 2000 (co-author dengan Anggraini).
- Hartono, Jogiyanto. Hubungan Kandungan Informasi Arus Kas, Komponen Arus Kas dan Laba Akuntansi dengan Harga atau Return Saham, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 3, Januari 2000 (co-author dengan Triyono).
- Hartono, Jogiyanto. Evidence on the Value of Dividend Signals, Dividend Policy and the Issuance of Debt, 1995 (co-author with Roland Lipka). Sebagai forum paper di National Meeting of American Accounting Association di San Diego, 1999.
- Herawaty, Vinola. 2008. "Peran Praktek *Corporate Governance* Sebagai *Moderating Variable* Dari Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Nilai Perusahaan." *Prosiding SNA 11 Pontianak*.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs. And Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*. Vol. 3: 305-360.
- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei (1999). "Corporate Ownership Around the World." *Journal of Finance*. Vol. 54, No. 2: 471-517.
- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; dan Vishny, Robert (1998). "Law dan Finance." *Journal of Political Economy*. No. 106: 1113-1155.
- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; dan Vishny, Robert (2000). "Agency Problems and Dividend Policies Around the World." *Journal of Finance*. Vol. 55: 1-33.

- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; dan Vishny, Robert (2002). "Investor Protection and Corporate Valuation." *Journal of Finance*. Vol. 57, No. 3: 3-27.
- Midiastuty, Pratana Puspa dan Mas'ud Machfoed (2003). "Analisa Hubungan Mekanisme Corporate Governanace dan Indikasi Manajemen Laba." *Simposium Nasional Akuntansi VI. IAI, 2003*.
- Moreck, Randall; Wolfenzon, Daniel; dan Yeung, Bernard (2004). "Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth." NBER Working Paper No. 10692.
- Osiris Data Guide. 2003. Bureu van Dijk Electronic Publishing.
- Silveira and Barros (2006). *Corporate Governance Quality and Firm Value in Brazil*. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923310
- Sloan, Richard G. (1996). "Do Stock fully Reflect Information in Accrual and Cash Flow About Future Earning," *the Accounting Review*, p.289-315.
- Siallagan, Hamonangan dan Machfoedz, Mas'ud (2006), "Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan." *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006*.
- Shleifer, A dan R.W. Vishny (1997). "A Survey of Corporate Governance." *Journal of Finance*. Vol 52. No.2 Juni. 737-783.
- Siregar, Baldric. 2008. "Ekspropriasi Pemegang Saham Minoritas Dalam Struktur Kepemilikan Ultimat." *Prosiding SNA 11 Pontianak*.
- Siregar, Sylvia Veronica N.P & Bachtiar, Yanivi S.(2004). "Good Corporate Governance, Information Asymmetry, and Earnings Management", *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar-Bali : hal 57-69.
- Siregar, Sylvia. Veronica N.P, dan Utama, Siddharta. (2006). "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)", *Journal Riset Akuntansi Indonesia Vol 9 No.3. Hal 307-326*
- Sri Suryaningsum. 2008. Hibah Doktor UGM DP2M DIKTI. Implementasi Model Corporate Supply Chain Dalam Gcg Terhadap Kualitas Laba Dengan Overall Country Risk Sebagai Proteksi Investor (Komparasi Empiris Negara-Negara Asean).**
- Sri Suryaningsum. 2013. Dagian dari Disertasi. Daya Deteksi Auditor Atas Managemen Laba Akrual Pada Kesegeraan Adopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (Spki/Ifrs) Dan Sistem Busines**
- Tarjo, 2002. "Analisa Free Cash Flow dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Mempublik di Indonesia". *Tesis S2 Program Pasca sarjana UGM, Yogyakarta*.
- Teoh, Siew Hong dan T,J, Wong, 1993. "Perceived Auditor Quality and the Earnings ResponseCoefficient." *The Accounting Review*. 346-366.
- Utama, Siddharta (2003). "Corporate Governance, Disclosure and its Evidence in Indonesia." *Usahawan* no.04 th XXXII. hlm. 28-32
- Utama, Siddharta dan Afriani, Chyntia (2005). "Praktek Corporate Governance dan Penciptaan Nilai Perusahaan Studi Empiris di BEJ." *Usahawan* no.88 th XXXIV.
- Watfield, Terry D., J.J. Wild dan K.L Wild (1995). "Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earning." *Journal of Accounting and Economics* 20, hal 61-91.
- Wedari, L.K.(2004). "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba." *Prosiding SNA VII*. Denpasar. 963-974

PERSEPSI MENGENAI PERILAKU ETIS OLEH AKUNTAN DAN LULUSAN S1 AKUNTANSI YANG SUDAH BEKERJA

Lisia Apriani

Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
e-mail: clara_lisia@yahoo.com

Abstract

Value and ethics required by students to prepare themselves to enter business world. This paper discusses code of ethics and ethical behavior that perceived by accounting graduates and accounting profession graduates. This aim of study is to see if there is a differences between them.

The study involved 62 accounting graduates and accounting proffesion graduates of various companies types in Indonesia. This study used five likert scale to measure the code of ethics and ethical behaviour perceived by them. Independent sample t test is used to analyzed two hypothesis.

The results showed that there are no differences code of ethics and ethical behaviour perceived by accounting graduates and accounting proffesion graduates. There are some reason for example there are no value added of ethical value that perceived by accounting profession students. Another reason is may be the responden give ideal answer not the realistic answer.

Keywords: *accounting graduates, accounting profession graduates, echical behavior, ethics code.*

Abstrak

Etika dan nilai diperlukan oleh mahasiswa untuk menyiapkan dirinya memasuki dunia kerja. Penelitian ini membahas kode etik dan perilaku etis yang dirasakan oleh lulusan akuntansi dan lulusan profesi akuntansi (PPAk). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan.

Penelitian ini melibatkan 62 responden yang terdiri dari lulusan S1 akuntansi dan PPAk. Penelitian ini menggunakan 5 skala likert untuk mengukur variabel persepsi perilaku etis dan variable penerapan kode etik. Menggunakan *independent sample t test* untuk menganalisis dua hipotesis yang diajukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi perilaku etis dan penerapan kode etik antara lulusan S1 akuntansi dan lulusan PPAk. Ada beberapa alasan diantaranya adalah materi yang diberikan di PPAk hampir sama dengan di S1 Akuntansi sehingga tidak ada nilai tambah yang dirasakan oleh mahasiswa. Alasan lainnya adalah kemungkinan responden menjawab dengan jawaban yang ideal dan bukan jawaban yang sesungguhnya.

Kata kunci: lulusan akuntansi, lulusan PPAk, perilaku etis, kode etik

I. Pendahuluan

Pembuat kebijakan dan perusahaan saat ini menekankan kode etik sebagai aspek yang efektif dari tata kelola korporat. Bagaimanapun literatur mengenai tata kelola korporat di akuntansi hanya memberikan sedikit bukti (Davidson dan Stevens, 2013). USA Congress mengeluarkan Sarbanes Oxley Act sebagai respon terhadap skandal korporasi yang sangat terpublikasi yaitu Enron, WorldCom, Adelphia Communications, dan Tyco. Tujuan utama SOX adalah untuk memperkuat tata kelola korporat dan akhirnya meningkat kepercayaan investor (Davidson dan Stevens, 2013).

Sarbanes Oxley Act yang dikeluarkan pada tahun 2002 tersebut membentuk pengendalian pemerintah yang lebih kuat dan merupakan peraturan atas berbagai perusahaan publik di Amerika Serikat. SOX diberlakukan untuk perusahaan yang diperdagangkan secara publik, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham untuk diperdagangkan di berbagai pasar saham di Amerika Serikat. Beberapa bagian terpenting SOX meliputi pembentukan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), peningkatan independensi auditor, pengetatan peraturan tata kelola perusahaan, pengendalian atas manajemen dan penilaian pada peningkatan perhatian atas etika perusahaan (Hansen dan Mowen, 2007).

Semua praktik akuntansi manajemen dikembangkan untuk membantu manajer memaksimalkan laba. Secara tradisional, kinerja ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama. Namun, manajer dan akuntan manajemen seharusnya tidak terlalu berfokus pada laba yang akan mengakibatkan mereka membangun suatu keyakinan bahwa satu-satunya tujuan bisnis ialah memaksimalkan kekayaan bersih. Tujuan memaksimalkan laba harus dibatasi dengan persyaratan bahwa laba dicapai melalui cara-cara yang legal dan etis. Meskipun hal ini selalu menjadi asumsi implisit dari akuntansi manajemen, asumsi tersebut seharusnya dibuat secara eksplisit (Hansen dan Mowen, 2007).

Terdapat sepuluh nilai inti etika yang disampaikan oleh Brackner (Mowen, Hansen dan Heitger, 2012). Kesepuluh prinsip tersebut adalah: (1) kejujuran, (2) integritas, (3) pemenuhan janji, (4) kesetiaan, (5) keadilan, (6) kepedulian terhadap sesama, (7) penghargaan kepada orang lain, (8) kewarganegaraan yang bertanggung jawab, (9) usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan (10) akuntabilitas.

Sebagai seorang akuntan, entah itu lulusan S1 akuntansi ataupun akuntan yang memiliki register negara baik yang bekerja di perusahaan baik sebagai akuntan manajemen ataupun sebagai auditor harus mematuhi kode etik. Oleh karena penelitian ini berada di wilayah Indonesia maka kode etik yang dipakai di penelitian ini adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah mengeluarkan kode etik dalam kongresnya di tahun 1998. Ada delapan prinsip yang termuat di kode etik IAI. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) tanggung jawab profesi, (2) kepentingan publik, (3) integritas, (4) obyektivitas, (5) kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) kerahasiaan, (7) perilaku profesional, (8) standar teknis.

Sebelum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2014, untuk menjadi akuntan harus kuliah S1 Akuntansi lalu mengikuti PPAk. Dengan adanya PMK ini, jika merasa mampu lulusan akuntan langsung bisa ambil Chartered Accountant (CA) tanpa harus menempuh PPAk. Kemudian dari jurusan lain misalnya dari manajemen atau teknik juga bisa menjadi CA dengan terlebih dahulu mengikuti PPA. Dengan adanya PMK ini jalurnya lebih fleksibel (IAI, 2014).

Lingkungan pendidikan tinggi (universitas) mengalami perubahan yang signifikan, hal ini disebabkan karena meningkatnya harapan konsumen dan penekanan yang lebih besar pada kualitas jasa (Smith dkk, 2007 dalam Apriani, 2009). Meningkatnya SPP

menyebabkan mahasiswa menuntut kualitas yang tinggi karena mereka merasa sudah mengeluarkan biaya yang tinggi. Thorne (2001) mengindikasikan bahwa defisiensi di kapasitas moral kognitif mahasiswa akuntansi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi pengajar akuntansi untuk mengembangkan kurikulum etika yang lebih efektif ketika melatih mahasiswa akuntansi untuk menggunakan pertimbangan prinsipil dalam proses pembuatan keputusan. Berdasarkan hal di atas peneliti ingin menguji apakah dengan menerapkan proses yang baik akan menghasilkan calon-calon akuntan yang berperilaku etis. Jika seseorang menempuh PPAk maka dia akan diberi materi tentang etika profesi, dengan adanya mata kuliah tersebut diharapkan mereka akan lebih paham tentang etika profesi.

II. Tinjauan Pustaka

Perilaku Etis

Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang "benar", "sesuai", dan "adil". Tingkah laku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dan keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. Meskipun orang sering berbeda pandangan terhadap arti istilah etika, tampaknya terdapat suatu prinsip umum yang mendasari semua sistem etika. Prinsip ini diekspresikan oleh keyakinan bahwa setiap anggota kelompok bertanggungjawab untuk kebaikan anggota lainnya. Keinginan untuk berkorban demi kebaikan kelompoknya merupakan inti dari tindakan yang etis.

Pentingnya Pengajaran Etika di Perguruan Tinggi

Fogart, 2011 dalam Liu, Yao dan Hu, 2012 mengatakan bahwa akuntansi menghadapi profesionalisme yang menurun ketika budaya akuntansi publik gagal untuk meningkatkan kepentingan publik. Beberapa peneliti dengan kritis mempertanyakan keefektifan pendidikan etika bagi mahasiswa akuntansi dan bisnis untuk membuat pilihan-pilihan etis setelah lulus kuliah (Fleming, dkk, 2009, dalam Liu, Yao dan Hu, 2012).

Pendidikan etika akuntansi dapat mengambil manfaat dari pandangan yang lebih luas dari akuntabilitas dan tanggungjawab akuntan, pelatihan formal yang lebih sistematis, pelatihan informal yang lebih dan penggunaan partner yang lebih banyak yang tersedia di hukum dan kedokteran. Dapatkah etika diajarkan? Hanya sedikit yang membantah argumen bahwa etika bisa dipelajari (Geary dan Sims, 1994 dalam Liu, Yao dan Hu, 2012). (Felton dan Sims, 2005 dalam Liu, Yao dan Hu, 2012) menemukan bahwa pendidikan etika bisnis dapat memperluas pandangan mahasiswa tentang etika, sedangkan yang lain mengatakan bahwa alasan moral, pemrosesan penilaian pertimbangan etis dan penentuan serangkaian tindakan moral dapat diajarkan (Amstrong, 1987 dalam Liu, Yao dan Hu, 2012). Peneliti di profesi yang lain menyimpulkan bahwa program pengajaran etika formal di hukum (Kelly 1980 dalam Liu, Yao dan Hu, 2012), obat-obatan (Klingensmith 2008; Pellegrino, dan McElhinney 1982 dalam Liu, Yao dan Hu, 2012 and kedokteran gigi (Bebeau 1985, 1991, dalam Liu, Yao dan Hu, 2012) membantu seseorang untuk mengembangkan kapasitas moral kognitifnya ke level yang paling tinggi. Rest (1986, dalam Liu, Yao dan Hu, 2012) menemukan bahwa pendidikan merupakan prediktor yang paling kuat tentang kemampuan seseorang untuk memformulasi judgment etis.

Pengaruh kualitas proses belajar mengajar terhadap persepsi etis seorang akuntan

McManus (2009) mengatakan bahwa evaluasi terhadap keseriusan konflik etika dipengaruhi oleh standar etis yang dirasakan oleh teman, luasnya pelajaran etika di perguruan tinggi dan gender. Sedangkan Rest (1986, dalam Liu, Yao dan Hu, 2012) menemukan bahwa

pendidikan merupakan prediktor yang paling kuat tentang kemampuan seseorang untuk memformulasi judgment etis.

Dari landasan teori yang dikemukakan sebelumnya peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Terdapat perbedaan persepsi tentang perilaku etis untuk seseorang yang sudah bekerja antara sarjana S1 Akuntansi dengan akuntan (lulusan PPAk)

Ha2: Terdapat perbedaan persepsi penerapan kode etik profesi antara akuntan dan lulusan akuntansi yang sudah bekerja?

III. Metode Penelitian

Variabel Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk deskriptif karena memberikan deskripsi tentang penerapan kode etik dan persepsi perilaku etis oleh akuntan dan lulusan S1 Akuntansi yang sudah bekerja. Data yang digunakan merupakan data *cross sectional* karena menggunakan beberapa lulusan baik S1 Akuntansi maupun PPAk Universitas Sanata Dharma pada waktu yang sama. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner para lulusan S1 Akuntansi dan PPAk yang sudah bekerja dengan memanfaatkan jasa internet. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan pertengahan September 2015. Untuk mendapatkan pandangan tentang kode etik dan persepsi perilaku etis peneliti menggunakan sumber Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dan beberapa referensi jurnal.

Variabel persepsi etis calon akuntan

Untuk mengukur variabel persepsi etis calon akuntan mengadopsi item-item pertanyaan yang dibuat oleh Forsyth (1980) dalam Radtke (2004), dengan mengubah yang semula menggunakan 9 skala likert menjadi 5 skala likert. Item-item pernyataan di atas sudah pernah diterapkan di penelitian Apriani dan Sulistiyowati, 2014.

Variabel kode etik

Variabel kode etik diadopsi dari kode etik Ikatan Akuntan Indonesia

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner dibagikan kepada kurang lebih 100 lulusan S1 Akuntansi dan PPAk Universitas Sanata Dharma melalui e-mail, BBM dan WhatsApp. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Kuesioner yang kembali sebesar 62 atau memiliki tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 62%.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan skala likert untuk mengukur kode etik maupun persepsi perilaku etis. Skala likert terdiri dari 5 skala yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Tiap pernyataan akan dianalisis tentang distribusi jawaban responden dengan menghitung frekuensi jawaban responden.

Pengujian Validitas, Reliabilitas, dan Penarikan Simpulan

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Gozali, 2001). Uji korelasi pearson digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini. Untuk

menentukan apakah suatu butir pernyataan dapat dikatakan valid maka kita melihat signifikansi korelasi masing-masing butir pernyataan dengan total keseluruhan pernyataan.

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Gozali, 2001). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach's alpha. Butir-butir pertanyaan dapat dikatakan *reliable* dalam mengukur variabel jika memiliki nilai Cronbach's alpha $> 0,7$ meskipun dapat diturunkan menjadi $> 0,6$ dalam penelitian *exploratory* (Hair, et.al, 2006).

Teknik statistik yang digunakan untuk menjawab hipotesis menggunakan uji beda rata-rata sampel yang tidak berpasangan, dalam penelitian ini menggunakan independent sample t test. Ho ditolak apabila terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata sampel yang ada.

IV. Hasil

Pengujian validitas

Sejauh mana alat ukur dapat mengukur sesuatu yang diukur dilakukan dengan melakukan uji validitas. Variabel yang diukur validitasnya dalam penelitian ini adalah (1) kode etik dan (2) persepsi perilaku etis. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan korelasi pearson. Hasil pengujian korelasi pearson menunjukkan bahwa semua pertanyaan untuk semua kelompok pertanyaan kode etik valid karena signifikan pada alpha 5%. Sedangkan untuk pertanyaan mengenai persepsi etis ada 4 pernyataan yang tidak valid, oleh karena itu kemudian dikeluarkan untuk analisis selanjutnya.

Pengujian reliabilitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan atau jika diulangi pengukurannya akan menghasilkan data yang tidak berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung Cronbach's alpha. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini reliabel karena memiliki nilai Cronbach's alpha $> 0,6$ yaitu 0,872 untuk kode etik dan 0,682 untuk persepsi perilaku etis.

Analisis Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis 1 dan 2 adalah menggunakan *independent sample t test*.

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 yang mengatakan bahwa Ha1: Terdapat perbedaan persepsi tentang perilaku etis untuk seseorang yang sudah bekerja antara sarjana S1 Akuntansi dengan akuntan (lulusan PPAk) tidak didukung. Hasil uji statistik menggunakan *independent sample t test* menunjukkan tingkat signifikansi 0,133 dengan mean masing-masing sebesar 3,8480 untuk lulusan S1 Akuntansi dan 3,8715 untuk lulusan PPAk.

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 1 yang mengatakan bahwa Ha2: Terdapat perbedaan persepsi penerapan kode etik profesi antara akuntan dan lulusan akuntansi yang sudah bekerja.

Hasil uji statistik menggunakan *independent sample t test* menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,262 dengan mean masing-masing sebesar 4,49 untuk lulusan S1 Akuntansi dan 4,39 untuk lulusan PPAk. Dari hasil pengujian Hipotesis 1 dan 2 di atas ternyata tidak ada perbedaan persepsi tentang perilaku etis dan penerapan kode etik antara lulusan S1

akuntansi dan akuntan. Liu, Yao dan Hu, 2012 mengatakan bahwa pendidikan etika diperlukan untuk memformulasi judgment etis.

V. Pembahasan

Mengapa perbedaan jenjang pendidikan ternyata tidak mempengaruhi persepsi perilaku etis lulusan? Pemahaman mereka tentang persepsi etis keduanya tinggi. Lalu pertanyaannya mengapa tidak ada perbedaan antara lulusan S1 Akuntansi dan lulusan PPAk. Ada beberapa kemungkinan: pertama pertanyaan yang diajukan ke responden dianggap merupakan suatu pernyataan yang menggiring mereka untuk menjawab sesuatu hal yang ideal. Terutama ini terkait dengan pertanyaan mengenai pemahaman persepsi etis. Untuk pertanyaan mengenai kode etik, peneliti sudah berusaha mengarahkan agar pernyataan yang diajukan akan dijawab dengan pengalaman mereka bukan sesuatu yang idealis.

Kemungkinan yang lain adalah karena pernyataan aslinya berasal dari sumber yang berbahasa Inggris maka terjemahan yang dibuat oleh peneliti kurang bisa dipahami dengan baik oleh responden. Kemungkinan yang ketiga adalah materi etika bisnis yang diberikan di program PPAk bukan sesuatu hal yang baru atau memberi nilai tambah yang lebih bagi peserta pendidikan profesi.

IV. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata tidak ada perbedaan persepsi perilaku etis dan penerapan kode etik antara lulusan S1 Akuntansi dan lulusan PPAk. Persepsi lulusan tentang perilaku etis dan penerapan kode etik sebenarnya nilainya tinggi, hanya saja tidak ada perbedaan diantara keduanya. Pemahaman tentang perilaku etis bisa diperoleh dengan cara pengajaran di sekolah-sekolah. Apabila dalam penelitian ini ditemukan tidak ada perbedaan hal ini disebabkan mungkin karena kuesioner yang diberikan kepada responden tidak bisa mengarahkan responden untuk menjawab sesuatu yang sesuai kenyataan. Kemungkinan yang lain adalah materi yang diberikan di PPAk bukan hal yang asing bagi mahasiswa akuntansi jadi menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai persepsi perilaku etis diantara mereka.

Implikasi dan Keterbatasan

Pada penelitian ini yang menarik adalah bahwa perilaku etis bisa diperoleh dari bangku perkuliahan. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi etis antara lulusan S1 dan lulusan PPAk. Oleh karena dari penelitian-penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa pendidikan mempunyai peran yang besar dalam pembentukan karakter maka untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan cara membandingkan mahasiswa akuntansi yang diberi mata kuliah etika bisnis dengan mahasiswa non akuntansi yang tidak pernah mendapat materi etika bisnis dari bangku perkuliahan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pernyataan yang dimuat di kuesioner diadopsi dari artikel luar negeri dan kemungkinan alih bahasanya kurang mengenai bagi responden. Keterbatasan lainnya adalah jumlah sampel dari mahasiswa PPAk terlalu sedikit. Metode survei dalam pengumpulan data juga dirasakan mempunyai kelemahan. Untuk penelitian berikutnya dapat dicoba dengan menggunakan eksperimen.

Daftar Pustaka

- Apriani, Lisia, 2009. "Fokus pada Kualitas: Salah Satu Langkah untuk Mendukung Tujuan Audit Manajemen di Prodi-Prodi Perguruan Tinggi". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 1 (2): 163-172.
- Apriani, Lisia dan Firma Sulistiyowati, "The Influence of Teaching and Learning Quality on Prospective Accountant's Perception of Ethics: A Way of Achieving The Goal of Management Auditing in Accounting Profession Program in Daerah Istimewa Yogyakarta", proceeding 2nd ICBE
- Blackmur, Douglas, 2004. "Issues in higher education quality assurance", *Australian Journal of Public Administration* 63 (2): 105-116
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. et, al. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5th ed. Prentice Hall.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Kode Etik.
- Liu, Chunhui, Lee J. Yao, dan Nan Hu. 2012. "Improving Ethics Education in Accounting: Lesson from Medicine and Law 27. *Issues in Accounting Education* (3): 671-690.
- McManus, Lisa dan Nava Subramaniam. 2009."Ethical Evaluation and Behavioral Intentions of Early Career Accountants: The Impact of Mentors, Peers and Individual Attributes." *Accounting and Finance*". 49: 619-643.
- Menon, Maria E. 2005. "Students' views regarding their Participation in University Governance: Implications for Distributed Leadership in Higher Education". *Tertiary Education and Management*; 11: 167-182
- Ping. Charles J. 1993. Accountability in Higher Education. *Ohio CPA Journal*: 52 (2): 11-17.
- Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran.
- Radtke, Robin R. 2004. "Exposing Accounting Students to Multiple Factors Affecting Ethical Decision Making". *Issues in Accounting Education* 19 (1):73-84
- Smith, Gareth, Alison Smith, dan Alison Clark. 2007. "Evaluating service quality in universities: A Service Department Perspective", *Quality Assurance in Education* 5 (3): 334-351.
- Thorne, L, 2001. Refocusing ethics education in accounting: An examination of accounting students's tendency to use their cognitive moral capability. *Journal of Accounting Education* 19: 103-117.

Lampiran:

Contoh-contoh pernyataan untuk penerapan kode etik adalah:

1. Saya berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik.
2. Saya selalu melaksanakan jasa profesional dengan hati-hati, kompeten dan tekun.
3. Saya selalu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional.

Contoh-contoh pernyataan untuk persepsi perilaku etis adalah:

1. Risiko terhadap orang lain seharusnya tidak ditolerir, dihiraukan meskipun risiko tersebut sekecil apapun.
2. Seseorang seharusnya tidak merugikan orang lain baik secara psikologis maupun secara fisik.

Jika suatu tindakan dapat merugikan orang lain yang tidak berdosa, seharusnya tidak dilakukan.

PERBEDAAN TINGKAT KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI KEPUTUSAN AUDITOR NON PROFESIONAL DAN PROFESIONAL: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN SEMU

Negina Kencono Putri
Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kompetensi dan independensi antara auditor non profesional dengan auditor profesional.

Metodologi: Penelitian menggunakan metoda eksperimen lapangan semu 2 x 2 mixed design dengan alat analisis *t-test*, yang melibatkan 18 orang mahasiswa tingkat magister dan 18 orang auditor yang bekerja di wilayah KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kompetensi yang signifikan antara auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan tingkat kompetensi, tidak terdapat perbedaan dalam hal independensi auditor yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.

Keterbatasan: penelitian hanya melibatkan auditor profesional yang jumlahnya terbatas dan lingkup wilayah auditnya tidak terlalu luas. Penelitian selanjutnya disarankan mampu memperluas batasan jumlah auditor yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.

Kata kunci: kompetensi; independensi; non profesional dan profesional auditor; eksperimen semu

1. Pendahuluan

Independensi merupakan salah satu hal penting dalam auditing. Akuntan profesional yang melakukan audit dituntut untuk memiliki kecukupan integritas serta kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Seorang auditor profesional dapat memberikan jasa penjaminan (*assurance services*) maupun jasa atestasi. Jasa penjaminan atas kualitas laporan keuangan dianggap mampu meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan bisnis baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Posisi auditor dalam akuntansi adalah sebagai pihak yang harus mampu menjembatani kepentingan pihak internal dalam hal ini manajemen serta pihak eksternal seperti *shareholder* maupun pemerintah. Manajemen memiliki kepentingan berupa penyediaan laporan keuangan yang relevan dengan proses pengambilan keputusan bisnis serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan/organisasi. Sementara, pihak eksternal dalam hal ini *shareholder* dan pemerintah memiliki kepentingan dalam hal penyediaan laporan keuangan yang andal yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan investasi, pengenaan pajak, maupun keputusan yang bernilai ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, tindakan menjaga tingkat kompetensi serta independensi seorang auditor menjadi hal yang penting. Independensi merupakan landasan dari profesi audit dan unsur penting kepercayaan pengguna dalam laporan keuangan. Dan oleh karena auditor independen menempati posisi kepercayaan antara manajemen entitas pelaporan dan pengguna laporan keuangan, mereka harus dianggap beraktifitas secara independen atas dasar standar audit dan prinsip-prinsip etika yang kuat (Chadegani, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kompetensi dan independensi antara auditor non profesional dengan auditor profesional. Penelitian menggunakan metoda eksperimen lapangan semu 2 x 2 mixed design dengan alat

analisis *t-test*, yang melibatkan 18 orang mahasiswa tingkat magister dan 18 orang auditor yang bekerja di wilayah KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kompetensi yang signifikan antara auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan tingkat kompetensi, tidak terdapat perbedaan dalam hal independensi auditor yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Chusing (1990) dan Lampe dan Finn (1992) yang menunjukkan bahwa perkembangan kognitif seseorang akan mempengaruhi keputusan etis yang diambil.

2. Literature Review dan Hipotesis

Penelitian sebelumnya yang bertema kompetensi auditor sebagian besar terkonsentrasi baik pada model penilaian auditor independen atau pada situasi dimana auditor tidak mencukupi kompetensinya. Studi yang dilakukan oleh Schatzberg (1990) berusaha untuk mempelajari konsep kemandirian dalam proses audit, tetapi tidak melakukan pengamatan kepada subjek secara langsung terutama yang terkait dengan kompetensi auditor.

Penelitian yang menguji masalah kompetensi auditor diantaranya dilakukan oleh Palmrose (1997) dan Johari et al. (2013). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor tetap terjaga seiring dengan adanya sikap konservatisme serta kebutuhan untuk tetap menjaga kredibilitas. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1. Terdapat perbedaan tingkat kompetensi antara auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam eksperimen.

Windsor dan Ashkanasy (1995) menyatakan bahwa tingkat moralitas seorang auditor akan menjelaskan masalah yang terkait dengan perilaku dan independensi auditor. Penelitian tersebut juga diperkaya dengan analisis yang melibatkan lingkungan ekonomi seperti kesehatan financial klien dan kemungkinan dilakukannya tender dalam pemilihan auditor eksternal. Auditor juga percaya bahwa layanan non-audit dan masalah lain yang mengancam independensi auditor berdampak buruk terhadap persepsi publik atas independensi auditor serta keberlangsungan kantor akuntan publik tempat di mana mereka bekerja.

Independensi auditor akan membantu pengguna untuk meyakinkan kualitas audit dan berkontribusi terhadap keandalan proses penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan efisiensi pasar modal. Lindberg dan Beck (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi CPA atas hubungan antara layanan non audit dengan independensi auditor adalah negative setelah peristiwa Enron pada tahun 2001. CPA memegang pandangan yang lebih konservatif mengenai apakah suatu transaksi atau peristiwa material akan berdampak buruk independensi auditor setelah kebangkrutan Enron, dibandingkan dengan sebelum Enron menyatakan kebangkrutan. Selanjutnya, temuan menunjukkan bahwa auditor percaya layanan non-audit dan isu-isu lain yang mengancam independensi auditor berdampak buruk terhadap persepsi publik atas independensi pada yang lebih besar dibandingkan dengan independensi yang sesungguhnya.

Falk et al. (1999) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tinjauan eksternal dan denda potensial dapat mengurangi pelanggaran independensi auditor. Hal tersebut berasal dari meningkatnya kesadaran auditor independen atas dimensi etis dari keputusan mereka. Hasil penelitian tersebut memvalidasi Windsor dan Ashkanasy (1995) terkait dengan pengembangan moral terhadap independensi auditor. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2. Tidak terdapat perbedaan tingkat independensi antara auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam eksperimen.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metoda eksperimen lapangan semu 2 x 2 mixed design dengan *completely randomized*. Dua variabel yang dimanipulasi adalah level independensi dan kompetensi yang dihadapi auditor. Tabel 1 menunjukkan desain eksperimen penelitian ini berupa kriteria dan *treatment* yang akan diberikan.

Tabel 1. Desain Experimen

Treatment	Non Profesional Auditor	Profesional Auditor
Tingkat kompetensi	1	2
Tingkat independensi	3	4

Data diuji dengan alat analisis t-test, yang melibatkan 18 orang mahasiswa tingkat magister dan 18 orang auditor yang bekerja di wilayah KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Partisipan mahasiswa dapat digunakan sebagai surogasi auditor non profesional karena mereka dianggap memiliki kemampuan analisis dan memiliki kemampuan untuk melakukan tugas auditor profesional karena telah mendapatkan materi auditing dari perkuliahan yang telah mereka tempuh (Bean dan D'Aquila, 2003). Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai surogasi untuk profesi akuntan publik sudah mencukupi apabila mereka telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang auditing pada tataran teori.

Dalam penelitian eksperimen ini, terdapat beberapa konsep penting dalam hal validitas internal yang perlu untuk diperhatikan. Terdapat beberapa ancaman yang akan dihadapi oleh partisipan saat mereka mengikuti eksperimen ini. Yang pertama adalah masalah histori. Histori adalah peristiwa tertentu yang dialami oleh subjek selama eksperimen berlangsung. Peristiwa tersebut tidak direncanakan oleh peneliti atau bukan manipulasi eksperimen yang dapat berpengaruh pada reaksi subjek. Kedua adalah maturasi atau kematangan berupa perubahan alamiah yang dialami subjek akibat berlalunya waktu. Masalah maturasi ini diatasi dengan penyusunan materi eksperimen yang singkat namun mampu untuk menjawab pembuktian dalam hipotesis. Ancaman internal validitas berikutnya adalah testing, merupakan gangguan pada eksperimen yang diakibatkan oleh perubahan kemampuan atau pengalaman subjek dalam memahami protokol eksperimen. Selanjutnya, masalah yang dihadapi adalah instrumentasi, yaitu tidak ekuivalennya perubahan kalibrasi instrumen pengukuran. Dan masalah yang terakhir adalah mortality, yaitu bias perbedaan yang timbul karena tingkat perbedan maturasi atau perubahan otonom.

Pengujian dengan menggunakan alat uji *t-test* dilakukan dengan cara membandingkan jawaban berupa keputusan partisipan auditor non profesional dengan auditor profesional untuk masing-masing instrumen. Pengujian pada bagian ini dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan pada kedua hipotesis dalam penelitian ini. Apabila diperoleh *p-value* positif yang memiliki nilai dibawah 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% pada pengujian perbedaan antar instrumen pada masing-masing format instrumen, maka berarti terdapat perbedaan keputusan yang dibuat akibat dari adanya perbedaan kompetensi dan independensi auditor.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 18 orang mahasiswa tingkat magister dan 18 orang auditor yang bekerja di wilayah KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Partisipan diminta untuk mengisi lembar data demografi. Selanjutnya, partisipan diminta untuk mengerjakan materi eksperimen sesuai dengan petunjuk yang diberikan, dan eksperimen diakhiri dengan prosedur manipulation check. Dalam eksperimen ini, seluruh partisipan lolos dari prosedur manipulation check sehingga data dalam penelitian ini dapat seluruhnya diolah untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan *t-test*. Apabila diperoleh *p-value* positif yang memiliki nilai dibawah 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% pada pengujian perbedaan antar instrumen pada masing-masing format instrumen, maka berarti terdapat perbedaan keputusan yang dibuat akibat dari adanya perbedaan kompetensi dan independensi auditor.

Hasil pengujian statistik *t-test* menunjukkan untuk hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kompetensi antara auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam eksperimen, nampak nilai pengujian atau signifikansi sebesar 0,037. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kompetensi auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam eksperimen. Partisipan auditor non profesional memiliki kompetensi yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan auditor profesional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**.

Hal tersebut diduga karena auditor non profesional belum memiliki pengalaman sebanyak auditor profesional. Kompetensi yang mereka miliki masih sebatas kompetensi teoritis dan belum mencapai tahapan praktis seperti yang dimiliki oleh auditor profesional. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nelli (2014) dan Lee dan Stone (1995) yang menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor adalah dua hal yang saling *mutually exclusive* namun perlu menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan prosedur audit.

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik t test untuk Hipotesis 1 dan 2

Treatment	T test	sig.
Tingkat kompetensi auditor non profesional dan profesional	.085	.037
Tingkat independensi auditor non profesional dan profesional	.237	.522

Hasil pengujian statistik t test menunjukkan untuk hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat independensi antara auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam eksperimen, nampak nilai pengujian atau signifikansi sebesar 0,522 untuk independensi partisipan auditor non profesional dan auditor profesional. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara independensi keputusan yang dibuat oleh partisipan baik partisipan auditor non profesional maupun auditor profesional, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**. Artinya, partisipan baik auditor non profesional maupun auditor profesional tidak terpengaruh independensinya dengan adanya tekanan pekerjaan penyusunan laporan audit. Dalam kondisi apapun, partisipan tetap berusaha mempertahankan independensinya sebagai seorang auditor. Nilai tersebut membuktikan bahwa sebagian besar partisipan memilih untuk tetap mempertahankan independensinya berupa pemberian opini audit yang sesuai dengan hasil audit yang sesungguhnya meskipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran independensi.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor baik yang termasuk dalam kategori profesional maupun non profesional tidak akan terpengaruh oleh adanya tekanan. Partisipan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa independensi tetap menjadi prioritas dalam melaksanakan prosedur sesuai dengan profesinya sebagai seorang auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Falk et al. (1999) dan Palmrose (1997) sehingga dapat disimpulkan bahwa independensi auditor tidak mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan tekanan pekerjaan yang mereka alami.

5. Kesimpulan

Independensi merupakan salah satu hal penting dalam proses auditing selain kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kompetensi dan independensi antara auditor non profesional dengan auditor profesional. Penelitian menggunakan metoda eksperimen lapangan semu, yang melibatkan 18 orang mahasiswa tingkat magister dan 18 orang auditor yang bekerja di wilayah KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kompetensi yang signifikan antara auditor non profesional dengan auditor profesional yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan tingkat kompetensi, tidak terdapat perbedaan dalam hal independensi auditor yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Chusing (1990) dan Lampe dan Finn (1992) yang menunjukkan bahwa perkembangan kognitif seseorang akan mempengaruhi keputusan etis yang diambil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nelli (2014) dan Lee dan Stone (1995) yang menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor adalah dua hal yang saling *mutually exclusive* namun perlu menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan prosedur audit.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian hanya melibatkan auditor profesional yang jumlahnya terbatas dan lingkup wilayah auditnya tidak terlalu luas. Penelitian selanjutnya disarankan mampu memperluas batasan jumlah auditor yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.

6. Bibliography

- Bean, D. F. and D'Aquila, J. M. 2003. Accounting students as surrogates for accounting professionals when studying ethical dilemmas: a cautionary note. *Teaching Business Ethics*. Vol. 7. No. 3. P. 187-204.
- Chadegani, Arezoo Aghaei, Zakiah Muhammadiyah Mohamed, Azam Jari. 2011. The Determinant Factors of Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange. *International Research Journal of Finance and Economics*. Issue 80. P. 158-168.
- Cushing, B.E. 1990. Discussion of auditor independence judgements: a cognitive-developmental model and experimental evidence. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 7 No.1, P. 252-260.
- Falk, Haim, Bernadette Lynn, Stuart Mestelman, and Mohamed Shehata. 1999. Auditor independence, self-interested behavior and ethics: some experimental evidence. *Journal of Accounting and Public Policy*. No. 18. P. 395-428.
- Johari, Razana Juhaida, Zuraidah Mohd Sanusi, Rashidah Abdul Rahman, and Normah Omar. 2013. Auditors' Independence, Experience and Ethical Judgments: The Case of Malaysia. *Journal of Business and Policy Research*. Vol. 8, No. 1. Special Issue. P. 100 – 119.

- Lampe, J.C., Finn, D.W. 1992. A model of auditor's ethical decision processes. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 11 (Suppl.). P. 33-59.
- Lee, Tom dan Mary Stone. 1995. Competence And Independence: The Congenial Twins Of Auditing?. *Journal of Business Finance & Accounting*. Vol. 22 Issue 8. P 1169–1177.
- Lindberg, Deborah L. and Frank D. Beck. 2002. CPAs' Perceptions of Auditor Independence: An Analysis of Views Before and After the Collapse of Enron. Working paper.
- Nelli, Novyarni. 2014. Influence Of Internal Auditor Competence And Independence On The Quality Of Financial Reporting By Municipal/Provincial Government. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. II Issue 10. P 1-14.
- Palmrose, Zoe-Vonna. 1997. Audit Litigation Research: Do the Merits Matter? An Assessment and Directions for Future Research. *Journal of Accounting and Public Policy*. No. 16. P. 355-378.
- Schatzberg, J.L. 1990. A laboratory market investigation of "low balling" in audit pricing. *The Accounting Review*. Vol. 65. No. 2. P. 337-362.
- Schatzberg, J.L., Sevcik, G.R. 1994. A multiperiod model and experimental evidence of independence and "lowballing". *Contemporary Accounting Research* Vol. 11 No. 1. P. 137-174.
- Windsor, C.A. and Ashkanasy, N.M. 1995. The effect of client management bargaining power, moral reasoning development, and belief in a just world on auditor independence. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 20 No. 7/8. P. 701-720.

THE DIFFERENCE OF EMOTIONAL FOCUSED COPING BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS WHO LIVE IN BOARDING AND UNIVERSITY STUDENTS WHO LIVE WITH THEIR PARENTS IN GUIDANCE AND COUNSELING MAJOR – SCIENCE AND EDUCATION FACULTY OF AHMAD DAHLAN UNIVERSITY IN YOGYAKARTA

Written By

Dra. Erni Hestiningrum, M.A.

ABSTRACT

Recently, the complexity and high competition through these era, has already sued the young generation to finish their study until University. Therefore, many High School graduates have to continue their study in university outside their original region. As a City of Education, Yogyakarta has many students who continue the study there which far away from their original region have to live in boarding. If the problem happens toward the student, they will not use cognition reaction but emotional reaction. This evidence happens because as a part of adolescence age, the university student will tend to use their unstable emotion and easy to be stimulated. This kind of reaction is used by student for adapting with their problem (Hurlock in Mappiare, 1982). In fact, the through the case of emotional focused coping, the real problem has not been solved.

According to Sarafino (1997), there are some factors which influence people to use of emotional focused coping behavior in facing the problem, for example the condition of the people itself in term of the ability to perceive the simulation associated with the experience. Emotional focused coping is divided by four aspects, such as Escapism (an escape from the problem), Minimization (reduction the burden of the problem), Self-blame (blaming him/herself).

The subject in this research is the third semester students from guidance and counseling major as much as 309 students. The collection method of this study is using scale method and identification sheet which contains factual data about the subject. The t-test results in each factors of emotion-focused coping are as follows: There is not any significant difference for escapism factor (an escape from the problem) between students who live in boarding and students who live in parents' house, emotional focused coping for minimization (reduction the burden of the problem) of students who live in boarding is higher than students who live with their parents, emotional focused coping for self-blame (blaming him/herself) of students who live in boarding is higher than students who live with their parents. Emotion-focused coping of Guidance and Counseling Major – Science and Education Faculty Ahmad Dahlan University students who live in boarding is higher than students who live with their parents.

PERBEDAAN EMOTIONAL FOCUSED COPING ANTARA MAHASISWA KOST
DENGAN MAHASISWA
YANG TINGGAL DENGAN ORANG TUA PADA MAHASISWA JURUSAN BK –
FKIP
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

Oleh
Dra. Erni Hestiningrum, M.A.

ABSTRAK

Tuntutan jaman yang kompleks dan tinggi menuntut para generasi muda untuk menyelesaikan pendidikannya sampai ke Perguruan Tinggi. Oleh karena itu banyak para lulusan SMA yang mau tidak mau harus meneruskan ke Perguruan Tinggi di luar daerah asal tempat tinggal. Yogyakarta sebagai kota pendidikan banyak mahasiswa yang berasal dari luar daerah terpaksa harus tinggal di tempat kost. Mahasiswa sebagai bagian masa remaja kondisi emosinya masih labil dan mudah terstimulasi, sehingga apabila sedang mengalami permasalahan akan cenderung menggunakan reaksi emosi dan bukan dengan reaksi kognisi. Reaksi emosi ini digunakan sebagai cara untuk beradaptasi dengan masalah (Hurlock dalam Mappiare, 1982). Pada *emotional focused coping* permasalahan yang sebenarnya belum terselesaikan sehingga penggunaan *emotional focused coping* secara terus menerus dalam menangani permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah *emotional focused coping* mahasiswa kost lebih tinggi daripada *emotional focused coping* mahasiswa yang tinggal dengan orang tua pada mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan

Menurut Sarafino (1997) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan perilaku *emotional focused coping* oleh individu dalam menghadapi masalah, antara lain kondisi individu bersangkutan dalam bentuk kemampuan mempersepsi stimulasi yang terkait dengan pengalaman. *emotional focused coping* dibagi menjadi empat aspek, yaitu Escapism (pelarian dari masalah), Minimization (pengurangan beban masalah),) Self blame (penyalahan diri sendiri) .

Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling semester tiga yang berjumlah 309 mahasiswa. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode skala dan lembar identitas yang berisi data faktual tentang subjek. Hasil uji t pada masing-masing faktor dari *emotion-focused coping*, seperti tersebut di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut: Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk faktor *escapism* (pelarian dari masalah) antara mahasiswa kost dengan mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua, *emotional focused coping* untuk faktor *minimization* (pengurangan beban masalah) untuk mahasiswa kost lebih tinggi *emotional focused coping* untuk faktor *minimization* (pengurangan beban masalah) pada mahasiswa yang tinggal dengan orang tuanya, *emotional focused coping* untuk faktor *self blame* (penyalahan diri sendiri) untuk mahasiswa kost lebih tinggi daripada *emotional focused coping* untuk faktor *self blame* (penyalahan diri sendiri) mahasiswa yang tinggal dengan orang tuanya. *Emotion-focused coping* pada mahasiswa kost lebih tinggi dibandingkan dengan *Emotion-focused coping* mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua. pada mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD

LATAR BELAKANG MASALAH.

Mahasiswa berada dalam taraf perkembangan tertentu, satu masa transisi ke kedewasaan. Ia sedang mencari identitas diri sendiri dan sedang mencari satu gaya hidup sendiri. Dengan eksperimen sesuai kemampuannya dan kesanggupannya, dan sebagai

mahasiswa harus menerapkan hal – hal baru yang belum pernah dilakukan. Mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, kebudayaan, agama dan pendidikan tersebut masuk dalam satu wadah pengelolaan. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah dimana Perguruan Tinggi tersebut berada akan merasakan sekali perubahan – perubahan yang harus dilakukan tersebut, sehingga hal itu dapat menimbulkan masalah dan tentu saja juga mempengaruhi cara – cara dalam penyelesaian masalah tersebut.

Banyak perubahan yang dialami mahasiswa baik perubahan biologis maupun psikologis seperti perubahan status di dalam masyarakat, munculnya dorongan seksual, penyesuaian diri dalam cara belajar, jauh dari keluarga, penyesuaian dalam cara bergaul karena perubahan status dari anak sekolah menjadi seorang mahasiswa, dan hal tersebut akan mempengaruhi keadaan emosinya.

Adanya masalah-masalah yang begitu kompleks yang terjadi pada mahasiswa, ada sebagian yang berhasil mengatasi masalahnya, namun ada juga yang mengalami kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sarafino (1997) mendefinisikan coping sebagai suatu proses dimana individu mencoba mengatur tuntutan-tuntutan, baik tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan dengan menggunakan sumber yang dimiliki individu guna mengatasi situasi yang stressfull. Lazarus (dalam Smet, 1994) mengatakan metode coping dibagi menjadi dua model, yaitu (1) coping yang berfokus pada permasalahan disebut *problem-focused coping* dan (2) coping yang berfokus pada emosi disebut *emotional focused coping*. Penggunaan *problem-focused coping* (PFC) apabila penyelesaian sesuai pokok permasalahan. dan penggunaan *emotional focused coping* (EFC) apabila penyelesaian dengan emosi. Menurut Mappiare (1982) bahwa cara pengatasan masalah yang dialami mahasiswa yang dalam masa transisi, sering digunakan adalah dengan cara-cara emosional. Pada masa transisi, mahasiswa cenderung menghadapi masalah dengan cara emosional karena masa tersebut penuh dengan badai dan topan yaitu perasaan yang penuh gejolak dan peka terhadap rangsang negatif, remaja menggunakan cara ini untuk meminimalkan atau menghilangkan tekanan atau stres. Silver dan Wortman (Folkman, 1984) menyatakan individu yang dapat mencari segi-segi positif dari situasi negatif akan memiliki tingkat stress yang lebih rendah dibandingkan individu yang menggunakan *emotional focused coping*. Menurut Folkman & Lazarus (Davison dkk, 2004) *emotional focused coping* merupakan perilaku menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi dimana individu berusaha menghadapi masalah secara tidak langsung dan untuk mengurangi berbagai reaksi emosional negatif terhadap stressor, dengan mengalihkan perhatian dari masalah, melakukan relaksasi, atau mencari rasa nyaman dari orang lain. Sebenarnya pemakaian *emotional focused coping* cenderung membawa individu pada keadaan insecure, mempunyai kekhawatiran berlebihan, merasa bersalah dan murung, karena teknik *emotional focused coping* menghadapi masalah tidak secara langsung dan lebih mengarah pada usaha menyeimbangkan afeksi. Emotional focused coping dapat dilihat jika individu sedang mengalami suatu permasalahan. Mahasiswa yang menggunakan emotional focused coping cenderung melakukan pendekatan secara emotional yang berupa mencari dukungan sosial karena adanya rasa solidaritas dari kelompok sebaya, penolakan terhadap masalah yang ditandai dengan perilaku merokok dan pemakaian narkoba, atau berusaha menarik diri.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *emotional focused coping* yaitu kondisi internal berupa persepsi terhadap stimulus yang terkait dengan kesadaran diri individu, proses belajar dan pengalaman dan kondisi eksternal berupa situasi lingkungan dan dukungan sosial masyarakat yang tercipta bila individu memiliki kemampuan kontrol diri, empati serta kecakapan sosial. Pengalaman yang telah diterima dari lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

KAJIAN TEORI

Sarafino (1997) menyatakan *emotional focused coping* merupakan pengaturan respon emosional dari situasi yang penuh stress. Oleh Silver dan Wortman (Folkman, 1984) *emotional focused coping* sering digunakan individu untuk mencari aspek-aspek positif dari penilaian situasi permasalahan yang dinilai mengancam atau mencari aspek-aspek positif dari kegagalan-kegagalan individu dalam menghadapi masalah. Individu yang dapat mencari segi-segi positif dari situasi negatif akan memiliki tingkat stress yang lebih rendah dibandingkan individu yang tidak menggunakan *emotional focused coping* tersebut. *Emotional focused coping* ini mempunyai efek yang bersifat sementara dalam arti yang sesungguhnya yang belum terselesaikan, tetapi bisa menjadi efektif untuk mengurangi tekanan ketika situasi permasalahan telah dinilai negatif oleh individu.

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi *Emotional Focused Coping* Menurut Sarafino (1997) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan perilaku *emotional focused coping* oleh individu dalam menghadapi masalah, antara lain kondisi individu bersangkutan dalam bentuk kemampuan mempersepsi stimulasi yang terkait dengan pengalaman. Pengaruh lingkungan, berupa dukungan sosial dan situasi lingkungannya berpengaruh terhadap penggunaan *emotional focused coping* oleh remaja.

Berdasarkan Aldwin dan Revenson (1987) strategi dalam *emotional focused coping* dibagi menjadi sebagai berikut □(1) *Escapism* (pelarian dari masalah) Individu menghindari masalah dengan cara membayangkan seandainya ia berada dalam situasi lain yang menyenangkan. Individu menghindari masalah dengan makan, tidur berlebihan, merokok atau minum-minuman. (2) *Minimization* (pengurangan beban masalah) Individu membuat masalah menjadi selingan mungkin dan menganggap masalahnya seolah-olah tidak ada. (3) *Self blame* (penyalahan diri sendiri) Individu cenderung menyalahkan dan menghukum diri sendiri serta menyesali apa yang terjadi.

Metodologi.

Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling semester III yang berjumlah 309 mahasiswa. Metode pengambilan data menggunakan Skala. Skala digunakan dalam penelitian adalah Skala *Emotion-Focused Coping* sebanyak 30 item. Analisis data yang digunakan dengan Uji-t.

Kesimpulan.

1. *Emotion-focused coping* pada mahasiswa kost lebih tinggi dibandingkan dengan *Emotion-focused coping* mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua. pada mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD.
2. Perbedaan pada masing-masing faktor *emotion-focused coping*, sebagai berikut:
 - a) *Emotion-focused coping* untuk faktor *escapism* (pelarian dari masalah) yang ada pada mahasiswa kost tidak lebih tinggi dari mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua pada mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD.
 - b) *Emotion-focused coping* untuk faktor *minimization* (pengurangan beban masalah) mahasiswa kost lebih tinggi daripada mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua pada mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD.
 - c) *Emotion-focused coping* untuk faktor *self blame* (penyalahan diri sendiri) mahasiswa kost lebih tinggi daripada mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua pada mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD.

Pembahasan

1. *Emotional Focused Coping* untuk faktor *escapism* (pelarian dari masalah) mahasiswa kost tidak lebih tinggi dibandingkan *Emotional Focused Coping* untuk faktor *escapism* (pelarian dari masalah) mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua pada mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD. Hasil ini menunjukkan bahwa *escapism* (pelarian dari masalah), yaitu individu menghindari masalah dengan cara membayangkan seandainya ia berada dalam situasi lain yang

- menyenangkan; dengan: makan, tidur berlebihan, merokok atau minum-minuman; baik pada mahasiswa kost maupun mahasiswa yang tinggal dengan orangtua tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.
2. *Emotional Focused Coping* untuk faktor *minimization* (pengurangan beban masalah) mahasiswa kost lebih tinggi daripada *Emotional Focused Coping* untuk faktor *minimization* (pengurangan beban masalah) mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua pada mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD. *Minimization* (pengurangan beban masalah), yaitu individu membuat masalah menjadi seringan mungkin dan menganggap masalahnya seolah-olah tidak ada, pada mahasiswa yang tinggal di kost lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua
 3. *Emotional Focused Coping* untuk faktor *self blame* (penyalahan diri sendiri) mahasiswa kost lebih tinggi daripada *Emotional Focused Coping* daripada mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling FKIP UAD. *Self-blame* (penyalahan diri sendiri), yaitu: individu cenderung menyalahkan dan menghukum diri sendiri serta menyesali apa yang terjadi pada mahasiswa yang tinggal di kost lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di rumah orangtua.

REFERENSI

- Aldwin, C.M & Revenson, T. A. 1987. *Does Coping Help A Reexamination of The Relation Between Coping and Mental Health. Journal of Personality and Social Psychology.* 53: 337 – 348.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Davison dkk. 2006. *Psikologi Abnormal*. Pengalih Bahasa: Noermalasari. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunarsa, S.D. 1990. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: P.T. Bpk. Gunung Mulia.
- Goleman, D. 2005. *Kecerdasan Emosi*. Pengalih Bahasa: Hermaya. Jakarta: Gramedia
- Hadi, S. 2002. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta : Andi
- Mappiare, A. 1982. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sarafino, P.E. 1998. *Health Psychology*. New York: John Willey and Sons.
- Soewondo Soesmalyah, 2001, *Bimbingan dan Konseling Pengertian dan Perannya dalam Pembinaan Mahasiswa*, Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi

Pengendalian Internal dan Hubungannya dengan Aktivitas Audit Internal

Rama Kurnia

SKK Migas

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengendalian internal yang dipaparkan dengan berbagai cara. Terdapat pula definisi pengendalian internal yang dilihat dari berbagai aspek. Sesuai dengan *Implementation Standard No 2100 Nature of Work*, internal auditor harus mengevaluasi dan berkontribusi pada pengembangan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Di dalam kontribusinya Pengendalian Internal, aktivitas audit internal harus membantu mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mempromosikan pengembangan berkelanjutan.

Penulisan artikel ini memiliki tujuan agar para pembaca dapat mengerti dan memahami hubungan pengendalian internal dan aktivitas audit internal. Penulisan artikel ini ringan dan mudah dipahami dengan harapan untuk memberikan informasi jelas pada semua pembaca.

Keyword : Pengendalian internal, Aktivitas audit internal, COSO.

A. Definisi Pengendalian Internal

Mengacu pada *glossary* yang diterbitkan oleh IIA (*The Institute of Internal Auditors*), Pengendalian didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen, Dewan Direksi dan Komisaris, dan pihak lain untuk memitigasi risiko dan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan organisasi. Manajemen merencanakan, mengorganisir dan mengarahkan kinerja untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa tujuan akan tercapai.

COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris dan Direksi, manajemen dan pihak lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan dalam:

1. Efektifitas dan efisiensi dari operasional
2. Keandalan dari pelaporan Keuangan
3. Ketaatan dengan hukum yang berlaku dan peraturan

B. Jenis Pengendalian Internal

1. Berdasarkan Tingkatan

a. *Entity Level Control*

Adalah pengendalian yang diterapkan pada keseluruhan tingkat organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dan untuk memitigasi risiko yang mengancam organisasi secara keseluruhan. Komponen dari *Entity Level Control* adalah:

1) *Governance Control*

Pengendalian tata kelola merupakan Pengendalian yang bersifat budaya. Isinya adalah berupa penjelasan atas ekspektasi organisasi termasuk kebijakan dan prosedur umum didalam organisasi. Contoh dari Pengendalian ini adalah:

- Dibentuknya Komite Audit untuk Pengawasan Pengendalian dan komunikasi dengan audit internal

- Penetapan selera risiko organisasi dan adanya Manajemen Risiko Korporat
- Kebijakan dan Prosedur serta Kode etik perusahaan
- Kebijakan Teknologi Informasi

2) *Management Oversight Control*

Adalah Pengendalian yang diterapkan untuk unit bisnis atau lini manajemen untuk mencapai tujuannya dan mitigasi risiko yang terdapat dalam unit bisnis. Contoh dari Pengendalian ini adalah:

- Dibentuknya Komite Risiko
- Pengendalian akhir periode
- Pengendalian Umum Teknologi Informasi (*IT General Control*)

b. *Process Level Control*

Pengendalian ini dibuat oleh *Process Owner* untuk memastikan bahwa tujuan dari proses dapat tercapai dan risiko di tingkat proses telah ditangani. Contoh dari Pengendalian ini adalah kegiatan supervisi, monitoring, asesmen risiko proses bisnis, evaluasi kinerja, rekonsiliasi dan perhitungan fisik atas persediaan

c. *Transaction Level Control*

Pengendalian ini bersifat spesifik pada satu transaksi. Keberadaannya dimaksudkan untuk memastikan tujuan dari transaksi dapat tercapai dan risiko yang terkait dapat dimitigasi. Contoh dari Pengendalian ini adalah keharusan mendokumentasikan transaksi, pemisahan wewenang, otorisasi berjenjang, Pengendalian Aplikasi Teknologi Informasi (*IT Application Control*)

2. Berdasarkan Tingkat Kepentingan

a. *Key Control*

Adalah pengendalian yang harus beroperasi secara efektif untuk mengurangi risiko signifikan ke tingkat yang dapat diterima. Pengendalian jika dihilangkan akan menyebabkan hambatan dalam mencapai tujuan.

b. *Secondary Control*

Adalah pengendalian yang dapat membantu proses berjalan lancar namun tidak bersifat utama. Pengendalian ini diadakan untuk memitigasi risiko yang tidak signifikan dan penganda pengendalian yang sudah diterapkan pada *key control*.

Tujuan mengidentifikasi kedua jenis pengendalian ini adalah untuk

- memastikan supervisi manajemen
- area untuk pengujian pengendalian dalam prosedur audit sehingga efisien
- dapat melihat risiko kunci yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi

3. Berdasarkan Fungsi

a. *Preventive Control*

Pengendalian ini bersifat proaktif untuk mengurangi terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Contoh dari pengendalian ini adalah adanya indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) untuk berbagai departemen

b. *Detective Control*

Pengendalian ini bersifat reaktif dan mendeteksi adanya sesuatu yang tidak diharapkan. Contoh dari pengendalian ini adalah proses rekonsiliasi atau laporan pengecualian (*exception report*)

c. *Corrective Control*

Pengendalian ini bersifat reaktif dan didesain untuk membuat perbaikan kesalahan secara manual ataupun mandiri atas suatu kesalahan atau ketidakwajaran yang ditemukan oleh *Detective Control*. Contoh dari pengendalian ini adalah jejak audit (*audit trail*) dan prosedur *backup and recovery*

d. *Directive Control*

Pengendalian ini bersifat proaktif yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu keadaan yang diharapkan. Contoh dari pengendalian ini adalah program pelatihan dan paket insentif karyawan

e. *Mitigating Control*

Adalah pengendalian yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya dampak atas kejadian. Contoh dari pengendalian ini adalah mengasuransikan asset perusahaan.

f. *Compensating Control*

Adalah pengendalian yang bertujuan untuk mengimbangi kekurangan dari pengendalian yang sudah ada. Contoh dari pengendalian ini adalah pengawasan melekat yang dapat mengurangi pemisahan wewenang pada organisasi yang relative kecil dengan jumlah pekerja yang terbatas

g. *Redundant Control*

Adalah pengendalian yang bersifat berulang dan menduplikasi atau dengan kata lain pengendalian ini beroperasi ketika *key control* gagal beroperasi. Contoh dari pengendalian ini adalah regulator ganda pada tabung gas elpiji yang premium quality.

4. Berdasarkan Sifat

a. *Active (Manual Control)*

Pengendalian ini bersifat preventif atau mendeteksi kesalahan dari prosedur yang disetujui. Pengendalian ini dapat berjalan dengan adanya intervensi secara sadar. Contoh dari pengendalian ini adalah review yang dilakukan oleh manajer atas transaksi berjalan

b. *Passive (Automated Control)*

Pengendalian ini beroperasi tanpa intervensi manusia. Umumnya pengendalian ini dilakukan oleh sistem komputer atau fungsi keteknikan tertentu. Contoh dari pengendalian ini adalah thermostat yang digunakan untuk menjaga temperatur ruangan.

5. Berdasarkan Wujud

a. *Hard Control*

Adalah pengendalian yang bersifat kuantitatif dan obyektif. Pengendalian ini dimaksudkan agar dapat digunakan dalam audit atau pengujian kepatuhan. Contohnya adalah proses inspeksi, analisa realisasi anggaran

b. Soft Control

Adalah pengendalian yang bersifat kualitatif dan subyektif yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh budaya didalam organisasi. Contohnya adalah kompetensi, standard etika.

C. Manfaat Pengendalian Internal

1. Dapat meminimalisir kemungkinan seseorang didalam organisasi untuk melakukan kecurangan,
2. Mengendalikan *agency theory* sehingga pemilik dapat memastikan manajer telah bertindak sebagai agen dari pemilik, yang bertanggung jawab atas kinerjanya
3. Memberikan keyakinan yang memadai kepada pemilik mengenai pengelolaan perusahaan yang telah dijalankan.

D. Standar Pengendalian Internal COSO

1. Penjabaran Definisi COSO Internal Control Intergrated Framework

Seperti didalam definisi Pengendalian Internal menurut Standar COSO terdapat beberapa poin penting yang harus dipahami yaitu:

- a. Pengendalian merupakan proses berkelanjutan dan dipengaruhi oleh berbagai individu di setiap tingkatan
- b. Dewan Direksi dan Komisaris akan menerima keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak yang bersifat absolut
- c. Pengendalian internal melampaui manual kebijakan yang diarahkan menuju pencapaian tujuan organisasi
- d. Dapat diadaptasikan didalam struktur organisasi dari tingkat tertinggi sampai unit terkecil dan proses bisnis

2. Tujuan Kerangka Kerja COSO Internal Control Intergrated Framework

Standar COSO *Internal Control Intergrated Framework* telah diperbaharui pada Bulan Mei 2013 yang menekankan pencapaian tujuan didalam:

- a. Tujuan Operasional
Efektifitas dan efisiensi dari operasional organisasi termasuk tujuan operasional dan Keuangan serta pengamanan fisik aset
- b. Tujuan Pelaporan
Mengusahakan pelaporan internal dan eksternal Keuangan dan non Keuangan telah andal, tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, pembuat standard, dan kebijakan organisasi
- c. Tujuan Ketaatan
Menjaga ketaatan dengan hukum yang berlaku dan peraturan dimana organisasi berada

3. Komponen Kerangka Kerja COSO Internal Control Intergrated Framework

Kerangka kerja COSO memiliki 17 prinsip yang mewakili konsep dasar yang mendukung 5 (lima) komponen yang ada yaitu:

a. Komponen Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus, mencakup etika, kompetensi, integritas dan

kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, struktur organisasi, kebijakan serta filosofi manajemen.

Prinsip yang terkait dengan komponen ini adalah:

- 1) Organisasi mendemonstrasikan komitmen kepada integritas dan kode etik
- 2) Dewan Direksi dan Komisaris mendemonstrasikan independensi dalam pengembangan dan implementasi Pengendalian Internal
- 3) Management dan Dewan menjabarkan kecukupan otoritas dan tanggung jawab garis koordinasi, struktur dalam mencapai tujuan organisasi
- 4) Organisasi mendemonstrasikan komitmen untuk mengembangkan dan menjaga kompetensi individu agar sesuai dengan tujuan organisasi
- 5) Organisasi memberikan tanggung jawab kepada individu atas Pengendalian internal dalam mencapai tujuannya

b. Komponen Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan semua bagian organisasi harmonis.

Prinsip yang terkait dengan komponen ini adalah:

- 6) Organisasi menjabarkan tujuan yang jelas agar dapat dilakukannya proses identifikasi dan penilaian risiko terkait dengan tujuan organisasi
- 7) Organisasi mengidentifikasi risiko dan menganalisa risiko bagaimana seharusnya di mitigasi
- 8) Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko yang terkait dengan tujuan organisasi
- 9) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada sistem Pengendalian internal

c. Komponen Aktifitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas ini harus dievaluasi risikonya secara keseluruhan organisasi.

Prinsip yang terkait dengan komponen ini adalah:

- 10) Organisasi memilih dan mengembangkan aktifitas Pengendalian yang berkontribusi pada mitigasi risiko dalam pencapaian tujuan pada tingkat yang dapat diterima
- 11) Organisasi memilih dan mengembangkan Pengendalian umum aktifitas pada teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan
- 12) Organisasi mengembangkan aktivitas Pengendalian melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan agar dapat dijalankan

d. Komponen Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Komponen penting dari manajemen di mana tidak akan berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang pengendalian internal operasi memberikan substansi yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan mengelola operasi.

Prinsip yang terkait dengan komponen ini adalah:

- 13) Organisasi mendapatkan dan menggunakan informasi yang berkualitas untuk mendukung berfungsinya Pengendalian Internal

- 14) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk Pengendalian internal yang cukup untuk memfungsikan Pengendalian Internal
- 15) Organisasi mengkomunikasikan pihak lain terkait permasalahan yang berpengaruh pada berfungsinya Pengendalian Internal

e. Komponen Pemantauan (*Monitoring*)

Evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan pengendalian manajemen.

Prinsip yang terkait dengan komponen ini adalah:

- 16) Organisasi memilih, mengembangkan dan menjalankan evaluasi berkelanjutan atau terpisah untuk melihat apakah komponen Pengendalian internal tersedia dan berfungsi
- 17) Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi Pengendalian internal secara berkala kepada pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan tindakan korektif termasuk Dewan Direksi dan Komisaris.

4. Keterkaitan antara Tujuan dan Komponen COSO Internal Control Intergrated Framework

Hubungan langsung terjadi antara Tujuan yang merupakan hal yang ingin dicapai organisasi, Komponen yang merupakan hal yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan serta struktur organisasi yang berlapis dari Entitas Organisasi terbesar sampai Fungsi. Hubungan tersebut dapat dirangkum adalah sebagai berikut:

- Tiga Kategori Tujuan ditempatkan dalam kolom
- Lima Komponen ditempatkan didalam baris
- Struktur Organisasi ditempatkan didalam setiap kolom dan baris

COSO menggambarkan keterkaitan antara Tujuan, Komponen dan Struktur Organisasi dengan bentuk sebagai berikut:



E. Peran Auditor Internal Terkait Pengendalian Internal menurut Standar IPPF

Didalam standar pekerjaannya, Auditor Internal mengacu pada Standar Internal Audit yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang diterbitkan oleh IIA Global. Versi terbaru dari IPPF diterbitkan pada tahun 2013. Didalam melaksanakan pekerjaannya Auditor Internal wajib mengacu pada *Implementation Standard*. Dan sebagai tambahan yang sangat direkomendasikan untuk diikuti, internal auditor dapat

mengikuti *Practice Advisory* yang memberikan narasi detail terkait dengan *Implementation Standard*

Sesuai dengan *Implementation Standard No 2100 Nature of Work*, internal auditor harus mengevaluasi dan berkontribusi pada pengembangan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Didalam kontribusinya Pengendalian Internal, aktivitas audit internal harus membantu mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mempromosikan pengembangan berkelanjutan.

Kegiatan yang harus dilaksanakan pada aktivitas audit internal berupa Assurance dan Consulting:

1. Assurance mengacu pada Standar 2130.A1
Aktifitas Internal Audit harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari pengendalian didalam merespon risiko pada tata kelola organisasi, operasional, dan sistem informasi yang terkait dengan:
 - a. Pencapaian tujuan strategis organisasi
 - b. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional
 - c. Efektivitas dan efisiensi dari operasi dan program
 - d. Pengamanan fisik aset
 - e. Ketaatan dengan hukum, aturan, kebijakan, prosedur dan perjanjian
2. Consulting mengacu pada Standar 2130.C1
Auditor internal harus menggabungkan pengetahuannya atas pengendalian yang didapat dari penugasan dalam mengevaluasi proses pengendalian organisasi.

Daftar Referensi

- The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (2013). *Internal Control – Integrated Framework*. Durham
- The Institute of Internal Auditors (2013). *The IIA's CIA Learning System 4.0 Exam Part 1*. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation
- The Institute of Internal Auditors (2013). *International Professional Practice Framework*. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation
- Sawyer, Lawrence B. (2012) *Sawyer's Guide for Internal Auditors* (6th ed). Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation

Kontrol Diri Sebagai Pemoderasi Pengaruh Pelanggaran Kontrak Psikologis Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif

Oleh: DR. Tiarapuspa, SE, MM
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta
Email: mahkotapuspa17@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses psychological contract violation to explain counterproductive work behavior. The psychological contract violation lead to the emergence counterproductive work behavior. In addition, self-control is also alleged to moderate the influence of psychological contract violation on the counterproductive work behavior. This study was conducted by doing a survey on 48 companies in six cities in Java. It employed 870 supervisors as samples. Using instruments and questionnaires of previous researchers, the present researcher performed validity test of content and construct, as well as internal consistency reliability of the questionnaires before being distributed to respondents. The correlation model of the variables was tested using the Structural Equation Model (SEM). The results of the study support the counterproductive work behavior triggered by psychological contract violation. This study also find that an individual with high self-control and low self-control do not moderate the influence of psychological contract violation on the counterproductive work behavior. Discussions about the correlation model of the variables tested in this study along with theoretical and practical implications are presented completely in this study.

Key words: *psychological contract violation, self control, and counterproductive work behavior.*

Pendahuluan

Setiap karyawan dapat memberikan kontribusi bagi kesuksesan ataupun kegagalan organisasi melalui upaya kontrol diri. Karyawan dapat melakukan kontrol terhadap (1) perilaku yang berhubungan dengan kinerja, seperti bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas; (2) perilaku yang berhubungan dengan rekan kerja, seperti bekerja sama, berkomunikasi, dan bertukar informasi terkait dengan pekerjaan; dan (3) perilaku yang merusak dan membahayakan, seperti melanggar prosedur keselamatan kerja, menggunakan obat terlarang, dan menghancurkan perlengkapan perusahaan (Murphy, 1989). Perilaku yang ketiga disebut perilaku kerja kontraproduktif (*counterproductive work behavior*), yaitu perilaku merugikan dan merusak yang dilakukan karyawan untuk menghalangi organisasi mencapai tujuan (Fox & Spector, 2005).

Alasan peneliti tertarik untuk menganalisis dampak pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif, Pertama studi mengenai kontrak psikologis umumnya dihubungkan dengan munculnya sikap dibandingkan terhadap perilaku, seperti kepuasan kerja (Kickul & Lester, 2001; Radja *et al.*, 2004; Wright, 2005), komitmen (Agee, 2000; Lester *et al.*, 2002; Raja *et al.*, 2004; Suazo *et al.*, 2005), dan sikap negatif karyawan (Kickul, 2001; Kickul & Lester, 2001). Pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap sikap lebih besar dibandingkan terhadap perilaku, hal ini disebabkan oleh: (1) sikap lebih dapat meramalkan pelanggaran kontrak psikologis dibandingkan perilaku (Cantisano *et al.*, 2008); dan (2) kemarahan akibat diingkari akan lebih aman ditunjukkan dalam bentuk sikap dibandingkan dalam bentuk perilaku (Cantisano *et al.*, 2008). Studi yang menghubungkan pelanggaran kontrak psikologis dengan perilaku, khususnya perilaku kontraproduktif adalah

penting, terutama bagi manajemen. Manajemen dapat memahami perilaku kontraproduktif karyawan yang muncul akibat pelanggaran kontrak psikologis. Pemahaman berguna untuk mencegah munculnya faktor-faktor yang memicu perilaku kontraproduktif di masa yang akan datang.

Kedua, peristiwa hubungan ketenagakerjaan memberikan informasi adanya kasus pelanggaran kontrak psikologis di Indonesia. Misalnya, status sebagai karyawan kontrak yang tidak pasti menghalangi kesempatan menjadi karyawan tetap (Edwin, 2007). Penilaian kinerja dipengaruhi unsur senioritas dan kedekatan dengan pimpinan, bukan atas prestasi dalam bekerja (Gunawan & Rizal, 2010). Karyawan akan mempersepsikan organisasi gagal memenuhi tanggung jawabnya karena harapan-harapannya tidak terpenuhi. Hal ini merupakan bentuk fenomena yang memicu pelanggaran kontrak psikologis. Karyawan melampiaskan harapannya yang tidak terpenuhi dengan berperilaku kontraproduktif merugikan organisasi (Shore & Tetrick, 1994). Pemahaman pihak manajemen mengenai pelanggaran kontrak psikologis yang dilakukan oleh agen organisasi terhadap karyawan diharapkan dapat mencegah perilaku kerja kontraproduktif karyawan terhadap organisasi.

Ketiga, belum banyak studi yang meneliti pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku. Beberapa studi sebelumnya yang meneliti pelanggaran kontrak psikologis dan pengaruhnya terhadap perilaku, misalnya Robinson dan Morrison (1995), pelanggaran kontrak psikologis meningkatkan penggantian karyawan dan mengurangi kinerja. Robinson dan Rosseau (1994), pelanggaran mengurangi keinginan berperilaku kewargaan organisasi. Berdasarkan dukungan empiris dan fenomena tersebut, studi ini akan mengkaji pelanggaran kontrak psikologis sebagai pemicu perilaku kinerja kontraproduktif.

Perumusan Masalah

Pokok masalah yang akan dibahas dalam studi ini adalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif? Apakah kontrol diri menjadi pemoderasi pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengonfirmasi terbentuknya perilaku kerja kontraproduktif akibat pelanggaran kontrak psikologis. Studi dicapai melalui pengujian pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif, serta pengujian peran pemoderasi kontrol diri pada pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif.

Pembahasan

Tipe perilaku kerja kontraproduktif

Terdapat berbagai tipe atau bentuk aktivitas perilaku kerja kontraproduktif yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Secara umum, klasifikasi tipe perilaku kerja kontraproduktif yang banyak digunakan adalah Buss (Neuman & Baron, 2005). Perilaku kerja kontraproduktif dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) fisik dan verbal; (2) aktif dan pasif; dan (3) langsung dan tidak langsung.

Perilaku kerja kontraproduktif fisik adalah kegiatan pelaku yang berbentuk fisik. Perilaku tersebut seperti mendorong korban, menyerang korban, dan merusak barang. Perilaku kerja kontraproduktif verbal adalah perbuatan jahat melalui kata-kata. Contoh tindakan tersebut misalnya menyebarkan gosip yang merugikan korban, memberikan kritik yang tidak adil terhadap korban, melakukan teriakan pada korban, atau menyoraki korban. Perilaku kerja kontraproduktif langsung adalah perbuatan jahat pelaku langsung terhadap korbannya. Perilaku kerja kontraproduktif tidak langsung adalah perbuatan merugikan

ditujukan pada seseorang atau sesuatu yang dianggap bernilai atau penting bagi korban. Perilaku kerja kontraproduktif aktif adalah pelaku melakukan tindakan pada korban. Perilaku kerja kontraproduktif secara pasif adalah pelaku menahan sesuatu yang penting atau dianggap bernilai oleh korbannya.

Aktivitas perilaku kerja kontraproduktif yang diklasifikasikan menurut fisik, verbal, aktif, pasif, langsung, dan tidak langsung tersebut, kesemuanya memiliki target atau korban. Korban tersebut umumnya ditujukan pada organisasi atau antar individu. Penentuan target perilaku kerja kontraproduktif hampir sama dengan penentuan pada siapa karyawan akan berkomitmen (*foci*) (Becker *et al.*, 1996). Karyawan dapat berkomitmen pada organisasi, penyelia, kelompok kerja, dan manajemen puncak. Namun, karyawan tidak akan memiliki akses ke semua pihak tersebut dalam organisasi, demikian pula perilaku kerja kontraproduktif. Target perilaku kerja kontraproduktif yang spesifik mengekspresikan upaya balas dendam secara tepat pada pihak yang dituju. Studi ini menggunakan organisasi sebagai target perilaku kerja kontraproduktif. Pilihan ini mengacu pada hasil studi empiris sebelumnya bahwa menggabungkan target akan menghasilkan peluang berbaur yang besar dibanding bila dilakukan terpisah (Hershcovis *et al.*, 2007).

Penyebab perilaku kerja kontraproduktif

Secara umum, penyebab perilaku kerja kontraproduktif dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu situasional dan individual (Martinko *et al.*, 2002). Marcus dan Schuler (2004) membuat tipologi yang menggabungkan keduanya menjadi empat faktor penyebab perilaku kerja kontraproduktif. Pertama, faktor pemicu (*triggers*), yaitu peristiwa eksternal dan persepsi internal terhadap suatu peristiwa yang dapat menimbulkan respon perilaku kerja kontraproduktif (Marcus & Schuler, 2004). Faktor pemicu ini misalnya adanya pemotongan gaji yang berdampak terjadinya pencurian dalam perusahaan (Greenberg, 1990a). Hal ini karena pemotongan gaji merupakan peristiwa eksternal tetapi secara tidak langsung membentuk persepsi internal pada diri karyawan bahwa telah terjadi ketidakadilan di perusahaan. Persepsi ini memicu munculnya tindakan negatif (Greenberg, 1990b). Studi lain yang dikategorikan sebagai wujud langsung pemicu perilaku kerja kontraproduktif adalah ketidakpuasan dalam bekerja (Marcus & Schuler, 2004; Dalal, 2005), perasaan frustrasi (Strom & Spector, 1987); dan persepsi ketidakadilan (Stroms & Spector, 1987; Ball, Trevino, & Sims, 1994; Haaland, 2002; Kwak, 2006; Villanueva, 2006).

Kedua, peluang (*opportunity*) yang oleh Marcus dan Schuler (2004), diartikan sebagai situasi atau persepsi yang mendorong terjadinya perilaku kerja kontraproduktif (Marcus & Schuler, 2004). Peluang dapat tercipta karena tidak ada larangan dalam bertindak, serta tidak ada konsekuensi negatif yang bernilai bagi pelaku. Contoh, pemberian hukuman dan norma kelompok dapat mencegah munculnya perilaku kerja kontraproduktif (Bennet & Robinson, 2000; Haaland, 2002; Marcus & Schuler, 2004). Adapun sistem kontrol organisasi, seperti kebijakan, peraturan, dan sistem keamanan akan meniadakan peluang perilaku kerja kontraproduktif oleh karyawan (Sackett & DeVore, 2001). Situasi konflik dalam organisasi juga akan memicu peluang terjadinya perilaku kerja kontraproduktif (Fox, Spector, & Miles, 2001).

Ketiga, kontrol di dalam diri (*internal control*), yaitu semua bentuk kepribadian dan sikap individu yang bersifat stabil akan berfungsi sebagai penghalang munculnya perilaku kerja kontraproduktif (Marcus & Schuler, 2004). Contoh kepribadian berupa kontrol diri (*self control*), konsep diri positif (*positive self concept*), kehati-hatian (*conscientiousness*), dan kestabilan emosi (*emotional stability*) dapat mencegah munculnya perilaku kerja kontraproduktif (Bennet & Robinson, 2000; Marcus & Schuler, 2004; Villanueva, 2006). Sebaliknya, sifat marah (*trait anger*) dan sifat negatif (*negative affectivity*) dapat memunculkan perilaku kerja kontraproduktif (Ball, Trevino, & Sims, 1994; Miles *et al.*, 2002; Dalal 2005; Kwak, 2006).

Keempat, perasaan sensasi karena mendapatkan pengalaman baru karena melakukan aktivitas beresiko (Marcus & Schuler, 2004). Tipe kepribadian yang mewakili perasaan tersebut misalnya agresivitas (Marcus & Schuler, 2004).

Definisi kontrak psikologis

Istilah ini diperkenalkan oleh Argyris (Wright, 2005) dan dikembangkan untuk menguraikan hubungan antara karyawan dan penyeliannya. Menurut Argyris (Wright, 2005), karyawan akan mempertahankan produktivitas dan tidak banyak mengeluh sepanjang penyelia menghargai *informal culture* (budaya tidak formal), menjamin keamanan bekerja, dan memberi gaji yang cukup.

Kontrak psikologis adalah keyakinan mengenai adanya hubungan timbal balik antara individu dan organisasi. Meskipun setiap pihak kurang menyadarinya, kontrak itu dapat memberi pengaruh pada hubungan mereka (Cullinane & Dundon, 2006). Definisi lain kontrak psikologis menurut Rousseau (1995) adalah keyakinan individu yang dibentuk oleh organisasi berkaitan dengan kesepakatan pertukaran antara dirinya dengan organisasi.

Kontrak psikologis tersebut penting bagi sebuah organisasi. Pertama, kontrak psikologis memiliki komponen seperti kesetiaan, loyalitas, dan kepercayaan dalam hubungan ketenagakerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak kerja formal (Shore & Tetrick, 1994; Agee, 2000). Kedua, kontrak psikologis mampu meramalkan jenis keluaran yang akan diperoleh sebuah organisasi. Sementara itu, kontrak tersebut membuat karyawan dapat mengetahui jenis penghargaan yang akan diperoleh dengan menginvestasikan waktu dan usahanya pada organisasi (Sparrow & Hiltrop, 1997). Ketiga, kontrak psikologis memberikan keuntungan organisasi karena mampu mengarahkan perilaku karyawan tanpa memerlukan pihak lain untuk mengawasi (Shore & Tetrick, 1994; Agee, 2000). Keempat, kontrak psikologis itu juga membantu organisasi mengatasi perilaku yang tidak diinginkan, misalnya keluar masuknya karyawan dalam organisasi. Perilaku ini dapat dicegah dengan pemberian informasi mengenai imbalan yang akan diperoleh dari organisasi. Idealnya, kontrak psikologis itu dikembangkan sejak awal proses perekrutan untuk mencegah terjadinya perilaku tidak diinginkan di kemudian hari (Kotter, 1973).

Pelanggaran kontrak psikologis

Pelanggaran kontrak psikologis atau *psychological contract violation*, menurut Morrison dan Robinson (1997) adalah rasa marah, sedih, frustrasi, dan kekecewaan karyawan karena kegagalan organisasinya mempertahankan komitmen. Awalnya, istilah pelanggaran kontrak psikologis sering dipertukarkan dengan pengingkaran kontrak psikologis. Namun, perbedaan keduanya dipertegas oleh Morrison dan Robinson (1997). Pelanggaran kontrak psikologis adalah reaksi afektif dari suatu pengingkaran. Sementara itu, pengingkaran kontrak psikologis adalah bentuk penilaian kognitif yang berasal dari persepsi karyawan mengenai kesenjangan antara yang dijanjikan dan yang sebenarnya diterima. Reaksi afektif pelanggaran kontrak psikologis melebihi reaksi kognitif, karena dapat melibatkan emosi, perasaan kecewa, dan frustrasi. Hal itu sampai pada tingkat perasaan yang paling dalam seperti kemarahan, pengkhianatan, dan kebencian (Morrison & Robinson, 1997).

Penyebab pelanggaran kontrak psikologis

Model terbentuknya pelanggaran kontrak psikologis diterangkan oleh Morrison dan Robinson (1997). Perubahan pengingkaran kontrak psikologis menjadi pelanggaran kontrak psikologis tergantung pada cara karyawan memberikan arti pada pengingkaran kontrak psikologis yang dialaminya. Pelanggaran kontrak psikologis muncul karena interpretasi atau atribusi karyawan terhadap peristiwa yang terjadi (Morrison & Robinson, 1997).

Elaboration likelihood model for workplace aggression menjelaskan munculnya emosi atau pelanggaran kontrak psikologis berawal dari faktor pemicu, yaitu pengingkaran kontrak psikologis yang dimediasi oleh atribusi pelaku. Pengingkaran kontrak psikologis yang diatribusikan sebagai tindakan sengaja pelaku memicu pelanggaran kontrak psikologis (Douglas *et al.*, 2008).

Teori Frustrasi dan Agresi

Pelanggaran kontrak psikologis atau PKP-v berpengaruh terhadap terbentuknya sikap dan perilaku (Lazarus, 1991 dalam Barclay *et al.*, 2005). Peristiwa tersebut dijelaskan oleh teori frustrasi dan agresi (Dollard , Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939 dalam Fox & Spector, 1999) .

Teori frustrasi-agresi menjelaskan alasan seseorang melakukan perilaku menyimpang. Teori ini terdiri dari dua hal yaitu pertama, frustrasi adalah kondisi yang mengganggu tercapainya suatu tujuan. Kedua, agresi yaitu bentuk respon akibat gagalnya tujuan yang ingin dicapai. Inti dari teori adalah tindakan agresi merupakan akibat frustrasi yang dialami seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan.

Hipotesis

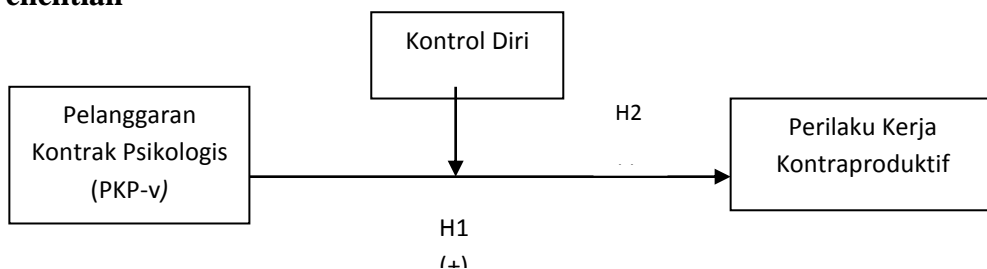
Pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif.

H1: Pelanggaran kontrak psikologis berpengaruh positif terhadap perilaku kerja kontraproduktif.

Peran pemoderasi kontrol diri pada pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif

H2: Kontrol diri memoderasi pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Semakin rendah kontrol diri, pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif semakin kuat, sebaliknya semakin tinggi kontrol diri, pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif semakin lemah.

Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Adapun pengumpulan data survei dilakukan dengan melalui kuesioner. Responden mengisi kuesioner mengenai anteseden (pelanggaran kontrak psikologis dan kontrol diri) dan kuesioner tentang konsekuen yaitu perilaku kerja kontraproduktif. Responden juga mengisi kuesioner kepatutan sosial (*social desirability bias*) atau *marlowe-crowne social desirability bias* atau MC-SDB (Crowne & Marlowe, 1960). Skala kepatutan sosial digunakan untuk mengetahui keakuratan jawaban, akibat bias karena mengukur hal sensitif, yaitu perilaku kerja kontraproduktif.

Total jumlah kuesioner yang disebarakan adalah 870. Peningkatkan tingkat kembalian kuesioner melalui pemberian *souvenir* untuk setiap kuesioner yang kembali dan terisi lengkap. Anonimitas dilakukan untuk menjaga objektivitas responden.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Respon Kuesioner dan Karakteristik Responden

Kuesioner disebarakan setelah mendapatkan izin dari pimpinan atau divisi SDM perusahaan. Objek penelitian adalah 48 perusahaan yang dibagi menurut bidang bisnis yang dilakukan. Objek penelitian tersebut terdiri dari 35 perusahaan yang bergerak pada bisnis jasa (seperti hotel, bank, rumah sakit, lembaga pendidikan, pengelola pusat perbelanjaan, penyedia jasa makanan, media elektronik, biro perjalanan, jasa kelistrikan, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, dan pelayanan pemerintah). Selanjutnya, tiga perusahaan bergerak pada bisnis perdagangan (retail sepatu, distribusi kosmetik, dan koperasi mahasiswa). Lebih lanjut, dua perusahaan bergerak dalam bisnis ekstraktif atau pengambilan kekayaan alam. Kemudian, enam perusahaan bergerak pada bisnis industri (industri pembuatan korek api, industri pembuatan sarung tangan, industri perlengkapan otomotif, dan industri karoseri mobil). Terakhir, dua perusahaan bergerak dalam bidang agraris (agraris perkebunan dan agraris perikanan). Objek penelitian tersebar di Yogyakarta (39 perusahaan), Klaten (satu perusahaan), wilayah distribusi Jawa Tengah (satu perusahaan), Magelang (tiga perusahaan), Jakarta (satu perusahaan), dan Karawang, Jawa Barat (satu perusahaan).

Selanjutnya kuesioner dipilih berdasarkan tingkat kepatutan sosial rendah. Median nilai kepatutan sosial seluruh responden adalah 26. Responden dengan total jawaban lebih atau sama dengan 26 dikategorikan memiliki kepatutan sosial tinggi. Responden yang memiliki kepatutan sosial tinggi berjumlah 271 responden. Responden dengan total jawaban kurang dari 26 dikategorikan memiliki kepatutan sosial rendah. Responden yang memiliki kepatutan sosial rendah berjumlah 574 responden. Dengan demikian, dari 845 responden yang mengisi kuesioner dengan lengkap, hanya digunakan 574 responden sebagai data primer untuk diolah lebih lanjut. Sisanya, 271 responden yang memiliki nilai kepatutan sosial tinggi tidak diikutsertakan. Data sebanyak 574 responden tersebut diolah menggunakan *SEM* untuk diuji hipotesis.

Simpulan

Studi ini penting karena dimotivasi oleh dua hal. Pertama, menguji pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Kedua, studi menguji peran kontrol diri sebagai faktor disposisional yang dapat meredam munculnya perilaku kerja kontraproduktif akibat pelanggaran kontrak psikologis. Pengujian ini penting karena dapat memberikan informasi bagi manajemen dalam upaya meredam pengaruh negatif perilaku kerja kontraproduktif yang dilakukan karyawan terhadap organisasi. Hasilnya, pelanggaran kontrak psikologis memengaruhi perilaku kerja kontraproduktif, namun korelasinya tidak cukup besar. Kontrol diri tinggi maupun kontrol diri rendah tidak signifikan memoderasi pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Namun demikian, kontrol diri tinggi lebih mendekati signifikan memoderasi pengaruh pelanggaran kontrak psikologis terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Hasil ini tidak mendukung hipotesis kedua yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albarracin, D., Johnson, B. T., dan Zanna, M. P. (2005). *The Handbook of Attitudes*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., dan Williams, T. A. (2002). *Statistics for Business and Economics*. South-Western: Collage Publishing

- Antoni, J., Leung, K., dan Knowles, G.(2002). Critical Success Factors of TQM Implementation in Hongkong Industries. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 19 (5) : 551-566
- Aquino, K., Tripp., T. M., dan Bies, R. J. (2006). Getting Even or Moving on? Power, Procedural Justice, and Types of Offense as Predictors of Revenge, Forgiveness, Reconciliation, and Avoidance in Organizations. *Journal of Applied Psychology*, 91: 653-668
- Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., dan Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of Moral Disengagement in The Exercise of Moral Agency. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71 (2) : 364-374
- Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., dan Regalia, C. (2001). Sociocognitive Self-Regulatory Mechanisms Governing Transgressive Behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80 (1) : 125-135
- Barcklay, L. J., Skarlicki, D. P., dan Pugh, S. D. (2005). Exploring the Role of Emotions in Injustice Perception and Retaliation. *Journal of Applied Psychology*, 90 (4) : 629-643
- Becker, T. E., Billings, R. S., Eveleth, D. M., dan Gilbert, N. (1996). Foci and Bases of Employee Commitment: Implications for Job Performance. *Academy of Management Journal*, 39 (2) : 464-482
- Cantisano, G. T., Dominguez, J. F. M., dan Depolo, M.(2008). Psychological Contract Breach and Outcomes: Combining Meta-Analysis and Structural Equation Model. *Psichotema*, 20 (003) : 487-496
- Chen, Z. X. , Tsui, A.S., dan Zhong, L. (2008). Reactions to Psychological Contract Breach: A Dual Perspective. *Journal of Organizational Behavior*, 29 (5): 527-548
- Cheng, E. W. L. (2001). SEM Being More Effective Than Multiple Regression In Parsimonious Model Testing For Management Development Research. *The Journal of Management Development*, 20 (7) : 650-667
- DelCampo, R. G., Rogers, K. M., dan Jacobson, K. J. L. (2010). Psychological Contract Breach, Perceived Discrimination, and Ethnic Identification in Hispanic Business Professionals. *Journal of Managerial Issues*, XXII (2): 220-238
- Done, R. S. (2000). *Self Control and Deviant Behavior in Organizations: The Case of Sexually Harassing Behavior*. The University of Arizona
- Douglas, S. C., Kiewitz, C., Martinko, M. J., Harvey, P., Younhee, K., dan Jae E. C. (2008). Cognitions, Emotions, and Evaluations: An Elaboration Likelihood Model For Workplace aggression. *Academy of Management Review*, 22 (2) : 455-451
- Fox, S. dan Spector, P. E. (2005). *Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets*. Washington, DC: American Psychological Association
- Greenberg, J. (1990a). Employee Theft as a Reaction to Underpayment Inequity: The Hidden Cost of Pay Cuts. *Journal of Applied Psychology*, 75 (5) : 561-568
- Greenberg, J.(1990b). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. *Journal of Management*, 16 (2) : 399-432
- Hershcovis, M.S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K.A., Dupré. K.E., Innes, M., LeBlanc, M., dan Sivanathan, N. (2007). Predicting Workplace Aggression : A Meta-Analysis. *Journal of Applied Psychology*, 92 (1) : 228-234
- Hepworth, W. dan Towler, A. (2004). The Effects of Individual Differences and Charismatic Leadership on Workplace Aggression. *Journal of Occupational Health Psychology*, 9 (2) : 176-185
- Kotter, J. P. (1973). The Psychological Contract: Managing the Joining-Up Process. *California Management Review*, XV (3) : 91-99

- Lester, S. W., Turnley, W. H., Bloodgood, J. M., dan Bolino, M. C. (2002). Not Seeing Eye to Eye: Differences in Supervisor and Subordinate Perceptions of and Attributions for Psychological Contract Breach. *Journal of Organizational Behavior*, 23 (1) : 39-56
- MacNeil, I.R. (1985). Relational Contract: What We Do and Do Not Know. *Winconsin Law Review* : 483-525
- Marcus, B. dan Schuler, H. (2004). Antecedents of Counterproductive Behavior at Work : A General Perspective. *Journal of Applied Psychology*, 89 (4): 647-660
- Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston : Pearson Education Company
- Neuman, J. H. dan Baron, R. A. (2005). Counterproductive Work Behavior Investigations of Actors and Targets. Dalam Fox, S. dan Paul, E. Spector (editor). *Aggression in the Workplace: A Social-Psychological Perspective*. Washington, DC : American Psychological Association
- Olson, M. A. dan Fazio, R. H. (2006). Reducing Automatically Activated Racial Prejudice Through Implicit Evaluative Conditioning. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32 (4) : 421-433
- Per-Olof. H. Wikstrom dan Treiber, K. (2007). The Role of Self-Control in Crime Causation : Beyond Gottfredson and Hirschi's General Theory of Crime. *European Journal of Criminology*, 4 (2) : 237-264
- Pratt, T.C. dan Cullen, F.T. (2000). The Empirical Status of Gottfredson and Hirchi's General Theory of Crime: A-Meta Analysis. *Criminology*, 38 : 589-601
- Quinn, K. A., Macrae, C. N., dan Bodenhausen, G. V. (2003). Stereotyping and Impression Formation: How Categorical Thinking Shapes Person Perception. Dalam M. A. Hogg dan J. Cooper (editor). *The Sage Handbook of Social Psychology*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Robinson, S. L. dan Bennet, R. J. (1995). A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. *Academy of Management Journal*, 38 (2) : 555-572
- Robinson, S. L., Kraatz, M. A., dan Rousseau, D. M. (1994). Changing Obligations and the Psychological Contract: A Longitudinal Study. *Academy of Management Journal*, 37 (1) : 137-152
- Robinson, S. L., dan Morrison, E. W. (2000). The Development of Psychological Contract Breach and Violation : A Longitudinal Study. *Journal of Organizational Behavior*, 21 (5) : 525-546
- Rousseau, D.M. dan Parks, J. (1992). The Contracts of Individuals and Organization. Dalam L.L. Cummings dan B.M. Staw (editor). *Research in Organizational Behavior*. Greenwich, CT : JAI Press
- Sackett, P. R. dan DeVore, C. J. (2001). Counterproductive Behaviors at Work. Dalam N. Anderson, D. S. Ones, H. K. Sinangil dan C. Viswesvaran (editor). *Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Salgado, J.F. (2002). The Big Five Personality Dimension and Counterproductive Behaviors. *International Journal of Selection and Assessment* (1/2 March /June) : 117-125
- Spector, P. E. dan Fox, S. (2005). The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work Behavior. Dalam Fox, S. dan Paul E. Spector (editor). *Counterproductive Work Behavior Investigations of Actors and Targets*. Washington, DC: American Psychological Association
- Stroms, P. L. dan Spector, P. E. (1987). Relationship of Organizational Frustration with Reported Behavioral Reactions: The Moderating Effects of Locus of Control. *Journal of Occupational Psychology*, 60 (1): 227-234

- Suazo, M. M., Turnley, W. H., & Mai-Dalton, R. R. (2005). The Role of Perceived Violation in Determining Employees Reactions to Psychological Contract Breach. *Journal of Leadership dan Organizational Studies*, 12 (1) : 24-36
- Wegener, D. T. dan Carlston, D. E. (2005). Cognitive Processes in Attitude Formation and Change. Dalam Albarracin, D. Blair T. Johnson. dan Mark P. Zanna (editor). *The Handbook of Attitudes*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

IMPLEMENTASI SIMDA KEUANGAN VERSI 2.7 DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATU

Arief Hidayatullah
Pemerintah Kota Batu, Malang

Dewasa ini, dunia yang mengalami perubahan total secara sistemik menyebabkan tingginya intensitas dan kompleksitas kebutuhan manusia akan informasi sehingga mendorong manusia untuk menciptakan suatu teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Sistem informasi menawarkan sinergi dan efisiensi informasi pada suatu organisasi (Dewett dan Jones 2001 dalam Handayani, 2007). Nasution (2004) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi bagi perusahaan mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi bisnis untuk memperoleh keunggulan bersaing.

Saat ini, organisasi sektor publik gencar melakukan implementasi melalui program e-governement agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima dalam pengelolaan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai dengan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 29 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diciptakan guna mewujudkan akuntabilitas dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan system informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu system informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu system dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.

Sistem informasi manajemen adalah suatu system yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto,2001:21). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi komputer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Handayani,2010). Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah (Bastian,2010:297) menyediakan informasi mengenai sumberdaya, alokasi, dan penggunaan sumberdaya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara

keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. (www.BPKP.go.id)

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Dinas PU CKTR Kota Batu menerapkan SIMDA untuk implementasi sistem informasi manajemen yang lebih luas dari berbagai subsistem yang ada dalam SIMDA tersebut. Terdapat banyak paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh Dinas PU CKTR Kota Batu salah satunya adalah SIMDA Keuangan yang membantu dinas mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan tersebut ke instansi di atasnya yaitu BPKAD Dinas PU CKTR Kota Batu telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2008, di awal penerapannya sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan, akan tetapi output yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur daripada penyusunan dengan sistem manual. Sedangkan untuk SIMDA versi 2.7 adalah versi pengembangan untuk implementasi Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Akrua.

Penerapan Sistem (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan SKPD pada Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah yang berperan juga sebagai Manual Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah kegiatan pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran, penata usahaan keuangan (prosedur tata usaha keuangan penerimaan/pengeluaran kas), dan pelaporan atau prosedur akuntansi. Sementara itu Pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu prosedur yang dicakup oleh aplikasi SIMDA Keuangan meliputi: prosedur Anggaran (RKA, DPA, RKA Perubahan dan

DPPA), prosedur pada PPK-SKPD (Verifikasi, Perbendaharaan, dan Akuntansi), prosedur Bendahara Pengeluaran, dan prosedur Bendahara Penerimaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk implementasi:

Dilakukan proses mapping terlebih dahulu antara akun/rekening Permendagri Nomor 13/2006, 59/2007, 21/2011 dengan akun Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang disempurnakan. Bila terdapat penambahan rekening/akun selain rekening default SIMDA, pemerintah daerah harus melakukan mapping atas rekening tambahan tersebut.

Berikut adalah uraian prosedur pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan:



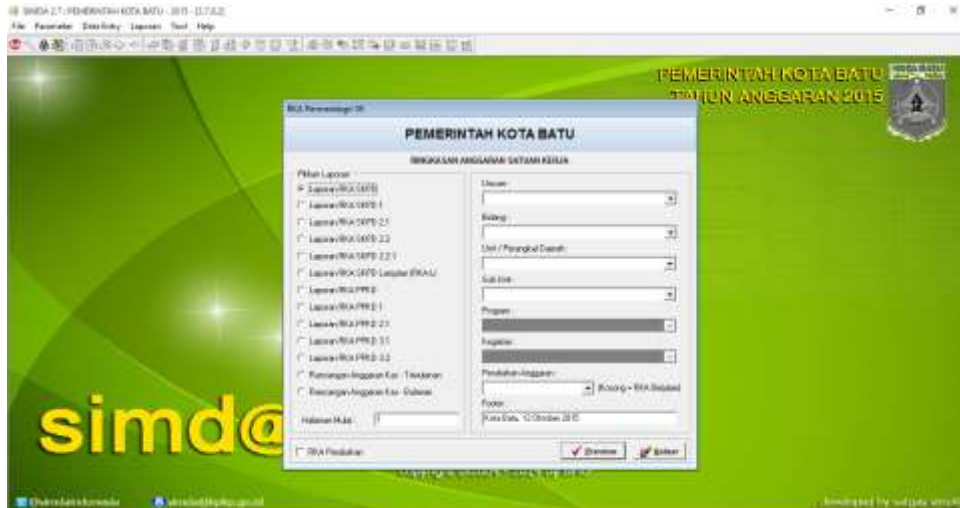
Gambar1. Gambaran Aplikasi dan Menu SIMDA Keuangan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu

Prosedur Penganggaran

Prosedur penganggaran tahap awal dalam pengolahan data keuangan, prosedur ini membentuk suatu data base anggaran kinerja/program/kegiatan

Format RKA-SKPD meliputi :

- | | |
|----------------|--|
| RKA-SKPD | : Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD |
| RKA-SKPD 1 | : Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
| RKA-SKPD 2.1 | : Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD |
| RKA-SKPD 2.2 | : Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD |
| RKA-SKPD 2.2.1 | : Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD |
| RKA-SKPD 3.1 | : Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah |
| RKA-SKPD 3.2 | : Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah |



Gambar2. Menu Anggaran SIMDA Keuangan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang

SPKD atau SKPKD selamasatu tahun. Di tingkat SKPD prosedur penganggaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan mencakup:

- Penyusunan RKA-SKPD
- Penyusunan Anggaran Kas
- Prosedur DPA dan DPPA

Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas

Prosedur penatausahaan Bendahara Penerimaan merupakan Prosedur yang digunakan untuk menata usahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan. Untuk melakukan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, terdapat dua prosedur yaitu prosedur penginputan Bukti Penerimaan dan prosedur penginputan Surat Tanda Setoran (STS).

Prosedur Pengelolaan Pengeluaran Kas

Langkah pertama prosedur penatausahaan pengeluaran kas adalah penerbitan SPD (Surat penyediaan dana), dokumen kesediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) melalui BUD (Bendahara Umum Daerah) dan tidak dilakukan oleh operator SIMDA keuangan SKPD. Pembuatan SPD dilaksanakan dengan membuat rencana penggunaan dana sampai ke rekening rincian obyek.



Gambar3. Prosedur pada aplikasi SIMDA Keuangan

Terdapat lima jenis pembayaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu pembayaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), Langsung (LS), dan Nihil. Dalam aplikasi SIMDA Keuangan prosedur penatausahaan pengeluaran kas meliputi penatausahaan sebagai berikut:

- Pembuatan SPP & verifikasi SPP
- penerbitan SPM & verifikasi SPM
- penerbitan SP2D & verifikasi SP2D
- pemberian panjar, SPJ Panjar, dan pengembalian panjar
- pembuatan SPJ dan pengesahan SPJ
- penerimaan dan penyetoran pajak



Gambar4. Register pada aplikasi SIMDA Keuangan

Prosedur Akuntansi dan Pelaporan

Prosedur akuntansi dalam SIMDA Keuangan meliputi tiga hal yaitu: input saldo awal, input data transaksi, dan koreksi/penyesuaian. Sementara prosedur pelaporan dimaksudkan untuk pengiriman data base keuangan yang telah tersimpan dalam aplikasi SIMDA Keuangan ke server PEMDA dan BPKAD Kota Batu melalui server SKPD Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu. Prosedur ini dilakukan untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan PEMDA Kota Batu.

Dalam SIMDA Keuangan laporan keuangan dapat ditampilkan dalam bentuk sesuai dengan format dalam Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri no. 59 tahun 2007, juga dapat dalam format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PPNo. 71 Tahun 2010.

Pengendalian Intern SIMDA Keuangan dalam Pengolahan Data Keuangan

Suatu pengolahan data keuangan berbasis pengolahan data elektronik memerlukan suatu pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang bisa mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Terdapat beberapa jenis pengendalian intern yang diterapkan dalam pengelolaan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan.

Yang pertama adalah pengendalian akses dan wewenang user, hal ini memungkinkan pembatasan akses aplikasi SIMDA Keuangan yang ditujukan hanya kepada pihak tertentu seperti operator SIMDA Keuangan. Para operator yang merupakan bendahara pengeluaran pembantu setiap bidang dibekali account akses dan password sendiri.



Gambar5. Tampilan login user aplikasi SIMDA Keuangan 2.7

Pengendalian wewenang user dilakukan dengan pembagian tingkat kewenangan, meliputi: administrator, supervisor, dan operator. Administrator memiliki kewenangan pembuatan user dan otoritas user, setting aplikasi, posting anggaran, dan unposting jurnal. Supervisor memiliki kewenangan mengotorisasi input data, maupun penyesuaian/koreksi. Operator hanya memiliki kewenangan untuk menginput data dan melihat laporan.

Yang kedua adalah pengendalian keamanan umum, hal ini dilakukan secara fisik (pemeliharaan peripheral/hardware) dengan membekali UPS pada setiap unit komputer server sebagai pengaman daya. Dalam hal pengamanan data, terdapat kebijakan larangan mengcopy data lewat media flash drive agar komputer server tercegah dari penyebaran virus. Sedangkan untuk antisipasi hilangnya data server selalu mengirimkan data backup ke server PEMDA atau BPKAD.

Yang ketiga adalah pengendalian menu berdasarkan fungsi untuk menjamin validitas input data aplikasi SIMDA Keuangan secara terintegrasi, maka diterapkan pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi: penganggaran, pengendalian dilakukan dengan adanya jejak rekam (log) user pelaksana posting anggaran di tiap-tiap SKPD dan SKPKD; penata usahaan, pengendalian dilakukan dengan adanya peringatan apabila saldo sisa SPD tidak mencukupi untuk pengajuan SPP ataupun ada pengajuan TU untuk kegiatan yang sama dan belum dipertanggungjawabkan dan pembukuan; penatausahaan, validasi terhadap dokumen SPM dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan status draft, final atau batal.

Pengendalian internal yang terakhir adalah pengendalian aplikasi yakni pengendalian khusus yang didesain untuk memastikan bahwa sistem yang diaplikasikan telah berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuannya untuk menjamin bahwa seluruh transaksi yang diproses dalam aplikasi SIMDA Keuangan merupakan transaksi yang valid, terotorisasi dan dicatat secara lengkap, akurat dan benar. Pengendalian aplikasi dikategorikan menjadi pengendalian masukan, pengendalian proses, dan pengendalian output.

- Pengendalian Masukan

Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan pengolahan data. Pengendalian ini meliputi berbagai hal seperti otorisasi transaksi, validasi, akurasi dan kelengkapan data.

- Pengendalian Proses

Pengendalian proses dirancang untuk memastikan apakah proses pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan telah dilakukan secara benar. Pengendalian ini pada

dasarnya telah terintegrasi dengan pemrograman pada aplikasi SIMDA Keuangan seperti fungsi penolakan otomatis terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan jenis transaksinya, fungsi koreksi bila terjadi kesalahan penginputan.

- Pengendalian Output

Pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa output yang telah diproses oleh aplikasi SIMDA Keuangan merupakan output yang benar, sah, dan didistribusikan kepada pengguna laporan yang tepat. Pengendalian output dalam aplikasi SIMDA Keuangan dilakukan dengan verifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat pelaporan hasil pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Sebelum dilakukan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bendahara umum daerah pada tingkat SKPKD memverifikasi semua data yang diinputkan oleh tiap-tiap SKPD dan membandingkannya dengan data APBD yang telah disusun pada awal tahun. Bila sesuai maka akan dilakukan prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, bila tidak sesuai maka dilakukan proses koreksi.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Aplikasi SIMDA Keuangan yang diterapkan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu sebagai aplikasi pengolah data keuangan merupakan aplikasi sistem informasi manajemen yang secara terintegratif mengelola keuangan pemerintah daerah mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pembukuan/ akuntansi. Prosedur pengelolaan keuangan seperti yang telah dijelaskan dalam Permendagri No.13 tahun 2006 telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh aplikasi SIMDA Keuangan. Namun terdapat kekurangan yakni fungsi pembukuan/akuntansi dalam aplikasi SIMDA Keuangan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu belum dapat diaplikasikan secara maksimal karena terdapat fungsi menu pembukuan/akuntansi didisable oleh admin SIMDA Keuangan dan hanya dapat dilakukan oleh admin/operator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Untuk menjamin tujuan pengelolaan keuangan, maka diterapkan pengendalian intern atas aplikasi SIMDA Keuangan. Pengendalian yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut sudah sangat memadai, ditunjukkan dengan adanya pengendalian aplikasi yang menjamin bahwa masukan/input data keuangan dalam SIMDA Keuangan telah diotorisasi, divalidasi, dan dicek kelengkapannya untuk diproses dalam aplikasi SIMDA Keuangan. Selain itu aplikasi SIMDA Keuangan telah memberikan fungsi verifikasi pada dokumen keuangan yang telah diproses sehingga kebenaran dalam dokumen tersebut dapat lebih dipercaya. Aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual. Namun koreksi kesalahan data setelah diterbitkannya SP2D memiliki prosedur yang cukup rumit sehingga menghambat proses koreksi tersebut.

KETERBATASAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pengamatan pada aplikasi SIMDA Keuangan sebagai pengolahdata keuangan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa permasalahan atau keterbatasan yang dihadapi oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu dalam pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Beberapa keterbatasan tersebut antarlain:

Adanya perubahan atau masa transisi dalam pengolahan data keuangan di Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu yang dulunya menerapkan sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan. Serta perubahan dari versi SIMDA basis Kas ke SIMDA berbasis Akrua. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan culture pengolahan data keuangan yang ekstrim. Perubahan culture tersebut meliputi pencatatan baik pencatatan penatausahaan keuangan maupun pencatatan akuntansi. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan fungsi akuntansi dalam pengelolaan data keuangan di Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu tidak dapat diterapkan secara optimal. Perubahan culture tersebut tidak memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pengolahan data keuangan terutama data akuntansi melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Terbatasnya tenaga administrator aplikasi SIMDA Keuangan di BPKAD. Hal ini mengakibatkan proses koreksi data setelah diterbitkannya SP2D oleh BUD tidak mampu dilaksanakan secara optimal.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan antarlain sebagai berikut:

Untuk Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu perlu menempatkan minimal satu personil yang benar-benar memahami bidang akuntansi. Hal ini akan membantu dinas dalam melaksanakan prosedur akuntansi sehingga dinas mampu mengusulkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang kaitannya masih dalam urusan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu kepada PEMDA melalui BPKAD. Usulan tersebut dapat mencakup usulan jurnal penyesuaian terkait dengan penyusutan aset yang pengelolaannya digunakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batu.

Untuk BPKAD Kota Batu sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah Kota Batu perlu melakukan penambahan fungsi administrator untuk menangani proses koreksi data saat SP2D telah selesai diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah. Hal ini akan mempercepat proses koreksi, mengingat jumlah SKPD pengguna aplikasi SIMDA Keuangan cukup banyak, sehingga dapat dilakukan proses pengambilan keputusan yang benar bila data yang telah masuk merupakan data yang sudah dikoreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2011.
Program Aplikasi Komputer SIMDA: SIMDA Versi 2.7 www.BPKP.go.id
Widjajanto, N. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)

Dwi Sudaryati¹⁾, Ratna Hindria DPS²⁾

UPN "Veteran" Yogyakarta

email : sudaryati_dwi@yahoo.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that affect the readiness of the Government in implementing the Act 6 2014 on the village. The population in this study is the village head and village in Sleman involved in the process of preparation for implementation of the Act village. Administratively, Sleman regency consists of 17 sub-district, which has 86 villages. The sampling technique using simple random sampling. The sampling technique using simple random sampling and test hypotheses using multiple regression analysis (Multiple Regression).

Results of this study demonstrate that organizational commitment and human resources affect the readiness of the Government in implementing the 2014 Act 6 of the Village. As well as proving that the infrastructure and information systems do not affect the readiness of the Government in implementing the 2014 Act 6 of the Village. The result is expected, can help policy makers in understanding the factors that affect the readiness of the Government in implementing the Act 6 2014 on the village.

Keywords: Local Government Readiness, Organizational Commitment, Human Resources (HR), Infrastructure, Information Systems

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah dalam menerapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Sleman yang terlibat dalam proses persiapan penerapan UU desa. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 Kecamatan, yang memiliki 86 Desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dan hipotesis di uji menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression*).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi dan sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah dalam menerapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta membuktikan bahwa infrastruktur dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah dalam menerapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian ini diharapkan, dapat membantu para pembuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah dalam menerapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci: Kesiapan Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, Sistem Informasi

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. UU ini memberikan pengakuan terhadap setiap desa yang ada di Indonesia sebagai ujung tombak pemerintahan. UU ini juga memberikan keleluasaan pada setiap desa untuk mengatur pembangunan di desanya yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada UU Desa ini, terdapat poin yang menarik, yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Menurut Pasal 72 ayat (1) bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari huruf (b.) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Hal ini berarti setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga 1.4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.

Undang-undang Desa dimaksudkan untuk melakukan penyebaran anggaran secara langsung ke desa-desa, agar dapat mengangkat taraf hidup masyarakat desa, Namun, perencanaan penggunaannya tentu harus tepat sasaran. Dengan total dana sebanyak itu, tidak mustahil akan diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, perlu kesiapan dari aparat pemerintah desa dalam menerapkan UU Desa tersebut. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya.

Menurut Holt et al dalam Wiyono (2008), kesiapan didefinisikan sikap komprehensif yang memengaruhi secara berkelanjutan oleh isi, proses, konteks dan individu melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keleluasaan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui dan mengadopsi sebuah rencana. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Teori yang dijadikan acuan adalah teori kesiapan yang dikemukakan oleh Holt et. al. dalam Wiyono (2008), jika dikaitkan dengan penelitian ini: (1) Isi adalah perubahan keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tergolong cukup besar terhadap setiap desa per tahunnya. Namun, penelitian ini tidak membahas pengelolaan keuangan desa karena yang diteliti adalah factor yang mempengaruhi kesiapan Pemda; (2) Proses dapat dilihat dengan memahami factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. (3) Konteks mengacu pada perubahan yang terjadi, penilaian terhadap konteks ini memperhatikan situasi social dari objek penelitian pada saat UU Desa diimplementasikan. Karena penelitian ini dilakukan pada saat objek penelitian belum

menerapkan UU Desa, maka penilaian terhadap konteks ini belum dapat dilakukan. (4) Individu, penilaiannya dilihat dari karakteristik mereka yang diminta untuk berubah. Untuk itu akan ada kajian mengenai perilaku partisipan penelitian, diantaranya adalah komitmen, dan sumber daya manusia. Dari uraian diatas maka fokus penelitian ini adalah proses dan individu.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang akan menerapkan UU Desa. Penerapan UU Desa bagi pemerintah memberikan tantangan baru untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan, sumber daya manusia, infrastruktur serta sistem informasi. Sumber daya manusia (SDM) menjadi tumpuan tercapainya tata kelola yang baik yang dikerjakan oleh pemerintah desa, dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten harapannya dapat membuat perencanaan yang program-programnya dapat langsung mengena ke masyarakat. Hal ini tentu memerlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk tercapainya pelaksanaan penerapan UU Desa, diantaranya tidak hanya memiliki sumberdaya manusia yang kompeten saja namun perlu adanya komitmen, sarana dan prasarana serta sistem informasi untuk tercapainya penerapan UU Desa yang secara keseluruhan terkadang banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah dalam menerapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan hal baru dalam akuntansi sektor publik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut pasal (1) ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah "untuk mengatur", untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah. Kesuksesan pemerintah akan menjadikan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik (Kuratko dan Hodgest, 1997).

Infrastruktur merujuk pada system fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas public yang lain yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 2000). Menurut McLeod (2007), Sistem Informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi.

Menurut Kusuma (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen, infrastruktur dan sistem informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah kabupaten Jember dalam implementasi akuntansi akrual. Penelitian selanjutnya oleh Ranuba, dkk (2015) menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa sudah siap menerapkan akuntansi akrual, namun masih memiliki hambatan dalam hal SDM. Diharapkan pimpinan pemda menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam penerapan peraturan baru. Subroto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan dan alokasi dana desa sudah akuntabel dan transparan, namun kendala utama yang dihadapi adalah perlunya sumber daya manusia yang kompeten.

Dari penjelasan latar belakang masalah dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H₁: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- H₂: Sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- H₃: Infrastruktur berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- H₄: Sistem Informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

C. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Sleman yang terlibat dalam proses persiapan penerapan UU desa. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 Kecamatan, yang memiliki 86 Desa dan 1212 dusun. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*.

Berikut ini adalah definisi operasional variable yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Kesiapan Penerapan UU Desa

Kesiapan penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kemampuan dari masing-masing Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan sesuai dengan standart, tepat sasaran, dan tidak menggunakan jasa konsultan. Variabel dependen ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju), dengan skala interval.

2. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah keinginan dari setiap Pemerintah Desa untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan dan perundangan (Oluseyi O, 2010). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dalam hal perencanaan dan pelaporan (Oluseyi O. 2010). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

4. Infrastruktur

Infrastruktur adalah pendukung utama penerapan UU Desa dalam hal perencanaan dan pelaporan yang diukur dengan asset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan UU Desa (Grigg, 2000). Infrastruktur (variabel independen) diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju), dengan skala interval.

5. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah system pengendalian internal yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mukthar, 2002). Sistem informasi (variabel independen) diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju), dengan skala interval.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression*) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$PP = \alpha_0 + \alpha_1 KO + \alpha_2 SDM + \alpha_3 IF + \alpha_4 SI$$

Keterangan :

PP= Persepsi tentang kesiapan penerapan UU Desa

KO = Komitmen organisasi

SDM = Sumberdaya manusia

IF = Infrastruktur

SI = Sistem Informasi

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Menurut Hair, *et al* (1998) kualitas data digunakan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

1. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. Hasil pengujian reliabilitas untuk semua butir jawaban kuesioner masing-masing variabel dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai Alpha terletak di antara 0,60 sampai dengan 0,79 yang berarti reliabilitas diterima (Sekaran, 2000).

2. Uji Validitas

Dari sejumlah 45 pertanyaan yang dikelompokkan sesuai dengan variabel yang akan diuji yaitu variabel X1 terdapat 11 item pertanyaan, variabel X2 terdapat 11 pertanyaan, variabel X3 terdapat 6 pertanyaan, variabel X4 terdapat 6 pertanyaan dan untuk variabel Y terdapat 11 item pertanyaan. Instrumen-instrumen tersebut dapat dinyatakan valid karena masing-masing butir pertanyaan memang mengukur instrumen yang diukur.

Deskriptif Statistik

Deskripsi statistik variabel penelitian ditujukan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 2. Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kesiapan penerapan UU No.6 Tahun 2014 (Y), diperoleh rata-rata 3,77 berarti bahwa responden menjawab pertanyaan dengan pendapat setuju, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan penerapan UU No.6 Tahun 2014 oleh Pemda Kab. Sleman adalah cukup siap. Variabel komitmen organisasi (X1), diperoleh rata-rata 3,79 berarti bahwa responden mempunyai persepsi mengenai komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan UU No.6 Tahun 2014 adalah cukup siap. Variabel sumberdaya manusia (X2), diperoleh rata-rata 3,82 berarti bahwa responden mempunyai persepsi mengenai sumberdaya manusia terhadap kesiapan penerapan UU No.6 Tahun 2014 juga cukup siap. Variabel infrastruktur (X3), diperoleh rata-rata 3,38 berarti bahwa responden mempunyai persepsi mengenai infrastruktur terhadap kesiapan penerapan UU No.6 Tahun 2014 juga cukup siap. Dan variabel sistem informasi (X4), diperoleh rata-rata 3,76 berarti bahwa

responden mempunyai persepsi mengenai sistem informasi terhadap kesiapan penerapan UU No.6 Tahun 2014 juga cukup siap. Berdasarkan hasil deskriptif statistik tersebut diatas menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada umumnya dan Pemerintah Desa pada khususnya sudah cukup siap dengan penerapan kebijakan baru yaitu UU No.6 Tahun 2014 tentang desa baik dalam hal komitmen organisasi, sumberdaya manusia, infrastruktur maupun sistem informasi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 3, menunjukkan bahwa:

1. Nilai Sig untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,000 lebih kecil daripada alpha (5% atau 0,05), yang berarti bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan UU Desa No.6 Tahun 2014. Penerapan UU Desa yang merupakan kebijakan baru dalam pemerintahan, membutuhkan suatu komitmen organisasi yang merupakan dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjukkan keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mementingkan kepentingan organisasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2013) dan Subroto (2009).
2. Nilai Sig untuk variabel sumberdaya manusia sebesar 0,000 lebih kecil daripada alpha (5% atau 0,05), yang berarti bahwa sumberdaya manusia berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan UU Desa No.6 Tahun 2014. Penerapan UU Desa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, demi tercapainya tata kelola yang baik yang dikerjakan oleh pemerintah desa, dengan harapan dapat membuat perencanaan yang program-programnya dapat langsung mengena ke masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subroto (2009).
3. Nilai Sig untuk variabel infrastruktur sebesar 0,308 lebih besar daripada alpha (5% atau 0,05), yang berarti bahwa infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan UU Desa No.6 Tahun 2014. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem social dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000). Dalam hal ini pemerintah desa belum secara maksimal memanfaatkan infrastruktur untuk menerapkan UU Desa. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2013).
4. Nilai Sig untuk variabel sistem informasi sebesar 0,933 lebih besar daripada alpha (5% atau 0,05), yang berarti bahwa sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan UU Desa No.6 Tahun 2014. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa belum menggunakan sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan terkait dengan penerapan UU Desa. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2013).

E. KESIMPULAN

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komitmen organisasi dan sumberdaya manusia berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan UU Desa.
2. Infrastruktur dan Sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan UU Desa.

Saran :

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya meneliti variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan UU Desa.
2. Penelitian ini dilakukan pada organisasi pemerintah yang tidak terbatas pada hanya satu kabupaten saja karena di Indonesia ada ratusan kabupaten/kota.

REFERENSI

- Grigg, Neil and Fontane G. Darell. 2000. *Infrastructure System Management and Optimization. International Seminar " Paradigm and Strategy of Infrastructure Management"* Diponegoro University.
- Hair JF., Anderson, R.E. Tatham, R.L. and Black W.C. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5th Edition. New Jersey, Prentice Hall.
- Kuratko, Hodgets. 1998. *The entrepreneurship: a Contemporary Approach*, Fifth edition, Harcourt College Publisher, New York.
- Kusuma. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah. E-journal Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oluseyi O, Adesina. 2010. *A comparative study of the adoption of accrual accounting in government*. PhD Thesis, Cardiff University.
- Ranuba, Sifrid dan Sherly. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan SAP. Jurnal EMBA 388 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 388-397
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa diDesa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro.Semarang.
- Sulani A, Aldiani. 2009. *.Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada Pemerintah kabupaten Labuhan batu*. UNSU.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wiyono, Adrianto Sugiarto. 2008. *Hubungan Kepemimpinan dan Kesiapan Implementasi Knowledge Management Dalam Organisasi*. E-Jurnal Undip.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria Reliabilitas
1.	Kesiapan penerapan UU Desa (Y)	0,904	Diterima
2.	Komitmen organisasi (X1)	0,890	Diterima

3.	Sumberdaya manusia (X2)	0,860	Diterima
4.	Infrastruktur (X3)	0,918	Diterima
5.	Sistem Informasi(X4)	0,795	Diterima

Sumber: Data Diolah, 2015

Table 2. Statistik Deskriptif Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	63	1.18	5.00	3.7735	.55625
X1	63	1.18	5.00	3.7954	.49812
X2	63	2.91	4.82	3.8175	.46422
X3	63	1.83	5.00	3.5819	.70642
X4	63	1.83	9.83	3.7694	.99863
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	-1.003	.330		-3.042	.004	-1.662	-.343
X1	.847	.071	.759	11.927	.000	.705	.990
X2	.360	.072	.300	5.028	.000	.217	.503
X3	.055	.054	.070	1.028	.308	-.052	.162
X4	-.003	.034	-.005	-.084	.933	-.070	.064

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah, 2015

Are There Relationship among Stressor, Behavior, and Employee Performance? A Case of Civil Servants in Bantul, DIY, Indonesia

Muafi*
Ninik Probosari*
Anis Siti Hartati*

***Staff lecturer of Management Departmen, Economic Faculty,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: muafi2013@gmail.com**

Asbtract

High stressors can be experienced by employees, both by civil servants and private sector employees. This could have an impact on the positive and negative behaviors of employees and could eventually affect employee performance. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of stressors on deviant behavior (negative and positive) and work performance of civil servants in Bantul, Yogyakarta, Indonesia. This research is a survey research using questionnaires given in private to civil servants as respondents, with a purposive sampling technique. Research results concluded that; (1) stressor of individual and task demands has a significant positive effect on negative behavior, (2) stressor of role demand has no significant effect on negative behavior, (3) stressor of individual demand has a significant negative effect on positive behavior, (5) stressor of task demand has no significant effect on positive behavior, (6) stressor of role demand has no significant effect on positive behavior, (7) negative attitudes have a significant negative effect on employee performance, and (8) positive behaviors have a significant positive effect on employee performance.

Keywords: stressor, behavior, employee performance.

1. INTRODUCTION

Stress is a condition that can be created by an environmental change which was accepted as a challenge, threaten, or breaking the balance of a person's life. Stress is mostly defined by just observing the stimulus or response experienced by someone (Lazarus & Folkman, 1984). According to Robbins (2005) stress is "a dynamical condition in which the individual face the opportunities, obstacles, or demands that are related to what is very broad and the results are perceived as something uncertain but important". Stress can hit anyone either a private employee or a government employee. The condition that caused stress is called a stressor (Handoko, 1995). There are two kinds of stressor according to Barney and Griffin (1992), the stressor which is related with work (organizational stressor) and the stressor which is not related with work (non work stressor).

This research was carried out in Bantul Regency where was chosen as the object of the research because according to the survey results, this regency has a score value of performance management civil servants 52 (low) whereas the highest score is 80. This indicates that the performances of civil servants of Bantul was still far behind, compared with the performances of the civil servants of Sleman Regency (score 61) and Kulon Progo Regency (score 61) (Pusat Kajian Otonomi Daerah, 2012). This condition could have been caused the presence of stressor that is experienced by the employee. High stressor can cause employees to have an increase in positive and negative behavior either in the work

surroundings or outside and in the end it could have an impact on the employees' performance.

2. REFERENCE

Stressor Relationship Patterns, Behavior, and Individual Performances

Stress can be defined through three different ways, as a stimulus, response, and interaction. As a stimulus, if there is a focus on the environment, for example when someone says stress while he is on a depressed conditions, "I feel stress when I have to give a speech. As an interaction, one's relationship with the stimulus' environment, someone here is the active agent who can affect the result of the stressor through behavior, cognition, and emotional strategy (Brannon and Feist, 2007)

In general, stress is a negative condition, that is, a condition which leads to the indication of physical or mental illness or leads to unreasonable behavior (Robbins, 2005). In differentiate between distress, the destructive one, and eustress, the positive. Distress has an impact on mood, skeletal muscle, and vital organs in the body (Robbins, 2005; Munandar, 2008; Luthans, 1998). The condition that caused stress is called a stressor (Handoko, 1995). There are two kinds of stressor according to Barney and Griffin (1992), the stressor which is related with work (organizational stressor) and the stressor which is not related with work (non work stressor).

Robbins (2005) states that, the cause of the stress of work on an employee at least comes from three source, which are: (1) Task demand, i.e. work stress is directly related to the work environment and work directly with the function. The task include these following factors: a night work, workload, and a total comprehension of the risks and dangers. (2) Role demand, i.e. a work stress which is related with the pressure that is given to someone as a function of a particular role. Any labor work as his role in the organization, it means that every labor has a workforce that has to be done, along with the existing rules and in accordance with his superior's expectation. (3) Individual demand, i.e. a work stress that is associated with the pressure created by other employees (Susilo, 2000; Sutherland & Cooper, 2000; Luthans, 1998). Deviant behavior at work places can be caused by the presence of *stressor* which will eventually affect the performance of the employees (Muafi, 2011; Penny dan Spector, 2005; Chen dan Spector; 1992; Fox dan Spector, 1999). A contra productive behavior includes role ambiguity, conflict of roles, workload, organizational limitation, and interpersonal conflict. Based on several previous studies on theory and research, can be found the hypothesis of the research.

- H1. Individual stressor affects significantly positive to negative behavior,
- H2. Task demand stressor affect significantly positive to negative behavior,
- H3. Role demand stressor affect significantly positive to negative behavior,
- H4. Individual stressor affects significantly positive to positive behavior,
- H5. Task demand stressor affect significantly positive to positive behavior,
- H6. Role demand stressor affect significantly positive to positive behavior,
- H7. A negative behavior affects significantly positive to performance, and
- H8. A positive behavior affects significantly positive to performance.

3. RESEARCH METHODOLOGY

This kind of this research is survey. It is done on the Civil Servants in Bantul Regency based on the reason that this regency has a score value of performance management civil servants 52 (low) whereas the highest score is 80. Therefore, the samples and the respondents in this study is some part of all of the Civil Servants in Bantul Regency and it was take as a purposive sampling. The questionnaire was distributed to 150 respondents,

and the result that was return decently to be used in the research was 92 questionnaires. Statistic technique was using Partial Least Square. The result of the validity test of all the questionnaire items has a lower significant value than 0,05 so it can be said that the questionnaire item in this research has a good convergent validity. Also, the *cronbach's alpha* value and *composite reliability's* result has a higher value than 0,7. This show that the variable of this research can be said is a reliable one.

4. RESULTS

4.1. Respondents Characteristics

The respondents' characteristics can be viewed through the respondent demography that include year of birth, age, work period, level of education, and gender.

Table 1
Respondents Characteristics

Year of Birth	Frequency	Percentage
1943 – 1960	8	8,7
1961 – 1981	60	65,2
1982 – 2001	24	26,1
Age		
49 – 66 year old	33	35,9
28 – 48 year old	51	55,4
< 28 year old	8	8,7
Work Period		
1 – 3 years	1	1,1
4 – 6 years	13	14,1
7 – 9 years	6	6,5
10 – 12 years	14	15,2
≥ 13 years	58	63,1
Level of Education		
Senior High School	25	27,2
D3/(Scholar)	54	58,7
S2 (Master)	12	13,0
S3 (Doctor)	1	1,1
Gender		
Male	57	62,0
Female	35	38,0
Total	92	100,0

Based on Table 1 can be viewed that the most likely respondents was born between the years 1961 - 1981 which reached 60 people or about 65,2%; the it is followed with respondents who were born between the years 1982 – 2000 as many as 24 people or around 26,1%, and the least was respondents who were born between the years 1943 – 1960, only 8 people or about 8,7%. Most respondents are in the age between 28 – 48 years which reached 51 people or about 55,4%; followed by the respondents between age 49 – 66 years, around 33 people or about 35,9%; and the least likely is respondents which is less than 28 years, of only 8 people or about 8,7%. Most respondents that have worked more than 13 years reaches 58 people or about 63,1%; followed in a row, respondents who have worked for 10 – 12 years as many as 14 people or about 15,2%; respondents who have worked for 4 – 6

years as many as 13 people or about 14,1%; respondents who have worked for 7 – 9 years are 6 people or about 6,5%; and the least was respondents who recently worked for 1 – 3 years, only 1 person or around 1,1%. Latest education of most respondents was scholar, namely reach 54 people or about 58,7%; followed by respondents whose latest education was in senior high school graduation as many as 25 people or about 27,2% respondents; respondents whose latest education was master as many as 12 people or about 13,0%; and the least is respondents whose latest education was a doctoral, only 1 person or about 1,1%. Male respondents are more than female, reaching 57 people or about 62,0%, whereas female respondents are only 35 people or about 38,0%.

4.2. Hypothesis Testing

The result for hypothesis testing can be viewed on Figure 1 and Table 2.

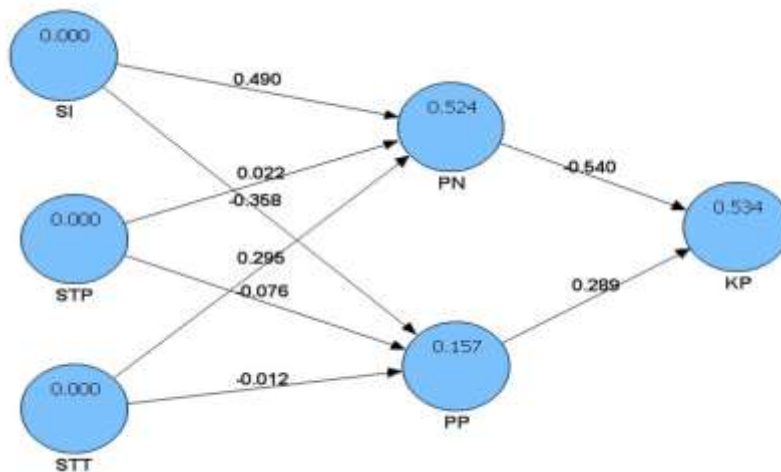


Figure 1. Result of Coefficient Path

Table 2
Coefficient of the Variable Path Research

Path	Path Coefficient	t-statistic	Significance
H _{1a} : SI → PN	0,490	5,037	0,000* (Sign)
H _{1b} : STT → PN	0,295	2,803	0,006*(Sign)
H _{1c} : STP → PN	0,022	0,276	0,783 (ns)
H _{2a} : SI → PP	-0,358	3,051	0,003*(Sign)
H _{2b} : STT → PP	-0,012	0,106	0,916 (ns)
H _{2c} : STP → PP	-0,076	0,670	0,505 (ns)
H ₃ : PN → KP	-0,540	4,253	0,000*(Sign)
H ₄ : PP → KP	0,289	2,215	0,029*(Sign)

Note= * Sign (significant); ns = non significant

5. DISCUSSION

The analysis result influence of the individual stressor that affects towards negative behavior has been earned the t statistic number, 5,037 with the significance level 0,000 which is less than 0,05. This shows that individual stressor affect significantly to negative behavior. The higher the level of individual demand, push an increase of negative behavior.

The analysis result influence of the task demand stressor towards negative behavior has been earned the t statistic number, 2,803 with the significance level 0,006 which is less than 0,05. This shows that task demand stressor affect significantly to negative behavior. The higher the level of task demand, push an increase of negative behavior.

The analysis result influence of the role demand stressor towards negative behavior has been earned t statistic number 0,276 with the significance level 0,783 which is higher than 0,05. This shows that the role demand stressor does not affect significantly towards negative behavior. The changing of the role demand stressor does not affect significantly towards negative behavior changing.

The analysis result influence of the individual stressor towards positive behavior has been earned t statistic number as many as 3,051 which is higher than the t table 1,960 or with the significance level 0,003 which is less than 0,05. This shows that individual stressor affects significantly towards positive behavior. The higher the level of individual demand, push a decrease of the positive behavior.

The variable influence of analysis result of the task demands stressor towards positive behavior has been earned t statistic number 0,106 that is less than the t table 1,960 or with significance level 0,916 that is higher than 0,05. This shows that the stressor variable of the task demand does not affects significantly towards positive behavior. The changing of task demand stressor does not affect towards positive behavior changing.

The variable influence of analysis result of the role demand stressor toward positive behavior has been earned t statistic number 0,670 that is less than t table 1,960 or with significance level 0,505 that is higher than 0,05. This shows that the stressor variable of the role demand does not affect significantly towards positive behavior. The changing of the role demand does not affect towards positive behavior changing.

The analysis result influence of negative behavior towards employee performance has been earned t statistic number 4,253 that is higher than the t table 1,960 or with significance level 0,000 that is less than 0,05. This shows that the variable of negative behavior is significantly affect towards performance of employee. Employees who behave negatively are more likely decrease the employee's performance.

The variable influence of analysis result of positive behavior toward employee performance has been earned t statistic number 2,215 that is higher than the t table 1,960 or with significance level 0,029 which is less than 0,05. This shows that the variable of positive behavior is significantly affects towards the performance of employee. Employees who act a positive behavior are more likely increase the employee's performance. The whole results also prove a findings that stressor can have impact to deviant behavior in the work place that eventually will affect towards performance (Penny dan Spector, 2005). Chen dan Spector (1992; Fox dan Spector, 1999; Fox *et al.*, 2001) also added that work stressor has a tight relation with the performance of the contra productive behavior which are role ambiguity, role conflict, workload, organizational limitation, and interpersonal conflict

Related to the stressor of task demand, role demand, and individual demand, someone who can manage it will give a positive impact to the increase of positive behavior. It can be an innovation behavior, organizational citizenship behavior, creativity, whistleblowing—in a good way, and corporate social responsibility (Muafi, 2011; Spreitzer and Sonenshein, 2004; Appelbaum, et al., 2007). On the contrary, it will give negative impact, tend to behave negatively, and will also affect the performance of the employee. If a high task demand does not addressed with positive behavior can be harmful either for the individual employee as well as the organization. Employees should be fully aware about the task that is their responsibility so they will give the best result towards organization.

Siswanti (2006) added that work stress that is caused by high stressor can be affect directly to aggressive deviant behavior.

However, employees are not always able to play their role and tasks without causing problems. Less well functioning of tasks and role is also able to cause stress. Task and role conflict arise if employees experience a conflict between the task and role that has to be done and the responsibility. Stress arises because of his inability to fulfill the task and role demands while there is lot of expectation towards him. Usually, the reason is lack of work goals, an unclear responsibility, and lack of work procedures. Related to individual demand, psychological reaction, physiology, and in the form of many behavior toward stress is the result's situation with individual employee. Usually it is influenced by behavior patterns based on the attitudes, needs, values, past experiences, life circumstances, and competence. This aspects also needs to be taken care by the organization.

6. CONCLUSION

The conclusions of this research are: (1) individual demand stressor affects significantly positive towards negative behavior; (2) task demand stressor affects significantly positive towards negative behavior; (3) Role demand does not affect significantly towards negative behavior; (4) individual stressor affects significantly negative towards positive behavior; (5) task demand stressor does not affects significantly towards positive behavior; (6) role demand stressor does not affect significantly towards positive behavior; (7) negative behavior affects significantly negative towards the performance of the employee; and, (8) positive behavior affects significantly positive towards the performance of the employee. As for suggestion that could be proposed is: (1) organization requires ways or strategies for stress management. Prevention needs to be done by; time management, relaxation, meditation, the presence of the social support, physical excercises either done individually or organizationally, (2) provide training to employees in accordance with their competencies so that employees who have a high job stress can disribute it to positive behavior, and, (3) performance improvements can be done with the employee is directed to have a positive behavior like innovation, organizational citizenship behavior, creativity, whistleblowing—in a good way, and corporate social responsibility.

REFERENCES

- Appelbaum, S.H., Iaconi, G.D. and Matousek, A. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: causes, impact, and solutions, *Corporate Governance*, Vol. 7, No. 5, p. 586-598.
- Barney, J.B. and Griffin, R.W (1992). *The Management of Organization: Strategy, Structure and Behaviour*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Brannon, L. and Feist, J. (1997). *Health Psychology : An Introduction to Behavior and Health*. California : Brooks/Cole Publishing
- Chen, P. Y., & Spector, P. E. (1992). Relationships of work stressors with aggression, withdrawal, theft and substance use: an exploratory study. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 65, 177–184.
- Fox, S., and Spector, P. E. (1999). A model of work frustration—aggression. *Journal of Organizational Behavior*, 20, 915–931
- Handoko, T. Han (1995). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Yogyakarta :BPFE
- Lazarus RS, Folkman S. (1984) *Stress Appraisal and Coping*. Springer Publishing Company. New York
- Luthans, F. (1998), *Organizational Behavior*, Singapore: McGraw Hill Companies International Edition

- Muafi (2011), Causes and Consequences Deviant Workplace Behavior, *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol. 2, No. 2, April, p. 123-126.
- Munandar, A. S . (2008) . Psikologi Industri dan Organisasi . Jakarta : UI Press
- Penney, L.M and Spector, P.E (2005), Job stress, incivility and counterproductive work behavior (CWB); the moderating role negative affectively, *Journal of Organizational Behavior*, 26, 777–796.
- Pusat Kajian Otonomi Daerah (2012), Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Manajemen PNS di Daerah, <http://www.pkkod.lan.go.id/index.php?mod=6&d=82>, 23 Maret 2012.
- Robbins, S.P. (2005), *Organization behaviour*, Eleven Edition, (2005) Mc Graw Hill New York
- Siswanti, Y. (2006), Analisis pengaruh stres kerja dalam memediasi hubungan antara politik organisasional dengan perilaku agresif (studi kasus pada RS PKU muhammadiyah dan DKT di Yogyakarta), *Siasat Bisnis*, hal. 165-180
- Spreitzer, G.M and Sonenshein, S. (2004), Toward the construct definition of positive deviance, *American Behavioral Scientist*, 2004, Vol. 47, No. 6, pp. 828-47
- Susilo, M. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 4, BPFE Yogyakarta
- Sutherland, V. & Cooper, C. L. (2000). Strategic Stress management. London : Macmillan
<http://bappeda.bantulkab.go.id/>

PENINJAUAN IMPLEMENTASI IFRS 6 PADA PERUSAHAAN TAMBANG²**Oleh:****Dr. Noto Pamungkas, M.Si. – Akuntansi, FE UPNVY****Rusherlistyani, S.E., M.Si. – Akuntansi, FE UPNVY****ABSTRAK**

Karakteristik industri dalam explorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang bersifat ekonomis mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbeda – beda. Hasil sumberdaya alam tersebut mengarah pada industri pertambangan dan migas. Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya standarisasi yang berbeda – beda pada masing industri, padahal masing – masing industri mempunyai permasalahan pendanaan, proses dan pengoperasian yang berbeda – beda. Explorasi pertambangan memungkinkan kesuksesan atas keberhasilan penemuan cadangan sebesar 80 % sedangkan explorasi dalam bidang migas rasio kesuksesan keberhasilan sangat kecil sehingga perlu diadakan aturan pendanaan yang mendetail pada masing-masing industri tersebut. Paper ini menitik beratkan pada masalah perlunya adanya kajian ulang untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources telah sesuai dengan karakteristik eksplorasi pada masing-masing industri di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan klasifikasi biaya produksi pada bidang pertambangan dan migas.

Keyword : Explorasi, Eksploitasi, Pertambangan, Migas, IFRS 6

PENDAHULUAN

Explorasi bertujuan untuk menemukan serta mendapatkan sejumlah maksimum dari cebakan mineral yang bersifat ekonomis baru dengan biaya seminimal mungkin dalam waktu seminimal mungkin.

Menurut Agustine (2013) dalam “Perbandingan Standar Akuntansi Atas Pertambangan Batubara FASB, IFRS dan PSAK” karakteristik pendanaan produksi bidang pertambangan dan migas di Indonesia perlu adanya standarisasi yang bersifat global dikarenakan adanya kuantitas dan kualitas yang berbeda pada masing-masing industri. Explorasi pertambangan memungkinkan kesuksesan atas keberhasilan penemuan cadangan sebesar 80 % sedangkan explorasi dalam bidang migas rasio kesuksesan keberhasilan sangat kecil sehingga perlu diadakan aturan pendanaan yang mendetail pada masing-masing industri tersebut. Paper ini menitik beratkan pada masalah perlunya adanya kajian ulang untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources telah sesuai dengan karakteristik eksplorasi pada masing-masing industri di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan klasifikasi biaya produksi pada bidang pertambangan dan migas.

² Artikel ilmiah ini merupakan hasil penelitian Hibah Fundamental 2015 yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti RI. Tim peneliti menghaturkan terima kasih mendalam atas pendanaan ini kepada Kemenristek Dikti RI dan LPPM UPNVY yang memfasilitasi penelitian ini.

Tim peneliti menghaturkan terima kasih kepada Dr. Sri Suryaningsum, M.Si. (UPNVY) dan Dr. Bambang Jatmiko, M.Si. (UMY) atas telaah dan diskusi mendalam mengenai akuntansi partai politik, serta Elfira, S.E. dan Ristiya Munahazatin, S.T. asisten penelitian ini.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan pendanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan pada masing-masing industri baik dalam industri perminyakan maupun pertambangan. Selanjutnya menelaah dan menganalisa permasalahan yang terjadi, dalam kajian paper ini dalam bidang penerapan IFRS 6 dan PSAK 64 sebagai standarisasi peraturan industri.

PEMBAHASAN

Dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral, eksplorasi sumber daya alam adalah mencari tahu keberadaan suatu objek geologi batubara, mineral maupun akumulasi minyak dan gas bumi, juga gejala geologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia maupun mempunyai dampak negatif, seperti adanya sesar, jenis batuan tertentu yang keberadaannya perlu diketahui secara mendetail.

Tujuan dari eksplorasi adalah menemukan serta mendapatkan sejumlah maksimum dari cebakan mineral ekonomi baru dengan biaya seminimal mungkin dalam waktu seminimal mungkin.

Untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari *IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* telah sesuai dengan karakteristik eksplorasi di Indonesia, maka diperlukan klasifikasi biaya produksi pada bidang pertambangan dan migas.

Produksi Pertambangan

Kegiatan pada perusahaan pertambangan yang diatur berdasarkan SFAS No. 19 yaitu :

1. Tahap eksplorasi

Kegiatan eksplorasi bertujuan untuk mengidentifikasi daerah yang terdapat cadangan mineral untuk di uji dan dibuktikan sumber daya mineral yang terkandung didalamnya.

2. Tahap Pengembangan

Biaya - biaya pengembangan terjadi untuk memperoleh akses kepada cadangan yang dibuktikan dan untuk menyediakan fasilitas - fasilitas untuk mendapatkan batubara tersebut ke permukaan

3. Tahap Produksi

Kegiatan produksi yang dimaksud adalah untuk mengangkat batubara ke atas permukaan dan transportasi batubara tersebut kepada tempat penyimpanannya, kadang - kadang batubara yang dihasilkan memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat mencapai kualitas yang dapat diterima secara umum.

A. Produksi MIGAS (Minyak dan Gas)

Adapun untuk tahap-tahap pelaksanaan kegiatan usaha migas menjadi dua sektor:

1. Sektor Hulu

Tahapan-tahapan khusus tentang regulasi kegiatan usaha hulu migas di Indonesia diatur di Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 dan perubahannya di PP No. 34 Tahun 2005. Adapun mengenai BP Migas sendiri diatur pada PP No. 42 Tahun 2002. Tahapan - tahapan kegiatan usaha perusahaan sektor hulu migas yaitu:

a. Eksplorasi (GnG/geology and geophysics)

Kegiatan awal eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak atau gas bumi. Hal ini dimulai dari survei untuk menemukan cadangan hidrokarbon sampai

dengan pembuktian cadangan migas yang ditemukan. Dalam tahap eksplorasi, dibagi menjadi beberapa bagian antara lain survei geologi, survei geofisika, survei seismik dan melakukan pemboran eksplorasi.

b. Kegiatan Pemboran Sumur

Setelah dilakukan survei diatas, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengeboran sumur eksplorasi dan well logging untuk mengetahui adanya cadangan migas di daerah tersebut dan mengukur tingkat keekonomian cadangan tersebut.

c. Pengembangan Lapangan Migas

Perusahaan akan membuat rencana pengembangan untuk lapangan yang terbukti memiliki cadangan minyak yang ekonomis. Rencana pengembangan lapangan migas tersebut diajukan ke BP Migas dengan menghitung jumlah cadangan, jumlah sumur, produksi perhari dan berapa lama lapangan tersebut berproduksi.

d. Kegiatan Produksi

Setelah rencana kegiatan pengembangan lapangan di setujui oleh BP Migas, maka perusahaan akan melanjutkan ke tahap produksi. Biaya yang termasuk dalam aktivitas pengeboran ini, diantaranya biaya sewa rig, mud, testing, cementing dan biaya pendukung lainnya. Supaya efisien, dalam keberlangsungannya produksi memberikan data dan informasi lebih lengkap sehingga peta cadangan dapat direvisi setiap tahun dengan tingkat keakuratan makin tinggi.

2. Sektor Hilir

Tahapan-tahapan khususnya mengenai regulasi kegiatan usaha hilir migas di Indonesia secara jelas telah diatur di Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 serta perubahannya di PP No. 30 Tahun 2009. Adapun mengenai BPH Migas sendiri diatur pada PP No. 67 Tahun 2002. Adapun secara umum, kegiatan usaha hilir migas yaitu:

a. Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

b. Pengangkutan/ distribusi

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Migas ataupun produk hasil olahannya dapat diangkut menuju user langsung (industri), instalasi/depot, ataupun SPBU/SPBG menggunakan rail tank wagon, pipeline, kapal tanker, maupun truk pengangkut.

c. Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung (floating storage).

d. Perniagaan

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Menurut Sri Suryaningsum, dkk (2008) dalam Profil Kinerja Keuangan Perusahaan Minyak dan Gas Negara – Negara Asean sebagai Landasan untuk Kebijakan Strategis Bagi Pemerintah Indonesia, terlihat bahwa karakteristik biaya

yang ada pada proses eksplorasi antara bidang pertambangan dan migas merupakan hal yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali mengenai standar akuntansi yang digunakan didalamnya,

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 Mengenai Eksplorasi Dan Evaluasi Sumber Daya Mineral

PSAK 64 Tahun 2011 merupakan adopsi dari *IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resource* 2013. IFRS 6 sendiri merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk menentukan apakah kegiatan pertambangan memerlukan standar akuntansi keuangan tersendiri atau bisa menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada. Namun dalam IFRS 6 hanya mengatur aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, sedangkan aktivitas lainnya tidak diatur dalam IFRS 6 (Tunggal, 2008)

Pendekatan konsep yang digunakan dalam IFRS 6 terkait dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral berbeda dengan PSAK 29 yang mengatur mengenai Akuntansi Minyak dan Gas Bumi, serta berbeda pula dengan PSAK 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum. Dalam IFRS 6 hanya mengatur secara umum mengenai biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset. Sedangkan dalam PSAK 29 dijelaskan lebih komprehensif mengenai biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset di dalam suatu negara sebagai pusat biaya (*full cost*) dan diakui sebagai aset untuk sumur yang mempunyai cadangan terbukti (*successful efforts*). Begitu pula dengan PSAK 33 menjelaskan mengenai biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset jika terdapat cadangan terbukti dan belum terdapat cadangan terbukti ketika aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang signifikan masih berjalan.

Menurut Suryaningsum (2011) dalam pelatihan internasional "*Training for Trainer*" IFRS dan penyusunan kamus akuntansi Indonesia, hal-hal yang menyangkut didalam IFRS 6 antara lain mengenai biaya pengembangan. Biaya pengembangan sumber daya mineral merupakan biaya yang dikeluarkan setelah cadangan terbukti sampai dengan dimulainya aktivitas produksi. Perlakuan atas biaya pengembangan tersebut diatur berbeda antara PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral, PSAK 29 mengenai Akuntansi Minyak dan Gas Bumi, dan PSAK 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum. Dalam PSAK 64 biaya pengembangan tidak diatur perlakuannya secara eksplisit tetapi mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan PSAK 19 (revisi 2010) mengenai Aset Tak berwujud. Sedangkan biaya pengembangan dalam PSAK 29 diakui sebagai aset (dikapitalisasi), baik menggunakan *full cost* maupun *successful efforts*; dan dalam PSAK biaya pengembangan diakui sebagai aset (biaya pengembangan yang ditangguhkan).

Biaya pengembangan sebaiknya lebih dijelaskan secara eksplisit, mengingat bahwa pengakuan biaya eksplorasi dan evaluasi sebagai aset tidak mampu menunjukkan kepastian apakah diperolehnya cadangan terbukti. Hal kedua yang terdapat dalam IFRS 6 yaitu mengenai biaya yang dikeluarkan sebelum eksplorasi dan evaluasi antara lain termasuk biaya perizinan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi. Pada PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral tidak ada pengaturan untuk biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi. Sedangkan didalam PSAK 29 biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi merupakan bagian dari biaya eksplorasi yang diakui sebagai aset atau bukan aset sesuai dengan metode *full cost* atau *successful efforts*. Kemudian dalam PSAK 33 biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi merupakan bagian dari biaya eksplorasi yang diakui sebagai beban, kecuali terdapat cadangan terbukti dan belum terdapat cadangan terbukti ketika aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang signifikan masih berjalan maka diakui sebagai aset. PSAK 64 tidak mengatur secara eksplisit atas biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi.

Beberapa perbedaan mendasar antara PSAK 64, PSAK 29, dan PSAK 33 terkait dengan:

- Pengakuan atas biaya eksplorasi dan evaluasi.
- Komponen biaya eksplorasi dan evaluasi.
- Uji penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi.

Pengecualian dalam PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral adalah Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, karena hal tersebut tidak relevan dengan kondisi di Indonesia yang telah memiliki SAK untuk minyak dan gas bumi dan pertambangan umum dan adopsi IFRS 6 tidak akan membawa manfaat jika masih tetap mengizinkan untuk menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya. Secara umum ringkasan pengaturan dalam PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

Perihal	Perlakuan Akuntansi
Ruang Lingkup	Biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral
Pengakuan dan pengukuran awal	Biaya Eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai asset sebesar biaya perolehannya
Pengukuran selanjutnya	Merujuk pada PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap dan PSAK PSAK 19 (revisi 2010): Aset Tak berwujud
Penurunan nilai	Merujuk pada PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset, kecuali terkait dengan penentuan unit penghasil kas untuk tujuan uji penurunan nilai

KESIMPULAN

Kajian ulang untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources dirasa kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Mengingat adanya karakteristik eksplorasi yang berbeda pada masing-masing industri pertambangan dan migas di Indonesia. Terlebih lagi, PSAK 64 merupakan pengganti standar akuntansi sebelumnya yang telah dirasa cukup komprehensif mewakili masing-masing industri pertambangan dan migas, yaitu pada PSAK 29 dan PSAK 33.

Dengan adanya pencabutan PSAK 29 dapat menunjukkan bahwa PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral dirasa kurang bijak karena tidak relevan dengan kondisi di Indonesia yang telah memiliki SAK untuk minyak dan gas bumi dan pertambangan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine. 2013. Perbandingan Standar Akutansi Atas Pertambangan Batubara Antara FASB, IFRS, dan PSAK.

International Financial Reporting Standard. 2003. *International Financial Reporting Standard 6 Exploration for and Evolution of Mineral Resources*. Canada: Willey.

Undang - Undang Republik Indonesia. 1967. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan. Jakarta : Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Tunggal, Amin Widjaja. 2008. *Memahaami International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Jakarta: Harvindo.'

- Suryaningsum, Sri. 2011. Pelatihan Internasional "Training for Trainer" IFRS dan Penyusunan Kamus Akuntansi Indonesia.
- Suryaningsum, Sri. 2012. *The Impact Of International Financial Reporting Standards Prompt Adoption And Earnings Management*. Prosiding: 13th Annual Conference of Asian Academic Accounting Association, Kyoto University.
- Suryaningsum, Sri., Dkk. 2010. Pemetaan Dan Komparasi Empiris Internasional Pada Sektor Industri Energi di Kawasan Asia . Prosiding UNS.
- Suryaningsum, Sri. Dkk. 2009. Studi Empiris Komparasi Profil Kinerja Keuangan Perusahaan Minyak dan Gas: Negara Indonesia dan Malaysia. Jurnal Administrasi Bisnis ISSN 1829-7277. Volume 5, nomor 2.
- Suryaningsum, Sri., Dkk. 2008. Penentuan Indeks Sustainability Reporting (Pelaporan Atas Dampak Lingkungan, Sosial, Dan Ekonomik) Untuk Masing-Masing Sektor Industri (Sebagai Landasan Penelitian Sustainability Reporting Di Indonesia). Hibah insentif Fundamental DIKTI- RI.
- Suryaningsum, Sri., Dkk. 2008. Profil Kinerja Keuangan Perusahaan Minyak Dan Gas Negara-Negara Asean Sebagai Landasan Untuk Kebijakan Strategis Bagi Pemerintah Indonesia. LPPM UPN Veteran Yogyakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral

PENGGARUH BUDAYA ORGANISASI MOTIVASI DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KINERJA KARYAWAN

**Tri Mardiana, FE Manajemen UPNVY
Sucahyo Heriningsih, FE Akuntansi UPNVY**

ABSTRAK

Budaya organisasi, motivasi dan *self efficacy* dapat mengendalikan dan menggerakkan kinerja seseorang untuk melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan berdasarkan tujuan yang akan dicapai, dan bisa menerapkan budaya organisasi yang sudah tersedia untuk dijalankan. Memberikan motivasi kerja kepada karyawan sangatlah penting untuk membangkitkan semangat kerja. Serta *self efficacy* dapat membantu dalam mengatasi masalah yang ada dalam organisasi dengan lebih baik, karena *self efficacy* dapat meningkatkan semangat kinerja. Budaya organisasi motivasi dan *self efficacy*, kinerja seseorang akan semakin meningkat dan menunjukkan progres kerja yang lebih baik. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menerangkan mengenai budaya organisasi, motivasi dan *self efficacy* terhadap Kinerja. Penulisan ini membahas tentang budaya organisasi, motivasi dan *self efficacy* terhadap kinerja. Hal ini diyakini budaya organisasi, motivasi dan *self efficacy* ini sangatlah penting untuk menunjang sebuah kinerja. Dengan adanya itu semua dapat meningkatkan semangat kerja dan karyawan serta memotivasi dalam bekerja.

Kata kunci: budaya organisasi, motivasi, self efficacy, kinerja

A. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan aset yang penting dalam suatu perusahaan karena sumber daya manusia memiliki peranan sebagai pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional pada sebuah perusahaan. Sehingga setiap organisasi harus memperhatikan dan memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik agar organisasi diperusahaan dapat berkembang. Budaya organisasi membedakan satu organisasi dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari cara para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Budaya organisasi mengikat anggota kelompok karyawan menjadi satu kesatuan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan berjalannya waktu, budaya organisasi yang terbentuk dapat memberikan kontribusi bagi suatu organisasi

Budaya perusahaan yang kuat adalah budaya bersama untuk semua tingkatan dalam organisasi. Bila ada diskriminasi atas implementasi nilai-nilai budaya dalam perusahaan, maka keyakinan orang-orang terhadap nilai-nilai inti budaya akan berkurang, dan akibatnya perusahaan akan beroperasi dengan budaya yang tidak sehat, dan lama kelamaan akan menjadi budaya yang lemah dan tidak akan mampu berbagi cerita, keyakinan, tujuan, rencana, bahasa, hasil, dan rasa kepemilikan. Motivasi kerja merupakan suatu keahlian dalam mengarahkan atau mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Gibson (1995:P.185) menjelaskan motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Sedangkan menurut Hamalik (1993:p.72) motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Dalam pemberdayaan pada karyawan di perusahaan harus mampu memotivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja dengan mediasi *self efficacy* yang tepat, sehingga akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi motivasi karyawan adalah budaya perusahaan yang berjalan di perusahaan tersebut. Inti motivasi dan budaya organisasi yaitu dengan adanya dorongan semangat kerja dan pelaksanaan aktivitas karyawan agar dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai perusahaan. Pada artikel ini yang dibahas adalah sebagai berikut, latar belakang, pengertian tentang budaya organisasi, motivasi, *self efficacy*, dan kinerja.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel dilakukan dengan metode pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, hasil penelitian, paper, dan skripsi yang berkaitan dengan budaya organisasi motivasi dan *self efficacy* terhadap kinerja karyawan guna penulisan artikel ini.

C. PEMBAHASAN

1. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi yang ada di perusahaan merupakan pengendali sikap dan perilaku para anggota dalam suatu organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan dalam organisasi, dan juga dapat menjadi faktor kegagalan organisasi. Pada dasarnya seseorang yang berada dalam lingkungan organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, dalam menjalankan aktivitas. Budaya merupakan faktor yang dapat membentuk sikap dan tingkah laku seseorang untuk menjadi pribadi yang baik.

Pengertian budaya organisasi merupakan Wirawan (2007) mendefinisikan, budaya organisasi sebagai norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya. Isi budaya organisasi yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen, dan mencapai tujuan organisasi. Mardiana dan Heriningsih (2014), menjelaskan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan menurut Kreitner dan Kinichi (1995) mendefinisikan budaya organisasi adalah perekat sosial yang yang mengikat anggota dari organisasi. Maksud dari penjelasan Kreitner dan Kinichi adalah karakter yang berbeda-beda dari setiap individu dapat disatukan dalam suatu organisasi. Budaya organisasi dalam suatu perusahaan merupakan sebuah alat untuk mempersatukan seorang individu yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan aktivitas secara bersama-sama. Budaya organisasi merupakan pengendali dalam membentuk sikap dan perilaku individu dalam suatu kegiatan organisasi.

Robbins (1996) ada tujuh karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi, yaitu:

1. Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko.
2. Perhatian ke hal yang rinci. Sejauh mana para karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian.
3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen focus pada hasil bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu.

4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu.
5. Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya individu.
6. Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan bersantai.
7. Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi.

Menurut Schein (1985), budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang ketika mereka belajar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan *eksternal*, dan berintegrasi dengan lingkungan *internal*. Budaya organisasi yang kuat akan menciptakan sebuah komunikasi, dan organisasi yang sehat di perusahaan. Pengembangan budaya organisasi yang sehat dimulai dari sejak perusahaan dibangun. Budaya organisasi yang kuat dapat menciptakan lingkungan kerja yang

2. MOTIVASI

Menurut Hadari Nawawi (2003: 35), menyatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Yang dapat mempengaruhi motivasi kerja, yaitu: uang, pujian, perhatian, persaingan, kebanggaan, kesempatan, kebutuhan, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, keterampilan, masa kerja, dan lain sebagainya. Menurut Susilo Martoyo, (2000) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi adalah atasan, rekan, sarana fisik, kebijakan dan peraturan, imbalan jasa dan non uang, jenis pekerjaan dan tantangan. Karyawan yang telah dimotivasi akan menunjukkan suatu sikap keinginan dan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja, dan sikap inilah yang disebut dengan semangat karyawan dalam bekerja. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan motivasi adalah faktor-faktor dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan atau tantangan dalam bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang diharapkan.

Karyawan yang telah dimotivasi akan menunjukkan suatu sikap keinginan dan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja yang maksimum, dan sikap inilah yang disebut dengan semangat karyawan dalam bekerja. Jadi pada akhirnya karyawan yang telah dimotivasi akan bersemangat dalam bekerja. Jika karyawan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik produktivitas kerja akan meningkat. Jika produktivitas meningkat berarti prestasi kerja karyawan juga meningkat. Dan jika prestasi kerja karyawan meningkat berarti tujuan perusahaan dalam upaya memotivasi dan menerapkan budaya organisasi kepada karyawannya berhasil.

Tujuan dalam memberikan motivasi dalam bekerja terhadap karyawan:

1. Karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan semangat kerja.
3. Berkembangnya persaingan sehat antara karyawan yang lainnya atau tim kerja.
4. Mendorong karyawan untuk berprestasi di lingkungan kerja.

3. SELF EFFICACY

Individu yang nyaman dalam bekerja, memandang tugas yang sulit itu sebagai tantangan yang harus dikuasai dan diselesaikan bukan sebagai tugas sulit yang harus dihindari. Mereka lebih memiliki minat yang besar terhadap kegiatan yang dilakukan, menyusun tujuan yang menantang, dan memelihara komitmen yang kuat untuk mendukung usaha-usaha dalam menghadapi kegagalan. Mereka lebih cepat memulihkan apabila mengalami kegagalan dalam bekerja. *Self efficacy* yang tinggi membantu membuat perasaan tenang dalam menerima tugas dan kegiatan yang sulit. Sebaliknya, orang yang meragukan kemampuan dirinya, mereka bisa percaya bahwa sesuatu itu lebih sulit daripada yang sebenarnya. Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keyakinan terhadap keberhasilan yang selalu dicapai seseorang membuat lebih giat dan selalu menghasilkan kinerja yang terbaik. Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keyakinan terhadap keberhasilan yang selalu dicapai membuat seseorang bekerja lebih giat dan selalu menghasilkan hasil yang terbaik.

Menurut Bandura (1986) menyatakan bahwa ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi *self efficacy*:

1. Pengalaman Keberhasilan (*mastery experiences*)
Keberhasilan yang diperoleh akan meningkatkan *self efficacy* yang dimiliki seseorang sedangkan kegagalan akan menurunkan *self efficacy*-nya. Keberhasilan yang didapatkan dengan hasil kerja keras sendiri, maka akan membawa pengaruh pada peningkatan *self efficacy*-nya.
2. Pengalaman Orang Lain (*vicarious experiences*)
Pengalaman dari keberhasilan orang lain yang memiliki kesamaan dengan individu dalam mengerjakan tugas biasanya akan meningkatkan *self efficacy* seseorang dalam mengerjakan tugas yang sama. *Self efficacy* tersebut didapat melalui sosial model pengetahuan tentang kemampuan dirinya sehingga mendorong seseorang untuk melakukan modeling.
3. Persuasi Sosial (*Social Persuasion*)
Informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara *verbal* oleh seseorang yang berpengaruh dan digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa ia cukup mampu menjalankan tugas yang diberikan.
4. Keadaan fisiologis dan emosional (*physiological and emotional states*)
Kecemasan dan stress yang terjadi dalam diri seseorang ketika melaksanakan pekerjaan sering dianggap sebagai kegagalan. Pada umumnya seseorang cenderung akan mengharapkan keberhasilan dalam kondisi yang tidak tegang dan tidak merasakan adanya gangguan. *Self efficacy* biasanya ditandai oleh rendahnya tingkat stress dan kecemasan sebaliknya *self efficacy* yang rendah ditandai oleh tingkat stress dan kecemasan yang tinggi.

Self-efficacy yang tinggi membantu membuat perasaan tenang dalam mendekati tugas dan kegiatan yang sulit. Sebaliknya, orang yang meragukan kemampuan dirinya, mereka bisa percaya bahwa sesuatu itu lebih sulit daripada yang sesungguhnya. *Self efficacy* merupakan sebuah keyakinan tentang probabilitas bahwa seseorang dapat melaksanakan dengan sukses beberapa tindakan atau masa depan dan mencapai beberapa hasil.

Menurut Chasanah, (2008) menyimpulkan bahwa *Self efficacy* sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepuasan kerja karyawan. Untuk itu perlulah dibentuk *self efficacy* yang tinggi, yaitu dengan cara pihak manajemen menerapkan sistem penilaian terhadap hasil kerja individu artinya jika dalam melakukan pekerjaan diselesaikan oleh suatu team maka penilaian tidak hanya diberikan kepada team tersebut melainkan juga kepada individu yang berada pada team tersebut. Orang yang

percaya diri dengan kemampuannya cenderung untuk berhasil, sedangkan orang yang selalu merasa gagal cenderung untuk gagal. *Self efficacy* berhubungan dengan kinerja dimana jika seseorang memiliki *self efficacy* yang tinggi maka cenderung untuk berhasil dalam tugasnya sehingga meningkatkan kepuasan atas apa yang dikerjakannya.

4. KINERJA

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang akan dicapai nantinya. Dengan adanya informasi mengenai kinerja pada perusahaan, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. Waldman (1994) berpendapat bahwa kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi.

Masrukhin dan Waridin, 2006 mengatakan bahwa secara garis besar, kinerja dapat dipahami sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan menurut Ostroff, (1992) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kinerja karyawan mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Pengelolaan untuk mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Neal Jr (2004) evaluasi kinerja diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yaitu:

1. Mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan.
2. Mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan.
3. Untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan.
4. Untuk membuat organisasi lebih produktif.
5. Untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai.
6. Untuk memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan

D. KESIMPULAN

Motivasi adalah faktor-faktor dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan atau tantangan dalam bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Budaya perusahaan yang kuat adalah budaya bersama untuk semua tingkatan dalam organisasi. Bila ada diskriminasi atas implementasi nilai-nilai budaya dalam perusahaan, maka keyakinan orang-orang terhadap nilai-nilai inti budaya akan berkurang, dan akibatnya perusahaan akan beroperasi dengan budaya yang tidak sehat, dan lama kelamaan akan menjadi budaya yang lemah dan tidak akan mampu berbagi cerita, keyakinan, tujuan, rencana, bahasa, hasil, dan rasa kepemilikan. Motivasi kerja merupakan suatu keahlian dalam mengarahkan atau mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Gibson (1995:P.185) menjelaskan motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. *Self-efficacy* yang tinggi membantu membuat perasaan tenang dalam mendekati tugas dan kegiatan yang sulit. Sebaliknya, orang yang meragukan kemampuan dirinya, mereka bisa percaya bahwa sesuatu itu lebih sulit daripada yang sesungguhnya. *Self efficacy* merupakan sebuah

keyakinan tentang probabilitas bahwa seseorang dapat melaksanakan dengan sukses beberapa tindakan atau masa depan dan mencapai beberapa hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1986). "Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory". Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Chasanah, Nur. (2008). "Analisis Pengaruh Empowerment, Self Efficacy Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada Karyawan PT. Mayora Tbk Regional Jateng dan DIY)". Tesis. Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.
- Gibson, James L., Ivancevich, Donnelly, Jr. (1995). "Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses". Edisi I. Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Hamalik, Oemar. (1993). "Psychologi Manajemen". Tri Gendakarya. Bandung.
- Kreitner, Robert, Kinichi, Angelo. (1995). "Organizational Behavior". Third Edition, Printed in The United State of America: Richard D. Irwin Inc.
- Mardiana, Tri. dan Heriningsih, Suchyo. (2014). "Pengaruh Motivasi Dan Budaya Organizational Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Self Efficacy". Proposal Penelitian Hibah Fundamental. Kemenristek & Dikti RI
- Masrukin dan Waridin. (2006). "Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai". EKOBIS, Vol. 7, No. 2.
- Nawawi, Hadari. (2003). "Manajemen Sumber Daya Manusia". PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Neal, J. R. (2004). "Panduan Evaluasi Kinerja Karyawan (Wawan Setiawan, Trans)". Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ostroff, C. (1992). "The Relationship Between Satisfaction Attitudes and Performance anOrganization Level Analysis", *Journal of Applied Psychology*, Vol.77, No. 68.
- Robin, Stephen P. (1996). "Organizational Behavior". Concept, Controversies. Aplitation 7th ed. Prentice Hall, Englewood.
- Schein, Edgar H. (1985). "Organizational Culture and Leadership". San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Susilo, Martoyo. (2000). "Manajemen Sumber Daya Manusia". Edisi Ketujuh. BPFE. Yoyakarta.
- Waldman, David A., (1994). " The Contribution of Total Anality Management to aTheory of Work performance". *Academy of Management Review*. Vol 19 No.3, pp 210-536.
- Wirawan. (2007). "Budaya dan Iklim Organisasi". Jakarta: Salemba Empat.

**KUALITAS LAYANAN *ONLINE* DAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL
MEDIASI PENGARUH *PERCEIVED EASE OF USE* DAN *PERCEIVED
USEFULNESS* TERHADAP *e-LOYALTY***

(Survey pada Pelanggan *Online Furniture* dan *Handycraft* Produk UKM DIY)

**Surpiko Hapsoro Darpito
Danang Yudhiantoro**

A b s t r a c t

The aim of this paper is to investigate the impact of perceived ease of use and perceived usefulness on perceived service quality and trust on customer satisfaction and loyalty in e-commerce settings. Data analytical technique uses SEM with sample 118 responders who ever bought furniture and handycraft product of Small and Medium Size Enterprise (SMEs) which becomes member of Asmindo Komda DIY and other online media. Empirical results indicate that the perceived ease of use and perceived usefulness has positive direct effects on trust. The results also show that service quality have not direct effect on customer satisfaction, while customer satisfaction have direct positive effects on loyalty. Thus, both service quality and trust play an imperative role in creating customer loyalty as suggested by many authors. Some theoretical and managerial implications and suggestions for future research are also provided.

Keywords: satisfaction, perceived ease of use, perceived usefulness, service quality, trust, loyalty

PENDAHULUAN

Strategi bisnis dengan menggunakan *Customer Relationship Management* (CRM) banyak terkait dengan strategi bisnis yang lain, seperti teknologi. *Technology Acceptance Model* (TAM) memberikan informasi atau hasil yang sangat umum saja tentang minat dan perilaku pemakai sistem dalam menerimasistem teknologi informasi. TAM hanya menjelaskan alasan mengapa pemakai menggunakan system, yaitu keyakinan akan kemudahan (*perceived ease of use*) dan keyakinan akan kemanfaatan (*perceived usefulness*). Sehingga pada penelitian ini peneliti tertarik dan ingin menguji pengaruh variabel TAM terhadap pembelian melalui media online yang di medasi variabel kualitas layanan dan kepercayaan. Sedangkan menurut David (2010:486), e- CRM adalah memanfaatkan teknologi komunikasi *digital* untuk memaksimalkan penjualan untuk pelanggan yang ada dan terus mendorong penggunaan layanan *online*.

Seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia, bisnis *online* juga meningkat. Namun Usaha Kecil Menengah (UKM) belum tergarap sepenuhnya. Faktor minimnya edukasi masyarakat akan internet menjadi salah satu kendala. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 17 juta UKM yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 75 ribu UKM yang memiliki *website*. Sehingga UKM belum sepenuhnya meraih kesempatan pasar di dunia digital. Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan baru-baru ini terhadap 200 pelaku UKM di Indonesia, rata-rata 29% dari pendapatan mereka per tahun diperoleh dari transaksi *online*.

TINJAUAN PUSTAKA

TAM (*Technology Acceptance Model*)

Perceived Ease of Use menurut Davis *et al.* (1989) mendefinisikan *percieved ease of use* sebagai keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana *user* percaya bahwa teknologi/sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan peng-gunaan. Davis *et al.* (1989) memberikan beberapa indikator

percieved ease of use: ease of learn, controllable, clear and understandable, flexible, ease to become skillful, ease to use.

Percieved Usefulness menurut Davis *et al.* (1989) mendefinisikan *percieved usefulness* sebagai keyakinan akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana *user* percaya bahwa penggunaan teknologi/sistem akan meningkatkan performa mereka dalam bekerja. Ekspektasi kinerja (*performance expectancy*) didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan *percieved usefulness*, motivasi ekstrinsik, job fit, keuntungan relatif (*relative advantage*)

Kualitas Layanan (*Online Service Quality*)

Kualitas biasanya tidak ditentukan oleh satu atribut atau dimensi tunggal dari suatu produk atau jasa, tetapi ditentukan oleh beberapa atribut. David Garvin (1988) memperkenalkan subyek kualitas yang diterapkan pada produk system informasi dan telah mengidentifikasi delapan dimensi yang berbeda. Dimensi-dimensi tersebut terdiri dari: 1) Kinerja, 2) Features, 3) Keandalan, 4) Kesesuaian, 5) Daya Tahan, 6) Kemudahan Perbaikan, 7) Keindahan, 8) Persepsi terhadap Kualitas. Menurut SERVQUAL bahwa kualitas layanan dibagi menjadi 5 dimensi, sedangkan jika dikombinasikan maka kualitas layanan web menurut Lee dan Lin (2005) dapat dilihat 5 dimensi juga yaitu *website design, reliability, responsiveness, trust, dan personalization.*

Kepercayaan (*Trust*)

Beberapa indikator kepercayaan konsumen pada transaksi online adalah 1) *Technology Orientation* Besarnya kepercayaan konsumen terhadap sistem elektronik berkaitan dengan besarnya kepercayaan mereka terhadap *online banking* (Lee dan Turban 2001). Ketika konsumen memperkirakan faktor kepercayaan, beberapa persoalan muncul dalam pikiran mereka dan salah satu persoalan tersebut adalah kesesuaian kemampuan dari sistem elektronik tersebut dengan harapan konsumen (Mukherjee dan Nath 2003). 2) *Reputation* Reputasi (*reputation*) adalah keseluruhan kualitas atau karakter yang dapat dilihat atau dinilai secara umum oleh masyarakat (Malaga 2001). Ketika konsumen memproses informasi dalam *online transaction*, mereka akan mempertimbangkan reputasi website yang menyediakan layanan tersebut (Mukherjee dan Nath 2003) dimana reputasi adalah faktor yang sangat penting dari kepercayaan. 3) *Perceived Risk* Besarnya persepsi konsumen mengenai resiko mempengaruhi besarnya kepercayaan mereka terhadap *online transaction* tersebut sehingga ketika memproses informasi *online*, konsumen sering menganggap bahwa ada resiko yang tinggi walaupun resiko tersebut sebenarnya rendah (Mukherjee dan Nath 2003).

Kepuasan (*Satisfaction*)

Perasaan senang atau kecewa merupakan hasil membandingkan harapan konsumen dengan produk yang ditawarkan (Kotler, 2003). Hal tersebut memperlihatkan bahwa konsumen memperlibatkan emosinya saat membeli sebuah produk yang mereka inginkan. Sedangkan menurut Dutka (1994) kepuasan konsumen dikaitkan dengan tingkat dimana terdapat kesesuaian antara produk dan harapan konsumen. Jadi pada dasarnya, *satisfaction* itu merupakan perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja aktual yang dirasakan. Indikator dalam *satisfaction* secara universal menurut Dutka (1995) adalah: *attributes related to the product, attributes related to service, and attributes related to purchase.*

Kepuasan konsumen merupakan hal yang penting bagi para konsumen untuk mempercayai sebuah toko yang telah lama diminati. Kemudian menurut Dutka (2011) mengatakan bahwa konsumen yang memperlihatkan berbagai pengalaman saat memakai produk atau jasa terhadap sebuah perusahaan yang dapat memenuhi harapan mereka. Sama halnya kepuasan konsumen menurut Anderson, *et al* (1994) adalah sebuah pengalaman

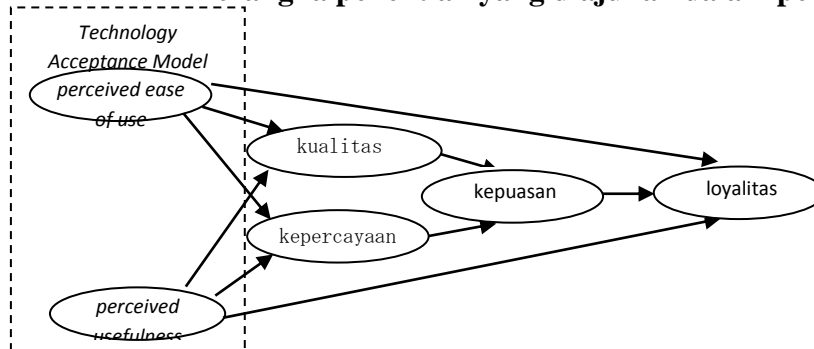
yang dirasakan konsumen ketika membeli sebuah produk pada perusahaan yang pernah dibeli olehnya. Sehingga dari pengalaman yang dirasakan tersebut, konsumen yang puas akan berniat untuk melakukan pembelian ulang (Alam, 2010).

Loyalitas penggunaan internet dalam berbelanja (*e-loyalty*)

Hasil penelitian empiris Norizan M. Kassim and Nor Asiah Abdullah (2008) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung positif pada kepuasan dan kepercayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki efek langsung yang positif pada kepercayaan, sedangkan kedua kepuasan pelanggan dan kepercayaan memiliki efek positif langsung terhadap loyalitas melalui word-of-mouth dan niat. Dari penelitian lain yang telah dilakukan oleh Jeon, Myunghee (mindy) (2009) menunjukkan bahwa kualitas layanan jasa situs web, meliputi FUNC (*Website Functionality*), CE Aspects (*Customer Experiential*) dan dimensi-dimensi REP (*Reputation*), secara langsung berpengaruh terhadap persepsi kualitas layanan situs web penginapan (*lodging website*). Kualitas layanan secara langsung mempengaruhi keseluruhan kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan akan menimbulkan niat kembali menggunakan situs web. Pada akhirnya, mempengaruhi kesetiaan pelanggan di satu situs web penginapan. Sedangkan hasil penelitian Cathy S. Lin, Sheng Wu dan Kaohsiung, Taiwan, R.O.C, (2002), menunjukkan bahwa variabel antesenden berkontribusi dalam penggunaan situs portal dan semua itu mempengaruhi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*.

Gambar 1

Rerangka penelitian yang diajukan dalam penelitian ini



Sumber : diadopsi dan dimodifikasi dari Davis et al. (1989), Gefen (2002), Cathy S. Lin, Sheng Wu dan Kaohsiung, Taiwan, R.O.C, (2002), Norizan M. Kassim and Nor Asiah Abdullah (2008) dan Jeon, Myunghee (mindy) (2009)

Dari beberapa penelitian di atas diajukan sembilan hipotesis dan rerangka penelitian (Gambar 1) sebagai berikut:

H1: *perceived ease of use* berpengaruh langsung terhadap loyalitas, H2: *perceived ease of use* berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan, H3: *perceived ease of use* berpengaruh langsung terhadap kepercayaan, H4: *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap loyalitas, H5: *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap kepercayaan, H6: *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan, H7: kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan, H8: kepercayaan berpengaruh langsung terhadap kepuasan, H9: kepuasan berpengaruh langsung terhadap loyalitas

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah berbelanja furniture dan handycraft produk UKM anggota Asmino Komda DIY, Toko Online, dan web milik pribadi yang menjual secara *online* di Yogyakarta. Sedangkan sampel adalah sebagian dari anggota populasi tersebut, yaitu sebagian konsumen yang pernah berbelanja produk UKM secara *online* di Yogyakarta. Menurut Hair *et al.* (2006) untuk analisis

multivariat ukuran sampel disarankan 100-200. Oleh karena itu, ukuran sampel dalam penelitian ini peneliti tentukan secara *judgment* pribadi sebagaimana pendapat Hair *et al.* di atas, yaitu sebanyak 118 orang. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*; artinya sampel ditentukan atau dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu calon sampel untuk menjadi sampel (Sekaran, 2003). Kriteria-kriteria responden adalah konsumen yang pernah berbelanja lebih dari satu kali furniture dan handycraft produk UKM pada web Asmindo Komda DIY, Toko Online, dan web milik pribadi yang menjual secara *online* di Yogyakarta.

Adapun variabel-variabel dan indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

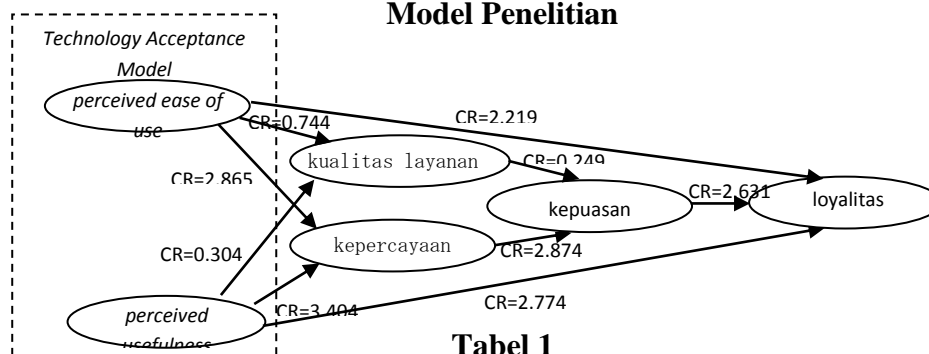
Percieved Ease of Use menurut Davis *et al.* (1989) memberikan beberapa indikator *percieved ease of use: ease of learn, controllable, clear and understandable, flexible, ease to become skillful, ease to use.* *Percieved Usefulness* menurut Davis *et al.* (1989) memberikan beberapa indikator *percieved usefulness, yaitu work more quickly, job performance, increase productivity, makes job easier, useful.* Kepuasan menurut Dutka (1995) adalah: *attributes related to the product, attributes related to service, and attributes related to purchase.* Kualitas layanan menurut SERVQUAL bahwa kualitas layanan dibagi menjadi 5 dimensi, sedangkan jika dikombinasikan maka kualitas layanan web menurut Lee dan Lin (2005) dapat dilihat 5 dimensi juga yaitu *website design, reliability, responsiveness, trust, dan personalization.* Kepercayaan menurut Lau dan Lee (1999) dalam membentuk kepercayaan konsumen pada merek ada 3 faktor utama yaitu : karakteristik merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik hubungan merek dan konsumen. Menurut Mukherjee dan Nath (2003) kepercayaan dapat diukur melalui *technology orientation, reputation dan perceived risk.* Sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan adalah *technology orientation, reputation dan perceived risk.* Loyalitas menurut Cheng *et al.* (2005) mengembangkan indikator pembelian berulang sebagai berikut: 1. selalu menggunakan internet banking untuk keperluan perbankan, 2. menggunakan internet banking untuk menyelesaikan transaksi perbankan, 3. saya menggunakan sendiri internet banking untuk menyelesaikan transaksi perbankan saya sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini lokasi penelitian pada UKM industri furniture dan kerajinan yang berada di Bantul yaitu PT Timboel, Sleman adalah PT Jawa Furni Lestari, dan Kota Yogyakarta adalah CV Palem Craft.

Pada Gambar 2 Hasil pengujian *goodnees of fit* menunjukkan bahwa model hipotetik didukung oleh data empirik, atau model menunjukkan nilai kesesuaian yang baik. Model teoritis pada kerangka konseptual penelitian, dikatakan *fit* jika didukung oleh data empirik. Hasil pengujian *goodnees of fit overall model* digunakan untuk mengetahui apakah model hipotetik didukung oleh data empirik. Hasil komputasi AMOS untuk model SEM ini dihasilkan indeks-indeks *goodnees of fit* seperti diberikan pada Tabel 1.

Gambar 2
Model Penelitian



Tabel 1

Pengujian *Good of Fit Model*

<i>Goodness of Fit</i>	Hasil Perhitungan	<i>Cut-off Value</i>	Keterangan
X ² -Chi-Square	276.545	Diharapkan kecil	Baik
Probability	0.003	>0.05	Baik
CMIND/DF	0.213	<2.00	Baik
GFI	0.901	>0.90	Baik
AGFI	0.887	>0.90	Marginal
TLI	0.902	>0.90	Baik
CFI	0.916	>0.90	Baik
RMSEA	0.021	<0.08	Baik

Sumber : data primer yang diolah (2015)

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian berupa hubungan antar variabel yang diuji dengan cara melihat uji secara partial masing-masing variabel. Untuk menerima hipotesis alternatif bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dinilai dari nilai C.R. Hipotesis alternatif diterima apabila nilai C.R > 2 (Ferdinand, 2000).

H1: *perceived ease of use* berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Hasil analisis untuk menguji apakah *perceived ease of use* berpengaruh terhadap loyalitas diperoleh nilai CR=2.219 atau C.R > 2. Hal ini berarti bahwa *perceived ease of use* berpengaruh positif terhadap loyalitas. Hasil ini mendukung penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, Agarwal dan Prasad (1999) menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara *perceived ease of use* dengan *perceived usefulness*. Penelitian yang lainnya menunjukkan hasil yang signifikan mengenai pengaruh *perceived ease of use* dalam penggunaan teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung pada *perceived usefulness* (Davis et al., 1989; Hu et al., 1999; Jackson et al., 1997; Venkatesh, 1999, 2000; Venkatesh and Davis, 1996, 2000; Venkatesh and Morris, 2000). Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Chau dan Lai (2003) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan internet banking. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian H1 dapat diterima.

H2: *perceived ease of use* berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *percieved ease of use* tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan, karena nilai *critical ratio* 0.744 kurang dari 2. Penelitian sebelumnya Cathy S. Lin, Sheng Wu dan Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. (2002) menguji kualitas layanan sebagai variabel yang mempengaruhi *perceived ease of use*. Hasil penelitiannya adalah kualitas layanan berpengaruh langsung signifikan positif terhadap *perceived ease of use*. Sedangkan Jeon, Myunghee (mindy) (2009) menguji pengaruh *perceived ease of use* berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan dan hasilnya berpengaruh signifikan positif. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian H2 tidak dapat diterima.

H3: *perceived ease of use* berpengaruh langsung terhadap kepercayaan. Berdasarkan pengujian hipotesis, telah dibuktikan terhadap pengaruh positif dari variabel *perceived ease of use* terhadap *trust*, artinya semakin baik *perceived ease of use*, maka *trust* juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam penggunaan bisa menyebabkan konsumen menjadi semakin percaya terhadap situs website. Menurut hasil survey yang dilakukan mayoritas responden percaya kepada situs CV Palembang, PT Timboel dan PT Jawa Furni Lestari, karena situsnya mudah dipahami oleh para konsumen. Dengan situs yang menarik, itu bisa membuat para konsumen percaya terhadap situs dan produk-produk UKM tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chao Wen, Victor dan Chenyan (2011) yang memberikan hasil penelitian

bahwa variabel *perceived ease of use* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *trust*. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian H3 dapat diterima.

H4: *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan akan kemanfaatan (*perceived usefulness*) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, karena nilai *critical ratio* 2.774 lebih besar dari 2. Hal ini berarti bahwa peningkatan keyakinan akan kemanfaatan berpengaruh pada peningkatan loyalitas konsumen dalam menggunakan media on line dalam berbelanja. Mengacu pada TAM, kemauan atau maksud untuk menerima atau memakai teknologi baru, ditentukan oleh persepsi kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) dari teknologi. Dalam penelitian mengenai TAM kaitannya dengan pelayanan elektronik melalui internet (*e-Service*), Gafen dan Straub (2003) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara persepsi kemudahan penggunaan dengan Persepsi manfaat, dan hubungan positif antara persepsi manfaat dengan kemauan untuk membeli. Dalam penelitian ini loyalitas (*e-Loyalty*) menggantikan sikap atau keinginan untuk membeli sebagai variabel dependen dalam hubungannya dengan TAM. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian H4 dapat diterima.

H5: *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap kepercayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap kepercayaan, karena nilai *critical ratio* 3.404 lebih besar dari 2, sehingga hipotesis 5 diterima, artinya bahwa *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap kepercayaan. Berdasarkan studi empiris dari Al-Somali *et al.* (2008) yang mengambil subyek penelitian di Saudi Arabia, menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi sikap pengguna dari *internet banking*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Saudi Arabia yang terpilih secara acak. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian H5 dapat diterima.

H6: *perceived usefulness* berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *perceived usefulness* tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan, karena nilai *critical ratio* 0.304 kurang dari 2, sehingga hipotesis 6 tidak diterima, artinya bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. Hasil penelitian Cathy S. Lin, Sheng Wu dan Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. (2002) menguji kualitas layanan sebagai variabel yang mempengaruhi *perceived usefulness*. Hasil penelitiannya adalah kualitas layanan berpengaruh langsung signifikan positif terhadap *perceived usefulness*. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian H6 tidak dapat diterima.

H7: kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan, karena nilai *critical ratio* 0.249 lebih kecil dari 2. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian empiris Norizan M. Kassim and Nor Asiah Abdullah (2008) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung positif pada kepuasan dan kepercayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak berperan sebagai variabel mediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas. Dari beberapa penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh langsung signifikan positif terhadap loyalitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan konsumen masih rendah yang disebabkan karena banyak web yang dimiliki beberapa UKM tidak di update, tampilan web tidak menarik dan secara keseluruhan kualitas layanan, dukungan IT dan SDM masih rendah. Penelitian sebelumnya (Gefen 2002, Van Riel *et al.* 2004, Wolfenbarger dan Gilly 2003, Zeithaml *et al.* 2002) menunjukkan bahwa dalam menciptakan kepuasan, dimensi desain website penting karena langsung berhubungan dengan user interface. Ini dimensi SERVQUAL nyata termasuk konten, organisasi dan struktur situs yang secara visual menarik dan menyenangkan mata.

H8: kepercayaan berpengaruh langsung terhadap kepuasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh langsung terhadap kepuasan, karena nilai *critical ratio* 2.874 lebih besar dari 2, sehingga hipotesis 8 diterima, artinya Hasil penelitian empiris Norizan M. Kassim and Nor Asiah Abdullah (2008) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung positif pada kepuasan dan kepercayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki efek langsung yang positif pada kepercayaan, sedangkan kedua kepuasan pelanggan dan kepercayaan memiliki efek positif langsung terhadap loyalitas melalui word-of-mouth dan niat. Dengan demikian, baik kepuasan dan kepercayaan memainkan peran penting dalam menciptakan loyalitas pelanggan seperti yang disarankan oleh banyak penulis.

H9: kepuasan berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh langsung terhadap loyalitas, karena nilai *critical ratio* 2.631 lebih besar dari 2, sehingga hipotesis 9 diterima, artinya semakin tinggi kepuasan konsumen akan meningkatkan loyalitas. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Gommans *et al.* dalam Billy Bai *et al.* (2008:394) *e-loyalty* didasari oleh proposisi nilai, *brand building*, kepercayaan dan keamanan, *website* dan teknologi, dan layanan pelanggan. Di dalam konteks *e-commerce*, *e-satisfaction* dan kepercayaan berdampak pada *e-loyalty*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di tahun kedua ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh langsung terhadap kepuasan, sehingga loyalitas konsumen dalam berbelanja menggunakan media online pada penelitian ini lebih dipengaruhi oleh kualitas layanan tanpa melalui kepuasan pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan konsumen pengguna web di beberapa UKM masih rendah yang disebabkan antara lain karena web yang dimiliki UKM kebanyakan tidak di update, tampilan web tidak menarik dan secara keseluruhan kualitas layanan, dukungan IT dan SDM masih rendah. 2). Dalam penelitian ini *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan. Sedangkan beberapa penelitian yang lain menunjukkan bahwa kualitas layanan sebagai antecedent variabel mempengaruhi *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*. Dukungan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini masih lemah, sehingga untuk penelitian yang akan datang dukungan teori yang lebih mendalam sangat diperlukan guna menguji pengaruh *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* yang berdampak pada kualitas layanan online (*e-qual*) khususnya pada UKM, 3). *Perceived ease of use* dan *perceived usefulness* mempengaruhi kepercayaan konsumen dan secara langsung juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang akhirnya pelanggan loyal dalam menggunakan media online untuk berbelanja. Kepercayaan pelanggan dapat dibangun dengan menyampaikan fitur produk dan layanan. Informasi produk dalam web misalnya produk terdaftar dan terstandar secara lokal maupun internasional sedangkan layanan dibangun dengan layanan yang terintegrasi dengan asosiasi legal dan formal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1). UKM diharapkan lebih meningkatkan pemanfaatan TI untuk mendorong peningkatan kualitas layanan unit usaha kecil dan menengah. Bagaimanapun UKM dengan kadar pemahaman teknologi mempunyai kemungkinan memanfaatkan TI secara ekstensif. Oleh karena itu penggunaan teknologi berbasis informasi merupakan langkah penting bagi para pengelola UKM dalam memasuki MEA 2015, maka peningkatan skill dan pemahaman terhadap TI bagi para pengambil keputusan/top manajer unit usaha kecil dan menengah adalah merupakan syarat mutlak untuk mencapai efisiensi dan efektivitas unit usaha kecil dan menengah. 2). Pengembangan model TAM untuk penelitian yang akan datang agar

menguji pengaruh variabel kualitas layanan online terhadap *e-loyalty* yang dimediasi oleh *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cathy S. Lin , Sheng Wu dan Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. 2002, *Exploring the Impact of Online Service Quality on Portal Site Usage*, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences.
- David, Fred R. 2010. *Strategic Management : Manajemen Strategis Konsep*. Edisi Kedua Belas. Salemba Empat, Jakarta
- Davis, F.D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use of Information Technology. *Management Information System Quarterly*, 13(3): 319-340.
- Gefen, D., Karahanna, E. & Straub, D.W. 2003. Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model. *Management Information System Quarterly*, 27(1): 51-90.
- Jeon, Myunghee (mindy), 2009. "Impact of perceived website service quality on customer e-loyalty on a lodging website". *Graduate Theses and Dissertations*. Paper 11068.
- Lee, G and lin, F (2005). *Consumer perceptions of e-service quality in online shopping*. *International Journal of retail and distribution management* vol 33 no2 p161-176.
- Norizan M. Kassim and Nor Asiah Abdullah (2008) Customer Loyalty in e-Commerce Settings: An Empirical Study, *Electronic Markets* Volume 18 (3): 275-290. www.electronicmarkets.org

LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Oleh:

Sujatmika, Marita

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jln. SWK Lingkar Utara 104 Yogyakarta, Indonesia

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jln. SWK Lingkar Utara 104 Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Laporan keuangan partai politik sangat bervariasi, memiliki susunan yang berbeda antara satu partai dengan yang lain. Setiap partai politik menyusun laporan keuangan sesuai dengan kehendaknya. Padahal sesungguhnya sudah ada pedoman untuk menyusun laporan keuangan, yaitu yang terangkum dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Partai politik memiliki beberapa cara dan langkah untuk memperkuat diri, meyakinkan masyarakat yang ada untuk mengikutinya, menjadi pemilih partai tersebut pada masa pemilihan kelak. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan kondisi partai, menyampaikan secara terbuka laporan keuangan partai politik kepada publik. Jika masyarakat luas mengetahui kondisi partai beserta keadaan keuangan partai melalui laporan keuangan tersebut, diharapkan publik mendapat keyakinan untuk memilih partai politik tersebut.

Akuntabilitas keuangan partai politik terutama yang berkenaan dengan sumber pendanaan dan penggunaan bantuan dana partai merupakan sesuatu hal yang harus diimplementasikan. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat akan tingginya pengeluaran operasional partai politik, sementara sumber pendanaan yang legal tidak begitu memadai. Hal ini harus sangat diperhatikan, untuk menghindari politikus dalam suatu partai politik mencari sumber pendanaan tambahan, berupa pendanaan ilegal.

Keywords: Laporan Keuangan, Partai Politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai politik menurut Budiarto (1989) adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kewajibannya di antara lain pembuatan laporan keuangan. Namun demikian, tak jarang kita temui laporan keuangan partai politik yang bervariasi, memiliki susunan yang berbeda antara satu partai dengan yang lain. Setiap partai politik menyusun laporan keuangan sesuai dengan kehendaknya. Padahal sesungguhnya sudah ada pedoman untuk menyusun laporan keuangan, yaitu yang terangkum dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Hal-hal yang menjadi aspek penilaian suatu partai di antaranya transparansi, akuntabilitas serta kredibilitasnya. Aspek-aspek tersebut merupakan pilar utama demokrasi yang menjadi elemen penghubung antara pemerintah dan rakyat. Aspek-aspek tersebut juga berpengaruh sangat besar bagi kepercayaan publik terhadap partai politik. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai sarana pembandingan akan kemajuan yang telah didapat dan hal-hal yang harus dicapai pada masa mendatang. Laporan keuangan digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan demikian, pengaruh mereka dapat lebih besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik yang dicanangkan bersama oleh para anggota yang membentuknya (Darwis, 2014).

Sumber utama keuangan partai politik diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan yang diberikan kepada partai politik oleh anggota masyarakat, perusahaan dan badan lainnya, serta oleh Pemerintah. Partai politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing. Sebagai sebuah organisasi nirlaba yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha.

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif. Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum.

Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan Pemilihan Umum bagi partai politik seperti yang dijelaskan oleh Radikun, Muslim, Kuncoro (2008)

Laporan Keuangan

Pencatatan mengenai keuangan suatu organisasi atau perusahaan merupakan wujud dari laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 (IAI, 2004), laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu,osiasi atau organisasi bisnis. Laporan keuangan merupakan pencatatan transaksi dan ringkasan dan pelaporan yang dapat memberikan informasi bagi pemakai. Laporan keuangan dibuat secara berkala, dalam periode tertentu yang sudah ditentukan, untuk mengetahui situasi keuangan

suatu perusahaan. Laporan itu juga mampu sebagai pembanding perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Sehingga dapat sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan keputusan perusahaan.

Laporan Keuangan Partai Politik

Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sesungguhnya sudah memiliki pedoman. Pedoman pembuatan laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PSAK khususnya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 (revisi 2011) yaitu mengenai Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan pada tanggal 8 April 2011, menggantikan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997.

Aturan-aturan partai politik membatasi jumlah sumbangan dan sumber sumbangan dan mewajibkan melaporkan seluruh penyumbang kepada publik. Hal-hal seperti ini tidak diatur dalam undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba (misalnya UU Yayasan). Partai politik memerlukan suatu standar akuntansi khusus partai politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan keuangan dan pengukuran-pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan.

Keuangan yang dimiliki partai politik berasal dari beberapa sumber. Dasar mengenai kebijakan yang menyangkut akan sumber keuangan partai politik daitur dalam UU No. 31 Tahun 2002 dan mengalami revisi menjadi UU No. 2 Tahun 2008. Namun demikian, undang-undang yang baru tersebut malah melonggarkan peraturan sumber keuangan partai politik. Dalam undang-undang tersebut memang dilakukan pembedaan sumber penyumbang, ada penyumbang perseorangan anggota partai politik dan ada pula penyumbang perseorangan bukan anggota partai politik, namun jenis jenis penyumbang non-anggota partai ini tidak dibatasi besaran sumbangannya.

Akuntabilitas partai politik

Secara umum akuntabilitas (*accountability*) dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas lembaga publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat.

Akuntabilitas keuangan partai politik terutama yang berkenaan dengan sumber pendanaan dan penggunaan bantuan dana partai merupakan sesuatu hal yang harus diimplementasikan. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat akan tingginya pengeluaran operasional partai politik, sementara sumber pendanaan yang legal tidak begitu memadai. Hal ini harus sangat diperhatikan, untuk menghindari politikus dalam suatu partai politik mencari sumber pendanaan tambahan, berupa pendanaan ilegal.

Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilihan umum adalah penyampaian laporan-laporan yang bersangkutan dengan partai politik. Laporan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik, diperiksa oleh KPU serta terbuka untuk diakses publik. Selain menekan potensi kecurangan dalam penggalangan dana, standarisasi laporan keuangan partai politik juga bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi rakyat untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional.

Transparansi laporan keuangan partai

Semua partai politik diwajibkan oleh pemerintah untuk menyusun serta mengumumkan laporan keuangannya kepada publik. Laporan tersebut berisikan jumlah sumbangan dan daftar sumbangan yang diterima partai. Keterbukaan partai politik meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang dapat merangsang akan terjadinya persaingan politik sehat, memiliki toleransi dan kebijakannya dibuat berdasarkan atas preferensi masyarakat.

Informasi mengenai keuangan partai politik hendaknya disajikan secara terbuka bagi publik. Hal ini didasari oleh adanya peraturan yang secara khusus mengatur akan hal itu. Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Lebih mendalam hal ini dibahas dalam pasal 15, yaitu mengenai informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KESIMPULAN

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkeadilan. Demokrasi berkeadilan ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif. Demokrasi berkeadilan ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum. Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan Pemilihan Umum bagi partai politik seperti yang dijelaskan oleh Radikun, Muslim, Kuncoro (2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. Halaman: 59.
- Darwis, Danial. 2014. <http://politik.kompasiana.com/2014/01/09/partai-politik-di-indonesia-dan-permasalahan-permasalahan-yang-dihadapinya-626793.html> (diakses pada 21 Februari 2015)
- Dubnick, Melvin. J. *Orders of Accountability*. at World Ethics Forum Leadership, Ethics and Integrity in Public Life 9-11 April 2006, Keble College, University of Oxford, UK 2006.
- Hafild, Emmy. "Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik". ISBN 979-9381-35-5. Jakarta: Transparency International Indonesia. 2008.
- Harahap, Sofyan S. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi Kesatu*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat. 2004.
- Ismawan, Riswandha. *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati, Mencari Jati Diri* (diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada dalam Rangka Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada 4 September 2004 di Yogyakarta). 2004.
- Lansford, Tom. *Democracy: Political System of World*. Marshall Cavendish. ISBN978-0-7614-2629-5. 2007.
- Munawir. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Radikun, dkk. 2008. *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*.
- Sinclair, A. "The Chameleon of Accountability: Forms and Disclosures". dalam *Accounting Organizations and Society*, 20 (2&3): 219-237. 1995.
- UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2002.
- UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008.
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagai Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1999.

AUDITOR DAN IFRS

Oleh:
Lita Yulita Fitriani
Sri Suryaningsum

Abstrak

Adopsi IFRS merupakan fenomena baru karena dilakukan oleh Indonesia tahun 2012, sehingga dua tahun ini laporan keuangan disajikan dalam fenomena yang baru. Fenomena adopsi IFRS ini penting untuk diteliti, karena karakteristik IFRS yang sangat berbeda dengan dengan karakteristik standar domestik sebelumnya. Karakteristik IFRS berbasis prinsip, sedangkan karakteristik standar domestik sebelumnya adalah berbasis aturan. Penelitian ini menduga terjadinya perubahan orientasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manager.

Paper ini merupakan suatu rancangan proposal dalam skema Hibah Desentralisasi Hibah Bersaing yang didanai oleh Kemenristek Dikti – RI. Paper ini dianggap penting karena hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi dalam menemukan arah orientasi atas perilaku manager dalam melakukan manajemen laba akibat fenomena adopsi IFRS yang dilakukan Indonesia tahun 2012. Teori baru tersebut adalah apakah terjadi perubahan praktik manajemen laba dari praktik berbasis akrual ataukah berubah menjadi praktik berbasis aktivitas real.

Temuan hasil penelitian ini akan mampu dan sangat layak dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah terakreditasi dan diseminarkan dalam forum ilmiah tingkat nasional maupun internasional.

Kata kunci: adopsi IFRS, perilaku manager dalam hal manajemen laba, praktik berbasis akrual, praktik berbasis aktivitas real

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Orientasi penelitian ini adalah kemutakhiran dalam menganalisis fenomena adopsi IFRS. Adopsi IFRS dilakukan oleh Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menduga terjadinya perubahan orientasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manager. Dugaan ini berdasarkan karakteristik IFRS yang sangat berbeda dengan dengan karakteristik standar domestik sebelumnya. Karakteristik IFRS berbasis prinsip, sedangkan karakteristik standar domestik sebelumnya adalah berbasis aturan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh adopsi IFRS terhadap perilaku manager dalam melakukan manajemen laba. Pertanyaan besar dalam riset ini adalah: Apakah karakteristik IFRS yang berbasis prinsip lebih membuat manager melakukan manajemen laba aktivitas real?

Tim peneliti telah lebih dahulu melakukan dua penelitian awal berkaitan dengan penerapan standar lokal yang dasarnya adalah berbeda dengan IFRS. Fitriani 2011 meneliti tentang nilai perusahaan pada saat menggunakan standar lokal. Fitriani 2008 meneliti kinerja perusahaan pada saat menggunakan standar lokal. Dalam hal khusus manajemen laba, tim peneliti telah lebih dahulu melakukan dua penelitian awal berkaitan dengan manajemen laba. Tahun 2008-2009 dalam riset hibah fundamental yang dibiayai oleh LPPM UPNVY, Sujatmika dan Suryaningsum. (2009) melakukan riset deteksi manajemen laba aktivitas real untuk pada perusahaan-perusahaan sektor industri consumer goods. Sujatmika dan Suryaningsum (2010) melanjutkan risetnya dengan pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba

aktivitas real. Kedua riset ini dilakukan pada saat Indonesia masih menggunakan standar lokal yang mengacu pada standar akuntansi Amerika.

Tujuan jangka panjang penelitian ini sangat penting yaitu untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan penemuan penelitian ini. Hasil penelitian ini akan memberikan arah untuk penelitian-penelitian selanjutnya berkaitan dengan adopsi IFRS.

Target khusus penelitian ini adalah menemukan teori baru berkaitan dengan perubahan orientasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manager akibat adopsi IFRS yang dilakukan Indonesia tahun 2012. Dengan adanya temuan ini akan sangat penting dalam hal membuat kebijakan untuk pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dan regulasi.

Metode yang akan digunakan adalah menemukan basis praktik manajemen laba. Basis praktik manajemen laba ini akan dilakukan berdasarkan karakteristik standar akuntansi domestik sebelum adopsi dan berdasarkan karakteristik adopsi IFRS. Temuan basis praktik manajemen laba ini akan diuji secara statistik dengan alat analisis uji beda untuk membandingkan basis praktik manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi IFRS tahun 2012. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2009 s.d. tahun 2013, yang dipecah menjadi dua kelompok yaitu tahun 2010-2011 dan kelompok tahun 2012-2013.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi dalam menemukan teori baru atas perilaku manager dalam melakukan manajemen laba akibat fenomena adopsi IFRS yang dilakukan Indonesia tahun 2012. Teori baru tersebut adalah apakah terjadi perubahan praktik manajemen laba dari praktik berbasis akrual ataukah berubah menjadi praktik berbasis aktivitas real.

Temuan hasil penelitian ini akan mampu dan sangat layak dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah terakreditasi dan diseminarkan dalam forum ilmiah tingkat nasional maupun internasional.

b. Tujuan Khusus Penelitian

1. Hasil penelitian ini menjadi dasar bangunan teori yang peneliti dapatkan dan akan dimantapkan dengan pengujian model dampak ekonomik dan dampak sosial pada penelitian tahap selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini menjadi dasar bangunan teori basis manajemen laba akibat adopsi IFRS.
3. Mempublikasikan dan membuat buku serta menseminarkan hasil-hasil penelitian berkaitan dengan praktik manajemen laba akibat adopsi IFRS.
4. Menemukan dampak karakteristik IFRS sebagai suatu standar akuntansi. negara-negara.

Dengan adanya temuan ini akan sangat penting dalam hal membuat kebijakan untuk pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dan regulasi.

c. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal teori basis manajemen laba akibat adopsi IFRS.
- Menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan karakteristik basis manajemen laba akibat adopsi IFRS.
- Tujuan jangka panjang penelitian ini sangat penting yaitu untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan penemuan penelitian ini. Hasil penelitian ini akan memberikan arah untuk penelitian-penelitian selanjutnya berkaitan basis manajemen laba akibat adopsi IFRS.

TINJAUAN PUSTAKA

a. State of the art

Dalam hal penggunaan standar lokal Fitriani 2011 meneliti tentang nilai perusahaan pada saat menggunakan standar lokal. Fitriani 2008 meneliti kinerja perusahaan pada saat menggunakan standar lokal. Peneliti juga telah lebih dahulu melakukan dua penelitian awal berkaitan dengan manajemen laba. Tahun 2008-2009 dalam riset hibah fundamental yang dibiayai oleh LPPM UPNVY, Sujatmika dan Suryaningsum. (2009) melakukan riset deteksi manajemen laba aktivitas real untuk pada perusahaan-perusahaan sektor industri consumer goods. Sujatmika dan Suryaningsum (2010) melanjutkan risetnya dengan pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba aktivitas real. Kedua riset ini dilakukan pada saat Indonesia masih menggunakan standar lokal yang mengacu pada standar akuntansi Amerika. Standar lokal memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan standar akuntansi yang diadopsi Indonesia tahun 2012, yaitu IFRS. Salah satu karakteristik yang berbeda tersebut adalah IFRS berbasis prinsip dan standar lokal/domestik adalah berbasis aturan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh adopsi IFRS terhadap perilaku manager dalam melakukan manajemen laba. Pertanyaan besar dalam riset ini adalah: Apakah karakteristik IFRS yang berbasis prinsip lebih membuat manager melakukan manajemen laba aktivitas real?

Adopsi IFRS dan Manajemen Laba Berbasis Aktivitas Real

Manajemen laba dilakukan dengan bermacam teknik. Teknik-teknik dalam melakukan manajemen laba antara lain akrual (Jones, 1991), manipulasi aktivitas real (Rochowdhury, 2006), pendapatan diskresioner (Stubben, 2010), penstrukturan transaksi (Marquardt dan Wiedman, 2005), dan penggantian klasifikasi (McVay, 2006). Kebanyakan penelitian manajemen laba hanya memfokuskan pada teknik manajemen laba berbasis akrual, oleh karena itu sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan melakukan manajemen laba melalui aktivitas real, selain akrual menurut Cohen dan Zarowin (2010), McVay (2006), Roychowdhury (2006), Zang (2005)

Penelitian mengenai manajemen laba berbasis aktivitas real dikemukakan oleh Roychowdhury (2006). Roychowdhury (2006) membuat model untuk mendeteksi manipulasi aktivitas real dengan menguji aliran kas operasi (CFO), kos produksi, dan biaya diskresioner. CFO merupakan aliran kas operasi yang dilaporkan dalam laporan aliran kas. Kos produksi didefinisikan sebagai jumlah dari COGS dan perubahan dalam persediaan selama periode tersebut. Biaya diskresioner didefinisikan sebagai jumlah dari biaya iklan, R&D, dan biaya administrasi & umum serta biaya penjualan. Selanjutnya Roychowdhury (2006) menggunakan ukuran tersebut untuk mendeteksi manipulasi aktivitas real di sekitar batas laba yang mendekati nol dengan menguji apakah ada nilai yang abnormal dari ketiga variabel tersebut. Roychowdhury (2006) menemukan bahwa perusahaan mencoba untuk menghindari rugi dengan menawarkan diskon yang besar yang ditunjukkan oleh peningkatan penjualan yang bersifat temporer, melakukan overproduksi untuk menurunkan kos barang terjual (COGS), dan mengurangi pengeluaran diskresioner secara agresif untuk meningkatkan margin, selain itu juga menemukan bahwa praktik ini akan berkurang ketika investor semakin pandai. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen melakukan manipulasi aktivitas real adalah keanggotaan industri, cadangan persediaan dan piutang, kesempatan tumbuh, dan adanya utang. Manajemen laba real dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan manajemen yang menyimpang dari praktik bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba (Cohen dan Zarowin, 2010; Roychowdhury, 2006).

METODE PENELITIAN

Orientasi perilaku manager diproksi dengan manajemen laba yang digunakannya. Penghitungan proksi manajemen laba ini akan menunjukkan kecenderungan manager tersebut dalam melakukan manajemen labanya, yaitu apakah manager tersebut memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba akrual ataukah manager tersebut memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba aktivitas real.

Tahun penelitian adalah enam tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Periode ini akan dibagi menjadi dua yaitu tahun 2009 sd 2011 dan periode tahun 2012 sd 2014.

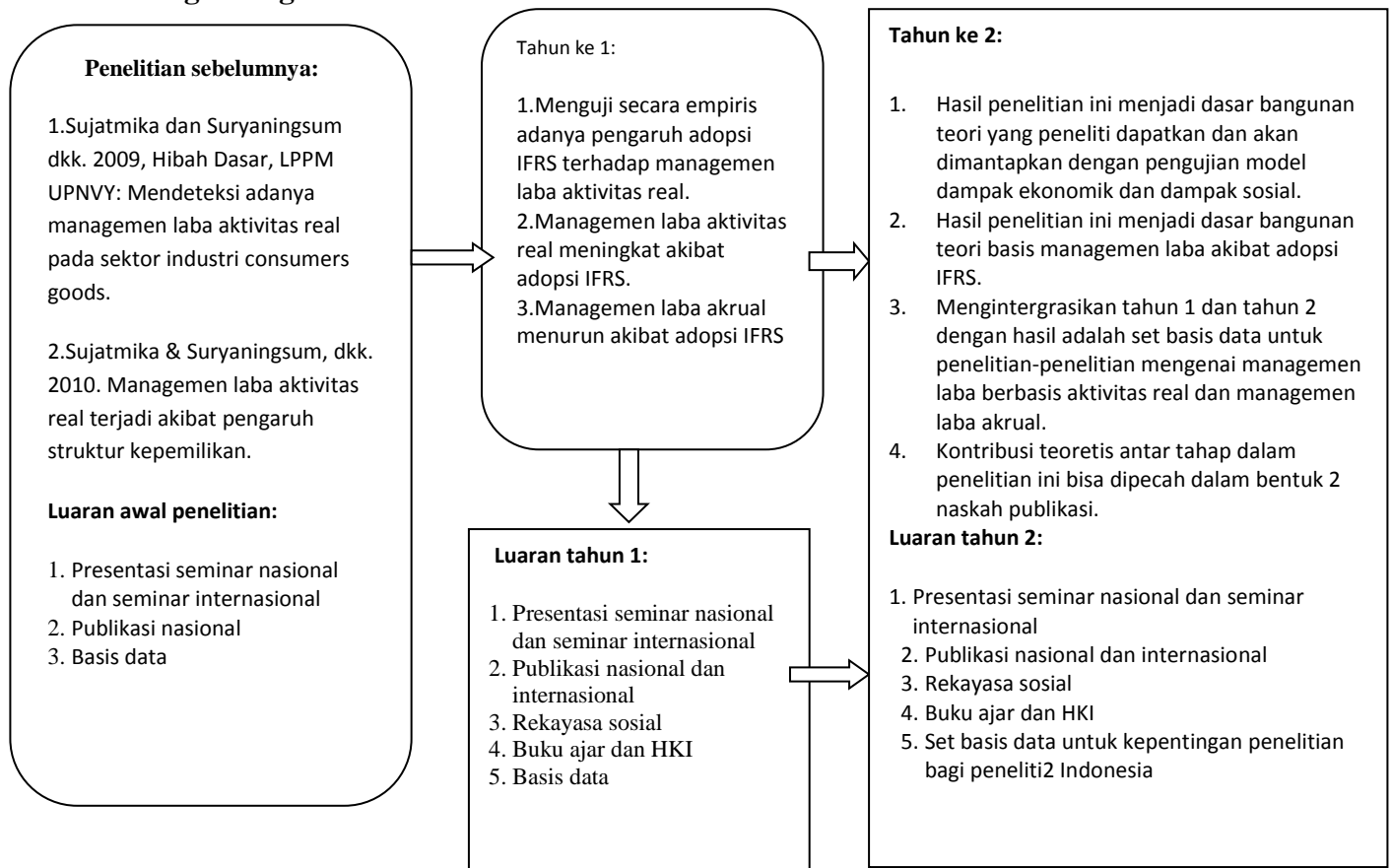
1. Periode tahun 2009 sd 2011 adalah periode dimana belum melakukan adopsi IFRS. Periode tahun ini akan dihitung kecenderungan manager melakukan manajemen labanya apakah manajemen laba akrual ataukah memiliki kecenderungan manajemen laba aktivitas real.
2. Periode tahun 2012 sd 2014 adalah periode dimana sudah melakukan adopsi IFRS. Periode tahun ini juga akan dihitung kecenderungan manager melakukan manajemen labanya apakah manajemen laba akrual ataukah memiliki kecenderungan manajemen laba aktivitas real.

Populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah jumlah proporsional berdasarkan sektor industrinya.

Rancangan tahun 1 dalam Hibah Bersaing yang diajukan ini adalah pada tahun 1 akan memfokuskan pada **dampak adopsi IFRS terhadap manajemen laba aktivitas real**. Hasil penelitian tahun 1 ini menjadi dasar bangunan teori yang peneliti dapatkan dan akan dimantapkan dengan penelitian tahun ke 2.

Rancangan tahun 2 dalam Hibah Bersaing yang diajukan ini adalah pada tahun 2 akan memfokuskan pada **dampak ekonomik dan dampak sosial akibat adopsi IFRS**. Hasil penelitian ini menjadi dasar bangunan teori basis manajemen laba akibat adopsi IFRS. Berikut ini adalah bagan kegiatan dan luaran penelitian untuk dua tahun.

Bagan Kegiatan Tahun 1 dan tahun 2:



SIMPULAN

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh adopsi IFRS terhadap perilaku manager dalam melakukan manajemen laba. Pertanyaan besar dalam riset ini adalah: Apakah karakteristik IFRS yang berbasis prinsip lebih membuat manager melakukan manajemen laba aktivitas real?

Paper ini merupakan suatu rancangan proposal dalam skema Hibah Desentralisasi Hibah Bersaing yang didanai oleh Kemenristek Dikti – RI. Paper ini dianggap penting karena hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi dalam menemukan arah orientasi atas perilaku manager dalam melakukan manajemen laba akibat fenomena adopsi IFRS yang dilakukan Indonesia tahun 2012. Teori baru tersebut adalah apakah terjadi perubahan praktik manajemen laba dari praktik berbasis akrual ataukah berubah menjadi praktik berbasis aktivitas real.

Temuan hasil penelitian ini akan mampu dan sangat layak dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah terakreditasi dan diseminarkan dalam forum ilmiah tingkat nasional maupun internasional.

PUSTAKA ACUAN

- Ahmed, S.A., Neel, M., & Wang, D. (2010). Does mandatory adoption of IFRS improve accounting quality? Preliminary evidence. Working Paper, Texas A&M University.
- Burgstahler, D. and M. Eames. 2006. Management of earnings and analysts' forecasts to achieve zero and small positive earnings surprises. *Journal of Business, Finance & Accounting* 33: 633–652.
- Burgstahler, D., and I. Dichev. 1997. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. *Journal of Accounting and Economics* 24: 99–126.
- Capkun, V., Cazavan-Jeny, A., Jeanjean, T., & Weiss, L.A. (2010). Setting the bar: Earnings management during a change in accounting standards. AAA Annual Meeting.
- Capkun, Vedran. Collins, Daniel W. Jeanjean, Thomas. Does Adoption of IAS/IFRS Deter Earnings Management?. Working Paper. Version of 2-2-12. Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1850228>
- Caylor, R. 2009. Strategic revenue recognition to achieve earnings benchmarks. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Chen, KH; Shimerda, TA, 1981, "An Empirical Analysis of Useful Financial Ratio," *Financial Management*. pp.51-60.
- Christensen, H.B., Lee, E., & Walker M., (2008). Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption? AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1013054>
- Cohen, A. Zarowin, Daniel Paul. 2010. Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings, *Journal of Accounting and Economics*. 50. (2-19)
- Fitriani, Lita Yulita. 2011. Peran Kepemilikan Saham atas Hubungan Corporate Social Responsibility dengan Nilai Perusahaan. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol.6, No.1, Juni 2011. ISSN 1907-1442.
- Fitriani, Lita Yulita. 2008. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol. 3, No.1, Juni 2008. ISSN 1907-1442
- Foster, G., 1986, *Financial Statement Analysis*. Prentice-Hall International Edition, Second Edition.

- Givoly, D. & Hayn, C. (2000). The changing time series properties of earnings, cash flows, and accruals: has financial reporting become more conservative? *Journal of Accounting and Economics*, 29, 287-320.
- Gordon, E.A., B.N. Jorgensen, and C.L. Linthicum. 2008. Could IFRS Replace US GAAP? A Comparison of Earnings Attributes and Informativeness in the US Market. Working paper.
- Hail, L., C. Leuz, and P. Wysocki. 2009. Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the United States: An Analysis of Economic and Policy Factors. Working paper, University of Pennsylvania.
- Hayn, C. 1995. The Information Content of Losses. *Journal of Accounting and Economics* 20:125-153.
- Healy, P. and J. Wahlen. 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard-setting. *Accounting Horizons* 13: 365–383.
- Holthausen, Robert W. 2009. Accounting Standards, Financial Reporting Outcomes, and Enforcement. *Journal of Accounting Research*. Vol. 47 No. 2 May 2009 Printed in U.S.A. DOI: 10.1111/j.1475-679X.2009.00330.x. pp 447-458.
- Horrigan, JO, 1987, "Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis," *The Accounting Review*. Pp.558-567.
- International Accounting Standards Board. 2010. The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010. IASB, London.
- Jones, J. 1991. Earnings management during import relief investigations. *Journal of Accounting Research* 29: 193–228.
- Kang, S., and K. Sivaramakrishnan. 1995. Issues in testing earnings management and an instrumental variable approach. *Journal of Accounting Research* 33: 353–367.
- Kusuma, Indra Wijaya. 2010. IFRS: Implikasi pada Dunia Usaha dan Perangkat Pendukung. Makalah Seminar. 16 Desember 2010.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R.. (2000, January). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 58, 3-27.
- Land, J., and M. Lang. 2002. Empirical Evidence on the Evolution of International Earnings. *The Accounting Review* 77: 115-134.
- Leuz, C. (2003). IAS versus US GAAP: Information-asymmetry based evidence from Germany's new market, *Journal of Accounting Research*, 41, 445–472.
- Leuz, C., and R. Verrecchia. 2000. The Economic Consequences of Increased Disclosure. *Journal of Accounting Research* 38: 91-124.
- Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. *Journal of Financial Economics*, 69, 505–27.
- Leuz, Christian. (2010). Different approaches to corporate reporting regulation: how jurisdictions differ and why. *Accounting and Business Research*. Vol. 10. No.3 (229-256)
- Marquardt, C., and C. Wiedman. 2004. How are earnings managed? An examination of specific accruals. *Contemporary Accounting Research* 21: 461–491.
- McVay, Sarah Elizabeth. 2006. Earnings management using classification Shifting: an examination of core earnings and special items. *The Accounting Review*. Vol. 81. No.3. (501-531)..
- Roychowdhury, S.. (2006). Earning management through real activities manipulation. *Journal of Accounting & Economic*, 42, 335-370.
- Sari, Ratna Candra. Warsono, Sony. Suryaningsum, Sri. Does investor protection affect the choice of earnings management methods through real activity manipulation and accrual manipulation? Asian comparison. 2010. *Journal of Modern Accounting and Auditing*. Vol. 6. Nomor 6. June. (1-13)

- Saudagaran, S. M. & Diga, J. G.. (2000). The institutional environment of financial reporting regulation in ASEAN. *The International Journal of Accounting*, 35, 1-26.
- Schipper, K. (2005). The introduction of international accounting standards in Europe: Implications for international convergence. *European Accounting Review*, 4,1-25.
- Schipper, K. 2003. Principles-Based Accounting Standards. *Accounting Horizons* (March): 61-72.
- Scholes, M., G. Wilson, and M. Wolfson. 1990. Tax planning, regulatory capital planning, and financial reporting strategy for commercial banks. *Review of Financial Studies* 3: 625–650. *Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management* 717
- Sony, Warsono. ChandraSari, Ratna. Suryaningsum, Sri. 2008. *Does Investor Protection Prevent Earnings Management Activity Through Real Activity Manipulation?Asian Comparison. Prosiding SNA 11*. Pontianak.
- Stubben, S. 2010. Discretionary revenues as a measure of earnings management. *The Accounting Review*. Vol. 85. No.2. (695-717).
- Sujatmika. Suryaningsum, Sri. Wardani, Indra K. Model Deteksi Manipulasi Aktivitas Riil Atas Arus Kas Operasi (Studi Empiris Untuk Sektor Industri Consumers Goods Di Negara-Negara Kawasan Asean). 2009. *Laporan Penelitian Hibah Dasar. LPPM UPNVY*.
- Sujatmika. Sri Suryaningsum. 2010. Pengujian Implikasi Kepemilikan Saham Komparasi Empiris Untuk Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Dan Vietnam Pada Sektor Industri Consumer Goods. *Laporan Penelitian Dasar UPNVY*.
- Suryaningsum, Sri. Siti Anis Hartati. Marita. Hafsa. Arif Wibawa. Kinerja Sektor Industri Energi Dan Profil Negara Pada Ekonomi Indonesia Dan Vietnam. *Jurnal Berkala Akuntansi (forthcoming, 2010)*.
- Suryaningsum, Sri. 2009. Implementasi Model *Corporate Supply Chain* Dalam Gcg Terhadap Kualitas Laba Dengan *Overall Country Risk* Sebagai Proteksi Investor (Komparasi Empiris Negara-Negara Asean). *Laporan Akhir Hibah Doktor*.
- Suwardjono. 2009. *Teori Akuntansi: Perlukah dalam Program Pendidikan Akuntansi?* Kumpulan Artikel Seminar Lokakarya Teori CGCG. Edisi Elektronik. www. Suwardjono.com
- Tendeloo Van, B., & Vanstraelen, B. (2005). Earnings management under German GAAP versus IFRS. *European Accounting Review*, 14, 155-180.
- The fourth Global Public Policy Symposium. *White paper: principles-based accounting standard*, January 2008.
- Van Tendeloo, B. and A. Vanstraelen. 2005. Earnings Management under German GAAP versus IFRS. *European Accounting Review* 14:1, 155-180.
- Yulita. Lita. F., Suryaningsum Sri. ORIENTASI PERILAKU MANAGER DALAM MELAKUKAN MANAGEMEN LABA ATAS FENOMENA ADOPSI IFRS DI INDONESIA. 2014. Proposal Hibah Bersaing. Kemenristek Dikti RI.

KONFLIK PERAN GANDA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN WANITA

Anis Siti Hartati, FE Manajemen UPNVY
Tri Mardiana, FE Manajemen UPNVY

ABSTRAK

Ibu rumah tangga seringkali menghadapi tuntutan-tuntutan yang dirasakan tidak seimbang dengan kemampuan yang dimilikinya, tuntutan-tuntutan itu bisa membuat seorang wanita pekerja mengalami stres dalam bekerja. Jika seorang wanita bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama, maka ia memiliki kontrak psikologi terhadap perusahaan atau dengan kata lain wanita yang bekerja akan memiliki komitmen terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Ketika wanita yang bekerja memiliki komitmen terhadap perusahaan pastinya ia selalu dituntut untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang karyawan akan tetapi di sisi lain ia memiliki tanggung jawab terhadap keluarga sebagai ibu rumah tangga. Apabila tanggung jawab terhadap pekerjaan dan keluarga tidak diimbangi maka pastinya akan terjadi konflik peran ganda dalam kehidupan wanita yang bekerja. Stres kerja dapat dipengaruhi dengan adanya konflik peran ganda. Konflik peran ganda disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kedua peran yaitu seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dan wanita yang bekerja diluar rumah, pada saat yang bersamaan seorang wanita dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin.

Kata kunci: konflik, peran ganda, stres, kinerja

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya dunia kerja lebih mengakui atau mengapresiasi kinerja lelaki dibandingkan dengan kinerja perempuan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan pesat, menyebabkan semakin berkurangnya sekat-sekat yang memisahkan antara pria dan wanita untuk bekerja. Menjadi seorang wanita karir menjadi dambaan setiap wanita, wanita mandiri yang mempunyai pekerjaan, berpenghasilan dan memiliki jabatan di suatu perusahaan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep emansipasi wanita, yang menempatkan wanita untuk dihargai dan diapresiasi setara dengan kinerja pria. Sesuai dengan kodratnya sebagai seorang ibu dan istri, tenaga kerja wanita memiliki sebuah konflik peran ganda. Kodrat wanita yang utama yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga yang berbakti pada suami dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan peran wanita saat ini bertambah menjadi wanita pekerja.

Tuntutan tugas di rumah dianggap sang ibu melebihi sumber daya yang dimilikinya karena semua tugas rumah tangga dikerjakan seorang diri yang mana membutuhkan keterampilan, waktu, dan tenaga banyak. Ibu yang bekerja tidak dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga maka akan menimbulkan tekanan sehingga mengakibatkan ibu tersebut sering marah-marah kepada keluarga, kurangnya perhatian terhadap keluarga, cepat merasakan lelah, dan lain-lain. Tuntutan pekerjaan yang berlebihan bisa membuat seseorang tertekan dan mengalami stres. Pekerjaan yang menyebabkan seseorang tertekan dan mengalami stres seperti; pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan *deadline*.

Stres yang dialami oleh ibu rumah tangga dan bekerja diluar rumah terjadi karena sang ibu menilai bahwa tugasnya membawa kerugian pada dirinya sehingga dirasakan membebani oleh seorang ibu yang bekerja. Setiap orang dalam hidupnya mempunyai satu harapan untuk lebih baik dari pada waktu sekarang dan untuk dalam mencapai cita-citanya dibutuhkan suatu usaha agar dapat mewujudkannya. Menjadi seorang wanita karir menjadi dambaan setiap wanita, wanita mandiri yang mempunyai pekerjaan, berprestasi dan memiliki jabatan di suatu perusahaan.

Pada artikel ini akan membahas mengenai pengaruh konflik peran ganda dan stres kerja terhadap kinerja, dengan pembahasan pengertian konflik peran ganda, stres dan kinerja. Penulisan ini bertujuan untuk menjadi masukan dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antara peran ganda dengan stres dan kinerja.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel dilakukan dengan metode pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, hasil penelitian, paper, dan skripsi yang berkaitan konflik peran ganda dan stres kerja terhadap kinerja karyawan guna penulisan artikel ini.

C. PEMBAHASAN

1. KONFLIK PERAN GANDA

Konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir mempunyai permasalahan dalam memenuhi tuntutan peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita bekerja diluar rumah dan warga masyarakat. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan kerja di rumah tangga dan tempat kerja dapat menimbulkan konflik peran ganda yang dialami oleh wanita. Luthans (2001: 407) menjelaskan peran didefinisikan sebagai suatu posisi yang memiliki harapan yang berkembang dari norma yang dibangun. Individu yang terlibat dalam peran ganda bisa menghadapi pilihan perilaku yang rumit. Konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir dapat menyebabkan hambatan dalam bekerja. Bila tidak ingin seperti itu disarankan sebaiknya wanita tersebut tidak berprinsip sebagai seorang wanita super yang sanggup melakukan semua pekerjaan sendiri.

Menurut Fisher, (2001:143- 170) Konflik peran juga akan muncul disaat seorang karyawan menunjukkan harapan yang tidak sesuai sehingga membuatnya sulit atau secara efektif tidak mungkin sesuai dengan harapan pihak lain. Konflik peran ini terjadi ketika kehidupan rumah tangga seseorang berbenturan dengan tanggung jawabnya di tempat kerja, seperti waktu kerja, tugas harian ditempat kerja, dan kerja lembur. Dan juga tuntutan dalam kehidupan rumah tangga yang menghalangi seorang ibu untuk meluangkan waktu untuk pekerjaannya.

Seorang wanita karir tidak dapat menyelesaikan konflik yang dapat menyebabkan hasil kinerja negatif misalnya kurang konsentrasi, kurang motivasi bekerja yang disebabkan urusan keluarga. Konflik akibat peran ganda yang dimiliki oleh wanita dapat menyebabkan tingkat stres kerja yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan perempuan.

Stoner et al. (1990) menyatakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik peran ganda, yaitu:

1. *Time pressure*, semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka semakin sedikit waktu untuk keluarga.
2. *Family size* dan *support*, semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak konflik, dan semakin banyak dukungan keluarga maka semakin sedikit konflik.

3. Kepuasan kerja, semakin tinggi kepuasan kerja maka konflik yang dirasakan semakin sedikit.
4. *Marital and life satisfaction*, ada asumsi bahwa wanita bekerja memiliki konsekuensi yang negatif terhadap pernikahannya.
5. *Size of firm*, yaitu banyaknya pekerja dalam perusahaan mungkin saja mempengaruhi konflik peran ganda seseorang.

2. STRES KERJA

Stres yang dialami seorang ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah terjadi karena seorang ibu menilai bahwa tugas di luar rumah membawa kerugian pada dirinya sehingga merasa terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Penilaian seorang ibu terhadap tugas rumah tangga menentukan derajat stres yang dirasakannya. Di sisi lain stres yang dialami oleh karyawan juga dapat memberikan sebuah motivasi untuk memberikan rasa semangat dalam menjalankan setiap pekerjaannya untuk mencapai prestasi kerja yang baik untuk karir karyawan dan untuk kemajuan perusahaan.

Menurut Davis dan Newstrom (1996) menyatakan stres sebagai bentuk kondisi yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang terjadi ditempat kerja merupakan hasil reaksi emosi akibat kegagalan individu beradaptasi di lingkungan kerja dimana terjadi ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan. Sedangkan Robbin (2006) menjelaskan bahwa stres adalah suatu kondisi yang dinamis dalam mana seseorang individu dihadapkan pada suatu peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan individu tersebut dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Stres adalah kondisi seseorang yang dipengaruhi oleh emosi, perasaan tertekan dan cemas akan suatu keadaan yang sedang dihadapi ditempat kerja maupun diluar tempat kerja.

Stres yang tidak dapat diatasi dengan baik akan berakibat pada ketidak mampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun diluarnya. Artinya karyawan yang mengalami stres akan menghadapi berbagai gejala negatif yang pada gilirannya berpengaruh pada prestasi kerjanya.

Menurut Hendrix, Spencer & Gibson (1994) terdapat beberapa macam stres yang dihadapi oleh wanita, yaitu:

1. Wanita pekerja dipengaruhi oleh sumber stres yang biasanya dihadapi oleh laki-laki seperti beban kerja yang berlebihan, *overskills*, *underutilization skills*, kebosanan kerja, hubungan dengan pasangan dan anak, dan masalah keuangan.
2. Sumber stres yang kedua ini bersifat unik dan berasal dari pekerjaannya atau di luar pekerjaan. Yang berasal dari pekerjaan misalnya; kebosanan, rendahnya tingkat kekuasaan, permintaan tinggi dalam pekerjaan pekerjaan, dan sedikitnya promosi yang diberikan perusahaan

Leontaridi dan Ward (2002) menyatakan bahwa stres kerja dapat disebabkan oleh faktor lingkungan kerja seperti tekanan kerja yang berat, manajemen yang tidak sehat dan hubungan yang buruk dengan karyawan lainnya. Gejala stres ditempat kerja dapat diamati dari perilaku para karyawan, antara lain : kepuasan kerja yang rendah, kinerja yang menurun, semangat kerja menghilang, kurangnya kreativitas, keputusan yang jelek, serta banyak melakukan pekerjaan yang tidak produktif.

3. KINERJA

Menurut As'ad (2004: 46) mendefinisikan kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Ostroff (1992), menerangkan dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja karyawan mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Asumsi diatas didasarkan pada individu yang dapat memuaskan kebutuhannya dengan cara mencapai apa yang menjadi tujuannya dan dapat memberi kontribusi bagi organisasi untuk meraih tujuan. Kinerja merupakan kondisi yang diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang akan dicapai nantinya. Kinerja adalah hasil kerja yang akan dicapai seseorang atau sekumpulan orang di organisasi yang sesuai tanggung jawab pekerjaan masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Gibson, (1986) ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seorang individu:

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (*reward system*).

Kinerja merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas yang dikerjakan. Penilaian kinerja sistem yang digunakan untuk menilai apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan dan sesuai dengan prosedur. Sebuah perusahaan atau organisasi memiliki tingkatan pekerjaan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Semakin tinggi tingkatan pekerjaan tersebut maka akan semakin tinggi pula tanggungjawab dan imbalan yang akan diterima karyawan

D. KESIMPULAN

Konflik peran ganda disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kedua peran yaitu seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dan wanita yang bekerja diluar rumah. Kinerja adalah hasil kerja yang akan dicapai seseorang atau sekumpulan orang di organisasi yang sesuai tanggung jawab pekerjaan masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Stres adalah kondisi seseorang yang dipengaruhi oleh emosi, perasaan tertekan dan cemas akan suatu keadaan yang sedang dihadapi ditempat kerja maupun diluar tempat kerja. Stres yang tidak dapat diatasi dengan baik akan berakibat pada ketidak mampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun diluarnya. Artinya karyawan yang mengalami stres akan menghadapi berbagai gejala negatif yang pada gilirannya berpengaruh pada prestasi kerjanya. Kinerja merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas yang dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, M. (2004). "Psikologi Industri", Seri Umum. Sumber Daya Manusia. Edisi 4. Liberty, Yogyakarta.
- Davis, Keith, and Newstorm. (1996). "Perilaku dalam Organisasi". Edisi Tujuh. Jakarta: Erlangga.
- Fisher, Richard. (2001). "Role Stress, The Type A Behavior Pattern, And External Auditor Job Satisfaction And Performance", Behavioral Research in Accounting 13 : 143-170.
- Gibson. (1986). "Organisasi". Jakarta: Bina Aksara.
- Hendrix, W.H., Spencer, B.A., & Gibson, G.S., (1994). "Organizational and extraorganizational factors affecting stress, employee well-being, and absenteeism for males and females". Journal of Business and Psychology, 9 (2), 103-128
- Leontaridi, R.M and Ward, M.E. (2002). "Work-Related Stress, Quitting Intentions and Absenteeism". Available on line at <http://www.ssrn.com>
- Luthans, F. (2001). "Organizational Behavior. Ninth Edition. New York: Mc.Graw Hill.
- Ostroff, C. (1992). "The Relationship Between Satisfaction Attitudes and Performance an Organization Level Analysis", Journal of Applied Psychology, Vol.77, No. 68.
- Robbins, Stephen.P. (2006). "Perilaku Organisasi". PT Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Stonner, Charles R. (1990). "Workhome role conflict infemale owners of small bussiness: an eploratory study". Journal of small business management , 28 (1), page 30-38.

**PENGENTASAN KEMISKINAN: MOTIVASI DAN BUDAYA
PEREMPUAN DALAM MEKANISME PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BERBASIS PENDEKATAN POTENSI
DI KECAMATAN BERBAH, SLEMAN
(PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA SAMPAI PELUANG
PENYALURAN HASIL USAHA)**

Tri Mardiana, Sri Kussujaniatun, Sucahyo Heriningsih, Marita, Sadi,

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah upaya pengembangan nilai ekonomi sumberdaya kaum perempuan mengutamakan pada keterkaitan potensi dan kebutuhan kaum perempuan di suatu kawasan pengembangan, dalam bentuk jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya melalui upaya penggalan sumber daya potensial, pengembangan industri mikro, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan kaum perempuannya dalam kapasitasnya sebagai kelompok masyarakat miskin. pemberdayaan kelompok perempuan sasaran akan mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai pendekatan potensi yang dimiliki.,dimotivasi untuk pembentukan kelompok usaha sampai akhirnya diharapkan akan memperoleh peluang penyaluran hasil usaha sesuai dengan pendekatan potensi.

ABSTRACT

The objective of this study is the effort to develop the economic value of women's resources emphasis on relevance potential and needs of women in a development region, in the form of a network of production to services and efforts of innovation development through the efforts of resource extraction potential, the development of micro industries , trade, services and other investments that can create jobs and increase the income of the women in her capacity as the poor. women's empowerment of the target group will receive the appropriate skills training approach its potential., motivated for the establishment of business groups until finally expected to obtain delivery of business opportunities in accordance with the approach of potenti

Keywords: poverty reduction, motivation, culture, women's empowerment mechanisms, approach potential, forming a business group, the distribution of operating results

PENDAHULUAN

Upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Dua indikator penting yang mengukur hal itu disajikan dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report/HDR*) yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan *Gender-related Development Index* (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,697; sedangkan untuk GDI menduduki peringkat ke-87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebesar

0,691. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya kesenjangan gender. Indikasi kesenjangan diperkirakan akan masih terlihat pada tahun 2013.

Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah *Gender Empowerment Measurement*/GEM. Angka indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, sehingga berguna untuk mengukur ketimpangan gender di 3 (tiga) hal tersebut. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 sekitar 0,458; yang berarti peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan kurang dari separuh dari peran laki-laki. Untuk mengatasi rendahnya GDI dan GEM, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2006 telah dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu prinsip pengarusutamaan ketika melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan. Dalam kaitan itu, pada akhir tahun 2006 GDI dan GEM

Hasil Penelitian pada tahun pertama ditemukan dari 41 responden yaitu ibu-ibu didusun Krikilan Berbah Slemen sebagian besar (61%) rata-rata, berpendidikan akhir setingkat SMA, berusia 40 th, menikah di usia 20 th, pekerjaan ibu RT, dan dalam kondisi sehat, sedangkan kondisi ekonomi wanita dan keinginan untuk berwirausaha, jumlah wanita yang sudah memiliki pekerjaan adalah 25 dari total 41 responden (61%) dengan rata-rata berpenghasilan Rp1.733.840;00. Sementara 16 responden (39%) hanya menggantungkan penghasilan dari suaminya. Di daerah Berbah, selisih penghasilan sebesar Rp1.733.840;00 ini termasuk selisih yang sangat besar. Dari sisi pengeluaran rata-rata per hari untuk kelompok wanita pekerja juga lebih besar dibandingkan pengeluaran rata-rata harian kelompok wanita tidak bekerja. Hal ini juga berarti bahwa kesejahteraan untuk responden yang bekerja lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak bekerja dan rata-rata ingin berwirausaha.

Pada tahun ke dua ini dilakukan penelitian secara kualitatif dan pendampingan intensif atas prosedur pembentukan Kelompok Usaha Bersama.

TINJAUAN PUSTAKA

MOTIVASI

Menurut Bandura (2000) mendefinisikan *self efficacy* adalah rasa kepercayaan seseorang bahwa ia dapat menunjukkan perilaku yang dituntut dalam suatu situasi yang spesifik. *Self efficacy* lebih mengarahkan pada penilaian individu akan kemampuannya. Pentingnya *self efficacy* akan berpengaruh pada usaha yang diperlukan dan pada akhirnya terlihat dari *performance* kerja. Menurut Bandura (2000) keberadaan *self efficacy* pada diri seseorang akan berdampak pada empat proses, yaitu :

a. Proses Kognitif

Pengaruh *self efficacy* pada proses kognitif dapat timbul dalam berbagai bentuk. Banyak perilaku manusia yang diatur dengan pemikiran sebelumnya dalam mewujudkan tujuan. Pengaturan tujuan individu dipengaruhi oleh penaksiran individu terhadap kapabilitas yang dimilikinya.

b. Proses Motivasi

Kepercayaan diri terhadap *self efficacy* berada dalam pengaturan diri terhadap motivasi. Motivasi individu banyak ditimbulkan melalui proses kognitif. Orang – orang memotivasi dirinya sendiri dengan mengarahkan tindakannya dengan melalui berbagai latihan. Mereka percaya terhadap apa yang mereka lakukan dan selalu mengantisipasi adanya hasil tindakan yang prospektif. Mereka akan mengatur tujuan yang dimilikinya dan merencanakan latihan-latihan sebelum melakukan tindakan dengan mendesainnya sesuai nilai-nilai masa depan.

c. Proses Afektif

Orang-orang percaya terhadap pengaruh kapabilitasnya dalam mengatasi stres dan depresi dalam menghadapi ancaman atau situasi yang sulit. Dengan adanya *self efficacy*, seseorang akan lebih mampu mengatasi segala persoalan yang mengancam keberadaannya.

d. Proses Seleksi

Melalui kepercayaan diri terhadap kapabilitas yang dimilikinya, maka seseorang cenderung bertindak selektif atau melakukan pemilihan terhadap pencapaian tujuan hidupnya. Manusia akan memilih pemecahan masalah dan pencapaian tujuan hidupnya yang sesuai dengan kapabilitas yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Sampel adalah masyarakat di lokasi sasaran yaitu ibu-ibu pengrajin mete . Penelitian secara kualitatif dan pendampingan intensif atas prosedur pembentukan Kelompok Usaha Bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan di dusun Krikilan, desa Kalitirto, kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Pelaksanaan dengan memberikan pelatihan Teknik Budidaya Dan Pengolahan Biji Mete. Instruktur menjelaskan bagaimana pengolahan gelondong menjadi kacang mete dimulai dengan **pemilihan gelondong, penjemuran, pengupasan, penyangraian, pelepasan testa, sortasi, pengeringan, dan diakhiri dengan pengemasan.** Perbedaan pengolahan terjadi pada tahap penanganan gelondong sebelum dikupas, yaitu dengan penjemuran (proses dingin), *roasting* dengan CNSL dan *roasting* dengan pengukusan (proses panas). CNSL adalah cairan yang dipres dari kulit gelondong mete. Perlakuan *roasting* dengan CNSL dapat menghasilkan kacang yang bermutu baik. Namun perlakuan ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain membutuhkan CNSL dalam jumlah banyak dan kontrol proses yang teliti, sehingga diperlukan peralatan dan biaya yang lebih mahal daripada *roasting* dengan cara dikukus. Cara *roasting* dengan CNSL biasanya diterapkan pada skala industri. Agar pengrajin rumah tangga mampu menghasilkan kacang mete bermutu baik, diperlukan teknologi pengolahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengolahan kacang mete dengan cara pengukusan dan pengupasan gelondong menggunakan kacip dianjurkan untuk dikembangkan, karena mampu menghasilkan kacang utuh 85-90%. produk lebih higienis, dan lebih efisien daripada pengolahan secara tradisional. Masalah utama dalam pengolahan kacang mete adalah pengupasan kulit gelondong. Bentuk gelondong umumnya memiliki bentuk tidak teratur serta kulitnya liat. Selain itu, selama pengolahan kacang mete tidak boleh terkontaminasi CNSL. Selama ini pengupasan gelondong masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kacip sederhana. Pengupasan menggunakan kacip sederhana belum dapat menghasilkan kacang yang bermutu baik. Persentase kacang yang pecah dan belah masih tinggi sehingga kacang yang utuh hanya sedikit. Pengeringan dilakukan setelah kacang mete dikupas, tujuannya mengurangi kadar airnya hingga 3 % dan untuk mempermudah pengupasan kulit ari kacang mete (testa). Pengeringan bisa dengan matahari atau dengan cara mekanis. Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan hingga kulit arinya dapat dikelupas dengan tangan. Keuntungan dari pengeringan dengan matahari adalah kacang mete tidak gosong dan kualitas baik. Kelemahannya, kacang mete dengan kadar air lebih 3 % menjadi sangat rapuh (hancur). Sedangkan dengan cara mekanis dapat dilakukan pada suhu optimum 700° C selama 4 - 8 jam. Hasilnya, kualitas baik dengan kadar air ± 3 %. Pengupasan kulit ari dilakukan segera setelah dikeringkan. Pengupasan dapat secara manual dan cara lain yang dapat dilakukan petani, yaitu proses gabungan antara penggorengan bersama-sama dengan pengupasan.

Dasar sortasi dan grading adalah keadaan, ukuran dan warna. Berdasarkan keadaan dapat dibedakan 6 golongan, yaitu : 1. kacang mete utuh (*whole kernels*), yaitu kacang mete utuh seluruhnya, tanpa cacat; 2. kacang mete sedikit utuh (*butts kernels*), yaitu kacang mete yang sebagian kecil sudah pecah; 3. kacang mete belahan (*split kernels*), yaitu kacang mete setengah utuh atau merupakan belahan kacang mete yang utuh. 4. kacang mete remukan besar (*large pieces kernels*), yaitu kacang mete yang pecah lebih dari dua bagian dengan ukuran di atas 0,6 cm; 5. kacang mete remukan kecil (*small pieces kernels*), yaitu kacang mete yang pecah/remuk dengan ukuran 0,4 - 0,5 cm; dan 6. kacang mete remukan halus (*baby bits kernels*), yaitu kacang mete yang pecah/remuk halus.

Pengemasan perlu segera dilakukan karena kacang mete mudah sekali rusak. Kemasan dapat berupa peti/kaleng, plastik kemas dalam keadaan tanpa udara. Pengemasan tidak dapat meningkatkan atau memperbaiki mutu, tetapi hanya mempertahankan atau melindungi mutu produk yang dikemas. Oleh karena itu, hanya produk yang baik yang perlu dikemas. Produk yang rusak atau busuk yang ada dalam kemasan akan menjadi kontaminasi dan infeksi bagi produk yang masih sehat. Akibatnya produk tidak laku di pasaran.

Kacang mete yang diekspor biasanya dalam bentuk mentah dengan kadar air antara 4 - 6 %, yang dikemas dalam kaleng hampa udara dan diisi dengan karbondioksida. Kaleng kemasan yang digunakan sama dengan kaleng minyak tanah atau minyak goreng, tetapi sebaiknya yang masih baru, bersih, kering, kedap udara dan tidak bocor, serta harus bebas dari infeksi serangga dan jamur serta tidak karatan.

Hasil dari penelitian yg dilaksanakan bulan November 2013 pada ibu-ibu pengrajin mete yang berjumlah 41 orang, dengan usia antara 28 tahun sd 65 tahun. Motivasi untuk berwirausaha menunjukkan hasil yang sama, yaitu 100% memiliki keinginan wirausaha. Hal ini berarti bahwa kesadaran wanita untuk meningkatkan kesejahteraan adalah relatif sama. Para responden, merasa yakin mampu untuk berwirausaha jika ada modal dan kesempatan. Dalam teori Bandura (dalam Avey, Luthans & Jensen, 2009) keyakinan *self efficacy* dikatakan mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan menginterpretasi suatu kejadian. Dapat digolongkan bahwa semua responden memiliki motivasi dan budaya ingin maju, dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini, mereka termasuk memiliki *self efficacy* yang tinggi dan cenderung untuk melihat tantangan sebagai sesuatu yang dapat diatasi yang diberikan oleh kompetensi dan upaya yang cukup.

SARAN

Sejumlah 41 responden dalam studi kasus ini dilakukan di desa Krikilan, Berbah Sleman ini menginginkan wirausaha, jika memiliki tambahan pengetahuan dan modal dalam mewujudkan wirausaha yang akan ditekuni. Keinginan wirausaha ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga masyarakat luas untuk membinanya. Dengan demikian akan meningkatkan perekonomian bangsa.

Daftar Pustaka:

- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organizations Behavior Structure Processes*. Irwin McGraw-Hill.
- Greenberg, J dan R. Baron. 1995. *Behavior Structure and Process*. Business Publication Inc., Plano, Texas
- Ghufron M. Nur & Risnawati Rini S. 2010. *Teori-Teori Psikologi*.
- Heriningsih, Sucahyo. 2010. "Cara Mengelola Keuangan Rumah Tangga" di RT 13 RW 13 Perumnas Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman
- Heriningsih, Sucahyo. Jurnal Buletin Ekonomi Pengaruh kecerdasan Emosional terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa akuntansi Vol.7 / No.1, ISSN:1410-2293 / 2009

- Kussujaniatun, Sri. 2006. Hubungan antara Sikap Terhadap Bukti Fisik, Proses dan Karyawan dengan Kualitas Keterhubungan serta Perannya Dalam Menimbulkan Niat Ulang Membeli dan Loyalitas (Survei Pada Konsumen Member Card ALFA yang Berdomisili Di Sleman Yogyakarta) (Jurnal Humaniora Sains dan Pengajaran "INOVASI" Vol. XIV No. 3 September 2006, ISSN 0854-4328)Penulis sendiri
- Kussujaniatun, Sri. 2006 Efek Komunikasi Dari Mulut ke Mulut Terhadap Sikap dan Niat Membeli Produk Prosesor AMD Athlon DSI Yogyakarta(Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi " BALANCE" Th. III No. 6 Juli 2006, ISSN : 1693-9352)Penulis sendiri
- Kussujaniatun, Sri. 2007 Pengaruh Motivasi Nasabah Kredit Terhadap Keputusan Meminjam Dana (Survei Pada BPR Bank Kredit Kecamatan Juwangi Boyolali) Jurnal Ekonomi "Artavidya" Tahun 7 No.1 Maret 2007, ISSN : 1410-8755 Terakreditasi No. 23 a/DIKTI/Kep/2004Penulis sendiri
- Kussujaniatun, Sri. 2007 Analisa Pengaruh Dead Endorser Terhadap Brand Personality Pada Iklan Kompas Di Televisi (Survei Pada Iklan Konsumen Surat Kabar Harian Kompas Di Kabupaten Sleman Yogyakarta) Penulis sendiri) (Jurnal Bisnis dan Ekonomi "JBE" Vol. 14 No. 23 a/DIKTI/Kep/2004
- Kussujaniatun, Sri. 2007 Analisis Ekuitas Merek (Survei Pada Konsumen Rokok Djarum 76 Di Yogyakarta) (Jurnal Kajian & Riset Manajemen "Karisma" Vol. 1 Nomor 2, April 2007, ISSN : 1978-404X)
- Kussujaniatun, Sri. 2008 Antecedent Perilaku berganti Merek pada mobil Nissan Grand Livina di YogyakartaPenulis ke 2 Karisma-Prodi Manajemen UPN Vol IV, no 3 . ISSN:1978-404X. Desember 2010
- Kussujaniatun, Sri. 2009Pengaruh Pengetahuan Produk, Nilai da Kualitas yang dipersepsikan terhadap Kepuasan Pelanggan mobil Toyota di Yogyakarta Jurnal Bisnis dan Manajemen " Bisma" 2009, Vol 5, No 1.ISSN : 1978-3108 . April 2011
- Kussujaniatun, Sri. Analisis Strategi membangun Loyalitas konsumen melalui Differensiasi produk. (Survey pada pengguna sepeda motor "Yamaha Mio" di Kab Sleman) Seminar Nasional V Call for Paper UTY. ISBN: 978-979-1334-25-9, 18 juli 2009
- Usman, Wan, dkk. 2003. *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
- Mardiana, Tri. 2001. Analisis Pengaruh Stressor Terhadap Kinerja (Studi Pada Pegawai BPK Di DI Yogyakarta. Jurnal Ilmiah "SIASAT BISNIS
- Mardiana, Tri. 2002. Pengaruh Efektifitas Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bank Yang Ada Di DI Yogyakarta. Jurnal Ilmiah "KOMPAK"
- Mardiana, Tri. 2004. Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan dan Pengalaman Kerja Terhadap komitmen Perawat RS Panti Rapih Di DI Yogyakarta Jurnal Ilmiah "TELAAH BISNIS"
- Mardiana, Tri. 2009. Pengaruh Sumber Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Edukatif Di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Yogyakarta Call Paper Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur
- Mardiana, Tri. 2011. Antecedent Kepuasan Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Intensi Turn Over (Studi Pada Perawat Rumah Sakit Golongan C) Jurnal Manajemen Inovasi dan Bisnis
- Mardiana, Tri. 2012. Analisis *Degree of Fit* Tipe Perilaku dengan Budaya Organisasi Serta Dampaknya Pada Kinerja. Laporan Penelitian LPPM UPNVY
- Marita. 2008 Pengaruh Komitmen dan Peran Informasi Manajemen Biaya Dalam Mendukung *Total Quality Management* Terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya dan

- Implikasinya Terhadap Kinerja Manajer (Survei terhadap Manajer Divisi pada BUMN Manufaktur di Indonesia) PDM Dikti
- Marita. 2010 Model Corporate Reporting Supply Chain untuk Sektor Industri energi berdasarkan Karakteristik Negara: Pemetaan dan Komparasi pada Perusahaan-perusahaan Sektor Industri Energi di Kawasan Asia LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta
- Marita. 2012 Analisis Kemampuan Karyawan dalam Pemakaian Informasi Berbasis Komputer Dalam Proses Penelitian
- Marita. 2011 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UKM dan UMKM di Wilayah DIY Kadin DIY
- Sadi. 2009. Pendekatan Sistem dalam Organisasi.

**Determinan Kemiskinan Tingkat Provinsi di P. Jawa
(Pendekatan Structural Vector Autoregression)
PERIODE 2001 – 2012 *)**

Oleh :

Drs. R. Bambang Sulistiyono, M.Si. **)

Wahyu Dwi Artaningtyas, SE. MSi. **)

Abstract

Distribution percentage of GDP at current prices by province in Java P average of 15 percent for the provinces of Jakarta, East Java and West Java; Banten, Central Java and Yogyakarta average of 8 percent over other areas outside Java Island. When viewed from the Human Development Index (HDI) value is high above the provincial level of national value, but always accompanied by a relatively high poverty rate even surpassed the national poverty level. It is certainly no problem in the structural determinants of poverty itself, especially at the provincial level. Determinant of poverty is an important factor that can determine the level of poverty such as the Human Development Index; Gini index is a measure of the relative levels of income inequality; GDP growth rate in constant prices in 2000; Consumer Price Index (CPI) which is a reflection of the rate of inflation; Unemployment Rate (TPT) according to the level of education is a reflection of the employment field; The number of households that have Improved Sanitation (MSL) itself is a reflection of the housing sector.

Long-term goal of this study was to determine strategies and policies in order to reduce structural poverty to match Masterplan Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Specific targets to be achieved in this research is to want to know how big the impact of short-term and long-term on the changes in the factors determinant above the provincial level of structural poverty in affecting change in P Java.

Methods to be used in achieving the above objectives through the analysis of the degree of pass-through in each group that is the determinant of poverty with that can be calculated via Cholesky decomposition, with the hope of identifying the structural shocks from models Structural Vector Autoregression (SVAR) during the period 2001-2012 can be seen.

Keywords:

Structural poverty, Determinants of Poverty, Model SVAR.

*) Dirangkum dari Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2014-2015

***) Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta

RINGKASAN

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut Propinsi yang ada di P Jawa rata-rata sebesar 15 persen untuk propinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat; propinsi Banten, Jawa Tengah dan DIY rata-rata 8 persen di atas daerah lain di luar P Jawa. Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat propinsi nilainya tinggi diatas nilai nasional namun selalu disertai dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi bahkan melampaui angka kemiskinan tingkat nasional. Hal ini tentu ada masalah dalam determinan kemiskinan struktural itu sendiri khususnya di tingkat propinsi. Determinan kemiskinan merupakan suatu faktor penting yang dapat menentukan besarnya tingkat kemiskinan seperti Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Gini yang merupakan pengukuran tingkat ketidakmerataan pendapatan relatif; laju pertumbuhan PDRB menurut

harga konstan 2000; Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan cerminan dari tingkat inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan yang merupakan cerminan dari bidang ketenagakerjaan; Jumlah rumah tangga yang memiliki Sanitasi Layak (MSL) sendiri yang merupakan cerminan dari sektor perumahan.

Tujuan jangka panjang penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi dan kebijakan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan strukturalnya (agar sesuai dengan Masterplan Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) .

Target khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui seberapa besar dampak jangka pendek maupun jangka panjang atas perubahan faktor-faktor determinan di atas pada tingkat propinsi dalam mempengaruhi perubahan kemiskinan struktural di P Jawa.

Metode yang akan dipakai dalam mencapai tujuan di atas melalui analisis derajat *pass through* pada masing-masing kelompok yang ada dalam determinan kemiskinandenganyang dapat dihitung melalui *Cholesky Decomposition*, dengan harapan identifikasi goncangan struktural dari model *Structural Vector Autoregression (SVAR)* selama kurun waktu 2001 – 2012 dapat diketahui.

Kata Kunci :

Kemiskinan Struktural, Determinan Kemiskinan, Model SVAR.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan struktural telah menarik perhatian peneliti, karena ada sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Lemahnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan faktor determinan kemiskinan kurang mendapat perhatian sehingga berimplikasi negatif terhadap perkembangan kemiskinan struktural di daerah.

Tingkat kemiskinan struktural dalam hal ini dapat diukur melalui angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinannya. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks ini semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan struktural di atas, besar kecilnya akan dipengaruhi oleh beberapa variabel determinan kemiskinan seperti : Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah suatu indeks yang mengukur pembangunan sosial ekonomi suatu daerah yang berdasarkan pada pengukuran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Disamping itu tingkat kemiskinan di beberapa propinsi di Jawa terlihat turun tapi tingkat ketimpangan yang di ukur dengan Indeks Gini (IG) malah meningkat yang oleh Bank Dunia ditunjukkan dalam bentuk persentase. Variabel determinan lain adalah PDRB yang merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang dihadapi oleh sebuah perekonomian daerah. Lemahnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kenaikan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus (melalui perubahan Indeks Harga Konsumen) memberikan implikasi terhadap perubahan kemiskinan struktural di daerah. Variabel lain dalam determinan kemiskinan ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan pendidikan yang merupakan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan akibat tidak ada kesempatan. Kelompok inilah yang belum mampu menyerap banyak tambahan tenaga kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial. Demikian pula dengan jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum

sendiri yang layak untuk dikonsumsi (MSL) merupakan salah satu cerminan bahwa kemiskinan masih relatif tinggi.

Permasalahan yang ingin di kaji dan ingin dicari jawaban (solusi) nya adalah : (1) bagaimana perilaku pergerakan masing-masing kelompok determinan kemiskinan tingkat propinsi di P. Jawa, (2) bagaimana pengaruh dan dampak perilaku pergerakan determinan kemiskinan terhadap perubahan tingkat kemiskinan strukturalnya, (3) bagaimana peranan masing-masing kelompok determinan kemiskinan dapat menjelaskan fluktuasi kemiskinan struktural baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Tinjauan Pustaka

Banyak para ahli kemiskinan, melihat kemiskinan sebagai kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial, masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka (Hadi Prayitno dan Budi Santoso, 2003;102-103).Salah satu ciri umum dari kondisi masyarakat yang miskin adalah tidak memiliki sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh, tidak layak huni. Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), pemerintah memaknai kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Pendekatan yang digunakan meliputi: *basic needs* (menekankan ketakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sebagai sumber kemiskinan); *income poverty* (menekankan tiadanya kepemilikan aset dan alatn produksi), *basics capability* (menekankan keterbatasan kemampuan dasar untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat); *social welfare* (tekanan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan); serta *subjective* (cara pandang kemiskinan dari sudut orang miskin pandangan orang miskin sendiri).

Metode

Peta jalan (roadmap) penelitian yang peneliti lakukan adalah dari data-data determinan kemiskinan (Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Gini; Tingkat Pengangguran Terbuka; Indeks Harga Konsumen; PDRB menurut lapangan usaha (sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; Jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum) dan tingkat kemiskinan struktural (yang terdiri dari Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan) yang sudah menjadi stasioner pada *first difference*, kemudian dikointegrasikan melalui model SVAR. Dua/lebih variabel yang tidak stasioner sebelum didiferensi namun stasioner pada tingkat diferensi pertama, besar kemungkinan akan terjadi kointegrasi; yang berarti terdapat hubungan (keseimbangan) jangka panjang di antara keduanya. Terminologi autoregresif karena adanya nilai lag pada variabel determinan kemiskinan dan terminology vector muncul karena pada kenyataannya harus berurusan dengan dua atau lebih variable vector tersebut. Namun dalam jangka pendek ada kemungkinan terjadi ketidakseimbangan (*disequilibrium*), artinya kedua variabel hanya menunjukkan trend saja bukan karena hubungan antar keduanya atau ada yang mengatakan bahwa apa yang diinginkan (*desired*) belum tentu samadengan apa yang terjadi sebenarnya sehingga diperlukan adanya penyesuaian (*adjustment*).

Bila melihat peta hubungan antar variabel yang ada dalam identifikasi setiap variabel yang saling berhubungan dan mempunyai dampak dinamis dari gangguan yang bersifat random dalam bentuk struktural maka digunakanlah model struktural VAR yang terestriksi

yang dikenal dengan SVAR. Model SVAR ini akan kami gunakan untuk menganalisis adanya *shock* variabel-variabel dalam model di atas dengan cara melakukan peramalan.

Diharapkan dari analisis model ini dampak jangka pendek adanya perubahan variabel-variabel di atas dapat terlihat secara jelas. Dari dampak ini akan dilakukan identifikasi beberapa kemungkinan kebijakan ekonomi yang dapat diusulkan dalam rangka untuk mengurangi/menanggulangi kemiskinan struktural. Diharapkan dari analisis model ini dampak jangka pendek adanya perubahan variabel-variabel di atas dapat terlihat secara jelas. Dari dampak ini akan dilakukan identifikasi beberapa kemungkinan kebijakan ekonomi yang dapat diusulkan dalam rangka untuk mengurangi/menanggulangi kemiskinan struktural.

Hasil

Dengan adanya keserentakan diantara variable-variabel determinan kemiskinan dimana semua variable tersebut harus diperlakukan dalam keadaan yang adil (*equal footing*) sehingga tidak ada apriori perbedaan antarvariabel endogen dan eksogen maka dibawah ini kami sajikan hasil estimasi model VAR (*Vector Autoregressive Model*).

Hasil estimasi model VAR untuk variabel D(P₁) :

$$D(P_1)_{t-1} = -2,3027 + 0,1338 D(IG)_{t-1} + 1,3479 D(IG)_{t-2} + 3,5027 D(IG)_{t-3} + 3,4802 D(IG)_{t-4}$$

$$t[-1,2128] \quad [0,1382][1,1130][0,7067][0,6638]$$

$$+ 0,0080 D(IHK)_{t-1} - 0,0018 D(IHK)_{t-2} - 0,0025 D(IHK)_{t-3} - 0,0013 D(IHK)_{t-4}$$

$$[0,5154] \quad [-0,2590] \quad [-0,3677] \quad [-0,2137]$$

$$+ 0,1151 D(IPM)_{t-1} - 0,1489 D(IPM)_{t-2} - 0,0394 D(IPM)_{t-3} + 0,0986 D(IPM)_{t-4}$$

$$[0,2294][-0,1993][-0,0811][0,4150]$$

$$- 0,0071 D(MSL)_{t-1} + 0,0530 D(MSL)_{t-2} - 0,0155 D(MSL)_{t-3} - 0,0204 D(MSL)_{t-4}$$

$$[-0,1903] \quad [0,9410] \quad [-0,3566] \quad [-0,7070]$$

$$- 0,2781 D(P_1)_{t-1} - 0,3590 D(P_1)_{t-2} - 0,0065 D(P_1)_{t-3} - 0,2043 D(P_1)_{t-4}$$

$$[-0,7151] \quad [-1,0427] \quad [-0,0217] \quad [-0,7110]$$

$$+ 0,1168 D(PDRB)_{t-1} + 0,0101 D(PDRB)_{t-2} + 0,2102 D(PDRB)_{t-3} + 0,1849 D(PDRB)_{t-4}$$

$$[0,7248] \quad [0,0582] \quad [1,1133] \quad [0,9445]$$

$$- 0,0093 D(TPT)_{t-1} - 0,0105 D(TPT)_{t-2} + 0,0627 D(TPT)_{t-3} - 0,0354 D(TPT)_{t-4} + e_t$$

$$[-0,1101] \quad [-0,1304] \quad [0,6922] \quad [-0,3835]$$

Untuk variabel Indeks Gini (IG) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Gini D(IG) pada 3 (tiga) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif tertinggi baru disusul dengan tingkat pertumbuhan angka Indeks Gini pada 4 (empat) tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Harga Konsumen D(IHK) pada 1 (satu) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif tertinggi walaupun pengaruhnya relatif kecil, baru disusul dengan tingkat pertumbuhan angka Indeks Gini pada 3 (dua) tahun sebelumnya yang mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia D(IPM) hanya ada dua yang berpengaruh positif terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu pertumbuhan angka Indeks Pembangunan Manusia pada satu tahun sebelumnya dan empat tahun sebelumnya, sedang unatu dua dan tiga tahun sebelumnya bahkan malah berpengaruh negatif.

Untuk variabel pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum sendiri yang layak untuk dikonsumsi D(MSL) hanya pada periode satu tahun sebelumnya berpengaruh positif sedang periode lainnya berpengaruh negatif.

Sedang untuk variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan sendiri untuk semua kurun waktu sebelumnya berpengaruh negatif, disamping itu seluruh variabel pertumbuhan PDRB mempunyai pengaruh positif.

Untuk variabel PDRB seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Indeks keparahan Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berpengaruh positif hanya periode waktu untuk tiga tahun sebelumnya sedang kurun waktu yang lainnya berpengaruh negatif walau nilainya relatif kecil.

Hasil estimasi model VAR untuk variabel $D(\mathbf{P}_2)$:

$$D(\mathbf{P}_2)_t = -3,8839 + 0,0298 D(\text{IG})_{t-1} - 1,1070 D(\text{IG})_{t-2} + 3,8087 D(\text{IG})_{t-3} + 1,5689 D(\text{IG})_{t-4}$$

$$t \quad [-1,8247] \quad [0,0297] \quad [-0,8300] \quad [0,7024] \quad [0,2665]$$

$$+ 0,0165 D(\text{IHK})_{t-1} + 0,0049 D(\text{IHK})_{t-2} + 0,0064 D(\text{IHK})_{t-3} + 0,0057 D(\text{IHK})_{t-4}$$

$$[0,9894] \quad [0,6701] \quad [0,8714] \quad [0,8956]$$

$$+ 0,6490 D(\text{IPM})_{t-1} - 1,1999 D(\text{IPM})_{t-2} + 0,8975 D(\text{IPM})_{t-3} - 0,2920 D(\text{IPM})_{t-4}$$

$$[1,2911] [-1,5763] [1,7201] [-1,1062]$$

$$- 0,0012 D(\text{MSL})_{t-1} - 0,0271 D(\text{MSL})_{t-2} + 0,0332 D(\text{MSL})_{t-3} - 0,0153 D(\text{MSL})_{t-4}$$

$$[-0,0289] \quad [-0,4674] \quad [0,7085] \quad [-0,5045]$$

$$+ 0,1274 D(\mathbf{P}_2)_{t-1} + 1,0365 D(\mathbf{P}_2)_{t-2} + 0,8231 D(\mathbf{P}_2)_{t-3} + 1,4710 D(\mathbf{P}_2)_{t-4}$$

$$[0,1453] \quad [1,1634] \quad [1,0556] \quad [1,7945]$$

$$+ 0,3010 D(\text{PDRB})_{t-1} + 0,2498 D(\text{PDRB})_{t-2} - 0,2486 D(\text{PDRB})_{t-3} + 0,3734 D(\text{PDRB})_{t-4}$$

$$[1,7193] \quad [1,3780] \quad [-1,1857] \quad [1,7185]$$

$$- 0,0149 D(\text{TPT})_{t-1} - 0,0522 D(\text{TPT})_{t-2} + 0,0866 D(\text{TPT})_{t-3} + 0,1687 D(\text{TPT})_{t-4} + e_t$$

$$[-0,1682] \quad [-0,5864] \quad [0,8677] \quad [1,5762]$$

Untuk variabel Indeks Gini (IG) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Gini D(IG) pada 3 (tiga) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif terbesar baru disusul dengan tingkat pertumbuhan angka Indeks Gini pada 4 (empat) tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan Indeks Keparahakan Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Harga Konsumen D(IHK) pada 1 (satu) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif tertinggi walaupun pengaruhnya relatif kecil, baru disusul dengan tingkat pertumbuhan angka Indeks Gini pada 3 (dua) tahun sebelumnya yang mempunyai pengaruh positif juga terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia D(IPM) hanya ada dua yang berpengaruh positif terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu pertumbuhan angka

Indeks Pembangunan Manusia pada tiga tahun sebelumnya dan satu tahun sebelumnya, sedang dua dan empat tahun sebelumnya bahkan pengaruhnya negatif.

Untuk variabel pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum sendiri yang layak untuk dikonsumsi (MSL) hanya pada periode tiga tahun sebelumnya berpengaruh positif sedang periode lainnya berpengaruh negatif.

Sedang untuk variabel Indeks Keparahan Kemiskinan sendiri untuk semua kurun waktu sebelumnya berpengaruh positif, dengan urutan empat, tiga, satu baru dua tahun sebelumnya.

Untuk variabel PDRB yang berpengaruh negatif hanya pertumbuhan PDRB tiga tahun sebelumnya sedang waktu yang lainnya semuanya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Indeks keparahan Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berpengaruh positif hanya periode waktu empat dan tiga tahun sebelumnya sedang kurun waktu yang lainnya berpengaruh negatif walau nilainya relatif kecil.

Pembahasan

Bila dilihat dari Determinan Indeks Kedalaman Kemiskinan, faktor Indeks Gini tiga atau empat tahun sebelumnya dan PDRB tiga atau empat tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang besar disamping variabel-variabel lainnya dalam penelitian ini. Indeks Gini dan PDRB merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya distribusi pendapatan. Semakin lebar distribusi pendapatan akan menyebabkan Indeks Kedalaman Kemiskinan semakin jauh dari garis kemiskinannya. Sedang variabel IPM berpengaruh positif dan TPT berpengaruh negatif menempati urutan ke tiga dan ke empat dalam mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. IPM seharusnya berpengaruh negatif berarti ada kesalahan dalam menentukan besar kecilnya alokasi dana yang diperuntukkan dalam pemberdayaan pembangunan manusia yang sesuai dengan program pengentasan kemiskinan.

Bila dilihat dari Determinan Indeks Keparahan Kemiskinan, faktor Indeks Gini tiga atau empat tahun sebelumnya dan PDRB tiga atau satu tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang besar disamping variabel-variabel lainnya dalam penelitian ini. Indeks Gini dan PDRB merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya distribusi pendapatan. Semakin lebar distribusi pendapatan akan menyebabkan Indeks Keparahan Kemiskinan semakin jauh dari garis kemiskinannya. Sedang variabel IPM berpengaruh positif dan TPT berpengaruh positif menempati urutan ke empat dan ke tiga dalam mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. IPM seharusnya berpengaruh negatif berarti ada kesalahan dalam menentukan besar kecilnya alokasi dana yang diperuntukkan dalam pemberdayaan pembangunan manusia yang sesuai dengan program pengentasan kemiskinan.

Simpulan

Faktor Indeks Gini dan PDRB memberi pengaruh positif terbesar terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan yang seharusnya memberikan pengaruh negatif dalam jangka pendek. Atas ke dua variabel tersebut dimungkinkan terjadinya distribusi pendapatan yang begitu lebar (semakin menjauh dari garis kemiskinannya). Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan selalu ada kendala (tidak sesuai dengan yang diharapkan).

Daftar Rujukan

- Agung Eddy Suryo Saputro dan Agung priyo Utomo. (2010), *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro di Lima Belas Provinsi Tahun 2007*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, September 2010, Jakarta.
- Andriopoulou Eirini dan Tsakloglou : *The Determinants of Poverty Transitions in Europe and the Role of Duration Dependence* yang diunduh dari <http://www.ftp.iza.org/dp5692.pdf> pada tanggal 21 Februari 2011 pukul 07.30 WIB
- Angus Deaton, Allesandro Tarozzi : *Price and poverty in India* yang diunduh dari http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Prices_and_Poverty_in_India.pdf yang diunduh pada tanggal 2 Februari 2011 pukul 22.30 WIB
- Bambang Sulistiyono (2012) , "Analisis Keterkaitan Antara Indeks Kedalaman Kemiskinan Dengan Indeks Harga Konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta" , BULETIN EKONOMI; Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN "Veteran Yogyakarta, Volume 10, Nomor 1, April 2012, Yogyakarta.
- Bambang Sulistiyono dan Karyono (2013) , "Analisis VAR (Vector Auto Regressive) dan GCT (Granger Causality Test) Terhadap Keterkaitan Antara PDRB menurut lapangan Usaha Dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta" Penelitian Dasar LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta (dalam proses untuk penerbitan sebuah jurnal).
- Bogale Ayalneh, Hagedorn dan Korf Benedikt : *Determinants of poverty in rural Ethiopia* yang diunduh dari http://www.eaae114.hu-berlin.de/ress-en/problementorierung-en/Ressourcenuarmut-en/bogale_qjia_ethiopia.pdf?switchLanguage&set language=en pada tanggal 21 April 2014 pukul 07.45
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*, 4th Edition, McGraw-Hill, Inc, Singapore.
- Hadi Prayitno dan Budi Santosa.(2003). *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramon Jose G. Albert dan Monina Paula Collado: *Profile and Determinants of Poverty in the Philippines* diunduh dari http://nscb.gov.ph/ncs/9thncs/papers/poverty_Profile.pdf pada tanggal 21 April 2014 pukul 09.15
- Said Farah, Musaddiq Tareena dan Mahmud Mahreen : *Macro level Determinants of Poverty: Investigation through poverty mapping of districts of Pakistan* diunduh dari <http://www.pide.org.pk/psde/25/pdf/AGM27/Farah%20Said.pdf> pada tanggal 21 April 2014 pukul 10.10
- Usman, Bonar, at all.: *Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*, diunduh dalam <http://www.ejournal.unud.ac.id/abstrak.pdf> pada tanggal 21 Februari 2011 pukul 10.30 WIB
- Waskhito, dalam *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM Perkotaan) Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta* yang diunduh di <http://crackbone.wordpress.com/pelaksanaan-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-perkotaan-pnpm-perkotaan-ditinjau-dari-aspek-ekonomi-dalam-pengentasan-kemiskinan-di-kota-yogyakarta/> pada pukul 4.30 hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012.
- Wing Wahyu Winarno. (2007), *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan E-Views*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

PERANCANGAN DATABASE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

Sabihaini¹⁾, Hendri Gusaptono²⁾, Wilis Kaswidjanti³⁾, Agus Sasmito Aribowo⁴⁾

¹Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta
email: sabihaini@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta
email: tono_hendri@yahoo.com

³Fakultas Teknologi Industri, UPN Veteran Yogyakarta
email: wilis.kas@gmail.com

⁴Fakultas Teknologi Industri, UPN Veteran Yogyakarta
email: sasmito_skom@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang belum bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satunya disebabkan oleh basis data yang masih belum baik. Pada tahun 2012 angka kemiskinan di Provinsi DIY menunjukkan penurunan, tetapi dalam kenyataan di lapangan penerima skinner jumlah justru meningkat di atas 100%, dan di antara penerima skinner terdapat pula keluarga yang masuk kategori orang yang mampu. Basis data yang lemah menyebabkan pengambil keputusan tidak mampu mengambil keputusan dengan tepat dan juga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah membangun Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) berdasarkan basis data yang baik, agar para pengambil keputusan dapat melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan program dapat dicapai seperti yang diharapkan

Kata Kunci : Program pengentasan Kemiskinan, Sistem Pendukung Keputusan

Abstract

Implementation of poverty alleviation programs have not been able to achieve the expected goals. This is caused by a poverty data base is not good. In 2012 the poverty rate in the province to show a decline, but the reality of the rice beneficiary numbers have increased over 100%, and among the beneficiaries of rice there are also not poor families. Because of the poverty database is weak, the decision maker can't take right decisions and can't solve the poverty problems. The aim of research is to build Decision Support System (DSS) based on a good data, so that decision makers can implement poverty alleviation programs effectively and efficiently, and the program objectives can be achieved as expected

Keywords: *poverty alleviation program, Decision Support System*

1. PENDAHULUAN

Semenjak program pengentasan kemiskinan digulirkan, jumlah dana yang telah dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemda, maupun swasta belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara maksimal. Penduduk di bawah garis kemiskinan di Provinsi DIY misalnya, pada Tahun 2010 mencapai 15,63%, menuruni kondisi pada tahun 2009 sebesar 16,83%. Angka tersebut masih berada di atas rataan nasional sebesar 13,33%. Demikian pula halnya bila dibandingkan dengan target MDGs nasional tahun 2015 sebesar 10,30%, maka diperlukan kerja keras untuk menurunkannya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

menempati urutan terbawah dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Daerah Ibukota Jakarta menempati urutan terbaik (3,48%), diikuti Provinsi Banten (7,16%), Provinsi Jawa Barat (11,27%), Provinsi Jawa Timur (15,26%) dan Provinsi Jawa Tengah (16,56%).

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang belum bisa mencapai tujuan yang diharapkan, salah satunya disebabkan oleh basis data yang masih belum baik. Pada tahun 2012 angka kemiskinan di Provinsi DIY menunjukkan penurunan, tetapi dalam kenyataan di lapangan penerima miskin jumlahnya justru meningkat di atas 100%, dan antara penerima miskin terdapat pula keluarga yang masuk kategori orang yang mampu. Basis data yang lemah menyebabkan pengambil keputusan tidak mampu mengambil keputusan dengan tepat dan juga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ketidaktepatan penerima miskin menyebabkan timbulnya permasalahan sosial di masyarakat.

Dalam rangka untuk mengatasi persoalan yang dihadapi maka penelitian ini menawarkan pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System/DSS*). Pembuatan DSS memerlukan database yang berkualitas. Database yang berkualitas akan menghasilkan informasi dengan kualitas tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengetahuan bagi pihak yang memanfaatkannya. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat database yang berkualitas dan mudah diakses oleh penerima miskin berdasarkan dimensi-dimensi yang menentukan kriteria kemiskinan.

2. KAJIAN LITERATUR

Pengertian awal Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sebagai suatu sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial pada permasalahan semi terstruktur (Turban dkk, 2005). SPK dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kemampuannya, namun tidak untuk menggantikan penilaiannya. SPK ditujukan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian atau pada keputusan-keputusan yang yang samasekali tidak dapat didukung oleh algoritma.

Menurut Gorry dan Scott Morton, SPK adalah sistem berbasis komputer interaktif, yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah tidak terstruktur (Turban dkk, 2005). Mempertajam pendapat Gorry dan Scott Morton mengenai definisi SPK, maka Little menyimpulkan definisi SPK, yakni: SPK adalah sekumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data dan kebijakan untuk membantu seorang manager dalam membuat keputusan (Turban dkk, 2005). Little mempunyai argumen bahwa untuk berhasil maka sistem harus mudah, kuat, mudah dikontrol, mampu menyesuaikan diri, lengkap pada persoalan penting, dan mudah dikomunikasikan.

Secara minimum, SPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang interaktif, fleksibel dan dapat beradaptasi, secara khusus dikembangkan untuk mendukung suatu solusi dari pengelolaan yang tidak terstruktur untuk meningkatkan pembuatan keputusan, memanfaatkan data, membutuhkan antarmuka dengan pemakai yang yang mudah, dan mengizinkan pembuat keputusan mempunyai wawasan sendiri (Turban dkk, 2005).

3. METODE PENELITIAN

a. Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem yang dibutuhkan adalah sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu menentukan keluarga atau individu yang berhak mendapatkan bantuan penanganan kemiskinan. Sistem dapat memberikan daftar nama-nama (*by name dan by*

address) individu atau kepala keluarga yang perlu dibantu dalam bentuk tabel data setelah dilakukan proses seleksi dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pengguna.

b. Analisis Pengguna Sistem

Berdasarkan hasil analisa lapangan, disimpulkan bahwa pengguna sistem dibagi menjadi empat macam yaitu :

- 1) Administrator merupakan pengguna yang memegang hak akses pengelolaan user dalam sistem. Administrator juga mengelola data dasar bagi sistem.
- 2) Operator merupakan pengguna yang mengoperasikan sistem secara umum dengan status petugas input data. Operator merupakan pengguna yang memiliki hak akses pada data transaksional.
- 3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pengguna yang mendapatkan hak untuk melihat data setelah diproses dengan seleksi berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebutuhan SKPD yang dipimpinnya.
- 4) Masyarakat merupakan pengguna umum yang dapat masuk ke sistem tanpa login sekuriti dan pengguna ini hanya dapat melihat rekap data kemiskinan secara umum, dalam bentuk grafik atau tabel.

c. Analisis Output Sistem

Output yang diharapkan adalah daftar keluarga atau individu miskin sesuai kriteria yang dibutuhkan. Output sistem akan diterima oleh SKPD dan masyarakat umum. Sebuah SKPD atau lembaga sejenis hendak menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin akan membutuhkan data warga miskin yang dapat menerima bantuan sesuai bidang kerja/bidang garap SKPD tersebut. Misalnya SKPD yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dibawah Departemen Sosial akan memilih warga miskin berusia lanjut (lansia) untuk dibantu dalam bentuk uang tunjangan pensiun. SKPD tersebut dapat melakukan pencarian data warga yang memiliki kriteria usia dan tingkat kemiskinan sesuai ketentuan. SKPD yang bergerak di bidang peternakan dapat memilih warga miskin yang memiliki keterampilan/potensi sebagai peternak. SKPD yang bergerak di bidang pertanian dapat memilih warga miskin yang memiliki keterampilan/potensi sebagai petani, dan seterusnya.

d. Analisis Proses dalam Sistem

Ada dua buah proses utama dalam sistem yaitu proses query untuk seleksi data keluarga miskin berdasarkan kriteria yang diinginkan dan proses rekap data kemiskinan menjadi tabel atau grafik. Proses-proses lain merupakan proses standar seperti penambahan data, edit dan hapus data. Proses standar berlaku untuk semua jenis data.

e. Analisis Input Sistem

- 1) Administrator menginputkan data master, yaitu data: Kecamatan, Kelurahan (desa), Pedukuhan, Indikator Permasalahan, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, KB, Pendidikan, Pekerjaan, Keterampilan/Potensi, Status Miskin, Jaminan Pernah Diterima. Selain itu administrator juga akan menginputkan data umum seperti data Keluarga (KK) dan Anggota Keluarga.
- 2) Operator merupakan perugas penginput data terbanyak, selain dapat menginputkan data Keluarga (KK) dan Anggota Keluarga, operator juga menginputkan data Score Evaluasi Kemiskinan Tahunan.
- 3) Pimpinan SKPD menerima laporan Keluarga Miskin berdasarkan kriteria yang telah ditentukan/diinginkan. Maka Pemimpin SKPD akan menginputkan data kriteria tersebut sehingga dapat diproses menghasilkan tabel data keluarga miskin yang dibutuhkan.
- 4) Masyarakat tidak menginputkan data apapun.

f. Analisis Pengguna Sistem

Berdasarkan analisis-analisis di atas diperoleh informasi bahwa user dari sistem yang hendak dibangun adalah: administrator, operator, pimpinan SKPD, dan masyarakat

g. Perancangan Sistem

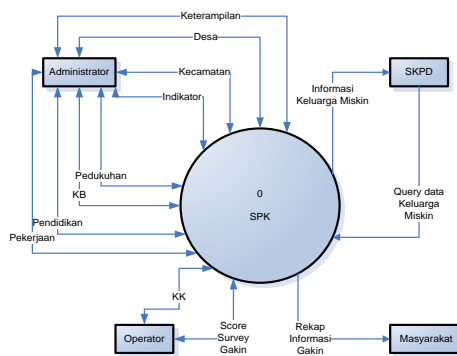
Perancangan sistem menggunakan pendekatan terstruktur dimana sistem distrukturkan menggunakan *tools* (alat-alat) seperti data flow diagram. *Data flow* diagram menggambarkan aliran data dan interaksi data antar entitas dalam sistem. Pada kasus ini entitas adalah para user dalam sistem yaitu SKPD, Operator, Administrator dan masyarakat.

1) Data Flow Diagram

a) **Context Diagram.** Penggambaran Data Flow Diagram (DFD) dimulaidari Context Diagram. Context diagram ada pada Gambar 1.

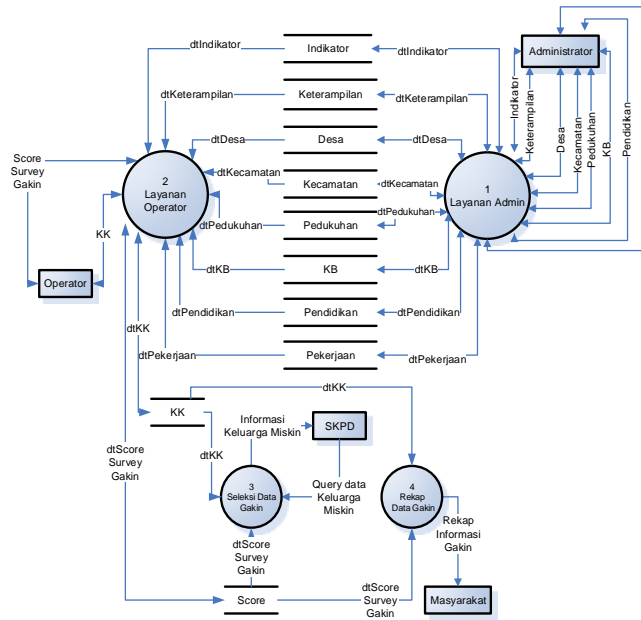
b) **DFD Level 1.** Context Diagram dijabarkan lebih mendetil pada DFD level 1. Pada DFD level 1 terlihat proses-proses utama dalam sistem sekaligus kamus data yang mengalir dalam sistem. DFD Level 1 mempermudah dalam proses perancangan basis data. DFD Level 1 ada pada Gambar 2.

c) **DFD Level 2.** Proses Layanan Administrator dan Layanan Operator dijabarkan lebih mendetil pada DFD level 2. DFD Level 2 Proses Layanan Administrator ada pada Gambar 3 dan DFD Level 2 Proses Layanan Operator ada pada Gambar 4.

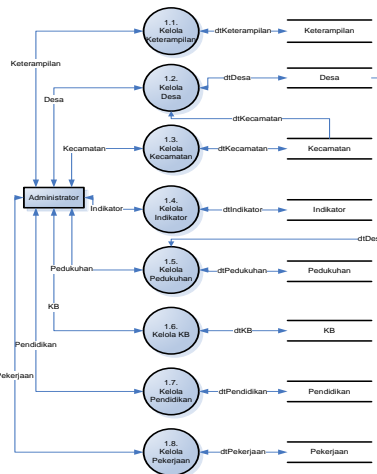


Gambar 1. Context Diagram

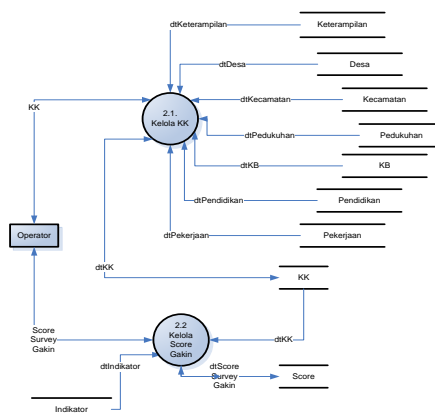
2) **Basis Data.** Basis data merupakan sebuah struktur penyimpanan data yang berhubungan (berelasi) satu sama lain. Perancangan basis data menggunakan teknik terstruktur dimana basis data disusun dalam bentuk tabel-tabel. Hasil analisis terhadap dokumen dasar telah memberikan suatu kesimpulan bahwa struktur basis data relasional untuk penyimpanan data sistem ada pada Gambar 5.



Gambar 2. DFD Level 1



Gambar 3. DFD Level 2 untuk proses yang dikelola Administrator



Gambar 4. DFD Level 2 Untuk Proses yang Dikelola Oleh Operator

Data keluarga miskin yang telah dikirimkan ditampilkan dalam sistem dalam bentuk tabel. Data keluarga miskin ditampilkan sebagaimana dalam Gambar 9.



The screenshot shows a web interface with a header in Indonesian: 'SISTEM PENYALUR KEPUTUSAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL'. Below the header is a table with multiple columns and rows of data, representing the list of poor families.

Gambar 9. Halaman Data Keluarga Miskin

Halaman pencarian keluarga miskin berbentuk form isian yang berisi combo-box pilih keluarga miskin sesuai kriteria lokasi maupun profil keluarga miskin. Sarana pencarian ini ada pada Gambar 10.



The screenshot shows a search form titled 'Pencarian Keluarga Miskin Sesuai Kriteria'. It includes several dropdown menus (combo-boxes) for selecting search criteria and a search button.

Gambar 10. Halaman Pencarian Keluarga Miskin

Hasil pencarian keluarga miskin sesuai kriteria akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Hasil ini akan mempermudah pencarian keluarga miskin sesuai bidang gerak SKPD tersebut dilihat dari berbagai aspek kriteriaanya. Hasil pencarian ada pada Gambar 11. Hasil berbentuk tabel.



The screenshot shows the search results page, displaying a table of data similar to Gambar 9, but filtered according to the search criteria entered in Gambar 10.

Gambar 11. Halaman Keluarga Miskin Sesuai Kriteria

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Sistem database untuk aplikasi pendukung keputusan untuk pengentasan kemiskinan telah selesai dirancang dan dapat dipakai dan diterapkan untuk menyimpan data keluarga miskin dan evaluasi keluarga miskin.

Hasil pengujian menggunakan proses entry data dan retrieve data menunjukkan bahwa database dapat menyimpan data penduduk miskin dan data score aspek kemiskinan dengan baik.

b) Saran

Saran untuk perbaikan database dan program di masa mendatang adalah: hendaknya database dan aplikasi disempurnakan sehingga dapat lebih jauh dilengkapi proses seleksinya dengan metode-metode perkomendasi dukungan keputusan yang lebih baik.

6. REFERENSI

1. Turban dkkEfraim, Jay E. Aronson, dan Ting Peng Liang, 2007. *Decision Support Systems and Intelligent Syatems (SistemPendukungKeputusanSistemCerdas) Jilid 1*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
2. Jogiyanto, 1999, *PengenalanKomputer*, Andi, Yogyakarta
3. Davis, Gordon B. 1995. *Sistem Informasi Manajemen*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
4. Pressman, Robert, *RekayasaPerangkatLunak*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002

ANALISIS DESTINASI KOMPETITIF KLUSTER KERAJINAN KAJIGELEM BANTUL

Sigit Haryono, Ratna Rostika, Tri Wahyuningsih

Abstract

Inherited resources, created resources, supporting resources, demand conditions, destination management and situational conditions are all factors that shape Competitive Destinations. High competitive destinations will increase the competitiveness that led to the prosperity of society. Inherited resources craft clusters Kajigelem face the challenges of the availability of quality raw materials. The availability of adequate infrastructure is important to improve the competitiveness of this cluster. While demand conditions are seen from awareness, perception and preference have high competitiveness, particularly for products Kasongan. However, efforts need to be strengthen for other craft industries. Therefore we need a good destination management, in the form of government intervention to provide training according to the needs of the craftsman, and the provision of facilities in the form of events and various facilities to improve the performance of SMEs in the midst of a relatively stable situational conditions.

Abstraksi

Sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi situasional merupakan faktor-faktor yang membentuk Destinasi Kompetitif. Destinasi kompetitif yang tinggi akan meningkatkan daya saing yang berujung pada kemakmuran masyarakat. Sumberdaya asal kluster kerajinan Kajigelem menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan daya saing kluster ini. Sementara kondisi permintaan yang dilihat dari *awareness*, *perception* dan *preference* memiliki daya saing yang tinggi, khususnya untuk produk Kasongan. Namun demikian perlu usaha yang keras untuk industri kerajinan yang lain. Oleh karena itu diperlukan manajemen destinasi yang baik, berupa campur tangan pemerintah untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan para perajin, dan penyediaan fasilitas berupa *event* dan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kinerja UKM tersebut di tengah kondisi situasional yang relatif stabil.

Pendahuluan

Pada masa kini perkembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan keunikan dan keindahan budaya serta keindahan alam saja tetapi juga tergantung pada industri yang mendukung. Industri yang mendukung sektor pariwisata ini salah satunya adalah industri kerajinan. Industri kerajinan mendukung sektor pariwisata karena industri ini yang mensuplai cinderamata atau souvenir yang akan dibawa pulang oleh para wisatawan.

Salah satu industri kerajinan yang berkembang adalah industri kerajinan yang ada di Kabupaten Bantul. Bantul merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi percontohan bagi tumbuhnya industri kreatif. Perkembangan industri kreatif di daerah ini tumbuh pesat seiring dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata di daerah ini. Tabel 1 menunjukkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan semakin banyak dari tahun ke tahun. Data tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan adalah sebesar 1.311.009 orang, dengan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 2 milyar lebih. Pada tahun berikutnya yaitu 2009 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1.439.260 dengan kontribusi ke PAD sebanyak dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Data terakhir tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Bantul adalah sebanyak 2.153.404 dengan kenaikan kontribusi ke PAD sebanyak 450% dibanding lima tahun sebelumnya (2008).

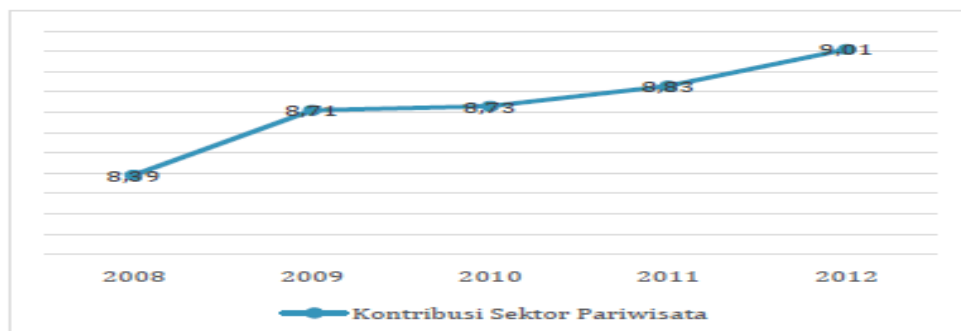
Tabel 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi PAD

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp.)
2008	1.311.009	2.144.605.950,00
2009	1.439.260	4.361.159.125,00
2010	1.496.626	4.596.019.826,00
2011	1.740.417	5.289.407.718,00
2012	2.356.578	8.640.795.116,00
2013	2.153.404	9.120.764.368,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

LAKIP Kabupaten Bantul, 2013

Kenaikan jumlah wisatawan yang jelas berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dijelaskan melalui Gambar 1 berikut:



Gambar 1: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sumber: LAKIP Kabupaten Bantul 2013.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat jelas bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada PDRB yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sektor pariwisata memberikan kontribusi ke PDRB sebanyak 8,05%. Data terakhir pada tahun 2012 sektor pariwisata memberikan kontribusi ke PDRB sebesar 9,01.

Kenaikan jumlah wisatawan yang berakibat pada peningkatan PAD membawa efek pada pertumbuhan industri pendukung. Kerajinan tangan sebagai industri pendukung sektor pariwisata tidak dapat dielakkan juga menikmati pertumbuhan yang tinggi ini. Bantul sebagai salah satu Kabupaten yang berhasil menggiatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan tidak tinggal diam untuk memanfaatkan momentum ini dengan membuat suatu kebijakan *One Product One Village (OVOP)*. Pembentukan klaster kerajinan ini bertujuan agar tiap klasternya memiliki daya saing yang tinggi. Dengan memiliki daya saing maka industri ini akan mampu memberikan kontribusi yang tinggi pada PAD.

UKM Kerajinan Kabupaten Bantul telah membuktikan keberhasilannya dengan tidak hanya menjadi *supporting industry* bagi sektor pariwisata tetapi juga mampu memberikan kontribusi sebesar 80% dari ekspor UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (Agrofarm, 2014). Namun demikian, meskipun memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekspor kerajinan DIY industri ini masih lemah dalam persaingan global. Tantangan UKM kerajinan ini adalah

lemahnya inovasi dan pemasaran. Pada industri kreatif, inovasi menjadi kata kunci yang mutlak untuk memiliki daya saing. Inovasi produk yang lemah akan berakibat pada pemasaran yang kurang maksimal. Selera dan preferensi pelanggan yang selalu berubah mengikuti jaman mutlak diperlakukan inovasi sebagai solusi.

Teori Destinasi Kompetitif yang dikemukakan oleh Ritchie and Crouch (2003) serta Dwyer and Kim (2003) menyatakan bahwa daya saing akan terbentuk melalui sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, strategi persaingan, dan globalisasi. Destinasi Kompetitif Kajigelem yang merupakan klaster kerajinan yang berlokasi di Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemahdadi berarti meliputi identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut untuk melihat daya saing klaster tersebut.

Tinjauan Pustaka

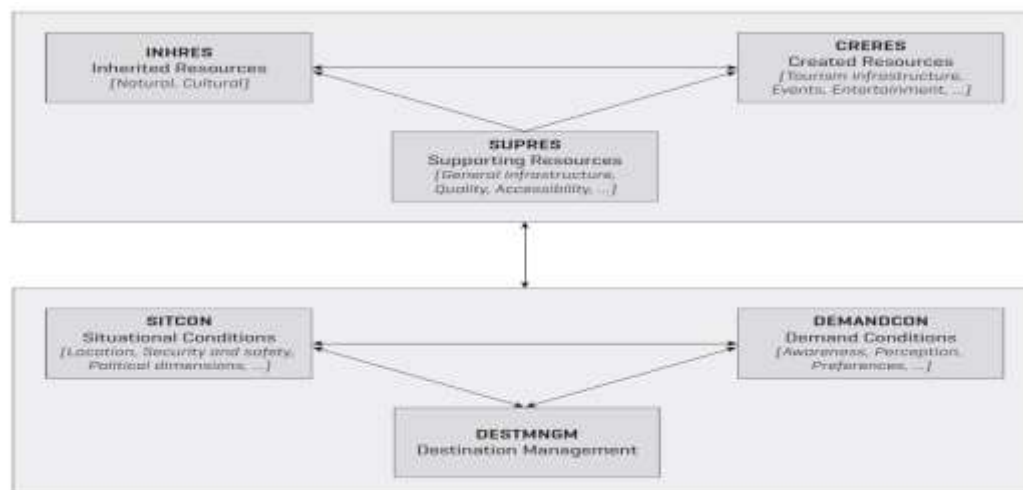
Pengertian Destination Competitiveness (Destinasi Kompetitif)

Ada beberapa definisi tentang destinasi kompetitif. Crouch and Ritchie (1999) mendefinisikan destinasi kompetitif dengan pendekatan ekonomi kemakmuran. Pendekatan ini secara khusus berlaku untuk destinasi kompetitif tingkat nasional. Hal ini dianggap wajar untuk memeriksa destinasi kompetitif yang berfokus pada ekonomi kemakmuran, karena bangsa-bangsa yang menjadi pemain di pasar pariwisata internasional bertujuan mendorong kesejahteraan ekonomi penduduk, serta kesempatan untuk mempromosikan negara sebagai tempat untuk hidup, perdagangan, berinvestasi, melakukan bisnis dan sebagainya (Dwyer & Kim, 2003).

Hassan (2000) mendefinisikan destinasi kompetitif sebagai kemampuan untuk menciptakan dan mengintegrasikan nilai tambah produk dengan tetap menjaga posisi pasar relatif terhadap competitor. Dwyer dan Kim (2003) mengusulkan bahwa destinasi kompetitif adalah kemampuan suatu destinasi untuk memberikan barang-barang dan jasa yang lebih baik dibanding destinasi lain (Dwyer & Kim, 2003). Sedangkan Ritchie and Crouch menyatakan destinasi kompetitif adalah kemampuan satu negara untuk menciptakan nilai tambah dan dengan demikian meningkatkan kekayaan nasional dengan mengelola aset dan proses, daya tarik, agresivitas dan kedekatan dan dengan mengintegrasikan hubungan ini dalam model ekonomi dan sosial yang memperhitungkan modal alam tujuan dan pelestariannya untuk generasi mendatang (Ritchie, Crouch, 2003).

Model Destination Competitiveness (Destinasi Kompetitif)

Model destinasi kompetitif dikemukakan oleh Dwyer and Kim (2003). Dwyer mengemukakan bahwa destinasi kompetitif terbentuk oleh enam faktor yaitu sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi permintaan. Gambar 2 merupakan Model Destinasi Kompetitif yang dikembangkan oleh Dwyer and Kim (2003).



Gambar 2: Model *Destination Competitiveness*

Sumberdaya asal adalah sumberdaya alami dalam destinasi wisata seperti keadaan alam dan budaya (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Sumberdaya buatan adalah sumberdaya yang dibuat oleh manusia dengan sengaja (infrastruktur, tempat belanja, festival, event) (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Sumberdaya pendukung adalah sumberdaya yang melengkapi industri utama (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Manajemen destinasi adalah pengelolaan untuk meningkatkan daya tarik sumberdaya, efektivitas dan kualitas kluster, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menghadapi persaingan (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Faktor permintaan adalah permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang ditawarkan (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Kondisi situasional adalah lokasi, keamanan, lingkungan makro dan mikro, serta persaingan harga (Omerzel-Gomezelj and Mihalic, 2008).

Metode Penelitian

Populasi penelitian ini adalah para perajin yang ada di Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemahdadi (Kajigelem) Kabupaten Bantul. Teknik sampling dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) kepada para perajin. Teknik FGD ini dilakukan dengan alasan bahwa masalah yang diteliti ini tidak dapat dipahami dengan metode survei, selain itu FGD dilakukan adalah untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat, dan FGD merupakan metode yang cocok bagi pemmasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dan melibatkan masyarakat setempat.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kluster kerajinan Kajigelem Kabupaten Bantul dengan pendekatan destinasi kompetitif yang meliputi kondisi-kondisi sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi situasional.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kluster keajinan Kajigelem Bantul maka dapat dieoleh data berkaitan dengan Destinasi Kompetitif yang meliputi faktor-faktor sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi permintaan adalah sebagai berikut:

Sumberdaya Asal

Sumberdaya asal menurut Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012) adalah sumberdaya alami dalam destinasi wisata seperti keadaan alam dan budaya. Kluster kerajinan yang ada di Kasongan Jipangan Gendeng dan Lemahdadi mengelola sumberdaya alam untuk bahan baku yang berasal dari lingkungan sekitar. Bahan baku berupa tanah untuk kerajinan keramik dan bambu untuk kerajinan kipas pada awalnya berasal dari daerah asal. Namun untuk saat ini kondisinya sudah tidak memungkinkan mereka untuk mengandalkan sumberdaya asal. Hal ini karena ketersediaan bahan baku berupa tanah liat sudah tidak sepenuhnya berasal dari Kasongan. Demikian juga dengan bambu yang dulunya bahan baku berasal dari daerah asal untuk saat ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa Kluster kerajinan di Kajigelem Bantul ini menghadapi ancaman tentang ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku ini akan mempengaruhi kelancaran produksi dan mempengaruhi kualitas produk. Pada masa lalu tanah liat Kasongan yang membuat produk keramik Kasongan mempunyai kualitas yang baik. Demikian juga dengan bambu yang baik yang semakin sulit untuk ditemukan.

Sumberdaya Buatan

Menurut Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012), sumberdaya buatan adalah sumberdaya yang dibuat oleh manusia dengan sengaja (contohnya infrastruktur, tempat belanja, festival, event). Kluster kerajinan Kajigelem memiliki didukung oleh infrastruktur berupa jalan yang memadai untuk lalu lintas distribusi bahan baku dari daerah asal bahan baku ke lokasi produksi, maupun distribusi dari lokasi produksi untuk membawa produk jadi ke pasar. Namun demikian sumberdaya buatan berupa tempat belanja atau showroom untuk memamerkan hasil kerajinan masih perlu ditingkatkan jumlah maupun kualitas venue. Showroom yang ada sekarang masih menyatu dengan rumah para perajin tinggal sehingga masih terkesan sederhana.

Salah satu sumberdaya buatan lain yang mempengaruhi destinasi kompetitif adalah event berupa pameran. Pameran diadakan sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran. Pameran bertujuan untuk memberitahu keberadaan produk kerajinan dan sebagai alat branding suatu produk. Pameran diadakan secara berkala untuk memamerkan produk-produk kerajinan Kajigelem baik di Yogyakarta maupun luar daerah. Untuk mengkomunikasikan produk kerajinan dalam rangka mendapatkan buyer kegiatan pameran yang dilakukan masih kurang dari yang diharapkan. Setiap perajin untuk memperoleh kesempatan untuk mengikuti pameran lokal masih secara bergilir. Sedangkan pameran di luar daerah masih jarang diikuti.

Sumberdaya Pendukung.

Sumberdaya pendukung adalah sumberdaya yang melengkapi sumberdaya utama (Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Faktor pendukung industri kerajinan Kajigelem ini adalah sektor pariwisata. Pertumbuhan wisatawan yang ada di Kabupaten Bantul (Tabel 1) membawa efek pada tingkat pertumbuhan industri kerajinan ini. Kerajinan merupakan faktor pendukung sektor pariwisata demikian juga bahwa pariwisata merupakan *supporting industry* bagi industri kerajinan.

Manajemen Destinasi

Manajemen destinasi adalah pengelolaan untuk meningkatkan daya tarik sumberdaya, efektivitas dan kualitas klaster, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menghadapi persaingan (Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Manajemen destinasi terkait dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja UKM Kerajinan di Kajigelem ini. Usaha-usaha yang dilakukan dapat berupa pelatihan, pendampingan maupun insentif yang diberikan dalam bentuk modal maupun pengurangan pajak.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja UKM Kerajinan Kajigelem. Namun pelatihan yang dilakukan baru sebatas pelatihan yang sifatnya menjalankan program yang bersifat top down. UKM kerajinan membutuhkan pelatihan yang memang dibutuhkan oleh para perajin yang bersifat bottom up. Jadi pelatihan yang diselenggarakan harus berawal dari suatu analisis kebutuhan. Di samping kualitas pelatihan, kuantitas pelatihan pun juga dibutuhkan lebih banyak karena selama ini pelatihan yang diselenggarakan belum dapat menjangkau seluruh perajin yang ada.

Kondisi Permintaan

Kondisi permintaan menurut Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), dan Kim (2012)) adalah permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Kondisi permintaan menurut Tanja *et al.*, (2011) meliputi *awareness*, *perception* dan *preference*. *Awareness* berkaitan dengan tingkat perhatian atau popularitas dari produk kerajinan UKM Kajigelem. *Perception* berkaitan dengan persepsi pasar terhadap produk kerajinan UKM Kajigelem. Sedangkan *preference* berkaitan dengan pilihan yang bersifat afektif bahwa produk kerajinan Kajigelem lebih baik dibandingkan produk yang lain, sehingga menjadi pilihan.

Produk kerajinan berupa keramik dari Kasongan memiliki popularitas yang tinggi. Setiap kali menyebut produk keramik maka yang teringat pertama adalah Kasongan. Fakta ini membuktikan bahwa produk Kasongan memiliki tingkat *awareness* yang tinggi. Dilihat dari persepsi pasar, produk kerajinan keramik Kasongan dipersepsikan sebagai produk kerajinan keramik yang bernilai tinggi. Tingkat *awareness* yang tinggi, ditambah dengan *perceive quality* yang baik maka membuat produk keramik Kasongan menjadi *preference* dalam arti bahwa pasar lebih menyukai produk keramik Kasongan ini dibandingkan produk keramik yang dihasilkan di daerah lain. Namun demikian untuk produk kerajinan yang lain masih perlu dikembangkan mengingat produk yang dibuat hanya berupa *mass product*, bukan suatu produk yang mempunyai nilai tinggi.

Kondisi Situasional

Kondisi situasional adalah lokasi, keamanan, lingkungan makro dan mikro, serta persaingan harga (Omerzel-Gomezelj and Mihalic, 2008). Lokasi mempunyai peran besar terhadap tingkat keberhasilan industri karena lokasi berkaitan dengan keterjangkauan. Keterjangkauan bahan baku dari lokasi produksi maupun keterjangkauan pasar. Demikian juga dengan faktor keamanan, lingkungan makro berupa situasi politik dan ekonomi, maupun lingkungan mikro berupa *presser group* maupun kreditur, serta persaingan harga dari produsen lain yang menawarkan barang sejenis.

UKM Kajigelem terletak pada lokasi yang strategis atau mudah dijangkau. Faktor letak ini membuat para perajin tidak kesulitan memperoleh distribusi bahan baku maupun mendistribusikan hasil kerajinan mereka. Kondisi keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang stabil ditunjang dengan lingkungan makro dan mikro yang relatif stabil membuat kinerja UKM Kajigelem relatif stabil.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi yang telah dipaparkan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Sumberdaya asal Kajigelem masih relatif baik meskipun mulai terjadi ketergantungan sumberdaya dari daerah lain. Kebutuhan mendesak yang harus dilakukan pihak yang berwenang untuk memikirkan ketersediaan pasokan bahan baku yang berkualitas. Infrastruktur yang ada di Kabupaten Bantul sangat mendukung perkembangan UKM, namun yang perlu diperhatikan agar sumberdaya buatan memiliki daya saing yang tinggi adalah kualitas maupun kuantitas event yang perlu ditingkatkan. Peningkatan event berupa pameran

perlu dilakukan untuk meningkatkan awareness agar Kajigelem tidak hanya terkenal karena Kasongan tetapi juga produk kerajinan lainnya.

Sumberdaya pendukung Kajigelem memiliki daya saing yang tinggi karena pertumbuhan pariwisata yang tinggi. Permasalahan yang muncul adalah pada manajemen destinasi yang masih perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan pelatihan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para perajin. Kondisi permintaan UKM yang berada di Kajigelem dilihat dari awareness, perception dan preference khususnya untuk produk kerajinan Kasongan memiliki daya saing yang tinggi. Namun untuk produk kerajinan lainnya masih perlu usaha keras untuk meningkatkannya. Kondisi situasional kluster Kajigelem memiliki daya saing yang tinggi yang dapat dilihat pada kondisi keamanan, lingkungan makro maupun mikro yang relatif stabil.

Daftar Pustaka

- Agrofarm, 2014, IKM Bantul diharapkan mampu bersaing di asean economic community 2015, *Agrofarm*, April 2014, diakses dari <http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian469/ikm-bantuldiharapkan-mampu-bersaing-di-asean-economic-community-2015/#.U1tCWVfi-8A>, April 2014.
- Armenski Tanja, Armenski, Marković Vladimir, Davidović Nemanja, Jovanović Tamara. 2011, Integrated Model of Destination Competitiveness, *Geographica Pannonica*, Volume 15, Issue 2, 58-69
- Crouch, G. I., and B. Ritchie J.R. 1999. Tourism, competitiveness and societal prosperity. *Journal of Business Research* 44 (3): 137–152.
- Dwyer, L., and C. Kim. 2003. Destination competitiveness: Determinants and indicators. *Current Issues in Tourism* 6 (5): 369–414.
- Hassan, S. S. 2000. Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. *Journal of Travel Research* 38 (3): 239–245.
- Kim, N, 2012, *Tourism destination competitiveness, globalization, and strategic development from a development economics perspective*, PhD Dissertation in Recreation, Sport and Tourism University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul 2013
- Omerzel- Gomezelj, D., Mihalic, T. 2008. Destination competitiveness-Applying different models, the case of Slovenia. *Tourism Management* 29 (2), 294-307.
- Ritchie, JR, & Crouch, GI, 2003, *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*, CABI Publishing, Wallingford, UK.

PENGARUH MODAL MANUSIA DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING YANG DIMEDIASI OLEH KINERJA DAN KOMPETENSI ORGANISASI

**Winarno
Sri Wahyuni Widiastuti**

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal manusia dan pembelajaran organisasi terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kinerja dan kompetensi organisasi. Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya yaitu pengaruh modal manusia dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja yang dimediasi oleh kompetensi organisasi. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada perguruan tinggi swasta di Yogyakarta tentang pentingnya modal manusia komprehensif, baik modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan maupun modal mental. Di samping itu, diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi dan kinerjanya serta pada gilirannya akan meningkatkan keunggulan bersaing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) modal manusia berpengaruh langsung terhadap keunggulan bersaing, (b) pembelajaran organisasi berpengaruh langsung terhadap keunggulan bersaing, (3) modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kompetensi organisasi, dan (4) modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kinerja organisasi.

Kata kunci: Modal Manusia, Pembelajaran Organisasi, Kompetensi, Kinerja dan keunggulan bersaing

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of human capital and organizational learning to competitive advantage mediated by the performance and competence of the organization. This study is a continuation of previous studies is the influence of human capital and organizational learning on performance mediated by the competence of the organization. This study is expected to provide insight to the private universities in Yogyakarta about the importance of a comprehensive human capital, both intellectual capital, emotional capital, social capital, equity capital and mental capital. In addition, it is expected encourage increased competence and performance, and in turn will increase the competitive advantage

The results showed that (a) human capital influence directly on competitive advantage, (b) learning organization influence on the competitive advantage, (3) human capital and organizational learning affect on the competitive advantage that is mediated by organizational competence, and (4) human capital and organizational learning affect on the competitive advantage that is mediated by organization performance.

Keywords: Human Capital, Organizational Learning, Competence, Performance and Competitive Advantage

PENDAHULUAN

Setiap organisasi harus mempertahankan dan meningkatkan keunggulan dan kinerjanya dalam jangka panjang dan berkesinambungan melalui berbagai pendekatan

manajemen strategis di era global (Raduan, at al. 2009). Organisasi yang kokoh apabila didukung oleh kinerja yang tinggi (Winarno dan Widiastuti, 2013).

Organisasi akan mencapai keunggulan bersaing (*competitivies advantage*) yang berkelanjutan, maka harus memiliki kinerja superior dan kompetensi organisasi (Barney, 1991). Kompetensi organisasi meliputi semua aset-aset strategis baik yang berwujud (*tangible assets*) seperti: *physical capital*, *financial capital* dan *structural capital*, maupun yang tidak berwujud (*intangible assets*) seperti: *human capital*, *organizational reputation* dan *managerial capacity*) (Pateraf, 1993).

Keunggulan bersaing akan meningkat apabila didukung oleh kompetensi organisasi dan kinerja (Ray, at al., 2004). Hasil penelitian yang lain (Yamin, at al., 1999) juga menunjukkan bahwa kinerja organisasi yang tinggi dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing perusahaan baik di perusahaan manufaktur maupun jasa.

Organisasi yang bersedia melakukan eksperimen dan mampu belajar dari pengalaman-pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukannya (Wheelen and Hunger, 2002).

Kinerja organisasi dalam hal ini program studi akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja apabila didukung oleh modal manusia yang komprehensif, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan dan modal mental (Ancok, 2002).

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diusulkan adalah: (a) Apakah ada pengaruh modal manusia terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kinerja organisasi?, (b) Apakah ada pengaruh pembelajaran organisasi terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kinerja organisasi?, (c) Apakah ada pengaruh modal manusia terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kompetensi organisasi?, dan (d) Apakah ada pengaruh pembelajaran organisasi terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kompetensi organisasi?

TINJAUAN PUSTAKA

Keunggulan Bersaing (*Competitive Advantage*)

Agha dan Jamhour (2012) mengungkapkan bahwa keunggulan bersaing dapat dicapai melalui proses terus-menerus yang akan menghasilkan kompetensi. Aktivitas pokok meliputi layanan (*service*), pemasaran (*marketing*), penjualan (*sales*) dan logistik. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi.

Barney (2007) menambahkan bahwa sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing bila menciptakan strategi nilai (*value creating strategy*) yaitu merupakan sumber yang utama untuk menghasilkan perbedaan antara perusahaan dalam sebuah industri satu dengan lainnya.

Ferdinand (2003) yang menyatakan bahwa berdasarkan teori berbasis sumber daya, esensi keunggulan bersaing adalah kombinasi unik dari sumber daya dan kapabilitas. Sementara itu Li et al, (2006) keunggulan bersaing dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai yang tidak dimiliki dan tidak dapat ditiru oleh pesaing. Li et al. (2006) mengukur keunggulan bersaing perusahaan dengan menggunakan indikator; harga, kualitas, *delivery dependability*, inovasi produk, dan *time to market*. Dalam penelitian ini indikator keunggulan bersaing meliputi: harga, kualitas, immitabilitas dan inovasi /produk.

Kompetensi Organisasi (*Organizational Competencies*)

Kompetensi organisasi didefinisikan sebagai kemampuan mengorganisir pekerjaan dan menyampaikan nilai; kompetensi dapat meliputi komunikasi, keterlibatan dan komitmen yang besar untuk bekerja sepanjang batas-batas organisasi (Prahalad and Hamel, 1990; Kogut

and Zander, 1992). Kompetensi juga dapat dirasakan sebagai aset-aset perantara yang diturunkan perusahaan untuk meningkatkan produktifitas sumberdayanya, seperti fleksibilitas strategi dan perlindungan terhadap produk dan jasa-jasa akhir perusahaan (Amit and Schoemaker, 1993). Sedangkan asset-aset strategis didefinisikan sebagai seperangkat sumberdaya dan kompetensi yang sulit untuk diperjualbelikan, sulit untuk ditiru disebabkan langka, sulit ditemukan dan khusus (unik), yang tersedia bagi perusahaan sebagai keunggulan bersaing (Amit and Schoemaker, 1993).

Kinerja Organisasi (*Organizational Performance*)

Reukert., *at al.* (1985) mendefinisikan kinerja organisasi adalah efektivitas yang mencakup tercapainya tujuan organisasi, efisiensi yang mempertimbangkan hubungan antara input dan output yang diperlukan untuk mencapai output, dan adaptasi yang merefleksikan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan (dalam Homburg, *et al.*, 1999). Sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi bertugas merancang, menghasilkan dan meneruskan melalui pelayanan-pelayanan (Mathis dan Jackson, 2001).

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang mencakup 15 standar akreditasi, yaitu: 1. Kepemimpinan, 2. Kemahasiswaan, 3. Sumber daya manusia, 4. Kurikulum, 5. Prasarana dan Sarana, 6. Pendanaan, 7. Tata pamong (*governance*), 8. Sistem pengelolaan, 9. Sistem pembelajaran, 10. Suasana akademik, 11. Sistem informasi, 12. Sistem jaminan mutu internal, 13. Lulusan, 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 15. Program studi

Modal Manusia (*Human Capital*)

Edvinson dan Malone (1997) mendefinisikan: *human capital is individual knowledge, experience, capability, skills, creativity, innovativeness*. Sementara itu (Ross, *at al.*, 1997; Goleman, 1997; Fukuyama, 1995; Stoltz, 1997; Lennick & Kiel, 1995) dalam Ancok (2002) mengemukakan bahwa modal manusia secara komprehensif meliputi: (1) modal intelektual, (2) modal emosional, (3) modal sosial, (4) modal ketabahan, dan (5) modal moral. Perguruan tinggi yang mencetak para pioneer pembangunan bangsa ini harus mengembangkan modal manusia yang menyangkut:

- a) Modal intelektual (*intellectual capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan kemauan dan kemampuan berfikir untuk memikirkan sesuatu yang baru.
- b) Modal emosional (*emotional capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan sikap positif dalam organisasi dalam menghadapi perubahan.
- c) Modal sosial (*social capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan kerjasama dengan organisasi lain untuk mencapai keberhasilan.
- d) Modal ketabahan (*adversity capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan sikap tabah dalam menghadapi berbagai tantangan.
- e) Modal moral (*morality capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan citra baik bagi organisasi.

Pembelajaran Organisasi (*Organizational Learning*)

Baldwin *et al.* (1997) menyatakan bahwa anggota organisasi dari semua tingkatan, tidak hanya manajemen puncak, terus melakukan pengamatan lingkungan dalam upaya memperoleh informasi penting, perubahan strategi dan program yang diperlukan untuk memperoleh keunggulan dari perubahan lingkungan, dan bekerja dengan metode, prosedur, dan teknik evaluasi yang terus menerus diperbaiki. Organisasi yang bersedia untuk melakukan eksperimen dan mampu belajar dari pengalaman-pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukannya (Wheelen and Hunger, 2002). Agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dan berkinerja tinggi

dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, organisasi harus dapat meningkatkan kapasitas pembelajarannya (Marquardt, 1996).

Dimensi pengukuran pembelajaran organisasi yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka studi ini menggunakan 6 (enam) dimensi pembelajaran organisasi yang dibangun oleh Marquardt (1996:30), yakni.

1. Sistem berpikir, yakni kerangka konseptual.

2. **Model mental**

3. **Keahlian personal**

4. **Kerjasama tim**

Senge menyebut proses ini sebagai *team learning* dan menjelaskan bahwa hal ini merupakan disiplin yang ditandai dengan tiga dimensi penting, yakni:

a. kemampuan untuk memiliki wawasan berpikir mengenai masalah-masalah penting

b. kemampuan untuk bertindak dengan cara-cara yang inovatif dan koordinatif

c. kemampuan untuk memainkan peranan yang berbeda pada tim yang berbeda

5. **Keahlian membagi visi bersama**

6. **Dialog**

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali (2006), bahwa penelitian *explanatory* menjelaskan hubungan antara variabel dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu bahwa sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *internal consistency* yaitu mencobakan instrumen pengukuran sekali saja kemudian data yang didapat dianalisis dengan menggunakan uji statistik dalam hal ini yaitu menggunakan *alpha cronbach* (Sugiono, 1999: 22). Jika koefisien alpha cronbach $> 0,60$ maka konstruk variabel dikatakan reliabel (Ghozali, 2006).

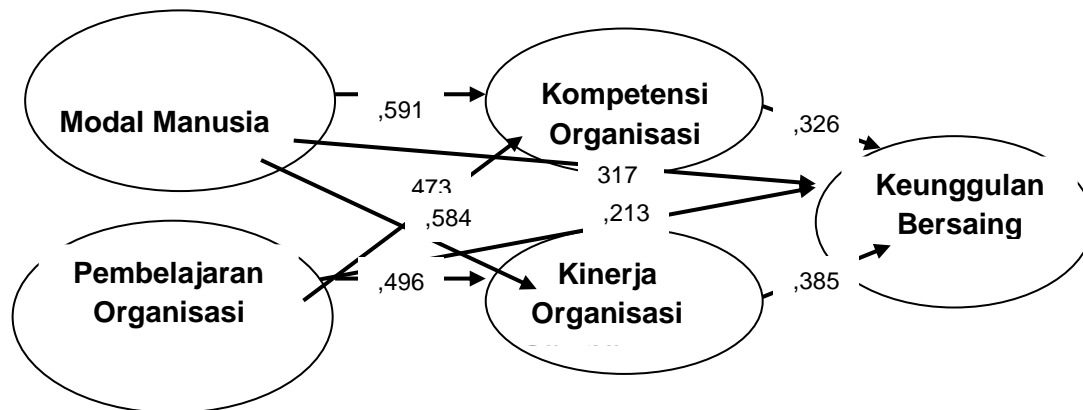
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Penelitian

Langkah-langkah dalam pengujian analisis jalur dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Pengembangan diagram jalur.

Hubungan *kausalitas* itu dapat juga digambarkan dalam sebuah diagram jalur, selanjutnya bahasa program akan mengkonversi gambar menjadi persamaan dan persamaan menjadi *estimasi* (Suwarno, 2007). Diagram jalur dari analisis data dapat dilihat pada Gambar 1.



Rekapitulasi Hasil Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi Terhadap Keunggulan Bersaing Yang Dimediasi Oleh Kompetensi dan Kinerja Organisasi

b) Konversi diagram jalur kedalam persamaan

Berdasarkan untuk mengetahui pola hubungan masing-masing variabel tersebut maka dapat disusun sistem persamaan strukturnya sebagai berikut :

(1) Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi terhadap Kompetensi Organisasi dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kompetensi Organisasi} = 0,591 \text{ Modal Manusia} + 0,473 \text{ Pembelajaran Organisasi}$$

(2) Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Organisasi} = 0,584 \text{ Modal Manusia} + 0,486 \text{ Pembelajaran Organisasi}$$

(3) Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi terhadap Keunggulan Organisasi dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Keunggulan Bersaing} = 0,317 \text{ Modal Manusia} + 0,213 \text{ Pembelajaran Organisasi} + 0,326 \text{ Kompetensi Organisasi} + 0,385 \text{ Kinerja Organisasi}$$

1) *Theory trimming*

2) Interpretasi Hasil Analisis

Pengujian Hipotesis

1. **Hipotesis pertama** menyatakan bahwa modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kompetensi organisasi dapat didukung atau terbukti. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Pengaruh Modal Manusia dan pembelajaran organisasi Terhadap kompetensi organisasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig. t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	4,599	,380		,000
Modal Manusia	,591	,079	,622	,000
Pembelajaran Organisasi	,473	,087	,470	,000

a Dependent Variable: Kompetensi Organisasi

- R = .778
- R Square = .659
- Adjust. R Square = .453
- Sig. F = .000

2. **Hipotesis kedua** menyatakan bahwa modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi dapat didukung atau terbukti. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Pengaruh Modal Manusia dan pembelajaran organisasi Terhadap kinerja organisasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig. t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	1,913	,205		,000
Modal Manusia (X1)	,584	,042	,482	,000
Pembelajaran Organisasi (X2)	,496	,047	,440	,000

- a Dependent Variable: Kinerja Organisasi (X4)

$$R = .678$$

$$R \text{ Square} = .459$$

$$\text{Adjust. } R \text{ Square} = .453$$

$$\text{Sig. F} = .000$$

3. **Hipotesis ketiga** menyatakan bahwa modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kompetensi organisasi dapat didukung atau terbukti. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 3; Rekapitulasi Hasil Pengaruh Modal Manusia dan pembelajaran organisasi Terhadap Keunggulan Bersaing Yang Dimediasi Oleh Kompetensi Organisasi

Pengaruh Antar Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak langsung	Total Pengaruh
Modal Manusia → Kompetensi → Keunggulan Bersaing	0,317	$0,591 \times 0,326 = 0,193$	$0,317 + 0,193 = \mathbf{0,510}$
Pembel. Organ. → Kompetensi → Keunggulan Bersaing	0,213	$0,473 \times 0,326 = 0,154$	$0,213 + 0,154 = \mathbf{0,367}$

4. **Hipotesis keempat** menyatakan bahwa modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kinerja organisasi dapat didukung atau terbukti. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4: Rekapitulasi Hasil Pengaruh Modal Manusia dan pembelajaran organisasi Terhadap Keunggulan Bersaing Yang Dimediasi Oleh Kinerja Organisasi

Pengaruh Antar Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak langsung	Total Pengaruh
Modal Manusia → Kinerja → Keunggulan Bersaing	0,317	$0,584 \times 0,385 = 0,225$	$0,317 + 0,225 = \mathbf{0,542}$
Pembel. Organ. → Kinerja → Keunggulan Bersaing	0,213	$0,486 \times 0,385 = 0,188$	$0,213 + 0,188 = \mathbf{0,401}$

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Redmon, 2005; Stenberg & Slater, 1982) yang menemukan bahwa modal manusia (modal intelektual, emosional/sosial dan modal moral/spiritual) berpengaruh terhadap kompetensi organisasi. Penelitian lain yang didukung hasil penelitian ini adalah (Fernandes, *et al.* 2005 dan Ukenna, *et al.* 2010) yang menemukan bahwa organisasi yang berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperoleh keunggulan bersaing dan berkinerja tinggi. Hasil penelitian ini juga mendukung teori modal manusia (Roos, *et al.*, 1997 dalam Ancok, 2002) dan (Pralhad dan Hamel, 1990; Rumelt, 1991; Barney, 1991; dan Pateraf, 1993) tentang *Resources Based View (RBV)* bahwa kompetensi organisasi yang dihasilkan dari integrasi asset-aset khusus perusahaan termasuk aset manusia meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa kompetensi organisasi memediasi pengaruh modal manusia terhadap

kinerja organisasi. Oleh karena itu, organisasi di dalam investasi di bidang sumber daya manusianya harus mampu meningkatkan kompetensi organisasinya agar dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Said (2002), hasil temuannya bahwa pembelajaran organisasi dapat meningkatkan kompetensi organisasi (kemampuan analisis pasar dan kualitas layanan) pada PTS di Indonesia. Sementara dalam penelitian ini, meskipun kompetensi organisasi mengacu pada kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, tetapi di dalamnya terkandung kemampuan perguruan tinggi dalam menganalisis pasar dan kualitas layanan baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Sedangkan Wang *and* Lo (2003), menemukan bahwa pembelajaran organisasi dan pemberdayaan anggota dapat meningkatkan kompetensi organisasi, dimana kompetensi organisasi menggunakan RBV yang terdiri dari: langka, bernilai, tidak mudah ditiru dan tidak mudah tergantikan, dan kompetensi organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Bagi perguruan tinggi yang dapat melaksanakan tri dharma dengan kualitas yang tinggi sudah barang tentu akan menghasilkan kompetensi yang langka, bernilai, tidak mudah ditiru dan tidak muda tergantikan. Bhatnagar (2006), penelitian di universitas negeri dan swasta di India, menemukan bahwa kompetensi organisasi meliputi yaitu pengajaran (*teaching*), penelitian (*research*), dan pelayanan (*services*) berpengaruh terhadap kinerja organisasi baik universitas negeri maupun swasta (Absah, 2007). Pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kompetensi organisasi dan diversifikasi serta berpengaruh terhadap kinerja organisas pada PTS di Sumatra Utara dan Hidayat (2008) pada PTS di Jawa Tengah, Abubakar *et al.* (2009), pada universitas di Malaysia dan Mansor *et al.* (2010) pada Bank Islam di Malaysia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu PTS di Yogyakarta harus mencari cara untuk mengembangkan pembelajaran organisasi yang dapat meningkatkan kompetensi organisasi baik di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, agar mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu (Khandekar *and* Sharma, 2006; Wang *and* Lo, 2003; Said, 2002; Absah, 2007; dan Therin, 2003, yang menemukan bahwa pembelajaran organisasi secara langsung dapat meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu mendukung penelitian Marquardt (1996) yang menemukan bahwa pembelajaran organisasi (Sistem berpikir, Model mental, Keahlian personal, Kerjasama tim, Keahlian membagi visi bersama dan Dialog/diskusi dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Penelitian ini juga mendukung teori pembelajaran organisasi dari Argyris (1976) yang mengungkapkan bahwa pembelajaran organisasi adalah proses mendeteksi dan memperbaiki kesalahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan juga mendukung teori pembelajaran organisasi Senge (1990) yang mengungkapkan bahwa organisasi harus terus menerus memperluas kapasitasnya untuk menciptakan kinerja yang diinginkan, melalui pola baru dan pengembangan pemikiran, dimana aspirasi kolektif dibebaskan, serta organisasi terus belajar bagaimana dapat menciptakan belajar bersama.

Implikasi penelitian ini terhadap organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi (PTS), maka organisasi (PTS) harus terus mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran organisasi seperti yang diungkapkan oleh Watkins *and* Marsick (1993) antara lain:

1. Menciptakan secara berkesinambungan kesempatan untuk belajar
2. Mengembangkan penyelidikan dan dialog
3. Mendorong kerjasama dan kelompok belajar
4. Membangun berbagai sistem untuk mendapatkan dan berbagi pembelajaran
5. Memberdayakan anggota organisasi menuju visi bersama, dan
6. Menghubungkan organisasi dengan lingkungannya

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Yamin, at al., 1999 dan Ray, at al., 2004) yang menunjukkan bahwa kompetensi organisasi yang ditunjukkan melalui *Resources-Base-View* dapat meningkatkan keunggulan bersaing, demikian pula dengan kinerja organisasi yang superior akan mampu mendorong peningkatan keunggulan bersaing organisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka organisasi sudah selayaknya terus meningkatkan kompetensinya khususnya kualitas sumber daya manusia dan pembelajaran organisasi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kedua aset tersebut organisasi mampu meningkatkan keunggulan bersaingnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Modal manusia berpengaruh langsung terhadap keunggulan bersaing,
2. Pembelajaran organisasi berpengaruh langsung terhadap keunggulan bersaing,
3. Modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kompetensi organisasi, dan
4. Modal manusia dan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh kinerja organisasi.

Saran

Berdasar pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka organisasi tidak hanya memfokuskan pada aset berwujud saja dalam mencapai keunggulan bersaing, tetapi terbukti bahwa aset tidak berwujud yang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembelajaran organisasi mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja organisasi. Oleh karena itu organisasi harus terus memberikan peluang sumber daya manusianya untuk terus meningkatkan kualitasnya melalui studi lanjut dan melakukan pembelajaran sendiri maupun pembelajaran dari organisasi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agha, S., Alrubaiee, L., & Jamhour, M. (2012, January). Effect of core competence on competitive advantage and organizational performance. *International Journal of Business and Management*, 7(1), 192-204.
- Ancok, D. (1998). *Membangun Kompetensi Manusia dalam Milenium Ketiga*, Psikologika, No. 6, 5-17.
- Barney, J.B (1986b). Organization Culture: Can it be a Source of Sustained Competitive Advantage? *Academy of Management Review*, Vol.11, pp.656-665.
- _____, (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, *Journal of Management*, Vol.17, No.1, pp.99-120.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Ghozali, Imam., (2006). *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hansson, Johanson and Keitnerl (2004) The impact of human capital and human capital Investments on company performance, Office for Official Publications of the European Communities, 2004
- Toole and Czarnitzki (2007) Exploring the relationship between scientist human capital and firm performance: The case of biomedical academic entrepreneurs, Dis cus si on Paper No. 07-011
- Wang and Lo (2003) Customer-focused Performance and the Dynamic Model for Competences Building and Leveraging: A Resource-based View, *Journal of Management Development Vol. 22 No. 6, 2003*

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MANAJEMEN MODAL KERJA YANG EFISIEN PADA PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH DAN BESAR DI INDONESIA

**Shinta Heru Satoto
Nilmawati**

*Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Upn "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 Lingkar Utara Condong Catur Yogyakarta
email : shintaherusatoto@yahoo.com*

Abstract

The purposes of this study were to provide an empirical evidence of the impact of company characteristics on efficient working capital management in small, medium, and large firms. This research used 9 industries that list on Indonesian Capital Market on 2009 until 2013 periods. This study used Cash Conversion Cycle (CCC) to show the firm efficient working capital management. The shorter the cash conversion cycle, the more efficient the internal operations of a firm. The empirical result showed that cash conversion cycle on medium firms was shorter than the other groups. Its means medium firms have more efficient working capital management than the others. This result also showed that there were a negative influenced of Debt Ratio in small, medium, and large firms. And there was positive influence of ROA in medium firms.

Keyword: *Cash conversion cycle, company characteristic, efficient working capital*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen modal kerja yang efisien pada kelompok perusahaan kecil, menengah dan besar. Penelitian ini menggunakan 9 industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Manajemen modal kerja yang efisien diukur dengan menggunakan *cash conversion cycle* (CCC). Semakin pendek CCC, semakin efisien manajemen modal kerja perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelompok perusahaan menengah memiliki CCC yang paling pendek dibanding kelompok perusahaan lain. Selain itu, ditemukan juga adanya pengaruh negatif Debt Ratio terhadap CCC pada kelompok perusahaan kecil, menengah dan besar, dan pengaruh positif ROA terhadap CCC pada kelompok perusahaan menengah.

Keyword: *Cash conversion cycle, karakteristik perusahaan, Modal kerja efisien*

A. Pendahuluan

Tujuan utama dalam manajemen modal kerja adalah memelihara tingkat investasi yang optimum untuk setiap komponen aktiva lancar, seperti persediaan, piutang, kas, dan investasi jangka pendek lainnya (Bellouma, 2010). Manajemen modal kerja sangat penting karena akan mempengaruhi profitabilitas dan risiko perusahaan, dan konsekuensinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat menerapkan manajemen modal kerja yang efisien yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Manajemen modal kerja yang efisien meliputi perencanaan dan pengawasan dari aktiva lancar dan hutang lancar untuk menghindari kelebihan investasi dalam aktiva lancar dan mencegah kekurangan aktiva lancar dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Menurut Nilsson, et al.'s (2010), manajemen modal kerja yang efisien dapat ditunjukkan dengan semakin pendeknya siklus perputaran kas perusahaan (*cash conversion cycle*). *Cash conversion cycle* dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen

modal kerja sampai saat kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek siklus tersebut berarti semakin cepat perputarannya, yang berarti semakin pendek periode perputaran modal kerja tersebut akan lebih efisien. Semakin besar *cash conversion cycle* yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin besar pendanaan yang dialokasikan untuk modal kerja (Deloof, 2003). *Cash conversion cycle* yang panjang dapat meningkatkan penjualan, dan akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Namun, meningkatnya kebutuhan modal kerja yang diikuti dengan semakin panjangnya *cash conversion cycle* juga akan menyebabkan peningkatan biaya. Hal ini akan sangat mempengaruhi perusahaan dalam usaha mendapatkan profit. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi *cash conversion cycle* sehingga dapat memaksimalkan profit perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen modal kerja yang efisien. Karakteristik perusahaan yang digunakan berupa profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (Size), operating cash flow (OCF), pertumbuhan penjualan (Growth), rasio hutang (DR), *current ratio* (CR) dan *quick ratio* (QR). Pada bagian pertama perusahaan akan dibagi menjadi tiga kelompok menurut ukuran perusahaan, yaitu kecil, sedang, dan besar dan akan dilakukan analisis penerapan manajemen modal kerja yang efisien pada masing-masing kelompok perusahaan yang diukur dengan melihat jangka waktu *cash conversion cycle* perusahaan. Kemudian akan dilihat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen modal kerja pada masing-masing kelompok perusahaan dan akan dilihat pengaruh masing-masing ukuran terhadap manajemen modal kerja. Hal ini dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen modal kerja dalam perusahaan dengan berbagai ukuran.

B. Tinjauan Pustaka

Cash conversion cycle (CCC) mengukur jumlah antara pengeluaran kas aktual pada pembelian bahan baku dan penerimaan kas aktual dari penjualan produk atau jasa (Eljelly, 2004). Manajemen modal kerja yang efisien dapat ditunjukkan dengan semakin pendeknya siklus perputaran kas perusahaan (*cash conversion cycle*). Dengan *cash conversion cycle* yang pendek, perusahaan dapat menyimpan lebih sedikit kas dibanding komponen-komponen lain dalam modal kerja dan mendapatkan likuiditas dari pembayaran yang ditangguhkan (Cakir, 2013). Semakin pendek siklus perputaran kas (*Cash Conversion Cycle*) dan siklus perdagangan bersih (*Net Trade Cycle*) akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik.

Penelitian Bhutto, et. Al's (2011) pada industri minyak dan gas menunjukkan bahwa *cash conversion cycle* berpengaruh negatif terhadap *sales revenue*, *return on equity* (ROE) dan kebijakan pendanaan perusahaan serta berpengaruh positif terhadap *total asset*, *return on assets* (ROA) dan kebijakan investasi perusahaan. Penelitian Ganesan (2007) menunjukkan bahwa perusahaan yang berada pada sektor yang kurang kompetitif akan fokus pada *cash conversion cycle* yang meminimalkan piutang. Sedangkan perusahaan yang bersaing dalam sektor yang lebih kompetitif akan relatif mempunyai tingkat piutang yang lebih besar.

Beberapa penelitian mengenai *cash conversion cycle* pada berbagai industri antara lain dilakukan oleh Rahmad and Nazer (2007), Uyar (2009), Nillson, et.al (2010) dan Attari and Raza (2012). Penelitian Rahmad and Nazer (2007), dan Uyar (2009) menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *cash conversion cycle*. Pengaruh negatif ini mengindikasikan modal kerja yang efisien. Ketika profitabilitas meningkat maka *cash conversion cycle* akan semakin pendek. Dan untuk meningkatkan profitabilitas, diperlukan lebih banyak penjualan yang dapat dilakukan dengan memperpanjang masa pembayaran dan mempercepat penarikan piutang pelanggan. Sedangkan penelitian Nillson, et.al's (2010) dan Attari and Raza (2012) pada perusahaan automobile, semen, kimia dan makanan menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara

profitabilitas dan *cash conversion cycle*, dan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, *operating cash flow* terhadap *cash conversion cycle*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan, maka akan semakin panjang *cash conversion cycle* perusahaan. Semakin besar perusahaan akan mempunyai daya tawar (*bargaining power*) dengan para supplier dan konsumennya. Sebaliknya, konsumen dari perusahaan-perusahaan kecil akan mudah bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan diskon dari pemasok dan juga dapat memperpanjang periode pembayaran.

Current Ratio dan *Quick Ratio* merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan. Kedua rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur apakah suatu perusahaan mempunyai cukup aktiva lancar untuk menutup hutang lancarnya. Penelitian Moss and Stine (1993) dan Lyroudi and Lazaridis (2000) membuktikan adanya pengaruh positif antara *current ratio* dan *cash conversion cycle*. Menurut Moss, perusahaan yang mempunyai *cash conversion cycle* yang panjang perlu untuk menyimpan lebih banyak kas dan investasi jangka pendek untuk keperluan operasi. Dengan memperpendek waktu *cash conversion cycle*, perusahaan akan dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dari jumlah yang diinvestasikan. Moss juga menemukan bahwa perusahaan besar memiliki *cash conversion cycle* yang lebih pendek dibanding perusahaan kecil. Hal ini berkaitan dengan kebijakan operasi jangka pendek yang menghasilkan *cash conversion cycle* yang pendek berkaitan dengan kemampuan yang tinggi untuk membiayai investasi dengan kewajiban lancar. Hal ini didukung oleh penelitian Howorth and Westhead (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan kecil pada umumnya memiliki proporsi yang besar pada aktiva lancar, likuiditas yang rendah, arus kas yang mudah menguap dan ketergantungan pada utang jangka pendek, relatif terhadap perusahaan besar.

Penelitian Jeng-Ren (2006) dan Nilson (2010) membuktikan adanya pengaruh positif antara *debt ratio* dan *cash conversion cycle*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai *debt ratio* yang rendah cenderung untuk memperpendek waktu penyimpanan persediaan, yang berarti memperpendek periode *cash conversion cycle* nya. Dengan *debt ratio* yang rendah, perusahaan membutuhkan dana internal yang cukup untuk membiayai operasionalnya dan ini berarti perusahaan harus mampu mengumpulkan kas dalam jangka waktu yang pendek.

C. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2009-2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Industri yang terpilih sebagai sampel harus memenuhi kriteria bahwa industri tersebut terdiri dari minimal 10 perusahaan dalam satu industri dan tidak terdapat *missing data* selama tiga tahun atau lebih dalam periode penelitian. Sampel dibagi menjadi 3 kelompok berdasar total aset, yaitu kelompok perusahaan kecil, menengah dan besar. Kelompok perusahaan kecil, adalah untuk perusahaan dengan total aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 500 juta. Kelompok perusahaan menengah, adalah untuk perusahaan dengan total aset lebih dari Rp 500 juta sampai dengan maksimum Rp 10 Milyar. Kelompok perusahaan besar, adalah untuk perusahaan dengan total aset lebih dari Rp 10 Milyar

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengujian *Cash Conversion Cycle* pada Kelompok Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar

Berdasar tabel 5.1, rata-rata *cash conversion cycle* pada perusahaan kecil adalah sebesar 105,918 dengan jumlah minimum selama -440,72 dan maksimum selama 729,63. Ini

berarti bahwa pada kelompok perusahaan kecil dibutuhkan waktu selama 114,75 hari untuk pengembalian kas. Sedangkan pada kelompok perusahaan menengah rata-rata *cash conversion cycle* sebesar 59,92 dan pada perusahaan besar rata-rata *cash conversion cycle* yang dibutuhkan selama 108,1218 hari.

Tabel 5.1
Ikhtisar Hasil Perhitungan *Cash Conversion Cycle* pada Kelompok Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar

Kelompok Perusahaan	Minimum	Maksimum	Rata-rata CCC
Kecil	-440,72	729,63	105,918
Menengah	-414,7	510,8177	59,92
Besar	-368,58	624,76	108,1218

Dari tiga kelompok perusahaan tersebut tampak bahwa kelompok perusahaan menengah memiliki siklus perputaran kas yang paling singkat. Diikuti oleh kelompok perusahaan kecil, dan kelompok perusahaan besar. *Cash Conversion Cycle* yang pendek memberikan indikasi bahwa perusahaan menerima kas secara cepat dan pemasok dibayar mendekati tanggal jatuh tempo (Gentry et.al., 1990). Semakin pendek *Cash conversion cycle* perusahaan menunjukkan semakin efektifnya manajemen modal kerja perusahaan. Kelompok perusahaan besar memiliki CCC terpanjang dibanding kelompok perusahaan lain. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kelompok perusahaan besar memiliki sedikit waktu untuk mengumpulkan kas dari kegiatan operasinya sebagai akibat dari posisi tawar kepada pemasok yang dimiliki perusahaan sehingga dapat memperpanjang periode pembayaran, serta akibat dari tingginya tingkat penjualan (Costa, 2014).

Cash conversion cycle yang positif menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan manajemen dalam mengumpulkan atau meminjamkan dana dari aktiva lancar sebelum melakukan pengumpulan piutangnya. Sebaliknya, *cash conversion cycle* yang negatif mengindikasikan bahwa perusahaan tidak membayar kepada pihak supplier hingga perusahaan menerima pembayaran dari debitur dan oleh karena itu, perusahaan tidak memiliki kebutuhan untuk mengadakan sangat banyak persediaan dan dapat menahan kas untuk jangka waktu yang lebih lama (Hutchison et al., 2007; Uyar, 2009).

2. Pengujian Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Cash Conversion Cycle* pada Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar

Hasil pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *cash conversion cycle* pada perusahaan kecil, menengah dan besar disajikan pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Hasil Regresi Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Cash Conversion Cycle* pada Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar

Variabel	Kelompok Perusahaan					
	Kecil		Menengah		Besar	
	Koefisien	t-stat	Koefisien	t-stat	Koefisien	t-stat
Konstanta	18035.122	0.489	11277.716	1.516	375.328	0.548
ROA	-3190.712	-0.743	6341.750	7.936*	194.071	1.303
Size	-1295.798	-0.397	-834.752	-1.393	-41.041	-0.913
OCF	46.319	0.828	4.455	0.170	-14.337	-0.427
Growth	211.904	0.110	-776.338	-1.202	-101.462	-1.487
CR	1886.243	0.497	13.547	0.419	4.533	1.151
QR	-2158.265	-0.573	-24.196	-0.405	-7.271	-1.127
DR	-4622.167	-5.060*	-2425.419	-7.971*	-433.497	-4.735*
R Square	0.643		0.213		0.243	

F Stat	6.918	14.831	3.859
Prob F	0.000	0.000	0.000
DW	1.677	1.863	2.010

Keterangan: *Sig pada $\alpha=5\%$

Dari hasil pengujian pada tabel 5.2 nampak bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *cash conversion cycle* pada kelompok perusahaan kecil, menengah dan besar. Hal ini tampak dari probabilitas F hitung masing-masing kelompok perusahaan yang lebih kecil dari 5%. Ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yang terdiri dari *Return on Asset (ROA)*, *Ukuran Perusahaan (Size)*, *Operating Casf Flow (OCF)*, pertumbuhan penjualan (*Growth*), *Current Ratio (CR)*, *Quick Ratio (QR)*, dan *Debt Ratio (DR)* mampu menyediakan informasi yang cukup relevan untuk mengestimasi *Cash Conversion Cycle (CCC)*.

Pada kelompok perusahaan kecil dan kelompok perusahaan besar, *Debt Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Cash Conversion Cycle (CCC)*, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas t-hitung yang lebih kecil dari 5%. Ini berarti bahwa kelompok perusahaan ini memiliki rasio hutang yang tinggi namun *Cash Conversion Cycle* nya cukup rendah. Penggunaan dana eksternal yang rendah akan mendukung ketersediaan kas dalam perusahaan dan ini akan mempersingkat siklus perputaran kas. Pada kelompok perusahaan kecil dan besar, perusahaan menggunakan dana eksternal yang cukup besar untuk membiayai operasionalnya namun perusahaan mampu mengumpulkan kas dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini, meskipun perusahaan menggunakan dana eksternal untuk membiayai kegiatan operasionalnya, dana eksternal yang digunakan berupa hutang jangka pendek. Sehingga, perusahaan mempunyai kemampuan untuk memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan dan hal ini mampu mempersingkat *cash conversion cycle* perusahaan (Chambers & Lacey, 2004). Jeng-Ren (2006) menyatakan bahwa perusahaan besar dapat mengelola manajemen modal kerjanya lebih baik dibanding perusahaan kecil. Oleh karenanya, meskipun kelompok perusahaan besar memiliki tingkat rasio hutang yang tinggi, kelompok ini mampu mengelola rasio hutangnya sehingga dapat mempersingkat *cash conversion cycle* nya

Pada kelompok perusahaan menengah, ROA berpengaruh positif signifikan, sedangkan *Debt Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *cash conversion cycle*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas t-hitung ROA dan DR yang lebih kecil dari 5%. Pengaruh ROA yang positif signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi *Return on asset* maka akan semakin panjang siklus *Cash Conversion Cycle* perusahaan. Menurut Rahmad and Nazer (2007), ketika profitabilitas meningkat maka *cash conversion cycle* akan semakin pendek. Hal ini disebabkan karena perusahaan membutuhkan lebih banyak penjualan untuk meningkatkan ROA dengan memperpanjang masa pembayaran hutang dan mempercepat penarikan piutang pelanggan. Meningkatnya ROA yang diikuti dengan meningkatnya CCC menunjukkan bahwa perusahaan dengan profit yang besar kurang peduli dengan modal kerja yang efisien yang ditunjukkan dengan semakin panjangnya siklus perputaran kas (CCC). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nazir and Afza (2009), Mahomet and Eda (2000), dan Wu (2001) yang menunjukkan pengaruh ROA yang positif terhadap CCC.

E. PENUTUP

Cash conversion cycle sangat membantu perusahaan dalam mengetahui periode perputaran kas yang dicerminkan dari jangka waktu yang dimulai dari pembelian bahan mentah untuk diolah menjadi produk hingga pengumpulan piutang dari penjualan produk selesai. *Cash conversion cycle* dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui keefektifan manajemen modal kerja perusahaan. Semakin pendek *cash conversion cycle*, maka akan semakin efektif manajemen modal kerja perusahaan. Dalam penelitian ini,

ditemukan bahwa kelompok perusahaan menengah mempunyai *cash conversion cycle* yang paling pendek, diikuti oleh kelompok perusahaan kecil dan besar. Pada kelompok perusahaan kecil dan besar, variabel *Debt Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *cash conversion cycle*. Sedangkan pada kelompok perusahaan menengah, *Return on Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *cash conversion cycle* dan *Debt Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *cash conversion cycle*. Semakin pendek *cash conversion cycle* perusahaan maka akan semakin efisien manajemen modal kerjanya. Sehingga dari ketiga kelompok perusahaan, kelompok perusahaan menengah memiliki manajemen modal kerja yang paling efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellouma, M, 2010, "Effect of capital investment on working capital management: Evidence on Tunis an export SME", *The International Journal of Finance*, 22(3), pp. 6498-6509.
- Cakir, H.M. ,2013, "Sectoral Analysis of the Impact of Cash Cycle Company to profitability ", *Journal of Law University*, 30, 8, pp. 4948-4965
- Chambers, D.R., Lacey, N.J. (2004). *Modern Corporate Finance: Theory & Practice*, Plymouth:Hayden McNeil Publishing, Inc.
- C. Jeng-Ren, C. Li and W. Han-Wen, (2006), "The Determinants Of Working Capital Management", *Journal of American Academy of Business*, Cambridge, 10(1), pp 149-155.
- Costa, Barbara, (2014), "Cash Conversion Cicle Across Industry", A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Management from the NOVA – School of Business and Economics.
- Deloof, M., 2003, "Does working capital management affect profitability of Belgian firms?.", *Journal of Business Finance & Accounting*, (30), pp. 573-588.
- Eljelly, A. (2004). "Liquidity-Profitability Tradeoff: An empirical Investigation in an Emerging Market", *International Journal of Commerce and Management*, Vol 14 No 2 pp. 48 – 61
- Gentry, James A., R. Vaidyanathan and Hei Wee Lee, (1990) ," A Weighted Cash Conversion Cycle", *Financial Management*, Spring, pp 90-99.
- Howorth, C. & Westhead, P. (2003). "The Focus Of Working Capital Manangement In UK Small Firms", *Management Accounting Research*, 14,pp. 94-111.
- Hutchison, P. D., Farris II, M. T. and Anders, S. B, 2007, "Cash-to-cash analysis and Management", *The CPA Journal*, Vol. 77, No. 8, pp. 42-47.
- Jans Nilsson, 2010, "The Effect Of Company Characteristics On Working Capital Management", *Umeå School of Business*.
- J. Chiou, L. Cheng and H. Wu, 2006," The Determinants Of Working Capital Management" , *The Journal of American Academy of Business*, Cambridge, 10(1), pp. 149-155.
- J.D. Moss and B. Stine, 1993, "Cash Conversion Cycle And Firm Size: A Study Of Retail Firms", *Managerial Finance*, 19(8), Pp. 25-34.
- Lyroutdi, K., Lazaridis, Y., 2000, "The Cash Conversion Cycle and Liquidity Analysis of the Food Industry in Greece", *EFMA Athens*, pp. 1-31
- Muneeb Ahmad Attari, Kashif Raza, April 2012, The Optimal Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 4
- Niaz Ahmed Bhutto ,Ghulam Abbas, Mujeeb-ur-Rehman , Syed Mir M. Shah , 2011, "Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size, Working Capital Approaches and Firm's Profitability: A Case of Pakistani Industries", *Pak. j. eng. technol. sci.* ,Volume 1, No 2, pp 45-64

Dampak Struktur Kepemilikan, Financial Leverage, Board Director terhadap Nilai Perusahaan

Sri Dwi Ari Ambarwati¹⁾, Rini Dwi Astuti²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta

email: ambarwati-73@yahoo.com

²⁾Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta

email: rinidwiastuti@upnyk.ac.id

Abstract

This study tried to analyze the effect of ownership structure, financial leverage, size of board directors and sales Growth on the performance of companies with lower growth opportunities, whether there is a proxy growth opportunities with low PER. This research was conducted at the manufacturing company with the selection criteria for purposive sampling method 2010-2012 period, based on the criteria the obtained sample of 32 companies with low growth opportunities. Thus obtained 96 observations for each group. The results showed that: 1). simultaneously the ownership structure, financial leverage, size of board directors and sales Growth affect the performance of companies with low growth opportunities. 2). Partially, it was found empirical evidence that financial leverage and variable size of board directors significantly affect the company's performance with lower growth opportunities. For institutional ownership structure revealed a significant effect on performance, but at a rate of 10% alpha tolerated.

Keyword: Ownership structure, leverage, size of board, growth opportunities

1. PENDAHULUAN

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa peluang pertumbuhan (growth opportunities) mempengaruhi hubungan antara nilai perusahaan/kinerja dan keputusan keuangan perusahaan (Smith and Watts, 1992; Chen and Liu, 2010, Reyna & Encalada, 2012). Namun tidak ditemukan bagaimana hubungan ini dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan insider. Ini isu yang menarik karena konflik kepentingan yang baru akan muncul antara pemegang saham minoritas dan mayoritas. (Shleifer & Vishny, 1997). La Porta, et.al (2000) telah membuktikan bahwa di beberapa negara, *Expropriation* (kecurangan) yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*) terhadap para pemegang saham minoritas dan para kreditor sangat besar. Pada saat para investor mendanai perusahaan, mereka menghadapi risiko dan kadang-kadang besar kemungkinannya bahwa kembalian atas investasi yang mereka tanamkan tidak pernah material, karena para manajer dan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi terhadap mereka.

Penelitian terkait dilakukan oleh Reyna & Encalada (2012) pada perusahaan di Mexico tentang pengaruh struktur kepemilikan, *financial leverage* dan proporsi direktur terhadap nilai perusahaan dengan membedakan ada tidaknya peluang pertumbuhan untuk sampel yang ditelitinya. Kepemilikan keluarga/insider, komposisi dan ukuran direktur serta *leverage* keuangan memainkan dua peran yaitu bisa meningkatkan kinerja pada perusahaan yang tidak memiliki peluang pertumbuhan menguntungkan tapi sebaliknya, memiliki pengaruh negatif pada perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan. Masalah baru muncul antara pemegang saham mayoritas dan minoritas pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun demikian konsentrasi kepemilikan, hutang dan *board*

director hanya sebuah mekanisme dalam perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi adanya konflik keagenan.

Hasil penelitian Ahmad, et.al (2012) pada perusahaan Malaysia menemukan bukti empiris bahwa struktur modal seperti hutang jangka pendek dan total hutang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini mendukung temuan Reyna & Encalada (2012) dan membuktikan tulisan sebelumnya oleh Ross (1977), Heinkel (1982) and Noe (1988) yang menyatakan bahwa penambahan leverage dengan menambah hutang perusahaan memberikan implikasi positif bagi nilai perusahaan dan kinerja. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hadlock&James (2002) dimana mereka menyimpulkan bahwa perusahaan lebih menyukai hutang karena untuk mengantisipasi tingginya pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi gabungan penelitian Reyna & Encalada (2012), Abor (2005) dan Zurraidah Ahmad, et.al (2012) dengan lebih menekankan pada pengaruh karakteristik perusahaan seperti struktur kepemilikan (insider dan institusi), *leverage*, *sales growth* dan *size* terhadap kinerja perusahaan dengan membedakan ada tidaknya peluang pertumbuhan (growth opportunities) yang dalam hal ini menggunakan proksi *Price Earnings Ratio* (PER) seperti yang dilakukan oleh Smith and Watts (1992), McConnell-Servaes, (1995), Kallapur (2001) dan Reyna & Encalada, (2012)

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Seiring perkembangan literatur manajemen keuangan menunjukkan bagaimana peluang pertumbuhan (growth opportunities) memberikan pengaruh pada hubungan kinerja/nilai perusahaan dan keputusan keuangan perusahaan (struktur modal) (Smith and Watts, 1992; Chen and Liu, 2010; Reyna, 2012). Meski begitu beberapa penelitian belum menemukan bagaimana hubungan ini dipengaruhi struktur kepemilikan, khususnya (kepemilikan orang dalam (insider ownership) karena isu baru muncul bahwa konflik keagenan lebih dipengaruhi oleh orang dalam (insider) hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan yang berbeda antara pemegang saham pengendali (misal:institutional) dan pemegang saham minoritas (misalnya: orang dalam atau individu) (Shleifer-Vishny,1997;La Porta et.al, 2000; Reyna-Encalada, 2012)

Penelitian tentang teori struktur modal diawali oleh Miller dan Modigliani (1958) mereka menemukan bahwa nilai perusahaan (value of the firm) dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Mereka juga menyimpulkan bahwa teori ketidakrelevanan struktur modal dimana financial leverage tidak mempengaruhi nilai perusahaan hanya pada kondisi pasar sempurna. MM menyatakan bahwa tanpa pajak maka struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Meskipun pendapat ini tidak konsisten dengan kondisi riil dimana perusahaan pasti memiliki kewajiban pajak sehingga teori ini masih menjadi perdebatan (Ahmad, Abdullah & Roslan ,2012)

Penelitian terkait dilakukan oleh Reyna & Encalada (2012) pada perusahaan di Mexico tentang pengaruh struktur kepemilikan, *financial leverage* dan proporsi direktur terhadap nilai perusahaan dengan membedakan ada tidaknya peluang pertumbuhan untuk sampel yang ditelitinya. Kepemilikan keluarga/insider, komposisi dan ukuran direktur serta leverage keuangan memainkan dua peran yaitu bisa meningkatkan kinerja jika tidak ada proyek investasi tapi memiliki pengaruh negatif jika ada peluang pertumbuhan. Masalah baru muncul antara pemegang saham mayoritas dan minoritas pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun demikian konsentrasi kepemilikan, hutang dan board director hanya sebuah mekanisme dalam perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan.

Hasil penelitian Ahmad, et.al (2012) pada perusahaan Malaysia menemukan bukti empiris bahwa struktur modal seperti hutang jangka pendek dan total hutang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini mendukung temuan Reyna & Encalada (2012) dan membuktikan tulisan sebelumnya oleh Ross (1977), Heinkel (1982) and Noe (1988) yang

menyatakan bahwa penambahan leverage dengan menambah hutang perusahaan memberikan implikasi positif bagi nilai perusahaan dan kinerja. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hadlock and James (2002) dalam Reyna & Encalda (2012) dimana mereka menyimpulkan bahwa perusahaan lebih menyukai hutang karena untuk mengantisipasi pembayaran pajak yang lebih tinggi.

Gleason et.al (2000) menguji hubungan antara kinerja dan leverage dengan menggunakan proksi kinerja return on assets. Hasil penelitian adalah total hutang memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja, kemudian dua implikasi dapat disimpulkan yaitu struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan koefisien negatif menunjukkan secara umum penggunaan hutang yang lebih besar bagi perusahaan menyebabkan pengaruh negatif itu. Struktur modal juga tidak hanya merupakan penentu kinerja, ukuran (size) perusahaan juga merupakan penentu kinerja perusahaan yang lebih besar akan menghasilkan return on asset yang lebih besar pula dibanding perusahaan kecil. Hasil ini didukung oleh Agarwal, et.al (2001) ketika hutang memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun profitabilitas perusahaan berhubungan positif dengan sales dan sales growth. Penelitian ini juga selaras dengan Hames and Chen (2004) dalam Reyna-Encalada (2012) dimana rasio hutang memiliki hubungan negatif dengan kinerja namun size memiliki hubungan positif terhadap kinerja.

Mesquita and Lara (2003) menemukan bukti empiris bahwa hutang jangka panjang tidak berpengaruh terhadap return on equity dan bertanda negatif, namun hutang jangka pendek memiliki tanda positif. Abbor (2005) melakukan penelitian di Ghana dan menemukan bukti bahwa hutang jangka pendek memiliki hubungan positif signifikan terhadap return on equity (ROE), dia menganggap bahwa hutang jangka pendek tidak mahal dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Hasil ini juga menyatakan bahwa profitabilitas mampu ditingkatkan dengan sales dan sales growth. Untuk hutang jangka panjang memiliki hubungan negatif signifikan dengan kinerja. Artinya peningkatan dalam hutang jangka panjang berhubungan dengan pengurangan profitabilitas dan lebih mahal. Implikasinya adalah posisi hutang berhubungan dengan peningkatan profitabilitas, rasio hutang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas. Selain itu terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan (size) dan sales growth.

Berdasarkan beberapa hasil riset sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Diduga terdapat pengaruh signifikan secara serempak struktur kepemilikan, financial leverage, size dan sales growth terhadap kinerja pada perusahaan dengan *growth opportunities* rendah.
- H₂ : Diduga terdapat pengaruh signifikan secara parsial struktur kepemilikan, financial leverage, size dan sales growth terhadap kinerja pada perusahaan dengan *growth opportunities* rendah.

3. METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2012 yaitu ada 128 perusahaan, dan sampel yang memenuhi kriteria penelitian adalah 64 perusahaan (kemudian diranking menjadi dua kelompok yaitu 32 perusahaan dengan PER tinggi dan 32 perusahaan dengan PER rendah) selama 3 tahun sehingga jumlah observasi sebesar 96 observasi untuk perusahaan dengan PER Tinggi dan 96 untuk PER rendah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* tahun 2010 – 2012 dan dari ruang penelusuran UPN "Veteran" Yogyakarta. Analisis data dari model dengan dukungan program Eviews. Artikel ini khusus melihat dan menguji perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah

karena ingin menguji apakah dampak struktur kepemilikan , financial leverage, size dan sales growth masih berpengaruh signifikan meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki peluang investasi (underinvestment)

Teknik Analisis Data

a. Uji Regresi OLS

Analisis estimasi data dari seluruh model persamaan regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program Eviews. Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi yang diformulasikan sebagai berikut :

$$Q_{\text{Low-PER}} = \alpha + \beta_1 \text{INSD}_{it} + \beta_2 \text{INST}_{it} + \beta_3 \text{LEV}_{it} + \beta_4 \text{SIZE}_{it} + \beta_5 \text{SG}_{it} + e_{it} \dots \text{model 1}$$

Keterangan:

- Q = tobin's Q = Nilai perusahaan
 INSD = kepemilikan insider/internal
 INST = kepemilikan institusi/eksternal
 LEV = financial leverage
 SIZE = ukuran board of director (outsider)
 SG = sales growth
 TA = Total assets
 e = error term

b. Uji Hipotesis

Uji F digunakan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel bebas (independen) secara bersamaan terhadap variabel terikat (dependen) dan Uji t adalah uji parsial yang digunakan untuk menguji keterkaitan antara variabel bebas (independen) secara individual dengan variabel terikat (dependen).

c. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang tidak bias atau BLUE maka perlu dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji Multikolinearitas, Autokorelasi dan heterokedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Regresi OLS

Berdasarkan olah data statistik eviews diperoleh hasil regresi OLS sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi OLS

Dependent Variable: Y_RENDAH

Method: Least Squares

Date: 06/02/15 Time: 14:45

Sample: 1 96

Included observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.14539	1.198487	14.30586	0.0000
X1	1.260931	1.074846	1.173126	0.2438
X2	-2.064788	1.061739	-1.944722	0.0549
X3	-0.142046	0.047340	-3.000515	0.0035
X4	0.417578	0.174638	2.391108	0.0189
X5	-0.018429	0.037700	-0.488816	0.6262

R-squared	0.194353	Mean dependent var	13.37001
Adjusted R-squared	0.149595	S.D. dependent var	0.829641
S.E. of regression	0.765074	Akaike info criterion	2.362773
Sum squared resid	52.68042	Schwarz criterion	2.523044
Log likelihood	-107.4131	Hannan-Quinn criter.	2.427557
F-statistic	4.342294	Durbin-Watson stat	1.545627
Prob(F-statistic)	0.001382		

Kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan terbukti bahwa model regresi ini lolos dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Sehingga persamaannya:

$$Y_RENDAH = 17.1453940301 + 1.26093065075X1 - 2.06478804296X2 - 0.142045651041X3 + 0.417578264638X4 - 0.0184286191554X5$$

2. Uji Hipotesis untuk Perusahaan dengan Growth Opportunities Rendah (Model PER Rendah)

a. Pengaruh secara serempak

Berdasarkan olah data regresi OLS diatas maka dapat dapat dibuktikan secara empiris bahwa struktur kepemilikan, financial leverage, Size, dan sales growth memiliki pengaruh secara serempak terhadap kinerja perusahaan dengan growth opportunities rendah. Hal itu ditunjukkan dengan nilai probabilitas F statistik sebesar $0,0013 <$ dari alpha ditolerir sebesar 5%. Dengan demikian hipotesis pertama terbukti dan model regresi OLS ini mampu untuk dianalisis lebih lanjut

b. Pengaruh secara Parsial

Berdasarkan olah data regresi OLS maka diperoleh hasil empiris sebagai berikut:

- 1). Struktur kepemilikan Insider Ownership (INSID) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan growth Opportunities rendah, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,2438 >$ 5%, sehingga hipotesis alternatif ditolak.
- 2). Struktur kepemilikan Institutional Ownership (INST) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan growth Opportunities rendah, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,054 <$ 10%, sehingga hipotesis alternatif diterima.
- 3). Financial Leverage (LEV) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan growth Opportunities rendah, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,0035 <$ 5%, sehingga hipotesis alternatif diterima.
- 4). Size (Board) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan growth Opportunities rendah, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,0189 <$ 5%, sehingga hipotesis alternatif diterima.
- 5). Sales growth (SG) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan growth Opportunities rendah, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,6262 >$ 5%, sehingga hipotesis alternatif ditolak.

3. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Insider Ownership (INSID), Institutional ownership (INST), Financial Leverage (LEV), Size od Board (Size) dan Sales growth (SG) terhadap Kinerja perusahaan dengan growth opportunities rendah.

Berdasarkan analisis statistik diperoleh hasil bahwa INSID tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities* rendah, hal ini berhubungan dengan teori keagenan dimana kepemilikan insider memainkan peranan penting dalam mengurangi masalah keagenan. Untuk perusahaan dengan peluang investasi rendah maka kepemilikan insider sangat diperlukan untuk bisa mengurangi konflik keagenan, dan sangat diperlukan karena kepemilikan insider bertindak sebagai mekanisme kontrol dari perilaku manajemen perusahaan. Hasil statistik tidak signifikan, penjelasannya adalah adanya perbedaan perilaku struktur kepemilikan dalam kerangka kerja institusional yang berbeda berhubungan dengan masalah keagenan dan asimetri informasi. Namaun arah hubungan yang positif sesuai teori dimana semakin tinggi kepemilikan insider maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah cenderung sedikit memiliki konflik kepentingan, karena cenderung tidak ada perilaku manajer yang mengambil proyek investasi demi kepentingan pribadinya, sehingga konflik keagenan bisa diminimalisir apalagi ditambah pengawasan yang lebih besar dari insider, maka kepemilikan insider yang lebih besar akan berhubungan dengan kinerja yang tinggi pula. Temuan ini mendukung penelitian Reyna & Encalada (2012), Conell & Servaes (2007), Ambarwati, et.al, (2011).

Kepemilikan institusional (INST) memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah artinya semakin besar kepemilikan institusional maka dapat mengurangi penggunaan ekuitas eksternal sehingga kinerja perusahaan semakin baik. Konsentrasi kepemilikan memang berpengaruh positif terhadap kinerja untuk perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah karena memang di situ tidak ada pemegang saham mayoritas dan minoritas seperti yang terjadi pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi. Rendahnya peluang pertumbuhan menyebabkan kebutuhan akan modal eksternal juga rendah sehingga masalah keagenan bisa dihindari. Semakin tinggi kepemilikan institusional atau eksternal maka semakin besar kontrol yang bisa dilakukan, sehingga masalah keagenan bisa dikurangi dan akhirnya kinerja perusahaan semakin baik. Temuan ini mendukung penelitian Servaes (2007)

Financial leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah, hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan rendah biasanya kelebihan cashflow yang kemudian digunakan manajer untuk melakukan investasi pada proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Sehingga perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi untuk mendongkrak kinerja perusahaan dan adanya leverage tinggi maka kontrol perusahaan dibantu oleh kreditor atau lenders, sehingga masalah keagenan bisa dikurangi dan kinerja menjadi lebih baik. Hasil statistik menunjukkan arah hubungan negatif, hal ini dimungkinkan adanya penggunaan leverage yang tidak semestinya oleh manajer. Tingkat hutang tinggi namun tidak digunakan untuk proyek investasisehingga terjadi *underinvestment* dan akhirnya menyebabkan kinerja perusahaan menurun akibat beban tetap yang harus terus ditanggung oleh perusahaan. Temuan ini mendukung Reyna & Encalada (2012), Mc Conell & Servaes (1995)

Size of board director mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah. Artinya banyaknya direktur dari luar perusahaan dapat memberikan kontrol yang obyektif terhadap perilaku manajer bagi pemilik perusahaan, dan membatasi kebebasan manajer dalam mengambil keputusan-keputusan keuangan yang tidak menguntungkan. Sehingga banyak penelitian menemukan bukti empiris bahwa hubungan antara *size of board director* dan kinerja perusahaan adalah negatif. Namun riset ini menemukan hubungan yang positif signifikan, hal ini kemungkinan karena jika terlalu banyak komposisi direktur dari luar maka semakin banyak pembatasan-pembatasan yang mereka lakukan, sehingga lebih baik komposisi direktur eksternal itu lebih kecil. Sesuai dengan penelitian San Martin (2010), Reyna & Encalada (2012) yang menemukan bukti

empiris size of board berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Semakin kecil size of board semakin tinggi nilai perusahaan.

Sales of Growth mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah. Hal ini terjadi karena sedikitnya investasi yang dilakukan perusahaan menyebabkan kelebihan *cashflow* yang salah satunya berasal dari penjualan menyebabkan perusahaan mengalami underinvestmen sehingga nilai perusahaan tidak bisa meningkat. Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham tidak terwujud. Sehingga pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi nilai perusahaan, karena hasil penjualan tidak dimanfaatkan dengan melakukan investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan, karena memang tidak memiliki peluang investasi. Temuan ini tidak selaras dengan penelitian Abbor (2005).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini sudah bisa membuktikan bahwa secara empiris bahwa struktur kepemilikan, financial leverage, Size of board director, dan sales growth memiliki pengaruh secara serempak terhadap kinerja perusahaan dengan growth opportunities rendah.

Jika dilihat pengaruhnya secara parsial maka ditemukan bukti empiris bahwa variabel financial leverage dan size of board director berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan growth opportunities rendah. Untuk struktur kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja namun pada tingkat alpha ditolerir 10%. Sedangkan Struktur kepemilikan Insider Ownership (INSID) dan Sales Growth secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan growth Opportunities rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang bisa disampaikan untuk perbaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan financial leverage dan size of board director serta kepemilikan institusional karena ketiganya ini berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan growth opportunities rendah.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mencoba menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga ditemukan hasil penelitian yang lebih robust.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data size of board sehingga perlu dilakukan pendekatan atau penetapan proksi yang lebih baik.

6. REFERENSI

- Abor, 2005, The Effect of Capital Structure on Profitability: An Empirical Analysis of Listed Firms in Ghana, *The Journal of Risk Finance*, Vol. 6, No. 5, pp 438-445
- Agarwal, R and Elston, JA 2001, 'Bank-firm relationships, financing and firm performance in Germany', *Economics Letters*, vol.72, pp.225-232.
- Agus Harjito, 2006, Substitution Relationship between the Agency Problem Control Mechanisms in Malaysia, *Siasat Bisnis*, p 111-117
- Ahmad, Abdullah and Roslan, 2012, Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms, *International Review of Business Research Papers Vol. 8. No.5. July 2012. Pp. 137 – 155*
- Brigham, E and Houston, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Penerbit Salemba, Edisi kesepuluh
- Chen, C., & T. Steiner. (2005). Tobin's q, managerial ownership, dan analyst coverage: A nonlinear simultaneous: A nonlinear simultaneous equations model. *Journal of Economics and Business* 52: 365-382.

- Eisenhardt, 1999, Agency Theory an Assesment and Review, *Academy of Management Review*, vo. 14, no. 1, pp 57-74
- Gozali, 2005, *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi ketiga, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Gleason KC, Mathur LK and Mathur I ,2000, 'The interrelationship between cultures, capital structure, and performance: Evidence from European retailers', *Journals of Business Research*, vol.50, pp.185-91
- Kallapur, et.al, 1999, The Asosiasi Between Investment Oportunity Set Proxies and Realized Growth, *Journal of Business Finance and Accounting*, pp 505-519
- La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny.1997. Legal Determinants of External Finance. *Journal of Finance*.52. 1131-1150
- La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny.1999. Corporate Ownership Around the World. *Journal of Finance*.54. 471-517
- La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny. 2000.Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*.58(1-2).3-27
- La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny. 2000. Agency Problem and Dividend Policies Around The World. *Journal of Finance*. 60. 1-33.
- Mayer, C. ,1996, Corporate Governance, competition, and performance, *Jornal of Law and Society*, 24, 152-76
- McConnell and Servaes, H. 1995, Equity Ownership and the two faces of debt, *Journal of Financial Economics*, 39, 131-57
- Mesquita and Lara 2003, 'Capital structure and profitability: The Brazilian case', Working paper, Academy of Business and Administration Sciences Conference, Vancouver, July 11-13
- Modigliani, F and Miller, M 1958, 'The cost of capital, corporation finance and the theory of investment', *The American Economic Review*, vol. 48 no. 3, pp. 261-97.
- Modigliani, F and Miller, M 1963, 'Corporate income taxes and the cost of capital: A correction', *American Economic Review*, vol. 53, pp. 443-53.
- Reyna-Encalada, 2012, Ownership Structure, Firm Value and Investment Opportunity Sets: Evidence from Mexican Firm, *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, Volume 8, Issue 3, pp 35-37
- Riahi-Belkaouli & Picur, 2001, Investment Opportunity Sets Dependence of Dividend Yield and Price Earnings Ratio, *Managerial Finance*, Volume 27 Number 3
- Smith and Watts, 1992, The Investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies, *Journal of Finacial Economics*, 32, pp 263-292
- Weston, J.Freud and Brigham, F.Eugene. 1992. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jilid Dua. Erlangga : Jakarta.
- Wilopo dan Sekar Mayangsari. 2002. Pengaruh Struktur Kepemilikan,Perilaku Manajemen Laba,Free Cash Flow Hypotesis dan Economic Value Added: Pendekatan Path Analysis.Simposium Nasional Keuangan In Memorium Prof.Dr.Bambang Riyanto.Hal:87-112.

**PENGARUH *EXPERIENCE* PADA TIPE ALTERNATIF KOMUNIKASI DALAM
TIM AUDIT
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

Sultan, SE, MSi

Kaharudinsyah Leon Sakti, SE, Ak., MSc., CA

Dra Sri Luna Murdianingrum, MSi

Abstrack

This study aims to select effective communication in an audit team during the audit team to make decisions quickly and accurately. There are several alternative types of communication used is by face-to-face or direct communication in a meeting agenda and communication with the computer-aided system is to chat and bulletin boards. With the growing world of business and auditing, will greatly enable the Public Accountant (KAP) branch audit of a company in a different place, so it will take time and the way of effective communication within the audit team so that decisions can be made quickly. Type of computer-aided communication with the audit team to be very helpful in communicating anywhere without having to meet face to face in a meeting. Type of a variety of computer-assisted communication, can be done with the chat system or by means of a bulletin board.

This study used a moderator variable is experience. The moderator variables can affect the communication method for use in the audit team. Test equipment used in this study is the Mann-Whitney test to compare the effectiveness of three types of communication with the experimental method in some KAP in DI Yogyakarta and Central Java. The results of this study indicate that the type of communication vs. chat bulletin board system does not show one of the better and chat systems vs. face to face similar results although at variable moderated experience. In addition, this study provides evidence that this type of communication in a computer-assisted audit team is needed by the firm to communicate in a different place and time.

Keywords: Bulletin Board, Chat System, auditing, and Experience.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Audit review merupakan sarana utama dalam melakukan kontrol kualitas audit dan juga sebagai pelatihan bagi auditor (Rich et al., 1997). Semua pekerjaan yang dilakukan didokumentasikan dalam kertas kerja (*workpapers*) oleh auditor (*preparers*) yang akan direview oleh anggota yang lebih senior (*reviewer*) dalam tim audit (payne et al., 2010). Lebih dari 50% dari waktu manajer audit dan 30% dari total jam audit dialokasikan untuk melakukan review, Kantor Akuntan Publik (KAP) secara terus-menerus memeriksa cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan review (Bamber dan Bylinski 1987; rich et al., 1997; Gibbins dan Trotman, 2002; Miller et al., 2006).

Beberapa organisasi saat ini, termasuk KAP menggunakan beberapa bentuk komunikasi berbantuan komputer. Misalnya, sebagian besar KAP dalam penugasannya menggunakan *group support systems* (GSS), seperti *Lotus note* dan sama seperti *Web-based system* (Menezes 1999; Lamont 2000) dalam (Murthy dan Kerr 2004).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, misalnya karakteristik pengambil keputusan, fitur penugasan, isi informasi serta lingkungan dimana keputusan tersebut dibuat (Libby and Lewis 1977, 1982; Maines 1995; Roberts 2002) dalam (Payne ea al. 2010). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murthy dan Kerr (2004) melakukan penelitian terhadap *review* yang dilakukan dengan tiga cara tersebut tidak memasukkan faktor lain yang mempengaruhi hasil pengambilan keputusan tersebut,

begitupun yang dilakukan oleh Payne et al., (2010). Dengan adanya hasil yang berbeda tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan metode yang berbeda.

1.2. Perumusan Masalah

Secara spesifik, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

Apakah *experience* sebagai variabel moderator akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pola komunikasi dalam tim audit yang menggunakan *bulletin board system*, *synchronous chat system* dan *face-to-face* ?

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pembuatan Keputusan Grup dalam Auditing

Secara umum literatur tentang group dalam pembuatan keputusan, dibagi dalam dua tipe: (1) *hierarchical groups* dan (2) *peer groups* (Jessup dan valacich, 1993). *Hierarchical group* dalam auditing diwakili terutama dari proses review audit. Beberapa proses pembuatan keputusan secara hirarki dilengkapi selama pelaksanaan pada bagian lapangan dari audit. *Peer groups* digunakan untuk membuat keputusan secara kolektif dalam bentuk komunikasi secara bersamaan (Sutton et al. 1991). Ashton et al. (1988) mencatat bahwa *peer review* menjadi semakin penting dalam mendukung aktivitas tim audit, terutama dalam perencanaan audit dan pada fase pelaporan. *Peer group* audit secara khusus berfokus pada isu yang lebih luas seperti pengungkapan pelaporan keuangan, tingkat materialitas, dan pemilihan laporan audit (Ashton et al. 1988).

2.3. Experience

Penelitian tentang pengalaman auditor menunjukkan bahwa penilaian auditor sering membaik dengan pengalaman lebih besar. Pengalaman memberikan kesempatan untuk akuisisi pengetahuan teknis yang terkait, yang penting untuk meningkatkan kinerja tugas (Libby dan Luft, 1993).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Ha: pengaruh kinerja pemecahan masalah dalam *hidden profile task* akan dipengaruhi oleh *experience* pada interaksi tim yang menggunakan sistem *bulletin board*, diikuti dengan tim yang menggunakan sistem *chat*, diikuti dengan interaksi tim menggunakan sistem *face-to-face*.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Partisipan

Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) se DIY dan JATENG. Partisipan merupakan auditor aktif di suatu KAP, kemudian dibentuk 6 kelompok dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang. Setiap partisipan dalam kelompok diupayakan sama untuk beberapa kriteria yaitu: *aptitude* (diukur berdasarkan jam audit), *background in accounting* (masih bekerja di lingkungan akuntansi atau audit), *gender* (tidak semua laki-laki atau perempuan dalam tim) dan auditor yang sering menggunakan komputer (lebih pengalaman dengan teknologi).

3.2. Desain Penelitian

Tim ditugaskan untuk salah satu dari tiga cara komunikasi yaitu dengan *bulletin board*, *chat* dan *face-to-face*. 2 tim menyelesaikan eksperimen dengan menggunakan *bulletin board tool*, 2 tim menyelesaikan eksperimen dengan menggunakan *chat tool* dan 2 tim menyelesaikan eksperimen dengan menggunakan *face-to-face*.

3.3. Prosedur Penelitian

Satu anggota tim dipilih untuk menjadi sekretaris yang bertugas untuk mencatat solusi yang dihasilkan tim. Seluruh tim diberitahu bahwa mereka memiliki 45 menit untuk bekerjasama menyelesaikan masalah tersebut. Setiap tim dengan model interaksi *face-to-face*

duduk di kursi dalam sebuah ruang konferensi dan dimonitor secara langsung. Sebelum memulai diskusi, partisipan diminta untuk tidak menunjukkan catatan audit secara langsung kepada seluruh anggota timnya. Mereka juga diberitahu bahwa telah disiapkan semcam kertas yang dapat digunakan untuk mencatat hasil diskusi yang mereka inginkan, kemudian kertas tersebut sengaja diletakkan sehingga setiap anggota tim dapat melihat hasil tersebut kapanpun. Setelah setiap menyelesaikan kasus tersebut, maka fasilitator eksperimen akan mengumpulkan *material case* dan solusi dari hasil diskusi mereka.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Interaksi pada Kemampuan Memecahkan Masalah

Dalam hipotesis penelitian ini, tipe komunikasi menggunakan *Bulletin Board* lebih baik dibandingkan dengan *Chat System*, serta *Chat system* lebih baik dibandingkan dengan *face-to-face*. Pengukuran dalam kemampuan memecahkan masalah dalam penelitian ini diukur berdasarkan ketepatan tim untuk menjawab kedua pertanyaan yang diajukan; yaitu: (1) pemasok mengklaim klien anda berutang sebesar \$420.000, tetapi klien anda menyatakan tidak memiliki utang tersebut. Apa yang menyebabkan ketidaksepahaman ini? [Jawaban: pembayaran tersebut dikirimkan kepada pemasok yang salah]. (2) berapa banyak utang yang dimiliki klien anda kepada pemasok? [jawaban: \$240.000, klien hanya menerima jumlah persediaan yang ada].

Kemampuan memecahkan masalah diukur menggunakan tiga skala pengukuran, yaitu (0 – 2). Satu poin untuk satu jawaban yang benar. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

TABEL 1				
KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH				
PANEL A: Descriptive Statistics				
		Bulletin Board	Chat System	Face-to-face
Distribusi jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar	Kedua pertanyaan	33%	50%	50%
	Hanya pertanyaan 1	17%	17%	33%
	Hanya pertanyaan 2	17%	17%	17%
	Tidak keduanya	33%	17%	0%
	Mean Rank	2.75%	3.67%	2%
	Mean	1.00	1.33	1.50
	Std. Dev.	89%	81%	54%
PANEL B: Mann-Whitney U Test Result				
Skor distribusi perbandingan tipe		Mann-Whitney U Statistics	Significance Level	
Bulletin Board vs Chat System		2.5	0.761	
Chat System vs Face-to-face		1.0	0.182	

Perbandingan berpasangan dengan menggunakan *Mann-Whitney U tests* menunjukkan untuk menentukan distribusi skor untuk masing-masing tiga tipe komunikasi dapat dilihat dalam Tabel 1, panel B. sebagai prediksi, tim yang menggunakan tipe komunikasi *Bulletin Board* tidak berpengaruh secara signifikan memecahkan masalah dengan tim yang menggunakan sistem komunikasi *Chat System* ($p = 0.761$). kemudian tidak terjadi perbedaan tipe komunikasi antara *Chat System* dengan tim yang menggunakan tipe komunikasi *face-to-face* dalam memecahkan masalah ($p = 0.182$).

4.2. Pembahasan

4.4.1. Experience

Variabel *experience* yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel moderator yang diharapkan dengan adanya variabel ini dapat memberikan hasil yang

lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang dimaksud dengan *experience* dalam penelitian ini, mereka yang sudah berpengalaman dalam menggunakan teknologi informasi (CMC) dalam proses pengambilan keputusan dan telah memiliki pengalaman dalam mengaudit di lingkungan pekerjaannya.

Dari hasil penelitian ini, didapatkan hasil bahwa variabel *experience* ini tidak mempengaruhi tipe komunikasi yang digunakan tim dalam audit dengan berbantuan komputer. Hal ini terjadi dikarenakan partisipan yang digunakan dalam penelitian ini, belum terbiasa menggunakan komunikasi berbantuan komputer dalam pengambilan suatu keputusan dalam suatu tim.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian dalam bidang ini masih sangat terbatas, peneliti dalam menyusun penelitian ini, referensi penelitian yang digunakan semua berasal dari luar negeri. Penelitian seperti ini sebaiknya dapat dikembangkan di Indonesia mengingat jangkauan tim audit dimasa yang akan datang jauh lebih luas, sehingga membutuhkan suatu alat komunikasi yang efektif dalam berkomunikasi dalam tim audit walaupun tidak harus bertemu secara langsung. Hasil penelitian ini, dari ketiga jenis tipe komunikasi yang digunakan, yaitu *bulletin board*, *chat system* dan *face-to-face*, ketiganya tidak berpengaruh secara signifikan walaupun telah di moderasi variabel *experience* pada tiap tipe komunikasi.

5.2. Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini masih relatif kecil, hal ini terjadi karena sikap kehati-hatian KAP dalam menjaga data klien mereka kepada pihak luar, walaupun sebenarnya penelitian ini tidak berhubungan sama sekali dengan data rahasia klien mereka.
2. Masih terdapat beberapa keterbatasan dalam *Software* yang dikembangkan, terdapat beberapa konten yang masih harus di tambahkan dalam tiap tipe komunikasi baik *bulletin board* maupun *chat system*.

5.3. Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan diatas, terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. untuk eksperimen selanjutnya dapat menambah partisipan, tidak hanya dari KAP tetapi dapat ditambahkan pada sektor bisnis lainnya yang relevan.
2. Mengembangkan lebih lanjut *software* yang telah ada agar penggunaannya dapat lebih mudah untuk di aplikasikan, seperti data perusahaan yang akan diaudit oleh KAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoglia, C. P., C. Beaudoin, and G. T. Tsakumis. 2009. The Effect of Documentation Structure and Task-Specific Experience on Auditors' Ability to Identify Control Weaknesses. *Behavioral Research in Accounting*, 21 : 1 – 17.
- Arnold, V., S. G. Sutton, S. C. Hayne, and C. A. P. Smith. 2000. Group Decision Making: The Impact of Opportunity-cost Time Pressure and Group Support Systems. *Behavioral Research in Accounting* 12: 69 – 96.
- Ashbaugh, H; Johnstone, K.M and Warfield, T.D (1999), "Corporate reporting on the internet", *Accounting Horizons*, 13(3): 241-257.
- Ashton, R. H., D. N. Kleinmuntz, J. B. Sullivan, and L. A. Tomassini. 1988. Audit Decision Making. In *Research Opportunities in Auditing: Thee Second Decade*, edited by A. R. Abdek-Khalik and I. Solomon, 95 – 132. Sarasota, FL: American Accounting Association.

- Bamber, E. M., and J. H. Bylinski. 1987. The effects of the planning memorandum, time pressure and individual auditor characteristics on audit managers' review time judgments. *Contemporary Accounting Research* 4 (1): 127–143.
- Bamber, E. M., P. Gillet, T. J. Mock, and K. T. Trotman. 1995. Audit Judgment. In *Auditing Practice, Research, and Education*: 55 – 85.
- Biggs, S. F., W. F. Messier, Jr., and J. V. Hansen. 1987. A descriptive analysis of computer audit specialists' decision-making behavior in advanced computer environments. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 6 (Spring): 1–21.
- Bonner, S. E. 1990. Experience effects in auditing: The role of task-specific knowledge. *The Accounting Review* 65 (January): 72–92.
- Brazel, J. F., C. P. Agoglia, and R. C. Hatfield. 2004. Electronic versus face-to-face review: The effects of alternative forms of review on auditors' performance. *The Accounting Review* 79 _4_: 949–966.
- Briggs, R. O., J. F. Nunmaker, Jr., and R. H. Sprague. Jr. 1997-1998. 1001unanswered research questions in GSS. *Journal of Management Information Systems*: 3 – 21
- Feldman, D. G. 1984. The development and enforcement of group norms. *Academy of Management Review*, 9: 47-53.
- Gibbins, M., and K. T. Trotman. 2002. Audit review: Managers' interpersonal expectations and conduct of the review. *Contemporary Accounting Research* 19 _3_: 411–444.
- Hassebrock, F., P. E. Johnson, P. Bullemer, P. W. Fox, and J. H. Moller. 1993. When less is more: Representation and selective memory in expert problem solving. *The American Journal of Psychology* 106 (2): 155–189.
- Hayne, S. C., and S. G. Sutton. 1996. Toward Effective Group Decision Making: Interacting Group Support Systems Into the Accounting Environment. *Advances in Accounting Information Systems* 4: 279 – 304.
- Jehn, K. A., & Shah, P. P. 1997. Interpersonal relationships and task performance: An examination of mediating processes in friendship and acquaintance groups. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72: 775-790.
- Jessup, L., and J. Valacich. 1993. *Group Support Systems: A New Frontier*. New York, NY: MacMillan.
- Johnson, E. N. 1994. Auditor Memory for Audit Evidence: Effects of Group Assistance, Time Delay, and Memory Task. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*: 36 – 56.
- Kahn, W. A. 1989. Toward a sense of organizational humor: Implications for organizational design and change. *Journal of Applied Behavioral Science*, 25: 45-63.
- Knapp, C. A., and M. C. Knapp. 2001. The effects of experience and explicit fraud risk assessment in detecting fraud with analytical procedures. *Accounting, Organizations and Society* 26 (1): 25–37.
- Larkin, J., J. McDermott, D. P. Simon, and H. A. Simon. 1980. Expert and novice performance in solving physics problems. *Science* 208: 1335–1342.
- Libby, R., and J. Luft. 1993. Determinants of judgment performance in accounting settings: Ability, knowledge, motivation, and environment. *Accounting, Organizations and Society* 18 (5): 425– 451.
- Libby, R., and I. Zimmer. 1987. Member Variation, Recognition of Expertise, and Group Performance. *Journal of Applied Psychology*: 81 – 87.
- Lymer, A and Tallberg, A (1997), "Corporate Reporting and the Internet – A Survey and Commentary on the use of the WWW in Corporate Reporting in the UK and Finland", Paper Presented at EAA'97, Graz, Austria.
- Miller, C. L., D. B. Fedor, and R. J. Ramsay. 2006. Effects of discussion of audit reviews on auditors' motivation and performance. *Behavioral Research in Accounting* 19: 91–106.

- Murnighan, J. K., dan Conlon, D. E. 1991. The Dynamics of Intense Work Groups: A Study of British String Quartets. *Administrative Science Quarterly*, 36: 165 – 186.
- Murthy, S. Uday, and Kerr S. David. 2004. Comparing Audit Team Effectiveness via Alternative Modes of Computer-Mediated Communication. *Journal of Practice & Theory* 23: 141–152.
- Patel, V. L., G. J. Groen, and C. H. Frederiksen. 1986. Differences between medical students and doctors in memory for clinical cases. *Medical Education* 20: 3–9.
- Payne, Elizabeth A., Ramsay Robert J., and Bamber E. Michael. 2010. The Effect of Alternative Types of Review on Auditors' Procedures and Performance. *Journal of Practice & Theory* 29: 207–220.
- Reckers, P. M., and J. J. Schultz, Jr. 1993. The Effect of Fraud Signals, Evidence Order, and Group-Assisted Counsel on Independent Auditor Judgment. *Behavioral Research in Accounting*: 124 – 144.
- Rich, J. S., I. Solomon, and K. T. Trotman. 1997a. Multi-auditor judgment/decision making research: A decade later. *Journal of Accounting Literature* 16: 86–126.
- Roy, D. F. 1959. Banana time; Job satisfaction and informal interaction. *Human Organization*, 18:158-168.
- Shah, P. P., & Jehn, K. A. 1993. Do friends perform better than acquaintances? The interaction of friendship, conflict, and task. *Group Decision and Negotiation*, 2; 149-165.
- Shelton, S. W. 1999. The effect of experience on the use of irrelevant evidence in auditor judgment. *The Accounting Review* 74 (2): 217–224.
- Sutton, S. G., and J. C. Lampe. 1991. A Framework for Evaluating Process Quality for Audit Engagements. *Accounting and Business Research* (Summer): 275 – 288.
- Tan, H. and K. T. Trotman. 2003. Reviewers' responses to anticipated stylization attempts by preparers of audit workpapers. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 78 (2): 581–604.
- Wiggins, M., and D. O'Hare. 1995. Expertise in aeronautical weather-related decision making: A cross-sectional analysis of general aviation pilots. *Journal of Experimental Psychology. Applied* 1 (4): 305–320.
- Zigurs, I., and B. K. Buckland. 1998. A Theory of Task-Technology Fit and Group Support Systems Effectiveness. *MIS Quarterly* 22 (3): 313–334.
- Ziv, A., & Gadish, O. 1990. The disinhibiting effects of humor: Aggressive and affective responses. *Humor*, 3: 247-257.

PENGARUH METODE LATIHAN DAN VO₂ MAX TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN TEKNIK DASAR BULUTANGKIS

ABSTRAK

OLEH :

**Sumintarsih, Tri Saptono. Hanafi Mustofa
(Dosen MPK Olahraga UPN "Vetran" Yogyakarta)**

Pengaruh Metode Latihan dan VO₂ Max Terhadap Peningkatan Keterampilan Teknik Dasar Bulutangkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perbedaan pengaruh metode *massed practice* dan *distributed practice* terhadap peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis, 2) perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis antara VO₂ Max tinggi dan rendah, 3) perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis antara metode *massed practice* VO₂ Max tinggi dan metode *distributed practice* VO₂ Max tinggi, 4) perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis antara metode *massed practice* VO₂ max rendah dan metode *distributed practice* VO₂ Max rendah, 5) pengaruh interaksi antara metode latihan dan VO₂ Max terhadap peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet klub PB Taruna Sleman Yogyakarta yang berjumlah 44 atlet. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling, besarnya sampel yang diambil sebanyak 24 atlet. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan ANAVA. Uji prasyarat analisis data dengan menggunakan uji normalitas (uji Lilliefors dengan $\alpha = 0.05$) dan uji homogenitas varians (uji Bartlett dengan $\alpha = 0.05$).

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode *massed practice* dan *distributed practice* terhadap peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis, terbukti dari nilai $F_{hitung} = 7.206 > F_{tabel} = 4.26$ pada taraf signifikansi 5%. 2) ada perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis yang signifikan antara VO₂ Max tinggi dan rendah, terbukti dari nilai $F_{hitung} = 10.693 > F_{tabel} = 4.26$ pada taraf signifikansi 5%. 3) ada perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis yang signifikan antara metode *massed practice* VO₂ Max tinggi rerata = 39.125 dan metode *distributed practice* VO₂ Max tinggi rerata = 20.167 terbukti pada nilai selisih rerata $19.667 > RST = 6.113$ pada taraf signifikansi $P \leq 0.05$. 4) ada perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis yang signifikan antara metode *massed practice* VO₂ Max rendah rerata = 19.167 dan metode *distributed practice* VO₂ Max rendah rerata = 29.667, terbukti pada selisih rerata $10.5 > RST = 5.037$ pada taraf signifikansi $P \leq 0.05$. 5) terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan dan VO₂ Max terhadap peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis, terbukti dari nilai $F_{hitung} = 78.039 > F_{tabel} = 4.26$, pada taraf signifikansi 5%.

Kata kunci: Metode *Massed Practice*, Metode *Distributed practice*, VO₂ Max, Bulutangkis.

EFFECTS OF EXERCISE AND VO₂MAX METHODS ON THE IMPROVEMENT OF BADMINTON BASIC TECHNIQUE SKILLS

ABSTRACT

BY :

Sumintersih, Tri Saptono, Hanafi Mustofa

This study aims to find out: 1) the difference in the effects of massed practice and distributed practice methods on the improvement of badminton basic technique skills, 2) the difference in the improvement of badminton basic technique skills between VO₂ Max 3) the difference in the improvement of badminton basic technique skills between the massed practice with high VO₂ Max and the distributed practice with high VO₂ Max, 4) the difference in the improvement of badminton basic technique skills between the massed practice with low VO₂ Max and the distributed practice with low VO₂ Max, and 5) the effect of interaction between the exercise method and VO₂ Max on the improvement of badminton basic technique skills.

This study employed the experimental method with a 2 x 2 factorial design. The research population comprised 44 athletes from PB Taruna clubs Sleman, Yogyakarta. The sample, consisting of 24 athletes, was selected using the purposive random sampling technique. The data in this study were analyzed using ANOVA. The prerequisite tests for the analysis were the normality test (the Lilliefors test with $\alpha = 0.05$) and the variance homogeneity test (the Bartlett test with $\alpha = 0.05$).

The results of the study are as follows. 1) There is a significant difference in the effects of the massed practice and distributed practice methods on the improvement of badminton basic technique skills, indicated by $F_{\text{observed}} = 7.206 > F_{\text{table}} = 4.26$ at a significance level of 5%. 2) There is a significant difference in the improvement of badminton basic technique skills between high and low VO₂ Max, indicated by $F_{\text{observed}} = 10.693 > F_{\text{table}} = 4.26$ at a significance level of 5%. 3) There is a significant difference in the improvement of badminton basic technique skills between the massed practice method with high VO₂ Max, with a mean of 39.125, and the distributed practice with high VO₂ Max, with a mean of 20.167, indicated by a mean difference of $19.667 > SSR = 6.113$ at a significance level of $p < 0.05$. 4) There is a significant difference in the improvement of badminton basic technique skills between the massed practice with low VO₂ Max, with a mean of 19.167, and the distributed practice method with low VO₂ Max, with a mean of 29.667, indicated by a mean difference of $10.5 > SSR = 5.037$ at a significance level of $p < 0.05$. 5) There is a significant effect of interaction between the exercise method and VO₂ Max on the improvement of badminton basic technique skills, indicated by $F_{\text{observed}} = 78.039 > F_{\text{table}} = 4.26$ at a significance level of 5%.

Keywords: Massed Practice Method, Distributed Practice Method, VO₂ Max, Badminton

Pendahuluan

Bulutangkis sebagai aktifitas jasmani merupakan salah satu cabang olahraga yang populer dan berkembang pesat di Indonesia. Banyak orang melakukan olahraga bulutangkis dengan berbagai tujuan diantaranya untuk rekreasi dan hiburan, menjaga kebugaran dan kesehatan sampai untuk tujuan olahraga prestasi. Sebagai olahraga prestasi, bulutangkis termasuk olahraga *kompetitif* yang memerlukan gerakan *eksplosif*, banyak gerakan berlari, meloncat untuk *smash*, reaksi, kecepatan mengubah arah dan juga membutuhkan daya tahan VO₂ Max

Kemampuan fisik berhubungan dengan kemampuan VO_2 Max mempengaruhi penampilan atlet dalam gerakan-gerakan keterampilan teknik dasar bulutangkis. Dengan demikian dapat dikatakan kemampuan VO_2 Max adalah suatu persyaratan dalam pencapaian prestasi maksimal bagi atlet dalam keterampilan teknik dasar bulutangkis. Kemampuan VO_2 Max dapat dibedakan menjadi dua kemampuan VO_2 Max tinggi dan kemampuan VO_2 Max rendah. Perbedaan kemampuan VO_2 Max yang ada pada diri atlet harus menjadi pertimbangan sebagai suatu faktor yang menentukan dalam keterampilan teknik dasar bulutangkis dalam menentukan metode latihan yang sesuai dengan karakter dari masing-masing atlet sehingga bisa mencapai hasil yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Metode latihan adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi olahraga. Diantaranya adalah metode *massed practice* dan *distributed practice*. Kedua metode latihan ini menekankan pada kegiatan praktek pada suatu tugas yang berbeda. *Massed practice* merupakan sesi latihan di mana jumlah waktu latihan dalam sebuah percobaan lebih besar dari pada jumlah istirahat di antara percobaan, yang akhirnya mengarah pada kelelahan dalam berbagai tugas, sedangkan *distributed practice* adalah disela-sela latihan yang dilakukan terdapat istirahat yang sama atau melebihi banyaknya waktu dalam percobaan yang mengarah ke suatu urutan yang lebih santai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh metode latihan dan kemampuan VO_2 Max terhadap peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah perbedaan pengaruh antara metode *massed practice* dan *distributed practice* terhadap peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis?
2. Adakah perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis antara atlet yang memiliki kemampuan VO_2 Max tinggi dan rendah?
3. Adakah perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis antara metode *massed practice* kemampuan VO_2 Max tinggi dan metode *distributed practice* kemampuan VO_2 Max tinggi?
4. Adakah perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis antara metode *massed practice* kemampuan VO_2 Max rendah dan metode *distributed practice* kemampuan VO_2 Max rendah?
5. Adakah interaksi antara metode latihan dan kemampuan VO_2 Max terhadap peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis?

Kajian Pustaka

1. Metode *Massed Practice*

Untuk mencapai tingkat keterampilan yang baik, maka dalam pelaksanaan latihan seorang atlet harus melakukan pengulangan gerakan dengan frekuensi sebanyak-banyaknya. Semakin sering atau semakin banyak mengulang-ulang gerakan yang dipelajari maka akan terjadi otomatisasi gerakan yang efektif dan efisien. *Massed Practice* merupakan metode latihan yang pelaksanaannya tanpa diselingi istirahat diantara waktu latihan sampai batas waktu yang ditentukan.

"*Research on practice-distribution effects has frequently used the terms massed practice and distributed practice, in one sense massing means to put things together- in this case, running work periods very close together with either no rest at all or very brief rest intervals between periods of work*" (Schmidt & Lee, 2005: 332).

Karakteristik latihan berlanjut dengan intensitas tinggi adalah: a) lama latihan antara 15-60 menit, b) intensitas latihan antara 80-90% dari penampilan

maksimum/denyut nadi maksimum c) denyut nadi antara 160-180 denyut per menit, e) Persentase VO_2 mak antara 70-80 ml/kg/menit, f) kadar asam laktat darah dijaga antara 3-5 mmol/l (Icuk Sugiarto, M Furqon & S Kunta P, 2002: 124).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dirumuskan bahwa *massed practice* adalah latihan keterampilan yang dilakukan secara terus menerus tanpa diselingi istirahat.

2. Metode *Distributed Practice*

Metode *distributed practice* merupakan bentuk latihan yang diselingi istirahat diantara waktu latihan. "*Research on practice-distribution effects has frequently used the terms massed practice and distributed practice, distributing practice means spacing these periods of work apart with longer intervals of rest*" (Schmidt & Lee, 2005: 333).

Latihan dengan metode *distributed practice* dapat juga diterapkan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan teknik dasar bulutangkis. Dalam pelaksanaannya, yaitu atlet melakukan gerakan keterampilan teknik dasar bulutangkis sesuai instruksi dari pelatih atau pembina dan pada saat tertentu atlet diberi kesempatan untuk istirahat. Istirahat yang diberikan tersebut dapat digunakan untuk relaksasi atau diberikan koreksi dari pelatih. Dengan demikian kondisi pemain akan pulih, selain itu dapat mengenali atau mencermati kesalahan pada saat melakukan keterampilan teknik dasar bulutangkis, sehingga pada kesempatan berikutnya kesalahan tersebut tidak diulang lagi.

3. Kemampuan VO_2 Max

Menurut Sukadiyanto (2011: 83) Kemampuan VO_2 Max adalah kemampuan organ pernafasan manusia untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya pada saat latihan (aktifitas fisik). Adapun cara menghitung VO_2 Max yang paling sederhana dan mudah adalah dengan cara lari menempuh jarak tertentu atau menempuh waktu tertentu yaitu dengan *multistage fitness test* yaitu lari bolak-balik menempuh jarak 20 meter.

4. Keterampilan Teknik Dasar Bulutangkis.

Keterampilan bulutangkis adalah kemampuan seorang atlet bulutangkis dalam menggunakan teknik, taktik, serta unsur-unsur yang dimiliki oleh seorang pemain bulutangkis. Teknik dasar bulutangkis atlet harus bisa memukul kok, baik dari atas maupun bawah. Jenis-jenis pukulan yang harus dikuasai adalah: *service, netting, lob, underhand, dropshot, drive, dan smash*.

Menurut Tony Grice (diterjemahkan Eri Desmarini Nasution 2007: 26) cara melakukan servis panjang (*forehand service*).

a. Servis Panjang (*Forehand Service*)

Servis panjang dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Servis ini biasanya dilakukan dalam permainan tunggal, sehingga sering dinamakan dengan "*deep single servis*" jenis servis ini dilakukan dengan *forehand*.

b. Servis Pendek *Forehand/Backhand*

Servis pendek ada 2 yaitu *Forehand* dan *Backhand* Menurut Tony Grice (diterjemahkan Eri Desmarini Nasution 2007: 27) pelaksanaan servis pendek dapat dilaksanakan dengan cara *forehand* yaitu: a) fase persiapan: *grip handshake*, posisi berdiri kaki diregangkan di depan dan di belakang, bola dipegang pada ketinggian pinggang, berat badan pada kaki belakang, tangan yang memegang raket pada posisi *backswing*, pergelangan tangan ditekukukan, b) fase pelaksanaan: berat badan dipindahkan ke kaki depan, gerakan pergelangan tangan sedikit atau tidak sama sekali, kontak terjadi pada ketinggian paha, bola didorong, bola bergerak rendah di atas net, c) fase *follow-through*: gerakan diakhiri dengan raket mengarah ke atas lurus

dengan gerakan bola, silangkan raket di atas depan bahu yang tidak memegang raket, putar pinggul dan bahu

c. Lob/ Forehand Clear

Teknik pukulan Lob/ Forehand Menurut Tony Grice (diterjemahkan Eri Desmarini Nasution 2007: 43) pelaksanaan lob/forehand clear overhead yaitu: a) fase persiapan: *grip handshake*, posisi memukul menyamping, kedua tangan ke atas, berat badan pada kaki belakang, b) siku mendahului gerakan mengulurkan tangan, gerakkan tangan yang tidak dominan ke bawah, putar tubuh bagian atas, gapai tinggi ke atas untuk memukul, gerakkan tangan bagian bawah menelungkupkan ke depan, c) fase *follow-through*: gerakkan tangan yang memegang raket berakhir dengan telapak tangan menghadap luar, gerakkan raket berakhir di bawah lurus dengan gerakan bola, silangkan raket pada sisi tubuh yang berlawanan, ayunkan kaki yang di belakang dengan gerakan seperti gunting, teruskan pemindahan berat badan.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ANAVA rancangan faktorial 2 x 2 yaitu suatu eksperimen faktorial yang menyangkut dua faktor masing-masing faktor terdiri atas dua buah taraf, dengan menggunakan tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*). Sebelum data dianalisis dilakukan uji pra-syarat analisis dengan uji normalitas dan uji homogenitas.

Ringkasan Hasil Analisis Varian Dua Faktor

Sumber variasi	dk	JK	RJK	F _o
Rata-rata perlakuan	1	R _y	R	
A	a-1	A _y	A	A/E
B	b-1	B _y	B	B/E
AB	(a-1)(b-1)	AB _y	AB	AB/E
Kekeliruan	Ab (n-1)	E _y	E	

Keterangan : A = Kelompok A

B = Kelompok B

AB = Interaksi antara kelompok A dengan kelompok B

n = Jumlah sampel

Hasil Penelitian

Deskripsi hasil analisis data hasil tes keterampilan teknik dasar bulutangkis yang dilakukan sesuai dengan kelompok yang dibandingkan disajikan sebagai berikut:

Deskripsi Data Hasil Tes Keterampilan Teknik Dasar bulutangkis

Perlakuan	VO ₂ Max	Statistik	Hasil tes awal	Hasil tes akhir	Peningkatan
Metode <i>Mass Practice</i>	Tinggi	Jumlah	891	1130	239
		Mean	148.5	188.33	39.83
		SD	7.176350047	6.15389684	3.970726203
	Rendah	Jumlah	728	843	115
		Mean	121.333	140.5	19.167
		SD	13.60392098	11.97914855	1.722401422
Metode <i>Distributed Practice</i>	Tinggi	Jumlah	950	1071	121
		Mean	158.333	178.5	20.167
		SD	6.15389684	6.920982589	2.296886855
	Rendah	Jumlah	704	882	178
		Mean	117	147	29.667
		SD	10.42433048	10.43072385	1.632993141

Metode *massed practice* dan metode *distributed practice* memberikan pengaruh terhadap pembentukan keterampilan teknik dasar bulutangkis yang berbeda. Jika antara kelompok atlet yang yang mendapat metode *massed practice* dan metode *distributed practice* dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa kelompok perlakuan metode *massed practice* memiliki peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis sebesar 4.583 lebih tinggi dari pada kelompok metode *distributed practice*.

Jika antara kelompok atlet yang memiliki VO₂ Max tinggi dan rendah dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa kelompok atlet yang memiliki VO₂ Max tinggi memiliki peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis sebesar 5.583 lebih tinggi dari pada kelompok atlet yang memiliki VO₂ Max rendah.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini memberikan penafsiran yang lebih lanjut mengenai hasil-hasil analisis data yang telah dikemukakan. Berdasarkan pengujian hipotesis telah menghasilkan yaitu: terdapat perbedaan peningkatan teknik dasar keterampilan bulutangkis antara

1. Metode *massed practice* VO₂Max rendah dengan metode *distributed practice* VO₂ Max rendah.
 2. Metode *massed practice* VO₂ Maxrendahdengan metode *Massed practice* VO₂ Max tinggi.
 3. Metode *distributed practice* VO₂ Maxtinggi dengan metode *distributed practice* VO₂Max rendah.
 4. Metode *distributed practice* VO₂ Maxtinggidengan metode *massed practice* VO₂ Max rendah
 5. Metode *distributed practice* VO₂ Maxrendah dengan metode *mass practice* VO₂Max tinggi.
- Sedangkan tidak ada perbedaan peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis
6. Metode *mass practice* VO₂ Maxrendah dengan metode *distributed practice* VO₂ MaxVO₂Max tinggi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan metode *massed practice* dan metode *distributed practice* terhadap keterampilan teknik dasar bulutangkis. Pengaruh metode *massed practice* lebih baik dari pada metode *distributed practice*.
2. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara atlet yang memiliki VO₂ Max n tinggi dan rendah. Peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis pada atlet yang memiliki VO₂ Max tinggi lebih baik dari pada atlet yang memiliki VO₂Max rendah.
3. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode *massed practice* VO₂ Max tinggi dengan metode *distributed practice* VO₂Max tinggi. Peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis dengan metode *massed practice* VO₂Max tinggi lebih baik dari pada metode *distributed practice* VO₂ Max tinggi.
4. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode *distributed practice* VO₂ Max rendah dengan metode *massed practice* VO₂Max rendah. Peningkatan keterampilan teknik dasar bulutangkis metode *distributed practice* VO₂ Max rendah lebih baik dibandingkan metode *massed practice* VO₂Max rendah.
5. Terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan dan VO₂ Max terhadap peningkatan teknik dasar bulutangkis.
 - a. Atlet yang memiliki VO₂ Max tinggi lebih cocok jika diberikan metode *massed practice*.

- b. Atlet yang memiliki VO₂ Max rendah lebih cocok jika diberikan metode *distributed practice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bompa, T.O. (1994). *Teory and methodology of training*. York University: Departement of Physical Education
- Icuk Sugiarto, M. Furqon H, S., & Kunta P. (2002). *Total badminton*. Solo: CV. Setyaki Eka Anugerah.
- Nossek, J. (1982). *General theory of training*. Logos: Pan African Press
- Sapta Kunta Purnama. (2010). *Kepelatihan bulutangkis modern*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Schmidt, R.A., & Lee, T.D. (2005). *Motor control and learning: a behavior emphasis*. United States: Human Kinetics Champaign. Il.
- Sudjana. (2002). *Desain dan analisis eksperimen*. Bandung: Tarsito.
- Sukadiyanto., & Dangsina Muluk. (2011). *Pengantar teori dan metodologi melatih fisik*. Bandung: CV Lubuk Agung.
- Tony, G. (2007). *Bulutangkis petunjuk praktis untuk pemula dan lanjut*. (Terjemahan Eri Desmarini Nasution) Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (Buku asli diterbitkan tahun 1996).

Model *Non Market Capability* Dalam Memoderasi Kinerja Pada Industri Perbankan

Sabihaini, Januar Eko Prasetyo
Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta
SWK 104 Ring Road, Yogyakarta 55283
E-mail: sabihaini@yahoo.com

Abstract

This study purpose is to examine the role model of non-market capability as moderating variables on banking industry performance in East Java. Model is tested by Structural Equation Modeling (SEM). The estimation results of normality show some data indicators are not distributed normally, since the value $CR > 2.58$. Boot-strapping analysis needs to be done to ensure that normality assumption is still within tolerance. Boot-strapping test results obtained P value > 0.05 . Therefore, the normality assumption is still within tolerance limits that do not cause a bias in model analysis. Assumption test results show that all the assumptions are met. Goodness of fit-overalls models suggest that all measurement results at an acceptable level so that it can be stated quite fit to model estimation. These tests results show fairly good confirmation on indicators and causal relationships between variables. These findings also indicate that model can be accepted and used to estimate and analyze the further research results.

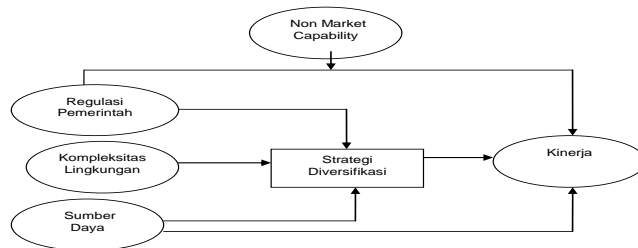
Key words: Non-Market Capability, Government Regulation, Environment Complexity, Resources, Diversification Strategy, and Performance in Banking

Pendahuluan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (*quantitative approach*), yakni suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variable dan melakukan prosedur analisis data dengan peralatan statistic serta bertujuan untuk menguji hipotesis. Sebelum menguji hipotesis maka uji model dilakukan terlebih dahulu. Tulisan ini adalah tulisan kedua dan merupakan lanjutan dari artikel yang berjudul "analisis non market capability, lingkungan, strategi diversifikasi, dan kinerja: studi pada bank umum di Jawa Timur dengan menggunakan statistik deskriptif" (Sabihaini dan Januar, 2014; Sabihaini dkk., 2012; Sabihaini, 2011).

Penelitian ini dirancang untuk menguji model peran Model Peran *Non Market Capability* dalam Memoderasi Kinerja Pada Industri Perbankan. Adapun kerangka konseptual penelitian ini seperti tampak pada Gambar 1.

Model penelitian ini diuji menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM merupakan salah satu teknis analisis multivariate. Hubungan model kausalitas penelitian ini merupakan hasil justifikasi secara teoritis dari berbagai sumber yang didukung oleh hasil kajian empiris (Sabihaini dan Januar, 2014a; Sabihaini dkk, 2012; Sabihaini, 2011) sehingga terbentuk sebuah model penelitian.



Gambar 1. Model Penelitian

Hubungan kausalitas di antara variabel tersebut perlu diuji untuk mengkonfirmasi model melalui uji empiris. Untuk menguji sebuah teori, mungkin sebuah teori yang baru dikembangkan sendiri oleh peneliti, atau teori yang sudah dikembangkan sejak lama, pokoknya harus berupa sebuah teori, dan untuk pembuktiannya dibutuhkan sebuah pengujian empiris (Ferdinand 2002, 2005). Selanjutnya, Ferdinand menjelaskan SEM bukanlah untuk menghasilkan kausalitas tetapi untuk membenarkan adanya kausalitas teoritis melalui uji data empiris. Pengujian terhadap model dikembangkan dengan berbagai kriteria *Goodness of Fit*, yakni *Chi-square*, *Probability*, *RMSEA*, *GFI*, dan *TLI* (Tabel 1).

Tabel 1. *Goodness of Fit Indices* untuk Evaluasi Model

GOODNESS OF FIT INDEX	KETERANGAN	CUT-OFF VALUE
X ² - Chi-square	Menguji apakah covariance populasi yang destimasi sama dengan cova-riance sample (apakah model sesuai dengan data). Bersifat sangat sensitive untuk sample besar (di atas 200)	<i>Diharapkan Kecil</i>
Probability	Uji signifikansi terhadap perbedaan matriks covariace data dan matriks covariance yang diestimasi	≥ 0,05
RMSEA	Mengkompensasi kelemahan Chi-Square pada sample besar (2006)	≤ 0,08
GFI	Menghitung proporsi tertimbang varians dalam matriks sample yang dijelaskan oleh matriks covariance populasi yang diestimasi (analog dengan R ² dalam regresi berganda) (Bentler, 1983)	≥ 0,90
AGFI	GFI yang disesuaikan terhadap DF (Arbukle, 1999)	≥ 0,90
CMIND/DF	Kesesuaian antara data dan model	≤ 2,00
TLI	Pembandingan antara model yang diuji terhadap baseline model (Hair, 2006; Arbukle, 1997)	≥ 0,95
CFI	Uji kelayakan model yang tidak sensitive terhadap besarnya sample dan kerumitan model (Arbukle, 1997)	≥ 0,94

Sumber : Hair (2006), Bentler (1983), Muller (1996), Arbukle (1997)

Hasil dan Pembahasan

A. Evaluasi *Goodness Of Fit Model Uji Asumsi Struktural Equation Modeling (SEM)*

Sebelum melakukan evaluasi *goodness of fit model* maka uji asumsi SEM dilakukan untuk mendapatkan model yang valid dengan menggunakan program SPSS AMOS versi 21. Hasil beberapa uji asumsi SEM secara berturut-turut diuraikan bawah ini:

1. Ukuran Sampel

Besarnya sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter dalam penelitian ini adalah 123 sampel. Jumlah sampel ini telah memenuhi syarat minimum untuk ukuran sampel jika didasarkan pada pedoman penggunaan alat analisis *Struktural Equation Modeling (SEM)* sebanyak 100 – 200 unit sampel (Ferdinand 2002) atau 5 kali parameter yang diestimasi sesuai dengan yang disarankan Muller (1996), sehingga data penelitian ini telah memiliki kecukupan data.

2. Uji Asumsi Normalitas Data

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS AMOS versi 21 yaitu dengan uji *Skweness value*. Asumsi normalitas terpenuhi jika nilai *critical value* (cr) lebih kecil dari nilai $\pm 2,58$ (Arbucle, 1997). Hasil pengujian normalitas data yang diestimasi ada indikator yang tidak berdistribusi normal, karena nilai C.R > 2.58 . Sehingga perlu dilakukan analisis *boot straping* untuk memastikan bahwa asumsi normalitas masih dalam batas toleransi. Hasil uji *boot straping* diperoleh nilai $P > 0,05$ dengan demikian asumsi normalitas masih dalam batas toleransi yang tidak menyebabkan bias pada analisis model.

Namun, berdasarkan dalil limit pusat (*central limit theorem*) bila data observasi mencapai 100 atau lebih asumsi normalitas data tidak terlalu kritis karena dari sampel yang besar dapat dihasilkan statistik sampel yang mendekati distribusi normal (Solimun 2002). Dengan jumlah sampel 123, maka data penelitian ini dipandang sudah memenuhi dalil limit pusat sehingga asumsi normalitas data tidak bersifat kritis dan dapat diabaikan.

3. Uji Linieritas Data

Berdasar hasil uji kurva fit dan *scatter plot* dapat diketahui bahwa pola sebaran data mengikuti garis *trend linear*. Dengan demikian, hasil uji data menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan linearitas data. Kemudian berdasar prinsip parsimony, hubungan dikatakan linier jika model linier signifikan (nilai sig. linier < 0.05). Berdasar hasil olahan data dapat disimpulkan bahwa asumsi linieritas hubungan variable dalam penelitian ini terpenuhi.

4. Outliers

Jika dilihat dari besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam sampel besar, yakni di atas 80 observasi. Dimana nilai ambang batas dari nilai atau *z-score* berada dalam rentang 3 sampai dengan 4 (Hair 2006, Ghozali, 2005). Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari *univariate outliers*, karena dikategorikan sampel besar yakni 123 responden yang berarti di atas 80 observasi, maka *outliers* jika *z-score* lebih besar atau sama dengan 4.0.

Evaluasi terhadap *multivariate outliers*. Untuk menentukan apakah terdapat data *outliers* maka terlebih dahulu perlu ditentukan kriteria Jarak Mahalanobis pada tingkat $p < 0.001$. Jarak *Mahalanobis* tersebut dievaluasi dengan menggunakan χ^2 pada derajat bebas sebesar jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Bila kasus yang mempunyai Jarak *Mahalanobis* lebih besar dari nilai *chi-square* pada tingkat signifikansi 0,001 maka terjadi *multivariate outliers*. Nilai χ^2 0.001 adalah 33.409. Dari pengujian data *outliers* nampak tidak ada jarak *mahalanobis* yang bernilai lebih besar dari 33.409 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat data *outliers*.

5. Multicollinearity

Multikolinieritas dilihat pada *determinant* matriks kovarians. Nilai yang terlalu kecil menandakan adanya multikolinieritas atau singularitas (Tabachnick & Fidell, 1998), sehingga data tidak dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Determinan yang benar-benar kecil mengindikasikan adanya *multicoliniery* atau *singularity*. Dalam program AMOS, program SEM ini dapat ditampilkan output *Determinan of Sample Covariance Matrik*. Pengujian terhadap gejala multikolinieritas antar variabel bebas memperlihatkan tidak adanya gejala multikolinieritas yang merusak model terlihat dari *determinant of sample covariance matrix* 3.001. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau singularitas dalam data ini sehingga asumsi terpenuhi.

B. Evaluasi terhadap Model

Pengujian tingkat kesesuaian model persamaan struktural didasarkan pada nilai-nilai acuan (*cut-off values*) sebagaimana digunakan pada analisis faktor konfirmatori (CFA). Hasil pengujian tingkat kesesuaian model structural hubungan kausalitas peran *non market capability* dalam memoderasi regulasi pemerintah terhadap kinerja dan peran strategi diversifikasi dalam memediasi sumber daya, kompleksitas lingkungan, regulasi pemerintah terhadap kinerja.

Model teoritis pada kerangka konseptual penelitian, dikatakan *fit* jika didukung oleh data empirik. Hasil pengujian *goodness of fit overall model* digunakan untuk mengetahui apakah model hipotetik didukung oleh data empirik (Gambar 2). Hasil komputasi dengan program AMOS untuk model SEM ini dihasilkan indeks-indeks *goodness of fit* seperti disajikan pada Tabel 2.

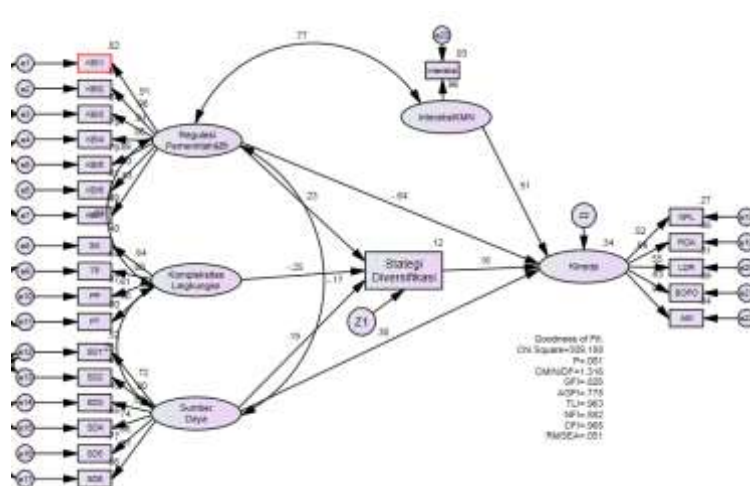
Berdasar hasil model fit diketahui bahwa besarnya nilai *chi-square* sebesar 309.188 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) 0.001 hal ini berarti bahwa model tidak fit. Model yang baik harus tidak menolak hipotesa nol berarti harus tidak signifikan secara statistik (Ghozali, 2014). Namun demikian perlu diketahui bahwa *chi-square* sangat sensitive terhadap jumlah sampel, semakin besar jumlah sample semakin signifikan (Ghozali, 2014).

Tabel 2 Hasil Pengujian Goodness of Fit Overall Model

Goodness of Fit	Hasil Uji	Cut-off Value	Keterangan
X^2 - Chi square	309.188	Diharapkan kecil	Baik
Probability	0.001	≥ 0.05	Baik
CMIN/DF	1.316	≤ 2	Baik
GFI	0.828	$\geq 0,90$	Marginal
AGFI	0.778	$\geq 0,90$	Marginal
TLI	0.963	$\geq 0,90$	Baik
CFI	0.968	$\geq 0,95$	Baik
RMSEA	0.051	$\leq 0,08$	Baik

Sumber: Data Primer diolah 2015

Hasil ukuran model fit yang lain yaitu CMIN/DF sebesar 1.310 menunjukkan model fit sesuai dengan model yang direkomendasikan. Nilai GFI sebesar 0.826 dan AGFI sebesar 0.778 menunjukkan model cukup *fit* (marginal) dari standar nilai yang direkomendasikan. Nilai TLI sebesar 0.963 dan RMSEA sebesar 0.051 menunjukkan bahwa model *fit* sesuai dengan standar nilai yang direkomendasikan. Nilai CFI sebesar 0.968 menunjukkan bahwa model *fit* sesuai dengan standar nilai yang direkomendasikan.



Gambar 2. Hasil model Struktural Peran Kapabilitas Non-Market , Regulasi Pemerintah, Kompleksitas Lingkungan, Sumberdaya, Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja Bank Umum di Jawa Timur

Hasil pengujian *goodness of fit overall model* atau secara keseluruhan menunjukkan bahwa semua hasil pengukuran pada level yang dapat diterima sehingga dapat dinyatakan model estimasian cukup *fit*. Dengan demikian pengujian ini menghasilkan konfirmasi yang cukup baik atas indikator-indikator serta hubungan kausalitas antar variabel. Dengan kata lain, pengujian ini mampu membuktikan bahwa model kompleksitas lingkungan, sumberdaya, kapabilitas *non-market*, regulasi pemerintah, tingkat diversifikasi, kinerja perbankan tepat dengan data yang diobservasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model tersebut dapat diterima dan dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan analisis hasil penelitian lebih lanjut. Adapun Hasil model struktural pengaruh antar variabel dalam penelitian ini secara lengkap disajikan pada Gambar 2.

Acknowledgements

Penelitian ini terlaksana atas dukungan dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) Ditjen Pendidikan Tinggi dan penelitian ini merupakan penelitian multi tahun.

Daftar Pustaka

- Arbuckle, J. L. 1997. Amos user's guide: version 3.6, Chicago, SmallWaters Corp. Baron, David P. 2003. *Business and Its Environment*. Fourth Edition. Prentice Hall. USA
- Bentler, P. M. 1983. Some contributions to efficient statistics in structural models: Specification and estimation of moment structures. *Psychometrika*, 48, 493–517
- Bonardi, Jean-Philippe, Holburn, Guy L. F., and Bergh, Richard G. Vanden. 2006. Nonmarket strategy performance: Evidence from U.S. Electric Utilities. Source: www.isnie.org/ISNIE06/.../09.3/Bonardi.doc
- Carmeli, Abraham and Tishler, Asher. 2004. Resources, Capabilities, and the Performance of Industrial Firms: A Multivariate Analysis. *Managerial and Decision Economics*. Vol. 25, No. 6/7 pp. 299-315
- Ferdinand, A., 2005, *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang:FE UNDIP.
- Ghozali, I.,2005, *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos Versi 5.0.*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali, I.,2014, *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos Versi 22.0 Update Bayesian SEM.*, Cetakan VI, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hair, Joseph F, Black Bill, Barry Babin, Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham. 2006. *Multivariate Data Analysis*. 6/E. Prentice Hall.
- Hillman, A., Schuler, D., and Keim, G. 2004. Corporate political activity: A review and research agenda. *Journal of Management*30: 837–857
- Mueller RO, 1996. *Basic Principles of Structural Equation Modelling. An Introduction to Lisrel and EQS*. New York : Springer
- Pearce, Jhon A, and Robinson, Richard B. 2007. Strategic management with powerweb; Formulation, Implementation and Control. McGraw Hill.
- Sabihaini dan Januar EP. 2014a. Analisis Non market Capability, Lingkungan, Strategi Diversifikasi, dan Kinerja: Studi pada Bank Umum di Jawa Timur dengan

- menggunakan Statistik Deskriptif, *Seminar Nasional dan Call for Paper SINAU 3*: 383-392.
- Sabihaini, Djumilah H, Dhumahir, Mintarti R. 2012. Kompleksitas Lingkungan dan Regulasi Pemerintah: Implikasinya Terhadap Kinerja Perbankan di Jawa Timur, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi Vol.16 No.3 (September)*: 455-471.
- Sabihaini. 2011. Environmental and Strategy Changing and the Implications on Performance in the Banking Sector, *International Journal of Business and Management Tomorrow (IJBMT), Vol.1 No. 2*): 165-196.
- Schiemenn 2011. Aligment Capability, Engagement, Pendekatan Barutalent management untuk Mendongkrak kinerja Organisasi, PPM Jakarta.
- Solimun. 2002, *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos*. Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using multivariate statistics* (5th ed.). Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Thompson Jr, Arthur A and Strickland, A.J.. 2003. *Strategic Management; Concept and Cases*. McGraw Hill Irwin.
- Widener, Sally K. 2006. Associations between strategic resource importance and performance measure use: The impact on firm performance. *Management Accounting Research Vol 17* page 433–457.

**PERAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
SEBAGAI WIRUSAHAWAN MANDIRI DALAM RANGKA
MENDUKUNG PERTAHANAN DAN KETAHANAN NASIONAL³**

Oleh:

Sutoyo⁴

Meilan Sugiarto⁵

Winarno⁶

Rudi Wibowo⁷

Abstract

This research background was motivated by the spirit of managing youth potential, the result of this research maybe just give little bite contribution for the nation in managing youth potential to increase the defense and tenacity of the nation in the future. Their potential need to develop in the future to support our nation become more better and strength, so it will be an advantage for Indonesian, but the main problem is how to empowering them. This second research focus on how youth entrepreneur start implementing their business, and in other side focus on what is their motivation to do business, and what kinds motive that encouraging them interest in business. Base on this research youth entrepreneur group whose start up and ready to do business encouraging by need of achievement, responsibility, catch the opportunity, try to take business risk, bring creativity to the reality, leadership and management practices. The others which grouping as interesting group in business need to motivated in order to parallel them with group whose start up and ready to do business. The aims to encourage them in order to shift them to be ready and then start up the business in reality, this aims base on positive value which able to stick when someone become entrepreneur.

Keywords : *youth, entrepreneur, leadership, defense and tenacity, and business.*

A. Pendahuluan

Salah satu agenda Implementasi Politik dan Strategi Nasional dalam Bidang Pertahanan dan Ketahanan adalah pembangunan nasional yang bertumpu pada pemuda. Agenda tersebut adalah mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri. Sedangkan fasilitas untuk menumbuhkembangkan semangat wirausaha ini adalah mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, dan minat.

Pemuda merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, sehingga peran aktifnya tidak mungkin diabaikan. Pemuda yang kuat berdaya saing, berwawasan, cerdas dan berkepribadian merupakan salah satu modal utama terwujudnya ketahanan nasional itu. Salah satu langkah sederhana yang dapat dimulai oleh para pemuda untuk menjadi harapan bangsa adalah dengan menjadikan pemuda memiliki karakter memimpin. Dalam penelitian ini, karakter memimpin akan diaplikasikan dalam bentuk memimpin suatu

³Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian Hibah Kluster 2014 yang didanai LPPM UPN VY. Tim peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada LPPM UPN VY.

⁴Sutoyo adalah dosen Program Studi Akuntansi FE UPN VY.

⁵Meilan Sugiarto adalah dosen Program Studi Administrasi Bisnis FISIP UPN VY.

⁶Winarno adalah dosen Program Studi Manajemen FE UPN VY.

⁷Rudi Wibowo adalah dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN VY

usaha atau dengan kata lain menjadi wirausahawan muda. Latar belakang penelitian ini dimotivasi oleh semangat mengelola potensi pemuda. Pemuda sebagai tulang punggung negara perlu diteliti dan dibina karena memiliki potensi yang sangat luar biasa.

Potensi ini jika dikembangkan akan menjadikan bangsa Indonesia kuat dan berjaya, namun sebaliknya jika diabaikan akan menjadikan bangsa ini terpuruk. Jumlah usia muda di Indonesia hampir separo dari jumlah total penduduk Indonesia. Peran pemuda dalam ketahanan nasional ini sangat penting. Pemuda sebagai bagian dari potensi pembangunan harus berdaya agar mampu berkiprah dalam menghadapi tantangan global. Jumlah pemuda ini merupakan potensi yang sangat besar. Keberdayaan pemuda sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda dilakukan melalui dorongan, bimbingan, kesempatan, pendidikan, pelatihan dan panduan sehingga mempunyai kesempatan untuk tumbuh sehat, dinamis, maju, mandiri, berjiwa wirausaha, tangguh, unggul, berdaya saing, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana memperlakukan jumlah pemuda yang luar biasa banyak di Indonesia ini? Salah satu upaya membantu mengatasi persoalan bangsa dengan jumlah pemuda yang sangat banyak ini adalah dengan mengembangkan potensi pemuda Indonesia. Pembentukan karakter kepemimpinan dalam berwirausaha sebagai wujud implementasi pertahanan dan ketahanan bangsa sehingga akhirnya terbentuk semangat patriotisme. Semangat berusaha menciptakan sikap patriotisme dan semangat bela negara sebagai wujud pertahanan dan ketahanan bangsa.

Artikel ini memaparkan hasil penelitian tahun kedua terhadap para pemuda (dalam hal ini para mahasiswa) sebagai partisipan dalam penelitian ini. Artikel ini memfokuskan pada partisipan yang sebelumnya sebagai kelompok pemuda yang siap dan berminat berwirausaha didorong dan diberi perlakuan untuk bergeser menjadi kelompok yang menjalankan usaha dan siap berusaha. Sedangkan untuk kelompok minat dibentuk dengan para partisipan baru. Harapan ke depan, pengkondisian ini merupakan stimulus yang bisa berlangsung secara kontinyu dan saling tarik antar kelompok pemuda tersebut.

Para partisipan yang awalnya dalam kelompok siap berusaha setelah dikondisikan dan dimotivasi sudah mulai menjalankan usahanya antara lain bisnis fashion secara *online*, bantal lukis, sablon, peternak itik, makanan ringan, sedangkan yang awalnya berminat sudah siap menjalankan usahanya dengan ide antara lain bisnis makanan ringan, peternak burung berkicau, bisnis minuman ringan, peternak lele.

B. Kepemimpinan Pemuda Sebagai Wirausaha Mandiri

Para partisipan penelitian yang masuk dalam kelompok pemuda yang mulai menjalankan usahanya merupakan para wirausahawan mandiri yang akan memiliki peran positif dalam mendukung pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia di masa depan. Pemuda sebagai wirausahawan mandiri tidak lepas dari munculnya jiwa kepemimpinan yang baik, hal ini dibutuhkan agar dalam mengelola usaha dalam bersikap jujur, tegas, dan berani mengambil resiko. Sebagai seorang pemimpin juga para pemuda tersebut memiliki kebutuhan akan prestasi yang tinggi, sehingga selalu optimis dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rangka mewujudkan bisnisnya.

Keberanian dalam mengambil resiko dibutuhkan agar berani menangkap peluang yang muncul, dengan kata lain "*no pain no gain*". Selain itu, keinginan untuk memiliki tanggungjawab dalam rangka pembelajaran pendewasaan diri tertangkap dalam perilaku yang ditunjukkan dalam kelompok tersebut. Kreativitas tampaknya menjadi tuntutan dalam diri mereka untuk mewujudkan usahanya, didukung juga oleh ketrampilan manajerial yang selama ini dipelajari di bangku kuliah.

Ditinjau dari sisi pengelolaan usaha. Para pemuda yang sudah mewujudkan bisnisnya tersebut melakukannya di sela-sela waktu kuliah, bahkan untuk bisnis atau usaha yang dijalankan secara *online* tidak harus membutuhkan waktu khusus. Tantangan pengelolaan bisnis dan waktu kuliah masih dirasakan bagi para pengelola bisnis yang sifatnya produksi. Sedangkan untuk beberapa diantaranya tidak memproduksi sendiri produknya, para wirausahawan tersebut hanya menjualnya dan untuk produksi diserahkan pada orang lain sebagai *supplier* (ini banyak dilakukan oleh para wirausahawan muda yang berbisnis secara *online*).

Ditinjau dari sisi pengelolaan keuangan, para wirausahawan muda tersebut sudah mampu mengelolanya dengan baik, artinya sudah dilakukan pemisahan keuangan bisnis dan pribadi. Administrasi keuangan dilakukan dengan cara sederhana dan praktis, dan sudah ada aliran kas (*cash flow*). Ketertiban administrasi keuangan ini penting, karena dalam kelompok bisnis yang dijalankan diantaranya ada yang menggunakan model patungan. Usaha dengan model patungan tersebut biasanya menggunakan modal yang berasal dari beberapa orang, tentunya harus dipertanggungjawabkan dengan jujur dan transparan serta akuntabel.

Perkembangan media informasi digital sangat menguntungkan para wirausahawan muda tersebut. Rata-rata dari para pelaku bisnis muda tersebut mengiklankan bisnisnya dengan promosi melalui media sosial, seperti *facebook*, *BBM*, toko *on-line*, *whats up* maupun dengan cara *personal selling* ("gethok tular"). Pemuda memiliki tingkat inovasi yang tinggi dalam hal teknologi informasi.

Wirausahawan adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Pada hakekatnya semua orang adalah wirausaha dalam arti mampu berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya dan pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya, akan tetapi banyak diantara kita yang tidak berkarya dan berkarya untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk masa depannya, dan ia menjadi ketergantungan pada orang lain, kelompok lain dan bahkan bangsa dan Negara lainnya.

C. Karakter Pemuda Sebagai Wirausaha Mandiri

Keberanian menghadapi dan mengambil risiko merupakan salah satu karakter yang banyak muncul dari kelompok partisipan, tentunya pengambilan risiko tersebut tetap dengan perhitungan. Sikap berani menghadapi risiko dengan perhitungan yang matang ini dimiliki oleh kelompok yang sudah mulai menjalankan usahanya. Hal ini tercermin dari jawaban-jawaban atas pertanyaan mengenai alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan produk agar siap jual, waktu yang diperlukan oleh bisnis untuk mulai menghasilkan keuntungan, kemungkinan yang dapat menghambat bisnis, pesaing bisnis, kemampuan dalam menentukan harga jual produk dibandingkan dengan pesaing. Wirausaha yang mau mengambil risiko akan lebih mudah memulai atau berinisiatif. Hal ini merupakan modal dasar bagi wirausaha. Perhitungan yang matang akan menentukan kesuksesan wirausaha. Perhitungan yang matang akan menghasilkan banyak keuntungan dengan memberi pedoman arah mana yang akan diraih.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Suryana (2003) bahwa wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil risiko yang moderat, artinya risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberanian menghadapi risiko yang didukung komitmen yang kuat, mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Hasil-hasil itu harus nyata

dan objektif, dan merupakan *feedback* bagi kelancaran kegiatannya. Keberanian menghadapi risiko ini akan mempengaruhi karakter yang lainnya, yaitu sikap mandiri yang tidak tergantung orang lain serta selalu tertantang untuk mencari peluang agar bisnisnya semakin berkembang.

Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan yaitu kemampuan untuk memiliki ide dan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui kreatifitas berpikir dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup, maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif didalam mengembangkan ide dan pikirannya terutama didalam menciptakan peluang usaha didalam dirinya, dia dapat mandiri menjalankan usahanya yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain, seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada disekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Karakter yang lain juga menunjukkan adanya sikap selalu mencari peluang dan berkarya nyata. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Pengertian itu juga menampung wirausaha yang pengusaha, yang mengejar keuntungan secara etis serta wirausaha yang bukan pengusaha, termasuk yang mengelola organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan/masyarakat. Masa muda adalah masa yang penuh kesempatan. Berwirausaha saat muda memiliki banyak keuntungan, antara lain fisik yang kuat, waktu dan energi yang berlimpah, lebih idealis dan jujur, memiliki tekanan tanggung jawab yang ringan, semangat juang, berpikiran positif, menyukai kebebasan, memiliki bisnis adalah kebanggaan, jiwa yang dinamis, penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri, kreatif dan mampu mencapai hal-hal yang kebanyakan orang tidak terpikirkan sebelumnya. Sikap selalu mencari peluang dan berkarya nyata ini akan berhasil jika dalam diri wirausaha ini memiliki sifat-sifat melayani. Sifat melayani ini sesungguhnya adalah jiwa satria seorang pemimpin.

Memiliki Jiwa Santun, Kepemimpinan, dan Kemampuan Manajerial. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan, seperti selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu, lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, seorang wirausahawan muda mampu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya lebih cepat, lebih dahulu dan segera beradapasar. Kemampuan menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Seorang wirausaha selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Karena itu, perbedaan bagi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan merupakan sumber pembaharuan untuk menciptakannya.

Ketrampilan dalam bergaul dibutuhkan dalam mencari peluang, terbuka untuk menerima kritik dan saran yang kemudian dijadikan peluang. *Leadership ability* adalah kemampuan dalam kepemimpinan. Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan (*power*), seorang pemimpin harus memiliki taktik mediator dan negotiator daripada diktator. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun

kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan managerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Ia bebas merancang, menentukan mengelola, mengendalikan semua usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain.

Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercreta, berkarsa dan bersaahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Dari waktu-ke waktu, hari demi hari, minggu demi minggu selalu mencari peluang untuk meningkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasi lah semua peluang dapat diperolehnya, gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif.

D. Wirausahawan Mandiri, Pertahanan dan Ketahanan Bangsa

Dari tiga kelompok kategori yaitu kelompok berminat wirausaha, kelompok sedang merintis wirausaha, dan kelompok sudah berwirausaha. Maka kelompok sudah berwirausaha merupakan kelompok yang lebih sigap dan tanggap menangkap peluang, lebih berani menghadapi risiko, lebih berkarya nyata, lebih memiliki jiwa kepemimpinan, dan lebih memiliki kemandirian dibandingkan dua kelompok yang lainnya. Kelompok-kelompok yang lainnya yaitu kelompok yang sedang merintis usaha dan kelompok yang berminat usaha harus senantiasa didorong penuh agar maju sejajar dengan kelompok sudah usaha. Tujuan mendorong agar menjadi kelompok yang sudah wirausaha adalah karena nilai-nilai positif yang ada yang mampu melekat pada diri seseorang jika melakukan wirausaha.

Hal ini sejalan dengan agenda dalam bidang pertahanan dan ketahanan. Salah satu agenda Implementasi Politik dan Strategi Nasional dalam Bidang Pertahanan dan Ketahanan adalah pembangunan nasional yang bertumpu pada pemuda. Agenda tersebut adalah mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri. Pemuda merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, sehingga peran aktifnya tidak mungkin diabaikan. Pemuda yang kuat berdaya saing, berwawasan, cerdas dan berkepribadian merupakan salah satu modal utama terwujudnya ketahanan nasional.

E. Simpulan

Hasil kajian yang telah dilakukan melalui penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok partisipan yang sudah mulai menjalankan usaha merupakan kelompok yang lebih sigap dan tanggap menangkap peluang yang muncul, lebih berani menghadapi risiko, mewujudkan ide secara nyata, menunjukkan kepemimpinan diri secara nyata, dan mempraktekkan kemampuan manajerial walaupun masih sederhana dibandingkan dua kelompok yang lainnya.

Para pemuda pada dasarnya dituntut untuk memiliki berkualitas diri yang tinggi dan cerdas dalam menghadapi situasi perubahan yang terjadi karena maju tidaknya suatu bangsa tetap dilihat dari kualitas pemuda yang ada dalam suatu negara. Semakin banyaknya pemuda yang berkualitas dan cerdas akan menjadi investasi besar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Pemuda merupakan harapan untuk bangkitnya bangsa Indonesia menuju negara yang makmur dan sejahtera, kreativitas dan inovasi para pemuda dalam menjalankan usahanya merupakan pijakan yang penting untuk

dikembangkan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mendukung dan memfasilitasi para pemuda yang ingin menjadi pejuang bangsa.

Berbagai cara bisa dilakukan oleh pihak manapun, baik dari kalangan pemerintah, swasta ataupun individu pribadi untuk menjadikan para pemuda bangsa ini menjadi pelopor kemajuan suatu bangsa. Tentunya sebagai pelopor kemajuan bangsa, para pemuda harus dapat menjadi seorang pemimpin atau berjiwa pemimpin. Seorang pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berada pada level tengah sehingga dia melakukan proses kepemimpinan ke atas, ke samping dan ke bawah. Jika hal ini diterapkan pada jiwa pemuda Indonesia, maka akan tercipta pemimpin-pemimpin yang hebat untuk masa depan bangsa Indonesia, yang pada akhirnya akan menumbuhkan patriot muda yang mau berkorban untuk kemajuan bangsanya.

Daftar Pustaka:

- Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi. 1998. *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alma, B., 2007, *Kewirausahaan* (Edisi Revisi), Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Bandura, A, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986
- Bagozzi, R.P. ;Davis, F.D. and Warshaw, P.R. "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models," *Management Science* (35:8), August 1989.
- Cheong, Je Ho, and Park, Myeong-Cheol (2005). Mobile internet acceptance in Korea, *Internet Research*, 15 (2), pp.125-140.
- Compeau, D.R., and Higgins, C.A.; Application of Social Cognitive Theory to training for computer skills; *Information systems Research* (6:2), 1995, pp 118-143
- Darsono, Licen, "Examining Information technology Acceptance By Individual Professionals; *Gadjah Mada Internasional Journal of Business*, (7,2),2005.
- Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Ghufro M. Nur & Risnawati Rini S. 2010. *Teori-Teori Psikologi*.
- Kementerian Pertahanan RI 2009, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Kemhan, Jakarta
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 2011, *Pedoman Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan*, Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI, 2013
- Meredith, G.G., 2000. *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. Penerbit Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Sugiarto, Meilan. 2004. *Perencanaan SDM Bagi Organisasi Yang Kompetitif*. PARADIGMA FISIP UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2009 *Intellectual Capital Sebagai Aset Kesuksesan Organisasi* PARADIGMA FISIP UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2007. *Penerimaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Teknologi Informasi : Suatu Pendekatan Perilaku*. Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2006. *Pengaruh Karakteristik Manajerial Terhadap Orientasi Stratejik dan Kinerja Industri Kecil*. PARADIGMA FISIP UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2005. *Menciptakan Nilai Bagi Pelanggan Melalui Budaya Organisasi Yang Berorientasi Pasar*. Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2009 *Membangun Keunggulan Bersaing Organisasi Melalui Corporate Social Responsibility*. PARADIGMA FISIP UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2013 *Analisis Struktural Pengaruh Self Efficacy dan Kesenangan Yang Dirasakan Sebagai Variabel Antecedent Dalam Technology Acceptance Model : Studi*

- Tentang Perilaku Penggunaan Internet Mahasiswa di Propinsi DIY. BISNIS DAN MANAJEMEN UNPAD (Terakreditasi) --- dalam proses
- Sugiarto, Meilan. 2011 Factors Influencing Service Quality And Customer's Satisfaction, A Study On The Bank In The Malang, Indonesia. Call paper at the 2nd International Research Symposium in Service Management (IRSSM-2), hosted by Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, Indonesia.
- Sugiarto, Meilan. 2006 Pengaruh Karakteristik Manajerial Terhadap Orientasi Strategik dan Kinerja Industri Kecil (Studi pada Industri Kecil Batik di Propinsi DIY). Research Grand PHK A2 Tahun I Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2007 Inovasi Pembelajaran Mata Kuliah Perilaku Organisasi Melalui Penerapan Metode *Case Based* dan *Collaborative Learning Teaching* Grand PHK A2 Tahun II Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2007 Analisis Penerimaan UKM Terhadap Teknologi Informasi Berdasarkan Pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) Riset Unggulan LPPM UPN Veteran Yogyakarta
- Sugiarto, Meilan. 2008 Orientasi Kewirausahaan Usaha Kecil Kerajinan Grabah Di Wilayah Kasongan Kabupaten Bantul Dalam Membangun dan Mengembangkan Usahanya Hibah Bersaing DP2M DIKTI Jakarta
- Sugiarto, Meilan. 2008 Pengaruh *Job Unsecurity* Terhadap Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Pada Komitmen Organisasional (Studi pada Pegawai Tetap Yayasan UPN Veteran Yogyakarta Research Grand PHK A2 Tahun III Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta
- Suryana. 2003. Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta Salemba Empat.
- Sutoyo. 2012. Pengaruh Pemahaman Mata Kuliah kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Menjadi Wirausaha. Laporan Penelitian.
- Sutoyo. 2008. Pentingnya Budaya Perusahaan (*corporate culture* bagi organisasi, Majalah Info Kampus, UPNVY ISSN 0894-932X, 2006
- Sutoyo. 2008. Profesi Penilai Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Perusahaan (Sinergi antara Profesi Akuntan dan Penilai), 2008
- Sutoyo. 2008. Perspektif Etika Bisnis Dalam pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Wujud Tanggungjawab Sosial Korporasi, 2008.
- Sutoyo. 2009. *Urgensi Menumbuhkembangkan Jiwa Entrepreneurship Perguruan Tinggi*, Majalah Info Kampus, UPNVY ISSN 0894-932X, 2009
- Sutoyo. 2009. Pengurus Koperasi harus mempunyai Jiwa Entrepreneurship, Majalah Info Kampus, UPNVY ISSN 0894-932X, 2009
- Sutoyo. 2009. Peranan Pengawas dalam meningkatkan kinerja koperasi, Majalah Info kampus, UPNVY ISSN
- Sutoyo. 2009. Peran Pengurus dalam mengelola koperasi, majalah info kampus, UPNVY ISSN 2009
- Sutoyo. 2009. *Mengapa Lulusan Perguruan Tinggi lebih berorientasi cari kerja? Majalah kriring.*
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Usman, Wan, dkk. 2003. *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
- Wibowo, Rudi. 2011. Pendekatan Partisipatif Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jurnal Administrasi Bisnis FISIP UPN

- Winarno. 2012. Pengaruh modal manusia dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Volume 10, nomor 2, juni 2012. FEB. UB, Malang.
- Winarno. 2009. Pengaruh komitmen organisasional, kepemimpinan, motivasi, dan pemberdayaan terhadap kinerja. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*. Vol 5, Agustus 2009.

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) BAGI
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kusharyanti

UPN Veteran Yogyakarta
kusharyanti@gmail.com

Sri Astuti

UPN Veteran Yogyakarta
toeti_2003@yahoo.com

Abstract

This research aims to identify accounting practices in UMKM and evaluate the application of SAK ETAP in UMKM. The method used in this research is survey to UMKM agents in Yogyakarta. The result of this research are: UMKM agents have done recording simply but have not fulfilled prevailing accounting standard; and most of the UMKM agents do not understand SAK ETAP.

Keywords: SAK ETAP, UMKM

Abstraksi

Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi praktik pencatatan/akuntansi yang digunakan UMKM dan (2) mengevaluasi penerapan SAK ETAP di UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei ke para pelaku UMKM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan penyusunan laporan keuangannya. Hasil survai adalah pelaku UMKM menyadari sangat pentingnya pencatatan dan laporan keuangan, namun mereka tidak mempunyai kemampuan/keahlian atau terbatas sumber dayanya untuk melakukan pencatatan. Pencatatan masih sangat sederhana, belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Sebagian besar tidak mengerti tentang standar akuntansi (SAK ETAP) untuk pelaporan keuangan usaha mereka.

Kata Kunci: SAK ETAP, UMKM

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti bahwa UMKM mampu bertahan di saat terjadi krisis ekonomi. Jumlah UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2013 mencapai 56,5 juta dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia serta mampu memberikan kontribusi terhadap PDB adalah sebesar 56 persen (Hasan, 2013).

Masalah utama yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha kecil menengah antara lain adalah pengelolaan keuangan dan permodalan. Rendahnya kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Muntoro (1990) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Namun karena UMKM memiliki berbagai keterbatasan, maka kewajiban tersebut diduga tidak

menguntungkan karena akan menambah biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh atas penyusunan laporan keuangan serta laporan keuangan tidak keputusan (Suhairi, 2011).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyusun standar akuntansi keuangan bagi UMKM. Standar ini disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang berlaku efektif 1 Januari 2011. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak kendala, antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan para pelaku usaha UMKM tentang laporan keuangan, baik dari segi sosialisasi standar, pedoman penyusunan laporan keuangan, maupun manfaat dari laporan keuangan.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta sekitar 22.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), 86 persennya berskala mikro. Dari jumlah itu, 1.300 UMKM telah mendapat pelatihan, tetapi 9,6 persennya gagal berkembang. Kegagalan ini antara lain dikarenakan tidak memiliki rencana bisnis yang jelas. Belum adanya rencana bisnis yang jelas dikarenakan kurangnya informasi yang memadai, salah satunya adalah informasi keuangan. Hampir sebagian besar perusahaan di sektor ini belum mampu menyusun laporan keuangan dengan tepat (Disperindagkop, 2013). Padahal, laporan keuangan ini mempunyai banyak manfaat yaitu untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, mampu mengidentifikasi harta pemilik dan harta perusahaan, mampu dipakai sebagai penyusunan anggaran dengan tepat, mampu menunjukkan aliran kas dan dipakai sebagai dasar penetapan pajak dengan tepat (Auliyah, 2012). Akibatnya, UMKM tidak bisa berkembang, meski telah diberi insentif permodalan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM saat ini antara lain adalah: (1) Sulitnya para pelaku UMKM dalam mendapatkan dana dari pihak luar, karena kurangnya informasi keuangan yang dibutuhkan oleh lembaga pemberi dana; (2) Kurangnya kemampuan UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (SAK ETAP), sehingga belum bisa menunjukkan informasi keuangannya dan belum bisa melihat kinerja sesungguhnya dari usaha mereka; (3) Kurangnya kemampuan UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan mereka, yaitu belum dipisahkannya keuangan pribadi dengan keuangan usaha UMKM sehingga sulit menunjukkan kinerja keuangan usaha mereka.

Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan usaha untuk kemajuan usaha dan kelangsungan hidup usaha dengan cara menumbuhkan kesadaran tersebut, khususnya melakukan pendampingan secara intensif dalam pencatatan sederhana sehingga pelaku usaha merasakan kemudahan dan pada akhirnya merasakan manfaat dari pencatatan tersebut. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan khusus sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi perlakuan akuntansi yang digunakan oleh UMKM; (2) Mengevaluasi laporan keuangan yang disusun oleh UMKM; (3) Memberikan format penyusunan laporan keuangan bagi UMKM secara sederhana dan realistis; (4) Memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi UMKM baik secara manual maupun sistem informasi komputer dengan sederhana.

Hasil dari penelitian ini diharapkan (1) menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya laporan keuangan yang standar bagi para pelaku UMKM; (2) menjembatani antara pihak UMKM dan pihak perbankan atau lembaga keuangan lain terkait akan kebutuhan informasi yang diperlukan, sehingga bisa menekan risiko kredit macet; (3) menjembatani antara pihak UMKM dan pihak-pihak terkait akan kebutuhan informasi yang diperlukan; (4) mampu memberikan masukan kepada DSAK IAI terkait dengan implementasi SAK ETAP di UMKM; dan (5) memberikan masukan kepada badan regulator yang mengatur UMKM tentang laporan keuangan UMKM.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

Kelompok	Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil penjualan tahunan
Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Rp 300 juta
Kecil	Rp 50 juta - Rp 500 juta	Rp 300 juta - Rp 2.5 miliar
Menengah	Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Rp2.5 miliar- Rp 10 miliar

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UMKM) mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta - Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lebih didasarkan pada jumlah tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Pengendali (SAK-ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah (1) memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi; (2) Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (3) Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. (4) Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.

SAK ETAP akan membantu para pelaku UMKM karena sifatnya lebih ringkas dibandingkan dengan SAK yang umum, sehingga diharapkan para pelaku UMKM akan mampu memahami SAK ETAP tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya pemberian informasi dan sosialisasi terkait dengan SAK ETAP kepada para pelaku UMKM. Kurang pahamiannya para pelaku UMKM terhadap kebutuhan dan cara penyusunan laporan keuangan disebabkan antara lain oleh sosialisasi SAK-ETAP, latar belakang pendidikan para pelaku UMKM (Rudiantoro dan Siregar, 2011).

Sebagaimana pendapat dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa peran dan kontribusi UMKM dalam struktur perekonomian nasional tidak hanya menjadi salah satu prioritas nasional tetapi juga harapan bagi agenda percepatan pembangunan yang sedang berjalan (Sriyana, 2010). Dengan dimasukkannya tema penguatan UMKM pada KTT APEC ke 8 di Bali, Indonesia berharap pelaku UMKM nasional dapat memanfaatkan sejumlah peluang yang ada baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

Kecenderungan para pelaku UMKM di Indonesia dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi non akuntansi, mereka belum menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pelaku UMKM tentang laporan keuangan dan manfaat dari laporan keuangan. Laporan

keuangan yang dibuat oleh UMKM sebagian besar didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas saja, belum melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Jati, 2004). Menurut Murniati (2002), penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM dipengaruhi oleh karakteristik manajemen dan karakteristik perusahaan.

Baas dan Schrooten 2006 (dalam Siregar, 2011), bahwa perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM didasarkan pada 2 sumber informasi, yaitu *soft information* (kepercayaan) dan *hard information* (laporan keuangan). Hasil penelitian Baas dan Schrooten menunjukkan bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit perbankan karena belum adanya laporan keuangan yang standar pada industri UMKM. Rendahnya industri UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM. Sedangkan menurut Rudiantoro dan Siregar (2011), rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM dikarenakan kurangnya pemahaman para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan datanya diperoleh melalui survei. Survei dilakukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Disperindagkop, Sampai dengan tahun 2013 jumlah UMKM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 22.000. Survei dilakukan kepada pelaku UMKM yang masuk dalam keanggotaan APIKRI (Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Republik Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi pedoman penyusunan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK-ETAP. Identifikasi ke dalam Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas dan *Cash Flow*; (2) Mengidentifikasi akun-akun dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK-ETAP. Identifikasi akun ke dalam kas, piutang, sediaan, asset tetap, utang, dan modal; (3) Mengevaluasi penilaian dan pengukuran akun dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK-ETAP. Evaluasi ini dilakukan dengan mempelajari penilaian dan pengukuran per akun dengan tujuan untuk mampu melakukan identifikasi, penilaian dan pengukuran atas akun-akun dalam transaksi yang terjadi di UMKM; (4) Mengidentifikasi laporan keuangan yang digunakan oleh UMKM, melalui survei pada UMKM; (5) Menganalisis pengidentifikasian, penilaian dan pengukuran dalam laporan keuangan UMKM, melalui survei pada UMKM.

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan datanya diperoleh melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pelaku UMKM dan staf Disperindagkop, Pegadaian, dan pihak Bank. Tujuan survei adalah untuk mengetahui data umum responden, persentuhan UMKM dengan kredit bank, praktik pencatatan atau pelaporan yang sudah dilakukan UMKM, dan seberapa jauh pelaku UMKM telah mengetahui mengenai standar akuntansi untuk UMKM. Wawancara dengan Disperindagkop, pegadaian, dan pihak bank untuk mendapatkan gambaran awal mengenai persepsi mereka terhadap kemampuan UMKM dalam mencatat dan melaporkan usaha mereka dalam laporan keuangan.

Survei dilakukan selama dua hari pada saat pelaku UMKM mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh UMKM pada tanggal 20 dan 21 Mei 2015 berlokasi di Apikri,

Yogyakarta. Pelatihan tersebut ditujukan bagi pelaku UMKM pemula. Pelaku UMKM yang mengikuti acara tersebut sebanyak 140 orang. Alat melakukan survei adalah kuesioner yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang diisi sendiri oleh pelaku UMKM. Kuesioner tersebut diadopsi dan dikembangkan dari Rudiantoro dan Siregar (2011). Kuesioner yang disebar sebanyak 140, kuesioner dijawab dan dikembalikan sebanyak 87 buah.

Hasil Survei

Berdasarkan pertanyaan demografis responden, sebagian responden adalah pengelola usaha (50%), dan sebagian besar pendidikan responden adalah SMA/SMK (55%). Jenis usaha yang dijalankan pelaku usaha sangat bervariasi, mulai dari bidang makanan (katering, produksi makanan ringan, jualan soto, produksi sirup, sari kedelai, telur asin, abon ikan, pengolahan manisan salak pondoh, bakpia), pembuatan souvenir (keramik, gerabah), percetakan, pembuatan pupuk organik, bengkel elektronik, tempat kos, kerajinan (batik, batu, tas nilon, kulit, perak, kuningan, bambu, kayu, gerabah, keramik) garmen, bengkel las, ternak ayam, took kelontong.

Sebagian besar usaha berdiri antara tahun 2010-2012, dengan jumlah karyawan sebagian besar adalah kurang dari 4 (80%). Hanya dua usaha yang menyebutkan jumlah karyawan antara 20-99 orang. Aset perusahaan sebagian besar kurang dari Rp100 juta dengan omset sebagian besar kurang dari Rp100 juta. Sumber pendanaan terbesar berasal dari modal sendiri (53%). Berdasarkan data demografis responden dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tergolong usaha mikro.

Sebanyak 54% responden telah melakukan pencatatan/pembukuan akuntansi, namun sebagian besar tidak ditangani oleh bagian khusus (82%). Alasannya adalah keterbatasan karyawan (29,5%). Meskipun ada pencatatan, namun pencatatan tersebut tidak dilakukan secara rutin. Sebagian besar responden (56%) menyadari bahwa laporan keuangan tersebut sangat penting bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan, sehingga mereka berencana untuk melakukan pencatatan dan membuat pelaporan (98%). Pencatatan dilakukan sebagian besar (62,95%) tanpa mengacu pada standar tertentu. Komponen laporan keuangan yang paling banyak dibuat adalah laporan laba rugi. Sebagian besar pencatatan dilakukan secara manual (91%) tanpa menggunakan *software* tertentu, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Pelaporan tersebut sebagian besar disusun dengan tujuan untuk keperluan internal (79%), misalnya pembuatan keputusan.

Sebagian besar responden tidak mengetahui adanya SAK ETAP (94%), beberapa responden yang telah pernah mendengar mengenai SAK ETAP mengetahuinya dari acara Seminar/Pelatihan (60%). Sebagian besar (92%) responden belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan khusus mengenai SAK ETAP.

Berdasarkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada beberapa pelaku UMKM, maka ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut: (1) Tidak adanya inventarisasi bukti-bukti keuangan (nota/faktur); (2) Adanya pencatatan sederhana dan tidak terdokumentasi dengan baik; (3) Tidak melakukan pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi/keluarga; (4) Perhitungan biaya produksi dan penentuan laba kurang akurat; (5) Tidak mengetahui cara melakukan pencatatan yang baik namun mempunyai kemauan untuk belajar melakukan pencatatan; Tidak mengetahui apakah modal bertambah atau berkurang; (6) Tidak ada pencatatan dan perhitungan sediaan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden adalah kelompok usaha mikro dengan jumlah karyawan kurang dari empat dan jumlah aset serta omset kurang dari Rp100 juta. Adapun bidang usaha UMKM sangat bervariasi yang menjadi responden adalah bervariasi.

Sebagian besar pelaku UMKM di Yogyakarta menyadari pentingnya pencatatan dan laporan keuangan, namun mereka tidak mempunyai kemampuan/keahlian atau terbatas sumber dayanya untuk melakukan pencatatan. Sehingga hal tersebut belum dilakukan, laporan kegiatan usahanya masih sangat sederhana sekali. Belum memenuhi ketentuan standar akuntansi. Sebagian besar belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang benar untuk usaha mereka. Hampir seluruh pelaku UMKM Yogyakarta belum mengetahui mengenai standar akuntansi keuangan (SAK ETAP) untuk usaha mereka. Padahal SAK ETAP sudah disahkan sejak tahun 2011. Mereka belum bisa melakukan pencatatan yang memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Pencampuran uang usaha dan uang pribadi ini dianggap sebagai salah satu penyebab tidak berkembangnya usaha mereka, selain itu faktor ketekunan dan disiplin dalam pencatatan juga belum dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliyah Iim Ma'rifatul, 2012, Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK-ETAP pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo, Artikel Ilmiah, STIE Perbanas Surabaya.
- Bank Indonesia, 2009, Kajian Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan dan *Business Plan* untuk UMKM: Persiapan Bank Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM.
- Bass, Timo dan Mechthild Schrooten, 2006, Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis, *Small Business Economic*, Vo. 27.
- Hasan Syarifuddin, 2013, Sektor UMKM Menyerap 97,3% dari Total Tenaga Kerja Indonesia, *Republika online*, Juli.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Salemba Empat Jakarta.
- Jati, Hironnymus, Bala, Beatus, dan Otnil Nisnami, 2004, Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan, *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, II No. 8, 210-218.
- Muntoro, R. K. 1990, *Praktek Akuntansi Keuangan*, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- Murniati, 2002, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro.
- Rudiantoro Rizki dan Siregar Sylvia Veronica, 2011, Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP, Simposium Nasional Akuntansi ke 14, Aceh.
- Sriyana Jaka, 2010, Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Simposium Nasional: Menuju Purworejo Dinamis.
- Suhairi, 2011, Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Analisis Teknik serta Prosedur Akuntansi untuk Pengembangan Penerapan Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PT. BUKIT ASAM DAN PT. KALTIM PRIMA COAL :
Sebuah Komparasi Dengan Pendekatan Deskriptif

Meilan Sugiarto¹⁾

FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta; e-mail: msugiarto89@gmail.com

Indra Kusumawardhani²⁾

FE UPN "Veteran" Yogyakarta; e-mail: indrasumadyo@yahoo.com

Abstrak

Implementasi program *Corporate Social Responsibility*(CSR) pada setiap korporasi mempunyai karakteristik yang berbeda - beda, perusahaan pertambangan batubara dan mineral mempunyai *standard growth center* yang berbeda – beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi. Karakter tersebut harus dikaji sesuai dengan karakter sosial, lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga dana yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan program dan ketepatan program. PT. Bukit Asam yang beroperasi di Sumatera Selatan dan PT. Kaltim Prima Coal yang beroperasi di Kalimantan Timur mempunyai karakteristik program yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat lokal. Perbedaan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, untuk mengetahui sejauh mana perbedaan program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan pada masing – masing wilayah operasi usaha penambangan sehingga program *corporate social responsibility* memberikan prestasi yang berbeda pada masing – masing perusahaan implikasinya.

Keyword: CSR, Bukit Asam, Kaltim Prima Coal.

Abstract

The implementation program of CSR in every corporate has different characteristics, Coal Mining Company and Coal Mineral Company have different growth centre standardization depending on local operation area of its. Those characteristics have to be analyzed correlating social characteristic, environmental, social society in surrounding area so the funding which has been planned appropriate with program necessary and successful program accuracy. PT. Bukit Asam is operated in South Sumatra and PT. Kaltim Prima Coal is operated in East Borneo, both have different characteristic program depending on local social welfare society. Those differences become interesting to investigate to know about how far the corporate social responsibility differences program that had processed in every operation mining area so those programs given different achievement in the implication companies its self.

Keywords: CSR, Bukit Asam, Kaltim Prima Coal.

Pendahuluan

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang tepat berada pada *ring of fire* memberikan kontribusi yang besar terhadap sumber daya alam baik sumber daya alam dalam bidang mineral, minyak, gas, batubara dan lain sebagainya.

Keuntungan lain sebagai negara kepulauan membuat Indonesia mempunyai kehidupan budaya, sosial, agama, bahasa dan lingkungan yang berbeda – beda. Salah satu perbedaan tersebut memberikan implikasi kehidupan sosial yang berbeda – beda juga meskipun tetap dalam satu pilar Republik Indonesia.

PT. Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan besar yang berkecimpung dalam dunia pertambangan berlokasi di Sumatera Selatan memiliki karakteristik tingkat standar pendidikan, kehidupan sosial lebih baik dari masyarakat yang tinggal di wilayah operasi

pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal di Sangatta Kalimantan Timur. Perbedaan karakteristik ini memberikan dampak yang besar terhadap pengaplikasian program CSR sebagai aturan wajib dari pemerintah bagi perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi sumber daya alam (Suryaningsum, 2015).

Menurut Suryaningsum (2009), dalam Indeks CSR, salah satu tanggungjawab korporasi terutama perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (Pasal 74 UU No. 40/2007) mineral, tambang ataupun migas adalah *corporate social responsibility* (CSR) yang merupakan gerakan etis kepedulian sebagai wujud tanggung jawab sosial dan pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (*World Business Council for Sustainable Development*). Menurut Pasal 1 titik 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberlakuan Tanggungjawab *Corporate Social Responsibility*, Adhe Adhari 2015 menyatakan bahwa pelaksanaan CSR pada masing – masing perusahaan pertambangan batubara dan mineral mempunyai standar *growth center* yang berbeda – beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga implementasi CSR dilapangan harus dikaji berdasarkan karakter sosial masyarakat sekitar dan presentase dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan tersebut. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 hal yang terpenting adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di lapangan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat lokal yang berada pada daerah operasi perusahaan berupa kegiatan pelatihan, bantuan modal, dorongan, bimbingan, peluang dan prioritas ketenagakerjaan untuk menempati posisi tertinggi dalam perusahaan.

Corporate Social Responsibility

D'Amato, dkk. 2012, menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders*, dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain).

Stakeholders perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau supplier), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. Diterapkan pada setiap kegiatan pembangunan tersebut. Gray, *et.al.* (1995) dan Deegan (2002) menyatakan bahwa pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) mempengaruhi praktik *environmental disclosure*. Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial [Dierkes & Antal (1986), dalam Mangos & Lewis (1995)]. Mangos & Lewis (1995) menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif.

Jadi, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis serta pasif, semua

itu hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders*. Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*.

Penerapan CSR

Menurut Wibisono (2008), terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program CSR, setidaknya terdapat empat tahap, diantaranya:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu *awareness building*, *CSR Assessment*, dan *CSR manual building*. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat *CSR manual*. Hasil *assessment* merupakan dasar menyusun *manual* atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau menggunakan tenaga ahli.

Manual assessment merupakan inti dari perencanaan, karena menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan *manual* CSR dibuat sebagai acuan, panduan dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

2. Tahap Implementasi

Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik, akibatnya tujuan program CSR secara keseluruhan tidak akan tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal padahal anggaran yang telah dikururkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang.

Dalam memulai implementasi, Wibisono (2008), menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga aspek yang harus disiapkan, yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukan implementasi beserta alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, aspek tersebut diterjemahkan kedalam:

- Pengorganisasi, atau sumber daya yang diperlukan
- Penyusunan (*staffing*) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya
- Pengarahan (*directing*) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan
- Pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan
- Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
- Penilaian (*evaluating*) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

Tahap implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim atau divisi khusus yang dibentuk untuk mengelola program CSR, langsung berada dibawah

pengawasan salah satu direktur atau CEO. Tujuan utama sosialisasi adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman *Corporate Social Responsibility* yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun, sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan tentang *Corporate Social Responsibility* di dalam seluruh aspek bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tetapi sudah *beyond compliance*.

3. Tahap Evaluasi

Setelah program diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektifitas penerapan CSR. Terkadang ada kesan, evaluasi baru dilakukan jika ada program yang gagal sedangkan jika program tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi harus tetap dilakukan, baik saat kegiatan tersebut berhasil atau gagal, bahkan kegagalan atau keberhasilan baru bisa diketahui setelah program tersebut dievaluasi.

Menurut Prayogo dan Dody (2011) dalam Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* pada industri tambang dan migas, evaluasi program *corporate social responsibility* (CSR) perlu diadakan setiap tahunnya bukan untuk tindakan mencari-cari kesalahan. Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan.

4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholder* yang memerlukan.

PT. KALTIM PRIMA COAL

Berdasarkan Annual Report PT. Bumi Resources 2012, PT Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Bumi Resources yang memiliki konsesi tambang kurang lebih seluas 90.938 hektar di Sangatta dan Bengalon yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.

Tambang Sangatta terletak dekat dengan fasilitas-fasilitas pelabuhan di Tanjung Bara, yang dihubungkan dengan lokasi tambang melalui *overland conveyor* dengan panjang sekitar 13 kilometer. Tambang Bengalon juga berlokasi dekat dengan pantai dan dihubungkan dengan fasilitas pelabuhan melalui jalan sepanjang 22 kilometer. Lokasi yang dekat dengan pelabuhan memberikan keuntungan bagi KPC dengan biaya yang rendah untuk transportasi dari tambang ke lokasi pelabuhan. KPC memproduksi tiga jenis batubara (Annual Report PT. Kaltim Prima Coal, 2012):

- Prima, batubara berkualitas unggul, dengan kalori tinggi, kandungan abu sangat rendah, kandungan sulfur menengah dengan kelembaban rendah
- Pinang, memiliki kalori yang lebih rendah dari Prima dengan tingkat kelembaban yang lebih tinggi

- Melawan, batubara sub-bituminous dengan kandungan sulfur dan abu rendah, serta tingkat kelembaban yang tinggi.

Keadaan Umum Masyarakat lokal di Daerah Sangatta

Daerah penelitian terdiri dari daerah dengan topografi yang curam dan berbukit-bukit. Daerah berbukit-bukit dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk bercocok tanam, beternak, berkebun kelapa sawit dan merupakan kawasan pemukiman. Pada daerah yang curam, merupakan kawasan hutan lindung dan bukan hutan lindung, kegiatan yang banyak dilakukan adalah berburu hewan dan menebangi pohon secara legal maupun ilegal.

Di daerah ini terdapat jalur sungai panjang yaitu Sungai Kaliorang yang sangat membantu penduduk sekitar dalam mengatasi masalah irigasi dan sebagian masyarakat membentuk pembangkit listrik tenaga air secara sederhana. Pada hulu cabang-cabang Sungai Kaliorang terdapat beberapa mata air yang dimanfaatkan penduduk untuk dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Masyarakat yang tinggal di daerah ini pada umumnya adalah transmigran dari beberapa daerah yaitu Bali, Jawa dan Madura. Mereka membentuk perkampungannya masing-masing. Mata pencaharian utama mereka adalah sebagai petani, peternak, pegawai perkebunan kelapa sawit, pedagang, pengusaha kayu dan pengusaha angkutan. Akses jalan yang baik dan ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah ini.

Pendidikan

Pendidikan masyarakat yang tinggal di Sangatta masih banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga program *Corporate Social Responsibility* pada PT. Kaltim Prima Coal perlu mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi pendidikan ataupun pemerintahan guna mengembangkan pendidikan, mengadakan kegiatan pendidikan, cerdas cermat, pelatihan-pelatihan guru dan memberikan fasilitas yang memadai untuk bidang pendidikan.

Kesehatan

Rumah Sakit yang diberi nama Klinik International SOS merupakan rumah sakit yang didirikan PT. Kaltim Prima Coal yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat maupun pegawai PT. Kaltim Prima Coal.

Ekonomi

Mata pencarian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sangatta Utara umumnya adalah pekerja pada perusahaan pertambangan batubara yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur, sedangkan lainnya bermata pencaharian sebagai pedagang, pengrajin cinderamata dan penyedia jasa transportasi. Namun masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sangatta merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah diakibatkan oleh biaya hidupnya yang tinggi, karena di Sangatta ini standar biaya hidup mengikuti orang-orang yang ada diperusahaan dan karena faktor ketidakmampuan dari diri mereka sendiri akibat pendidikan rendah sehingga sukarnya mendapat lapangan pekerjaan sehingga masyarakat pada daerah tersebut perlu diberikan pelatihan-pelatihan kerja serta modal usaha.

PT. BUKIT ASAM

PT. Bukit Asam berada pada wilayah Tanjung Enim yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pencapaian daerah relatif mudah karena terletak pada ruas jalan utama lintas Sumatera Jalur Tengah. Kota Muara Enim dapat dicapai dari Kota Palembang dengan kendaraan selama kurang lebih 4 jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 185 km. Peta lokasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan Laporan Tahunan PT. Bukit Asam tahun 2014, keadaan umum masyarakat lokal di daerah Tanjung Enim Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, makadapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PT Bukit Asam Tanjung Enim mempunyai dampak eksternalitas positif terhadap sosial ekonomimasyarakat di Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Menurut Gunradi. R, Sabranto, Dkk. 2005 (dalam Laporan Lapangan Pemantauan Dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral, di Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan), lapangan pekerjaan yang diberikan oleh PT. Bukit Asam terhadap masyarakat lokal memberikan keuntungan dalam hal pengurangan yang semakin sedikit dikarenakan PT. Bukit Asam memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerja di PT. Bukit Asam, dan ditambah juga dengan adanya Kegiatan UsahaBersama (KUB) antara masyarakatsekitar dengan PT.Bukit Asam.

Kegiatan Usaha Bersama yang diselenggarakan oleh PT. Bukit Asam dan masyarakat memberikan dampak yang positif yaitu berkembangnya struktur ekonomi yang mengakibatkan munculnya industri – industri kecil dan rumah tangga sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untukmengembangkan usaha-usahanya dan memberikan sumber-sumber pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum karena semakin berkembangnya matapecaharian di Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Gunradi. R, Sabranto, dkk. (2005), menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat lokal juga semakin meningkat dengan adanya fasilitas transportasi yang membuat harga tanah di Daerah Tanjung Enim naik, fasilitas lingkungan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya melestarikan alam, fasilitas pendidikan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat setempat, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi masyarakat dan fasilitas umum lainnya dalam menunjang aktifitas masyarakat sehari – hari serta ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatKelurahan Pasar Tanjung Enim.

Tabel 1. Komparasi CSR PT. Bukit Asam dan PT. Kaltim Prima Coal BerdasarkanLaporan Tahunan, *Annual Report Sustainability* PT. BA 2014 & PT. Kaltim Prima Coal 2013.

Bidang CSR	PT. Bukit Asam	PT. Kaltim Prima Coal
	Pengembangan Industri Kecil	Pengembangan Industri Kecil
	Pengembangan Industri Besar	Pengembangan Industri Menengah
Ekonomi	Pelatihan Softskill	Pelatihan Softskill
	Usaha Tani	Pengembangan Kontraktor Lokal
		Pengembangan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat
Sosial	Kelestarian kesenian lokal daerah	Pendidikan
	Pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan	Peningkatan Insfatruktur
	Kerja sama dengan Pemerintah	Peningkatan Sanitasi dan Kesehatan
	Pemberian sembako kepada masyarakat kurang mampu	
	Kerja sama dengan masyarakat	
	Mengikutsertakan masyarakat lokal	
Lingkungan	Green Mining	Green Mining

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa program *corporate social responsibility*(CSR) yang diterapkan di PT. Bukit Asam mempunyai orientasi terhadap *stakeholder* dan masyarakat pemangku kepentingan bisnis batubara tersebut dengan lebih melibatkan masyarakat sekitar

untuk melaksanakannya memberikan dampak internal pada masyarakat sekitar yang cukup signifikan. Sedangkan PT. Kaltim Prima Coal mempunyai kecenderungan berorientasi kepada external masyarakat sekitar sehingga masyarakat kurang merasakan dampak internal dari penerapan program tersebut namun tetap memenuhi aturan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah ditetapkan pemerintahan Indonesia.

Kesimpulan

Karakteristik *corporate social responsibility* (CSR) disesuaikan dengan perusahaan pertambangan batubara beroperasi, masing – masing perusahaan mempunyai *standar growth center* yang berbeda – beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga dana yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan program dan ketepatan program. PT. Bukit Asam yang beroperasi di Sumatera Selatan lebih mengedepankan program *corporate social responsibility*(CSR) berorientasi kepada internal masyarakat sekitar sedangkan dan PT. Kaltim Prima Coal yang beroperasi di Kalimantan Timur mempunyai karakteristik program *corporate social responsibility* yang berorientasi pada externalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Adhari, *Tinjauan Yuridis: Kebijakan Pemberlakuan Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility (CSR)*, Energy and Mining Law Institute (EMLI), Jakarta, 12 Februari 2015.
- Annual Report Sustainability.*, PT. Bukit Asam. Tbk. 2014.
- Annual Report Sustainability.*, PT. Bukit Asam. Tbk. 2013.
- Annual Report Sustainability.*, PT. Bukit Asam. Tbk. 2014.
- Annual Report Sustainability.*, PT. Kaltim Prima Coal. Tbk. 2013.
- Annual Report Sustainability.*, PT. Bumi Resources. Tbk. 2013.
- Annual Report Sustainability.*, PT. Kaltim Prima Coal. Tbk. 2012.
- Cisro, 2014. *Corporate Social Responsibility Report*, 2014.
- D'Amato, dkk. 2012, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Business A Guide to Leadership Tasks and Functions*, North Carolina.
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. *Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 47-77
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. *Methodological Themes: Constructing a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 78-101
- Gunradi. R, Sabranto, dkk. 2005. *Pemantauan Dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral, Di Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan*. Kolokium Hasil Lapangan. Dim.
- IPPF, 2010. *Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development*, Canada.
- Leimona, Beria & Fauzi, Annul. 2008. *CSR dan Pelestarian Lingkungan Mengelola Dampak : Positif dan Negatif.*, IBL
- Mangos, Nicholas C. and Neil R. Lewis. 1995. *A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers' Accounting Choice Behaviour. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 1, p. 38-62
- Prayogo dan Dody. (2011). *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada industri tambang dan migas*. Makara, Sosial Humaniora, 15 (1).

- Sampe, Evy. Sarwono. Sukanto. 2012. Pengembangan Jejaring Organisasi Yayasan Sangatta Baru (Ysb) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 3, Hal. 471-477
- Sugiarto, M..dan Wardhani, I.K. 2014. Corporate Social Responsibility., Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Sugiarto, M..dan Wardhani, I.K. 2014. Corporate Sustainability Reporting. Prosiding Semnas Sinau 3.UPNV Jakarta, UPNV Yogyakarta, UPNV Jatim.
- Sugiarto, M. 2009. Membangun Keunggulan Bersaing Organisasi melalui Corporate Social Responsibility PARADIGMA FISIP UPN Veteran Yogyakarta.
- Suryaningsum, Sri. 2008. Indeks CSR. Laporan Penelitian HF Dikti RI.
- Suryaningsum, Sri. 2009. Perbedaan Paradigma Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility: Komparasi Amerika dan Eropa. *Paradigma* ISSN 1410-3133. Volume 13, no 2.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2006. Pekerjaan Sosial Industri, CSR, dan Comdev. Makalah workshop tentang Corporate Social Responsibility
- Waryanto. 2010. Pengaruh Karakteristik Good Govenance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corportae Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Skripsi S1 Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik. Fascho Publishing.
- Wibisono, Yusuf.2008. *Membedah konsep CSR; Seri Menejemen Berkelanjutan*. CV. Ashkaf Media Grafika Surabaya. Hal 23-25

MEKANISME TRANSMISI HARGA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENETAPAN KEBIJAKAN HARGA OLEH PEMERINTAH TERHADAP BEBERAPA KOMODITAS HASIL PERTANIAN TERTENTU

Rini Dwi Astuti

Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta

email: rinidwiastuti@upnyk.ac.id

Abstract

This study aimed to analyze the mechanism of transmission of international prices in the context of preparing the government's policy of controlling prices through the pricing of certain agricultural commodities. This price control in order to ensure stability of prices of agricultural commodities so as to support and ensure the economic stability. The analytical tool used is regression to the data period used was May 2009 to December 2013. The results showed that the increase in retail price increases in producer prices which indicates that the market red peppers, chicken meat and fresh fish are not integrated perfectly. Variation changes in retail prices is a source of variation and the producer price changes have a significant relationship between producer prices at retail prices. Changes in retail prices is not transmitted completely to the producer price which the retail price increases pushed up producer prices.

Keywords: *the transmission mechanism, international prices, domestic prices, pricing policies, agricultural commodities*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transmisi harga internasional dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga melalui penetapan harga komoditas pertanian tertentu. Pengendalian harga ini dalam rangka menjamin stabilitas harga komoditas pertanian sehingga dapat menunjang dan menjamin stabilitas perekonomian masyarakat secara nasional. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan periode data yang digunakan adalah Mei 2009 s.d Desember 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga eceran meningkatkan harga di tingkat produsen yang mengindikasikan bahwa pasar cabai merah, daging ayam ras, dan ikan segar tidak terintegrasi dengan sempurna. Variasi perubahan harga eceran merupakan sumber variasi perubahan harga produsen dan memiliki hubungan yang signifikan antara harga di tingkat produsen dengan harga eceran. Perubahan harga eceran tidak ditransmisikan secara sempurna ke harga produsen dimana kenaikan harga eceran mendorong kenaikan harga produsen.

Kata kunci: mekanisme transmisi, harga internasional, harga domestik, kebijakan harga, komoditas pertanian

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama dalam perdagangan dalam negeri adalah terkait dengan ketidakstabilan harga komoditas hasil pertanian. Fenomena kenaikan harga komoditas pertanian, khususnya pangan, pada momen-momen tertentu seperti saat bulan Ramadhan dan hari-hari besar lainnya di Indonesia selalu terjadi berulang setiap tahun. Selain itu, inflasi juga akan meningkat terus jika pemerintah tidak dapat mengendalikan harga

komoditas pertanian. Fenomena inflasi akibat kenaikan harga komoditas pertanian bahkan tetap terjadi tanpa adanya sentimen dari kondisi ekonomi global. Jika pun ada sentimen eksternal, maka potensi risiko inflasi akan semakin kompleks.

Selama ini Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mendorong pengendalian dan pengawasan ketersediaan pasokan untuk memastikan kestabilan harga baik di tingkat konsumen (masyarakat) maupun produsen baik melalui penetapan kebijakan harga, operasi pasar, pengendalian ekspor dan impor maupun regulasi lainnya yang ditujukan untuk tetap menjaga tingkat kestabilan harga di dalam negeri.

Salah satu peran Pemerintah yang diperlukan untuk melengkapi (komplemen) dan mengkoreksi mekanisme pasar yang terjadi terkait dengan harga komoditas pertanian adalah dengan penetapan kebijakan harga (Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014). Penetapan kebijakan harga adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Pemahaman secara rinci terhadap perkembangan situasi dan gerak pasar merupakan persyaratan penting untuk membangun keunggulan komparatif dan kompetitif agribisnis. Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir yang terkait dengan harga, ekspor, impor, penawaran-permintaan dan indikator ekonomi dan perdagangan lainnya serta berbagai peristiwa sangat dibutuhkan. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan kajian pasar (*market intelligence*), pengambilan kebijakan/ penetapan peraturan, pembinaan oleh instansi pembina serta sebagai pertimbangan dalam mengambil langkah bisnis yang tepat bagi para pelaku usaha.

Produk pertanian seperti beras, karet, kopi, kakao, gula, teh, jagung, dan kedelai sudah menjadi komoditi utama dalam perdagangan internasional. Harga-harga pasar dalam negeri maupun harga-harga pasar luar negeri (internasional) yang terjadi dari transaksi-transaksi perdagangan secara umum berlaku di bawah kaidah-kaidah penawaran dan permintaan. Harga-harga yang berkembang di bursa pasar internasional memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pasar harga dalam negeri. Pada perdagangan dalam negeri, harga komoditi tersebut pada umumnya ditentukan oleh para pedagang. Sedangkan dalam kenyataannya, petani sebagai produsen komoditas pertanian kurang mampu dalam menciptakan *bargaining position* dalam penciptaan harga. Petani selalu kurang diuntungkan sebagai produsen dalam rantai perdagangan baik lokal maupun internasional.

Terkait dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu tinjauan akademis secara mendalam terkait dengan mekanisme transmisi harga internasional dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga melalui penetapan harga komoditas pertanian tertentu. Pengendalian harga ini dalam rangka menjamin stabilitas harga komoditas pertanian sehingga dapat menunjang dan menjamin stabilitas perekonomian masyarakat secara nasional.

2. KAJIAN LITERATUR

Lee, Hyun-Hoon dan Park, Cyn-Young (2013) mengemukakan bahwa inflasi harga pangan dalam negeri sangat terkait dengan nilai dari inflasi harga pangan global (indeks harga makanan FAO). Menariknya, fluktuasi limpahan dari global untuk harga pangan dalam negeri tampaknya kontemporer. Gerakan tingkat inflasi harga pangan nasional dan fluktuasi sangat terkait dengan tingkat inflasi harga pangan intra dan ekstra-regional dan fluktuasi masing-masing. Selanjutnya hal ini juga menunjukkan bahwa inflasi harga pangan global mempengaruhi pasar makanan nasional di seluruh wilayah tetapi dengan jeda waktu berbeda. Selain temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, impor bahan makanan yang lebih besar dari porsi seluruh barang impor, peningkatan impor bahan makanan yang lebih kecil di bandingkan barang impor lain, apresiasi mata uang lokal, stabilitas politik yang lebih baik, dan tingkat pendapatan yang

lebih tinggi. Semua hal tersebut mengarah untuk menurunkan inflasi harga pangan dalam negeri. Sementara dalam hal fluktuasi harga pangan, hanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh, dimana negara-negara dengan ekonomi yang lebih tinggi tingkat pertumbuhannya memiliki fluktuasi harga pangan nasional yang lebih rendah.

Baltzer, Kenneth (2013) memperoleh kesimpulan bahwa dari ke empat belas negara yang diteliti dapat dikategorikan menurut status perdagangan untuk menghasilkan prediksi mengenai pola transmisi harga. Keempat kategori tersebut adalah: 1. Pedagang bebas (terintegrasi dan ekonomi pertanian yang terbuka), Brazil dan Afrika Selatan diperkirakan akan menunjukkan tingkat yang relatif besar pada transmisi harga. 2. stabilisator ekspor (China, India, dan Vietnam) merupakan eksportir beras, dan negara-negara ini memiliki kontrol yang efektif terhadap ekspor. 3. Importir: dari empat belas negara dalam sampel, Bangladesh, Mesir, Kenya, Mozambik, dan Senegal yang konsisten tergantung pada impor makanan pokok mereka. 4. Terisolasi (Ethiopia, Nigeria, Malawi, Zambia) memiliki ruang yang sangat kecil untuk terintegrasi dengan pasar sereal internasional dan sebagian besar mandiri dalam pokok utama mereka. Kemudian diketahui bahwa integrasi pasar menunjukkan bahwa guncangan lokal dapat diredam di pasar global melalui transmisi harga internasional. Jika guncangan lokal besar, ini akan melibatkan perubahan substansial dalam pola perdagangan. Pada contoh Ethiopia menunjukkan bahwa transmisi harga cross-komoditas antara bahan makanan pokok yang berbeda bisa menjadi saluran penting untuk transmisi harga internasional juga.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh World Bank (2012) memperoleh kesimpulan bahwa transmisi dianggap penting karena transmisi harga pangan internasional untuk harga domestik sangat penting untuk mengejar keunggulan berbasis komparatif, produksi pertanian yang berkelanjutan, dan untuk memastikan produksi dalam negeri merespon kelangkaan pangan global. Peningkatan dalam volatilitas harga pangan internasional, perlu perhatian besar, namun mencegah transmisi melalui harga internasional untuk melindungi konsumen adalah kontraproduktif. Oleh karena itu langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transmisi harga yaitu pertama, negara harus berinvestasi dalam infrastruktur pasar domestik dan menyelaraskan kebijakan untuk lebih mengintegrasikan pasar domestik dan internasional. Kedua, pembuat kebijakan harus mengejar kebijakan perdagangan terbuka untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari banyak negara di pasar internasional. Dan ketiga, negara harus memperkuat jaring pengaman mereka dan menggunakannya secara efektif berfokus pada masyarakat miskin dan rentan untuk mengurangi dampak kenaikan harga, sementara memungkinkan harga domestik naik untuk menginduksi respon suplai makanan.

Dalam kaitannya dengan tahap produksi pangan, maka penelitian yang dilakukan oleh Weinhagen, Jonathan C. (2012), menjelaskan analisis transmisi harga melalui tiga tahap produksi pangan yang menunjukkan perbedaan besar dalam transmisi harga dari produsen makanan untuk makanan yang dikonsumsi di rumah dengan makanan yang dikonsumsi jauh dari rumah peningkatan di berbagai PPI yang berhubungan dengan makanan menyebabkan kenaikan CPI untuk makanan yang dikonsumsi di rumah tetapi tidak untuk CPI pada makanan yang dikonsumsi jauh dari rumah. Sedangkan Minot, Nicholas. 2011 mengemukakan bahwa Tingkat kenaikan harga tampaknya terkait dengan tingkat daya jual. Komoditas yang memiliki nilai perdagangan lebih tinggi akan lebih erat terkait dengan pasar internasional, sehingga harga domestik komoditas tersebut mengikuti lonjakan harga dunia. Sementara komoditas yang kurang banyak diperdagangkan di pasar internasional mengalami peningkatan harga yang lebih kecil di pasar Afrika. Selain bahwa harga internasional makanan biji-bijian memiliki beberapa efek pada pasar Afrika yaitu untuk beras dan untuk tingkat yang lebih rendah yaitu jagung, tetapi efeknya biasanya tenggelam oleh efek dominan yaitu guncangan pasokan domestik yang berhubungan dengan cuaca.

Lonjakan harga dunia pada tahun 2007-2008 itu lebih jelas merupakan transmisi karena (1) itu adalah kejutan besar, (2) itu didampangi oleh biaya transportasi naik tajam, (3) upaya oleh negara-negara Afrika untuk melarang ekspor gandum berkontribusi harga pangan meningkat di negara-negara tetangga, dan (4) faktor lokal dan pembatasan perdagangan swasta memperburuk kenaikan harga di beberapa negara.

Penelitian lain, diantaranya dilakukan oleh Keats, Sharada. dkk. (2010) menemukan bahwa ketika harga sereal/bahan makanan pokok dunia melonjak pada 2007 hingga 2008, ada yang berhubungan dengan kenaikan di pasar domestik di banyak negara berkembang. Namun transmisi Harga tidak terjadi secara merata, di sebagian besar negara di Asia harga beras naik namun lebih kecil dari kenaikan harga di pasar dunia. Sementara di Afrika terjadi kenaikan harga jagung yang sangat tinggi dan jauh lebih tinggi daripada kenaikan yang terjadi di pasar dunia. Namun hal ini tidak berkorelasi dengan harga internasional. Kemungkinan hal ini adalah akibat dari insiden faktor lokal, dan inflasi impor dari kenaikan harga minyak. Sebagian besar pemahaman tentang dampak dari lonjakan harga telah dihasilkan oleh model yang mengasumsikan tingkat transmisi dari harga internasional untuk harga domestik. Namun, karena transmisi umumnya tidak lengkap dan tidak merata, maka model idealnya perlu menggunakan asumsi yang berbeda untuk negara yang berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Masyrofi (1994), untuk melihat hubungan elastisitas harga di tingkat internasional dengan elastisitas harga di tingkat domestik (produsen dan konsumen), dilihat elastisitas transmisi harganya. Model yang digunakan adalah:

$$P_f = \alpha P_r \beta$$

Kemudian model tersebut dirubah menjadi bentuk linear sebagai berikut:

$$\ln P_f = \ln \alpha + \beta \ln P_r$$

Keterangan:

P_f = harga di tingkat domestik (Rp/kg);

P_r = harga di tingkat internasional (Rp/kg);

α = intersep;

β = koefisien.

Penambahan variabel lain sangat dimungkinkan karena terdapat banyak variabel yang turut berpengaruh terhadap harga domestik selain harga internasional itu sendiri.

Pengujian parameter dilakukan dengan uji t, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta = 1$$

$$H_1 : \beta \neq 1$$

Pengujian hipotesis:

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta - 1}{SE(\beta)}$$

Dengan meningkatnya perdagangan, maka pengukuran transmisi harga seperti di atas dapat menimbulkan bias. Bias tersebut timbul dari asumsi bahwa harga domestik merupakan variabel yang dibentuk oleh harga dunia dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Intensitas perdagangan yang lebih tinggi dengan adanya diferensiasi produk dan perubahan kebijakan perdagangan dan kebijakan industri memberikan peluang bagi suatu negara sebagai eksportir atau importir suatu komoditi. Dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, maka suatu negara eksportir atau importir dapat memiliki pasar yang lebih luas sehingga mempunyai kekuatan pasar. Dengan demikian, kondisi bahwa harga dunia dipengaruhi oleh harga domestik dapat terjadi.

Untuk itu, harga domestik yang disebutkan dalam studi ini adalah harga ekspor atau harga impor suatu komoditi. Harga ekspor atau harga impor diproksi dengan konsistensi nilai perdagangan bersih suatu komoditi. Jika nilai perdagangan bersih (ekspor dikurangi impor) Indonesia untuk suatu komoditi adalah surplus maka Indonesia ditetapkan sebagai negara eksportir sedangkan jika nilai perdagangan bersih (ekspor dikurangi impor) Indonesia untuk suatu komoditi adalah defisit maka Indonesia ditetapkan sebagai negara importir.

Volume ekspor dan impor terkait komoditi cabai merah dan daging ayam ras adalah produk yang terkait dengan olahan cabai merah dan pembibitan ayam ras; untuk ikan segar komoditi utamanya adalah ikan tuna. Karena itu, harga produsen yang digunakan adalah harga yang diterima petani produsen atau bukan harga bersih dari transaksi ekspor impor produk cabe merah segar maupun pembibitan ayam. Untuk ikan segar, karena data yang tersedia adalah harga eceran ikan kembung, maka yang dianalisa adalah transmisi harga produsen dan harga eceran ikan kembung. Periode yang digunakan adalah Mei 2009 s.d Desember 2013.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Cabai Merah

Model persamaan analisis reresi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Produsen} = 14.526,539 + 0,145 \text{ Harga Eceran}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) kurang dari satu dan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga eceran meningkatkan harga di tingkat produsen dimana perubahan harga eceran sebesar Rp 1.000 akan merubah harga produsen sebesar Rp 145. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar cabai merah tidak terintegrasi dengan sempurna. Pasar yang kurang terintegrasi dapat disebabkan oleh pola distribusi atau pemasaran sehingga kecenderungannya adalah oligopsoni.

Nilai elastisitas transmisi harga cabai merah yaitu 0,096 atau kurang dari satu yang artinya jika terjadi perubahan pada harga eceran 1% maka terjadi perubahan pada harga eceran sebesar 0,096%. Dengan demikian, elastisitas transmisi harga bersifat inelastis. Nilai ini menunjukkan bahwa perubahan harga pada konsumen tidak tertransmisikan secara sempurna kepada produsen. Nilai yang positif juga mengindikasikan bahwa kenaikan harga eceran justru akan mendorong kenaikan harga produsen.

4.2 Daging Ayam Ras

Model persamaan analisis reresi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer untuk daging ayam ras adalah sebagai berikut

$$\text{Harga Produsen} = 28.053,685 + 0,576 \text{ Harga Eceran}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) kurang dari satu dan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga eceran meningkatkan harga di tingkat produsen dimana perubahan harga eceran sebesar Rp 1.000 akan merubah harga produsen sebesar Rp 576. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar daging ayam ras tidak terintegrasi dengan sempurna.

Nilai elastisitas transmisi harga yaitu 0,867 atau kurang dari satu yang artinya jika terjadi perubahan harga konsumen 1% menyebabkan perubahan harga produsen 0,867%. Dengan demikian, perubahan harga eceran tidak tertransmisikan secara sempurna ke harga produsen. Nilai yang positif mengindikasikan bahwa kenaikan harga eceran daging ayam ras mendorong kenaikan harga produsen.

4.3 Ikan Segar

Model persamaan analisis reresi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pengecer adalah sebagai berikut

$$\text{Harga Produsen} = -43.098,337 + 2,708 \text{ Harga Eceran}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) lebih dari satu dan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga eceran meningkatkan harga di tingkat produsen dimana perubahan harga eceran sebesar Rp 1.000 akan merubah harga produsen sebesar Rp 2.708. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar cabai merah tidak terintegrasi dengan sempurna.

Nilai elastisitas transmisi harga ikan segar yaitu 0,447 atau kurang dari satu yang artinya jika terjadi perubahan harga konsumen 1% menyebabkan perubahan harga produsen 0,447%. Dengan demikian, perubahan harga eceran tidak ditransmisikan secara sempurna ke harga produsen. Nilai yang positif mengindikasikan bahwa kenaikan harga eceran mendorong kenaikan harga produsen.

5. KESIMPULAN

Inflasi harga pangan dalam negeri sangat terkait dengan nilai dari inflasi harga pangan global. Fluktuasi limpahan dari global untuk harga pangan dalam negeri tampaknya kontemporer. Gerakan tingkat inflasi harga pangan nasional dan fluktuasi sangat terkait dengan tingkat inflasi harga pangan intra dan ekstra-regional dan fluktuasi masing-masing. Selanjutnya hal ini juga menunjukkan bahwa inflasi harga pangan global mempengaruhi pasar makanan nasional di seluruh wilayah tetapi dengan jeda waktu berbeda.

Kenaikan harga eceran meningkatkan harga di tingkat produsen yang mengindikasikan bahwa pasar cabai merah, daging ayam ras, dan ikan segar tidak terintegrasi dengan sempurna. Variasi perubahan harga eceran merupakan sumber variasi perubahan harga produsen dan memiliki hubungan yang signifikan antara harga di tingkat produsen dengan harga eceran. Perubahan harga eceran tidak ditransmisikan secara sempurna ke harga produsen dimana kenaikan harga eceran mendorong kenaikan harga produsen.

6. REFERENSI

Baltzer, Kenneth. *International to domestic price transmission in fourteen developing countries during the 2007-08 food crisis*. WIDER Working Paper No. 2013/031 March 2013. University of Copenhagen.

Keats, Sharada. dkk. *Food price transmission: rising international cereals prices and domestic markets*, Project Briefing No. 48 October 2010. Overseas Development Institute. London.

Kementerian Perdagangan, 2013. Artikel Edisi 08 CABE/08/2013, Tinjauan Pasar Cabe, diunduh dari ews.kemendag.go.id.

Lee, Hyun-Hoon and Park, Cyn-Young. *International Transmission of Food Prices and Volatilities: A Panel Analysis*. ADB Economics Working Paper Series No. 373 | September 2013. Asian Development Bank. Manila.

Minot, Nicholas. *Transmission of World Food Price Changes to Markets in Sub-Saharan Africa*. IFPRI Discussion Paper 01059 January 2011. Markets, Trade and Institutions Division International Food Policy Research Institute.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, *Statistik Harga Komoditas Pertanian Tahun 2013*, diunduh dari pusdatin.setjen.pertanian.go.id.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian-Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian, *Outlook Pertanian 2010-2025*.

Rachman, Handewi D.S., *Metode Analisis Harga Pangan, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, makalah disampaikan pada apresiasi Sistem Distribusi Pangan dan Harga Pangan, 3-5 Juli 2005, diunduh dari* pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/mono26-7.pdf.

Saihani, Azwar., *Elastisitas Transmisi Harga Beras Ciherang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Zira'ah Volume 29 No.3, Halaman 213-218, Oktober 2010, diunduh dari* faperta.uniska-bjm.ac.id/.../elastisitas-transmisi-harga.

Saptana, NurKhoiriyah Agustin, dan Ahmad Mkky Ar Rozi., *Kinerja Produksi dan Harga Komoditas Cabai Merah, Analisis Kebijakan No.12, 2012, diunduh dari* pse.litbang.pertanian.go.id/ind/.../anjak_2012_10.pdf.

Weinhagen, Jonathan C. Price transmission effects through three stages of food production. *Monthly Labor Review* December 2012. US Department of Labor.

_____. Price transmission: from crude petroleum to plastics product. *Monthly Labor Review* December 2006. US Department of Labor.

World Bank. Transmission of Global Food Prices to Domestic Prices in Developing Countries: Why It Matters, How It Works, and Why It Should Be Enhanced. *Contribution from the World Bank to the G20 Commodity Markets Sub Working Group*. April 2012.

**Kos *Stickiness* dan Prediksi Laba
(Studi Kasus Industri Manufaktur)**

Oleh:

Windyastuti

Email: windyastuti.wijaya@gmail.com

Kunti Sunaryo

Email: kunti_73@yahoo.co.id

Sri Hastuti

Email: sri_has_tuti@yahoo.com

UPN “Veteran” Yogyakarta

Abstract

This study want to analyze the impact of stickiness cost on profit forecast error in the manufacturing sector. The financial statement during 2000-2014 were used. Furthermore, this study used regression analysis based on the dynamic panel data to make a conclusion from this study. Results show that there is an evidence that cost stickiness has positive impact on profit forecast error. However, an increase in cost stickiness, lead to an increase in profit forecast error. Then, accuracy of profit forecast was declined due to cost stickiness. As consequence some investor tend to make a mistake in assessing company performance.

Keywords: cost, stickiness, profit, forecast, error.

PENDAHULUAN

Perubahan kos berjalan secara asimetris dengan perubahan penjualan. Kos merespons secara asimetrik terhadap penurunan dan kenaikan penjualan (Windyastuti, 2010). Kos meningkat secara lebih cepat pada saat penjualan naik daripada saat penjualan menurun. Perilaku kos demikian ini disebut *sticky*. Kos *stickiness* berkaitan dengan kemampuan perusahaan melakukan penyesuaian (*adjustment*) sumber daya. Pada saat penjualan (volume aktivitas) turun, penyesuaian sumber daya berjalan lebih lambat dibandingkan proses penyesuaian pada saat penjualan (volume aktivitas) meningkat. Hal ini dikarenakan manajer cenderung untuk tetap menggunakan sumber daya tak terpakai daripada melakukan pengurangan pada saat volume aktivitas menurun.

Kos *stickiness* menyebabkan manajer kesulitan untuk melakukan penyesuaian sehingga kos sulit untuk turun walaupun pada saat volume aktivitas perusahaan turun. Semakin besar kos *stickiness*, semakin besar pula biaya penyesuaian pada saat volume aktivitas mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada penurunan laba. Sebagai akibatnya perusahaan tidak bisa melakukan penghematan. Pada saat volume aktivitas menurun, perusahaan dengan kos *stickiness* tinggi menunjukkan penurunan laba yang lebih besar daripada perusahaan dengan kos *stickiness* rendah. Hal ini berarti prediksi laba tanpa mempertimbangkan aspek kos *stickiness* menjadi tidak akurat. Akurasi prediksi laba berkurang. Laba yang dilaporkan menjadi kurang informatif bagi prediksi laba periode yang akan datang. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien respons yang menurun (Weiss, 2010).

Temuan dari beberapa penelitian terakhir menunjukkan pentingnya analisis perilaku *stickiness* kos dalam bidang akuntansi kos (Banker *et.al*, 2011). Akuntansi kos membahas perilaku kos sebagai aspek dalam analisis laba. Pengembangan studi perilaku kos telah menarik perhatian akuntan manajemen yang berminat mengkaji pengendalian dan pengambilan keputusan. Akan tetapi hubungan antara perilaku kos dengan prediksi laba belum banyak dibahas (Weiss, 2010).

Dalam upaya memprediksi laba periode mendatang, manajer akan mengestimasi kos periode mendatang. Prediksi kos terkait dan merupakan bagian penting dalam prediksi laba. Hasil studi tentang perilaku kos menunjukkan bahwa analisis keuangan juga mendapatkan manfaat dari pemahaman terhadap perilaku kos. Analisis keuangan akan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan aspek perilaku kos (Abarbanell dan Bushee, 1997). Penelitian ini akan membahas dampak stickiness kos pada prediksi laba industri manufaktur.

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Banker dan Chen (2006) mengevaluasi validitas model perilaku kos. Penelitian ini bertujuan memperbaiki prediksi laba dengan mengestimasi *excessive cost* akibat adanya kos *stickiness* pada saat penjualan turun. Dalam penelitian ini, dilakukan komparasi dari empat model prediksi laba. Keempat model tersebut meliputi model *returns on equity (ROE)*, model *operating income*, model *cash flow*, dan model *cost variability* dan *cost stickiness (CVCS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *CVCS* memiliki kemampuan prediksi laba yang lebih akurat dibandingkan ketiga model lainnya. Model *CVCS* memiliki kandungan yang lebih baik daripada model lainnya, khususnya dalam menjelaskan *abnormal stock returns*.

Sementara itu, Kim dan Kinsey (2010) mengkaji pengaruh perilaku kos terhadap kesalahan dalam prediksi laba dengan mengambil objek pengamatan selama periode 1996-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila perubahan biaya yang terjadi lebih kecil daripada perubahan penjualan terkait adanya biaya tetap, maka biaya yang diprediksi para analis menjadi terlalu tinggi apabila mereka memprediksi adanya kenaikan penjualan. Laba yang diprediksi menjadi terlalu rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian kos tidak dapat berlangsung dengan sempurna. Penyesuaian kos yang tidak sempurna berdampak pada besarnya kesalahan dalam prediksi laba.

Weiss (2010) meneliti dampak asimetri perilaku kos terhadap akurasi prediksi laba. Cakupan kos dalam penelitian ini meliputi harga pokok penjualan (HPP) dan kos pemasaran, administrasi dan umum (PA&U). Penelitian ini mengintegrasikan aspek akuntansi keuangan dengan akuntansi kos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kos *stickiness* tinggi memiliki akurasi prediksi laba yang lebih rendah, dan sebaliknya. Akurasi prediksi laba berpengaruh pada tingkat kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan.

Hubungan antara Kos *Stickiness* dan Prediksi Laba

Pengembangan konsep kos *stickiness* memberikan dasar bagi eksplorasi mengapa dan bagaimana perilaku kos berdampak pada akurasi prediksi laba. Dalam kasus penurunan aktivitas perusahaan, faktor kos *stickiness* menyebabkan kos menjadi lebih tinggi karena proses penyesuaian yang berjalan lebih lambat. Kos *stickiness* menyebabkan penyesuaian kos relative kecil sehingga kos yang dapat dihemat tidak besar. Hal ini mengakibatkan penurunan laba pada perusahaan yang menghadapi kos *stickiness* lebih besar daripada perusahaan yang tidak menghadapi kos *stickiness*. Penurunan laba yang lebih besar meningkatkan variabilitas dalam distribusi laba sehingga prediksi laba menjadi tidak akurat.

Hal ini berarti prediksi laba pada perusahaan yang menghadapi kos *stickiness* lebih rendah daripada prediksi laba pada perusahaan yang tidak menghadapi kos *stickiness* (Weiss, 2010). Kesalahan prediksi laba baik pada saat volume aktivitas turun maupun volume aktivitas naik akan lebih besar pada perusahaan yang memiliki kos *stickiness* tinggi daripada perusahaan dengan kos *stickiness* rendah. Kesalahan dalam prediksi laba meningkat seiring dengan semakin tingginya kos *stickiness*. Dengan demikian semakin tinggi kos *stickiness*, semakin kecil akurasi prediksi laba.

Kondisi masa depan penuh ketidakpastian. Apabila perusahaan menghadapi kemungkinan kenaikan dan penurunan aktivitas perusahaan dengan probabilitas yang sama, maka analisis perusahaan akan menyadari bahwa perilaku kos sangat berperan. Kesalahan dalam prediksi baik pada saat aktivitas perusahaan meningkat maupun menurun, akan lebih besar pada perusahaan yang menghadapi kos stickiness. Variabilitas dari kesalahan prediksi akan meningkat seiring dengan peningkatan derajat kos stickiness.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian adalah 2000-2014. Dalam periode tersebut telah terjadi krisis ekonomi tahun 2008 sehingga sebagian perusahaan mengalami penurunan kinerja. Dengan demikian dapat diamati kondisi perusahaan pada saat volume aktivitas naik dan volume aktivitas turun. Ini berarti perilaku kos stickiness dapat diamati

Data penelitian mencakup kos Penjualan, Administrasi dan Umum (*PA&U*), penjualan bersih, ketidakpastian lingkungan dan *operating leverage*. Kos *PA&U* digunakan sebagai proksi kos karena komponen yang ada di kos ini mempengaruhi volume penjualan (He, *et al*, 2010). Selanjutnya, volume aktivitas perusahaan diproksi dengan pendapatan bersih. Ketidakpastian lingkungan diproksi dengan variasi penjualan bersih. Sementara itu nilai *operating leverage* diukur dengan rasio antara persentase perubahan laba sebelum pajak dengan persentase perubahan penjualan bersih.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan berdasar metode *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2000-2014 secara terus-menerus.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan merger yang dapat mengubah item-item dalam laporan keuangan
3. Kos administrasi dan umum tidak melebihi perolehan *income*
4. Data ekstrim atas atau bawah 0,5% dari distribusi dihilangkan.

Dengan menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh sejumlah 16 (enam belas) perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini meliputi :

1. Alumindo Light Metal Industry Tbk
2. Ekadharna Tape Industry Tbk
3. Gudang Garam Tbk
4. Indofood Sukses Makmur Tbk
5. Indorama Syntetics Tbk
6. Intraco Penta Tbk
7. Multi Bintang Indonesia Tbk
8. Mustika Ratu Tbk
9. Roda Vivatex Tbk
10. Semen Gresik (Persero) Tbk
11. Selamat Sempurna Tbk
12. Siantar TOP Tbk
13. Mandom Indonesia Tbk
14. Tempo Scan Pacific Tbk
15. Tunas Ridean Tbk
16. Unilever Indonesia Tbk

Alat Analisis

Objek penelitian ini mencakup sejumlah perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI selama kurun waktu tertentu (2000-2014) sehingga merupakan observasi terhadap sejumlah perusahaan selama beberapa tahun. Dengan demikian data penelitian berbentuk data panel. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode baru dalam pengukuran kos *stickiness* di tingkat perusahaan dengan mengacu pada model Weiss (2010). Berbeda dengan model Anderson, *et al.* (2007) yang mengestimasi kos *stickiness* dengan menggunakan analisis regresi berdasar data belah silang atau data runtun waktu murni, penelitian ini mengukur secara langsung derajat kos *stickiness* pada tingkat perusahaan. Kos *stickiness* ini diukur dengan mengestimasi perbedaan antara besarnya penurunan kos dengan penurunan penjualan dan kesesuaian tingkat kenaikan kos dengan kenaikan penjualan. Secara matematis kos *stickiness* dirumuskan sebagai berikut:

$$STICKY_{i,t} = \log \left(\frac{\Delta KOS}{\Delta PB_{i,t}} \right) - \log \left(\frac{\Delta KOS}{\Delta PB_{i,\bar{t}}} \right)$$

Keterangan:

STICKY adalah kos *stickiness*

ΔKOS adalah perubahan kos dan dirumuskan sebagai:

$$\Delta KOS = KOS_{i,t} - KOS_{i,t-1}$$

ΔPB adalah kenaikan penjualan bersih dan dirumuskan sebagai:

$$\Delta PB_{i,t} = PB_{i,t} - PB_{i,t-1}$$

\bar{t} adalah kuartal terakhir terjadinya kenaikan penjualan bersih

\underline{t} adalah kuartal terakhir terjadinya penurunan penjualan bersih

i adalah dimensi unit belah silang

Pengukuran akurasi prediksi laba dilakukan dengan menggunakan nilai mutlak kesalahan prediksi laba. Nilai kesalahan prediksi laba merupakan selisih antara *ROE* yang terjadi pada tahun *t* dengan nilai prediksi *ROE* (dilambangkan dengan $\overline{ROE}_{i,t}$). Nilai Prediksi *ROE* diprosi dengan rata-rata *ROE* selama 1 tahun. Kesalahan prediksi laba dituliskan sebagai $FE_{i,t} = ROE_{i,t} - \overline{ROE}_{i,t}$. Nilai mutlak kesalahan prediksi laba dituliskan sebagai $AFE_{i,t} = |FE_{i,t}|$.

Untuk menguji apakah kos *stickiness* berdampak pada penurunan akurasi prediksi laba, dibangun model regresi dinamis dengan memasukkan kos *stickiness* (*STICKY*), variasi penjualan bersih dan *operating leverage*. Model regresi dinamis dituangkan dalam persamaan berikut.

$$AFE_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \sum_{j=1}^k AFE_{i,t-j} + \beta_2 \sum_{j=1}^k STICKY_{i,t-j} + \beta_3 \sum_{j=1}^k VPB_{i,t-j} + \beta_4 \sum_{j=1}^k OPLEV_{i,t-j} + e_{i,t}$$

Keterangan:

AFE adalah nilai mutlak kesalahan prediksi laba

STICKY adalah kos *stickiness*

VPB adalah variasi penjualan bersih

OPLEV adalah *operating leverage*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan model dinamis, maka penentuan panjang *lag* menjadi isu penting. Hal ini dikarenakan *lag* yang terlalu pendek berisiko terjadi kesalahan spesifikasi, sedangkan *lag* yang terlalu panjang mengurangi derajat kebebasan. Untuk menentukan panjang *lag* yang tepat dipergunakan kriteria Akaike. Berdasar kriteria tersebut maka panjang *lag* optimum

adalah 1 tahun. Dengan demikian kesalahan prediksi laba dipengaruhi oleh variabel independen baik satu tahun sebelumnya maupun tahun berjalan (Tabel 1).

Tabel 1.

Penentuan Panjang *Lag* berdasar Kriteria Akaike

Nomor	Panjang <i>Lag</i>	Nilai Kriteria Akaike
1	1 1	6,589 *
2	1 2	6,624
3	2 2	7,033

Keterangan *. panjang *lag* optimum

Setelah diketahui panjang *lag* optimum, maka dibangun model regresi data panel. Dalam model regresi data panel, dikenal model *fixed effects* dan model *random effects*. Untuk memilih model yang lebih unggul apakah model *fixed effects* atau *random effects* dilakukan uji Hausman. Hasil pengujian Hausman menunjukkan nilai m sebesar 15,148 dan signifikan pada ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti model yang lebih unggul adalah model *fixed effects*.

Selanjutnya guna membentuk model estimasi yang sederhana, maka dilakukan reduksi terhadap parameter-parameter yang tidak signifikan diperoleh hasil estimasi yang sederhana. Hasil pengujian *redundant coefficient* menunjukkan bahwa F_{hitung} sehingga beberapa koefisien regresi memang tidak signifikan. Dengan demikian model reduksi dapat digunakan sebagai dasar analisis. Berdasar model *fixed effects*, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,5207. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 52,07 persen variasi pada kesalahan prediksi laba industri manufaktur dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel-variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 47,93 persen dijelaskan oleh residual. Adapun nilai F_{hitung} sebesar 13,750 dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Tabel 2).

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi kesalahan prediksi laba tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,647 menunjukkan bahwa secara rata-rata kenaikan kesalahan prediksi laba sebesar 1 yang terjadi pada satu tahun sebelumnya akan diikuti dengan kenaikan kesalahan prediksi laba pada tahun berjalan sebesar 0,647 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kesalahan di masa lalu berlanjut pada masa sekarang.

Sementara itu, koefisien regresi variabel *STICKY* bertanda positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 2,266. Hal ini berarti kenaikan kos *stickiness* sebesar 1 satuan yang terjadi pada tahun berjalan akan mengakibatkan kenaikan kesalahan prediksi laba sebesar 2,266 satuan. Semakin tinggi kos *stickiness*, semakin besar kesalahan dalam prediksi laba. Kesalahan dalam prediksi baik pada saat volume aktivitas perusahaan meningkat maupun menurun, akan lebih besar pada perusahaan yang menghadapi kos *stickiness*. Hal ini berarti akurasi prediksi laba semakin rendah. Penurunan akurasi prediksi laba menyebabkan laba yang dilaporkan akan memberikan informasi yang kurang penting bagi prediksi laba periode mendatang. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa kenaikan kos *stickiness* berdampak pada penurunan akurasi prediksi laba.

Tabel 2

Hasil Estimasi (*Fixed Effects*)

No.	Variabel	Koefisien	t -statistik	t -tabel ($\alpha=5\%$)
1.	<i>Konstanta</i>	2,761*	2,153	1,645
2.	$AFE_{i,t-1}$	0,647*	11,569	1,645
3.	$STICKY_{i,t}$	2,266*	2,201	1,645
4.	$VPB_{i,t}$	0,203*	2,951	1,645
5.	$OPLEV_{i,t-1}$	-0,712	-0,962	-1,645
<i>Adjusted R</i> ² = 0,5207			F_{hitung} = 13,750	

*) signifikan pada ($\alpha=5\%$)

Koefisien variasi penjualan bersih (VPB) signifikan dan bertanda positif. Nilai koefisien variasi penjualan bersih sebesar 0,203 menunjukkan bahwa kenaikan variasi penjualan bersih sebesar 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan kesalahan prediksi laba sebesar 0,657 satuan. Penjualan bersih merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan manufaktur. Fluktuasi dalam penjualan bersih menyebabkan fluktuasi laba dan selanjutnya berdampak pada semakin besarnya kesalahan dalam prediksi laba.

Sementara itu, variabel *operating leverage* (OPLEV) tidak berpengaruh pada kesalahan dalam prediksi laba. Koefisien regresi variabel *operating leverage* tidak signifikan baik untuk periode satu tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Hal ini diduga karena penggunaan aktiva tetap yang fleksibel sehingga tidak berdampak pada fluktuasi laba. Dengan demikian akurasi dalam prediksi laba relatif tinggi.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kenaikan kos *stickiness* berdampak pada penurunan akurasi prediksi laba, baik pada industri manufaktur maupun perbankan. Semakin tinggi kos *stickiness*, semakin besar kesalahan dalam prediksi laba. Kesalahan dalam prediksi laba baik pada saat volume aktivitas perusahaan meningkat maupun menurun, akan lebih besar pada perusahaan yang menghadapi kos *stickiness*.

Kesalahan prediksi laba menunjukkan tinggi rendahnya akurasi prediksi laba. Apabila prediksi laba tidak akurat, maka investor cenderung melakukan kesalahan dalam menaksir prospek bisnis perusahaan. Kesalahan dan keterbatasan pengetahuan investor tentang prospek bisnis perusahaan dapat mendorong penilaian yang salah tentang kinerja perusahaan di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada DP2M DIKTI yang telah memberikan bantuan dana bagi penelitian ini melalui Skim Penelitian Hibah Bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarbanell, J. S. dan B. J. Bushee. 1997. Fundamental analysis, future earnings, and stock returns. *Journal of Accounting Research* 35 (1): 1–24.
- Anderson, M. R. Banker, R. Huang, dan S. Janakiraman. 2007. Cost behavior and fundamental analysis of SGA costs. *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 22 (1): 1–22.
- Baltagi, Badi, H. 2003. *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley and Sons.
- Balakrishnan, R., E. Labro, and N. Soderstrom. 2010. Cost structure and sticky costs. Working Paper, University of Iowa (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1562726).
- Banker, Rajiv D. Dmitri Byzalovy, dan Jose M. Plehn-Dujowicz. 2011. *Sticky Cost Behavior: Theory and Evidence*. Working Paper, Temple University.
- He, D., Teruya, J., & Shimizu, T. (2010). Sticky Selling, General, and Administrative Cost Behavior and its Changes in Japan. *Global Journal of Business Research*, 4(4) : 1–10.
- Kim, M. dan P. Kinsey. 2004. An Additional Source of Financial Analysts' Earnings Forecast Errors: Imperfect Adjustments for Cost Behavior. *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 25 (1): 27-51.
- Siringoringo, Renniwyaty, 2012. Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Manufaktur di Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Manufaktur*, 15(1):61-83.
- Weiss, D. 2010. Cost Behavior and Analysis Earnings Forecasts. *The Accounting Review* 85 (4): 1441-1471.

Windyastuti, 2010. *Stickiness* Kos Produksi dan Non-Produksi: Studi pada Perusahaan Plastik dan Kaca yang Terdaftar di BEI, *Kajian Akuntansi* 8 (3): 257-268.

DERAJAT KETEGARAN UPAH NOMINAL MANAJER INDUSTRI MANUFAKTUR

Oleh:

Joko Susanto

Sultan

UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta. 55283

Email: jk.susanto.68@gmail.com

Abstract

This research want to analyze downward nominal wage rigidity of manager. The research data include nominal wage, productivity and regional/provincial minimum wages published by Statistics Indonesia. Using regression analysis based on dynamic panel data model, the results show that there is a downward nominal wage rigidity of manager. An increase in productivity is followed by an increase in nominal wage of manager, but a decline in productivity is not followed a decline in this wage.

Key words: nomina,l wage, rigidity, productivity, manager,

PENDAHULUAN

Bagi pekerja, upah merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja secara langsung. Tinggi rendahnya upah berpengaruh langsung pada kesejahteraan hidup pekerja. Penurunan tingkat upah nominal akan menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja turun. Pekerja akan melakukan berbagai upaya agar upah nominal yang diterimanya tidak turun, walaupun pada saat bersamaan kinerja perusahaan sedang mengalami penurunan (Christoffel dan Linzert, 2005).

Sebaliknya, pengusaha juga berkepentingan dengan produktivitas pekerja. Pengusaha akan mempertimbangkan aspek produktivitas pekerja dalam penentuan upah nominal pada. Pengusaha tidak bisa bersifat *selfish*. Pengusaha enggan untuk menurunkan upah nominal karena akan menurunkan moral pekerja dan pada akhirnya menurunkan produktivitas pekerja (Bewley, 2004). Pengusaha justru tidak mendapatkan keuntungan dari tingkat upah rendah. Penurunan upah nominal akan berdampak buruk bagi kinerja perusahaan. Penurunan upah nominal tidak disukai bukan saja oleh pekerja tetapi juga oleh pengusaha. Pertimbangan aspek produktivitas dan dampak pada kinerja perusahaan menjadikan upah nominal bersifat tegar untuk turun. Kenaikan produktivitas pekerja diikuti dengan kenaikan upah nominal, sedangkan penurunan produktivitas pekerja tidak diikuti dengan penurunan upah nominal (Susanto, 2009).

Salah satu alasan upah nominal tegar untuk turun adalah adanya kontrak antara pekerja dengan pengusaha. Melalui kontrak tersebut disepakati bahwa perusahaan akan mempertahankan upah nominal kecuali terdapat hal-hal yang di luar kendali misalnya perusahaan bangkrut (McConnell, 2003: 572). Alasan lain untuk mengadakan kontrak karena dirasakan lebih mahal apabila pekerja di perusahaan sering kali berganti. Perusahaan harus menanggung biaya rekrutmen dan pelatihan pekerja baru.

Selanjutnya derajat ketegaran upah nominal untuk turun dimungkinkan berbeda menurut jenis pekerja dan jabatan. Hal ini dikarenakan struktur pengupahan berbeda menurut jenis pekerja dan jabatan. Berdasar jenis pekerja, maka pekerja sektor industri manufaktur terdiri dari pekerja produksi dan non-produksi. Pekerja produksi merupakan pekerja yang berperan langsung dalam kegiatan menghasilkan barang (proses produksi). Adapun pekerja

non-produksi merupakan pekerja yang berperan dalam pengorganisasian kegiatan perusahaan dan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan produksi seperti tata kelola, pemasaran, dan administrasi. Baik pekerja produksi dan non-produksi keduanya menerima upah yang terdiri dari upah pokok dan sejumlah tunjangan. Upah pokok yang diterima pekerja besarnya tetap, tetapi tunjangan yang diterimanya berbeda. Tunjangan pekerja produksi seluruhnya bersifat variabel menurut intensitas (produktivitas) kerja dan kondisi perusahaan, sedangkan tunjangan pekerja non-produksi sebagian bersifat tetap dan sebagian lainnya bersifat variabel (SMERU, 2001).

Berdasar jumlah pekerja, sebagian besar pekerja perusahaan adalah pekerja produksi. Akan tetapi pekerja non-produksi, di antaranya manajer, sangat berperan dalam menentukan maju mundurnya perusahaan. Keberadaan mereka tetap diperlukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan termasuk pada saat perusahaan menghadapi krisis. Kebijakan dan terobosan yang dilakukan manajer sangat ditunggu guna menyelamatkan perusahaan dari ancaman krisis. Untuk itu studi ini memfokuskan pada ketegaran upah nominal manajer.

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Sebelumnya

Susanto (2009) meneliti ketegaran upah nominal untuk turun dengan obyek penelitian upah pekerja produksi di bawah supervisi pada industri manufaktur. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berdasar model koreksi kesalahan (*Error Correction Model = ECM*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah nominal pekerja di bawah supervisi tegar untuk turun. Penurunan produktivitas pekerja tidak menyebabkan penurunan upah nominal. Apabila kinerja perusahaan turun, maka perusahaan mengurangi atau meniadakan kerja lembur sehingga tunjangan lembur yang diterima pekerja berkurang.

Dias *et al* (2012) mengkaji ketegaran upah nominal untuk turun di Portugal. Penelitian ini menggunakan alat analisis Ekonometri dengan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model = ECM*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah nominal tegar untuk turun. Pengusaha berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memberlakukan sistem kompensasi yang fleksibel melalui sistem bonus, tunjangan serta mengenakan upah yang rendah pada pekerja baru.

Schmitt-Grohé, *et al* (2013) mengkaji ketegaran upah nominal untuk turun di Eropa sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi di Yunani. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tingkat pengangguran tinggi, akan tetapi upah nominal tegar untuk turun. Ketegaran nominal ini menjadi faktor penyebab tingginya pengangguran di Eropa. Apabila angka pengangguran ini ingin diturunkan, maka perekonomian Eropa harus menanggung kenaikan inflasi.

Ketegaran Upah Nominal Menurut Jabatan

Penurunan tingkat upah tidak disukai bukan saja oleh pekerja tetapi juga oleh pengusaha. Bagi pengusaha yang menerapkan prinsip upah efisiensi, maka tidak ada untungnya bila pengusaha menurunkan upah nominal. Upah rendah menjadikan pekerja malas dan selanjutnya akan berdampak negatif bagi kinerja perusahaan. Dengan demikian akan lebih menguntungkan bagi pengusaha untuk mempertahankan tingkat upah nominal. Tingkat upah nominal bersifat tegar untuk turun (Bewley, 2004).

Penentuan tingkat upah pekerja bukan hanya bergantung pada produktivitas saja tetapi juga pada kecenderungan pekerja untuk keluar dari perusahaan (du Caju, 2007). Apabila upah diturunkan, maka kemungkinan pekerja untuk keluar (*turn over*) semakin besar. Tingginya *turn over* pekerja akan berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Hal ini berarti perusahaan harus siap menanggung biaya rekrutmen dan pelatihan pelatihan pekerja baru. Biaya rekrutmen dan pelatihan pekerja baru berbeda-beda menurut jabatan.

Di samping faktor besarnya biaya rekrutmen dan pelatihan pekerja baru, maka peran pekerja dalam setiap jabatan juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan upah nominal. Keberadaan pekerja yang memiliki keahlian spesifik sangat berperan bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan berupaya agar mereka tidak keluar dari perusahaan (Bewley, 2004). Perusahaan enggan menurunkan upah nominal dan tunjangan bagi pekerja dengan keahlian spesifik kecuali terjadi hal-hal di luar kendali perusahaan misalnya perusahaan bangkrut. Hal ini berarti semakin tinggi jabatan, derajat ketegaran upah untuk turun juga semakin besar. Upah nominal pekerja dengan jabatan semakin tinggi juga semakin sulit untuk turun.

METODA PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data mentah dari Statistik Upah, Statistik Struktur Upah dan Statistik Industri yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai tahun 2001 sampai dengan 2014. Observasi yang dimulai tahun 2001 dikarenakan publikasi Statistik Struktur Upah tahun 2001 merupakan publikasi Statistik Struktur Upah yang pertama kali. Sementara itu publikasi Statistik Struktur Upah tahun 2014 merupakan publikasi terbaru sehingga periode penelitian dibatasi dari tahun 2001 sampai dengan 2014.

Data penelitian akan mencakup upah nominal, produktivitas pekerja dan upah minimum sektoral provinsi. Penggunaan data mentah dimaksudkan untuk menghilangkan bias karena agregasi. Berdasar jenis industri, maka obyek penelitian akan meliputi upah nominal pekerja non-produksi yaitu tenaga penjualan, tenaga administrasi dan manajer.

Variabel Operasional

Definisi variabel operasional dijelaskan sebagai berikut.

1. **Upah Nominal Pekerja (W)** adalah penerimaan pekerja industri manufaktur sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Satuan yang digunakan adalah ribu rupiah per pekerja per bulan.
2. **Produktivitas Pekerja (Y)** adalah nilai riil barang yang dihasilkan oleh industri sektor industri dibagi jumlah pekerja pada industri tersebut. Satuan produktivitas pekerja adalah ribu rupiah per pekerja.
3. **Upah Minimum Sektoral Provinsi ($UPMIN$)** adalah rata-rata upah minimum sektoral regional (provinsi) yang berlaku di provinsi tempat perusahaan kimia berlokasi. Apabila di provinsi tersebut belum berlaku upah minimum sektoral provinsi maka digunakan upah minimum provinsi.

Alat Analisis

Penelitian ini mengamati derajat ketegaran upah nominal untuk turun menurut jenis pekerja dan jabatan pada sejumlah obyek (industri) selama beberapa tahun. Dengan demikian berbentuk data panel yang merupakan gabungan dari data belah silang dan runtun waktu. Data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan data belah silang dan runtun waktu (Baltagi, 2003).

1. Model Dinamis dan Penentuan Panjang *Lag*

Dalam ilmu ekonomi, maka sangat sering variabel terikat bereaksi terhadap variabel bebas dengan suatu selang waktu. Selang waktu tersebut dinamakan *lag*. Keberadaan *lag* tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Analisis regresi dilakukan dengan memperhatikan adanya selang waktu (*lag*) tersebut. Dengan kata lain diwujudkan dalam suatu bentuk model dinamis.

Penentuan panjang *lag* menjadi isu penting. Jumlah *lag* terlalu pendek berisiko terjadi kesalahan spesifikasi model, sedangkan *lag* terlalu panjang banyak mengurangi derajat kebebasan. Untuk menghindari kesalahan spesifikasi, penentuan panjang *lag* menggunakan Akaike (*AIC*). Hal ini dikarenakan kriteria Akaike (*AIC*) lebih unggul dibandingkan kriteria

lain (Liew, 2004). Nilai kriteria Akaike (*AIC*) yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik.

2. Hausman Test

Dalam regresi data panel terdapat 2 (dua) model dasar yaitu model *fixed effects* dan *random effects*. Untuk memilih model yang unggul apakah model *Fixed Effects* atau Model *Random Effects* dipergunakan uji Hausman. Uji Hausman mengikuti distribusi menurut *Chi-Square* dengan derajat kebebasan sesuai jumlah variabel independen (*k*). Apabila nilai *m* lebih besar daripada χ^2 model yang pilih adalah *fixed effects*

3. Model Data Panel Multivariate

Model penelitian dibentuk dalam suatu model regresi dinamis dengan memasukkan *lag* baik pada variabel sisi kanan maupun sisi kiri persamaan. Guna memperoleh model estimasi yang sederhana, maka dilakukan reduksi mulai dari *lag* terpanjang hingga *lag* terpendek agar diperoleh model dimaksud. Estimasi jangka pendek dari model ketegaran upah nominal untuk turun dituliskan dalam persamaan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model=ECM*)

$$dW_{it} = \alpha_i + \sum_{j=1}^k \omega_{ij} dW_{it-j} + \sum_{j=0}^k \beta_{ij} dY_{it-j} + \sum_{j=1}^k \gamma_{ij} dY_{it-j} * DUM_{it} + \varphi \sum_{j=1}^k dUPMIN_{it} + \lambda_{ij} ECT_{t-1} + e_{it}$$

keterangan

W_{it} adalah upah pekerja

Y_{it} adalah produktivitas pekerja

$UPMIN_{it}$ adalah upah minimum sektoral propinsi

DUM adalah variabel *dummy*. $DUM = 1$ pada saat produktivas pekerja mengalami penurunan dan $DUM = 0$ untuk kondisi yang lain

HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis

Guna mengantisipasi risiko terjadinya kesalahan spesifikasi model akibat jumlah *lag* terlalu pendek dan pengurangan derajat kebebasan akibat jumlah *lag* terlalu panjang, maka dilakukan penentuan panjang lag optimum berdasar Kriteria Akaike. Penentuan panjang *lag* yang tepat dilakukan berdasar estimasi *VAR (Vector Autoregression)* dengan mengambil berbagai periode sebagai titik awal. Berdasar hasil estimasi *VAR*, maka nilai *AIC* minimum terjadi pada saat panjang *lag* adalah setahun. Estimasi *VAR* dengan panjang *lag* 1 akan terhindar dari kesalahan spesifikasi model dan masalah pengurangan derajat kebebasan. Estimasi *VAR* dengan panjang *lag* 1 merupakan *parsimonious VAR*. Dalam penentuan upah nominal, pelaku ekonomi mempertimbangkan variabel-variabel ekonomi pada tahun berjalan dan satu tahun lalu (Tabel 1).

Tabel 1.
Penentuan Panjang Lag Berdasar Kriteria Akaike

Nomor	Panjang Lag	Nilai Akaike
1.	1 1	13,492*
2.	1 2	13,595
3.	2 2	14,193

*Panjang *lag* optimum

Selanjutnya dalam regresi data panel terdapat 2 (dua) model dasar yaitu model *fixed effects* dan *random effects*. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan estimasi berdasar model *random effects*. Jumlah dimensi belah silang (jumlah industri) lebih kecil daripada jumlah koefisien regresi dalam model dinamis sehingga *innovation variance* tidak

dapat dihitung. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan pengujian Hausman. Hal ini berarti analisis data didasarkan pada model *fixed effects*.

Melalui metode estimasi *Seemingly Unrelated Regression (SUR)* dengan model *fixed effects* dan reduksi terhadap parameter-parameter yang tidak signifikan diperoleh hasil estimasi yang sederhana. Hasil pengujian *redundant coefficient* menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} ($\alpha = 5\%$) sehingga tidak signifikan. Hal ini berarti beberapa koefisien regresi memang tidak signifikan. Dengan demikian model reduksi dapat digunakan sebagai dasar analisis. Selanjutnya, dalam model koreksi kesalahan, ukuran ketepatan model ditunjukkan oleh signifikansi dari *error correction term (ECT)*.

Berdasar nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,4081 menunjukkan bahwa sebesar 40,81 persen upah nominal manajer dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel-variabel dependen, sisanya sebesar 59,19 persen dijelaskan oleh residual. Sementara itu nilai F_{hitung} sebesar 4,361 dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap upah nominal manajer. Adapun nilai koefisien $ECT_{\delta_{i,t-1}}$ sebesar -0,279 menunjukkan bahwa kecepatan penyesuaian upah nominal manajer menuju ke kondisi keseimbangan adalah sebesar 27,9 persen per tahun.

Tabel 2.
Hasil Estimasi Jangka Pendek Model Ketegaran Upah Nominal Manajer (*Fixed Effects*)

Nomor.	Variabel	Koefisien	t -statistik	t -tabel ($\alpha = 5\%$)
1.	C	0,043	3,705*	1,645
2.	$DLNW_{\delta_{i,t-1}}$	-0,171	-1,540	-1,645
3.	$DLNY_{i,t-1}$	0,069	2,039*	1,645
4.	$DUM*DLNY_{i,t-1}$	-0,137	-2,225*	-1,645
5.	$DLNUPMIN_{i,t-1}$	0,301	4,024*	1,645
6.	$ECT_{i,t-1}$	-0,280	-3,129*	-1,645

Variabel dependen: $DW_{\delta_{i,t}}$

$Adjusted R^2 = 0,4081$

$F_{hitung} = 4,361$

*) signifikan pada ($\alpha = 5\%$)

Koefisien regresi upah nominal manajer tahun sebelumnya ($DLNW_{\delta_{i,t-1}}$) tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah nominal manajer sebesar 1 persen pada suatu tahun sebelumnya diikuti dengan kenaikan upah yang sama pada tahun berjalan. Terdapat kecenderungan kenaikan upah nominal manajer setiap tahun. Sementara itu upah minimum juga berpengaruh positif terhadap upah nominal manajer. Kenaikan upah minimum sebesar 1 persen diikuti dengan kenaikan upah nominal manajer sebesar 0,301 (*ceteris paribus*). Dengan demikian fenomena upah sundulan berlaku bagi upah nominal manajer. Adanya kenaikan upah minimum menyebabkan upah pekerja lain lain yang lebih tinggi (manajer) ikut mengalami kenaikan. Hal ini diduga karena manajer berperan pokok dan merupakan pihak yang ikut menentukan kebijakan perusahaan/industri.

Selanjutnya terdapat kemungkinan bahwa upah nominal manajer tidak turun walaupun produktivitas pekerja turun. Dengan kata lain upah nominal manajer tegar untuk turun. Guna mengetahui ketegaran upah nominal manajer untuk turun, dilakukan pengujian Wald melalui penjumlahan nilai koefisien $DLNY_{i,t-1}$, dan $DUM*DLNY_{i,t-1}$. Hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} tidak signifikan sehingga upah nominal manajer tegar untuk turun. Kenaikan produktivitas pekerja sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan upah nominal manager sebesar 0,069 persen, sedangkan penurunan produktivitas pekerja sebesar 1 persen

tidak diikuti dengan penurunan upah nominal manajer. Upah nominal manajer tidak turun walaupun pada saat bersamaan produktivitas pekerja mengalami penurunan (Tabel 3).

Tabel 3
Pengujian Ketegaran Upah Nominal Manajer: Uji Wald

Nilai Penjumlahan Koefisien Regresi	Kesalahan Standar	t _{hitung}	t _{tabel} ($\alpha = 5\%$)
-0,067	0,061	-1,098	-1,645
Kesimpulan	Upah nominal manajer tegar untuk turun		

Manajer merupakan sumber daya manusia berharga bagi perusahaan. Mereka terlibat langsung dalam penentuan kebijakan perusahaan dan sangat menentukan bagi maju mundurnya perusahaan. Pengusaha tidak akan menurunkan upah nominal para manajer agar mereka tidak meninggalkan perusahaan. Penurunan upah nominal akan menyebabkan naiknya *turn over* pekerjanya dan selanjutnya mengakibatkan kenaikan biaya perekrutan dan pelatihan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Dias *et.al* (2012) di Portugal yang menunjukkan bahwa upah nominal tegar untuk turun. Pengusaha melakukan berbagai upaya untuk mengurangi biaya tenaga kerja tanpa menurunkan upah nominal. Temuan ini juga sejalan dengan temuan Schmitt-Grohé, *et al* (2013) yang mengkaji ketegaran upah nominal untuk turun di Eropa bahwa upah nominal tegar untuk turun.

Kesimpulan

Upah nominal manajer tegar untuk turun. Kenaikan produktivitas pekerja menyebabkan kenaikan upah nominal manajer, sedangkan penurunan produktivitas pekerja tidak diikuti dengan penurunan upah nominal pekerja dimaksud. Upah nominal manajer tidak berubah walaupun pada saat bersamaan produktivitas pekerja mengalami penurunan.

Selanjutnya perusahaan dapat menempuh kebijakan *profit sharing* dengan mengalokasikan persentase tertentu dari laba perusahaan kepada para manajer. Untuk itu, diperlukan adanya laporan keuangan (laba-rugi) perusahaan yang dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak. Strategi ini akan dapat memotivasi manajer untuk bekerja lebih giat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada DP2M DIKTI yang telah memberikan bantuan dana bagi penelitian ini melalui Skim Hibah Penelitian Fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltagi, Badi., H., 2003. *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley and Sons.
- Bewley, T.F., 2004. "Fairness, Reciprocity and Wage Rigidity", IZA Discussion Paper No. 1137.
- Christoffel, Kai dan Tobias Linzert, 2005. The Role Of Real Wage Rigidity and Labor Market Frictions For Unemployment and Inflation Dynamics Working Paper Series No. 556 /Nopember, European Central Bank.
- Dias, Daniel A., Carlos Robalo Marques, dan Fernando Martins, 2012, Wage Rigidity And Employment Adjustment At The Firm Level: Evidence From Survey Data, Working Paper, Banco de Portugal, Economics and Research Department.

- du Caju P., Fuss, C. and Wintr, L. (2007): "Downward Wage Rigidity for Different Workers and Firms: An Evaluation for Belgium Using the IWFP Methodology." ECB Working Paper, No. 840.
- Liew, Venus Khim-Sen, 2004. "Which Lag Length Selection Criteria Should We Employ?." *Economics Bulletin*, 33:1-9.
- McConnel, Campbell, R., Stanley L. Brue, dan David A. Macpherson, 2003. *Contemporary Labor Economics*, McGraw-Hill, New York.
- Schmitt-Grohé, S., and Uribe, M. (2013). "Downward Nominal Wage Rigidity and the Case for Temporary Inflation in the Eurozone." *Journal of Economic Perspectives*, 27(3), 193-212.
- SMERU, 2001. "Wage and Employment Effects of Minimum Wage Policy in the Indonesian Urban Labor Market", *Research Report*, Jakarta.
- Susanto, Joko, 2009. Ketegaran Upah Nominal Untuk Turun: Kasus Upah Nominal Pekerja Produksi di Bawah Mandor Pada Industri Besar dan Sedang Makanan Jadi, Bahan Pakaian, Karet dan Plastik, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 (1): 15-31

TRANSFER KNOWLEDGE GERAKAN MUDA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN BENCANA

Jatmika Setiawan¹⁾, Purbudi Wahyuni²⁾, Yuni Siswanti²⁾, Istiana Rahatmawati²⁾
Jatmikosetiawwan@yahoo.com

¹⁾ Prodi T. Geologi, FTM, UPN "Veteran" Yogyakarta

²⁾ Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penataan lingkungan dan pengelolaan kebencanaan melalui peran Karang Taruna. Diharapkan Karang Taruna binaan menjadi Karang Taruna yang efektif karena ada proses pembelajaran sosial dari Karang Taruna yang menjadi tauladan/model. Observasi awal yang sangat teliti selama 3 bulan sebelum proposal ini dibuat telah berhasil menemukan Karang Taruna model yang menjadi tauladan/ penginspirasi, yaitu Karang Taruna Jaya Kusuma dari Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, melakukan *transfer knowledge* pada Karang Taruna yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu Karang Taruna Gema Persada Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Untuk subjek penelitian diperoleh desa yang memiliki banyak pemuda pengangguran tapi mempunyai semangat bekerjasama. *Transfer knowledge* ini mencakupi pembentukan dan pengelolaan organisasi karang taruna, pelatihan tanggap bencana, pelatihan pengelolaan atau manajemen bencana khususnya sungai, pelatihan pengelolaan lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan dan pengelolaan kebencanaan merupakan aktivitas yang realitis bagi pemuda dan pemudi yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna. Penelitian dilakukan dengan metoda quasi eksperimen selama tiga tahun, dimulai tahun 2015, treatmentnya adalah *transfer knowledge* untuk Karang Taruna binaan (Gema Persada). Melalui FGD (Focus Group Discussion) diperoleh calon-calon pengurus dan permasalahan yang ada dan solusi yang akan dipilih untuk pengembangan kelompok. Pilihan ini dianggap tepat karena Karang Taruna tersebut murni terbentuk dari inisiatif pemuda/i. Karang Taruna Jaya Kusuma memiliki program pengelolaan lingkungan dan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) serta UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

Kata kunci: Karang Taruna, Pengelolaan lingkungan, Manajemen Bencana, transfer knowledge, pembelajaran sosial, kecerdasan emosional

PENDAHULUAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kelurahan ini terletak di paling selatan dari Kota Yogyakarta, tepatnya di utara Ring Road Selatan Kota Yogyakarta dan di sisi Timur dialiri Sungai Gajah Wong sebagai sungai heritage, yang mempunyai banyak potensi antara lain mempunyai terminal Bus Tipe A Giwangan, mempunyai Pasar Induk buah dan Sayur Giwangan, mempunyai wilayah yang telah memperoleh predikat sebagai Kampung Seni dan Budaya, serta berada di kawasan Kotagede sebagai kawasan wisata.

Latar Belakang

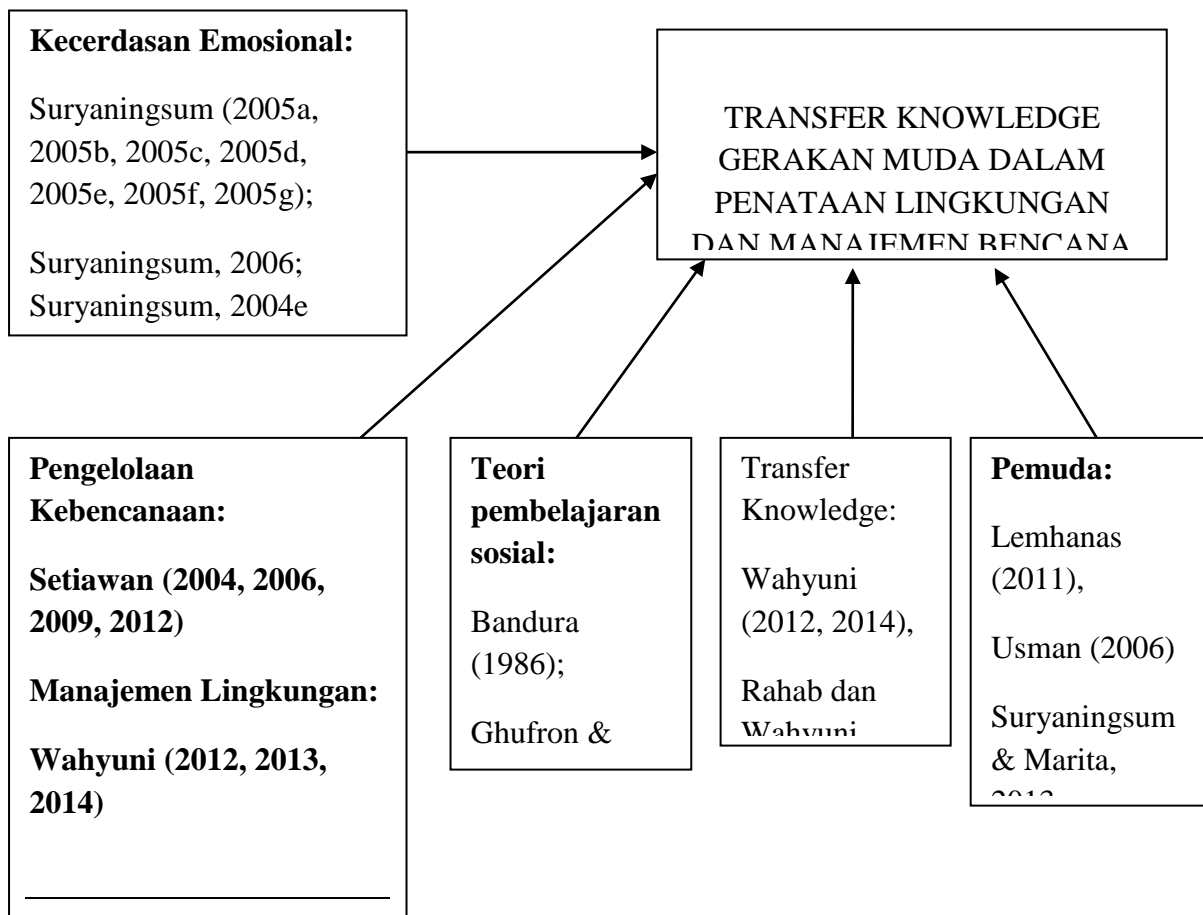
Penelitian ini memfokuskan *transfer knowledge* dari Karang Taruna Berprestasi Nasional yaitu Karang Taruna Jaya Kusuma dari Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, melakukan *transfer knowledge* pada Karang Taruna yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu Karang Taruna Gema Persada Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Untuk subjek penelitian diperoleh desa yang memiliki banyak

pemuda pengangguran tapi mempunyai semangat bekerjasama. kepada Karang Taruna yang belum mempunyai kinerja dengan kondisi anggota banyak yang menganggur, membuat taraf hidup menjadi tidak sejahtera dan dampak buruk yang lainnya jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memperbaiki kondisi ini dengan menggunakan teori belajar sosial. Diharapkan dengan memfasilitasi pertemuan dan pembelajaran akan lebih berhasil dalam teori pembelajaran sosial.

Menurut Bandura, 1977, 1986 menyatakan bahwa manusia dan lingkungannya merupakan faktor-faktor yang saling menentukan secara timbal balik Pembelajaran sosial yang diharapkan terjadi pada Karang Taruna tersebut adalah pembentuk dan pengelolaan lingkungan dan manajemen kebencanaan yang memiliki dampak *multiplier effect* yang luar biasa dalam bidang ekonomik. Dalam bidang akademik diharapkan mampu melakukan publikasi tentang hasil teori belajar sosial (juga dikenal sebagai belajar observasional atau belajar vicarious atau belajar dari model) adalah proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan dan, dalam kasus proses belajar imitasi, peniruan perilaku orang lain dalam konteks ini adalah pembelajaran antar Karang Taruna.

Dalam bidang nilai sosial terjadi/terciptanya sinergi pada pemuda pada desa objek penelitian. Pada tahun kedua terbentuk UKS dan UEP. Dan pada tahun ketiga mulai terbentuknya penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di desa objek penelitian yang berarti terjadinya pengentasan kemiskinan. Selain itu akan terjadi peningkatan kecerdasan emosional pada pemuda desa objek penelitian. Kecerdasan emosional meningkat karena pemuda lebih peduli pada lingkungan dan kebencanaan yang akan berakibat munculnya program UKS dan lebih bersosial akibat program UEP. Kecerdasan emosional menjadi fokus penting dalam penelitian ini karena merupakan modal dalam berinteraksi secara interpersonal.

Gambar 1. Roadmap Tim Peneliti Hibah Kluster



Kebaharuan Penelitian

Ada kebaruan yang difokuskan dalam penelitian ini. Kebaruan tersebut mencakupi, kebaruan pertama adalah transfer knowledge antar Karang Taruna (Karang Taruna Berprestasi Nasional yaitu Karang Taruna Jaya Kusuma dari Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, melakukan *transfer knowledge* pada Karang Taruna yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu Karang Taruna Gema Persada Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta (pembentukan dan pengelolaan Karang Taruna sampai operasional Karang Taruna baik pembentukan dan pengelolaan manajemen lingkungan dan kebencanaan, pembentukan dan pengelolaan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Usaha Ekonomi Produktif. Pembentukan ini diharapkan mampu berperan dalam pengelolaan lingkungan dan manajemen kebencanaan.

Kecakapan pribadi menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Goleman, (2002) menyatakan bagaimana tiga unsur yang terpenting untuk menilai kecakapan pribadi seseorang adalah: pertama, **kesadaran diri**. Goleman (2002) Ini menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, dan keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau percaya diri. Kedua, **pengaturan diri**. Ini menyangkut kemampuan mengelola emosi dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluwesan dalam menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap gagasan, pendekatan dan informasi-informasi baru. Dan ketiga, **motivasi**. Ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, komitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan.

Kemampuan interpersonal perlu didukung adanya kemampuan untuk membaca lingkungan, yaitu tanggap terhadap tuntutan global berupa isu green atau produk ramah lingkungan. Untuk itu para pelaku UKM untuk memenangkan persaingan dan mampu merebut sebagian pangsa pasar yang ada, yaitu dengan menselaraskan dengan isu *green industry*. Menurut Berkel dalam Petranto (2011) menyatakan bahwa produk yang sukses adalah produk yang mampu memberi manfaat sesuai dengan yang dipersepsikan konsumen. Oleh karena itu para pelaku usaha perlu mempertimbangkan kualitas produk berdasar kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang mulai mengarah pada produk yang ramah lingkungan (*green consumer*), adanya pengelolaan lingkungan akan berhasil jika juga didukung adanya kemampuan untuk mengelola kebencanaan.

Pengembangan Unit Usaha Kecil dan Menengah atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini biasanya disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengurus atau anggotanya (Lemhanas, 2011 dan Kemenhan 2009). Wilayah dengan potensi pertanian seperti Jawa dan Sumatera menunjukkan adanya korelasi dengan kegiatan ekonomi produktif yang ditekuni oleh Karang Taruna melalui budidaya tanaman pangan atau palawija.

Usaha Kesejahteraan Sosial menurut Lemhanas (2011) dan Kemenhankam (2006) menyatakan bahwa tugas utama yang mendasari lahirnya Karang Taruna adalah kepedulian mereka pada lingkungan masyarakat yang terkait dengan upaya memajukan usaha-usaha kesejahteraan. Karang Taruna menyadari secara partisipatif mereka dapat melakukan upaya penanganan permasalahan sosial yang ada sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki. Kepedulian Karang Taruna terhadap masalah sosial umumnya terbangun dari nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakatnya.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah Quasi Eksperimen.

Penelitian dilakukan untuk Karang Taruna. Ada dua model Karang Taruna. Model pertama adalah Karang Taruna yang menjadi tauladan. Karang Taruna ini menjadi

menginspirasi suatu desa yang belum memiliki Karang Taruna (ada Karang Taruna-nya tapi tidak berfungsi). Desa yang belum memiliki Karang Taruna (ada Karang Taruna-nya tapi tidak berfungsi ini) akan difasilitasi/ dipertemukan dengan Karang Taruna Berprestasi Nasional. Observasi awal telah menemukan model Karang Taruna yang menjadi tauladan/penginspirasi, yaitu Karang Taruna Jaya Kusuma dari Desa Singosaren, Kotagede. Observasi sudah dilakukan dengan hati-hati untuk memilih Karang Taruna Tauladan. Observasi dilakukan selama 3 bulan yaitu selama kegiatan KKN PPM berlangsung (1 Mei 2013 sd 31 Juli 2013). Pilihan ini dianggap tepat karena Karang Taruna tersebut murni terbentuk dari inisiatif pemuda/i. Karang Taruna Jaya Kusuma memiliki program pengelolaan lingkungan, manajemen bencana, UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Dan observasi ini ternyata tidak salah pilih, karena ternyata Karang Taruna Jaya Kusuma memiliki prestasi nasional. Seterusnya Proses *transfer knowledge* akan dilakukan selama 1 tahun pertama (2015) dan diperkirakan akan berlaku di Kelurahan Giwangan perlu proses 2 tahun berikutnya secara berturut-turut.

Transfer knowledge yang telah dilakukan yaitu dengan studi banding dan saling mengunjungi, selanjutnya dilakukan FGD yang dihadiri oleh para muda mudi warga di Kelurahan Giwangan masing-masing RW mengirimkan muda mudinya yang dianggap mempunyai kepedulian terhadap wilayah, kemudian dilanjutkan dengan wawancara untuk merefreshing Karang Taruna yang telah ada tetapi tidak optimal.

DATA DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Muda-mudi Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang masih peduli dengan wilayahnya dan yang aktif mengikuti atau memenuhi undangan untuk mengikuti FGD dan 42 orang dengan rata-rata usia antara 20 sampai 35 tahun dengan tingkat pendidikan sebagian besar telah menempuh studi diploma tiga dan telah menempuh pendidikan stata satu, 25% atau 10 orang wanita selebihnya pria, dengan pengalaman organisasi masih tergolong rendah.

FGD dan Wawancara

Hasil FGD dan observasi menyatakan bahwa kesadaran diri menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, dan keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau percaya diri masih tergolong rendah.

Pengaturan diri, menyangkut kemampuan mengelola emosi dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluwesan dalam menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap gagasan, pendekatan dan informasi-informasi baru, masih tergolong rendah. **Motivasi**, ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, komitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan masih tergolong rendah. **Empati** yang menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain. Juga kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengatasi keragaman dalam membina pergaulan, mengembangkan orang lain, dan kemampuan membaca arus-arus emosi sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan, juga tercakup didalamnya masih tergolong rendah.

Keterampilan sosial yaitu taktik-taktik untuk meyakinkan orang (persuasi), berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai dan mengelola perubahan, bernegosiasi dan mengatasi silang pendapat,

bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan kepentingan bersama, semua itu masih tergolong rendah. Kemampuan interpersonal perlu didukung adanya kemampuan untuk membaca lingkungan, yaitu tanggap terhadap tuntutan global berupa isu green atau produk ramah lingkungan. Untuk itu para pelaku UKM untuk memenangkan persaingan dan mampu merebut sebagian pangsa pasar yang ada, yaitu dengan menselaraskan dengan isu *green industry*, masih tergolong rendah

Pembahasan

Muda-mudi Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang masih peduli dengan wilayahnya dan yang aktif mengikuti atau memenuhi undangan untuk mengikuti FGD dan 42 orang dengan rata-rata usia antara 20 sampai 35 tahun dengan tingkat pendidikan sebagian besar telah menempuh studi diploma tiga dan telah menempuh pendidikan stata satu, 25% atau 10 orang wanita selebihnya pria, dengan pengalaman organisasi masih tergolong rendah.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kelurahan ini terletak di paling selatan dari Kota Yogyakarta, tepatnya di utara Ring Road Selatan Kota Yogyakarta dan di sisi Timur dialiri Sungai Gajah Wong sebagai sungai heritage, yang mempunyai banyak potensi antara lain mempunyai terminal Bus Tipe A Giwangan, mempunyai Pasar Induk buah dan Sayur Giwangan, mempunyai wilayah yang telah memperoleh predikat sebagai Kampung Seni dan Budaya, serta berada di kawasan Kotagede sebagai kawasan wisata, mempunyai banyak potensi tetapi belum tergarap karena kemampuan tentang **kesadaran diri** menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, dan keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau percaya diri masih tergolong rendah.

Pengaturan diri, menyangkut kemampuan mengelola emosi dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluwesan dalam menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap gagasan, pendekatan dan informasi-informasi baru, masih tergolong rendah. **Motivasi**, ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, komitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan masih tergolong rendah. **Empati** yaitu kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengatasi keragaman dalam membina pergaulan, mengembangkan orang lain, dan kemampuan membaca arus-arus emosi sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan, juga masih tergolong rendah.

Keterampilan sosial yaitu taktik-taktik untuk meyakinkan orang (persuasi), berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai dan mengelola perubahan, bernegosiasi dan mengatasi silang pendapat, bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan kepentingan bersama, semua itu masih tergolong rendah. Kemampuan interpersonal perlu didukung adanya kemampuan untuk membaca lingkungan, masih tergolong rendah.

Temuan tersebut belum sejalan dengan pendapat Berkel dalam Petranto (2011) menyatakan bahwa produk yang sukses adalah produk yang mampu memberi manfaat sesuai dengan yang dipersepsikan konsumen, mengarah pada produk yang ramah lingkungan (*green consumer*). **Meningat potensi yang ada Pengembangan Unit Usaha Kecil dan Menengah atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP)** disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengurus atau anggotanya (Lemhanas, 2011 dan Kemenhan 2009). 1). Kerajinan, dan Olahan Pangan khas Kotagede antara lain ue banjar, kembang waru, kipo 2).Optimalisasi Kelomppok tanggap bencana dengan membentuk wisata sungai. 3). Audio visual 5). Peternakan ayam buras dan ikan air tawar 4). Tanaman pangan, dan tanaman

obat dengan memanfaatkan lahan pekarangan 5). Pengelolaan kelompok kesenian diarahkan untuk wisata.

Usaha Kesejahteraan Sosial menurut Lemhanas (2011) dan Kemenhankam (2006) menyatakan bahwa tugas utama yang mendasari lahirnya Karang Taruna adalah kepedulian mereka pada lingkungan masyarakat yang terkait dengan upaya memajukan usaha-usaha kesejahteraan, serta dapat melakukan upaya penanganan permasalahan sosial yang ada sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki. Bentuk kegiatan maupun jenis permasalahan yang ditangani pun beragam, sesuai keadaan dan permasalahan yang menonjol di lingkungan masyarakat sekitar. Jenis-jenis permasalahan sosial yang ditangani oleh Karang Taruna antara banyak wanita tuna susila yang nongkrong di pinggir jalan mengotori dan meresahkan warga, dengan menggunakan cara membuat ancaman berupa spanduk yang dipanjang di tempat tersebut, hasilnya cukup signifikan.

KESIMPULAN

Muda-mudi Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang masih peduli dengan wilayahnya dan yang aktif mengikuti atau memenuhi undangan untuk mengikuti FGD dan 42 orang dengan rata-rata usia antara 20 sampai 35 tahun dengan tingkat pendidikan sebagian besar telah menempuh studi diploma tiga dan telah menempuh pendidikan stata satu, 25% atau 10 orang wanita selebihnya pria, dengan pengalaman organisasi masih tergolong rendah. Sehingga potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Kelurahan Giwangan belum dioptimalkan oleh warga setempat, disebabkan oleh kemampuan potensi warganya yang masih rendah dan dengan adanya studi banding dan refreasing atau pembentukan Karang Taruna Baru di Kelurahan Giwangan telah terlihat geliat warga dengan telah terbentuk beberapa UEP dan mampu membersihkan bencana sosial yang meresahkan warga setempat.

Daftar Pustaka:

- Achjari, Didi. Sri Suryaningsum, Ratna Chandra Sari .2008 Studi atas Tata Kelola Perusahaan untuk Sektor Industri Teknologi dan Telekomunikasi Pada Level ASEAN Kajian Akuntansi ISSN 1907-1442 Volume 3, Nomor 2, Desember 2008
- Bandura, A, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986
- Bandura, Albert, Ross, Dorothea, & Ross, Sheila A. (1961). Transmission of aggressions through imitation of aggressive models. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63, 575-582 [Full text](#)
- Bandura, A. (1977) *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall. Hardback: [ISBN 0-13-816744-3](#), Paperback: [ISBN 0-13-816751-6](#)
- Bagozzi, R.P. ;Davis, F.D. and Warshaw, P.R. "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models," *Management Science* (35:8), August 1989.
- Cheong, Je Ho, and Park, Myeong-Cheol (2005). Mobile internet acceptance in Korea, *Internet Research*, 15 (2), pp.125-140.
- Compeau, D.R., and Higgins, C.A.; Application of Social Cognitive Theory to training for computer skills; *Information systems Research* (6:2), 1995,pp 118-143
- Darsono, Licen, "Examining Information technology Acceptance By Individual Profesionals; *Gadjah Mada Internasional Journal of Business*, (7,2),2005.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Ghufron M. Nur & Risnawati Rini S. 2010. *Teori-Teori Psikologi*.

- Goleman, Daniel (2002). Kecerdasan Emosional.
Kementerian Pertahanan RI 2009, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Kemhan, Jakarta
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 2011, *Pedoman Pemantapan Nilai-Nilai
Kebangsaan*, Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI, 2013
Setiawan, Jatmika, 2004, *Pengelolaan Kawasan Pasca Bencana Gempa Bumi di Aceh*
-----, 2006, *Pengelolaan Kawasan Pasca Bencana Gempa Bumi di DIY*
-----, 2009, *Pengelolaan Kawasan Pasca Bencana Gempa Bumi di Semenanjung
Malaysia*
-----, 2013, *Pengelolaan Kawasan Pasca Bencana erupsi Merapi*
- Suryaningsum, Sri. 2006 *Kajian Empiris atas Pengaruh Tipe Personal dan Gender terhadap
Perilaku Etis pada Mahasiswa Akuntansi Kajian Akuntansi ISSN 1907-1442 Volume
1, Nomor 1, Juni 2006*
- Suryaningsum, Sri. 2005a. *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk
Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Penulis ke 2) Jurnal Akuntansi dan
Managemen STIE YKPN No. 26/ DIKTI/ Kep/ 2005 volume XVI, nomor 1 April
2005 ISSN: 0853-1259, terakreditasi*
- Suryaningsum, Sri. 2005b. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman
Mahasiswa Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan (Penulis I). Prosiding Seminar
Nasional Ekonomi 2005 Kopertis Wilayah V DIY*
- Suryaningsum, Sri. 2005c. *Analisis Tipe Personal Terhadap Kecerdasan Emosional Pada
Mahasiswa Akuntansi (Penulis II) Prosiding SemNas Ekonomi 2005 Kopertis
Wilayah V DIY SSN 1858-4373*
- Suryaningsum, Sri. 2005d. *Analisis Dampak Pengumuman Righthat Issue Terhadap Reaksi
Pasar Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta Periode 1996-2003 Jurnal
Administrasi Bisnis Upnvy ISSN 1829-7277 Volume 2, nomor 1 Juli 2005*
- Suryaningsum, Sri. 2005e. *Persepsi Akuntan Pendidik Pria dan Wanita Serta Mahasiswa/wi
Akuntansi Terhadap Etika Bisnis (Penulis 1) Media Akuntansi IAI ISSN: 14100886
Edisi 43/ Tahun XII/ 2005*
- Suryaningsum, Sri. 2005f. *Membangun Komunikasi Dan Budaya Organisasi Dengan
Meningkatkan Kecerdasan Emosional (Penulis ke 2) Jurnal Media Mahardhika
Volume 3 nomor 3 Mei 2005 ISSN: 0854-0861*
- Suryaningsum, Sri. 2005g. *Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi Terhadap Kecerdasan
Emosional (Penulis sendiri) Jurnal EKONOM ISSN: 0853-2435, terakreditasi no: 34/
DIKTI/ Kep/ 2003 Volume IX, nomor: 1, medan maret 2005*
- Suryaningsum, Sri. 2005h. *Pengaruh Pendidikan Dan Dunia Kerja Terhadap Terhadap
Kecerdasan Emosional (Studi Empiris Di Bantul, Sleman, Dan Kota Jogjakarta)
Jurnal Riset Daerah Bantul Volume IV, Desember 2004 ISSN: 1412-9519*
- Suryaningsum, Sri. 2004a. *Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Akuntansi Dengan
Kecerdasan Emosional (Penulis 1) Majalah Ilmiah Wimaya Nomor: 37 tahun XXII,
Desember 2004, ISSN 0215-4579*
- Suryaningsum, Sri. 2004b. *Perkembangan Riset Akuntansi Dalam Siklus Hidup Perusahaan
(Penulis 1) Media Akuntansi IAI Edisi 42/ tahun XI/ 2004, ISSN-14100886*
- Suryaningsum, Sri. 2004c. *Relevansi Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan Terhadap
Koefisiensi Respon Laba (Penulis 2) Jurnal Managemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Pembangunan volume 2 nomor 1, April 2004 ISSN: 1410-2293*
- Suryaningsum, Sri. 2004d. *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten/ Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jurnal
Riset Daerah Bantul volume III, nomor 1 April 2004 ISSN: 1412-9519*

- Suryaningsum, Sri. 2004e. Kajian Empiris Atas Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi Terhadap Kecerdasan Emosional .Vol 6 nomor 3 desember 2004 Jurnal Bisnis dan Akuntansi Terakreditasi nomor 134/ DIKTI/ Kep/ 2001
- Suryaningsum, Sri. 2003 Perspektif Profesionalisma Akuntan Dengan Tinjauan Dimensi Bahasa, Komunikasi, Dan Budaya. Volume 6/ agustus/2003 ISSN No:1410-2293 Jurnal Managemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan
- Suryaningsum, Sri. Marita. 2013. Ipteks untuk Ikatan Remaja Masjid dalam Pembinaan Managemen & Administrasi Masjid Al Islam. Laporan PPM LPPM UPNVY
- Suryaningsum, Sri. Marita. 2009. Sosialisasi Dan Pelatihan Penyediaan Data Informasi Akuntansi Sederhana Untuk Industri Kecil Penghasil Kerajinan Tangan Dan Batik Di DIY (ketua). DIKTI RI; Hibah Ipteks
- Sugiarto, Meilan. 2007 Inovasi Pembelajaran Mata Kuliah Perilaku Organisasi Melalui Penerapan Metode *Case Based* dan *Collaborative Learning Teaching* Grand PHK A2 Tahun II Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta
- Sutoyo. 2009. *Urgensi Menumbuhkembangkan Jiwa Entrepreneurship Perguruan Tinggi, Majalah Info Kampus, UPNVY ISSN 0894-932X, 2009*
- Sutoyo. 2009. Pengurus Koperasi harus mempunyai Jiwa Entrepreneurship, Majalah Info Kampus, UPNVY ISSN 0894-932X, 200.
- Usman, Wan, dkk. 2003. *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
- Wahyuni, Purbudi, 2012. WOMAN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT MODEL TOWARDS ECONOMICS INDEPENDENCE IN YOGYAKARTA. Proceeding of ICEBM-Untar Jakarta-ISBN: 978-602-18994-0-3.
- Wahyuni, Purbudi, 2012. DEVELOPS SINERGITY PERSON – JOB FIT ON INDONESIAN WORKERS (TKI) AND ITS IMPLICATION ON PROSPERITY AND LIVING IN HARMONI IN ASEAN COMMUNITY (CASE STUDY: INDONESIA- MALAYSIA). Seminar Nasional Fak Ekonomi, Proceeding Fak Ekonomi.
- Wahyuni, Purbudi, 2013. *Predicting Knowledge Sharing Intention Based on Theory of Reasoned Action Framework: An Empirical Study on Higher Education Institution American International Journal of Contemporary Research Vol. 3 No. 1; January.*
- Wahyuni, Purbudi, 2013. STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UMKM MELALUI *Sustainable Consumption and Production Berwawasan Green*. Proceeding pada Seminar Nasioanl UII Yogyakarta.
- Wahyuni, Purbudi, 2013. People Empowerment Through Green Water Resources (Study in Gajah Wong River). Proceeding International Seminar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Wahyuni, Purbudi, 2014. Penguatan ekonomi UMKM dan Pelaku Seni Serta Pelestarian Heiritage Kawasan Sungai Gajah Wong. Jurnal Pemerintah DIY Semester I.
- Wahyuni, Purbudi, 2014. Urban Farming sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Menuju Kemandirian Masyarakat Kawasan Sungai Gajah Wong. CSR Mandiri.
- Wahyuni, Purbudi, 2014. *Co-Workers Exchange* sebagai Pemediasi *Intergroup Knowledge* dan *Sharing* Informasi pada Well-Being. Ural Siasat Binis UII, Dalam Proses.

KOMUNIKASI PEMASARAN DAN PENGETAHUAN KONSUMEN DALAM ADOPSI PERTAMAX

Oleh
Dyah Sugandini
Yuni Istanto

Fenomena dalam riset ini diawali dengan adanya isu pembatasan subsidi BBM. Pembatasan subsidi BBM muncul karena anggaran belanja negara sangat terbebani oleh adanya subsidi BBM ini. Permasalahan subsidi BBM merupakan sebuah dilema, jika subsidi BBM tetap dipertahankan akan membebani keuangan negara, sebaliknya, jika dicabut akan membebani masyarakat, karena itulah maka pemerintah mengambil jalan tengah dengan membatasi BBM kepada hanya yang berhak. Subsidi BBM ini biasanya akan berakibat pada sektor ekonomi, yang juga mengakibatkan terjadinya resesi di berbagai sektor. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menerapkan beberapa strategi guna mengurangi subsidi BBM yaitu dengan cara mengalihkan pengguna premium sebagai BBM bersubsidi ke Pertamina (BBM non subsidi). Salah satu strategi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mempersuasi masyarakat agar bisa beralih ke Pertamina. Strategi periklanan yang efektif dipercaya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam studi ini pengetahuan berpengaruh pada persuasi yang dirasakan yang merupakan proses pembentukan sikap terhadap produk dalam wujud pencarian informasi dan interpretasi atas informasi tersebut. Proses pembelajaran informasi baik dalam tahap kognitif maupun afektif ditentukan oleh iklan yang dipaparkan. Tingkat persuasi yang dirasakan merupakan faktor yang menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya yaitu niat membeli dan perilaku coba yang diukur dalam setting laboratorium. Semakin tinggi persuasi yang dirasakan maka terjadi pembentukan sikap positif yang semakin tinggi terhadap pembelian Pertamina. Secara umum hasil studi ini memiliki konsistensi dengan pengujian model pengambilan keputusan adopsi sebelumnya. Kesamaan hubungan variabel model pengambilan keputusan adopsi ditemukan pada variabel pengetahuan subjektif, sebaliknya pengetahuan objektif ditemukan tidak dapat memprediksi proses evaluasi informasi lebih lanjut.

Kata kunci: komunikasi pemasaran, desain experimental, iklan video, advetorial dan adopsi Pertamina

Latar belakang

Permasalahan subsidi BBM merupakan sebuah dilema, jika subsidi BBM tetap dipertahankan akan membebani keuangan negara, sebaliknya, jika dicabut akan membebani masyarakat, karena itulah maka pemerintah mengambil jalan tengah dengan membatasi BBM kepada hanya yang berhak. Pengaturan langkah pembatasan BBM Bersubsidi diatur pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 12 tahun 2012 dan yang terbaru Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013. Upaya pemerintah mendorong masyarakat melakukan konversi penggunaan BBM non subsidi ke Pertamina merupakan proses dan kegiatan transfer teknologi rumah tangga dari pemasok ke pengguna. Transfer teknologi memerlukan proses komunikasi untuk mendorong pembelajaran dan perubahan dari dua pihak, yaitu pemasok dan pengguna (Hsu dan Mesak, 2005).

Subsidi BBM ini biasanya akan berakibat pada sektor ekonomi, yang juga mengakibatkan terjadinya resesi di berbagai sektor. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menerapkan beberapa strategi guna mengurangi subsidi BBM yaitu dengan cara mengalihkan pengguna premium sebagai BBM bersubsidi ke Pertamina (BBM non subsidi). Salah satu

strategi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mempersuasi masyarakat agar bisa beralih ke Pertamina. Strategi periklanan yang efektif dipercaya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. (Brunel dan Nelson, 2003). Pengetahuan merupakan konstruk yang penting dalam memahami perilaku konsumen karena perannya dalam menentukan perilaku pencarian informasi (Brucks, 1985; Fiske *et al.*, 1994). Asumsi dasar dari SRT ini adalah, media massa menimbulkan efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. *Theory of Reason Action* (Fishbein and Ajzen, 1975; 1980) memberikan kerangka pikir tentang bagaimana sikap mempengaruhi perilaku.

Pengetahuan konsumen terhadap produk merupakan suatu kondisi individu untuk memperoleh pemahaman mengenai manfaat dan cara kerja produk (Molesworth dan Suortti, 2002). Pengetahuan yang baik akan meningkatkan kemampuan konsumen untuk memperoleh gambaran positif mengenai manfaat produk. Sikap ini merupakan suatu kumpulan komponen aspek kognitif, afektif dan konatif (Grimm, 2005). Kajian literatur mengenai inovasi produk menunjukkan bahwa pengetahuan produk penting untuk menjelaskan kecenderungan konsumen untuk membeli produk inovatif (Brucks, 1985; Fiske, 1994; Moreau, Lehmann, Markman, 2001). Komunikasi pemasaran menggunakan berbagai bentuk promosi penjualan yang diterapkan oleh perusahaan dan pemerintah secara integratif. Kecukupan informasi yang diperoleh konsumen dari beberapa saluran komunikasi integrative ini akan berdampak pada pengambilan keputusan (Ahituv *et al.*, 1998).

Kajian Literatur Dan Hipotesis

Penelitian ini akan menguji pengaruh periklanan terhadap perilaku adopsi Pertamina, yang dimediasi oleh pengetahuan, sikap dan niat. Teori yang mendasari pengambilan keputusan terkait dengan periklanan dan perilaku konsumen adalah *Stimulus Response Theory* dan *The Theory of Reason Action*.

Stimulus Response Theory

Model klasik komunikasi yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi adalah *Stimulus Response Theory*. Objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi afeksi dan konasi. Asumsi dasar dari model ini adalah: media massa menimbulkan efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. *Stimulus Response Theory* atau S-R theory. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Pola *S-R theory* ini dapat berlangsung secara positif atau negative. Menurut S-R theory ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.

The Theory of Reason Action

Kings dan Gribbins (2002) menyebutkan bahwa pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, Fishbein and Ajzen (1975, 1980) telah mulai mengembangkan suatu teori yang membantu para peneliti untuk memahami dan memprediksi sikap dan perilaku individu. TRA telah berhasil memprediksi dan menjelaskan perilaku pada berbagai wilayah kajian. Teori tersebut paling sering digunakan sebagai model teoritis dalam sistem informasi. Davis, Bagozzi, dan Warshaw (1989) menyatakan bahwa kinerja seseorang mengenai perilaku tertentu ditentukan oleh tujuan untuk menjalankan perilaku, dan tujuan tersebut ditentukan oleh sikap dan norma subyektif.

Komunikasi pemasaran

Komunikasi pemasaran terpadu merupakan langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan, mempertahankan dan meningkatkan konsumen. Assael (1998) mengemukakan bahwa komunikasi pemasaran mempunyai dua tujuan pokok yaitu

bentuk pemberian informasi produk atau produk baru yang mereka keluarkan dan tujuan kedua adalah membujuk konsumen agar membeli produk dalam upaya untuk mencapai efektifitas dan tujuan komunikasi marketing yang optimal. Tentu saja faktor utamanya adalah bagaimana pemasar atau perusahaan dapat menyampaikan produk dan jasa mereka sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Salah satu bentuk dari komunikasi pemasaran tersebut adalah periklanan. Menurut Clow dan Black (2002), esensi dari program komunikasi pemasaran terpadu adalah merancang sebuah pesan yang secara efektif yang mampu menjangkau audien sasaran. Rancangan pesan yang tepat dan efektif, diarahkan untuk merubah atau membentuk sikap konsumen. Kotler (2003) menyatakan bahwa untuk berkomunikasi secara efektif, pemasar perlu memahami unsur-unsur fundamental yang mendasari komunikasi pemasaran yang efektif. Kotler mengemukakan bahwa dua unsure yang merupakan fungsi komunikasi utama adalah pengirim pesan dan penerima pesan. Assael (1998) menyatakan bahwa ada lima komponen dalam proses komunikasi yaitu: (1) sumber informasi, (2) penyampaian/penguraian pesan, (3) pemilihan media penyampaian pesan, (4) penerima pesan, (5) tindakan.

Periklanan

Periklanan merupakan alternatif utama yang dengan mudah dapat menjangkau konsumen yang akan dilayani dan sebagai sumber informasi bagi keseluruhan konsumen. Peran penting komunikasi tersebut secara eksplisit telah disebutkan dalam efektivitas iklan (Lautman dan Hsieh, 1993). Iklan merupakan salah satu bentuk informasi komunikasi pemasaran dan merupakan salah satu mekanisme komunikasi untuk menyampaikan informasi kualitas produk (Ippolito, 1990). Sejauh ini, advertorial pada umumnya diterbitkan sebagai bagian majalah (Stout, 1989). Dalam hal ini, edukasi secara individual dapat menciptakan kesadaran hemat energi tetapi kesadaran tersebut tidak mengarahkan pada terbentuknya perilaku. Sehingga, komunikasi hemat energi membutuhkan peran pemasaran untuk memodifikasi program yang dapat mempengaruhi pengetahuan, keyakinan dan sikap konsumen pada pemilihan pola hidup hemat energi. Selain itu, meskipun baik pemasaran maupun hukum keduanya dapat digunakan membentuk perilaku namun pemasaran memiliki kelebihan dalam melakukan pembentukan perilaku dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri konsumen. Dalam komunikasi pemasaran sumber komunikasi yang berbeda berperan penting juga pada tahap yang berbeda dalam proses adopsi (Beckman, 1967). Sumber komunikasi dapat juga digunakan untuk melakukan prediksi tipe adopter karena kelompok adopter yang berbeda memiliki kesesuaian yang berbeda pula dengan sumber komunikasi (Lee *et al.*, 2002). Selanjutnya dijelaskan bahwa sumber komunikasi dalam informasi dapat berasal dari departemen pemasaran perusahaan atau industri, lembaga independen non perusahaan (contoh : pemerintah, lembaga independen) dan interpersonal. Sehingga, pemasar perlu mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan komunikasi secara efektif dengan menentukan penggunaan sumber komunikasi secara tepat. Iklan merupakan sumber penting untuk memberikan informasi produk non harga termasuk informasi hemat energi dan mereduksi perbedaan penerimaan informasi antar kelompok populasi (Ippolito dan Mathios, 1990). Iklan merupakan stimulus yang dikembangkan oleh perusahaan untuk menimbulkan pengetahuan keberadaan produk dan minat (Debevec *et al.*, 1985). Format advertorial dikembangkan untuk mereduksi persepsi konsumen pada kepentingan penjualan produsen dalam iklan, sehingga advertorial dikembangkan untuk meningkatkan objektivitas informasi (Cameron dan Haley, 1992). Memiliki kredibilitas tinggi terutama dalam menyampaikan informasi produk atau atribut produk yang tidak dapat diobservasi secara langsung (Park and Bahr, 1980).

H1: Eksposisi informasi berupa iklan audio visual atau advertorial cetak akan memberikan efek peningkatan pengetahuan individu yang berbeda.

H2: Sikap yang dirasakan individu lebih besar pada kelompok yang tereksposisi iklan/advertorial.

Pengetahuan

Pengetahuan didefinisikan sebagai tahapan saat individu menyadari dan memahami krisis energi. Pengetahuan yang cukup juga meningkatkan kemampuan konsumen untuk memahami dan mengevaluasi pesan iklan yang spesifik (Andrew *et al.*, 1998) dan pengetahuan yang cukup mendorong pembentukan proses konsumsi (Miller dan Russell, 2004) dan kurangnya pengetahuan akan menyebabkan pembentukan sikap yang negative dari konsumen (Child and Poryzees, 1998). Sehingga :

H3: Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi membentuk sikap yang dirasakan lebih kuat dibandingkan dengan tingkat pengetahuan yang rendah.

Sikap dan Niat

Hierarchy of effect model dari Lavidge dan steiner, 1961, yang dikutip oleh Enis *et al.*, 1991, membagi sikap dalam tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Fungsi kognitif, iklan memberikan informasi dan fakta dengan tujuan membuat konsumen sadar dan memiliki pengetahuan tentang merek yang diiklankan. Kesadaran itu sendiri terdiri atas *message recall* dan *brand recall*, yaitu *what is it? Dan what of it?* (Rossiter dan Percy, 1997). Respon afektif meliputi sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek. Komponen sikap yang ketiga yaitu dimensi konatif merupakan kecenderungan konsumen untuk bereaksi dan bertindak terhadap obyek atau berperilaku.

H4: Sikap berpengaruh terhadap niat adopsi Pertamina.

H5: Niat berpengaruh terhadap adopsi Pertamina.

Model Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji model pengaruh komunikasi pemasaran yang berupa iklan dalam bentuk video dan advertorial dalam pengambilan keputusan keluarga. Perluasan model ini dicapai melalui integrasi *stimulus response theory* dengan *theory of reason action* dalam satu model untuk menentukan adopsi Pertamina. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh iklan video dan advertorial (media cetak) terhadap adopsi Pertamina dengan mediasi pengetahuan, sikap dan niat konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan *internal validity* dari masing-masing variabel yang diamati dalam penelitian, dengan menggunakan metode eksperimen. Model teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 1. Model Teoritis (Untuk keterangan Model Teoritis Dapat Menghubungi Penulis)

Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Masing-masing tahap akan digunakan untuk menguji model yang telah dikembangkan. Desain yang digunakan untuk menguji masing-masing tahap tersebut (kotak berwarna kuning) adalah desain eksperimen dengan manipulasi berupa iklan cetak dan iklan video menggunakan kuesioner untuk melihat respon pengetahuan, sikap, dan niat. Sedangkan, desain yang digunakan untuk menguji variabel dependen (kotak berwarna hijau), berupa adopsi Pertamina, adalah survei juga melalui kuesioner.

Hasil penelitian dan pembahasan

Eksperimen dilakukan pada subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan kriteria bahwa individu berperan dalam pengambilan keputusan pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor bagi diri atau keluarga dan tingkat pendidikan minimal SMA. Eksperimen utama dilakukan pada 200 subjek penelitian. Eksperimen dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2015 – Juni 2015 dengan mendatangi lokasi sesuai dengan permintaan subjek penelitian

Karakteristik Subjek Penelitian

Tabel. 1 menunjukkan bahwa subjek penelitian yang terlibat dalam studi ini terdiri dari 20,5% subjek perempuan dan sisanya laki-laki sebesar 79,5 %. Perbedaan proporsi gender antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena kriteria penentuan subjek adalah subjek berperan dalam pengambilan keputusan pembelian bagi dirinya maupun keluarga. Sejauh ini, dalam suatu keluarga pengambilan keputusan pembelian didominasi oleh suami ((Schiffman dan Kanuk, 2000). Seluruh subjek penelitian berperan dalam pengambilan keputusan pembelian bagi diri maupun keluarga.

Tabel .1: Karakteristik Subjek Penelitian (Untuk keterangan Tabel dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 2. menunjukkan nilai rerata variabel yang diukur dalam eksperimen pengetahuan, persuasi, dan niat membeli.

Tabel 2. Statistik deskriptif variabel penelitian (N = 200) (Untuk keterangan Tabel dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Pengukuran pengetahuan objektif menunjukkan bahwa skor pengetahuan semakin meningkat dengan penambahan informasi yang diterima dalam perlakuan eksperimen. Pertambahan pengetahuan secara objektif ini konsisten dengan pengukuran perseptual pada variabel pengetahuan subjektif. Nilai rerata menunjukkan bahwa subjek penelitian juga mempersepsikan bahwa pengetahuan mereka semakin tinggi dengan bertambahnya informasi yang diterima. Selanjutnya, pengukuran persuasi juga menunjukkan bahwa persuasi yang dirasakan menjadisemakin kuat dengan bertambahnya informasi pertama yang diterima.

Peran iklan / advertorial dalam membentuk pengetahuan dan persuasi yang dirasakan.

Efek informasi terhadap tingkat pengetahuan dan persuasi dilakukan dengan memberikan stimulus berupa iklan audio visual dan advertorial cetak dengan dua sumber informasi. Kedua sumber komunikasi tersebut adalah iklan dari selebritis dari produsen dan iklan advertorial.

Hipotesis yang dikembangkan untuk menguji efek tersebut adalah:

H1: Eksposisi informasi berupa iklan audio visual atau advertorial cetak akan memberikan efek peningkatan pengetahuan individu yang berbeda.

H2: Sikap yang dirasakan individu lebih besar pada kelompok yang tereksposisi iklan/advertorial.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis uji beda dua rata-rata paired samples test pada variabel pengetahuan yang diukur sebelum dan setelah perlakuan.

Tabel 3. Perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan setelah mendapatkan informasi iklan / advertorial. (N = 200)

(Untuk keterangan Tabel dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Hasil pengujian (Tabel. 3) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pengetahuan sebelum dan setelah menerima eksposisi informasi baik pada pengujian seluruh kelompok yang menerima iklan audio visual maupun advertorial.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa perbedaan pengetahuan sebelum dan setelah menerima informasi tersebut tidak sama antara kelompok yang tereksposisi iklan audio visual dengan kelompok yang tereksposisi advertorial cetak.

(Tabel.4). Uji beda rata-rata pada analisis ini menunjukkan bahwa efek iklan audio visual untuk meningkatkan pengetahuan individu terbatas pada pengetahuan subjektif yaitu peningkatan pengetahuan yang dipersepsikan oleh subjek penelitian. Sebaliknya, advertorial dapat meningkatkan pengetahuan secara signifikan meliputi pengetahuan aktual maupun yang dipersepsikan oleh subjek.

Tabel .4 Uji beda tingkat pengetahuan sebelum dan setelah mendapatkan informasi pada kelompok eksperimen yang mendapat eksposisi iklan atau advertorial (Untuk keterangan Tabel dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Angka yang tercetak tebal menunjukkan perbedaan yang signifikan pada $p \leq 0,01$

Peran pengetahuan dalam membentuk persuasi yang dirasakan.

Pengetahuan yang tinggi membentuk persuasi yang lebih kuat dibandingkan dengan subjek dengan tingkat pengetahuan yang lebih rendah. Pengujian dilakukan dengan pearson product moment correlation variabel pengetahuan dan persuasi yang dirasakan. Hipotesis yang dikembangkan untuk melakukan pengujian ini adalah sebagai berikut :

H3: Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi membentuk sikap yang dirasakan lebih kuat dibandingkan dengan tingkat pengetahuan yang rendah.

Pengujian dilakukan dengan uji pearson product moment correlation variable pengetahuan terhadap persuasi yang dirasakan baik yang diukur setelah individu mendapat eksposisi dari iklan/advertorial maupun setelah individu mendapat eksposisi iklan pertamax.

Tabel 5: Uji korelasi variabel pengetahuan subjektif dan persuasi yang dirasakan (Untuk keterangan Tabel dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Angka yang tercetak tebal menunjukkan korelasi yang signifikan pada $p \leq 0,01$

Angka yang tercetak miring menunjukkan korelasi yang signifikan pada $p \leq 0,05$

Sumber : data primer diolah

Hasil pengujian statistik pada Tabel 6 menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara variabel pengetahuan subjektif dan persuasi yang dirasakan. Hubungan yang kuat tersebut konsisten terjadi baik pada tingkat pengetahuan subjektif setelah subjek menerima informasi dari iklan maupun advertorial dengan persuasi yang dirasakan dan antara tingkat pengetahuan subjektif yang terbentuk setelah menerima informasi kembali dari pertamax dengan tingkat persuasi yang dirasakan individu. Sebaliknya, peran tersebut tidak nampak dalam pengetahuan objektif dalam membentuk persuasi yang dirasakan. Hasil pengujian pada Tabel 4.38 menunjukkan bahwa korelasi pengetahuan objektif dengan persuasi yang dirasakan tidak signifikan baik pada pengukuran setelah perlakuan iklan/advertorial maupun setelah perlakuan pertamax.

Tabel 6. Uji korelasi variabel pengetahuan objektif dan persuasi yang dirasakan (Untuk keterangan Tabel dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dipersepsikan dimiliki individu memiliki keterkaitan dalam pembentukan persuasi yang dirasakan subjek dalam proses evaluasi informasi yang diterima individu tersebut. Artinya, persepsi diri bahwa individu memiliki pengetahuan yang baik akan disertai dengan pembentukan sikap positif terhadap suatu produk. Sebaliknya, pengetahuan actual yang tinggi dalam diri individu tidak selalu disertai dengan pembentukan sikap positif terhadap produk tersebut.

Efek persuasi yang dirasakan dalam pembentukan pengambilan keputusan.

Pengujian ini dilakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi peran persuasi yang dirasakan terhadap variabel pengambilan keputusan yaitu niat membeli. Hasil analisis dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel persuasi yang dirasakan berpengaruh signifikan pada niat membeli dengan besarnya kemampuan variabel persuasi yang dirasakan untuk menjelaskan variasi dalam niat membeli sebesar 51,70%.

H4: Sikap berpengaruh terhadap niat adopsi Pertamax.

H5: Niat berpengaruh terhadap adopsi Pertamax.

Tabel 7. Uji regresi linier pengaruh sikap yang dirasakan pada variabel pengambilan keputusan yaitu niat membeli.

(Untuk keterangan Tabel dapat menghubungi peneliti secara langsung)

Angka yang tercetak tebal menunjukkan perbedaan yang signifikan pada $p \leq 0,01$

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan studi perilaku konsumensebelumnya bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dengan menentukan proses akuisisi informasi. Dalam penelitian ini pengetahuan berpengaruh pada persuasi yang dirasakan yang merupakan proses pembentukan sikap terhadap produk dalam wujud pencarian informasi dan interpretasi atas informasi tersebut. Lebih lanjut, kajian peran stimulus eksternal dalam studi ini memberikan gambaran bahwa upaya untuk melibatkan lembaga non pemasar guna meningkatkan kredibilitas komunikasi pemasaran perlu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan profil konsumen potensial yang akan dicapai. Informasi yang lengkap dan akurat merupakan faktor penting dalam proses evaluasi produk yang terkait dengan adopsi bahan bakar minyak. Dengan demikian iklan video dan advertorial bukan merupakan suatu pilihan bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan secara terpisah. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran yang simultan meskipun tidak memberikan efek yang instan namun menjadi akumulasi pengetahuan dalam diri seseorang untuk dipergunakan kembali ketika melakukan informasi yang diterima lebih lanjut.

Saran

Berkaitan dengan tingkat kepercayaan subjek terhadap produsen dalam melakukan komunikasi pemasaran, kiranya perlu dilakukan studi untuk mempelajari kemungkinan adanya sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi produsen untuk melakukan penjaminan yang lebih baik atas kebenaran proses produksi produk kredens. Selain itu, penggunaan desain eksperimen laboratorium dalam studi ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengontrol variabel lain yang dapat menyebabkan confounding effects. Kondisi ini pada sisi lain menyebabkan lemahnya naturalitas dalam pelaksanaan penelitian sehingga pada akhirnya menyebabkan generalisasi hasil studi yang rendah. Pengujian hasil studi pada tingkat generalisasi yang lebih luas diperlukan dengan melakukan desain survei untuk meningkatkan validitas eksternal pengujian model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D.A; V. Kumar; and G.S. Day (2004), *Marketing Research*, 8th Ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Andrew, J. C., R. G. Netemeyer, and S. Burton (1998), "Consumer Generalization of Nutrient Content Claims in Advertising," *Journal of Marketing*, Vol. 62, October, 62-75.
- Assael, H, 1992, *Consumer Behavior and Marketing Action*, Fourt Edition, Boston: PWS-Kent Publishing Company
- Brucks, M. (1985), "The Effects of Poroduct Class Knowledgeon Information Search Behavior," *Journal of Consumer Research*, 12 (June), 1-16.
- Brunel, F. F. dan M. R. Nelson (2003), "Message Order Effects and Gender Differences in Advertising Persuasion," *Journal of Advertising Research*, September, 330-341.
- Cameron, G. T. (1992), "Feature Advertising: Policies and Attitudes in Print Media," *Journal of Advertising*, Vol. XXI, No 3 (September), 47-55.
- Child, N.M. and G. H. Poryzees (1998), "Foods that Help Prevent Disease: Consumer Attitudes and Public Policy Implications," *British Food Journal*, Vol. 100, No. 9, 419-426.
- Dalmeny, K. (2003), "Food Marketing: The Role of Advertising in Child Health," *Consumer Policy Review*, Vol. 13 (1), 2—7.

- Debevec, K., P. W. Meyers and K. K. Chan (1985), "The Effect of Knowledge and Imagery on Advertising Responses to an Innovation," *Advances in Consumer Research*, Vol. 12 (1), 273-278.
- Diener, B. J. (2001), "The Frequency and Context of Alcohol and Tobacco Cues in Daytime Soap Opera Programs: Fall 1986 and Fall 1991," *Journal of Public Policy and Marketing*, Vol. 12, No. 2, pp 252-257.
- Feder, R. A. (1997), "Depth Interviews Avoid Turmoil of Focus Groups," *Advertising Age*, Vol. 68 (16), 33-34.
- Fishbein, M. and I. Ajzen, 1980, *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction Theory and Research*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Hair JR., J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black (1995), "*Multivariate Data Analysis with Readings*," 4th edition, Prentice-Hall International, Inc.
- Ippolito, P. M. (1990), "Bonding and Nonbonding Signals of Product Quality," *Journal of Business*, Vol. 63, No. 1, 41-60.
- Ippolito, P. M. and A. D. Mathios (1990), "Information, Advertising and Health Choices: A Study of Cereal Market," *RAND Journal of Economics*, Vol. 21, No. 3, Autumn, 459-480.
- Kotler Philip, 2003, *Marketing Management*, Eleventh Edition, by Pearson Education, Inc Upper Saddle River, New Jersey
- Lautman, M. R. and S. Hsieh (1993), "Creative Tactics and Communication of a 'Good Taste' Message," *Journal of Advertising Research*, July/August, 11-19.
- Long, J. F., T. A. Holleran and E. Esterly (2001), "The Effectiveness of Persuasive Messages: Comparing Traditional and Computerized Texts," *Theory into Practice*, Vol. 40, No. 4, 265-269.
- Miller, C. K. and T. Russel (2003), "Knowledge of Dietary Supplement Label Information Among Female Supplement Users," *Patient Education and Counseling*, Vol. 52, 291-296.
- Neuman, W. L. (2000), "*Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*," 4th edition, Allyn and Bacon, Boston.
- Park, C. W. and W. J. Bahr (1980), "A Situational Analysis of Communication Effect: A New Product Purchase by Mail Order," *Advances in Consumer Research*, Vol. 7 (1), 650-654.
- Pechman, Cornelia and David W. Stewart (1990), The Effects of Comparative Advertising on Attention Memory, and Purchase Intentions, *Journal of Consumer Research*, 17 (Sept), 180-191.
- Sekaran, U. (1992), "*Research Methods for Business: A Skill Building Approach*," 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Yiannaka, A., K. Giannakas and K. C. Tran (2002), "Medium, Message and Advertising Effectiveness in the Greek Processed Meats Industry," *Applied Economics*, Vol. 14, 1757-1763.

Communicating CSR: between Reputation and Greenwashing

Prayudi

Abstract

This paper looks at how corporate should communicate its CSR activities. CSR is the continuing commitment of business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the working environment and their families and the local community and society in general. The result shows that corporate may use three CSR communication strategies: stakeholder information strategy, stakeholder response strategy and stakeholder engagement strategy. The fact that some corporate had communicate its CSR to strengthen its reputation at some point had resulted in the excessive reporting. This may lead to greenwashing communication.

Introduction

CSR has now become an integral part of corporate strategic policy. According to Illia et al (2013), CSR has been seen as the main business of the corporate, has become standard practice, with an increasing number of corporates who are involved in CSR activities.

Despite the fact above, the addition of Indonesian corporations implementing CSR indicates the rise understanding of the beneficial of doing good CSR. It is Asia's most prestigious recognition awards programme for Corporate Social Responsibility. The results of the 7th Annual Global CSR Awards 2015 are:

<p>The Most Inclusive Corporate for 2014-2015 PT Holcim Indonesia Tbk Best Community Programme Award</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platinum PT Holcim Indonesia Tbk - Gold Standard Chartered Bank, Indonesia Tenaga Nasional Interface, Inc - Silver PT Pertamina (Persero) Tbk PT Sampoerna Tbk - Bronze Asian Agri Best Environmental Excellence Award - Platinum PT Great Giant Pineapple Indonesia - Gold Maynilad Water Services, Inc TNB Janamanjung Sdn Bhd PT Holcim Indonesia Tbk - Silver APP PT Levi Strauss Indonesia - Bronze Oceana Gold Excellence in Provision of Literacy & Education - Platinum PT Trakindo Utama - Gold Samsung Asia Pte Ltd PT YTL Jawa Timur Sarawak Energy Berhad - Silver PT Bank CIMB Niaga Tbk Putera Sampoerna Foundation - Bronze Megaworld Foundation 	<p>Empowerment of Women Award</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platinum PT Bank Internasional Indonesia Tbk - Gold PT L'Oreal Indonesia PT Indosat Indonesia - Silver PT Donggi-Senoro LNG - Bronze Lafarge Cement Indonesia Best Workplace Practices - Platinum DHL Express Philippines Corporation - Gold PT L'Oreal Indonesia Oceana Gold - Silver Dubai Customs Bronze PT Trakindo Utama Product Excellence Award - Platinum PT Chandra Asri Petro-Chemical Tbk - Gold Ricoh Asia Pacific Pte Ltd PT Telkomsel Indonesia - Silver Proctor & Gamble - Bronze Bank Indonesia CSR Leadership - Platinum PT Adaro - Gold PT Sarihusada Petronas - Silver TNB Janamanjung Sdn Bhd - Bronze Pt Bumi Serpong Damai - Sinarmas Land
---	---

Source: <http://en.acnnewswire.com/press-release/english/20998/the-7th-annual-global-csr-summit-&-awards-confer-the-csr-awards-2015>

Given that the corporate is getting serious in developing CSR activities, the communication aspect plays an important role. The point is that CSR activities require communication at every stage. Even when the activities have been implemented, CSR teams need to communicate the outcome to relevant stakeholders.

However, in publicizing the achievements of CSR, especially if done excessively to build corporate reputation, corporate can risk achieving the opposite result. It is called the "boomerang response" as described by Robert K. Merton and Patricia L. Kendall in 1944. Given public distrust of the corporate is big enough, it makes sense for a corporate fear that

stakeholders will see attempts to communicate achievements of CSR as "greenwashing". It means that CSR communication is done as if corporate product is environmentally friendly. If so, how to communicate good CSR activities? This paper discusses the arguments why communication should be a core element of CSR policies and a variety of techniques how to communicate CSR, both at the stage of development of CSR strategy and implementation of CSR.

Why CSR Communications?

One aspect that must be considered in developing a CSR strategy is how to assure that CSR activities undertaken can be communicated to the relevant stakeholders. CSR strategy both takes time and involves many stakeholders. Therefore, it is very important to have short-term as well as long-term goals clear. The CSR strategy should be developed in line with the goals and plans for communicating your message when meeting with stakeholders. Without proper planning, your CSR communication will be ineffective and at worst it brings impact in damaging your corporate's image as a CSR leader.

The fact that negative news seems to spread faster than the positive ones can create the risk of communicating CSR seem larger than it actually is. Usually corporate only communicates CSR activities to particular stakeholder based on the necessity. There is a belief about the risks associated with overload CSR communication activities. Although it must be recognized that corporate communicate honestly about their activities has nothing to fear.

There are several reasons why CSR team need to communicate CSR activities:

1. Stakeholders are increasingly critical.
2. The form of accountability to stakeholders.
3. Well managed and non-excessive CSR communication will lead to the formation of a good corporate reputation.

Corporates that are aware of the importance of stakeholders for the long-term life of corporate will consistently build and maintain relationships with main stakeholders. Research shows the potential business benefits of internal and external communication activities of CSR (Maignan et al. 1999). Therefore, it takes a corporate communication ability to establish relationships with all stakeholders.

CSR Communication Strategy

Good CSR communication practice ensures that all stakeholders, both actively involved and those who will ultimately be affected, continuously and adequately informed, in addition to communicating with stakeholders at an early stage of CSR strategic planning. Many techniques can be used to build and maintain good communication.

According to Torfaen County Borough Council (TCBC) in the Revit Project (2006), the desired result of holding stakeholder engagement can be:

1. Increase of corporate reputation
2. Increase of personal relationship/work
3. Change in perception
4. Better communication channels
5. Promoting responsibility for action decision - active citizenship.
6. Understanding the purpose and direction of a project or program.
7. Early identification of issues, conflicts and benefits.
8. Bring up new ideas.
9. Preparation of a new formal partnership.
10. Increase social capital and / or a better service to the people.
11. The policy change.

12. Cost savings in the medium and long term.
13. Encourage local development and learning ability (people and organizations).
14. Support local goodwill that encourages ideas or new ideas.
15. Increasing the unity of population and strengthen shared identity.

Based on the research that I conducted in Indonesian oil corporate, communication is the key element of CSR strategic planning. CSR strategic planning, as I introduce in my book *The Handbook of Corporate Social Responsibility* in 2015, is known as the 4E CSR model. It basically consists of 4 stages: CSR explore, CSR engage, CSR execute and CSR evaluate.

Before determining CSR communication strategy, as part of CSR strategic planning, it is important to obtain the following information:

- Who are key stakeholders?
- What kind of information do they need and at what level of detail?
- What type and level of information is required?
- How often do they need the information?
- How often the necessary information from them?
- What is the most useful way for them to receive the information?
- What kind of feedback mechanisms needed to encourage them to respond and react?
- What tools need to be used to continuously monitor the effectiveness of communication?

In determining the best CSR communication, it is interesting to look at public relations model developed by Gruning and Hunt (1984). There are four models of public relations identified by Grunig and Hunt: press agency, public information, two-way asymmetric and two-way symmetrical models.

Table 1 briefly describes the comparison of four models with characteristics used include purpose of communication, nature of communication, model of communication, the nature of research, main character, organization that uses the model and estimation of user.

Table 1 Public Relations Models

Characteristic	Public Relations Models			
	Press Agency	Public Information	Two-way asymmetrical	Two-way symmetrical
Purpose	Propaganda	Dissemination of Information	Scientific persuasion	Mutual understanding
Nature of communication	One way, truth inessential	One way, truth important	Two way; imbalanced effects	Two way, mutual understanding
Communication model	Source → Rec.	Source → Rec.	Source → Rec. ← Feedback	Group → Group ←
Mature of research	little; 'counting house'	little; readability, readership	Formatif; evaluasisikap	Formatif; evaluation of understanding
Philosophical worldview	Asymmetrical	Asymmetrical	Asymmetrical	Symmetrical
Estimation used by organisation	15%	50%	20%	15%

Sumber: James E Grunig & Todd Hunt. 1984. *Managing Public Relations*. Holt Rinehart & Winston: Fort Worth. Hal: 22.

Although all four models emerged along with the development of public relations, in fact all four models are practiced by various organizations alternately until today. The use of models depends on the objectives to be achieved by the organization.

Based on three of the four models of public relations above, three CSR communication strategies can be developed: stakeholder information strategy, stakeholder response strategy and stakeholder engagement strategy (Morsing & Schultz, 2006: 325).

Grunig and Hunt's research (1984) showed that 50% of all corporates practiced one-way communication (public information) to their stakeholders, and only 35% practiced the process of two-way communication (two-way communication both asymmetric and symmetric two-way communication).

Tabel 2 describes 3 CSR communication strategies that can be developed: stakeholder information strategy, stakeholder response strategy and stakeholder engagement strategy.

	The stakeholder information strategy	The stakeholder response strategy	The stakeholder involvement strategy
Communication ideal: (Grunig & Hunt 1984)	Public information, one-way communication	Two-way asymmetric communication	Two-way symmetric communication
Communication ideal: sense-making and sensegiving:	Sensegiving	Sensemaking ↓ Sensegiving	Sensemaking ↕ Sensegiving – in iterative progressive processes
Stakeholders:	Request more information on corporate CSR efforts	Must be reassured that the company is ethical and socially responsible	Co-construct corporate CSR efforts
Stakeholder role:	Stakeholder influence: support or oppose	Stakeholders respond to corporate actions	Stakeholders are involved, participate and suggest corporate actions
Identification of CSR focus:	Decided by top management	Decided by top management. Investigated in feedback via opinion polls, dialogue, networks and partnerships	Negotiated concurrently in interaction with stakeholders
Strategic communication task:	Inform stakeholders about favourable corporate CSR decisions and actions	Demonstrate to stakeholders how the company integrates their concerns	Invite and establish frequent, systematic and pro-active dialogue with stakeholders, i.e. opinion makers, corporate critics, the media, etc.
Corporate communication department's task:	Design appealing concept message	Identify relevant stakeholders	Build relationships
Third-party endorsement of CSR initiatives:	Unnecessary	Integrated element of surveys, rankings and opinion polls	Stakeholders are themselves involved in corporate CSR messages

Tabel 2 Three CSR Communication Strategy

Sumber: Morsing, Mette & Majken Schultz. Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies. *Business Ethics: A European Review*. Vol. 15 No. 4. 2006: 326.

1. Stakeholder Information Strategy

Stakeholder information strategy, like Grunig & Hunt model of public information, communication is always one way, from the organization to stakeholders. Communication is basically seen as 'telling, do not listen' Grunig & Hunt, 1984: 23), and therefore the one-way communication of stakeholders information strategy have the purpose of disseminating information, not necessarily with the persuasive intent, but rather to inform the public as objective as possible about the organization.

Therefore, the corporate must inform the stakeholders about good intentions, decisions and actions to ensure the positive support of stakeholders. Some corporates engage in CSR initiatives as corporate managers believe that morally this is 'the right thing to do' (Paine 2001), and a genuine desire to improve social conditions in the local or global community to support their information stakeholders strategy. CSR team convince corporates that they have done the right thing and that they only need to inform the general public about what is done efficiently in order to build and maintain positive support of stakeholders.

One of the strategic tasks of stakeholder information strategy is to ensure that the decisions and actions of corporate CSR effectively communicated to corporate stakeholders. It is the task of public relations department to ensure that messages are delivered in an interesting way and the focus is on the design of draft messages (van Riel 1995), that the CSR

message conveys, for example, how the CSR initiatives demonstrate a generally shared concern, are linked to the core business and show organizational support (Scott & Lane 2000).

2. Stakeholder Response Strategy

Stakeholder response strategy is based on the model of 'two-way asymmetric' communication, as opposed to the two-way symmetric model of stakeholder engagement strategy. In both models, the communication flow to and from the public. But there are striking differences in which the model assumes a bidirectional asymmetrical imbalance of securities in favor of corporate public relations, because corporate unchanged as a result of building relationships with stakeholders. By contrast, corporate is trying to change the attitudes and behavior of stakeholders. It is because corporate needs to involve stakeholders in decision making process if it wants to obtain the support of external stakeholders.

Although this communication process is regarded as a two-way public relations model of Grunig and Hunt, Morsing & Schultz elaborating their model by emphasizing that the model stakeholder response strategy is still sender oriented (2006: 325). Stakeholder response strategy is the one-sided approach; corporates have the sole purpose of convincing stakeholders to corporate. Thus, although the dialogue or focus group discussion held by corporate, the priority goal is still for the beneficial of the corporate. Therefore, Morsing & Schultz highlighted the response of stakeholders than their proactive involvement in the communication process. Stakeholders are considered influential, but passively respond to corporate initiatives. In a corporate's attempts to understand stakeholder concerns in a CSR perspective, it runs the risk of only hearing its own voice being reflected back; the corporate asks its stakeholders questions within a framework that invites predominantly the answers it wants to hear.

3. Stakeholder Involvement Strategy

Stakeholder involvement strategy, by contrast, considers the importance of dialogue with stakeholders. Persuasion may occur, which is derived from both from corporate and stakeholders, each trying to persuade the other to change. Ideally, both corporate and stakeholders change as a result of engaging in two-way symmetrical communication model. Because stakeholder engagement strategy based on the notion of stakeholder relations, corporate should not only affect but also strive to be influenced by stakeholders and therefore corporate ready to change if necessary. Although in the context of CSR, there is the challenge of the extent to which corporate CSR policies should change when a CSR activity is being challenged by stakeholders. For example: the limited availability of funds contrast to the need of CSR activity will make CSR team to prioritize CSR activity to be run. This may lead to dissatisfaction of stakeholders and go on strike to get corporate attention.

By engaging in dialogue with stakeholders, the corporate ideally ensures that it keeps abreast not only of its stakeholders' concurrent expectations but also of its potential influence on those expectations, as well as letting those expectations influence and change the corporate itself (Morsing & Schultz, 2006: 328).

Ideally, of these 3 CSR communication strategies, stakeholder involvement strategy is the best strategy to be used by corporate as both CSR team and stakeholders collaborate to develop CSR strategic planning. Thus creating a harmonious relationship (mutual understanding) between corporate and its stakeholders can be realized. However, the fact indicates that there is a tendency for the corporate to use the three CSR communication strategies in turn. This is because the usage of communication strategy is influenced by the environment in which corporate operates or corporate level where interaction with stakeholders.

In order to determine which strategy to be used for what purpose, CSR team can use interest-influence matrix which is known as stakeholder engagement model. Based on this matrix, CSR team identifies the level of communication or engagement of stakeholders. Key

stakeholders for CSR activities are then to be put in quadrant 4. This matrix is described as follows:

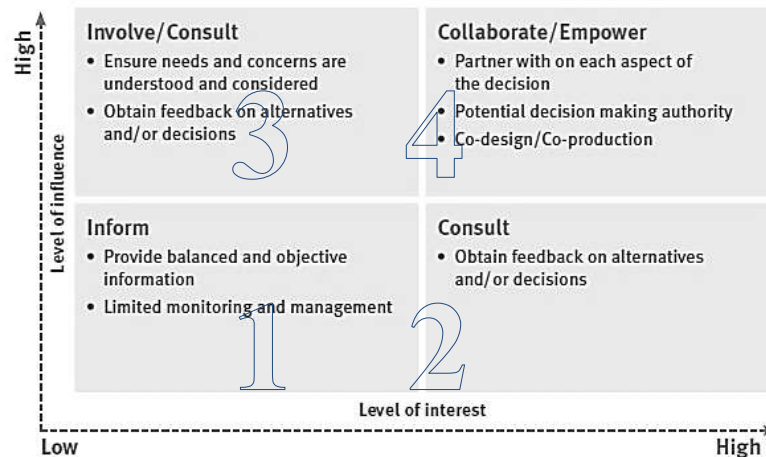


Figure 1. Stakeholder engagement model

Reputation survey conducted by Morsing & Schultz suggests that corporate's CSR initiatives are important for stakeholders (2006: 331). On the one hand, the survey showed that the corporate should concentrate on the development of an efficient one way communication of the corporate's CSR efforts. According to Grunig and Hunt (1984), this is the most preferred way to engage with stakeholders. This can be considered as 'greenwashing', namely the corporate action to build an impression in the mind of stakeholders as if they care about the environment or the community, which in fact they don't.

Avoid Greenwashing Communication

The increasing awareness of corporate in Indonesia to adopt CSR as part of their strategic policies is overwhelming. However, the booming of CSR practice and communication has resulted in excessive reporting of the activities at some point.

The rise of environmental concerns and the development of Corporate Social Responsibility (CSR) have led to a boom in green or social advertising. The image of multinational corporates working hard to make the World a better place is often just that - an image. This skepticism may be explained by the greenwashing phenomenon (Bazillier and Vauday, 2013).

Authors of the study titled "Beyond Good Deeds", Leighton et al. (2002) describe green washing as a lack of confidence or applicability of the information disclosed by the corporate. It only creates the impression of good conduct, but it is not so. From a systemic point of view it is the most irresponsible form of the behaviour which corporate can let to happen. Green washing works in several forms such as superficial claims of improvements without quantitative information, selective data that highlight the utility of one area, while others more important areas are ignored, and superficial or misleading verification by a third party. Typical instrument of the green washing is therefore abusing of annual reports, or misleading disclosure of information (Jurisova & Adrabou, 2012: 77).

Greenwashing took root in the 1970s concurrently with the emergence of environmental movements. A direct consequence of greenwashing is skepticism towards the ability of Corporate Social Responsibility to bring effective changes. When studying the economic effects of CSR, it is therefore crucial to take this problem of greenwashing into account, and to understand its implications.

In Indonesia, the cases of greenwashing activities may take the form as follow:

- a. Corporate funds the plantation of thousands of trees and leave them afterward.

- b. Copy paper with logo "green" on it as if this paper has been certified as eco-friendly paper, whereas the certification logo is made by the corporate itself.
- c. Corporate holds event such as concert or bazaar with "green" label, but many rubbish in the implementation (brochure, plastic bag, and Styrofoam) and high consume of electricity.
- d. Corporate holds event with "environment" theme but its product may endanger the environment itself.

For instance, an corporate, Aqua, Inturn, the corporate water to people of Timor, East Nusa Tenggara. Aqua has a CSR program called WASH and Hygiene Program) environment for pre-the WASH program, and continuously to problems related to One of the WASH for Ten". The massive meant to push the sale good image of the corporate massively as well printed media. CSR practice only took corporate didn't hold else.



Indonesia water bottling launched an ad in 2007. would contribute 10 liter of isolated village in mid-South Tenggara. Aqua has a CSR (Water Access, Sanitation, which aims to improve the prosperous society. Through Aqua contributes actively provide solutions to various water supply in Indonesia ". program is a program "One exposure of the ad was of the product as well as the corporate. In practice, the put ad in either TV stations As far as public knew, the place in one village and the the programme anywhere

Futerra, an international [sustainability](#) strategy and creative agency with offices in London, New York and Stockholm, released what they call 10 sins of greenwash as follow:

1. Fluffy language Words or terms with no clear meaning, e.g. 'ecofriendly'
 2. Green products v dirty corporate Such as efficient light bulbs made in a factory which pollutes rivers
 3. Suggestive pictures Green images that indicate a (un-justified) green impact e.g. flowers blooming from exhaust pipes
 4. Irrelevant claims Emphasizing one tiny green attribute when everything else is un-green
 5. Best in class? Declaring you are slightly greener than the rest, even if the rest are pretty terrible
 6. Just not credible 'Eco friendly' cigarettes anyone? 'Greening' a dangerous product doesn't make it safe
 7. Gobbledygook Jargon and information that only a scientist could check or understand
 8. Imaginary friends A 'label' that looks like third party endorsement except it's made up
 9. No proof It could be right, but where's the evidence?
 10. Out-right lying Totally fabricated claims or data
- (http://www.futerra.co.uk/downloads/Greenwash_Guide.pdf)

Based on the case above, corporate should carefully communicate what it claims to be CSR activities. Management of corporate should also know what considered being greenwashing activities.

Conclusion

The development of CSR practice in Indonesia experiences rapid development since the concept was raised in the early 2000s. Some corporates are already aware of the

importance of CSR being adopted in line with the corporate's core business. Some corporates even see CSR as part of a "social investment". In relation to CSR strategic planning and implementation, communication plays significant role.

In communicating CSR, three communication strategies can be used in turn: stakeholder information strategy, stakeholder response strategy and stakeholder engagement strategy. The key to successful CSR communication is by involving relevant stakeholder since at the CSR planning stage and wisely use the combination of communication strategy in implementing the program as well as reporting the outcome. It is expected that mutual understanding is formed as the consequence of good CSR communication that involves asymmetrical and symmetrical communication.

One thing that corporate must pay attention in communicating CSR is not falling into what is so called greenwashing communication. Some of the ways to overcome this is by involving stakeholder in the CSR decision making process and let them become the ambassador of corporate CSR. Corporate should not expose its CSR activities excessively as it may endanger corporate reputation.

Acknowledgment

I would like to thank to Institute of Research and Development at the University of Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta for providing me with fund and made my research on CSR possible.

Bibliography

- Bazillier, Remi & Julien Vauday. *The Greenwashing Machine : is CSR more than Communication.* DR LEO ; 2009-10. DR LEO, 2009-10. 2009. <hal-00448861v3>
- Greenwash Guide. Available at: www.futerra.co.uk/downloads/greenwashing_guide.pdf (accessed on 5 May 2015).
- Grunig, James E & Todd Hunt. 1984. *Managing Public Relations.* Florida: Holt, Rinehart, and Winston, Inc.
- Illia, Laura. *Communicating Corporate Social Responsibility to a Cynical Public.* MIT Sloan Management Review. Available at: <http://sloanreview.mit.edu/article/communicating-corporate-social-responsibility-to-a-cynical-public/> [accessed on 31 August 2015].
- Jurisova, V. & L. Adrabou Leighton, M., N. Roht-Arriaza & L. Zarsky. 2002. *Beyond Good Deeds: Case Studies and a New Policy Agenda for Corporate Accountability.* Nautilus Institute.
- Maignan, I., Ferrell, O.C. and Hult, G.T.M. 1999. 'Corporate citizenship: cultural antecedents and business benefits'. *Journal of the Academy of Marketing Science.* Vol. 27, No. 4. Hal 455–469.
- Merton, Robert K. & Patricia L. Kendall, "The Boomerang Response," in: Channels. Vol. XXI, No. 7 (June 1944). Patricia L. Kendall and Katherine M. Wolfe, *The Analysis of Deviant Cases in Communications Research.*
- Morsing, Mette & Majken Schultz. Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies. *Business Ethics: A European Review.* Vol. 15 No. 4. 2006: 323-338.
- Paine, L.S. 2001. *Value Shift: Why Corporates Must Merge Social and Financial Imperatives to Achieve Superior Performance.* New York: McGraw-Hill.
- Scott, S.G. & Lane, V.R. 2000. 'A stakeholder approach to organizational identity'. *Academy of Management Review.* Vol. 25. No. 1, 43–62.
- Torfaen County Borough Council. (2006). *Stakeholder Engagement-A Toolkit.* REVIT Project.
- Van Riel, C.B.M. 1995. *Principles of Corporate Communication.* London: Prentice-Hall.
- <http://en.acnewswire.com/press-release/english/20998/the-7th-annual-global-csr-summit-&-awards-confer-the-csr-awards-2015>

Mempercepat Masa Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta

Sri Suharsih, Astuti Rahayu, dan Joko Susanto

. Ringkasan

Panjang pendeknya masa studi mahasiswa sebagian besar ditentukan oleh lamanya masa penyusunan skripsi. Semakin lama masa penyusunan skripsi, semakin panjang pula masa studi mahasiswa. Selama ini mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan menyelesaikan skripsinya rata-rata dalam waktu 1 tahun (2 semester). Masa penyusunan skripsi ini melebihi target waktu yang ditentukan. Program Studi Ekonomi Pembangunan menargetkan masa penyusunan skripsi paling lama 6 bulan atau 1 semester. Skripsi dengan bobot 6 sks seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu maksimum 6 bulan. Lamanya masa penyusunan skripsi ini berdampak negatif pada nilai akreditasi program studi.

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab lamanya penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan dan merumuskan solusi untuk memperpendek masa penyusunan skripsi sesuai dengan target yang ditentukan. Subyek penelitian ini adalah keseluruhan alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta yang lulus pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang tersebar di berbagai kota. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan memberdayakan staf pengajar yang menjadi dosen pembimbing skripsi bagi alumnus bersangkutan. Dengan demikian diharapkan seluruh alumni akan bersedia mengisi kuesioner yang diterimanya. Penelitian ini akan memuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang faktor-faktor penghambat dalam penyusunan skripsi di Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta. Alat analisis dilengkapi dengan analisis regresi untuk menelaah faktor-faktor yang menentukan lamanya masa penyusunan skripsi, dan analisis SWOT untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalkan risiko yang dihadapi. Analisis SWOT dimulai dengan identifikasi aspek positif dan aspek negatif. Selanjutnya berdasar kategori faktor penghambat skripsi ini dilakukan penelaahan untuk dapat dicarikan solusinya.

Berdasar hasil penelitian dan masukan yang diberikan alumni, akan disusun rancangan pedoman pembimbingan skripsi dengan mempertimbangkan aspek mahasiswa, dosen dan cara pembimbingan skripsi. Rancangan tersebut diharapkan dapat memperbaiki proses pembimbingan skripsi dan menjadikan masa penyusunan skripsi sesuai dengan target yang diberikan oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan.

A. Pendahuluan

Salah satu pendukung keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang produktif merupakan modal dasar bagi pembangunan. Beberapa penelitian mendukung teori Becker's bahwa tingkat pendidikan berhubungan positif dengan produktivitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula produktivitasnya (de la Croix dan Vandenberghe, 2004). Faktor pendidikan merupakan kunci pokok bagi maju mundurnya suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi juga hanya dapat diraih melalui sinergi antara pengetahuan dengan tenaga kerja berpendidikan.

Sementara itu dari sisi demografi, maka struktur penduduk Indonesia semakin didominasi oleh penduduk berusia muda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 60 persen penduduk Indonesia berusia kurang dari 30 tahun. Jumlah penduduk berusia muda ini memerlukan pendidikan berkualitas agar mereka dapat menjadi tenaga kerja yang produktif. Tanpa adanya pendidikan yang memadai maka mereka tidak akan dapat menjadi

SDM yang tangguh dan berkualitas, akan tetapi mereka justru menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat secara umum. Untuk itu diperlukan kerja keras dari berbagai pihak untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan penduduk berusia muda.

Upaya peningkatan keahlian dan ketrampilan tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan pendidikan. Salah satu pihak yang memiliki peran dalam menghasilkan SDM yang berkualitas adalah Perguruan Tinggi (PT). Perguruan tinggi berkewajiban menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas lulusannya. Selanjutnya kemajuan suatu perguruan tinggi ditentukan oleh perkembangan dari program studi yang ada pada perguruan tinggi tersebut.

Sebagai salah satu program studi di UPNVY, maka program studi Ekonomi Pembangunan memiliki peran dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal tersebut telah tertuang dalam visi dan misi yang ingin dicapai oleh UPNVY dan program studi-program studi yang ada di dalamnya. Salah satu strategi yang dilakukan program studi Ekonomi Pembangunan untuk mencapai visi tersebut ialah menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pendidikan ekonomi untuk menghasilkan lulusan unggul.

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian visi tersebut ialah lama studi mahasiswa. Lama studi mahasiswa sebagian besar ditentukan dari lamanya masa penyusunan skripsi. Semakin lama masa penyusunan skripsi, maka semakin panjang pula masa studi mahasiswa. Rata-rata lama penyusunan skripsi program studi Ekonomi Pembangunan terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Rata-Rata Lama Penyusunan Skripsi Menurut Tahun Angkatan

No	Angkatan	Rata-Rata Lama Skripsi (Bulan)
1	2007/2008	12
2	2008/2009	12
3	2009/2010	14
4	2010/2011	9

Sumber : data Primer (diolah)

Berdasar Tabel 1, maka masa penyusunan skripsi mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan relatif lama. Mahasiswa angkatan 2007/2008 rata-rata menyelesaikan penyusunan skripsinya dalam waktu 12 bulan atau 2 semester. Hal yang sama terjadi juga pada mahasiswa angkatan 2008/2009 yang juga menyelesaikan penyusunan skripsinya dalam waktu 12 bulan. Rata-rata masa penyusunan skripsi justru menjadi lebih panjang bagi mahasiswa berikutnya (angkatan 2009/2010). Mereka memerlukan waktu 14 bulan untuk menyelesaikan penyusunan skripsinya. Adapun mahasiswa angkatan 2010/2011 mampu menyelesaikan skripsinya rata-rata dalam waktu 9 bulan.

Walaupun rata-rata masa penyusunan skripsi menjadi lebih pendek, akan tetapi masih lebih ini lama daripada target yang ditentukan. Program studi Ekonomi Pembangunan menargetkan masa penyusunan skripsi paling lama 6 bulan atau 1 semester. Hal ini berdasar pemikiran bahwa bobot skripsi hanya sebesar 6 sks sehingga seharusnya penyusunan skripsi dapat diselesaikan dalam waktu maksimum 6 bulan. Masa penyusunan skripsi yang relatif lama menyebabkan lamanya masa studi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan. Sementara itu, lamanya masa penyusunan skripsi juga tidak berkorelasi positif dengan hasil ujian skripsi. Hal ini berarti bahwa walaupun masa penyusunan skripsi relatif lama, tetapi tidak mampu menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik. Relatif lamanya masa

penyusunan skripsi menyebabkan lamanya masa studi. Mahasiswa tidak dapat lulus tepat waktu. Hal tersebut berdampak negatif pada nilai akreditasi program studi.

Nilai akreditasi menggambarkan proses pembelajaran yang terjadi pada suatu program studi. Nilai akreditasi yang tidak optimum (di bawah akreditasi A) mencerminkan proses pembelajaran yang belum optimum. Hal itu berarti masih terdapat sejumlah kekurangan yang timbul antara lain karena program studi belum dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Masih terdapat unit-unit kegiatan yang beroperasi di bawah kapasitas yang seharusnya. Hal ini merupakan suatu kerugian karena sebenarnya program studi tersebut mampu melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Guna mengoptimalkan kegiatan operasional program studi sesuai dengan kapasitasnya, maka perlu ditelaah permasalahan yang terjadi. Permasalahan merupakan perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang seharusnya dapat dicapai. Dari sisi tenaga pengajar, maka program studi Ekonomi Pembangunan memiliki SDM yang memadai. Program Studi ini didukung oleh sejumlah 5 orang dosen berpendidikan S_3 (dokter) dengan 1 orang guru besar (professor). Selain itu, semua dosen program studi Ekonomi Pembangunan sudah berpendidikan S_2 dan memiliki pengalaman kerja yang cukup. Dengan demikian seharusnya program studi Ekonomi Pembangunan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kinerja yang selama ini terjadi.

Dukungan SDM yang mencukupi sebenarnya memungkinkan program studi Ekonomi Pembangunan untuk mempersingkat masa studi mahasiswanya dengan memperpendek masa penyusunan skripsi. Untuk itu melalui penelitian ini akan ditelaah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan panjangnya masa penyusunan skripsi. Selanjutnya dalam penelitian akan dikaji faktor apakah yang menjadi penyebab lamanya masa penyusunan skripsi tersebut. Apakah dikarenakan faktor mahasiswa, dosen pembimbing atau sistem (prosedur dan tata aturan) yang selama ini terjadi. Selama ini kendala yang terjadi adalah bahwa proses penyusunan skripsi berlangsung secara individual sehingga tuntutan akan belajar mandiri sangat besar (Gunawati *et al*, 2006).

Apabila faktor penyebab lamanya masa penyusunan skripsi sudah teridentifikasi, maka akan dapat dicarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut sehingga masa penyusunan skripsi semakin singkat.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lamanya masa penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan.
2. Bagaimana solusi yang harus ditempuh agar masa penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan dapat diperpendek sesuai dengan target yang ditentukan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab lamanya penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan
2. Merumuskan solusi untuk memperpendek masa penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan target yang ditentukan.

D. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah keseluruhan alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta yang lulus pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang tersebar di berbagai kota. Hal ini berarti subyek penelitian adalah populasi alumnus Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta. Selanjutnya agar semua alumni bersedia memberikan data dan keterangan yang perlukan, maka Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta akan mengirimkan kuesioner kepada alumni melalui staf pengajar yang menjadi dosen pembimbing skripsi bagi alumnus bersangkutan. Kuesioner tersebut dikirim melalui surat elektronik (email) kepada alumni berdasar data base yang ada atau menghubungi alumni melalui telepon. Dengan demikian seluruh alumni akan bersedia mengisi kuesioner yang diterimanya.

2. Variabel Penelitian

Variable penelitian akan mencakup faktor-faktor yang terkait dengan penyusunan skripsi yaitu materi skripsi (termasuk penentuan judul/topik skripsi), keaktifan mahasiswa, peran dosen pembimbing skripsi, proses/cara pembimbingan skripsi, pengambilan data skripsi dan penyusunan hasil penelitian/skripsi dalam bentuk artikel untuk dapat dimuat pada jurnal ilmiah. Penentuan masa penyusunan skripsi dihitung sejak pengumuman penentuan dosen pembimbing skripsi sampai pelaksanaan ujian skripsi (dinyatakan dalam satuab bulan). Data masa penyusunan skripsi diambil dari data base Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta

3. Alat Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dari sisi deskriptif, penelitian ini akan memuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang faktor-faktor penghambat dalam penyusunan skripsi di Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta. Terhadap berbagai faktor penghambat dilakukan pengkategorian sehingga dapat dilakukan pengelompokan. Selanjutnya berdasar kategori faktor penghambat skripsi ini dilakukan penelaahan untuk dapat dicarikan solusinya. Solusi tersebut diwujudkan dalam suatu strategi atau kebijakan untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif dari faktor-faktor penghambat skripsi.

Selanjutnya analisis penyebab lamanya penulisan skripsi akan diwujudkan dalam suatu model regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan masa panjang pendeknya masa penyusunan skripsi. Model analisis dituangkan dalam model regresi dengan variable dependen masa penyusunan skripsi dan variable independen yang mencakup unsure keaktifan mahasiswa, peran dosen pembimbing dan cara/metode pembimbingan.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan

Y adalah masa penyusunan skripsi

X₁ adalah keaktifan mahasiswa

X₂ adalah peran dosen pembimbing skripsi

X₃ adalah cara/metode pembimbingan.

e adalah residual

Selanjutnya setelah faktor penyebab lamanya penyusunan skripsi dapat dideteksi, maka perlu dirumuskan strategi untuk mengatasinya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Upaya tersebut akan dirumuskan berdasar hasil analisis *SWOT*. Analisis *SWOT* dimulai dengan identifikasi aspek positif yaitu kekuatan program studi dan aspek negatif yaitu kelemahan program studi. Dari eksternal organisasi dilakukan identifikasi peluang dan ancaman. Peluang mencakup semua aspek baik dari mahasiswa, aturan dan unsure kelembagaan yang memungkinkan dilakukannya upaya untuk memperpendek masa penyusunan skripsi. Adapun ancaman meliputi semua aspek yang

mengganggu mahasiswa dalam menyusun skripsi. Berdasarkan identifikasi tersebut, disusun beberapa strategi (Rangkuti, 2002):

- (1). Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Strategi S-O);
- (2). Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (Strategi W-O);
- (3). Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Strategi S-T);
- (4). Mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman (Strategi W-T).

E. Hasil Penelitian Sementara

Dengan menggunakan model regresi sederhana terhadap 30 sampel sementara (sampel yang direncanakan 60) alumni Prodi Ekonomi pembangunan berbagai tahun angkatan masuk di peroleh hasil sebagai berikut :

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 09/12/15 Time: 11:27

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.09393	3.164607	3.189631	0.0037
X1	-0.353958	0.178337	-1.984768	0.0578
DA	0.645973	3.038540	0.212593	0.8333
DT	3.202634	1.819037	1.760620	0.0901
R-squared	0.200760	Mean dependent var	6.183333	
Adjusted R-squared	0.108540	S.D. dependent var	5.225078	
S.E. of regression	4.933369	Akaike info criterion	6.153487	
Sum squared resid	632.7913	Schwarz criterion	6.340313	
Log likelihood	-88.30231	F-statistic	2.176973	
Durbin-Watson stat	1.463612	Prob(F-statistic)	0.114833	

Dari hasil regresi telah dilakukan terlihat bahwa variabel X_1 (keaktifan mahasiswa) probabilitasnya 0.057 maka terdapat pengaruh signifikan dari X_1 terhadap Y pada tingkat kepercayaan 90% dan pengaruhnya variabel keaktifan mahasiswa (X_1) adalah negatif. Nilai koefisien keaktifan mahasiswa sebesar -0.353958 menunjukkan bahwa semakin mahasiswa aktif melakukan bimbingan maka masa penyusunan skripsi akan menurun/berkurang sebesar 0,35 bulan. Dengan demikian semakin mahasiswa aktif melakukan bimbingan masa penyusunan skripsi akan lebih cepat 0,35 bulan dibandingkan mahasiswa yang tidak aktif melakukan bimbingan.

Variabel Peran Dosen pembimbing (X_2) memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan nilai probabilitasnya 0.83, artinya bahwa variabel X_2 (peran dosen pembimbing) tidak berpengaruh terhadap Y = masa penyusunan skripsi mahasiswa .

Variabel X_3 = metode bimbingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masa penyusunan skripsi mahasiswa dengan nilai probabilitas 0.09 artinya variabel X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Variabel X_3 merupakan variabel dummy sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan masa penyusunan skripsi mahasiswa berdasarkan teknik bimbingan dosen. Teknik bimbingan dosen yang menyenangkan akan mempercepat masa penyusunan skripsi mahasiswa dibandingkan dengan teknik bimbingan dosen yang tidak menyenangkan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- de la Croix, D. and Vandenberghe, V. (2004). "*Human capital as a factor of growth and employment at the regional level. The case of Belgium, Report for the European Commission*". DG for Employment and Social Affairs, Brussels.
- Gunawati, Rindang, Sri Hartati dan Anita Listiara, 2006, Hubungan Antara Efektivitas Komunikasi Mahasiswadosen Pembimbing Utama Skripsi Dengan Stres Dalam Menyusun Skripsi Pada Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro Vol.3* (2).
- Rangkuti, Fredy, 2002 Analisis SWOT: Teknik membedah Kasus Bisnis Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

ANALISIS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM JALAN MALIOBORO-AHMAD YANI KOTA YOGYAKARTA (BULAN SEPTEMBER 2015)

Astuti Rahayu, Sumarjono dan Sri Suharsih
Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
UPN "Veteran" Yogyakarta

BSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi riil retribusi parkir tepi jalan umum Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani Kota Yogyakarta serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan retribusi parkir. Dengan menggunakan data primer jumlah dan jenis kendaraan yang parkir serta panjang ruas jalan dan menggunakan rumus analisis potensi retribusi parkir menunjukkan bahwa potensi riil retribusi parkir di Jalan utama Malioboro dan Jalan Ahmad Yani Kota Yogyakarta sebesar 758,8 juta (tarif perda) dan 514 juta (tarif lapangan).

Kata kunci: Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Potensi Riil.

A. Latar Belakang

Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki perkembangan yang sangat pesat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesatnya perkembangan kota Yogyakarta sebagai Kota tujuan pendidikan dan tujuan wisata tersebut menyebabkan besarnya distribusi arus lalu lintas. Besarnya distribusi arus lalu lintas tersebut menambah permintaan peningkatan pelayanan lalu lintas, tempat-tempat yang tingkat lalu lintasnya tinggi di Kota Yogyakarta. Salah satu wilayah yang mempunyai tingkat lalu lintas tinggi adalah Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani. Pada kedua jalan tersebut diperlukan pengendalian lalu lintas. Salah satu pengendalian lalu lintas adalah dengan menyediakan fasilitas parkir yang baik dan memadai.

Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik yang memanfaatkan badan jalan maupun di luar badan jalan sangat penting untuk ditata, mengingat tempat-tempat yang mendatangkan kegiatan orang banyak sangat dibutuhkan fasilitas parkir karena setiap orang cenderung ingin memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan maupun untuk mencapai tempat kegiatan. Untuk itu dalam menggunakan ruang parkir setiap orang akan memilih lokasi parkir yang mempunyai aksesibilitas dan mempunyai jarak sedekat-dekatnya dengan tujuan sehingga tidak perlu terlalu jauh berjalan kaki. Sehubungan dengan kecenderungan tersebut, dan dilain pihak terbatasnya ruang yang tersedia maka secara otomatis ruas jalan sering kali digunakan sebagai ruang parkir. Hal ini menyebabkan terganggunya fungsi jalan seperti kemacetan, berkurangnya aksesibilitas, kecelakaan dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka diperlukan manajemen parkir. Dengan manajemen parkir yang baik, penyebab terganggunya fungsi jalan akan dapat diatasi. Disisi lain dengan adanya manajemen parkir akan mendukung optimalisasi penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

Realisasi penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum signifikan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir TJU adalah belum adanya manajemen parkir TJU yang baik pada kawasan yang mempunyai arus lalu lintas tinggi seperti Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani.

Belum signifikannya kontribusi retribusi parkir TJU terhadap retribusi daerah di Kota Yogyakarta serta tingginya arus lalu lintas di Kawasan yang mempunyai arus lalu lintas tinggi seperti Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani sangat menarik untuk dilakukan kajian

terutama kajian mengenai potensi retribusi parkir TJU. Kajian yang dilakukan terutama berkaitan dengan jumlah juru parkir dan potensi retribusi pada kawasan tersebut, serta permasalahan maupun hambatan dalam upaya optimalisasi pendapatan retribusi parkir TJU dalam peranannya terhadap retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berapakah potensi retribusi parkir di tepi jalan umum jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Menghitung dan menganalisis potensi retribusi parkir di tepi jalan umum jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi sumbangan ilmiah terhadap penelitian – penelitian lainnya yang terkait dengan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Yogyakarta maupun di Kabupaten lainnya.
2. Bisa memberikan sumbangan pemikiran ataupun ilmu pengetahuan pada bidang keuangan daerah serta memberikan arah kebijakan di bidang optimalisasi potensi retribusi daerah khususnya retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Yogyakarta.

E. Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (2001) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.

Menurut Davey (1988:31), pengertian retribusi secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dari penerimaan yang sudah umum dan menjadi sumber utama dari pendapatan untuk pembangunan daerah.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012, retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

1. Definisi Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996, 1).

- a. Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir (Warpani, 1992;176).
- b. Jangka waktu parkir (*parking duration*) adalah lama parkir suatu kendaraan untuk satu ruang parkir (Edward, 1992;176).

2. Jenis Parkir

Lalu – lintas baik yang bergerak pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini menurut penempatannya dibedakan menjadi (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998) :

- a. Parkir di jalan (*on street parking*)
 1. Parkir di daerah perumahan
 2. Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*)
 3. Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)
 - b. Parkir diluar jalan (*off street parking*)
 1. Pelataran parkir
 2. Gedung parkir bertingkat
3. Parkir di Jalan (*on street parking*)
 Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan.
4. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini (sebagai Retribusi Jasa Umum) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya diatas meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tarif retribusi parkir di tepi jalan umum, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Struktur dan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan (*Untuk Tabel Lebih Jelasnya Dapat Menghubungi Penulis Langsung*)

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif, karena mendeskripsikan potensi dan permasalahan – permasalahan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Yogyakarta.

Untuk mencapai tujuan penelitian potensi retribusi parkir tepi jalan umum ini akan menggunakan data primer maupun data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan
2. Pra survei
3. Pengamatan langsung
4. Dokumentasi
5. Wawancara

Sementara itu, data sekunder dari beberapa penerbitan, antara lain dari Badan Pusat Statistik, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, serta publikasi dari berbagai pihak yang relevan.

Alat Analisis Potensi

Dalam kasus retribusi, harga ditunjukkan oleh besarnya tarif sementara kuantitas sama dengan basis/dasar pengenaan (Mahfatih, 2010, 143:145) yaitu:

Potensi Penerimaan Retribusi = Tarif x Basis.....(1)

Dalam konteks retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum maka,

Potensi Retribusi Parkir TJU = Tarif x tingkat penggunaan jasa.....(2)

Mengadopsi dasar pemikiran persamaan (1) dan (2), alternatif metodologi yang dapat digunakan untuk mengukur potensi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

$$\left[\left(\frac{PLP4}{SKP4} \times SJ4 \times \frac{AWP}{AWP4} \times TR \right) + \left(\frac{PLP2}{SKP2} \times SJ2 \times \frac{AWP}{AWP2} \times TR \right) \right] \times \left[\sum \text{aktivitas parkir sebulan} \times 1 \right]$$

Dimana:

PLP4 = Panjang ruas jalan untuk lahan parkir kendaraan roda empat

PLP2 = Panjang ruas jalan untuk lahan parkir kendaraan roda dua

AKP4 = Rerata lahan yang dibutuhkan per kendaraan roda empat

AKP2 = Rerata lahan yang dibutuhkan per kendaraan roda dua

SJ4 = Banyak sisi jalan untuk lahan parkir kendaraan roda empat

SJ2 = Banyak sisi jalan untuk lahan parkir kendaraan roda dua

AWP = Rerata waktu penggunaan ruas jalan untuk parkir dalam sehari

AWP4 = Rerata waktu parkir kendaraan roda empat

AWP2 = Rerata waktu parkir kendaraan roda dua

TR = Tarif retribusi

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***Deskripsi Wilayah Penelitian*

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu – satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten.

Kota Yogyakarta terletak ditengah – tengah Povinsi DIY, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- b. Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- c. Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- d. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110°24'19'' sampai 110°28'53'' Bujur Timur dan 7°15'24'' sampai 7°49'26'' Lintang Selatan dengan ketinggian rata – rata 114 m diatas permukaan laut.

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luasnya wilayah Provinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata – rata 13.177 jiwa/Km².

2. Obyek Penelitian

Pada lokasi penelitian ini peneliti mengambil 32 titik parkir sebagai obyek penelitian. Adapun titik parkir pada jalan Malioboro-Ahmad Yani adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Obyek Penelitian

(Untuk Tabel Lebih Jelasnya Dapat Menghubungi Penulis Langsung)

Dari ke 32 titik parkir yang diambil ada 28 titik parkir motor dan 4 titik parkir mobil. Dalam sehari parkir dibagi menjadi 2 shift, 08.00 – 16.00 dan 16.00 – 22.00. dalam sekali jam kerja / shift wajib menyetor ke UPT langsung atau memberikan ke atas nama lahan parkir. Khusus parkir motor disetorkan ke UPT dan parkir mobil diserahkan ke Dinas Perhubungan.

Pada tabel dapat dilihat lahan parkir depan Mall adalah lahan yang paling panjang dibandingkan lahan yang lain. Dari hasil wawancara bahwa sewa lahan yang ditentukan berdasarkan luas lahan dan kepadatan parkir. Dalam seminggu diadakan survey menunjukkan di parkir motor jam kerja 08.00 – 16.00 setiap harinya depan Bank Jogja dan Depan Greja selalu padat sedangkan untuk jam kerja 16.00 – 22.00 depan Mall dan depan Gereja. Lahan parkir mobil siang malam paling padat adalah Jalan perwakilan. Rata – rata waktu parkir setiap pengunjung adalah 2 jam. Tidak semua lahan parkir digunakan oleh pengunjung malioboro, ada pedagang dan pegawai toko – toko sekitarnya yang ikut parkir. Tarif yang dikenakan oleh pengunjung dan pedagang berbeda ada yang sesuai dengan peraturan ada juga yang diatasnya.

Selanjutnya dari olah data pada tabel 2 akan diolah lagi untuk mendapatkan hasil potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, sebagai berikut :

Tabel 3. Potensi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

(Untuk Tabel Lebih Jelasnya Dapat Menghubungi Penulis Langsung)

Hasil penerimaan diatas adalah hasil apabila semua kendaraan membayar sesuai dengan peraturan pemerintah dengan total Rp 758,880,405. Dan hasilnya pun sama dengan penjelasan sebelumnya semakin padat lahan parkir makan penerimaan juga semakin tinggi. Dengan tingkat penerimaan tinggi yaitu B2 di depan mall dan C5 di samping gereja. Proporsi penerimaan roda 4 tidak lebih dari 20% dari total penerimaan selama sebulan.

Pada tabel 3 peneliti mengubah tarif sesuai keadaan dilapangan, dan selanjutnya akan dihitung potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang sebenarnya, sebagai berikut :

Tabel 4. Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

(Untuk Tabel Lebih Jelasnya Dapat Menghubungi Penulis Langsung)

Hasil tabel adalah penerimaan selama sebulan dengan kondisi yang ada di lapangan sebesar Rp 514,527,657. Totalnya dibawah dari total yang pemerintah harapkan sebab becak dan andong tidak memberikan pajak parkir sesuai yang diharapkan pemerintah. Kontribusi becak dan andong kedalam pendapatan ternyata bernilai lebih dari Rp 200,000,000.

Perbandingan hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum antara tarif sesuai perda dengan tarif sesuai lapangan sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan Hasil Tarif Perda dan Tarif Lapangan

(Untuk Tabel Lebih Jelasnya Dapat Menghubungi Penulis Langsung)

Dari tabel 5 dapat dilihat perbandingan antara penerimaan retribusi apabila sesuai dengan tarif perda sebesar Rp 758.880.405, sedangkan penerimaan dari hasil tarif lapangan menurun menjadi sebesar Rp 514.527.657.

Adanya perbedaan hasil olah data penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Jalan Malioboro-Ahmad Yani ini karena pada saat melakukan olah data peneliti menerapkan 2 tarif yang berbeda, tarif perda dan tarif lapangan. Pada tabel diatas potensi penerimaan retribusi parkir selama sebulan apabila tarif sesuai dengan perda sebesar Rp 758.880.405, namun pada saat peneliti melakukan survei selama satu minggu untuk memastikan keadaan dilapangan masih terdapat juru parkir yang menerapkan tarif tidak sesuai perda, sebagai contoh untuk kendaraan bermotor roda dua tarif yang dikenakan sebesar Rp2000 padahal apabila sesuai perda tarif kendaraan tersebut sebesar Rp1000. Selain itu, untuk andong dan becak yang parkir di sepanjang Jalan Malioboro-Ahmad Yani seluruhnya tidak dikenakan tarif sedikit pun, alasan dari juru parkir saat wawancara adalah karena “*sama – sama wong cilik jadinya tidak usah bayar parkir*”. Untuk kendaraan bermotor roda 4 seperti taksi juga termasuk jarang bayar parkir, bahkan mobil – mobil yang parkir diluar Hotel Mutiara 1 dan 2 juga sering tidak dikenai tarif parkir.

Hal – hal seperti itulah yang membuat penerimaan retribusi parkir yang seharusnya bisa maksimal, tapi justru banyak kehilangan hingga mencapai ratusan juta pada lokasi Jalan Malioboro-Ahmad Yani.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Obyek yang diambil pada penelitian ini adalah Jalan Malioboro-Ahmad Yani, dengan jumlah 32 titik parkir. Jumlah kendaraan becak yang paling banyak parkir di tepi jalan umum selama satu minggu terdapat pada subsektor C1 (Jalan Perwakilan/depan Hotel IBIS) sebanyak 351 becak, jumlah andong yang paling banyak parkir selama satu minggu terdapat pada subsektor A1 (Depan Hotel Garuda 1) dan C5 (samping Gereja) sebanyak masing – masing 33 Andong, untuk jumlah kendaraan bermotor roda 2 yang parkir di tepi jalan umum selama satu minggu adalah subsektor B2 (Mall Malioboro) sebanyak 4233 kendaraan, dan untuk kendaraan bermotor roda 4 terdapat pada subsektor C1 (Jalan Perwakilan) sebanyak 446 kendaraan. Dengan melakukan penelitian tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Jalan Malioboro-Ahmad Yani dapat diketahui bahwa potensi retribusi parkir di tepi jalan umum sebenarnya adalah sebesar Rp 514.527.657.

2. Saran

Meningkatkan kontrol dan monitoring terhadap juru parkir serta meninjau ulang karcis parkir yang digunakan sebagai bukti terjadinya transaksi terhadap pemanfaatan ruang parkir dan bukti penerimaan retribusi. Melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap tindakan juru parkir yang mengambil biaya parkir diluar tarif yang berlaku. Mengupayakan penegakan hukum untuk mengurangi premanisme/juru parkir liar yang tidak jujur serta dengan peningkatan perparkiran yang persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, T Marcus and Dare, H William (2002), "Identifying Determinants of Horizontal Tax Inequity Evidence fro Florida", **JRER**, Vol 24. No,2
- Jufrizen (2013), "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat Pusat Perbelanjaan Kota Medan, **Jurnal Manajemen & Bisnis**, Vol 13 No. 01 April 2013 ISSN 16937619
- Musgrave, RA and Musgrave PB (1989), *Public Finance in Theory ang Practice*, fifth Edition, Mc Graw Hill Book Company, New York
- Karseno AR, Akhmad Makhfatih, dan Catur Sugiyanto (1995), " Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Pembangunan I dalam Rangka Peningkatan PAD (Studi Kasus daerah Tujuan Wisata)", **Hasil penelitian**, BPEKBAKM Depkeu dan PAU-SE UGM, Yogyakarta
- Makhfatih A (2001), "Penghitungan Potensi PAD (kasus Retribusi Pasar) Kota Kulon Progo", **Hasil penelitian**, PSEKP UGM, Yogyakarta
- Makhfatih A (2003), "Studi Penghitungan Potensi pendapatan Terminal Kota Kulon Progo", **Hasil Penelitian**, PSEKP UGM, Yogyakarta
- Makhfatih A dan Purwanto BM (2004), "Studi Penghitungan Pajak Reklame Luar Ruang di Kota Surakarta", **Hasil Penelitian**, PAU-SE UGM, Yogyakarta
- Makhfatih A (2007), "Studi Penghitungan Potensi Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Kota Kulon Progo", **Hasil Penelitian**, PSEKP UGM, Yogyakarta
- Mardiasmo (2000), "Penghitungan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Magelang", **Hasil Penelitian**, PAU-SE UGM, Yogyakarta

- Patunrangi, Junrair (2008), Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir (Studi Kasus: Pusat Pertokoan Hasanuddin), **Jurnal SMARTek**, Vol. 6, No. 4, Nopember 2008: 193 - 203
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (2013), Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Diklatpim Tingkat IV Angkatan I
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**KOMUNIKASI KESEHATAN DAN PROGRAM GENERASI BERENCANA
(Studi Program Generasi Berencana di Pusat Informasi dan Konseling/PIKM
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Retno Hendariningrum
Subhan Afifi
Senja Yustitia**

**Prodi Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta
Email : retno_hendari@yahoo.com.sg;
Telp. 0811283741**

Abstract

Komunikasi kesehatan merupakan studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Remaja adalah masa penuh paradoks, secara biologis dapat menjadi ayah atau ibu tapi belum dewasa secara psikologis dan mental. Dalam konteks generasi berencana, besarnya arus globalisasi informasi yang tidak untuk mengetahui strategi komunikasi kesehatan melalui pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) di BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program generasi berencana (GenRe) merupakan suatu program yang sesuai untuk menyiapkan masa depan remaja. Tujuannya untuk terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko narkoba dan penularan HIV/AIDS, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Pelaksanaan program genRe melalui PIKM Jari Mulia, PIKM Laras Hati, dan PIKM UKESMA dilakukan melalui pemberdayaan mahasiswa yakni, aksi donor darah, curhat remaja, debat pengetahuan kesehatan reproduksi dan masalah kesehatan, Kartini's Day, PIKM Goes to School, Pos Yandu lansia, Pos Yandu balita, Layanan Konseling Mahasiswa. Kesemua aktivitas tersebut adalah untuk mengisi dan menyiapkan masa remaja yang kesemuanya bermuara terwujudnya Tegar Remaja.

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No.52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga memberi tanggungjawab pengendalian penduduk di Indonesia kepada BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pasal 54 UU RI No. 52/2009 tersebut mempertegas peranan BKKBN dalam upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan factor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; BKKBN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB).

Dalam perkembangan program KB menjadi Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), maka program Pembinaan Ketahanan Remaja yang pada RPJMN 2004 – 2009 dinamakan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) berkembang menjadi Program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Program GenRe dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perhatian pemerintah terhadap permasalahan remaja yang ada di Indonesia. Program GenRe perlu dikembangkan karena program ini memberikan informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga, serta memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga.

Jumlah remaja yang besar bisa menjadi aset bangsa sekaligus juga masalah bila tidak dilakukan pembinaan dengan baik. Ditambah lagi arus informasi yang tidak terkendali akan juga berdampak positif dan negatif bagi remaja. Kedua hal diatas apabila tidak dikendalikan dan dibina oleh pemerintah akan melahirkan remaja-remaja Indonesia yang berperilaku hidup tidak sehat dan tidak berakhlak. Perilaku hidup seperti ini tentunya akan mempengaruhi program Kependudukan dan KB secara umum, karena tentunya permasalahan kependudukan tidak hanya berbicara tentang kuantitas, akan tetapi juga kualitas manusianya. Kualitas manusia Indonesia 10-20 tahun ke depan akan dipengaruhi dari kualitas remaja saat ini. Pembinaan remaja perlu dilakukan melalui dua sisi, disatu sisi pembinaan dilakukan untuk membantu remaja menghadapi tantangan hidup masa sekarang. Disisi lain pembinaan perlu juga dilakukan kepada remaja dalam mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Pembinaan dua arah ini perlu dilakukan secara bersinergis. Remaja yang terganggu kehidupannya saat ini, misalnya terganggu oleh risiko TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS, NAPZA), maka kehidupan masa depannya pun akan terganggu baik dari segi kesehatan ataupun psikologisnya.

Komunikasi Kesehatan

Mengapa komunikasi sebagai sesuatu yang dilakukan sehari-hari perlu dipelajari? Semua karena terdapat beberapa kegagalan dalam pekerjaan atau karier karena kegagalan dalam berkounikasi. (Mulyana, 2003:3-4) Komunikasi kesehatan secara konseptual adalah hubungan antara "komunikasi" dengan "kesehatan", sehingga konsep komunikasi memberikan peranan pada kata yang mengikutinya. (misalnya komunikasi bisnis, komunikasi cultural, komunikasi gender dsb).

Menurut Northhouse and Northhouse (dalam Notoatmodjo, 2010:147-148) komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar manusia yang berfokus pada bagaimana seorang individu dalam suatu kelompok/masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatannya. Fokus dalam komunikasi kesehatan adalah "transaksi" spesifik pada isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan dan factor-faktor yang mempengaruhi transaksi tersebut. Transaksi yang berlangsung antar ahli kesehatan dan antara ahli kesehatan dengan klien merupakan perhatian utama dalam komunikasi kesehatan. Transaksi tersebut berlangsung baik "verbal" maupun "non verbal", "lisan" atau "tulisan", personal atau impersonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Komunikasi Kesehatan merupakan aplikasi dari konsep dan teori komunikasi dalam transaksi yang berlangsung antar individu/kelompok terhadap isu-isu kesehatan.

Beberapa deksripsi dari Liliweri (2011:45-48) bisa dikutip untuk menjelaskan definisi komunikasi kesehatan, yaitu :

1. Studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarkan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan

komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan.

2. Studi yang menekankan peranan teori komunikasi yang dapat digunakan dalam penelitian dan praktik yang berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan.
3. Pendidikan kesehatan yakni suatu pendekatan yang menekankan pada usaha mengubah perilaku kesehatan secara luas agar mereka mempunyai kepekaan terhadap masalah kesehatan
4. Proses kemitraan antara para partisipan berdasarkan dialog dua arah yang di dalamnya ada suasana interaktif, ada pertukaran gagasan, ada kesepakatan mengenai kesatuan gagasan mengenai kesehatan, juga merupakan teknik dari pengirim dan penerima untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan yang seimbang demi memaharui pemahaman bersama.

Program Komunikasi Kesehatan

Program komunikasi kesehatan merupakan upaya promosi yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang didesain untuk tujuan jangka panjang agar terjadi perubahan perilaku yang "lestari" pada kelompok sasaran. Agar upaya komunikasi kesehatan lebih efektif, menurut Notoatmojo (2010:159-160) maka dianggap perlu mengadopsi strategi yang digunakan oleh upaya komunikasi produk komersial. Keberhasilan upaya komersial terletak bukan pada anggaran yang besar, tetapi lebih ditentukan oleh langkah-langkah penting yang strategis. Secara umum stratgi komunikasi kesehatan terdiri dari 3 langkah strategis yang merupakan siklus berkesinambungan yakni perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan. Setiap langkah terdiri dari berbagai kegiatan yang intinya terletak pada tahap perencanaan. Kegiatan sistematis pada tahap oinilah yang menjadi kunci keberhasilan program komunikasi kesehatan. Secara rinci langkah-langkah ini dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Tahap perencanaan terdiri dari Analisis msalah kesehatan, Riset pengembangan, Pengembangan strategi, Ujicoba bahan, Rencana operasional; (2) Tahap pelaksanaan terdiri dari Produksi, Pelatihan, distribusi; (3) tahap pemantauan dan evaluasi terdiri dari evaluasi keluaran (output) atau produksi, evaluasi akibat, evaluasi dampak. (Notoatmojo, 2010:160-163)

Tujuan Komunikasi Kesehatan

Pada umumnya program-program yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan yang dirancang dalam bentuk paket acara atau paket modul itu dapat berfungsi untuk :

1. Relay information, yaitu meneruskan informasi kesehatan dari suatle u sumber kepada pihak lain secara berangkai (hunting).
 2. enab informed decision making – memberikan nformasi akurat untuk memungkinkan pengambilan eputusan .
 3. Promote healthy behavior – informasi untuk memperkenalkan perilaku hidup sehat.
 4. Promote peer information exchange and emotional support – mendukung pertukaran informasi pertama dan menduk ng secara emosionla pertukaran informasi kesehatan.
 5. Promote self care – memperkenalkan pemeliharaan kesehatan diri sendiri.
 6. Manage demand for health services – memenuhi permintaan layanan kesehatan.
- (Liliweri, 2011:52-53)

Dari penjelasan Corcoran di atas, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa komunikasi dalam kesehatan mengambil tempat di banyak aspek meliputi individu, kelompok, komunitas, atau media massa. Komunikasi kesehatan dapat dikatakan sebagai proses transaksional. Penambahan "kesehatan" dengan definisi dari istilah komunikasi sebagai

'sumber daya' yang memungkinkan pesan kesehatan (misalnya pencegahan atau kesadaran) untuk digunakan dalam pendidikan atau menghindari sakit.

Ada berbagai saluran komunikasi yang biasanya dipakai yakni interpersonal, organisasi, masyarakat dan publik / massa. Ini termasuk komunikasi strategis, komunikasi perubahan perilaku, advokasi, atau mobilisation sosial.

Di bawah ini adalah ilustrasi yang menggambarkan hirarki saluran komunikasi tersebut :

Type of Channel	Definition of the channel	Examples of each channel
Interpersonal	Individual communication one-to-one	Health practitioner to patient/client, parent to child
Organisational	Locations where people live, work and play	Schools, workplaces, universities, supermarkets, places of worship, or leisure centre
Community and public/mass	Wider media and wider community structures	Mass media channels, political or structural channels

Gambar 2.1. Channels of Communication examples
Sumber

Communicating Health Strategies for Health Promotion, 2nd Edition, Sage Publication, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore Washington DC, 2013, hlm. 10.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan banyak metode ini sering disebut triangulasi – dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang diteliti. Sesuai dengan prinsip epistemologis-nya, peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut. (Denzin dan Lincoln, dalam Mulyana, 2007:4). Secara konvensional metode kualitatif cenderung diasosiasikan dengan keinginan peneliti untuk menelaah makna, konteks, dan suatu pendekatan holistik terhadap fenomena. (Hayes dalam Mulyana, 2007:5-6).

Penelitian ini sifatnya *descriptive analysis*. Penelitian ini bermaksud memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan program generasi berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM). Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian untuk membuat gambaran masalah mengenai situasi atau kejadian.

Pengujian validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu pengujian dengan jalan meminta sumber lain sebagai pembanding hasil penelitian dan untuk lebih meyakinkan pernyataan yang ada. Pengujian ini dilakukan melalui diskusi dengan BKKBN, PIKM, dan mahasiswa. Diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai pembanding hasil penelitian yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Program Generasi Berencana (GenRe)

Program Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai Tegar Remaja/Mahasiswa agar menjadi Tegar Keluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga. Tegar Remaja/Mahasiswa adalah remaja/mahasiswa yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko TRIAD KRR (Seksualitas,

Napza, HIV dan AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja.

Program GenRe dimulai sejak tahun 2010. Saat itu program ini bernama Program Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Namun kemudian penamaan program itu dirasa kurang populer, sehingga mulai tahun 2012 program PKBR berubah menjadi nama menjadi Program Generasi Berencana (GenRe). Nama GenRe dirasa lebih bagus karena genre bisa berarti masa, aliran dan dirasa lebih lekat di telinga remaja. Latar belakang dicetuskan Program GenRe didasari oleh, saat ini kurang lebih 27,6% atau sekitar 64 juta penduduk Indonesia adalah remaja. Jumlah remaja yang besar ini harus diimbangi dengan kualitas yang baik pula. Sebagian dari remaja saat ini telah memasuki perilaku berisiko diantaranya kawin di usia muda, terlibat dalam perilaku seks pra nikah, menggunakan napza, serta terinfeksi HIV dan AIDS. Data dari Depkes tahun 2009 di 4 kota besar (Medan, Jakarta Pusat, Bandung, dan Surabaya) 39,5% mengatakan temannya pernah melakukan hubungan seksual. Remaja yang menggunakan napza tercatat sebanyak 51.986 atau sebesar 45% dari seluruh pengguna napza. Sementara itu tercatat 45,9% remaja hidup dengan AIDS. Apabila tidak ditangani dengan baik, jumlah remaja yang banyak ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan, padahal mereka adalah generasi penerus di masa yang akan datang. (<http://ceria@bkkbn.go.id> akses 15 April 2013).

Pembinaan remaja perlu dilakukan melalui dua sisi, disatu sisi pembinaan dilakukan untuk membantu remaja menghadapi tantangan hidup masa sekarang. Disisi lain pembinaan perlu juga dilakukan kepada remaja dalam mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Pembinaan dua arah ini perlu dilakukan secara bersinergis. Remaja yang terganggu kehidupannya saat ini, misalnya terganggu oleh risiko TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS, NAPZA), maka kehidupan masa depannya pun akan terganggu baik dari segi kesehatan ataupun psikologisnya. Disisi lain remaja juga perlu mendapat gambaran tentang perencanaan dan persiapan masa depan, sehingga remaja berhati-hati dalam bersikap, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan, dan menyambut masa depan dengan kesiapan mental khususnya dalam kesiapan kehidupan berkeluarga.

Dalam rangka pembinaan remaja ini, serta dalam rangka mengemban amanat undang-undang dan merespon permasalahan remaja, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi Remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010 - 2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010 -2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam adendum tersebut dinyatakan sebagai berikut: (1). Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19.8 (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun. (2). Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dari 1.5 juta menjadi 2.7 juta keluarga remaja.

Program Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara umum pelaksanaan program Genreasi Berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada beberapa peraturan yaitu :

1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 86/Per/F2/2012 Tentang *Grand Design* Program Pembinaan Ketahanan Remaja.

2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 109/Per/F2/2012 TANGGAL 30 April 2012.
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 109/Per/F2/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 88 /Per/F2/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
5. Peraturan Presiden No. 62/2010 tentang BKKBN
6. Perpres No. 72/PER/B5 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja BKKBN.

Mengacu pada program GenRe pusat sasaran program ini ada 3 yaitu (1) remaja, (2) keluarga yang mempunyai remaja, dan (3) masyarakat yang peduli remaja. Dalam pelaksanaan program GenRe BKKBN Provinsi DIY bekerjasama dengan beberapa mitra, antara lain dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY dan kabupaten/kota di DIY, terutama Subdit Kesehatan Reproduksi/Remaja. (wawancara dengan Rohdiana Sumariati, M. Si Kepala Bidang KSPK BKKBN DIY dan Ewang Sewoko, M. Si Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja BKKBN DIY)

Untuk diketahui bahwa kegiatan generasi berencana meliputi 2 (dua) jalur yaitu sekolah dan non sekolah. Jalur sekolah diwadahi melalui PIK dan jalur non sekolah diwadahi melalui BKR (Bina Keluarga Remaja). Untuk diketahui pula bahwa PIK dan BKR memiliki status tumbuh, tegak, tegar dan excellent. Urut-urutan tersebut menunjukkan status kematangan dalam menjalankan aktivitas program generasi berencana. Ketika PIK dan BKR masih dalam tahap tumbuh, maka pembinaan menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). Namun ketika PIK dan BKR sudah memiliki status Tegak dan Tegar, pembinaan menjadi tanggung jawab BKKBN. (wawancara dengan Rohdiana Sumariati, M. Si Kepala Bidang KSPK BKKBN DIY dan Ewang Sewoko, M. Si Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja BKKBN DIY)

Pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) pada Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta

PIK Remaja/Mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR(seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (life skills), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Keberadaan dan peranan PIK R/M dilingkungan remaja/mahasiswa sangat penting artinya dalam membantu remaja/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa.

Berikut adalah Daftar PIKM di universitas/akademi di Daerah istimewa Yogyakarta :Tabel 1. Daftar Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM) (Untuk Tabel lebih jelasnya dapat menghubungi penulis)

Meskipun DIY memiliki 14 PIKM, namun dalam artikel ini akan dipaparkan pelaksanaan 3 (tiga) PIKM di DIY yaitu PIKM Jari Mulia dan PIKM Laras Hati yang sudah mencapai criteria *center of excellent* (sebuah kategori tertinggi untuk prestasi sebuah PIKM karena aktivitas dan kegiatannya yang konsisten dilaksanakan), dan PIKM UKESMA Universitas Gadjah Mada yang memiliki kategori tegar. Sebuah prestasi bagus di bawah *center of excellent*.

Pelaksanaan Program Generasi berencana PIK Jari Mulia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK M) Jarimulia (JM) merupakan salah satu PIKM yang sudah masuk dalam kategori center of excellence. Center of excellence merupakan kategori atau level tertinggi untuk kategori Generasi Berencana. PIK Jari Mulia merupakan sebuah komunitas yang peduli dan concern terhadap laju perkembangan HIV/AIDS yang semakin tinggi terutama di DIY. Terbentuk pada tanggal 26 Januari 2007, Jaringan Muda Peduli HIV AIDS beranggotakan 11 orang pada awalnya. Pada tanggal 5 Maret 2010, Jarimulia bekerjasama dengan BKKBN propinsi DIY meluncurkan program PIKM.

Susunan kepengurusan PIK Jari MULia UMY terdiri atas : Ketua Umum, ketua Internal, Ketua Eksternal, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Lapangan yang terdiri atas Koordinator Pendampingan, Koordinator Humas, Koordinator Diklat, dan Koordinator Kreatifitas dan IT. (Wawancara dengan Sofia, Ketua Umum; Rachmat Umar, Ketua Internal; dan Ichsan Masyuri, Pemenang Duta Genre Provinsi DIY 2013 dan anggota PIKM Jari Mulia UMY, pada 7 Mei 2014).

Pelaksanaan GenRe di PIKM UKESMA Universitas Gadjah Mada (UGM)

Unit Kesehatan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau biasa disebut Ukesma UGM merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan UGM dan berada dibawah Direktorat kemahasiswaan UGM. Ukesma UGM didirikan pada tanggal 13 Mei 1985. Sampai saat ini Ukesma telah memiliki 27 angkatan. Tidak seperti PIKM PIKM yang lain, pengurus dan anggota Ukesma tidak selalu berasal dari Fakultas Kedokteran Umum atau Fakultas Psikologi, tetapi beberapa pengurus dan anggota berasal dari beberapa fakultas yang ada di UGM.

Pelaksanaan materi ruang berlangsung selama 2 minggu kemudian materi yang telah didapat dipraktikkan pada kegiatan simulasi ertolongan pertama. Simulasi diadakan di sekitas lingkungan kampus UGM dimana peserta langsung dihadapkan paada kasus kecelakaan dengan beberapa korban yang harus dirawat dan dievakuasi.

Disamping itu, setiap bulannya Ukesma juga mengadakan pelatihan rutin bagi anggotanya sebagai sarana *refresh* materi dan untuk memperdalam ilmu pertolongan pertama yang telah didapat saat diklatsar. Ukesma juga melayani permintaan pemateri unruk pelatihan pertolongan pertama bagi mahasiswa dan masyarakat.

Ukesma UGM secara rutin dipercaya oleh rektorat untuk menjadi petugas P3K dalam acara wisuda, upacara penerimaan mahasiswa baru, dan ujian masuk universitas. Selain penjagaan rutin, Ukesma juga sering diminta sebagai etugas kesehatan di acara-acara seminar, pentas musik, dan kejuaraan olahraga. Disamping petugas kesehatan, Ukesma juga melayani peminjaman peralatan pertolongan pertama seperti obat-obatan, tandi, dan bidai.

PIK-M UGM terbentuk pada tahun 2010 dan berada di bawah naungan BKKBN Provinsi DIY. PIK-M adalah suatu wadah yang menjadi pusat kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja seperti konseling, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja, rujukan bagi kasus yang memerlukan terapi medis, penyediaan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja, roadshow PIK-M ke sekolah-sekolah, dan pembuatan mading dan leaflet. Prestasi yang telah di dapat oleh PIK-M UGM adalah terpilihnya wakil Duta Mahasiswa Provinsi DIY dari UGM pada tahun 2011.

Pelaksanaan Program GenRe di PIKM Laras Hati Akademi Kebidanan Yogyakarta (Akbidyo)

PIKM Larashati, seperti halnya PIKM Jari Mulia mencapai level center of excellence. Latar belakang didirikannya PIKM ini diawali dari keprihatian Pergaulan remaja yang longgar dan bebas sebagai akibat dari pengawasan yang kurang serta perkembangan media massa baik media cetak maupun elektronik yang makin maju serta kurangnya pengetahuan

masalah reproduksi, mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku remaja. Berdirinya PIKM Laras Hati berawal ketika salah satu pelopor PIKM Laras Hati yang merasa kasihan terhadap remaja-remaja yang memiliki permasalahan-permasalahan namun mereka tidak tau harus kepada siapa mereka bertanya. Selain itu fenomena yang terjadi pada remaja sekarang ini mereka bingung dengan jati diri, pergaulan dan banyak sekali info yang didapatkan tanpa ada penyaringan yang baik. Permasalahn itu semakin kompleks dan bila tidak segera dilakukan penanganan mungkin akan menjurus keterpurukan.

Peer educator merupakan edukasi untuk calon nara sumber dari pengurus PIKM. Jadi semacam TOT (training for trainer). Topik pembahasan bisa berupa pacaran yang sehat, kesehatan reproduksi dsb berdasarkan program kerja PIKM. Peer educator diberikan kepada pengurus PIKM, yang selanjutnya pada saatnya nanti pengurus bisa memberikan edukasi kepada anggota lain atau menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan PIKM. Misalnya dalam kegiatan Curhat Remaja, PIKM Goes to School dsb.

PIKM Laras hati melaksanakan debat pengetahuan Reproduksi dan kesehatan untuk kalangan mahasiswa internal Akbidyo sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih memperkenalkan PIKM Laras Hati dan upaya untuk PIKM tetap eksis. Selain itu PIKM laras Hati ikut berpartisipasi pada setiap event Pemilihan Duta generasi Berencana.

Dalam Kartini's Day PIKM Laras hati meakukan peringatan Hari Kartini dengan bakti social dan melakukan pelayanan kesehatan di pasar Beringharjo. Selain aktivitas Generasi berencana beberapa aktivitas lain yang dilakukan oleh PIKM Laras hati adalah : Pos yandu balita, Pos yandu Lansia, Karaoke Lansia.

Kesimpulan

Pelaksanaan program generasi Berencana di daerah istimewa Yogyakarta melalui beberapa Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM) sudah berjalan cukup baik. Belum semuanya perguruan tinggi/akademi memeiliki PIKM menjadi kendala tersendiri karena PIKM masih sebatas didirikan oleh perguruan tinggi/akademi yang memiliki program studi kedokteran, kebidanan, keperawatan, psikologi. Menjadi tantanagna teersendiri kemudian, bagi erguruan tinggi/akademi yang tidak memiliki program studi kesehatan/psikologi. Dari temuan penelitian diketahui bahwa PIKM yang sudah ada memiliki aktivitas yang sangat mendukung untuk menyiapkan masa depan generasi bangsa kea rah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Corcoran, Nova, 2013. *Communicating Health Strategies for Health Promotion*, 2nd Edition, Sage Publication, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.
- Liliweri, Alo, 2011. *Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Malik, Dedy Djamaluddin, 1991. *Komunikasi Pembangunan : Perspektif-Depedensia* , Bandung.
- Mulyana, Deddy, 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Rosdakarya, bandung.
- , 2007. *Metode penelitian Komunikasi*, Rosdakarya, bandung.
- Notoatmodjo, Soekirjo (Prof. Dr. SKM, M. Com. H). 2010. *Promosi kesehatan Teori & Aplikasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- , 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rogers, Everett M dan Shoemaker, F Floyd, 1983. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Usaha Nasional : Surabaya.

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENATAAN DAN VISUALISASI IKLAN MEDIA LUAR RUANG TERHADAP ESTETIKA KOTA YOGYAKARTA

M. Edy Susilo, S.Sos., M.Si.

Kartika Ayu Ardhanariswari, S.Sn, M.Ds

**Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UPN Veteran Yogyakarta**

ABSTRAK

Ikian luar ruang menjadi salah satu pilihan media untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengiklan yang menggunakan iklan luar ruang. Hal ini terlihat begitu banyaknya iklan luar ruang di berbagai sudut kota di Yogyakarta. Penelitian ini menggali seperti apa persepsi masyarakat mengenai penataan iklan luar ruang terhadap estetika kota di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dipadukan dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa terganggu dengan iklan luar ruang yang ada. Iklan sudah dianggap mengganggu keindahan kota dan bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Iklan luar ruang ternyata juga tidak cukup efektif untuk membuat masyarakat mengikuti apa yang dikatakan oleh iklan tersebut. Sudah saatnya para pemasang iklan tidak laah dalam memasang iklan luar ruang, tetapi perlu menggunakan riset media sebagai dasarnya. Tanpa riset, maka iklan luar ruang hanya merupakan pemborosan saja dan mengganggu estetika kota.

Kata kunci: iklan luar ruang, visualisasi, estetika kota

LATAR BELAKANG

Yogyakarta sebagai daerah istimewa, dikenal sebagai wilayah yang berkembang dan ramai akan pendatang, khususnya pelajar. Selain itu, unsur-unsur budaya dan keramahtamahan yang masih kental juga membuat Yogyakarta tetap menjadi salah satu kota yang menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut tentunya merupakan sasaran yang cukup berpotensi dalam melaksanakan promosi khususnya melalui iklan. Yogyakarta dipandang sebagai tempat yang strategis dalam melakukan kegiatan periklanan bagi seorang pengiklan dilihat dari banyak faktor seperti psikografis, geografis, maupun demografisnya. Hal tersebut mengakibatkan banyak sekali iklan dari berbagai produk maupun perusahaan yang ditempatkan di wilayah Yogyakarta khususnya pada media luar ruang. Media ini dianggap efektif untuk menarik perhatian dan memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan kepada calon konsumen yang melewati jalan dimana iklan tersebut ditempatkan.

Dilihat dari sudut pandang pengiklan, wilayah Yogyakarta khususnya wilayah kota merupakan daerah yang berpotensi untuk pemasangan iklan karena dinilai sebagai titik pusat yang sering dilalui oleh target audiens iklan. Informasi yang di tawarkan oleh pengiklan yang tentu saja telah dikemas dengan menarik akan cepat diserap oleh audiens. Demikian pula sebaliknya, audiens secara sadar maupun tidak telah menerima informasi produk yang diharapkan akan terjadi sikap sesuai yang diinginkan oleh pengiklan. Namun disisi lain, banyaknya pemasangan iklan di wilayah tersebut menimbulkan kesemrawutan ataupun sampah-sampah visual bagi pengguna jalan. Banyaknya iklan luar ruang yang terkadang tidak tertata dengan rapi membuat keindahan jalan khususnya tata kota menjadi berkurang. Kesan berantakan tidak jarang dijumpai akibat iklan-iklan luar ruang tersebut. Dampak itu berimbas pada berkurangnya kenyamanan pengguna jalan. Disamping itu, muncul sampah-sampah

visual akibat penempatan iklan luar ruang. Sampah visual disini dapat berupa sampah-sampah bekas iklan luar ruang seperti poster, leaflet di perempatan dan banyak lagi.

Permasalahan periklanan di atas, ternyata juga disoroti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku Buwono X saat launching logo dan tagline "Jogja Istimewa". Menurut HB X, papan-papan reklame menjadi visualisasi yang paling mudah tertangkap indera saat berkunjung ke Yogyakarta. Ini tidak lain disebabkan oleh bertaburannya iklan luar ruang di Yogyakarta telah mencapai pada taraf mengkhawatirkan. Masyarakat saat ini diteror dengan keberadaan iklan luar ruang yang sangat massif, hingga pada akhirnya masyarakat dituntut untuk konsumtif, dipaksa membeli apa saja yang dijual melalui iklan luar ruang. Tidak hanya itu, hadirnya iklan luar ruang yang tak terkendali "menjajah ruang publik" yang seharusnya menjadi milik bersama. Tetapi banyak pihak yang menganggap itu bukanlah suatu bencana. Hal tersebut dikarenakan tidak ada dampak fisik secara langsung yang diterima oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan berusaha menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari iklan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggunakan media videotron. Sejumlah videotron sudah terpasang di sudut Kota Jogja, seperti di simpang empat Galeria Mal, halaman PT. Telkom Kotabaru, Jl. Kiai Mojo, Jl. Abu Bakar Ali, Jl. Malioboro halaman Dinas Pariwisata serta Jl. Brigjen Katamso depan Jogjatronik. Hanya pemasangan videotron itu dikritisi sejumlah pihak (Harian Jogja, Senin, 27 Oktober 2014). Namun, keberadaan sampah visual berupa billboard ataupun videotron sangat mengganggu nuansa Yogyakarta sebagai *heritage city*. Hal ini membuat wisatawan tidak memperoleh janji yang ditawarkannya. Mereka hanya mendapatkan sekadar klaim Yogyakarta sebagai *heritage city*. Di negara tetangga seperti Seoul, Korea Selatan ataupun Penang, Malaysia yang menyatakan sebagai *heritage city*, sudah ada pengaturan jelas soal penataan visual. Pemerintahan di sana menjadikan penataan sampah visual sebagai perencanaan yang komprehensif bahkan telah diatur dalam peraturan daerah. Berbeda dengan keadaan di Yogyakarta, pemerintah beranggapan penempatan iklan luar ruang akan menambah pendapatan daerah dari pajak iklan yang masuk. Pajak dari iklan dikenal sebagai pajak dengan nilai rupiah yang tinggi. Hal tersebut membuat pemerintah daerah cenderung menerima iklan-iklan luar ruang yang dipasang di wilayahnya untuk menunjang kepentingan ekonomi pemerintah. Namun terkadang penempatan iklan luar ruang membuat pemerintah mengesampingkan sisi keindahan kota.

Berdasar dari penjabaran di atas, muncul permasalahan yang berkaitan dengan penempatan iklan pada media luar ruang khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Permasalahan yang muncul antara lain adalah mengenai tata kota yang semakin terlihat semrawut karena banyaknya gangguan visual berupa iklan luar ruang. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah periklanan dan merupakan masalah yang umum yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta. Permasalahan ini juga belum banyak diangkat dalam penelitian sehingga akan menarik untuk diketahui secara lebih mendalam.

Dari permasalahan di atas, maka pertanyaan dalam perumusan masalah yang akan membatasi penelitian yaitu

1. Bagaimana pengaruh daya tarik atau persepsi masyarakat Yogyakarta terkait penataan media iklan luar ruang?
2. Bagaimana sebenarnya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata reklame atau media iklan luar ruang?

Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan diketahui lebih dalam mengenai penempatan iklan media luar ruang khususnya wilayah Kota Yogyakarta. Secara jangka panjang diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh solusi atau sebagai wacana yang

diharapkan akan memunculkan solusi bagi wilayah Kota Yogyakarta untuk lebih baik dalam hal penempatan iklan pada media luar ruang dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (*Bogdan dan Taylor*, dalam Moleong, 2005: 4). Sedangkan menurut *Jane Richie*, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Secara singkat, maka penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005: 6).

Sedangkan metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005: 1).

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, bukan merupakan angka-angka seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Semua data yang dikumpulkan selalu berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau *natural setting* sehingga metode ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar relatif tidak berubah (Sugiyono, 2005: 2). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah iklan luar ruang di wilayah Kota Yogyakarta. Iklan luar ruang meliputi poster, rombong, primatek, iklan dalam kendaraan, spanduk, *billboard* (model bando, neon, billboard tanpa cahaya), balon udara, umbul-umbul, dan segala hal yang bersifat kampanye atau promosi suatu produk.

3. Sumber Data

Menurut *Lofland dan lofland* (dalam Moleong, 2005: 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data utama penelitian. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari narasumber mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian karena dia adalah pemilik informasi. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi narasumber utama yaitu :

1. Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Agensi periklanan
3. Khalayak atau audiens sebagai sasaran iklan

Kedua adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak lain. Sumber data ini dapat berupa buku/literatur, majalah, website, data yang menunjang penelitian seperti data perusahaan dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini didasarkan dengan dua cara yaitu wawancara mendalam dan menggunakan kuesioner. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interwee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti yang ditegaskan oleh *Lincoln dan Guba* (dalam Moleong, 2005: 186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang diharapkan akan dialami pada masa lalu.

Interview atau wawancara akan dilakukan kepada Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta yang berperan sebagai pemberi ijin penempatan iklan luar ruang Kota Yogyakarta. *Interview* juga akan dilakukan kepada Agensi periklanan yang berperan sebagai produsen iklan dan pihak yang mengurus perijinan penempatan iklan luar ruang. Pihak ini juga bertanggung jawab terhadap pembuatan-pembuatan rangka billboard yang diletakkan di tepi-tepi jalan. Selain itu Audiens atau khalayak dipandang perlu untuk diwawancarai. Audiens atau khalayak berperan sebagai target sasaran iklan yang ditempatkan di wilayah Kota Yogyakarta sekaligus pihak yang merasakan dampak pemasangan iklan media luar ruang. Khalayak meliputi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Khalayak juga sebagai pihak yang menjadi pertimbangan agensi periklanan dalam pemasangan iklan luar ruang.

Jenis Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2005: 7).

Observasi adalah tindakan yang mencatat fenomena yang sering menggunakan sejumlah instrumen dan merekamnya bagi tujuan-tujuan ilmiah. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Sutopo, 2002: 64). *Marshall* (dalam Sugiyono, 2005: 64) menyatakan bahwa "*through observation the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour*". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Kota Yogyakarta tempat dimana keberadaan atau penempatan iklan luar ruang dan segala aktivitas yang berkaitan dengan penempatan iklan pada luar ruang. Aktivitas lainnya meliputi kegiatan perijinan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan kegiatan produksi iklan luar ruang dan pengurusan ijin penempatan iklan luar ruang oleh agensi periklanan. Observasi yang digunakan adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam penelitian, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Mereka yang diteliti akan mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas yang diteliti. Namun pada suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau ada data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya sekaligus kota pendidikan. Posisinya yang unik dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia menjadikan Yogyakarta menjadi propinsi yang Istimewa. Hanya di propinsi Yogyakarta jabatan gubernur dipegang oleh raja atau sultan. Sultan masih memiliki pengaruh yang kuat secara kultural bagi masyarakat. Keraton yang merupakan istana raja menjadi salah satu daya tarik para turis untuk datang ke

Yogyakarta. Selain daya tarik budaya, Yogyakarta juga memiliki banyak objek wisata yang terletak di pegunungan dan daerah pantai. Kekayaan alam itulah yang mengundang turis untuk datang ke Yogyakarta.

Salah satu problematika yang muncul adalah maraknya iklan luar ruang di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta. Seperti sudah diketahui, Propinsi Yogyakarta secara administratif dibagi menjadi satu Kota dan empat kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta adalah maraknya iklan luar ruang. Iklan luar ruang adalah media iklan yang dipasang di tempat umum untuk menarik perhatian masyarakat. Iklan luar ruang memang memberikan pemasukan pajak bagi pemerintah. Namun di sisi lain bisa menimbulkan permasalahan seperti masalah estetika kota, keamanan dan sosial.

Hasil Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana data yang diperoleh merupakan bukan merupakan data numerik; peneliti menggali informasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan yaitu dari praktisi periklanan, pemerintah dan masyarakat. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Hasil kuesioner tidak akan diolah dengan menggunakan rumus statistik, melainkan hanya untuk mendapatkan informasi distribusi frekuensi. Penentuan 100 responden didasarkan pada justifikasi bahwa jumlah ini dianggap sudah mencukupi dan tidak akan digunakan sebagai bahan generalisasi.

Berdasarkan jenis kelamin, responden penelitian ini relatif berimbang, terdapat 58% laki-laki dan 42% wanita. Seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia, wanita memiliki akses yang luas untuk bekerja di sektor publik sehingga mereka pun perlu melakukan mobilitas. Pada saat mereka melakukan perjalanan itulah, mereka akan diterpa oleh iklan luar ruang.

Berdasarkan usia, jumlah responden mengelompok pada usia yang relatif muda. Usia 18 sampai dengan 25 tahun, mendominasi frekuensi dengan angka 52%. Hal ini tampaknya berkorelasi dengan kedudukan Yogyakarta sebagai kota pelajar. Pada rentang usia tersebut, biasanya responden masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Selanjutnya, usia yang juga relatif muda 26 sampai dengan 33 tahun berada pada peringkat kedua dengan angka 21%. Usia muda seperti ini biasanya memiliki aktivitas yang banyak sehingga memerlukan mobilitas yang tinggi. Selanjutnya, responden semakin menunjukkan angka yang mengecil pada usia senior.

Dari sisi pendidikan, peneliti memilih pendidikan minimal adalah Sekolah Lanjutan Pertama, dengan alasan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik untuk memberikan informasi yang berkualitas pada penelitian ini. Responden penelitian didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA dan sederajat sebesar 54%. Selanjutnya, terdapat 24% responden yang memiliki jenjang pendidikan S1. Pendidikan responden memberi gambaran bahwa mereka dapat memberikan data yang baik dalam penelitian ini. Apalagi, terdapat 3% responden dengan pendidikan S2.

Sementara itu, dari sisi pekerjaan terdapat keragaman. Hal ini penting agar tidak hanya mengelompok pada satu pekerjaan saja karena bisa menimbulkan bias dalam penelitian. Berikut ini datanya:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden yang mendominasi adalah mahasiswa yakni 42%. Hal ini berkorelasi dengan usia responden pada tabel pertama yang memang didominasi oleh usia sekolah dan kuliah. Sebagai pelajar atau mahasiswa, biasanya mereka memiliki aktivitas yang banyak

dan mengharuskan mereka mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Di luar kategori pelajar dan mahasiswa, kategori pekerjaan yang lain tersebar dengan relatif merata.

Sepeda motor menjadi pilihan utama masyarakat Yogyakarta dan para responden. Ada 64% responden yang menggunakan sepeda motor. Moda transportasi ini memiliki banyak kelebihan yaitu murah, praktis dan lincah. Sepeda motor bisa menembus kemacetan dengan mudah dibandingkan dengan mobil. Dari sisi bahan bakar, sepeda motor juga ekonomis. Biasanya, sepeda motor menjadi pilihan pertama bagi pelajar dan mahasiswa. Terkait dengan iklan luar ruang, para pengendara sepeda motor memiliki keleluasaan pandangan karena tidak terhalang apa pun. Mereka bisa melihat-lihat iklan luar ruang baik saat melaju di jalan raya maupun saat berhenti di traffic light. Dalam penelitian ini terdapat 11% responden yang menggunakan mobil. Para pengendara mobil memiliki pandangan yang lebih terbatas untuk melihat iklan luar ruang dibandingkan dengan pengendara sepeda motor, terutama penumpang mobil yang berda di baris belakang. Namun, saat berhenti di *traffic light*, mereka memiliki waktu lebih untuk mengamati iklan-iklan luar ruang yang ada. Sementara itu, hanya ada 2% responden yang menggunakan kendaraan umum. Di Yogyakarta, kendaraan umum selain taxi kurang bisa menjangkau pelosok kota. Apalagi, waktu tempuh dengan menggunakan angkutan umum jauh lebih lama. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan menggunakan angkutan umum.

Sebanyak 38% setuju bahwa sering menjumpai iklan Luar Ruang sudah habis batas waktu informasinya (kadaluarsa). Ini artinya dominasi secara keseluruhan menyatakan bahwa masyarakat menilai banyak iklan luar ruang yang sudah kadaluarsa tetapi tidak di cabut dan dibiarkan begitu saja. Namun harus dicermati, kenyataannya masih ada 26% responden yang menyatakan tidak sering menjumpai iklan yang sudah habis waktu (kadaluarsa). Hal ini bisa disebabkan oleh dua pendapat, karena memang tidak menjumpai atau memang responden tidak perhatian atau tidak tahu mengenai batas waktu iklan tersebut.

Mengenai keterbacaan iklan yang sulit dibaca secara detail keseluruhan. Diketahui sebanyak 50% responden berpendapat bahwa banyak iklan yang sulit dibaca secara detail keseluruhan. Sebanyak 24% menyatakan pendapat iklan yang sangat sulit di baca keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden menyatakan bahwa mereka tidak bisa membaca secara detail keseluruhan karena terlalu banyak nya informasi pada Iklan tersebut. Padahal tujuan dari periklanan adalah penyampaian pesan atau informasi, sehingga keberhasilan suatu iklan bila penyampaian pesan/informasi sampai kepada audiens. Hal yang perlu dicermati adalah apabila sebagian besar responden menyatakan sulit membaca informasi secara keseluruhan menandakan bahwa iklan luar ruang yang ada di kota Yogyakarta bisa dikatakan tidak berhasil.

Tabel. 3. Pendapat Responden berdasar ketidakberaturan penempatan Iklan di Kota Yogyakarta

Sebanyak 46% Responden berpendapat bahwa sangat banyak Iklan Luar Ruang yang penempatannya tidak beraturan dan sembarangan. Kemudian sebanyak 32% responden juga menyatakan banyak iklan luar ruang yang tidak beraturan dan berantakan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada peraturan dan penataan terkait Iklan Luar Ruang di kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini pengertian interpretasi akan diawali dengan melihat pernyataan atau persepsi responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan iklan media luar ruang. Indikator interpretasi ini dimulai dari pernyataan apakah iklan tersebut bagus, menarik, bermanfaat, mengganggu pengendara, berantakan/tidak teratur, terlalu banyak iklan luar ruang, mengganggu keindahan kota, atau bahkan membahayakan keselamatan orang yang di bawahnya, membuat saya tertarik untuk membeli produk/jasa yang diiklankan. Hasil dari interpretasi tersebut bisa dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 5. Pendapat Responden mengenai keindahan Iklan Luar Ruang

Pada tabel di atas diketahui bahwa responden berpendapat bahwa kondisi iklan ruang yang ada di Yogyakarta terlihat bagus, dengan tingkat sebesar 58%. Banyak hal yang mungkin bisa menjelaskan bahwa kenapa responden memilih hal tersebut, antara lain dari sisi visual yang menarik. Namun harus dicermati, kenyataannya masih ada 27% responden yang menyatakan tidak setuju akan hal tersebut. Ini bisa menyatakan bahwa ada iklan yang dinilai tidak bagus oleh responden/ masyarakat.

Tabel 6. Pendapat responden mengenai tingkat kreatifitas Iklan Luar Ruang

Melihat sisi kreatifitasnya Iklan Luar Ruang dominasi responden menilai bahwa media iklan ruang di Yogyakarta kreatif. Ini dibuktikan dengan penilaian responden yang mendukung hal tersebut dengan menyatakan iklan luar ruang kreatif sebanyak 52%. Namun harus dicermati, kenyataannya masih ada 26% responden yang menyatakan tidak setuju akan hal tersebut. Ini bisa menyatakan bahwa ada iklan yang dinilai tidak kreatif oleh responden/ masyarakat.

Tabel 7. Pendapat Responden mengenai Kemenarikan Iklan Luar Ruang

Melihat sisi ketertarikan Iklan Luar Ruang responden menilai bahwa media iklan ruang di Yogyakarta sudah menarik. Ini dibuktikan dengan penilaian responden yang mendukung hal tersebut dengan pernyataan iklan luar ruang menarik sebesar 53%. Namun harus dicermati, kenyataannya masih ada 27% responden yang menyatakan tidak setuju akan hal tersebut. Ini bisa menyatakan bahwa ada iklan yang dinilai tidak menarik oleh responden/

Tabel 8. Pendapat Responden mengenai manfaat Iklan

Efektivitas iklan dilihat dari bagaimana merek tersebut dikenali oleh yang melihatnya, menarik dan mampu menyampaikan pesan. Pada tabel 50% responden menyatakan bahwa iklan ruang yang ada di Yogyakarta tersebut memberi nilai efektif/bermanfaat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Till & Baack (2005) yang mengatakan bahwa sikap konsumen dalam mempersepsikan nilai merek datang dari berbagai sumber, tapi yang terpenting secara rasional dan emosional yang dapat mempengaruhi adalah iklan. Dikuatkan juga oleh Krishnan dan Chakravarti (dikutip oleh Cobb Walgren, et al, 1995) mengatakan bahwa efektivitas periklanan pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan ekuitas merek dan ekuitas merek yang kuat akan menyebabkan konsumen menempatkan merek tersebut dalam preferensinya, serta meningkatkan probabilitas penempatan merek dalam evoked set-nya. Ini menandakan bahwa efektifitas iklan ruang yang ada di Yogyakarta masih mendapat tanggapan dan respon baik oleh masyarakat.

Tabel 9. Iklan Luar Ruang dianggap Mengganggu (Untuk Keterangan Tabel lebih jelasnya dapat menghubungi penulis)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 38% dengan prosentase tertinggi tersebut menyatakan bahwa masyarakat atau pengendara cukup terganggu dengan adanya iklan ruang. Meski di prosentase 36% menyatakan pendapat yang berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri, karena keberadaan iklan ruang yang tidak ditempatkan pada titik yang tepat ternyata memberikan respon yang tidak baik. Dan tindakan yang seperti ini jelas merugikan semua pihak, baik yang mengiklankan maupun masyarakat sebagai objek iklan.

sekitar merupakan bentuk dari penilaian dan evaluasi tentang keberadaan reklame di jalan (ruang terbuka) sebagai ruang publik. Jika persepsi pada tabel di atas menunjukkan bahwa keberadaan iklan luar ruang dinilai mengganggu pengendara maka tidak lain jalan yang harus ditempuh dan segera untuk dilakukan adalah evaluasi titik penempatan/posisi iklan luar ruang tersebut.

KESIMPULAN

Iklan luar ruang yang ada di kota Yogyakarta cenderung dianggap terlalu banyak dan tidak beraturan. Hal ini berdampak pada keberadaan iklan yang justru dianggap mengancam kebersihan lingkungan di satu sisi serta mengganggu keselamatan berlalu lintas di lain pihak.

Sebaiknya para pelaku usaha benar-benar mendasarkan strategi media mereka berdasarkan riset dan bukan sekadar memakai commonsense saja. Di sisi lain, pemerintah perlu lebih tegas lagi untuk mengatur iklan luar ruang yang melanggar peraturan pemerintah. Sampai saat ini, iklan luar ruang baru di atur oleh pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebaiknya propinsi memiliki inisiatif untuk mengatur iklan luar ruang yang ada di wilayahnya karena saat ini terjadi ketimpangan aturan antarkabupaten atau kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, M, 2008, *Jualan ide segar*, Galangpress, Yogyakarta.
- Cook, Guy, 2001, *The Dicourse of Advertising*, Routledge, London and NewYork.
- Jefkins, Frank (1995), *Periklanan*, Erlangga, Jakarta
- H.B, Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Kasali, Rhenald, 1995, *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Grafiti, Jakarta
- Kasali, Rhenald, 2007, *Manajemen Periklanan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Liliweri, Alo, 1992, *Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Littlejohn, W, Stephen, 1995, *Theories Of Human Communication*, Wadsworth Publishing Company, USA
- Madjadikara, A. Agus. 2006. *Bagaimana Biro Iklan Memproduksi Iklan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metode penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Madjadikara, S, Agus, 2004, *Bagaimana Biro Iklan Memproduksi Iklan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mcquail, Dennis, 1987, *Teori Komunikasi Massa*, Erlangga, Jakarta.
- Mulyana, Deddy, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Rivers, L, Williams, Jensen.W, Jay, Peterson, Theodore, 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Prenada Media, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, dan Effendy, Sofuan, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Midas Surya Grafindo, Jakarta.
- Sissor, Z, Jack, and Baron, B, Roger, 2002, *Advertising Media Planning*, The mcgrow-hill companies, United States.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhandang, Kustadi, 2005, *Periklanan Manajemen Kiat dan Strategi*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Supriyanto, Sugeng "Aresta", 2008, *Meraih Untung Dari Spanduk Hingga Billboard*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.
- Suyanto, M, 2006, *Strategi perancangan iklan outdoor kelas dunia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tinarbuko, Sumbo, 2008, *Matahati Iklan Indonesia*, DINI Publishing, Yogyakarta.
- Uchjana, Efendy, Onong, 2003, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wells, William, Burnett, John, Moriarty, Sandra, 2000, *Advertising Principles and Practice*, Prentice Hall, United States of America.
- Widyatama, Rendra, 2007, Pengantar Periklanan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta**

**PENERBITAN SAHAM MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI ALTERNATIF
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
(STUDI KASUS DI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA)**

Penulis: M.I. Andriani Novitasari

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email Penulis: andrianimercubuana847@gmail.com

Abstract

Indonesia is an ASEAN country reputedly rich of natural resources, both renewable and unrenewable. Since 1 January 2001, the Government of the Republic of Indonesia has implemented regional autonomy, which has changed the government system from being centralized one to being decentralized. With the regional autonomy, the regional governments has acquired the authority to govern their respective regions and particularly the authority to generate their own revenues, which are labeled as locally generated revenues. However, in the implementation, regional governments tend to rely on local tax tariffs to increase their locally generated revenues which has caused more financial burdens for the local residents. In fact, Indonesia has abundant natural resources, but unfortunately not all regions have them. In this paper, the presenter will discuss opportunities for regions in Indonesia, particularly those without rich natural resources, to improve the residents' welfare without increasing their local tax tariffs. In the writer's opinion, the issuance of regional stocks for the oil and gas sector will allow regions without rich natural resources to buy the stocks as part of their investment. With the issuance of oil and gas stocks, the financial management exploitation of oil and gas which until now is still wholly in the hands of PERTAMINA, the state oil and gas corporation, is expected to be more transparent because it will be closely monitored by the public.

Keywords: *Oil and gas stocks, autonomy, locally generated revenues, welfare state, transperancy*

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Sejak 1 Januari 2001, Pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan otonomi daerah, yang telah mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi terdesentralisasi. Dengan otonomi, pemerintah daerah telah mendapatkan wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing serta untuk menghasilkan pendapatan mereka sendiri, yang disebut sebagai Pendapatan Asli Dearah (PAD). Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah cenderung mengandalkan tarif pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini yang telah menyebabkan beban keuangan meningkat bagi penduduk di daerah tersebut. Sebenarnya, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, tapi sayangnya tidak semua daerah memilikinya. Dalam tulisan ini, saya akan membahas peluang bagi daerah-daerah di Indonesia, terutama yang miskin sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan warga tanpa meningkatkan tarif pajak daerah mereka. Menurut pendapat penulis, penerbitan saham untuk sektor minyak dan gas akan memungkinkan daerah tanpa sumber daya alam yang kaya untuk membeli saham sebagai bagian dari investasi mereka. Dengan penerbitan saham minyak dan gas, eksploitasi pengelolaan keuangan minyak dan gas yang hingga kini masih sepenuhnya di tangan PERTAMINA, perusahaan minyak dan gas negara, diharapkan akan lebih transparan karena akan diawasi secara ketat oleh publik.

Kata kunci: Saham minyak dan gas bumi, otonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kesejahteraan rakyat, transparansi

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia dikenal untuk sumber daya alam yang kaya, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Minyak, gas, dan mineral adalah contoh sumber daya yang tidak terbarukan. Sejak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, tingkat provinsi dan kabupaten, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah masing-masing dan diberikan wewenang untuk mencari pendapatan mereka sendiri sehingga mereka tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat .

Bahkan, apa yang terjadi setelah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah bahwa untuk meningkatkan pendapatan mereka, pemerintah daerah hanya mau menempuh jalan pintas dengan meningkatkan tarif pajak, yang dibebani masyarakat. Ini seharusnya tidak terjadi jika pemerintah menemukan beberapa cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

Dalam paper ini akan dikemukakan bahwa dengan penerbitan saham dari minyak dan gas bumi diharapkan akan dapat menjadi alternatif bagi pemerintah provinsi dan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah mereka, tanpa membebani masyarakatnya, terutama di daerah dengan sumber daya alam yang miskin. Kemakmuran dalam masyarakat akan lebih merata. Manajemen yang tepat dari minyak dan gas juga akan menjadi alat untuk menyatukan bangsa.

Dalam paper ini juga akan penulis sampaikan perbandingan bagaimana beberapa Negara lain yang sukses mengelola minyak buminya.

Dengan penerbitan saham minyak dan gas, diharapkan pengawasan keuangan Perusahaan memonopoli pengolahan minyak dan gas di Indonesia, PERTAMINA, akan lebih transparan, karena masyarakat akan diberikan wewenang untuk memantau. Ini akan membuat pengolahan minyak dan gas yang telah dimonopoli oleh Pertamina menjadi lebih terbuka dan transparan.

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk menyusun model atau mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan penerbitan saham minyak dan gas bumi, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia yang tidak memiliki sumber daya alam, dan juga untuk meningkatkan transparansi keuangan Perusahaan Minyak dan Gas (PERTAMINA), yang selama ini telah memonopoli pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Pemikiran dalam paper ini disusun berlandaskan Teori Welfare State, bahwa Kesejahteraan Negara menurut yaitu Kamus Bahasa Inggris, Edisi Kelima 2011: bahwa : The Welfare State adalah sistem sosial dimana negara bertanggung jawab utama untuk kesejahteraan warganya, seperti dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial.

Adam Smith adalah pelopor Teori Welfare State dimana intervensi pemerintah yang aktif dalam perekonomian, terutama dalam hal kebijakan perdagangan. Teori tersebut dicetuskan sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Argumen Smith dan lawan-lawannya yang masih sangat hidup hari ini: pro-Smithians adalah mereka yang menempatkan kekuatan mereka di pasar, yang berpendapat bahwa penyediaan barang dan jasa dalam masyarakat harus dilakukan, oleh dan besar, dengan pembeli swasta dan

penjual bertindak dalam kompetisi dengan satu sama lain. Dengan semangat Adam Smith dimana dalam kebijakan ekonomi yang pengurangan pajak dan penurunan pertumbuhan pemerintah di negara-negara barat; dan dalam pemulihan sengaja pasar swasta di Cina, Uni Soviet, dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Ini adalah teori ekonomi yang mengukur dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Pada bagian ini kita melihat sejumlah kunci pada negara kesejahteraan yang mewakili pendekatan utama untuk teorisasi negara kesejahteraan yang telah dikembangkan selama dekade terakhir. Ini adalah:

1. Negara kesejahteraan muncul sebagai bagian dari 'logika industrialisasi'.
2. Negara kesejahteraan berkembang dalam menanggapi kebutuhan kapitalisme
3. Negara kesejahteraan adalah produk dari modernisasi masyarakat.
4. Negara kesejahteraan dibentuk oleh perebutan politik dan kelas sosial.
5. Negara kesejahteraan ditentukan oleh struktur dan kepentingan negara atau pemerintahan.

Pendekatan secara luas kronologis diadopsi. Ini menekankan baik sejauh mana teori-teori negara kesejahteraan yang pasti makhluk waktu mereka (misalnya, pada puncak popularitas fungsionalisme kita melihat pemahaman fungsionalis negara kesejahteraan) dan cara di mana teori berkembang dengan mereaksikan (baik mengembangkan atau menolak) pendekatan sebelumnya. Untuk kemudahan eksposisi, kita fokus pada satu atau dua teks kunci di setiap daerah. Dalam kebanyakan kasus ada, tentu saja, literatur yang luas di daerah masing-masing dengan variasi yang cukup besar antara penulis yang berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Dalam paper ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif, dengan membandingkan dengan Negara-negara lain yang telah sukses mengelola kekayaan minyak dan gas buminya untuk kesejahteraan rakyatnya mempergunakan *study literatur*. Kemudian baru menyusun metode/pola pengelolaan minyak dan gas bumi, yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia, model yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta meningkatkan transparansi keuangan di Pertamina.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disini saya akan membahas contoh dari beberapa negara yang telah berhasil mengelola sumber daya minyaknya dengan baik, sehingga masyarakatnya dapat sejahtera. Beberapa negara yang akan saya bahas adalah Norwegia dan Timor Timur

Norwegia

Norwegia adalah negara yang sukses untuk mengelola pendapatan minyak mereka untuk kesejahteraan rakyat Norwegia. Dana Pensiun Pemerintah (Norwegia: Statens pensjonsfond Utland, SPU) adalah dana ke mana kekayaan surplus yang dihasilkan oleh pendapatan minyak bumi Norwegia diendapkan. Dana tersebut berubah nama pada bulan Januari 2006 dari nama sebelumnya, Dana Minyak Norwegia. Dana ini sering disebut sebagai The Oil Fund. Sampai dengan valuasi pada Juni 2011, itu dana pensiun terbesar di dunia, meskipun itu bukan dana pensiun dalam arti konvensional karena berasal dukungan keuangan dari keuntungan minyak dan tidak iuran dana pensiun. Pada 30 September 2014 total nilai adalah NOK5.534 triliun (\$ 857.100.000.000), memegang satu persen dari pasar ekuitas global. Dengan 1,78 persen saham Eropa, dikatakan menjadi pemilik saham terbesar di Eropa.

Tujuan dari dana minyak bumi adalah untuk berinvestasi bagian dari surplus besar yang

dihasilkan oleh sektor minyak bumi Norwegia, yang dihasilkan terutama dari pajak perusahaan, tetapi juga pembayaran untuk lisensi untuk mengeksplorasi serta bunga dan dividen dari sebagian negara dimiliki Statoil. Pendapatan saat ini dari sektor minyak bumi diperkirakan pada periode puncaknya dan menurun selama dekade berikutnya. Dana Minyak didirikan pada tahun 1990 setelah keputusan oleh legislatif negara untuk melawan efek dari penurunan yang akan datang dalam pendapatan dan untuk kelancaran keluar efek mengganggu dari harga minyak yang sangat fluktuatif.

Dana ini dikelola oleh Norges Bank Manajemen Investasi (NBIM), bagian dari Bank Sentral Norwegia atas nama Menteri Keuangan. Saat ini dana pensiun Norwegia adalah yang terbesar di Eropa dan lebih besar dari masyarakat-karyawan dana pensiun California (CalPERS), salah satu yang terbesar dana pensiun publik di Amerika Serikat. Dalam sebuah kertas putih parlemen pada April 2011 Kementerian Norwegia Keuangan memperkirakan bahwa dana tersebut akan mencapai NOK 4,3 triliun (\$ 717.000.000.000) pada akhir 2014 dan NOK 6 triliun (\$ 1 trilyun) pada akhir 2019. Menurut perkiraan para 2030 nilai dana akan NOK 7,4 triliun (\$ 1300000000000).

Sejak tahun 1998 dana telah diizinkan untuk berinvestasi hingga 40 persen dari portofolio di pasar saham internasional. Pada bulan Juni 2009, kementerian memutuskan untuk menaikkan porsi saham 60 persen. Pada bulan Mei 2014, Gubernur bank sentral mengusulkan menaikkan tingkat 70 persen. Pemerintah Norwegia direncanakan bahwa sampai 5 persen dari dana harus diinvestasikan dalam real estate, mulai tahun 2010. Sebuah kebijakan khusus untuk investasi real estate disarankan dalam laporan Swiss Mitra Grup menulis untuk Kementerian Keuangan Norwegia.

Dengan pengelolaan dana minyak yang baik dan saham mereka, kebutuhan dasar bagi orang-orang Norwegia seperti pendidikan dari TK sampai universitas dan kesehatan gratis. Pemerintah juga memberikan pensiun baik untuk orang-orang pensiun. Pengangguran di Norway mendapatkan uang dari pemerintah. Keragaman besar dari pendapatan di Norway tidak besar daripada membuat kriminalitas di sana kecil.

Timor Timur

Timor Leste sebelumnya adalah bagian dari Indonesia. Tapi setelah mereka merdeka, Timor-Leste menjadi eksportir minyak pada tahun 2004 ketika produksi dimulai di ladang minyak di wilayah bersama dengan Australia di Laut Timor. Saat ini pendapatan dari minyak bumi, dapat meningkatkan ekonomi di Timor-Leste, dengan pendapatan minyak bumi pada tahun 2010 untuk 73% dari PDB, membuat Timor-Leste PDB nya hampir mendekati Indonesia. Setelah enam bulan konsultasi dengan masyarakat. Dana Minyak disahkan secara hukum pada tahun 2005, undang-undang pertama yang telah disetujui dengan suara bulat oleh Parlemen (Drysdale, 2010). Hukum Petroleum memberikan tujuan dari PF sebagai hati-hati mengelola sumber daya minyak bumi "untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan,

... dengan cara yang adil dan merata, dan memberikan keunggulan untuk transparansi dalam pengelolaannya" (DRTL, 2005)

Timor-Leste telah mencapai tujuannya memberikan transparan, akuntabel mekanisme untuk mengelola pendapatan minyak negara itu. Tanggung jawab telah terpecah antara eksekutif, Bank Sentral dan legislatif yang mengurangi kemungkinan dana yang digunakan di luar kepentingan umum. Dana Minyak menyediakan dasar pendanaan diprediksi untuk anggaran nasional dan terintegrasi dengan baik ke dalam proses anggaran, yang melibatkan baik eksekutif dan legislatif. Akibatnya, tanpa persetujuan parlemen melalui hukum anggaran, eksekutif tidak dapat mengubah proporsi kekayaan minyak bumi yang dihabiskan setiap tahun, atau menghabiskan pendapatan luar anggaran. Multi-

partai perwakilan proporsional sistem pemilu biasanya membutuhkan beberapa pihak untuk membentuk pemerintahan koalisi. Ini dispersi kekuasaan politik dalam sistem demokrasi adalah faktor selanjutnya yang menciptakan transparansi dalam pengoperasian Dana Minyak di Timor-Leste.

Indonesia

Otonomi daerah sebagai sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia bukanlah hal baru. Otonomi daerah yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, namun, pelaksanaan otonomi daerah belum membuahkan hasil yang optimal. Setelah Reformasi dan jatuhnya Soeharto, ide untuk menerapkan otonomi daerah kembali muncul, dan dorongan untuk menerapkan itu bahkan lebih kuat. Permintaan masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah disambut oleh Presiden Habibie. Beberapa undang-undang yang dihasilkan: Hukum N0 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini Republik Indonesia memiliki 34 provinsi dan 511 kabupaten / kota. Untuk sama-sama mendistribusikan pendapatan daerah di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Minyak dan Gas Company (PERTAMINA), penulis berpendapat bahwa setiap daerah memiliki perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD) sebagai wakil dari pemerintah daerah untuk membeli saham minyak dan gas. Karena tingginya jumlah perusahaan oleh pemerintah daerah perlu dibentuk, Pemerintah harus memiliki Pasar Saham Minyak dan Gas Bumi Nasional (PSMN).

Masyarakat Indonesia melalui perusahaan mereka masing-masing dapat membeli saham minyak dan gas di National Oil dan Gas Stock Market (PSMN) dengan persyaratan dan kondisi tertentu mengenai harga, jumlah, ukuran, volume, dan lain sebagainya. Saham yang dijual ke publik tidak boleh melebihi 49% dari total saham, sehingga PERTAMINA masih memiliki 51% sahamnya. Dijual ke publik ini hanya khusus untuk orang Indonesia, tidak diperkenankan untuk dijual ke orang asing.

Untuk memastikan bahwa ini dapat dengan baik-dilaksanakan, pemerintah daerah, tentu saja, harus benar mempersiapkan perencanaan, pengawasan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan manajemen.

Model ini atau pola dapat sama-sama diterapkan untuk penerbitan saham sumber daya alam lainnya di Indonesia seperti timah, batubara, bauksit, dan lain sebagainya.

BUMD

Skema 1:

Pertamin a → Pasar Saham Minyak

Dan Gas Nasional

Orang Indonesia

(Untuk skema lebih jelasnya dapat menghubungi peneliti secara langsung)

5. PENUTUP

Untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, penerbitan saham minyak dan gas bisa menjadi alternatif mengingat minyak dan gas merupakan sumber dominan pendapatan bagi bangsa Indonesia selain pajak.

Belajar dari beberapa Negara yang telah sukses mengelola sumber daya minyaknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Norwegia dan Timor Leste, maka timbul ide tentang adanya skema tersebut.

Norwegia merupakan Negara kaya dan memiliki PDB tertinggi di Eropa berkat kekayaan minyaknya. Rakyatnya juga makmur, karena cadangan minyak dan pengelolaan sumber daya minyaknya yang baik. Sekolah di Norwegia gratis untuk warga Norwegia sampai tingkat Doktoral. Demikian juga dengan kesehatan. Warga Norwegia yang tidak punya pekerjaan, diberi tunjangan oleh Pemerintah sampai mereka memperoleh pekerjaan. Orang lanjut usia dan pensiunan di Norwegia diberi tunjangan pensiun yang tinggi.

Sedangkan Timor Leste merupakan Negara kecil yang baru merdeka dari Indonesia. Setelah beberapa tahun merdeka dari Indonesia, saat ini PDB Timor Leste hampir mendekati Indonesia. Pemerintah berhasil mengelola sumber daya minyaknya dengan baik melalui Petroleum Fund untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Timor Leste juga berani melindungi rakyatnya dari gangguan eksternal dan internal tanpa menunggu Negara tersebut kaya raya. Hal ini terlihat dari nilai *Social Protection Index* versi Asian Development Bank, dimana Timor Leste berada di urutan 11, jauh di atas Indonesia yang berada di urutan 27 dari 35 negara.

Di masa depan penjualan stok minyak dan gas juga diharapkan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di PERTAMINA, yang sejauh memiliki izin untuk memonopoli pengelolaan dan penjualan minyak dan gas di Indonesia.

Pola investasi bersama antara perusahaan milik pemerintah daerah di seluruh daerah di Indonesia, Bursa Pasar Minyak dan Gas Nasional dan PERTAMINA dan Pemerintah diharapkan mendorong kepala daerah, para pejabat dari PERTAMINA, direktur regional perusahaan milik pemerintah menjadi transparan, akuntabel. Cara ini diharapkan dapat mengurangi para pejabat untuk tidak korupsi atau nepotisme. Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat karena masing-masing daerah akan memiliki kepentingan bersama, yaitu salah satu ekonomi makmur.

Model ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah penghasil minyak dan pasukan keamanan bertanggung jawab atas kelancaran dan keamanan operasi minyak dan gas di wilayah tersebut. Di daerah, minyak dan gas tidak lagi milik masing-masing daerah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

6. REFERENSI

- _____ ; Republic Indonesia's Law 1945
 Law No 22 of 1999 on Regional Government and Law No. 25 of 1999 on Financial Balance between Central and Local Government.
 Law No. 32 of 2004 on regional governments and Law No. 33 of 2004 on the financial balance between central and regional governments.
 AM. Putut prabantoro ; *Migas Untold Story*; Publisher : PT. Gramedia Pustaka Media ; 2002
The head of the public: there were 9 cases of corruption in BPH Migas ; Gatra ; 13 November 2013
 American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2011 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
 Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc.
 Dictionary of Unfamiliar Words by Diagram Group Copyright © 2008 by Diagram Visual Information Limited
 Arrow, K.J. 1950. A difficulty in the concept of social welfare. *Journal of Political Economy* 58, 328-346.
 Arrow, K.J. 1951. An extension of the basic theorems of classical welfare economics.

- Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, ed. J. Neyman, Berkeley: University of California Press, 507–32. Arrow, K.J. 1963. Social Choice and Individual Values. 2nd edn, New York: John Wiley and Sons.
- Bergson, A. 1938. A reformulation of certain aspects of welfare economics. *Quarterly Journal of Economics* 52, 310–34.
- Boadway, R. 1974. The welfare foundations of cost-benefit analysis. *Economic Journal* 84, 926–39.
- Clarke, E.H. 1971. Multipart pricing of public goods. *Public Choice* 11, 17–33.
- Coase, R.H. 1960. The problem of social cost. *Journal of Law and Economics* 3, 1–44.
- Drysdale, J. (2005) 'Managing petroleum revenue in Timor-Leste: a brief explanation'. ANU Development Bulletin 68, October 2005 (<http://devnet.anu.edu.au/db%2068-pdfs/03%20Drysdale%2068.pdf>).
- Drysdale, J. (2010) Sustainable Development or Resource Cursed? An Exploration of Timor-Leste's Institutional Choices. Chapter 4 Managing Timor-Leste's petroleum revenue. PhD Thesis Australian National University Digital Collections (2010) (<https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/49322/9/05chapter04.pdf>).
- Faisal Basri, Timor Leste sudah menyusul Indonesia? ; Faisal Basri's Blog, Januari 2014
- Feldman, A.M. and Serrano, R. 2006. *Welfare Economics and Social Choice Theory*, 2nd edn, New York, Springer.
- Gibbard, A. 1973. Manipulation of voting schemes: a general result. *Econometrica* 41, 587–601.
- Groves, T. and Loeb, M. 1975. Incentives and public inputs. *Journal of Public Economics* 4, 211–26.
- Kaldor, N. 1939. Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility. *Economic Journal* 49, 549–52.
- Kramer, G.H. 1973. On a class of equilibrium conditions for majority rule. *Econometrica* 41, 285–97.
- Lange, O. 1942. The foundations of welfare economics. *Econometrica* 10, 215–28. Lange, O. and Taylor, F.M. 1939. *On the Economic Theory of Socialism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Lerner, A.P. 1934. The concept of monopoly and the measurement of monopoly power. *Review of Economic Studies* 1, 157–75.
- Lerner, A.P. 1944. *The Economics of Control*. New York: The Macmillan Company.
- Lindahl, E. 1919. Just taxation – a positive solution. Translated and reprinted in *Classics in the Theory of Public Finance*, ed. R.A. Musgrave and A.T. Peacock, New York: Macmillan, 1958.
- Marshall, A. 1920. *Principles of Economics*. 8th edn, London: Macmillan, ch. VI. Maskin, E. 1999. Nash equilibrium and Welfare optimality. *Review of Economic Studies* 66, 23–38. Mas-Colell, A., Whinston, M.D., and Green, Jerry R. 1995. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press.
- McKelvey, R. 1976. Intransitivities in multidimensional voting models and some implications for agenda control. *Journal of Economic Theory* 12, 472–82. Volume 1, 1922.
- Socialism: An Economic and Social Analysis*. 3rd edn., Indianapolis: Liberty Classics, 1981. Pigou, A.C. 1920. *The Economics of Welfare*. London: Macmillan, Part II.
- Plott, C.R. 1967. A notion of equilibrium and its possibility under majority rule, *American Economic Review* 57, 787–806.
- Samuelson, P.A. 1954. The pure theory of public expenditure. *Review of Economics and Statistics* 36, 387–9.

- Satterthwaite, M.A. 1975. Strategy-proofness and Arrow's conditions: existence and correspondence theorems for voting procedures and social welfare functions. *Journal of Economic Theory* 10, 187-217.
- Scitovsky, T. 1941. A note on welfare propositions in economics. *Review of Economic Studies* 9, 77-88.
- Sen, A.K. 1970. *Collective Choice and Social Welfare*, San Francisco: Holden-Day.

UPAYA PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA MELALUI OPTIMALISASI USAHA WEDDING ORGANISER

Ratna Roostika¹⁾, Yuni Siswanti²⁾, Hery Sutanto³⁾

Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta

ratna.roostika@upnyk.ac.id¹⁾

yuni_sis2@yahoo.co.id²⁾

herystnt.osya@gmail.com³⁾

Abstract

Yogyakarta has many talented artists and craft makers. The strong influence from the traditional culture and Kasultanan Yogyakarta has caused many local cultures are well preserved. One among the important culture is wedding ceremony. Traditional wedding ceremonies have so far provide opportunities for the local people to make income for example by making wedding souvenirs, designing wedding outfit, making wedding attributes, working as master of ceremony, providing decoration, as well as offering traditional music. The Current IbM project was targeted to women entrepreneurs in wedding organizer. Women entrepreneurs joining in KUBe Sekar Ayu were trained and guided as partners in this project. The partners reside in Giwangan Districts Yogyakarta Special Region. Problems in this wedding industry covers: 1) lacking in creativity and innovation, 2) lacking in marketing capabilities, 3) lacking in packaging, and 4) lacking in confidence. Solutions are by training and assistances. Project outputs are 1) increase in creativities, confidence and marketing capabilities. 2) Providing tools to support crafts art works. 3) A book specialized in preserving Yogyakarta Cultural specialty is arranged.

Keywords: *Wedding organizer, women entrepreneurs, IbM, preserving cultural specialty.*

1. PENDAHULUAN

Yogyakarta terkenal dengan masyarakatnya yang memiliki nilai kreativitas tinggi sehingga sering dikenal sebagai kota yang kaya budaya. Sebagian besar dari Industri-industri yang ada adalah industri rumahan yang banyak didominasi para wanita karena dapat dikerjakan di rumah sambil menjaga anak.

Salah satu daerah yang mayoritas warganya adalah wirausaha kecil (keluarga) adalah di Kelurahan Giwangan. Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dihuni oleh 6.717 jiwa. Program ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini akan dilakukan terhadap mitra yang berlokasi di Kelurahan Giwangan. Justifikasi dipilihnya Giwangan adalah keunikannya dimana mayoritas warganya adalah wirausaha terkait wedding organizer (pengelolaan pernikahan). Bidang usaha yang digeluti berkaitan dengan penyediaan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam acara pernikahan. Warga yang satu dengan warga yang lain saling melengkapi keahlian untuk menghasilkan produk sesuai pesanan pelanggan. Sekitar 90 an keluarga tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "Sekar Ayu". KUBE ini khusus terlibat di bidang usaha *wedding organizer*. KUBE Sekar Ayu ini adalah bagian dari kelompok usaha yang utama yang telah dikelola warga sejak tahun 2006 dan membawahi beberapa KUBE seperti: KUBE jamu, kuliner, bordir payet, camilan, batik, kain perca, dan pengolahan limbah. Meskipun mayoritas adalah wanita, bapak-bapak

juga terlibat dalam usaha *wedding organiser* seperti dalam kerawitan, pembuatan baju tari, dan janur.

Keterlibatan wanita Indonesia dalam kegiatan ekonomi sebagai wirausaha telah ada sejak jaman dahulu. Berdasar penelitian Kerstan dan Berningham dalam Tambunan (2012), sektor perdagangan kecil yang didominasi wanita sudah menjadi tradisi Jawa. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa kerajinan sulaman adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang populer bagi wanita pedesaan jaman dulu. Hal ini kadang mengakibatkan suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga malah menjadi pengangguran tidak kentara (Siswanto, 2009), padahal kebutuhan rumah tangga harus berjalan terus seperti makan, kesehatan dan sekolah. Usaha kecil menengah (UKM) banyak menjadi pilihan para wanita untuk bekerja terutama yang sudah berkeluarga karena memberikan keleluasaan untuk mendapatkan tambahan pendapatan, disamping mengurus keluarga. Berdasar penelitian Sulaiman (1982), efek lain bekerja adalah para pengrajin wanita ditemukan merasa meningkat statusnya bila sanggup menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka. Mengingat bahwa UKM adalah jenis industri yang paling memungkinkan di akses oleh sebagian besar perempuan di Indonesia dan UKM adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (96%) bagi Indonesia (Kuncoro 2008), maka menjadi hal yang urgen bagi pengembangan dan dukungan yang serius untuk program-program yang berorientasi pada keberhasilan kinerja UKM.

Diantara beragam aktivitas bisnis kecil dibawah KUBe Sekar Ayu, tim Ipteks bagi Masyarakat (IbM) berkonsentrasi pada dua mitra yaitu unit produksi baju pengantin dan unit produksi kampuh (jarit prada) manten. Justifikasi dipilihnya unit produksi ini karena **1)** masih minimnya kemampuan pengrajin dalam menjalankan usahanya, **2)** telah mampu membuka lapangan kerja, **3)** memiliki keterkaitan kuat dengan unit usaha lain, **4)** jenis produk yang digeluti memiliki peran penting dalam memelihara warisan budaya keistimewaan Yogyakarta. Kondisi kedua mitra adalah sebagai berikut:

1. Mitra unit produksi baju pengantin.

Unit produksi baju pengantin dikelola oleh Ibu Ayu Komang beralamatkan di Ponggalan, UH 7-331, RT 18, RW 06, Yogyakarta. Meskipun unit produksinya adalah produksi baju pengantin, namun mitra ini khususnya hanya memberi desain payet-payet sesuai motif broklatnya. Baju pengantinnya bisa disediakan oleh warga lainnya, langsung disediakan pelanggan, disediakan oleh para penjual baju dari pasar Beringharjo, dan membeli sendiri kebaya broklat dari pasar Beringharjo.

Pengrajin kebanyakan membuat berdasarkan pesanan. Kerajinan memberi payet baju-baju kebaya ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketrampilan tinggi untuk menghasilkan hiasan yang indah. Harga jualnya setelah diberi payet-payet akan menjadi mahal rata-rata diatas Rp. 300.000,-/baju kebaya. Para karyawan dapat membawa pulang baju yang digarapnya untuk diberi payet-payet sehingga dapat dikerjakan diwaktu senggang. Pengrajin cenderung kewalahan dalam menerima pesanan sehingga pasar tidak menjadi masalah besar. Keterbatasan pengrajin memenuhi volume besar karena pekerjaan ini memerlukan kejelian, ketelitian, dan kesabaran sehingga waktunya lama karena dibuat dengan manual.

Selama ini pengrajin mengembangkan pengetahuannya dari belajar otodidak. Pengrajin berusaha mengembangkan kreativitas lewat mencoba-coba contoh model yang ditemukan dari majalah, buku, TV maupun dari kios-kios di Pasar Beringharjo. Pengrajin juga tidak melakukan pencatatan keuangan dan data pelanggan yang seharusnya penting dilakukan apabila bisnis lama-lama menjadi semakin besar. Peralatan pendukung juga masih terbatas, sehingga tidak bisa memenuhi volume pesanan yang besar dan cepat.

2. Mitra unit produksi kampuh (jarik prada) manten

Unit produksi kampuh (jarik prada) manten dikelola oleh Tri Wahyuningsih beralamatkan di Mrican, UH 7-337, RT 22, RW 08, Yogyakarta. Unit produksi kampuh (jarik prada) manten lebih besar ukuran produksinya dibanding mitra sebelumnya. Kondisi tempat kerja unit ini masih tidak memadai dan belum diatur dengan rapi dan kesannya berantakan. Dalam ruang produksi, gulungan-gulungan kain besar bertumpuk-tumpuk bercampur dengan potongan-potongan pola yang lebih kecil. Hal ini bisa berakibat sulitnya mencari bagian yang dibutuhkan apabila barang-barang tidak tertata rapi. Tempat kerja memang sempit karena berada ditengah kampung diantara perumahan padat penduduk. peralatan yang dibutuhkan juga merupakan peralatan standar. Sebenarnya yang lebih dibutuhkan bukan peralatan jahit-menjahit, namun lebih pada adanya meja untuk kerja yang nyaman dan almari-almari untuk merapikan bahan-bahan produksi.

Pengrajin jarik prada saat ini lebih fokus pada aktivitas memenuhi pesanan-pesanan kostum tari tradisional jawa, memberi sulaman pada jarik batik dan memberi prada emas pada jarik batik. Karyawan yang mendukung industri ini tidak hanya wanita tapi juga beberapa pria. Beberapa produk yang dihasilkan merupakan produk yang sudah menjadi barang setengah jadi bikinan industri lain. Contohnya, warga/pengrajin lain bertugas membordir, lalu karyawan Ibu Tri akan melanjutkan dengan memberi sulaman emas. Banyak pengrajin-pengrajin payet dari daerah Blawongan yang mengirimkan baju yang sudah dipayet untuk selanjutnya disulamkan benang emas ke unitnya Ibu Tri. Produksi yang jumlahnya sering besar adalah pesanan prada jarik dari para pedagang di pasar Beringharjo. Selain itu, UKM ini juga banyak menerima pesanan besar untuk kostum tari khususnya tari tradisional jawa baik dari ukuran anak-anak hingga dewasa.

Di Yogyakarta sering diselenggara kan event-event budaya ataupun nasional yang banyak membutuhkan kostum daerah atau kostum-kostum tari-tari daerah. Oleh karena itu industri ini sangat mendukung terjaganya keberlanjutan keistimewaan Yogyakarta yang dikenal dengan citra kota budaya yang tinggi. Jarik Prada berhiaskan emas merupakan bagian penting dari kostum pengantin jawa. Produk-produk ini memiliki arti penting terpeliharanya kualitas kostum tradisional Yogyakarta maupun kualitas kostum pernikahan tradisional. Jumlah pengrajin prada Jarik ini sangat terbatas di Luar Yogyakarta, sehingga banyak pembeli ataupun pedagang yang jauh-jauh dari luar kota mencari jenis kain prada ini ke Yogyakarta. Alternatifnya, pilihan jarik berkualitas tinggi juga disediakan oleh jarik dari produsen di Surakarta.

Berbeda dengan mitra I, unit jarik prada ini sudah mencatat secara manual pesanan-pesanan dan keuangan dari pelanggan. Hal ini karena volume produksi dan penjualan yang sudah cukup besar. Karena sering bertransaksi dengan volume besar, maka pembayaran oleh pelanggan sering menggunakan surat cek/bilyet giro (bukan cash). Sudah menjadi kebiasaan bahwa surat cek ini tidak bisa langsung diuangkan. Sering baru bisa diuangkan 1-3 bulan kedepan. Dengan masalah ini sering pengrajin menukar bilyet gironya dengan institusi/rekanan yang bisa menukar dengan uang cash. Resikonya adalah adanya biaya komisi 4%.

Karena cenderung kuwalahan melayani pesanan, maka jarang melakukan pendekatan pemasaran termasuk promosi. Menumpuknya pesanan menunjukkan potensi peluang pasar yang tinggi yang harus ditangkap. Pengrajin juga belum pernah mendokumentasikan produk-produk yang sudah diproduksi sehingga tidak memiliki katalog yang bisa membantu pembeli menentukan pilihan pesannya. Sebagian besar pemesan adalah para pedagang Pasar Beringharjo. Pelanggan lainnya termasuk institusi akademi, institusi pemerintah, institusi budaya, dan individu-individu.

3. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan di lapangan, maka permasalahan-permasalahan yang dialami para pengrajin dapat diidentifikasi antara lain:

1. Permasalahan terkait proses produksi

Permasalahan dalam proses produksi lebih berkaitan dengan keterbatasan tingkat ketrampilan/skill dari para pengrajin. Selama ini para pengrajin hanya mengandalkan desain-desain yang dibawa oleh pelanggan dan mendapatkan ide dari melihat-lihat desain dari toko-toko cinderamata baik di jalan Malioboo ataupun di pusat cinderamata sekitar. Semua pengalaman masih diperoleh dari pembelajaran secara otodidak, belajar dan mencoba sendiri. Para pengrajin belum memiliki akses dengan pengrajin yang sudah berhasil dengan usaha cinderamata ataupun dari pendidikan formal.

2. Permasalahan terkait peralatan penunjang produksi

Pengrajin sering mendapati masalah bahwa pesanan sedemikian banyak namun tidak mampu memenuhi kuota yang diinginkan pelanggan. Selain diakibatkan karena sebagian besar pekerjaan masih dikerjakan secara manual, para pengrajin masih menggunakan fasilitas peralatan penunjang produksi yang masih sangat sederhana. Oleh karena itu diperlukan fasilitas peralatan penunjang yang mampu meningkatkan produktivitas pengrajin seperti patung display, almari display, dan alat-alat hasta karya seperti lem tembak.

3. Permasalahan sumber daya manusia

Permasalahan sumber daya manusia lebih ditekankan pada bagaimana para pengrajin mengelola pencatatan atau manajemen usaha kecil seperti manajemen pemesanan dan manajemen keuangan. Disamping itu, karena semua pengrajin tergabung dalam suatu kelompok usaha masyarakat bersama Giwang Barokah yang lebih besar, maka perlu adanya pengelolaan pencatatan keorganisasian yang lebih terorganisir agar setiap KUBE yang tergabung didalamnya dapat selalu saling belajar bersama dan saling mendukung untuk kemajuan bersama. Para pengrajin juga belum memiliki semangat kewirausahaan karena masih sekedar hanya ikut-ikutan atau dalam artian belum cukup proaktif dalam mengembangkan usaha.

4. Permasalahan pemasaran

Para pengrajin masih mengandalkan pekerjaan berdasarkan pesanan. Meskipun hanya mengandalkan pesanan, banyak pengrajin yang cukup kuwalahan dalam memenuhi pesanan. Beberapa pelanggan mengeluhkan tidak adanya sampel ataupun katalog untuk melihat hasil produk yang sudah pernah diproduksi oleh pengrajin. Hal tersebut membatasi pilihan pelanggan. Disamping itu, pengrajin juga belum memiliki lemari display dan tidak memajang produk-produk hasil kreasi mereka dirumahnya untuk bisa dijadikan sampel. Pengrajin belum berpikir bahwa mereka perlu melakukan promosi dan memamerkan produknya untuk bisa dikenal pelanggan. Dari sisi pemasaran, pengrajin masih sangat lemah dalam melibatkan aspek pemasaran dalam proses produksinya utamanya dalam mengenalkan dan mem

5. Persoalan Prioritas untuk Diatasi

Dari beberapa permasalahan-permasalahan sebagai temuan hasil survei awal tim IBM dengan para mitra di lokasi usaha, maka diputuskan tiga permasalahan utama yang memungkinkan untuk diberikan solusi.

- a. **Permasalahan proses produksi.** Dalam hal ini lebih diutamakan pada masih sangat terbatasnya skill dan ketrampilan inovasi pengrajin untuk menghasilkan produk-produk perlengkapan pengganti yang dipasar sudah sangat berkembang.
- b. **Permasalahan Sumber Daya Manusia.** Dalam hal ini ada dua hal masalah utama yaitu adanya karakteristik kewirausahaan yang belum cukup kuat, sehingga masih kurang percaya diri untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Selain itu para

pengrajin juga kurang memiliki kemampuan mengelola pegawai, sehingga penting untuk memahami bagaimana menciptakan suasana kerja yang nyaman.

- c. **Permasalahan Pemasaran.** Dalam hal ini meskipun kewalahan dengan pemenuhan pesanan, mereka harus waspada bahwa suatu saat kondisi pasar akan lesu ataupun pesaing makin banyak, dan selera pasar berubah. Pengrajin harus selalu inovatif untuk menawarkan produk yang bernilai.

4. METODE PELAKSANAAN

1. **Metode Pelaksanaan proses produksi**
2. **Metode Pelaksanaan Sumber Daya Manusia**
3. **Metode Pelaksanaan Pemasaran**

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut diuraikan pembahasan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan wedding organizer.

1. Pelatihan I tentang SDM dan peningkatan proses produksi

Kegiatan pelatihan pertama berupa **peningkatan kinerja SDM**, yang meliputi penyuluhan peran kewirausahaan dan manajemen. Dalam hal ini, penyuluhan dilakukan oleh pengusul yang memiliki latar belakang manajemen. Pelatihan dilakukan mulai jam 9 pagi hingga jam 3 siang. Dua jam pertama diisi dengan saling diskusi pendapat antara tim pengusul dengan warga yang tergabung dalam kelompok usaha untuk berbagi ilmu terkait potensi kewirausahaan dan bagaimana manajemen pengelolaan usaha kecil. Pembahasan tentunya difokuskan pada konteks industry kreatif wedding organizer yang memiliki aspek luas seperti souvenir, kartu undangan, kelompok kerawitan, kelompok pentas seni, dokumentasi fotografi, kuliner, dan sewa alat alat pendukung.

Dalam rangka mengatasi **permasalahan produksi**, maka tim pengusul mengundang perias pengantin bersertifikat. Acara penyuluhan topik kewirausahaan, keuangan dan SDM dilanjutkan dengan praktek peningkatan ketrampilan wedding organizer. Pemateri wedding organizer dilakukan oleh perias pengantin bersertifikat. Untuk pelatihan tahap pertama ini, atas usulan peserta, pemateri memberikan latihan merias tutup kepala pengantin muslim. Permintaan tersebut terkait dengan semakin banyaknya pengantin yang meminta untuk dihias bergaya muslim di Yogyakarta. Pelatihan dilakukan dengan praktek oleh pemateri setelah itu setiap peserta dengan pasangannya saling mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan tadi. Beragam style penutup kepala diberikan dan dipraktekkan bersama oleh peserta. Dari style tradisional, style gaya penganten muda, style gaya Maroko, dan lain sebagainya.

Pemateri selain memberikan ilmunya juga sudah menentukan dan membawakan bahan-bahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan rias pengantin. Alat-alat yang diperlukan mencakup kerudung segi empat dan pasmina sesuai jumlah peserta, ragam pasmina untuk variasi kerudung, perhiasan pendukung, asesori pelengkap, dan Baju yang sesuai. Meski belum termasuk rias wajah karena waktu yang terbatas, tampak kreativitas peserta dalam menyerap ilmu yang diberikan cukup memuaskan.



Dengan pelatihan ini nampak peserta menjadi semakin berani memadukan warna-warna maupun memberikan kreasi hiasan kepala dalam praktek ini. Korsase kepala ditambahkan sehingga semakin mempercantik hiasan kepala. Peserta setelah pelatihan ini diharapkan menjadi semakin percaya diri untuk mengembangkan kreativitas menghias seseorang meski tidak harus untuk acara pernikahan. Karena di Yogyakarta banyak mahasiswa,

kemampuan menghias kepala pengantin ini juga sangat berpeluang untuk menghias mahasiswa yang mengikuti acara wisuda.

Pelatihan terakhir adalah pelatihan yang paling menarik yaitu membuat seserahan hantaran pengantin atau yang dikenal dengan istilah peningset. Dengan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan yaitu handuk, pakaian dalam dan jarik, maka peserta dituntut untuk menghias nampan seserahan. Pemateri mengajarkan membuat kelinci dan kura-kura dari bahan handuk. Yang paling mewah dan sangat mengundang decak kagum peserta adalah saat pemateri mempraktekkan cara membuat burung merak dari kain jarik. Sayang sekali karena terbatasnya waktu, ibu-ibu belum sempat mempraktekkan membuat burung merak. Praktek membuat hantaran akan dilanjutkan dalam pelatihan selanjutnya. Ibu-ibu sangat antusias menunggu pelatihan selanjutnya karena pemateri sangat trampil dan karenanya ibu-ibu sangat menikmati tambahan ilmu yang diperoleh.

Perbanyak buku-buku peningkatan ketrampilan

Untuk membantu mengembangkan kreativitas diluar session yang dipandu pemateri rias pengantin, maka tim pengusul juga membelikan buku-buku terkait pembuatan souvenir-souvenir upacara pengantin, membuat kotak-kotak indah, membuat kreasi pita, dan membuat paket seserahan pengantin. Buku-buku ini dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Buku ini diperbanyak dan buku-buku yang dibeli adalah sebagai berikut:

2. Pelatihan II tentang pemasaran dan peningkatan proses produksi

Pelatihan kedua ini difokuskan pada pentingnya pemasaran dan pengemasan serta peningkatan skill dan kualitas produksi. Di jaman teknologi modern ini para pengrajin harus mulai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkenalkan usahanya. Bisa lewat fasilitas blackberry maupun internet. Karena setiap warga saling melengkapi dalam usaha pengelolaan pernikahan, maka setiap warga perlu juga untuk membentuk pemasaran bersama. Justru jangan bergerak sendiri-sendiri dan menganggap warga lain adalah pesaing. Pelatihan ini juga member masukan mengenai pentingnya mengemas produk dengan baik. Produk yang dibuat baik namun dikemas buruk akan menjatuhkan harga barang. Produk yang rata-rata tapi dikemas bagus bisa meningkatkan harga produk. Kemasan pun juga bisa dimanfaatkan sebagai efek differensiasi.

Pelatihan kedua diawali dengan penyuluhan pemasaran dan pengemasan kemudian seperti acara pelatihan pertama, dilanjutkan dengan pelatihan praktek rias pengantin. Praktek rias pengantin ini langsung dilakukan dengan praktek pembuatan burung merak oleh peserta dibantu pemateri. Bahan disediakan dan disiapkan oleh pemateri. Pembuatan burung merak peningset ternyata tidaklah terlalu seuit. Setelah praktek membuat burung merak, pelatihan dilanjutkan oleh kreasi hias kepala lagi dengan style yang berbeda dari pelatihan pertama.

Pelatihan diakhiri dengan membuat ragam asesori bros dan nampan peningset. Bros bisa dibuat baik dari bahan kain flannel, kain pita, maupun kain perca. Pembuatan asesori oleh warga sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun mereka selama ini kurang mendapatkan info mengenai produk-produk atau kreasi-kreasi kreatif yang sudah muncul dipasar. Sehingga dengan membahas buku-buku yang diperbanyak, maka peserta antusias membuat potongan-potongan kain sesuai panduan dalam buku serta dipandu pemateri. Untuk selanjutnya, setelah latihan, peserta bisa membawa bahan-bahan yang tersedia, untuk dibawa pulang dan dipraktekkan di rumah masing-masing.

3. Pelatihan Pemakaian Jarik

Pelatihan ke III dilakukan untuk melatih memakai busana tradisional dengan baik dan benar. Selama ini banyak pemakaian busana tradisional yang tidak mengikuti tata cara tradisional yang sebenarnya memiliki filosofi yang tinggi. Banyaknya orang yang cenderung

mencari kepraktisan dan menjahitkan kain jarik di tukang jarik menjadikan memakai jarik hanya seperti memakai baju sehari-hari yaitu tinggal memakai dan menutup dengan ritsleting.

Banyak peserta yang tidak memahami jenis-jenis kain batik, keistimewaan arti dan kapan pemakaiannya. Apa beda motif jarik antara Yogyakarta dan Surakarta. Banyak yang terlibat dalam bisnis wedding organizer tapi tidak bisa mewiru jarik. Bagaimana menyimpan jarik yang benar dan melipat juga tidak banyak dipahami. Pelatihan ini dilaksanakan tanggal 28 Desember 2014 oleh Ibu-Ibu yang tergabung dalam kelompok Sekar Ayu.

Diharapkan teknologi dan ketrampilan menggunakan kain jarik ini tidak semata-mata digunakan untuk apabila menghadiri acara resepsi namun bisa untuk melestarikan budaya Jawa yang terkenal memiliki filosofi yang tinggi.



Gambar-gambar berikut menunjukkan saat perkumpulan termasuk program ini juga menyumbangkan kartu nama, kain seragam untuk meningkatkan kinerja kelompok karawitan Ibu-Ibu kelompok Sekar Ayu. Kelompok Karawitan juga seringkali menerima panggilan untuk acara-acara resepsi dan acara Desa maupun Kecamatan. Kelompok Karawitan ini rutin berlatih, dan memerlukan seragam untuk meningkatkan penampilan mereka. Kelompok Kerawitan ini sebagaimana sama saja dengan anggota Kelompok Sekar Ayu yang terlibat dalam pelatihan-pelatihan sebelumnya.

4. Pembuatan Buku Memakai dan Mempersiapkan Busana Gaya Yogyakarta

Program pembuatan buku ini merupakan upaya menghasilkan output dari IbM Upaya "Pemeliharaan dan Peningkatan Keistimewaan Yogyakarta melalui Optimalisasi Usaha Wedding Organiser". Output yang direncanakan adalah menghasilkan buku yang berguna di tengah masyarakat terkait melestarikan dan memelihara keistimewaan Yogyakarta. Tim IbM sebelum memutuskan jenis buku yang akan dibuat melakukan survey di took-toko buku yang tersebar di Yogyakarta. Banyak buku merias pengantin dan membuat hantaran yang sangat menarik sebagai alternative usaha yang menghasilkan laba. Namun demikian sangat sulit mencari buku yang menjadikan panduan bagi tata cara berbusana tradisional Jawa yang benar. Atau hamper tidak ada buku yang membahas apa beda berbusana gaya Surakarta dan Yogyakarta. Di dalam Resepsi mayoritas orang berbusana Jawa yang tidak memperhatikan pakem.

Dengan dibantu oleh ahli budaya Jawa yang beliaunya juga seorang ahli pranoto coro, yaitu Bapak Soegiman yang dibantu Ibu Soegiman, tim dalam beberapa kali pertemuan dilatih untuk:

1. Memahami konsep berpakaian Jawa
2. Filosofi berpakaian Jawa
3. Beda Busana Surakarta dan Yogyakarta
4. Arti Jarik bagi setiap daerah
5. Beda cara memakai gaya Surakarta dan Yogyakarta
6. Bagaimana melipat dan menyimpan kain dengan baik dan benar
7. Bagaimana mewiru
8. Bagaimana memakai Beskap dan Surjan
9. Bagaimana memakai Kebaya
10. Bagaimana menggulung stagen
11. Bagaimana memakai kelengkapan blangkon dan keris yang benar.

12. Bagaimana mencuci dan merawat kain yang benar.

Ilmu budaya dari Bapak dan Ibu Soegiman kami dokumentasikan dan kami bagi semampu kami dengan Ibu-Ibu di Kelompok Sekar Ayu. Pertemuan tanggal 28 Oktober 2014 menjadi program terakhir dalam program IbM periode ini, semoga dapat diteruskan dalam program-program lain lanjutan, karena ternyata tim dengan keterlibatan dalam budaya Jawa ini semakin memahami banyaknya budaya yang dapat digali, dikembangkan dan dibagi kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat pantas didanai oleh program-program Hibah Dikti.

5. KESIMPULAN

Laporan Akhir ini menggambarkan seluruh rencana program IbM yang diusulkan. Sejauh ini program yang direncanakan adalah memberikan dua kali pelatihan, namun pelaksanaannya kami bisa melaksanakan tiga kali pelatihan dan membuat buku pelatihan. Antusiasme yang sangat tinggi dari warga, permintaan dari warga yang menjadi peserta dan kemurahan pemateri rias pengantin, maka membuat kami mampu mengelola pelatihan yang ketiga dengan mempertimbangkan dana yang ada. Sejauh ini warga yang menjadi peserta Sekar Ayu dan Giwang Sekar yang mengelola bagian-bagian dari wedding organiser sudah memiliki kepercayaan diri untuk membuat produk-produk souvenir kreatif, hantaran pengantin dan memakai busana tradisional dengan benar sehingga sangat penting dalam kaitannya dengan pelestarian keistimewaan Yogyakarta. Dalam aspek pemasaran, meskipun peserta belum terlalu mempertimbangkan perlunya dibuat kemasan khusus, namun pemikiran dan pengenalan kearah pengemasan yang baik sudah diserap peserta. Secara terpisah, pengusul juga sudah selesai menyusun buku berjudul "Memakai dan Mempersiapkan Busana Gaya Yogyakarta" dengan Bapak dan Ibu Soegiman sebagai narasumber utama. Buku ini adalah menurut tim paling tepat karena berdasar survey di toko-toko buku hamper tidak ada buku yang mengajarkan cara berbusana Jawa yang baik dan benar secara tradisional. Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan bagi generasi muda untuk semakin menghargai budaya warisan leluhur dan memahami filosofi berbusana adat Jawa.

Program IbM ini sudah terlaksana sepenuhnya dan tim merasa sangat beruntung karena mengenal banyak Ibu-Ibu yang bersemangat mengelola usaha pernikahan yang kegiatannya banyak melibatkan unsur budaya tradisional. Tim juga sangat beruntung sehingga bisa bertemu para narasumber yang kedepan kami berniat untuk melanjutkan menggali budaya-budaya Jawa ini untuk semakin dikenal dan dipraktekkan masyarakat. Peralatan-peralatan dan pelatihan-pelatihan yang sudah kami berikan kami yakini sangat bermanfaat buat peserta dan meskipun hasil tidak bisa secara langsung terlihat, namun upaya pemeliharaan dan peningkatan keistimewaan Yogyakarta ini kami yakini cukup mampu diserap para target program IbM ini.

6. REFERENSI

1. Kuncoro, M, 2008, *UKM dan Orientasi Ekspor*, diakses di <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/periskop/ukm-dan-orientasi-ekspor.html>.
 2. Sulaiman, SS., 1982, *Crafts-women: The Social Status and Economic Role of Women Among Low Income Society*, makalah, Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T., 2012, *Wanita Pengusaha di UMKM di Indonesia: Motivasi Dan Kendala*, Policy Discussion Paper Series, No.33/01/2012 Center for Industry, SME and Business Competition Studies, Faculty of Economics, Trisakti University.

SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION OF RISK MODEL WITH AHP

Titik Kusmantini¹; Adi Djoko Guritno²; Yekti Utami³

^{1,3}Faculty of Economics, UPN Veteran Yogyakarta

²Faculty of Agricultural Industrial Technology, UGM

Email: kusmantini_titik@yahoo.co.id

Abstract

Competition increasingly competitive business has prompted the company to provide the best service for its customers. If you look at the customer as the highest goal, the company will be able to grow if the company is able to provide goods and services to customers in a timely, cost-effective and qualified for the customer is able to enjoy the benefits of the goods or services. Since the 1990s a number of studies have focused pad supply chain management as an integrated measurement system in ranking maximize the value and purpose of the company. This research study focuses on the scope of forwarder agents as a single business entity that will support the success of the company in order to export their products. The main motivation of this study is to examine the number of supply chain risk factors to be able to understand it and this assessment is useful to help the furniture industry in an effort to survive and win the competition of their business. So to achieve the objectives of the study, the research steps that need to be addressed: (1) review the literature on supply chain risks in the furniture industry; (2) make a list of risk factors and make the structure of a hierarchical classification of risk factors; (3) using AHP (Analytical Hierarchy Processing). Results of the study was the identification of priority regulatory risk as a major risk that triggered the failure of furniture exports.

Keywords: *Supply Chain Management; AHP Methods; Supply Chain Risk; Optimization of Risk; Forwarder Agent*

I. Introduction

In today's globalized world, have an impact on the company's ability to respond to a number of requirements needs of consumers, especially consumers in foreign markets. Companies need to build a strong supply chain to gain an advantage over their competitors by offering the best value for their customers. Supply chain management (SCM) has become very important for managing risk, dynamism and complexity of global sourcing (Christopher and Lee, 2004). A supply chain is completely integrated needed for the company to get the maximum benefit. The aim of the supply chain and performance measurement needs to be understood in order to build the most effective supply chain (Tang, 2006). Provide performance measurement approach to identifying successes and potential supply management strategies (Tang, 2005). One of the main aspects of the SCM is to select the appropriate source of supply in the global business environment that can support the

company's strategy. Contrary to a conventional perspective, SCM effective in the new competition suggest seeking a close relationship in the long term with numbers partners.

Given the conditions of overseas markets rapidly changing and customers who always need to look for the best value, long-term relationship exporter company established cooperative relationships with several parties such third party that helps the process of shipping or logistics of their products. Failure phenomenon export information often can be traced to the forwarder logistics or services, the data branch Asmindo solo mentions 33 container furniture manufacturer Asmindo members have failed to export due to multiple risk factors. The main risk is the incompleteness of the document PEB (Notice export of goods) are not equipped DKP document (Document commitment of suppliers) are not complete and many SMEs furniture yet certified timber legality verification as the primary document that should be included in the PEB. Some SVLK (Timber Legality Verification Certification) also is no longer valid due to an extension extend the certification cost is very expensive. The purpose of this paper is to emphasize the importance of identifying problems and perform a number of criteria and sub-criteria of ranking supply chain risks that often appear in the scope forwarder so the impact on export failures furniture manufacturing company. Methods for analysis using Analytical Hierarchical Processing (AHP), to create a supply chain management strategies that are reliable for furniture manufacturers. Failure triggers a number of risk information obtained from the export forwarder agents are expected as feedback for manufacturers to improve supply chain performance measurement system company.

II. Literature Review

2.1. Supply Chain Management

A supply chain is characterized by the flow of goods, services, money, and information both within and between enterprises including suppliers, producers / manufacturers and customers (Chase et al, 20001). It also includes all kinds of third-party organizations that are engaged in transportation, warehousing, information processing and export / import documents and materials handling. The functions of supply chain management include raw material procurement, production scheduling, order processing, inventory management, warehousing, shipping the product until the customer service functions. The main purpose of SCM is to meet customer demands more efficiently by providing the right product, in the right quantity, at the right location, at the right time and in the right conditions (Christoper, 2003)

2.2. Supply Chain Risk Management

Risk management is an important component in the process of development and execution of strategy, and is believed to be key to the success of the company (Finch, 2004). A survey has been carried out and resulted in finding some 74.2% of respondents believe that Supply Chain Risk Management or SCRM is a continuation of the process of building a partnership with the customer relationship management (Cophra and Sondhi, 2004). Although there have been an increasing number of studies that examines the SCRM, there is no consensus on the definition or scope of SCRM itself (Cophra and Sondhi, 2004). Let's say Kleindorfer and Saad, 2005 mentioned there are three steps in the supply chain risk management needs to be done: (1) determine the sources of risk and Supply Chain Vulnerability; (2) assessment and (3) mitigation. While Juttner et al, 2003 introduces four steps while Manuj and Mentzer 2008 tune into five steps in the supply chain risk management: (1) identification of risks; (2) evaluation and risk assessment; (3) Selection of alternative ways of managing risk; (4) the implementation of strategies to manage supply chain risk and (5) Risk Mitigation. Although standard elements in general SCRM yet it is

concluded that there is no consensus on the definition of standard components and SCRM process.

Although there is no agreement to classify the supply chain risk in this study need to develop a number of risk criteria as an agent or a source of risk and sub-criteria as the number of risk events that can be triggered from a particular agent or a source of risk. Essentially a risk agents can trigger a number of risk events and a risk event can also be triggered by more than one source of risk (Zsidisin, 2003). Several studies have identified a number of criteria specific risks such as labor disputes, distorted information, errors in the fulfillment of customer orders, supplier bankruptcies, exchange rate risk, government regulations, a single supply source, the delay in ports (Manuj and Mentzezer, 2008; Zsidisin and Ellram, 2003). The thing to remember is the incidence of risk is highly dependent on the type of industry studied, the phenomenon of diversity of risk requires supply chain risk management process differently, because of supply chain risk management process is a process of environmental scanning (Zsidisin and Ellram, 2003). Risk mitigation efforts in supply chain risk management is a process of evaluation and confidence because of the risk could arise as a result of dyadic relationships in the supply chain process (Carter and Cavinato, 2004).

III. Research Methodology

3.1. Data Collection Technique

Data collection using in-depth interview technique. Dillman, 1978 describes the technique of data collection using in-depth interviews need to be done carefully, a few steps that can be taken to conduct in-depth interviews. First, the researchers will use the list of members of the Branch ASMINDO in Yogyakarta through research partner who happens also as one of the members and the board ASMINDO at the local level. Second, researchers will conduct initial contact to the companies in the list and further members as a resource willingness response will be sent a questionnaire via email. Third, researchers will select a few key informants virgin enterprise data that can be contacted, in order to develop a questionnaire that will be used by researchers to select speakers who occupied positions at management level or several employees in the logistics department, sales, procurement, marketing and IT. Of the key informants representing the manufacturers, researchers will search where suppliers and logistics agents.

3.2. Data Analysis Technique

In this study, presents the AHP analysis model to assess the risk. AHP model is able to support managers in optimizing the supply chain objectives, identifying indicators of risk criteria and sub-criteria, putting all the risk with impact severity scale to identify optimal solutions risk. So there are three formulation of the problem is the first review of the literature related to supply chain risk industries studied, both make classification structure of risk factors based on field interviews and the third using AHP model to identify the consistency of existing risk assessment in order to produce an optimal solution in dealing with risks in the supply chain furniture industry.

The purpose of using the AHP model in this study is to evaluate the risk associated with supply chain management in manufacturing companies. The use of weighting criteria using the weighting criteria developed by Saaty (2000;2001), although in the weighting process of subjective role is very high but the weighting subjectively rated logical because it attempt a comparison criteria in AHP is an attempt appraisal criteria generally condition is often fickle and intangible. Pairwise comparisons intended to produce all the alternatives ranking criteria so that priority criteria can be identified. Here are five steps that need to be done with the AHP model: (1). Decomposition of problems with classification problems

hierarchically structured; (2). Gather data by conducting interviews (especially interviews with a team of experts); (3). Perform pairwise comparisons of each factor / criterion; (4) Calculate the consistency index to rank the importance of each risk (Gaudenzi and Borghesi, 2006).

IV. Results and Discussion

At the early stage researchers need to formulate a hierarchical model consisting of objectives, risk factors and sub risk. The purpose of the problems of this study is the optimization of supply chain risk management, where risk factors of identification there are five risk factors: environmental risk, risk systems and administration services; market risk, technical risk and regulatory risk. The fifth factor is assumed as an agent or a source of risk that can trigger a number of items of other risky events or referred to as sub factor. The sub factors of risk that triggered the events of each sources of risk are:

Table 1. Assessment of risk factors in the sphere of literature forwarder agent

Number	Risk Factors (Risk Sources)	Sub Risk Factors (Referred to as a number of risk events that trigger by sources of risk)
1	Environmental Risk	<ul style="list-style-type: none"> - Strike action in the port - Bad weather or storm disaster - The road to the port a lot of damage and crowded - Genesis accidents during the delivery process of export products
2	System and Administration Service Risk	<ul style="list-style-type: none"> - Services system disorders customs administration in the port - Delays in receiving FCR or forwarding cargo receipt - Supplier invoice document incomplete - Delays in the payment of export duties and other export taxes at customs regularly
3	Market Risk	<ul style="list-style-type: none"> - Unraveling the cost of exports has not detailed - Currency risk
4	Technical Risk	<ul style="list-style-type: none"> - Damage to the ship's engine - There ommit or the movement of goods using other boats and sail to the initial destination. - Technical Disorders forwarder agent communication with the supplier or manufacturer as exportir - Delay in receipt of invoice from the supplier, the SGLT and shipping line - There was a delay in custom clearance
5	Regulation risk	<ul style="list-style-type: none"> - Rejection of the transfer process of preparation of export of goods (PEB) - Card DFT or department of foreign trade is not valid

After building the model AHP next step is to measure and collect data, should involve a team of experts and subsequent tasks perform pairwise comparisons for a range of risk factors that have been identified by using weighting and weighting scale of 1 to 5, which was developed by Saaty, 2000; 2001. The questionnaire was prepared comprised of all the factors and sub-factors, and the team of experts will give a score for each risk to be compared with other risk weights range from 1 to 5 as shown in Table 2 as follows.

Table-2 Scale for Rating

Intensity of importance	Definition	Explanation
1	Equal importance	Two factors contribute equally to

		the objective.
2	Somewhat more important	Experience and judgment slightly favor one over
3	Much more important	Experience and judgment strongly favor one over the other.
4	Very much more important	Experience and judgment very strongly favor one over the other. Its importance is demonstrated in practice.
5	Absolutely more important	The evidence favoring one over the other is of the highest possible validity.
	Reciprocal	While comparing reversely one risk to other, value would be 1/original comparison.

Supply chain risk mapping in scope forwarder company there are 5 sources of risk as the risk factors or criteria consisting of: regulatory factors; factor and administrative systems; market factors; Technical factors and environmental factors. Here will be described a discussion of risk factors based on the priority of AHP and risk events as sub-criteria are urged to think about risk prevention action.

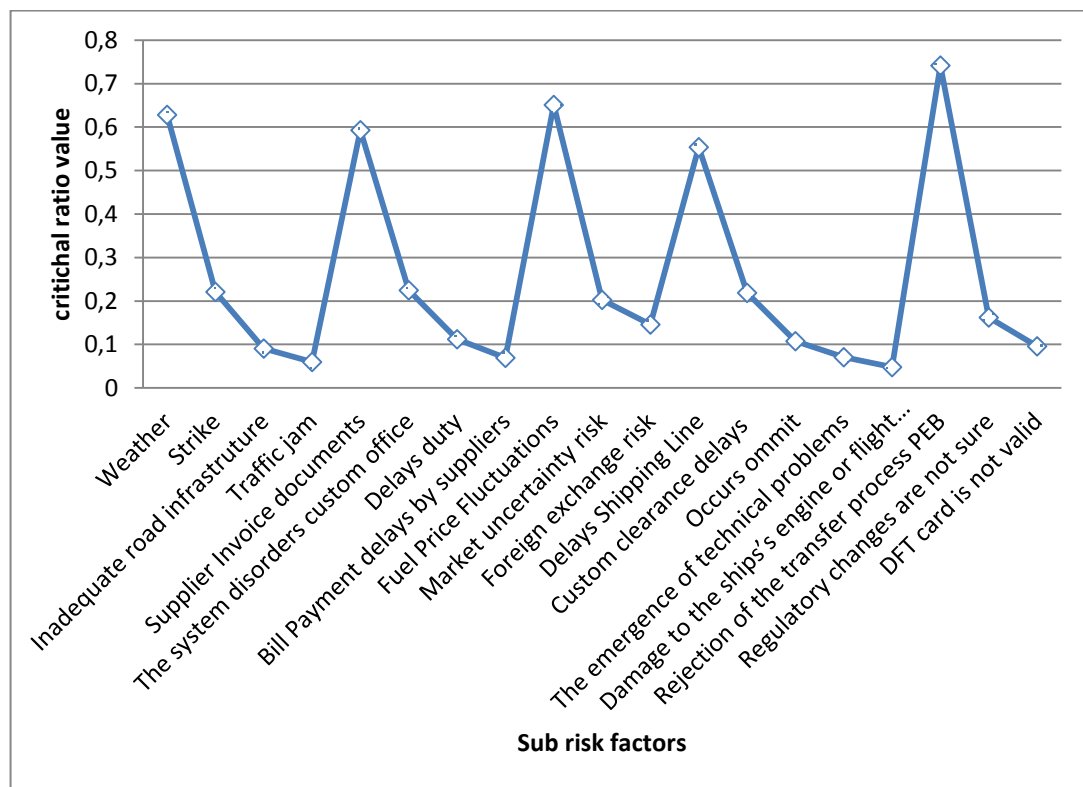
Table 3 presents the priority sub-criteria are detail risk or incidence of risk arising from the risk of each agent. Risk events that frequently arise and have a high severity level that is triggered by environmental factors is the weather, while the incidence of risk triggered by the sources of risk and the administrative system is a supplier invoice document; and so can be read in table 3.

Table 3. Priority risk events and the trigger source based on the critical ratio

Risk Agent	Sub Risk Factors	CR Value
Environment	Weather	0,628
	Strike	0,221
	Inadequate road infrastructure	0,091
	Traffic jam	0,06
System and Administration Service	Supplier Invoice documents	0,593
	The system disorders custom office	0,225
	Delays duty	0,112
	Bill Payment delays by suppliers	0,069
Economic	Fuel Price Fluctuations	0,651
	Market uncertainty risk	0,203
	Foreign exchange risk	0,146
Technical	Delays Shipping Line	0,554
	Custom clearance delays	0,219

	Occurs omit	0,108
	The emergence of technical problems	0,071
	Damage to the ships's engine or flight schedule	0,048
Regulation	Rejection of the transfer process PEB	0,742
	Regulatory changes are not sure	0,162
	DFT card is not valid	0,096

Figure 1 The Rankings of risk events that often arise in the scope Forwarder



AHP model in this research was conducted in order to determine the priorities on the various risks that arise in the process of supply chain manufacturers. Pairwise comparisons done by using the weighting scale of one to five.

Consistency ratio (Critical ratio or CR) is calculated with a degree of consistency of risk pairwise comparisons using role of thumb from the highest value of principal vector. If the CR value is less than 10%, the assessment is considered consistent. But if the value of CR is greater than 10%, the quality of the assessment must be increased in order to have a CR value less than or equal to 10%. Results of this study resulted in CR value of each criteria and sub-criteria risk of less than 10%, which means decisions subjectively perceived risk assessment has analyzed the respondents and the results are satisfactory and can be used for further analysis. It can be concluded that the company has risks that are consistent and the most important risk agents are regulatory risks while significant risk event is the rejection of

PEB. This finding is consistent with the results of interviews with manager's Asmino , researchers stating that triggers the failure of furniture exports caused by the lack of export documents and is in line with agency managers perceived that the incidence of the risk of rejection forwarder PEB documents most frequently occur and trigger a failed export. Risk regulation urged governments to be addressed because of the handling of these risks can reduce losses in the supply chain management. While the sub-factors associated with regulatory risks also need to be resolved in accordance with the ranking of each sub factors identified risks.

V. Conclusions and Implications

AHP concept is the concept of making complex decisions, which are generally companies focus on internal supply chain systems in the enterprise (Faisal et al, 2006). However AHP has advantages because the proposed framework decision is structured, simple and efficient as well as having the capability that is able to provide guidance on the level of impact on existing risks. The level of impact of each risk factor providing input for the company to be able to optimally allocate effort in order to maximize the benefits. The results proved that the regulation of risk factors have the highest impact on the successful implementation of supply chain. Here are some managerial implications to support the creation of supply chain reliable furniture industry, among others: EDI-based logistics system improvement help desk; import request staff to constantly monitor the condition of the field (either at the port or shipment process); using UPS (Uninterruptable Power System) to improve coordination with the department of export - import of the manufacturer or supplier; Request Shipping Line to inform the delivery schedule updates.

Acknowledgements

This article is an output of a competitive grant funded by The Directorate General of Higher Education of Indonesia with the letter of Number: ST/4/2014 and UPN Veteran Yogyakarta for support and motivation.

REFERENCES

- Chase Richard; Aquilano and Jacobs, (2001) "Operation Management For Competitive Advantage", The Mc.Graw-Hill Companies, Inc / Irwin Series, Ninth edition
- Cophra, S. and Sondhi, S.M., 2004 "Managing Risk to Avoid Supply-Chain breakdown" Sloan Management Review, Vol. 46, No.1, Hal.53-61.
- Christoper, M., 2003 "Creating Resilient Supply Chains: A Practical Guide" (online), diambil dari <http://www.cranfield.ac.uk/som/scr>. diakses 26 februari 2013
- Christoper, M. and Lee, H., 2004, "Mitigating Supply Chain Risk Through Improved Confidence", International Journal of Physical Distribution and Logistic Management, Vol.34., Vol.5, pp.388-396
- Dillman, D.A. (1978), Mail and Telephone Surveys: The Total Design Method, Wiley, New York,
- Faisal, Nishat M., Banwet, D.K. dan Shankan, R. 2006., "Supply Chain Risk Mitigation: Modelling The Enablers", Business Process Management Journal, Vol.12, No.4, pp.536-562
- Finch, P., 2004, "Supply Chain Risk Management", Supply Chain Management: An International Journal, Vol.9, No.2, pp. 183-196

- Gaudenzi, B. and Borghesi, A., 2006 "Managing Risk In The Supply Chain Using The AHP Method", The International Journal of Logistics Management, Vol.17, No.1, pp.114-136
- Juttner, U., 2003,"Supply Chain Risk Management: Understanding The Business Requirement From Practioner Perspective", International Journal of Logistic Management, Vol.16, No.1, pp.120-141
- Jutner, Uta; Helen Peck dan Martin Christoper (2003), " Supply Chain Risk Management: Outlining an Agenda For Future Research", International Journal of Logistics: Research and Application, Vol. 6; No.4, pp. 197-210
- Kleindorfer, Paul R and Germaine H Saad (2005), " Managing Disruption Risk in Supply Chains," Production and Operation Management, Vol.14, No.1, pp.55-68
- Manuj, Ila dan Mentzer, John. T., 2008 "Global Supply Chain Risk Management", Journal of Business Logistics, Vol. 29, No.1, pp. 133-157
- Norrman, A. dan Jonsson,U., 2004, "Ericsson's Proactive Supply Chain Risk Management Approach after Serious Sub-Supplier Accident", International Journal of Physical Distribution and Logistic Management, Vol.34, No.5, pp.434-45
- Saaty, T. L. (2000). *Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process*. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
- Saaty, T. L. (2001). *Decision making for leaders: The analytic hierarchy process for decisions in a complex world*. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
- Supply Chain Council* atau SCC, 2009 www.supply-chain.org diunduh 26 februari 2013
- Tang. S.C., 2005. "Robust Strategies for Mitigating Supply Chain Disruptions" (online), diambil dari <http://www.anderson.ucla.edu/x3258.xml> diakses 26 Februari 2013.
- Tang., S.C., 2006, "Perspectives in Supply Chain Risk Management: A Review", International Journal Production Economics, Vol.103., pp.451-458
- Zsidisin, George A (2003), " A Grounded Definition of Supply Risk, " Journal of Purchasing and Supply Management, Vol.9, N0.5/6, pp.217-224.
- Zsidisin, George A and Lissa m Ellram (2003), " A, Agency Theory Investifation of Supply Risk Management," Journal of Supply Chain Management, Vol.39, No.1,pp. 115-127.

The Moderating Effect of Contingency Variables on The Relationship Between Formal Strategic Planning and Company Performance

M. Irhas Effendi^a, Titik Kusmantini^b*

^aFaculty of Economics, UPN Veteran Yogyakarta, Indonesia

^bFaculty of Economics, UPN Veteran Yogyakarta, Indonesia

Abstract

This research examines the moderating effect of some contingency variables, which consisted of environment, structure, size of organization, and culture of organization, in organizational context, on the relationship between the level of formal strategic planning and company performance. The investigation was done to small and medium enterprises (SMEs), and data were gathered through interviews and questionnaires collected from 64 (sixty-four) SME exporters of regional featured products. Five hypotheses were tested in this research using Partial Least Square analysis technique. The analysis result showed that one hypothesis was supported by facts while the others were not. The four unsupported hypotheses were about the moderating effect of variable. The generalization of research result could be extended by using the setting of industries that are more varied and adding more number of samples.

Keywords: Moderating effect, formal strategic planning, contingency variables, organizational context, company performance

1. Introduction

Researches on the relationship between FSP and performance of organization showed unconvincing evidence. Some findings empirically proved that FSP could improve performance while some others showed there was no effect of FSP on performance. An early study on the relationship between FSP and performance conducted by Thune and House (1970) indicated that the economic performance of a group with formal strategic planning is better than a company without planner. It was supported by Herold (1972) who proved that FSP has a positive effect on financial performance. Meanwhile, Capon et al. (1984) stated that the higher the sophistication of strategic planning process, the better the company performance. In addition, Sinha (1990) as well as Ramanujam and Venkatraman (1987) claimed that as a planning action the strategic planning process will give real values to the company.

Several other studies concluded contradictive results, however, showing that there is no clear systematic relationship between FSP and company performance (for example, Shrader et al., 1984). Some researchers stated that FSP may be useless due to the introduction of exaggerated rigidity and bureaucracy (Bresser and Bishop, 1983). Furthermore, Fulmer and Rue (1974) as well as Whitehead and Gup (1985) provided contradictive empirical evidence because in a company with planner the economic performance is in fact worse than the company that has no planner. Most of the studies on causality of FSP towards performance used advanced countries as the research settings, for example Canada, USA, England, Australia, Japan, as well as other countries in Europe (Koufopoulos et. al., 2005). Haines (1988) and Glaister et al. (2008) stated that in fact there is an opportunity for researchers to investigate the conceptual framework of FSP causality towards performance using developing countries as research settings. The main reason for this was because, in general, developing countries experience a transition process and changing era that also cause changes in the need for formal strategic planning.

2. Literature Review and Hypothesis

* E-mail address: m_irhaseffendi@yahoo.com

2.1. Formal Strategic Planning

The goal of FSP implementation is to describe the managerial process of organization. FSP can be defined as a process to determine the mission, goals, strategies, and policies that regulate the acquisition and allocation of resources to achieve the organization's objectives (Pearce et al., 1987). FSP tends to be used as a messenger saying that the process of company's strategic planning involves a systematic procedure that explicitly reflects the involvement and commitment of main stakeholders in the planning design.

Hopkins and Hopkins (1997) explained that the process of strategic planning consists of three main components: (1) Formulation; (2) Implementation; and (3) Evaluation. Strategic (Glaister et al., 2008).

2.2. Relationship between Formal Strategic Planning and Performance

The researcher hypothesized that the performance of a company with planning will be better than without planning. Although some literatures mentioned that the relationship between strategic planning and performance is positive, Boyd (1991). The relationship was empirically tested for the first time by Thune and House (1970) who then found that the economic performance of formal planner group is better compared to the non-planner company.

Fulmer and Rue (1974); on the other hand, Whitehead and Gup (1985) gave contradictive empirical evidence because in a company that has a planner the economic performance is worse than the company with no planner.

2.3. Contextual Variables of Organization

Researchers claimed it as a limitation and suggested that contextual variables should be studied. Armstrong strengthened the benefit of formal planning but found a serious problem, which should be considered by future researchers, concerning how to design the planning and when to plan as one essential matter to study. Pearce et al., (1987) also concluded that a miss-link company is proven to be unable to achieve better performance due to the inconsistency between strategic planning and the existing environment (overlapping). Some empirical evidence is inconsistent because it does not consider the factor of organizational context. According to Glaister et al., (2008) how far a company is involved in the strategic planning process will reflect whether the strategic planning is formal or informal, and it all depends on the context of organization. Based on the aforementioned phenomena, this research would be directed to test the moderating role of some contextual variables in an organization as contingency variables towards the relationship between the level of strategic planning formality and company performance.

2.4. Environmental Turbulence

The external environment of a company is considered as an important factor that can affect the relationship between planning and performance (Pearce et al., 1987; Priem et al., 1995; Andersen, 2004; Glaister et al., 2008). Environment is usually defined as the strengths or power outside the control of the company management (Shrader et al., 1984). According to some researchers (Boyd et al., 1993; Drazinand Ven de Ven, 1985) certain aspects of strategic planning and performance are influenced by external environment. In this case, strategic planning may be more important in a turbulent environment than in a quiet one (Armstrong, 1982; Miller and Friesen, 1983, Miller and Cardinal, 1994). The characteristics of a turbulent business environment according to Christopher and Holweg (2011) are the more global competition, the more demanding customers, and the more uncertain market.

2.5. Organization Structure

Structure of organization is crucial to supporting the ability to manage information, and it has significant influence on the context and characteristic of human interaction (Miller, 1987). Previous researchers have studied the relationship between strategy and structure as well as the relationship between structure and environmental uncertainty (Khandwalla, 1977;

Covin and Slevin, 1989 in Gibbons and O'Connor, 2005). The types of organization structure include mechanistic structure versus organic structure (Burns and Stalker, 1961).

The research done by Gibbons and O'Connor (2005) found that a company with organic structure tends to adopt the process of strategy formation in a step-by-step or sudden manner, while a company with mechanistic structure tends to adopt formal and comprehensive strategy formation.

Miller and Droge (1986) explained that uncertainty is related to changes, customers' taste, behaviors in competition, technology of supply resources, and others. The contingency theory was proposed by Lawrence and Lorsch (1967). Pugh et al., (1969), Perrow (1970), and Child (1972) in Glaister et al., (2008) stated that the increasing uncertainty will create irregular, more complex tasks.

2.6. Company Size

Strategic planning is often considered as a management tool that is more useful for a relatively large company; however, it is also suitable and used by small and medium companies, which started to be studied (Matthews and Scott, 1995). Pearce et al., (1987) identified that the weakness in research methodology is affected by the company size and may be related to the relationship between planning and performance. Size as a controlling variable has been a matter for debate (Swan and Allred, 2003; Lau et al., 2007) or as a significant contingency variable that needs to be considered when designing an effective strategic planning system (Glaister et al., 2008). According to Swan and Allred (2003), company size reflects the economic potential or non-economic scale of the company that can trigger bias when a researcher is going to assess the performance; therefore, researchers often use company size as a controlling variable. Hopkins and Hopkins (1997) found a directly negative relationship between bank size and intensity of company's strategic planning that will eventually have a negative effect on the bank's financial performance.

2.7. Organization Culture

At first, studies on culture functioned as an independent variable that has a dominant influence on performance (Kotter and Heskett, 1992). Referring to the concept of McKensey 7S framework, it was mentioned that share value means the accumulation of organization's values as an outcome of interaction between strategies and structure, system, staff, skills, and style. Pearce and Bear (1998) classified the typology of culture that can encourage the performance of managers into Apollo and Athena culture types. Meanwhile, in his research, Zwaan (2006) divided culture into more varied types, which are Zeus, Apollo, Athena and Dionysus.

Bourantas et al., (1990) confirmed that, as a continuum, culture is only divided into two types, Apollo and Athena, which have extremely opposite characteristics. The characteristics of Apollo culture are for example: task planning system is more formal and centralistic with fixed and hierarchical plans, and it uses a rigid bureaucracy and commando system (Pearse and Bear, 1998; Zang, 2009). The recommendation of research by Glaister et al. (2008) was that future researchers need to consider the probability of culture as a contingency variable in testing the effect of FSP on performance because the benefit of FSP will be stronger when an organization has a culture that tends to use decentralization pattern and give freedom to managers to innovate according to their own tasks and responsibilities.

2.8. Research Model and Hypothesis

In this study, the factors of organizational context to be considered in establishing the moderating effect on the relationship between strategic planning and company performance were environmental turbulence, organization structure, organization size, and organization culture. From the aforementi

oned explanation, the conceptual framework of this research can be illustrated as in Figure 1.

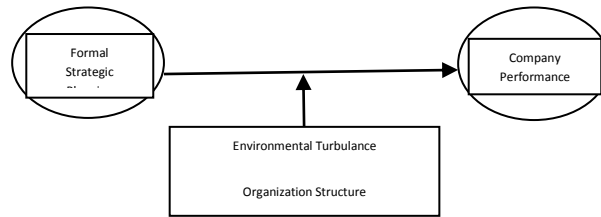


Figure 1: Research Model

Based on the literature review and research model, the proposed hypotheses to test in this research were:

- H1: The more flexible the formal strategic planning, the higher the company performance
- H2: A more turbulent business environment can strengthen the relationship between formal strategic planning and company performance.
- H3: A more "organic" structure of organization can strengthen the relationship between formal strategic planning and company performance compared to the "mechanistic" structure of organization.
- H4. A larger company will have more ability to strengthen the relationship between formal strategic planning and company performance compared to a small-scale company.
- H5. An "Athena" culture of organization tends to be able to strengthen the relationship between formal strategic planning and company performance compared to an "Apollo" organization culture.

3. Research Methods

3.1. Data Collection Techniques

The data collection techniques in this research used mixed methods in developing instrument assessment to reach a high level of content validity.

3.2. Operational Definitions of Variables

In this research, the six variables consisted of one dependent variable, which is company performance, and one independent variable, that is formal strategic planning, as well as four moderating variables comprising environmental turbulence, organization structure, organization size, and organization culture.

Company Performance

Greenley and Foxall (1997) explained that, in general, objective assessment towards performance is difficult to predict, particularly about how far this performance is influenced by strategic planning.

Formal Strategic Planning

To measure the construct of formal strategic planning, this study used eight (8) question items that have been developed by Gleitser et al., (2008).

Environmental Turbulence

The development of the first dimension refers to the measurement developed by Glaister et al. (2008) that includes three indicators: predictability of market demand, life cycle of products, and change in customers' need. The measurement of technological changes refers to the indicators developed by Miller and Droge (1986) using one indicator, which is the influence of technological changes on the production capacity.

Organization Structure

The construct of organization structure was measured by referring to the measurement developed by Burns and Stalker (1961) that include pattern of authority distribution in task completion, hierarchical relationship, flexibility of tasking pattern, and problem in employee mobility.

Organization Size

The size of company in this research used one of the indicators commonly applied in Indonesia, which is number of employees.

Organization Culture

There were three measurements of organization culture in this study, which are the value of working that prioritizes loyalty or creativity, the system of employee control that is based on task control system and procedure, or career orientation.

3.2. Data Analysis Model

The model of analysis in this study was the Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS) approach.

4. Results and Discussion

4.1. Results

Outer loadings (Measurement Model)

An item is declared valid if its value of outer loading (measurement model) is higher than or equal to 0.5. In addition, a statistical test using t-test was required for obtaining outer loadings. The validity criteria using the value of probability (P) required that the model was determined valid if the value of $p \leq 0.05$. The complete test result is presented in Table 1. It can be seen from Table 1 that not all of the indicators used for measuring the formal strategic planning variable was valid. From eight indicators, only three were valid: PS1, PS2, and PS6. Table 1. Validity Test for Measurement Model (for more table information, please kindly contact the researcher).

Meanwhile, in the indicators for measuring the company performance variable, all the indicators were valid. The test on measurement model was conducted for all the indicators of each latent variable. This result was then included in the structural model but only the valid indicators were involved.

Inner Weights (Structural Model)

The relationship between constructs is considered significant if the value of probability ($p \leq 0.05$). The test result according to the hypotheses is illustrated in Table 2. Structural Model (for more table information, please kindly contact the researcher)

The result in Table 2 indicates that only one hypothesis was significant and accepted or supported by the facts in this study; that was the effect of formal strategic planning on company performance, while using the significance level of probability ($p \leq 0.05$) the other four hypotheses were insignificant.

4.2 Discussion

From the result of hypotheses testing (Table 2), it can be seen that Hypothesis 1 was acceptable or supported by the facts of the study. It means that the hypothesis on export-oriented furniture and craft companies in Yogyakarta supported previous studies (as in Boyd, 1991). This research also proved that the more formal the strategic planning of the furniture and craft company, the lower the company performance; this is in line with the research finding conducted by Fulmer and Rue (1974) as well as Gup (1985).

The second hypothesis was not supported by facts. This result supported the opinion of Mintzberg (1973) who stated that formal strategic planning is more suitable for a more stable environment because it is easier to anticipate. However, this result did not support Armstrong (1982), Miller and Cardinal (1994) who explained that formal strategic planning may be more applicable in a turbulent environment.

The third hypothesis was not supported by facts. The effect of organization structure moderation on the influence of strategic planning on company performance was negative with a relatively small coefficient (-0.054). This is in line with the research of Gibbons and

O'Connor (2005) who found that mechanistic structure of organization tends to adopt formal, comprehensive strategic planning process.

The fourth hypothesis was not supported by facts. It corresponds to the opinion of Miller and Cardinal (1994) that a larger, more complex company requires more control and integration of strategic planning in order to achieve better performance than smaller companies.

The fifth hypothesis was not supported by facts. The effect of organization culture moderation on the influence of strategic planning on company performance was negative. It means the more Athena culture is adopted by an organization, the smaller the influence of strategic planning on company performance, and the more Apollo culture is implemented, which means more support is provided by the company for creativity, development of two-way communication, and competition for success, the more significant the influence of strategic planning on company performance. It means there is a tendency that the more flexible the strategic planning, the more the organization will adapt Apollo culture to achieve better performance. This tendency can also mean that in order to develop flexibility in planning, the loyalty of employees is essential.

5. Conclusions, Limitations, and Further Research

The result of hypotheses testing showed that only one hypothesis was significantly supported by the research facts; that is the first hypothesis, which stated that the more flexible the strategic planning, the better the company performance. The hypotheses that tested the effect of moderation from business environment, organization structure, organization size, and organization culture on the influence of strategic planning on company performance was insignificant. The testing of moderation effect from business environment, structure, size, and culture of organization resulted in a range of error probability from 10% to 40%.

In relation to the moderation tendency, it can be seen that it tends to be negative. A negative direction indicates that a more turbulent environment will decrease the flexibility of planning's effect on performance. To support the success of flexible strategic planning in improving performance, a more mechanistic structure is required. In addition, a more flexible strategic planning will tend to be implemented in smaller organizations, supported by a culture that adopts Apollo type and loyalty of employees. This research result neither fully supported nor rejected previous studies.

This research needs follow-up that deeply studies the characteristics of sample companies and recent related researches in order to analyze the cause of controversy over the findings compared to previous studies. To strengthen the findings, more samples are required by adding the number of samples or varying the types. The limited number of obtained samples may affect the choice of analysis model and results. More varieties of samples in other industry classifications (other than furniture and craft) will provide better generalization.

Acknowledgement

This research was funded by the Directorate General of Higher Education in the Ministry of National Education, according to the Statement of Agreement on the Implementation of Fundamental Research Grant No. 012/HB-LIT/III/2015/LPPM UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

References

- Andersen, T. J. (2004). Integrating the strategy formation process: an international perspective. *European Management Journal*, Vol. 22 No. 3, pp. 263-72.
- Armstrong, J. S. (1982). The value of formal planning for strategic decisions: review of empirical research. *Strategic Management Journal*, Vol. 3 No. 3, pp. 197-211.

- Bourantas D., Anagnostelis, J., Mantes, Y., & Kefalas, A. G. (1990). Culture Gap in Greek Management. *Organization Studies*, 11/2, pp. 261-283.
- Boyd, K. B. (1991). Strategic planning and financial performance: a meta-analytic review. *Journal of Management Studies*, Vol. 28, pp. 353-74.
- Bresser, R. K., & Bishop, R. C. (1983). Dysfunctional effects of formal planning: two theoretical explanations. *Academy of Management Review*, Vol. 8, pp. 588-99.
- Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). *The Management of Innovation*. Tavistock. London.
- Burton, R. M., Lauridsen, J., & Obel, B. (2004). The Impact of Organizational Climate and Strategic Fit on Firm Performance. *Human Resource Management*. Spring, Vol. 43, pp. 67-82.
- Capon, N., Farley, J. U., & Hulbert, J. M. (1994). Strategic planning and financial performance: more evidence. *Journal of Management Studies*, Vol. 31 No. 1, pp. 105-10.
- Cheah, C. Y. J., & Chew, D. A. S. (2005). Dynamics of strategic management in the Chinese construction industry. *Management Decision*, Vol. 43 No. 4, pp. 551-67.
- Christopher, M., & Holweg, M. (2011). *Supply Chain 2.0*: Managing supply chains in the era of turbulence. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 41(1), pp. 63-82.
- Drazin, R., & Ven de Ven, A. (1985). An examination of alternative forms of contingency theory. *Administrative Science Quarterly*, Vol. 30, pp. 514-39.
- Fulmer, R. M., & Rue, L. W. (1974). The practice and profitability of long range planning. *Managerial Planning*, Vol. 22 No. 6, pp. 1-7.
- Gibbons, P. T., & O'Connor, T. (2005). Influences on strategic planning processes among Irish SMEs. *Journal of Small Business Management*, Vol. 43 No. 2, pp. 170-86.
- Glaister, K. W., Dincer, O., Tatoglu, E., Demirbag, M., & Zaim, S. (2008). A Causal Analysis of formal strategic planning and firm performance. *Management Decision*, Vol. 46, No.3, pp. 365-391.
- Greenley, G. E. (1994). Strategic planning and company performance: an appraisal of the empirical evidence. *Scandinavian Journal of Management*, Vol. 10 No. 4, pp. 383-96.
- Greenley, G. E., & Foxall, G. R. (1997). Multiple stakeholder orientation in UK companies and the implications for company performance. *Journal of Management Studies*, Vol. 34 No. 2, pp. 259-84.
- Haines, W. R. (1988). Making planning work in developing countries. *Long Range Planning*, Vol. 21 No. 2, pp. 91-6.
- Herold, D. M. (1972). Long-range planning and organizational performance : a cross validation study. *Academy of Management Journal*, Vol. 14, pp. 91-101.
- Hopkins, W. E., & Hopkins, S. A. (1997). Strategic planning-financial performance relationships in banks: a causal examination. *Strategic Management Journal*, Vol. 18 No. 8, pp. 635-52.
- Jenings, D. F., Rajaratnam, D., & Lawrence, F. B. (2003). Strategy-Performance Relationships In Service Firm: A Test for Equifinality. *Journal of Management Issues*, Vol. XV, No. 2, pp. 208-220.
- Kotter, J. P., & Heskett, J. L. (1992). *Corporate Culture and Performance*. Free Press. New York.
- Lau, A. K. W., Yam, R. C. M., & Tang, E. P. Y. (2007). Supply chain product co-development, product modularity and product performance. *Industrial management and data systems*, Vol. 107, No.7, pp. 1036-1065.
- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). *Organization and Environment*. Richard D. Irwin, Homewood, IL.

- Matthews, C. H., & Scott, S.G. (1995). Uncertainty and planning in small and entrepreneurial firms: an empirical assessment. *Journal of Small Business Management*, Vol. 33 No. 4, pp. 34-48.
- Miller, D., & Friesen, P. (1983). Strategy-making and environment: the third link. *Strategic Management Journal*, Vol. 4, pp. 221-35.
- Miller, D., & Droge, C. (1986). Psychological and traditional determinants of structure. *Administrative Science Quarterly*, Vol. 31 No. 4, pp. 539-60.
- Miller, D. (1987). Strategy making and structure: analysis and implications for performance. *Academy of Management Journal*, Vol. 30 No. 1, pp. 7-32.
- Miller, C. C., & Cardinal, L.B. (1994). Strategic planning and firm performance: a synthesis of more than two decades of research. *Academy of Management Journal*, Vol. 37, pp. 1649-65.
- Mintzberg, H. (1973). Strategy-making in three modes. *California Management Review*, Vol. 16 No. 2, pp. 44-53.
- Pearce, J. A., II, Freeman, E. B., & Robinson, R. B. (1987). The tenuous link between formal strategic planning and financial performance. *Academy of Management Review*, Vol. 12 No. 4, pp. 658-75.
- Pearse, R. F. & Bear, M. M. (1998). Career success in different corporate cultures. *Compensations and Benefit Management*, Winter, pp. 26-35.
- Priem, R. L., Rasheed, A. M. A., & Kotulic, A. G. (1995). Rationality in strategic decision processes, environmental dynamism and firm performance. *Journal of Management*, Vol. 21 No. 5, pp. 913-29.
- Ramanujam, V., & Venkatraman, N. (1987). Planning systems characteristics and planning effectiveness. *Strategic Management Journal*, Vol. 8 No. 5, pp. 453-68.
- Sinha, D. K. (1990). "The contribution of formal planning to decisions. *Strategic Management Journal*, Vol. 11 No. 6, pp. 479-92.
- Shrader, C. B., Taylor, L., & Dalton, D. R. (1984). Strategic planning and organizational performance: a critical appraisal. *Journal of Management*, Vol. 10 No. 2, pp. 149-71.
- Swan, K. S., & Allred, B. B. (2003). A Predictive Model , Analytical Test, and Managerial Implications of International Subsidiaries' Technology Sourcing Strategy. *Journal of Product Innovation and Management*, 20 (6): 485-496.
- Thune, S. S., & House, R. (1970). Where long-range planning pays off. *Business Horizons*, 81-87.
- Whitehead, D. D., & Gup, B. E. (1985). Bank and thrift profitability: does strategic planning really pay?, *Economic Review*, Vol. 70, pp. 14-25.
- Zang, W., Yang, B., & Lem, G. N. M. (2009). Lingking Organizational Culture, Structure, Strategy and Organizational Effectiveness, Mediating role of Knowledge Management. *Journal of Management*, Vol. 47, pp. 136-151.
- Zwaan, L. (2006). *Assesing Organizational Cultur, in A Private Hospital in the Western Cape*. Zwaan, Thesis. Faculty of economic and management science, University of the western Cap.

DRAF RANCANGAN DESAIN PENELITIAN: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH WISATA PENGOLAHAN AKAR KAYU BERBASIS ECO GREEN DI LAHAN BEKAS PERTAMBANGAN KAPUR

KETUA: Dra SRI KUSSUJANIYATUN, MSi, NIDN: 9905000816

Dr. Ir. Teguh Kismantoroadji, M.Si. kismantoroadji@gmail.com081328089202

Hari Kusuma Satria Negara, S.E., M.Acc., Ak. harikusuma_sn@yahoo.co.id, 081227227555

ABSTRAK

RIP UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bidang tata kelola publik memberi arah bagi pengembangan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang penelitian ini adalah memberi sumbangan untuk pembangunan bangsa sesuai dengan pemikiran dalam khasanah ilmu tim peneliti. Grand desain penelitian ini adalah terwujudnya pembangunan bangsa dengan membuat *best practice model* pemanfaatan pengelolaan dengan mempertahankan dan bahkan pengkayaan ekosistem. Oleh karena itu strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu di lahan bekas pertambangan kapur di Bojonegoro ini sangat penting dilakukan.

Penelitian PUPT ini dirancang dalam lima tahap, yaitu tahap pertama adalah pemetaan potensi wisata, pemetaan tamanan yang tepat di bekas lokasi tambang kapur agar menambah asri lingkungan, pemetaan jalur produksi, pemetaan jalur pemasaran, dan pendekatan pada unsur tokoh masyarakat serta tokoh pemerintah daerah. Tahap kedua adalah dengan pemberdayaan masyarakat, branding, dan pelestarian lingkungan. Tahap ketiga adalah meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, industri pariwisata. Tahap keempat adalah pembuatan model terbaik penerapan pariwisata ekosistem di Ngraho, Bojonegoro sebagai proyek percontohan. Tahap terakhir yaitu tahap kelima adalah integrasi dari semua tahap yang sudah dilakukan.

Luaran dari penelitian PUPT ini adalah presentasi seminar nasional dan seminar internasional, publikasi nasional dan internasional, rekayasa sosial pemberdayaan masyarakat dalam menngembangkan potensi dan kesanggupan diri untuk pengentasan kemiskinan, dan buku ajar dan HKI.

Kata kunci: pengembangan strategi wisata, pelestarian ekosistem, pengembangan varietas tanaman jati, pengembangan varietas tanaman untuk bekas tambang kapur.

A. PENDAHULUAN

Artikel ini merupakan artikel yang diajukan dalam Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT). Selanjutnya artikel ini diajukan dalam Seminar Nasional, *Call Paper* dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat Kemenristek DIKTI RI guna dapat memaparkan hasil penelitian agar dapat diterima oleh khalayak ramai.

Permasalahan dalam membangun suatu kawasan seringkali mengabaikan konsep ekonomi hijau. Pengembangan strategi wisata berbasis pengolahan akar kayu menimbulkan kesan bahwa terjadi pembalakan kayu secara besar-besaran yang kemudian akarnya diolah. Atau dengan kata lain adalah akar kayu merupakan penadah bagi pemakaian kayu secara besar-besaran. PUPT ini memiliki visi membangun suatu kawasan wisata pengolahan akar kayu yang sudah sangat terkenal di manca negara dengan konsep ekonomi hijau.

RIP UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bidang tata kelola publik memberi arah bagi pengembangan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan **tujuan jangka panjang penelitian ini** adalah memberi sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu dan pembangunan bangsa dengan membuat *best practice model* pemanfaatan pengelolaan dengan mempertahankan dan bahkan pengkayaan ekosistem. Oleh karena itu strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu di lahan bekas pertambangan kapur di Bojonegoro ini sangat penting dilakukan. Lahan tambang tradisional kapur di wilayah Ngraho merupakan wilayah pegunungan kapur di Bojonegoro. Lahan pertambangan kapur ini semakin habis dan masyarakat mulai mengolah akar-akar kayu. Lahan kapur ini merupakan lahan yang bagus bagi pertumbuhan tanaman jati.

Urgensi PUPT ini adalah membangun kesadaran menghidupkan lahan harus ditumbuhkembangkan dengan konsep pelestarian alam, sehingga produksi pengolahan akar kayu tetap tumbuh dengan baik yang didukung dengan semakin hijaunya lingkungan. Konsep ekonomi hijau mampu diaplikasikan dengan mengembangkan varietas tanaman jati dan tanaman yang lainnya di lahan bekas tambang kapur yang menjadi sentra penelitian ini. Kismantoroadji, 2008a dan 2008b memaparkan bahwa kajian dalam pengembangan strategi wisata berbasis tanaman sangat penting untuk Indonesia karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati flora yang sangat kaya. Dalam hal ecotourisme, Kismantoroadji 2008c memaparkan bahwa pentingnya membangun komunitas berbasis Agri-ecotourism pada daerah-daerah sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.

Luaran yang akan dicapai setiap tahun penelitian ini adalah memberi sumbangan pemikiran dalam tata kelola publik dengan membuat *best practice model* model terbaik untuk proyek percontohan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro.

Luaran ini akan diwujudkan dalam presentasi seminar nasional dan seminar internasional, publikasi nasional dan internasional, rekayasa sosial pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi dan kesanggupan diri untuk pengentasan kemiskinan, buku ajar dan HKI.

Metoda yang akan dilakukan dalam PUPT ini terbagi dalam lima tahap, yaitu **metode yang akan dipakai dalam tahap pertama** adalah pemetaan potensi wisata, pemetaan tamanan yang tepat di bekas lokasi tambang kapur agar menambah asri lingkungan, pemetaan jalur produksi, pemetaan jalur pemasaran, dan pendekatan pada unsur tokoh masyarakat serta tokoh pemerintah daerah adalah membuat program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro. **Metode yang akan dipakai dalam tahap kedua** adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap ini dilakukan dengan model pemberdayaan pemuda dalam pendampingan dan menggerakkan peningkatan pelayanan publik. Peranan pemuda dipilih karena pemuda memiliki usia produktif dan potensi energi yang besar dalam pembangunan, sehingga memiliki dampak *multiplayer effect* yang besar bagi pengentasan kemiskinan.

Metode yang akan dipakai dalam tahap ketiga adalah meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, industri pariwisata. Pada tahap ini mulai diimplementasikan untuk semua pihak. Tujuan tahap ini adalah meningkatkan kesadaran rasa memiliki dengan menumbuhkan kesadaran perilaku untuk menjaga ekosistem yang ada di wilayah Ngraho, Bojonegoro.

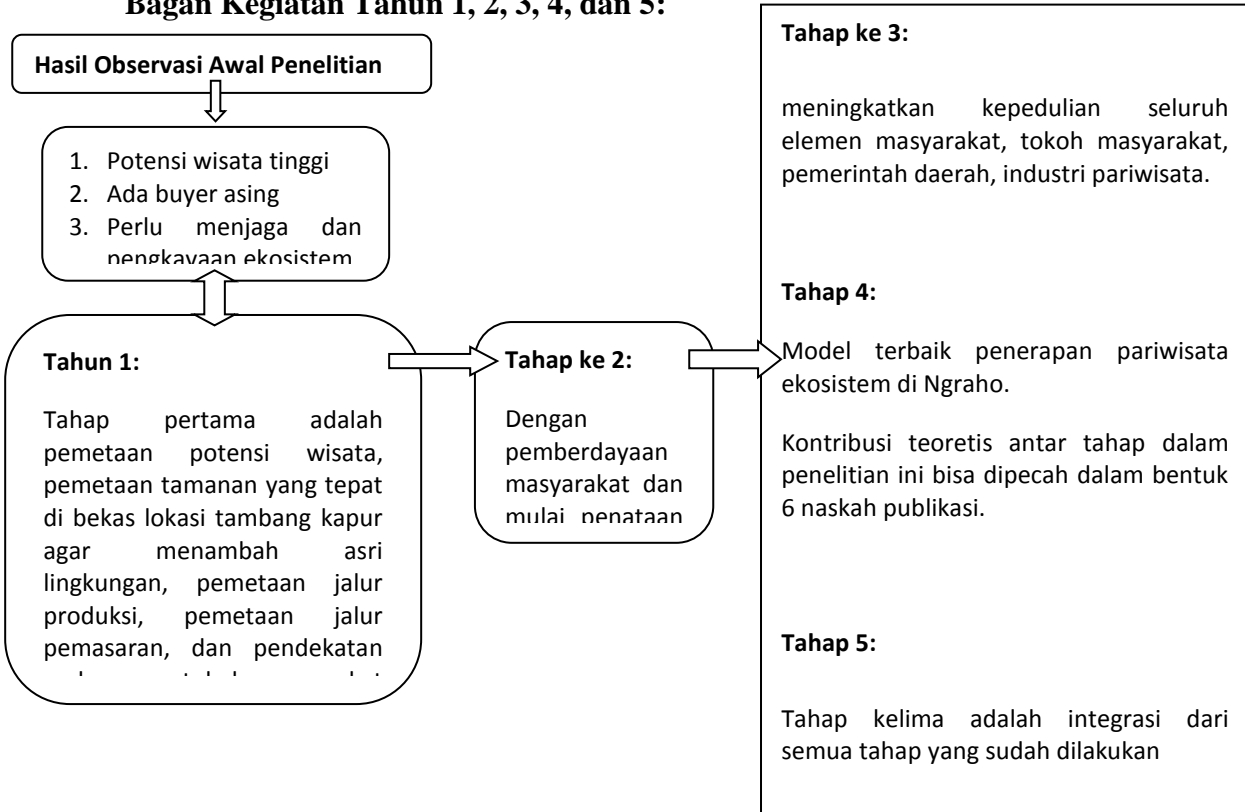
Metode yang akan dipakai dalam tahap keempat adalah model terbaik penerapan pariwisata ekosistem di Ngraho. Pada tahap ini, mulai masuk implementasi desain pengembangan wisata dengan web site untuk pengembangan wisata alam dan budaya yang berbasis ekosistem tanaman untuk bekas lahan tambang.

Metode yang akan dipakai dalam tahap kelima adalah tahap kelima adalah integrasi dari semua tahap yang sudah dilakukan. Pada tahap integrasi ini akan dilakukan diseminasi secara luas tentang model terbaik untuk projek percontohan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro.

b. Penelitian ini direncanakan dalam lima tahap yang saling berkaitan, yaitu:

Berikut ini adalah bagan kegiatan dan luaran penelitian untuk empat tahun.

Bagan Kegiatan Tahun 1, 2, 3, 4, dan 5:



B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama adalah *state of the art*. Sub bab kedua adalah strategi pengembangan wisata berbasis pengkayaan tanaman untuk melestarikan ekosistem yang ada di Ngraho, Bojonegoro

a. STATE OF THE ART

RIP UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bidang tata kelola publik memberi arah bagi pengembangan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang penelitian ini adalah memberi sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu dan pembangunan bangsa dengan membuat *best practice model* pemanfaatan pengelolaan dengan mempertahankan dan bahkan pengkayaan ekosistem. Oleh karena itu strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu di lahan bekas pertambangan kapur di Bojonegoro ini sangat penting dilakukan. Lahan tambang tradisional kapur di wilayah Ngraho merupakan wilayah pegunungan kapur di Bojonegoro. Lahan pertambangan kapur ini semakin habis dan masyarakat mulai mengolah akar-akar kayu. Lahan kapur ini merupakan lahan yang bagus bagi pertumbuhan tanaman jati. Dalam hal membangun strategi pengembangan wisata Kussujaniatun, 2006 menyatakan bahwa sinergi semua pemangku kepentingan akan membentuk percepatan dalam membangun

pengembangan wisata di suatu wilayah. Berkaitan dengan potensi ekonomi pengolahan akar kayu ini perlu suatu pemasaran yang baik. Selama ini pembeli asing dan pembeli dalam negeri membeli hasil olahan akar kayu tersebut. Dalam hal strategi pemasaran promosi yang dibangun bisa dimulai dengan efek komunikasi dari mulut ke mulut Kussujaniatun, 2006. Selain itu yang perlu dikembangkan sesuai dengan Kussujaniatun 2007a, 2007b, 2008 adalah pentingnya membangun merek dan citra, termasuk dalam hal ini adalah pengembangan strategi wisata.

Kussujaniatun, 2009a dan 2009b menyatakan bahwa analisis strategi loyalitas sangat penting dilaksanakan. Strategi membangun loyalitas ini bisa dimulai melalui produk differensiasi. Dalam hal ini, wilayah Ngraho Bojonegoro sebagai bekas lahan tambang kapur yang mampu pengelola sisa-sisa akar atau bonggol kayu dengan nilai seni yang tinggi perlu memosisikan sebagai wilayah penghasil produk olahan akar kayu yang melestarikan dan peduli lingkungan hijau sebagai basis potensi wisata ekonomi hijau.

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya di sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata.

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia khususnya di bidang pariwisata tahun 2013 di laksanakan dengan beberapa perencanaan pembangunan yaitu Objek dan daya tarik wisata, Prasarana wisata, Sarana wisata, Infrastruktur, Masyarakat/lingkungan. Yang pertama adalah Objek dan Daya Tarik Wisata. Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang untuk datang. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada: Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. Dalam hal ini akar kayu yang diolah menjadi wisata alam yang luar biasa indahnya jika digabung dengan ecogreen.

Dalam perkembangan ekonomi di bidang pariwisata tahun 2013 memiliki daerah dan tujuan wisata berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan

C. METODE PENELITIAN

a. Penelitian ini direncanakan dalam lima tahap yang saling berkaitan, yaitu:

1. Tahap pertama adalah pemetaan potensi wisata, pemetaan tamanan yang tepat di bekas lokasi tambang kapur agar menambah asri lingkungan, pemetaan jalur produksi, pemetaan jalur pemasaran, dan pendekatan pada unsur tokoh masyarakat serta tokoh pemerintah daerah.
2. Tahap kedua adalah dengan pemberdayaan masyarakat,
3. Tahap ketiga adalah meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, industri pariwisata.
4. Model terbaik penerapan pariwisata ekosistem di Ngraho.
5. Tahap kelima adalah integrasi dari semua tahap yang sudah dilakukan.

b. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian triangulation untuk setiap tahap penelitian (tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, serta tahap 5).

Metode yang akan dipakai dalam tahap pertama adalah pemetaan potensi wisata, pemetaan tamanan yang tepat di bekas lokasi tambang kapur agar menambah asri lingkungan, pemetaan jalur produksi, pemetaan jalur pemasaran, dan pendekatan pada unsur tokoh masyarakat serta tokoh pemerintah daerah adalah membuat program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan melakukan analisis terhadap data-data yang tersedia dan survei terhadap pembuat kebijakan yaitu pejabat Dinas Pariwisata, pelaku usaha, pemetaan lingkungan, pemetaan ekosistem, pengkayaan tanaman.

Metode yang akan dipakai dalam tahap kedua adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap ini dilakukan dengan model pemberdayaan pemudanya dalam pendampingan dan menggerakkan peningkatan pelayanan publik. Peranan pemuda dipilih karena pemuda memiliki usia produktif dan potensi energi yang besar dalam pembangunan, sehingga memiliki dampak *multiplayer effect* yang besar bagi pengentasan kemiskinan.

Pekerjaan yang kedua adalah pendampingan pada organisasi pemuda. Tujuannya untuk menghasilkan model terbaik peran pemuda dalam hal ini Karang Taruna di Ngraho, Bojonegoro.

Metode yang akan dipakai dalam tahap ketiga adalah meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, industri pariwisata. Pada tahap ini mulai diimplementasikan untuk semua pihak. Tujuan tahap ini adalah meningkatkan kesadaran rasa memiliki dengan menumbuhkan kesadaran perilaku untuk menjaga ekosistem yang ada di wilayah Ngraho, Bojonegoro.

Metode yang akan dipakai dalam tahap keempat adalah model terbaik penerapan pariwisata ekosistem di Ngraho. Pada tahap ini, mulai masuk implementasi desain pengembangan wisata dengan web site untuk pengembangan wisata alam dan budaya yang berbasis ekosistem tanaman untuk bekas lahan tambang.

Metode yang akan dipakai dalam tahap kelima adalah tahap kelima adalah integrasi dari semua tahap yang sudah dilakukan. Pada tahap integrasi ini akan dilakukan diseminasi secara luas tentang model terbaik untuk projek percontohan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro.

c. Variabel

Variabel penelitian yang akan diuji adalah variabel integritas, akuntabilitas, motivasi, empati, interaksi sosial, dan kebijakan pembangunan yang *pro poor government* (pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin).

d. Instrumen/Kuesioner

Instrumen kuesioner dirancang berdasarkan dimensi yang melekat pada masing-masing variabel yang akan diuji untuk semua pihak yang terlibat. Kuesioner akan dibagikan untuk pengujian pre dan post test pada semua tahap kegiatan penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data (Data, Sumber Data, dan Cara Mendapatkan Data)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survey pada pihak-pihak yang membuat kebijakan pembangunan pariwisata di Bojonegoro. Survey juga dilakukan untuk pelaku usaha dan pihak buyer dalam dan luar negeri.

f. Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah regresi untuk menguji hipotesis yang menjadi topik penelitian untuk setiap tahap penelitian.

g. Cara Menafsirkan dan Menyimpulkan

Langkah-langkah dalam menguji hipotesis adalah menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, kemudian persyaratan-persyaratan dalam asumsi klasik, baru kemudian menyimpulkan hasil olah statistik dengan alat analisis regresi.

Hasil olah dengan alat analisis regresi terdiri dari:

- seberapa besar variabel variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- fit atau tidaknya model regresi
- didukung atau tidaknya masing-masing variabel yang dapat disimpulkan dari tabel koefisien regresi.

KESIMPULAN

Lahan bekas penambangan merupakan lahan yang biasanya tidak termanfaatkan dengan baik. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut dianggap sudah tidak potensial dan tidak berguna lagi. Dalam penelitian ini, kami mencoba untuk dapat memanfaatkan lahan bekas penambangan. Lebih spesifik, lahan yang digunakan yaitu lahan bekas penambangan kapur.

Dalam penelitian ini, hal yang diangkat yaitu pengolahan akar kayu. Perlu adanya strategi peningkatan daerah wisata dengan memanfaatkan potensi pengolahan akar kayu. Basis yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu eco green. Sehingga wilayah yang awalnya merupakan lahan bekas penambangan kapur dapat didorong potensi pariwisatanya dengan mengoptimalkan potensi pengolahan akar kayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kismantoroedji, Teguh. 2008. Bantuan Benih Kedelai dan Dampaknya Terhadap Kelembagaan Petani di Gunungkidil DIY Prosiding Seminar 2008
- Kismantoroedji, Teguh. 2008 Problematika Ketersediaan dan Agribisnis Perbenihan Padi di Kabuapten Bantul Prosiding Seminar 2008 UPN "Veteran" Yk V
- Kismantoroedji, Teguh. 2008 Kajian Program Desa Mandiri Pangan Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Prosiding Seminar 2010 UPN "Veteran" Yk V
- Kismantoroedji, Teguh. 2008 Community –Based Agri-ecotourism in Kulon Progo and Bantul Regency Prosiding Seminar 2011 UPN "Veteran" Yk V
- Kussujaniatun, Sri. 2006. Hubungan antara Sikap Terhadap Bukti Fisik, Proses dan Karyawan dengan Kualitas Keterhubungan serta Perannya Dalam Menimbulkan Niat Ulang Membeli dan Loyalitas (Survei Pada Konsumen Member Card ALFA yang Berdomisili Di Sleman Yogyakarta). Penulis sendiri(Jurnal Humaniora Sains dan Pengajaran "INOVASI" Vol. XIV No. 3 September 2006, ISSN 0854-4328).
- Kussujaniatun, Sri. 2006. Efek Komunikasi Dari Mulut ke Mulut Terhadap Sikap dan Niat Membeli Produk Prosesor AMD Athlon DSI Yogyakarta. Penulis sendiri (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi " BALANCE" Th. III No. 6 Juli 2006, ISSN : 1693-9352).
- Kussujaniatun, Sri. 2007. Pengaruh Motivasi Nasabah Kredit Terhadap Keputusan Meminjam Dana (Survei Pada BPR Bank Kredit Kecamatan Juwangi Boyolali). Penulis sendiri Jurnal Ekonomi "Artavidya" Tahun 7 No.1 Maret 2007, ISSN : 1410-8755 Terakreditasi No. 23 a/DIKTI/Kep/2004

- Kussujaniatun, Sri. 2007. Analisa Pengaruh Dead Endorser Terhadap Brand Personality Pada Iklan Kompas Di Televisi (Survei Pada Iklan Konsumen Surat Kabar Harian Kompas Di Kabupaten Sleman Yogyakarta). Penulis sendiri) (Jurnal Bisnis dan Ekonomi "JBE" Vol. 14 No. 23 a/DIKTI/Kep/2004).
- Kussujaniatun, Sri. 2007. Analisis Ekuitas Merek (Survei Pada Konsumen Rokok Djarum 76 Di Yogyakarta). Penulis sendiri. (Jurnal Kajian & Riset Manajemen "Karisma" Vol. 1 Nomor 2, April 2007, ISSN : 1978-404X
- Kussujaniatun, Sri. 2007. Analisis Pengaruh Citra, Kualitas dan Kepuasan Terhadap Loyalitas (Studi Empiris pada BPR Danagung Yogyakarta). Penulis sendiri(Jurnal Bisnis dan Manajemen " Bisma" Vol. 1 No.1, April 2007, ISSN : 1978-3108)
- Kussujaniatun, Sri. 2008. Antecedent Perilaku berganti Merek pada mobil Nissan Grand Livina di Yogyakarta. Penulis ke 2 Karisma-Prodi Manajemen UPN Vol IV, no 3 ISSN:1978-404X. Desember 2010
- Kussujaniatun, Sri. 2008. Pengaruh Pengetahuan Produk, Nilai da Kualitas yang dipersepsikan terhadap Kepuasan Pelanggan mobil Toyota di Yogyakarta Jurnal Bisnis dan Manajemen " Bisma" 2009, Vol 5, No 1. ISSN : 1978-3108. April 2011
- Kussujaniatun, Sri. 2009. Analisis Strategi membangun Loyalitas konsumen melalui Differensiasi produk. (Survey pada pengguna sepeda motor "Yamaha Mio" di Kab Sleman) Seminar Nasional V Call for Paper UTY. ISBN: 978-979-1334-25-9, 18 juli 2009.
- Kussujaniatun, Sri. 2009. Analisis Segmentasi Pasar Produk Shampo Zinc (Proceding) Seminar Nasional,Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jatim. ISSN: 978-979-3100-28-9. 30 April 2009.
- Kussujaniatun, Sri. 2014. Pengentasan Kemiskinan: Motivasi dan Budaya perempuan dalam mekanisme Pemberdayaan Perempuan berbasis Pendekatan potensi di Kecamatan Berbah Sleman. Seminar Nasional,Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jogjakarta. Proceeding SINAU 3, 2014
- <http://purnamiap.blogspot.com/2014/09/makalah-perkembangan-ekonomi-indonesia.html>
- World Bank (1997), *World Development Report 1997-The State in a Changing World*, Washington, DC: World Bank.

PENGARUH *TECHNOLOGY READINESS* TERHADAP MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI INFORMASI MAHASISWA

Adi Soeprapto¹⁾, Meilan Sugiarto²⁾, Ida Susi Dewanti³⁾

FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Kampus II Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Sleman Yogyakarta
adi_soeprapto@yahoo.com

Abstract

Now every student is very familiar with the internet and make it as a media to run daily activities. Student behavior as internet users would vary which would bring its own model in the acceptance of information technology. The model is closely related to technological readiness. Aims of this study is to analysis influence of technology readiness on information technology acceptance model, where the model based on technology acceptance model. Object of this study is student at various university in Yogyakarta. Based on results of this study shows that perceived usefulness as ones variable of the model have higher mean value it means average student as internet users perceived that they use the internet because that information technology can improve their performance in many ways. Technology readiness as anticedent variabel of student information technology acceptance model has significant influence on many variabels in that models as perceived usefulness, perceived ease of use, attitude, and behavioral intentions.

Pendahuluan

Beberapa dekade belakangan ini telah menjadi kajian yang menarik, khususnya berkaitan dengan penerimaan dan pengguna teknologi informasi (Venkatesh, *et al.* 2003; Venkatesh and Davis, 2000; Agrawal, 2000; Sharp, 2006). Hal tersebut disebabkan oleh karena teknologi informasi dalam perkembangannya menjadi semakin fleksibel dan memberikan peluang bagi para pengguna untuk berkreasi dan berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Para mahasiswa saat ini banyak yang memanfaatkan internet untuk mengisi waktu luang dengan berkomunikasi *on-line*, bahkan dijadikan media bisnis. Kemudahan akses internet bagi mahasiswa di kampus diperkirakan berkembang di medio 2008 dengan pemasangan wifi di berbagai kampus yang dapat diakses oleh para mahasiswa untuk memperlancar kegiatan akademik. Hasil penelitian Sugiarto (2011) juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pengguna internet memanfaatkannya untuk mendukung aktivitas harian, dimana keakraban mahasiswa dengan internet sudah merupakan kewajiban dan tuntutan akademik karena di era global internet sudah merupakan media pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa sebagai pengguna internet memiliki pola tersendiri dalam menerima dan menggunakan teknologi informasi dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya.

Model yang paling banyak digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi informasi adalah TAM (Lee *et al.*, 2003). TAM merupakan sebuah model yang menjelaskan pola penerimaan suatu teknologi. Model ini banyak diadopsi dan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerimaan teknologi informasi (Agarwal and Prasad, 1999; Doll *et al.*, 1998; Segars and Grover, 1993).

Pada dasarnya manusia cenderung menggunakan teknologi baru untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari maupun penyelesaian tugas yang dihadapi (*technology readiness*) memiliki peran dan berpengaruh terhadap model penerimaan teknologi informasi

atau TAM (*technology acceptance model*) (Liljander *et al.*, 2006; Walczuch *et al.*, 2007; Lin *et al.*, 2007; Sheng Chris lin and Chi Chang, 2011; Ming kuo, 2013). Pengaruh *technology readiness* (TR) terhadap model penerimaan teknologi informasi di kalangan mahasiswa merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat perilaku mahasiswa sekarang sangat mengandalkan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai penelitian terdahulu berkaitan dengan *technology acceptance model* dalam memahami penerimaan pengguna atas teknologi informasi masih terbatas pada keinginan menggunakan sebagai variabel dependennya (Sausa, 2003; Liljander *et al.*, 2006; Walczuch *et al.*, 2007; Lin *et al.*, 2007; Sugiarto dkk., 2008; Sheng Chris lin and Chi Chang, 2011; Ming kuo, 2013). Sugiarto (2011) pernah meneliti model tersebut dengan obyek mahasiswa dan menambahkan perilaku penggunaan aktual (Davis, 1989; Teo, 2001). Namun penelitian tentang pengaruh *technology readiness* terhadap *technology acceptance model* dengan obyek mahasiswa belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Artikel ini memaparkan hasil penelitian hibah fundamental yang didanai oleh DP2M Dikti tahun anggaran 2015. Artikel ini dibuat dalam rangka publikasi dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim penelitian. Alur paparan dalam artikel ini disajikan dengan mengacu tujuan penelitian yang telah dilakukan yaitu menganalisis pengaruh *technology readiness* terhadap model penerimaan teknologi informasi (internet) mahasiswa. Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah diperoleh temuan empiris yang dapat berkontribusi bagi pengembangan pengetahuan, terutama untuk ilmu perilaku dan manajemen sistem informasi.

Kajian Literatur Dan Hipotesis Penelitian

Model yang paling banyak digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi informasi adalah TAM (Lee *et al.*, 2003). Model ini banyak diadopsi dan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerimaan teknologi informasi (Agarwal dan Prasad, 1999; Doll *et al.*, 1998; Segars dan Grover, 1993). TAM dikembangkan oleh Davis (1989) yang mengadaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Berkaitan dengan hal tersebut, Davis menggunakan TRA sebagai dasar teoritis untuk menentukan dan menghubungkan dua konstruk, yaitu : kemanfaatan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan menggunakan yang dirasakan (*perceived easy of use*). Sasaran TAM adalah menghasilkan penjelasan tentang faktor-faktor yang menentukan penerimaan terhadap teknologi, kemudian dapat menjelaskan perilaku pengguna melalui jangkauan luas pengguna akhir teknologi dan populasi para pengguna. Di dalam TAM, Davis menegaskan bahwa penggunaan ditentukan oleh intensitas perilaku penggunaan (*behavior intention to use*), dimana intensitas perilaku ditentukan oleh sikap (*attitude*) dan kemanfaatan yang dirasakan.

TAM juga mengakui adanya kontribusi variabel eksternal sebagai antiseden untuk meningkatkan pengaruh kemanfaatan dan kemudahan menggunakan yang dirasakan; sikap dan intensitas perilaku penggunaan. Di samping itu, kemudahan menggunakan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung terhadap kemanfaatan yang dirasakan. Oleh karena itu, TAM merupakan model kausal yang menguji kovarians atas konstruk-konstruk tersebut untuk menentukan apakah terdapat hubungan kausal antar konstruk.

Untuk meningkatkan pengaruh kemanfaatan dan kemudahan menggunakan yang dirasakan dalam TAM yang dikaji oleh Davis (1989) belum secara eksplisit memunculkan variabel eksternal sebagai antiseden. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengasumsikan TR sebagai variabel eksternal. Kecenderungan manusia menggunakan teknologi baru untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari maupun penyelesaian

tugas yang dihadapi (*technology readiness/TR*) memiliki peran dan berpengaruh terhadap model penerimaan teknologi informasi (*technology acceptance model/TAM*) (Liljander *et al.*, 2006; Walczuch *et al.*, 2007; Lin *et al.*, 2007; Sheng Chris lin and Chi Chang, 2011; Ming kuo, 2013). Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan penggunaan TAM sebagai model dalam memahami perilaku individu ketika menerima dan menggunakan suatu teknologi informasi.

Davis (1989) mengartikan kemanfaatan yang dirasakan sebagai kemungkinan perspektif subyektif pengguna dimana menggunakan suatu sistem aplikasi spesifik akan meningkatkan kinerjanya. Berkaitan dengan teknologi internet, maka dapat dikatakan kemanfaatan yang dirasakan merupakan tingkatan dimana seorang individu yakin dengan menggunakan suatu teknologi internet akan meningkatkan kinerjanya. Kemudahan menggunakan yang dirasakan diartikan sebagai tingkatan dimana harapan pengguna dengan menggunakan suatu sistem adalah bebas dari usaha (Davis, 1989). Dengan kata lain, kemudahan menggunakan merupakan tingkatan dimana seorang individual percaya bahwa belajar menggunakan suatu teknologi membutuhkan sedikit usaha.

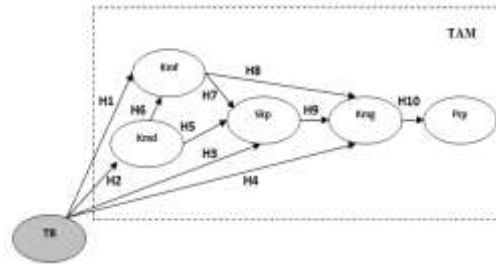
Sikap merupakan perasaan atau emosi seorang individu tentang penggunaan teknologi (Davis, 1989). Keinginan menggunakan mengacu keinginan individu akan menggunakan teknologi di masa depan dan merupakan awal dari penggunaan aktual suatu teknologi (Davis, 1989).

Perilaku penggunaan merupakan penggunaan internet secara aktual oleh mahasiswa di Yogyakarta. Indikator untuk variabel ini yaitu : frekuensi mengirim dan menerima pesan melalui internet; frekuensi melihat-lihat (*browsing*) di internet; frekuensi men-*download* berita/informasi melalui internet; frekuensi membeli sesuatu melalui internet (Teo, 2001; Sugiarto dkk, 2008; Sugiarto, 2011).

Pengertian *technology readiness* (TR) mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk merangkul dan menggunakan teknologi baru untuk mencapai tujuan dalam kehidupan di rumah dan di tempat kerja (Parasuraman, 2000). Lebih lanjut dijelaskan Parasuraman bahwa TR mencakup empat dimensi yaitu: (1) optimisme atau pandangan positif atas teknologi dan keyakinan yang menawarkan seseorang meningkatkan pengendalian, efisiensi, dan fleksibilitas dalam hidupnya; (2) inovasi atau kecenderungan untuk menjadi pengguna pertama dari teknologi dan menjadi pemimpin opini; (3) ketidaknyamanan atau adanya persepsi tidak dapat mengendalikan teknologi dan merasa repot oleh teknologi; (4) ketidakamanan atau mencurigai teknologi dan ragu tentang kemampuan kerja teknologi. Di antara empat dimensi, optimisme dan inovasi adalah memungkinkan kesiapan terhadap teknologi, sedangkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan adalah inhibitor (sesuatu yang mencegah pertumbuhan) (Parasuraman, 2000). Dengan demikian, orang yang optimis dan inovatif serta nyaman dan aman lebih cenderung menerima dan menggunakan teknologi.

Secara empiris, terdapat berbagai penelitian terdahulu yang pernah mengkaji hubungan kausal antar variabel dalam TAM antara lain Dias (1998), Hu *et al.* (1999), Sausa (2003), Sugiarto dkk. (2008). Sedangkan penelitian yang memasukkan penggunaan aktual dalam model TAM antara lain Stoel & Lee (2003), Fusilier & Durlabhji (2005), Seyal & Rahman (2007), Sugiarto (2011). Pengaruh TR terhadap TAM pernah dikaji oleh Sheng Chris Lin & Chi Chang (2011), Ming Kuo *et al.* (2013). Namun belum melibatkan variabel sikap dan penggunaan aktual.

Hipotesis pengaruh antar variabel penelitian ditunjukkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Model konseptual dengan hipotesis pengaruh antar variabel penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *explanatory research* yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel dalam model yang disusun melalui pengujian hipotesis. Sampel penelitian ini adalah 130 mahasiswa pengguna internet yang tersebar pada 10 universitas di Yogyakarta yang terdaftar pada hasil survei *webometrics*. Jumlah tersebut dinilai representatif sesuai dengan Roscoe dalam Sekaran (1992) bahwa ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500, sesuai untuk kebanyakan penelitian dan dalam penelitian *multivariate*. Sampel diambil dari populasi menggunakan teknik *simple random sampling* tanpa dibedakan secara strata dimana dari 10 universitas tersebut diambil 13 mahasiswa pengguna internet pada jenjang strata 1. Pengumpulan data utama dilakukan menggunakan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk mempermudah mendapat sasaran yang tepat, maka tim surveyor mengumpulkan data dengan cara mendatangi lokasi-lokasi tempat mahasiswa dapat mengakses internet, seperti warung internet, lokasi *hot spot* yang ada di dalam kampus, dan sebelum diberi kuesioner calon responden dipastikan terlebih dahulu oleh para surveyor bahwa calon responden adalah mahasiswa strata 1 dan pengguna internet. Untuk mendeskripsikan data empiris digunakan statistik deskriptif, sedangkan untuk menganalisis pengaruh antar variabel menggunakan SEM dan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji *t* dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha=0,05$).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil uji validitas instrumen pengumpul data dilakukan dengan *product moment correlation* (*r*) yang hasilnya menunjukkan semua item dalam kuesioner penelitian memiliki nilai r_{hitung} diatas 0,5 sehingga semua item dikatakan valid dan hasil uji reliabilitas dengan *Cronbach's alpha* (Nunnally, 1978) menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* diatas 0,8 sehingga instrumen penelitian dikatakan reliabel.

Untuk menggambarkan persepsi mahasiswa pengguna internet sebagai obyek penelitian terhadap variabel penelitian mengacu pada nilai *mean* setiap variabel penelitian. Adapun secara deskriptif ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Deskripsi Variabel Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Nilai Mean
1	<i>Technology Readiness</i>	3,53
2	Kemanfaatan yang dirasakan	4,15
3	Kemudahan yang dirasakan	3,97
4	Sikap	4,09
5	Keinginan menggunakan	3,82
6	Perilaku penggunaan	3,56

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel kemanfaatan yang dirasakan (Kmf) memperoleh nilai *mean* 4,15 yang berada pada daerah positif, maka dapat diartikan bahwa

rata-rata mahasiswa pengguna internet merasakan kemanfaatan dari internet sebagai salah satu teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja penggunaannya. Variabel kemudahan yang dirasakan (Kmd) memiliki nilai *mean* 3,97 yang berada pada daerah positif, sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata mahasiswa pengguna internet merasakan kemudahan dalam penggunaan internet. Nilai *mean* yang diperoleh variabel sikap (Skp) adalah 4,09 yang berada pada daerah positif, maka dapat diartikan bahwa rata-rata mahasiswa pengguna internet menunjukkan sikap positif terhadap internet. Nilai *mean* yang diperoleh untuk variabel keinginan menggunakan (Kmg) internet adalah 3,82 yang berada pada daerah positif, maka dapat diartikan rata-rata mahasiswa pengguna internet mempunyai keinginan yang tinggi menggunakan internet. Variabel perilaku penggunaan (Prp) internet memperoleh nilai *mean* 3,56 yang berada pada daerah positif, sehingga dapat diartikan rata-rata mahasiswa pengguna internet secara aktual memiliki tingkat penggunaan internet yang tinggi, atau dengan kata lain, mahasiswa seringkali menggunakannya. Berdasarkan data yang diperoleh berkaitan dengan perilaku penggunaan tersebut, berbagai aktivitas mahasiswa dalam penggunaan internet yaitu mencari dan mengumpulkan informasi, komunikasi *interface*, belanja *online*, dan beberapa diantaranya menggunakan internet sebagai media untuk melakukan bisnis *online*.

Nilai *mean* untuk variabel *technology readiness* (TR) adalah 3,53 yang berada pada daerah positif, maka dapat diartikan bahwa rata-rata mahasiswa pengguna internet merasakan bahwa internet sebagai salah satu teknologi informasi perlu dirangkul dan digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, mahasiswa pengguna internet optimis dan inovatif serta nyaman dan aman dengan teknologi informasi tersebut. Oleh sebab itu mereka cenderung mudah menerima dan menggunakan teknologi informasi tersebut secara intensif.

Hasil analisis pengaruh antar variabel penelitian menggunakan SEM dapat dicermati pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Analisis SEM Pengaruh Antar Variabel Penelitian

No .	Pengaruh Antar Variabel			Loadin g factor (β)	CR (t value)	ρ
1.	Kmd	<---	TR	.228	2.680	.010*
2.	Kmf	<---	TR	.269	3.178	.008*
3.	Kmf	<---	Kmd	.372	3.549	.000*
4.	Skp	<---	TR	.242	2.894	.007*
5.	Skp	<---	Kmf	.513	3.824	.000*
6.	Skp	<---	Kmd	.441	3.632	.000*
7.	Kmg	<---	Kmf	.465	3.646	.000*
8.	Kmg	<---	TR	.179	2.159	.041*
9.	Kmg	<---	Skp	.568	3.847	.000*
10.	Prp	<---	Kmg	.453	3.637	.000*

Sumber : data primer yang diolah, 2015.

Catatan : *signifikan $\rho < .05$

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa *technology readiness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap beberapa variabel dalam TAM yaitu kemudahan yang dirasakan ($Lf = .228$, $\rho < .05$), kemanfaatan yang dirasakan ($Lf = .269$, $\rho < .05$), sikap ($Lf = .242$, $\rho < .05$), maupun terhadap keinginan menggunakan ($Lf = .179$, $\rho < .05$). Dengan demikian, H1, H2, H3, dan H4 dapat diterima. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Sheng Chris Lin & Chi Chang (2011) maupun Ming Kuo et al. (2013).

Untuk pengaruh antar variabel dalam TAM menunjukkan bahwa kemudahan yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemanfaatan yang dirasakan ($Lf = .372$, $\rho < .05$) begitu pula terhadap sikap ($Lf = .441$, $\rho < .05$), maka H5 dan H6 dapat diterima. Hasil

tersebut sejalan dengan temuan Davis *et al.* (1989), Dias (1998), Chau (2001), Stoel dan Lee (2003), Darsono (2005), Cheong dan Park (2005), Huang, Lin dan Chuang (2006), Seyal dan Rahman (2007). Berbeda dengan Hu *et al.* (1999) yang menemukan kemudahan yang dirasakan berpengaruh terhadap kemanfaatan yang dirasakan dan sikap, tapi tidak signifikan.

Selanjutnya, kemanfaatan yang dirasakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap ($Lf = .513$, $\rho < .05$) maupun terhadap keinginan menggunakan ($Lf = .465$, $\rho < .05$), maka H7 dan H8 dapat diterima. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Davis *et al.* (1989), Hu *et al.* (1999), Stoel dan Lee (2003), Ndubisi dan Jantan (2003), Wang *et al.* (2003), Cheong dan Park (2005), Fusilier dan Durlabhji (2005). Berbeda dengan Darsono (2005) yang menemukan kemanfaatan yang dirasakan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap keinginan menggunakan.

Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan menggunakan ($Lf = .568$, $\rho < .05$), maka H9 dapat diterima. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Davis *et al.* (1989), Dias (1998), Hu *et al.* (1999), Stoel dan Lee (2003), Sausa (2003), Cheong dan Park (2005). Keinginan menggunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan ($Lf = .453$, $\rho < .05$), maka H10 dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan temuan Cheong dan Park (2005).

Mengacu pada hasil analisis pengaruh antar variabel yang telah dijelaskan, kemanfaatan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung paling besar terhadap sikap mahasiswa pengguna internet dibandingkan variabel lainnya dalam model, dengan demikian dalam penelitian ini sikap positif atau negatif mahasiswa terhadap teknologi informasi lebih banyak ditentukan oleh manfaat yang dirasakan dari teknologi informasi tersebut, jika suatu teknologi informasi tidak memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya, maka mahasiswa cenderung akan bersikap negatif begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, sikap mahasiswa pengguna internet mempunyai pengaruh paling besar terhadap keinginan menggunakan internet dibandingkan variabel lain dalam model, maka dapat diartikan bahwa semakin positif sikap mahasiswa terhadap teknologi informasi, maka semakin tinggi keinginan menggunakannya, begitu pula sebaliknya.

Technology readiness selain berpengaruh secara langsung terhadap beberapa variabel dalam TAM juga memiliki pengaruh tidak langsung secara positif terhadap kemanfaatan yang dirasakan yang dimediasi oleh kemudahan yang dirasakan, terhadap sikap yang dimediasi oleh kemudahan yang dirasakan maupun yang dimediasi oleh kemanfaatan yang dirasakan, terhadap keinginan menggunakan yang dimediasi oleh kemanfaatan yang dirasakan, terhadap keinginan menggunakan yang dimediasi oleh sikap, terhadap perilaku penggunaan yang dimediasi oleh keinginan menggunakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian *technology readiness* sebagai variabel eksternal TAM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemanfaatan yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, sikap, maupun keinginan pengguna untuk menggunakan suatu teknologi informasi. Semakin optimis, inovatif serta nyaman dan aman yang dirasakan pengguna terhadap suatu teknologi informasi, maka semakin besar kemanfaatan yang dirasakan, semakin mudah, semakin positif sikap yang ditunjukkan, dan semakin tinggi keinginan untuk menggunakannya. *Technology readiness* selain berpengaruh secara langsung terhadap beberapa variabel dalam TAM juga memiliki pengaruh tidak langsung secara positif.

Kemudahan yang dirasakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemanfaatan yang dirasakan maupun sikap. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin mudah suatu teknologi informasi digunakan akan semakin besar kemanfaatan yang dirasakan pengguna dan semakin positif sikap pengguna terhadap teknologi informasi. Kemanfaatan yang dirasakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sikap dan keinginan

menggunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kemanfaatan yang dirasakan pengguna teknologi informasi semakin positif sikap yang ditunjukkan dan semakin tinggi keinginan menggunakan suatu teknologi informasi. Sikap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keinginan menggunakan, dapat diartikan semakin positif sikap pengguna terhadap teknologi informasi semakin tinggi keinginan menggunakannya. Keinginan menggunakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan, dapat diartikan bahwa semakin tinggi keinginan pengguna menggunakan suatu teknologi informasi maka akan semakin tinggi pula penggunaan aktualnya.

Ucapan Terima Kasih

1. Terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti-KemenRistekDikti Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini melalui hibah penelitian fundamental tahun 2015.
2. Terima kasih kepada LPPM UPN Veteran Yogyakarta yang telah membantu secara administratif dalam pelaksanaan penelitian fundamental ini.

Daftar Pustaka

- Agarwal, R. dan Prasad, J. 1999. Are individual differences germane to the acceptance of new information technologies ? *Decision Sciences*. 30 (2) : 361-391.
- _____, R. 2000. Individual acceptance of information technologies. *In Framing the domain of IT Management*. Edited by Robert W. Zmud : 85-104.
- Ajzen, I. 1991. The theory of planned behaviour, *Organisational Behaviour and Human Decision Processes*. (50):179–211.
- Cheong, J.H. dan Park, Myeong-Cheol. 2005. Mobile internet acceptance in Korea. *Internet Research*. 15 (2):125-140.
- Chris Lin, J.S., Hsing-Chi Chang. 2011. The role of technology readiness in self-service technology acceptance. *Managing Service Quality*. 21 (4): 424-444.
- Darsono, L.2005. Examining Information technology Acceptance By Individual Professionals. *Gadjah Mada Internasional Journal of Business*. (7,2).
- Davis, F.D. 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*. 13(3): 319–340.
- Dias, D.S. 1998. Managers' motivation for using information technology. *Industrial Management & Data Systems*. 98 (7): 338–342
- Doll, W.J., Hendrickson, A. dan Deng, X. 1998. Using Davis's perceived usefulness and ease-of-use instruments for decision making: a confirmatory and multi-group invariance analysis. *Decision Sciences*. 29 (4): 839-69.
- Fusilier, M. dan Durlabhji, S. 2005. An exploration of student internet use in India : the technology acceptance model and the theory of planned behaviour. *Campus-Wide Information Systems*. 22 (4):233-246.
- Hu, J., Chau, Y.K., Sheng, R.L. dan Tam, K.Y. 1999. Examining technology acceptance model using physician acceptance of telemedicine technology. *Journal of Management Information Systems*. 16 (2): 91-112.
- Lee, Y., Kozar, K.A. dan Larsen, K.R.T. 2003. The technology acceptance model: past, present, and future. *Communications of the Association for Information Systems*. 12 (50): 752-780.
- Liljander, V., Gillberg, F., Gummerus, J. dan Van Riel, A. 2006. Technology readiness and the evaluation and adoption of self-service technologies. *Journal of Retailing and Consumer Services*. 13 (3): 177-91.
- Lin, C.H., Shih, H.Y. dan Sher, P.J. 2007. Integrating technology readiness into technology acceptance: the TRAM model", *Psychology & Marketing*. 24 (7): 641-57.

- Ming Kuo, K., Liu, C.F., dan Chen-Chung Ma. 2013. An investigation of the effect of nurses technology readiness on the acceptance of mobile electronic medical record systems. *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 13:88.
- Ndubisi, N.O. dan Jantan, M. 2003. Evaluating IS usage in Malaysian small and medium-sized firms using the technology acceptance model; *Logistics Information Management*. 16 (6): 440-450.
- Nunnally, J. C. 1978. *Psychometric theory*. 2nd ed. McGraw-Hill. New York. USA.
- Parasuraman, A. 2000. Technology readiness index (TRI): a multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. *Journal of Service Research*. 2 (4): 307-20.
- Sausa, K.J. 2003. Factors Influencing The Adoption Of Electronic Business In The Purchasing Activities Within A Business Organization Using An Extended Technology Acceptance Model. *Dissertation*. Department of Business Administration. University of Rhode Island.
- Segars, A.H. dan Grover, V. 1993. Re-examining perceived ease of use and usefulness: a confirmatory factor analysis. *MIS Quarterly*. 17 (4): 517-25.
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods For Business*. Second edition. John Wiley & Sons. Inc. Canada.
- Seyal, A.H. dan Rahman, N.A. 2007. The influence of external variables on the executives use of the internet. *Business Process Management Journal*. 13 (2): 263-278.
- Stoel, L., dan Lee, K.H. 2003. Modeling the effect of experience on student acceptance of Web-based courseware. *Internet Research Electronic Networking Application and Policy*. 13 (5): 364-374.
- Sugiyono.(1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Sugianto, M., Wiendijarti, I., dan Wibowo, R. 2008. *Analisis penerimaan usaha kecil menengah terhadap internet berdasarkan technology acceptance model, Studi Pada UKM Eksportir di Propinsi DIY*. Laporan Penelitian Unggulan-LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- _____, M. 2011. *Self efficacy dan kesenangan yang dirasakan sebagai variabel antiseden dalam TAM : Studi tentang perilaku penggunaan internet mahasiswa*. Laporan Penelitian Hibah Fundamental DP2M Dikti.
- Teo, T.S.H. 2001. Demographic and motivation variables associated with internet usage activities. *Internet Research Electronic Networking Application and Policy*. 11 (2): 125-137.
- Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis,G.B., dan Davis, F.D. 2003. User acceptance of information technology : toward a unified view. *MIS Quarterly*. 27(3): 425-478.
- _____,V., dan Davis, F.D. 2000. A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model : Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*. 46(2): 186-204.
- Walczuch, R., Lemmink, J. dan Streukens, S. 2007. The effect of service employees technology readiness on technology acceptance. *Information & Management*. 44 (2): 206-15.
- Wang, Y.S., Wang, Y.M., Lin, H.H. and Tang, T.I. 2003. Determinants of user acceptance of Internet banking: an empirical study. *International Journal of Service Industry Management*. 14 (5): 501-519.

INVESTASI BATUBARA⁹

Oleh:

Sutoyo, FE Akuntansi UPNVY
Sujatmika, FE Akuntansi UPNVY

ABSTRAK

Mineral dan batubara yang ada di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertambangan merupakan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral. Lebih lanjut, investasi tambang merupakan kegiatan penanaman modal untuk kegiatan pertambangan. Investasi tambang membutuhkan modal yang luar biasa besar. Oleh karena itu, investasi tambang harus dilakukan secara cermat dan teliti. Jangan sampai kehilangan sedikitpun untuk kerusakan. Uang yang keluar sama dengan mineral atau uang yang didapat.

Kata kunci : Investasi, tambang, batubara.

1. LATAR BELAKANG

Eksplorasi geologi batubara akan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia maupun mempunyai dampak negatif, seperti adanya sesar, jenis batuan tertentu yang keberadaannya perlu diketahui secara mendetail.

Tujuan dari eksplorasi adalah menemukan serta mendapatkan sejumlah maksimum dari cebakan mineral ekonomi baru dengan biaya seminimal mungkin dalam waktu seminimal mungkin.

Batubara

Batubara adalah hasil sedimentasi sisa-sisa tanaman air dan darat yang terpendam di dalam tanah. Akumulasi terjadi setempat atau berasal dari tempat di sekitarnya diangkut oleh sungai yang makin lama makin tebal. Perubahan situasi geologi berulang-ulang menyebabkan terjadinya beberapa lapis batubara yang diselingi oleh lapisan-lapisan pasir tanah liat (Sutoyo, Sujatmika, 2015).

Tekanan oleh lapisan penutup dan gerakan-gerakan tektonik dan kadang-kadang dijaga oleh intrusi batuan beku menyebabkan terjadinya gas-gas yang kemudian tersekap ke dalam lapisan penutup.

⁹ Artikel ilmiah ini merupakan hasil penelitian Hibah Bersaing 2015 yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti RI. Tim peneliti menghaturkan terima kasih mendalam atas pendanaan ini kepada Kemenristek Dikti RI dan LPPM UPNVY yang memfasilitasi penelitian ini.

Tim peneliti menghaturkan terima kasih kepada Dr. Sri Suryaningsum, M.Si. (UPNVY) dan Dr. Bambang Jatmiko, M.Si. (UMY) atas telaah dan diskusi mendalam mengenai akuntansi pertambangan, serta Ristiya Munazahatin, S.T. asisten penelitian ini.

Tergantung kepada intensitet/kerasnya tekanan dan gangguan menyebabkan terjadinya perubahan menjadi peat, lignit, browncoat, bituminous coal, antrasit, dan grafik. Di bukit atau dekat dengan batuan beku terjadi kokas alam (*natural cokes*). Macam/jenis tanaman dan sedikit banyaknya kotoran ikut menentukan kualitas daripada batubara.

Penyelidikan dengan pemetaan geologi yang menggambarkan keadaan formasi, singkapan-singkapan (*outcrop*) batubara (kemiringan, arah dan tebalnya) dan keadan tektonik (patahan dan pelipatan). Arahnya untuk dapat menentukan jumlah cadangan dilakukan dengan pemboran.

Lapisan batubara umumnya dicirikan mempunyai koefisien variasi rendah dengan geometri dan distribusi kadar sederhana, unsur-unsur utamanya mudah dievaluasi, sedangkan unsur-unsur minor sulit dievaluasi, dilusi internal dan dilusi tepi seringkali menimbulkan masalah. Secara umum geometri lapisan batubara memang lebih sederhana bila dibandingkan dengan endapan mineral yang lain (Spero Carras, 1984 dalam B. Kuncoro 2000). Tetapi kenyataan di lapangan, selain ditemukan sebagai lapisan yang melampar luas dengan ketebalan menerus dan dalam urutan yang teratur, juga dijumpai lapisan batubara yang tersebar tidak teratur, tidak menerus, menebal, menipis, terpisah dan melengkung dengan geometri yang bervariasi. Maka geometri menjadi perlu dipelajari dan dipahami secara baik karena merupakan salah satu aspek penting di dalam usaha mengembangkan industri pertambangan batubara. Adapun parameter geometri lapisan batubara harus dikaitkan dengan kondisi penambangannya, karena hasil pemetaan mengenai geometri lapisan batubara akan menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu tahap penambangan. Pembagian parameter geometri lapisan batubara (Jeremic, 1985 dalam B. Kuncoro 2000) ini didasarkan pada hubungannya dengan terdapatnya lapisan batubara ditambang dan kestabilan lapisannya meliputi :

- a. Ketebalan lapisan batubara :
 - (1) sangat tipis, apabila tebalnya kurang dari 0,5 m,
 - (2) tipis 0,5-1,5 m,
 - (3) sedang 1,5-3,5 m,
 - (4) tebal 3,5-25 m, dan
 - (5) sangat tebal, apabila >25 m.
- b. Kemiringan lapisan batubara:
 - (1) lapisan horisontal,
 - (2) lapisan landai, bila kemiringannya kurang dari 25°,
 - (3) lapisan miring, kemiringannya berkisar 25°-45°,
 - (4) lapisan miring curam, kemiringannya berkisar 45°-75°, dan
 - (5) vertikal.
- c. Pola kedudukan lapisan batubara atau sebarannya:
 - (1) teratur dan
 - (2) tidak teratur.
- d. Kemenerusan lapisan batubara:
 - (1) ratusan meter,
 - (2) ribuan meter 5-10 km, dan menerus sampai lebih dari 200 km.

Metoda Penambangan Terbuka

Menurut Prof. Partanto Prodjosumarto metoda Penambangan secara terbuka dengan menggunakan alat mekanik dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok metode yaitu:

1. '*Open Cast Mine*'

Metode ini biasanya diterapkan untuk menambang endapan-endapan bijih (ore). Secara umum metode ini menggunakan siklus operasi penambangan yang konvensional, yaitu : pemecahan batuan dengan pemboran dan peledakan, diikuti operasi penanganan material penggalian, pemuatan dan pengangkutan. Salah satu contoh metode open pit/open cast adalah seperti yang diterapkan di PT. Freeport Indonesia dan PT. Kelian Equatorial Mining.

2. "Quarry"

Suatu metode tambang terbuka yang ditetapkan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri.

Berdasarkan letak endapan yang digali atau arah penambangannya secara garis besar quarry dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- A. Slide hill type diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang letaknya di lereng bukit atau endapannya berbentuk bukit.
- B. Pit Type, diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang terletak pada suatu daerah yang relatif datar.

3. "Strip Mine" adalah metode penambangan yang diterapkan terhadap endapan bahan galian yang letaknya dekat dari permukaan, dengan posisi datar (horizontal) atau sedikit miring. Misalnya: batubara, belerang, yodium, dll.

4. "Alluvial Mine" adalah metode penambangan yang diterapkan terhadap endapan – endapan alluvial seperti: bijih emas, bijih besi, bijih timah putih, bijih tembaga, pasir, dan lain – lain.

Dalam melakukan suatu perancangan tambang terbuka, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Data Yang Diperlukan Untuk Perancangan Tambang Terbuka

Data yang diperlukan untuk membuat rancangan suatu tambang terbuka adalah :

- 1) Peta topografi dan peta geologi dengan skala 1 : 1000 atau 1 : 2000.
- 2) Data geologi dan eksplorasi rinci endapan bahan galian: letaknya, bentuknya (cincin, lensa, disseminated (tersebar), urat (vein), batolith, dll), stratigrafi/litologi, dip & strike, kadar bijih rata-rata, ukuran/dimensinya, jumlah sumber daya dan cadangan (measured/proven reserve), kadar rata-rata dan penyebaran kadar, dll.
- 3) Data geoteknik.
- 4) Data hidrologi dan geohidrologi.
- 5) Data kegempaan.
- 6) Data keekonomian

B. Pertimbangan-Pertimbangan Dalam Perancangan Tambang

Perancangan tambang harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan, yaitu :

- 1) Pertimbangan ekonomis (*Economic Considerations*). Pertimbangan ekonomis meliputi:

A. Cut off Grade

Ada 2 (dua) pengertian tentang *cut off grade*, yaitu :

- a. Kadar endapan bahan galian terendah yang masih memberikan keuntungan apabila ditambang.
- b. Kadar rata-rata terendah dari endapan bahan galian yang masih memberikan keuntungan apabila endapan tersebut ditambang.
Cut off grade inilah yang akan menentukan batas-batas atau besarnya cadangan, serta menentukan perlu tidaknya dilakukan *mixing / blending*.

B. Break Even Stripping Ratio (BESR)

Untuk menganalisis kemungkinan sistem penambangan yang akan digunakan, apakah tambang terbuka ataukah tambang bawah tanah, maka dipelajari *break even stripping ratio* (BESR), yaitu perbandingan antara biaya penggalian endapan bijih (*ore*) dengan biaya pengupasan tanah penutup (*overburden*) atau merupakan perbandingan selisih biaya penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka dengan biaya pengupasan secara tambang terbuka. BESR ini juga disebut *over all stripping ratio*.

2) Pertimbangan Teknis (*Technical/Engineering Considerations*)

Pertimbangan Teknis meliputi :

- 1) Penentuan ultimate pit limit.
- 2) Pertimbangan struktur geologi yang dominan.
- 3) Pertimbangan geometri.

Tahapan Kegiatan Penambangan Batubara

- *Land Clearing*

Tahapan pekerjaan penambangan umumnya diawali dengan mempersiapkan lahan, yaitu mulai dari pemotongan pepohonan hutan, pembabatan sampai ke pembakaran hasilnya, yang dinamakan *land clearing*. Jadi *land clearing* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembersihan material hutan yang meliputi pepohonan, hutan belukar sampai alang-alang.

- Pengupasan Tanah Penutup

Pengertian kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup yaitu pemindahan suatu lapisan tanah atau batuan yang berada diatas cadangan bahan galian, agar bahan galian tersebut menjadi tersingkap. Untuk mewujudkan kondisi kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup yang baik diperlukan alat yang mendukung dan sistematika pengupasan yang baik. Pekerjaan pengupasan lapisan tanah penutup merupakan kegiatan yang mutlak harus dikerjakan pada pertambangan terutama pada kegiatan penambangan yang menggunakan sistim tambang terbuka. Kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup ditentukan oleh rencana target produksi, semakin baik rancangan pada pengupasan lapisan tanah penutup maka rencana target produksi semakin baik. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan metode dan alat yang mendukung pengupasan lapisan tanah penutup.

- Pemboran Peledakan Pemboran

Dilakukan untuk bermacam-macam tujuan, antara lain adalah untuk penempatan bahan peledak, pemercontohan (merupakan metoda sampling utama dalam eksplorasi), dalam tahap development seperti penirisan dan tes pondasi, serta dalam tahap eksploitasi untuk penempatan baut batuan & kabel batuan. Jika dihubungkan dengan operasi peledakan, penggunaan terbesar adalah pemboran produksi (Nurhakim, 2004). Urutan pekerjaan peledakan adalah pemboran, pemuatan bahan peledak, penyambungan rangkaian peledakan dan penembakan. Prinsip pemboran adalah mendapatkan kualitas lubang ledak yang tinggi dengan pemboran yang cepat dan dalam posisi yang tepat. Guna mendapatkan hasil peledakan yang baik, yaitu volume bongkaran lapisan batuan yang besar dengan fragmentasi yang sesuai untuk dimanfaatkan serta biaya yang seminimal mungkin. Pada peledakan jenjang posisi dari suatu lubang ledak dapat memberikan keuntungan maupun kerugian dalam memperoleh hasil peledakan yang baik. Dalam upaya menghasilkan fragmentasi batuan yang diinginkan serta mengurangi terjadinya bahaya *flyrock* yang merupakan akibat sampingan dari proses peledakan, maka terlebih dahulu perlu ditinjau pemakaian arah lubang ledak. Pada perinsipnya terdapat dua cara

untuk membuat lubang ledak, yaitu membor dengan lubang miring dan membor dengan lubang tegak.

- Peledakan Peledakan
Merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemboran yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melepas batuan dari batuan induknya dengan harapan menghasilkan bongkaran batuan yang berukuran lebih kecil sesuai dengan yang diharapkan sehingga memudahkan dalam proses pendorongan, pemuatan, pengangkutan, dan konsumsi material.
- Penggalian dan Pemuatan
Semua satuan operasi yang terlihat dalam penggalian atau pemindah tanah/batuan selama penambangan disebut penanganan material (material handling). Pada siklus operasi, dua operasi utama pemuatan dan transportasi dengan kerekan sebagai operasi optimal ketiga, jika transportasi vertikal diperlukan.
- Pengangkutan (Hauling)
Material dalam jumlah besar dalam industri pertambangan di transport dengan haulage (pemindahan tanah ke arah horisontal) dan hoisting (pemindahan tanah ke arah vertikal).
- Reklamasi Revegetasi
Reklamasi adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki lahan bekas tambang atau lahan terbuka, dan pengelolaannya sesudah selesainya penambangan. Reklamasi dan Revegetasi bertujuan memperbaiki lahan bekas tambang untuk pelestarian lingkungan dan penanggulangan resiko akibat dampak dari pertambangan. Jadi Revegetasi dan Reklamasi adalah bagian integral dari rencana keseluruhan operasional pertambangan secara terpadu dimulai Perencanaan, eksplorasi sampai penggunaan lahan baru pasca penambangan. Tujuan akhir dari rencana reklamasi adalah untuk menyakinkan bahwa lahan bekas tambang dikembalikan pada penggunaan yang produktif (Kartosudjono, 1994).

2. PEMBAHASAN INVESTASI BATUBARA

Meskipun industri pertambangan merupakan bagian dari dunia industri umum tetapi terdapat karakteristik khusus dari investasi pada industri pertambangan yang berbeda dengan industri lainnya. Pemahaman tentang karakteristik khusus ini penting untuk melakukan analisis kelayakan suatu proyek tambang. Beberapa karakteristik tersebut adalah (Stermole & Stermole, 1996):

A. Modal Besar

Besarnya modal yang dibutuhkan untuk industri tambang bervariasi, tergantung dari jenis bahan tambang, metode penambangan, skala penambangan, lokasi dan parameter lainnya.

B. Periode Pra Produksi yang Panjang

Lama periode pra produksi tergantung dari metode penambangan, metode pengolahan, ukuran dan letak deposit, kompleksitas operasi, dan kendala lingkungan. Periode pra produksi ini berkisar antara 3 – 12 tahun. Periode pra produksi yang panjang akan berdampak terhadap besar modal yang dibutuhkan dan terhadap tingkat pengembalian modal.

- C. Beresiko Tinggi
Disamping resiko yang berhubungan dengan kebutuhan modal yang besar serta masa pra produksi yang lama, terdapat resiko lain yang mempengaruhi keputusan investasi pada industri tambang, yaitu : resiko geologi, resiko engineering dan konstruksi, resiko ekonomi, resiko politik, dan resiko pasar mineral.
- D. Sumber Daya Alam Yang Tak Dapat Diperbaharui (Nonrenewable Resources)
Implikasi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini terhadap industri tambang adalah bahwa pendapatan utama perusahaan yang diperoleh dari penjualan bahan tambang, dan mengakibatkan umur tambang tergantung dari jumlah cadangan dan tingkat produksi sehingga dibutuhkan eksplorasi kontinyu untuk menemukan deposit baru.
- E. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dikarenakan letak aktivitas penambangan banyak terdapat di daerah terpencil, hal ini akan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
- F. Dampak Terhadap Lingkungan
Kegiatan eksploitasi bahan tambang akan mengubah bentang alam sehingga berdampak buruk terhadap keadaan lingkungan. Oleh karena itu tingkat kepedulian industri tambang terhadap lingkungan harus tinggi. Reklamasi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan penambangan dan pengolahan.
- G. Sifat Indestructibility of Product
Konsekuensi dari sifat ini adalah munculnya pasar sekunder dan dapat mengurangi prosentase kebutuhan akan bijih/bahan tambang. Daur ulang logam sering dipertimbangkan lebih menguntungkan dibandingkan menambang bijih untuk dijadikan logam.

Dikutip dari Pernyataan PSAK 33 Revisi 2013, salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menekan biaya dalam industri pertambangan terbuka adalah aktivitas pengupasan lapisan tanah (stripping cost) yang sebelumnya diatur dalam PSAK 33 (Revisi 2011) tentang "Akuntansi Pertambangan Umum" menggantikan PSAK 33 tahun 1994 dengan judul yang sama. Adapun tujuan dari PSAK 33 nya untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup pertambangan umum. Sejalan dengan semangat konvergensi terhadap International Financial Reporting Standards (IFRS) maka pernyataan dan interpretasi yang tidak ada padanannya dalam IFRS akan dicabut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). PSAK 33 revisi tahun 2011 sebagaimana di uraikan diatas adalah warisan dari PSAK 33 tahun 1994 yang di bawa dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1967.

Dengan demikian PSAK 33 Revisi 2011 khususnya yang mengatur tentang aktivitas pengupasan lapisan tanah (Stripping Cost) harus di cabut. Sehubungan dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah telah ada pengaturannya dalam IFRS yaitu International Financial Reporting Interpretations Committee 20 (IFRIC 20) Stripping Costs in Production Phase of a Surface Mine yang telah di adopsi oleh DSAK menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 29 (ISAK 29) tentang Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka yang pada tanggal 12 Juli 2013 telah disahkan oleh DSAK IAI dan berlaku efektif pada periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan ISAK ini berlaku retrospektif.

3. Kesimpulan

Sebagai akibat dari iklim ekonomi batubara yang semakin anjlok maka Mining Recovery harus dipertimbangkan dari berbagai aspek antara lain faktor teknis, faktor ekonomi dan faktor lingkungan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Faktor teknis yaitu karakteristik spasial dari batubara sendiri dari geologis dan hidrogeologis, sifat mekanik tanah batuan dan faktor teknologi. Faktor ekonomi antara lain jumlah cadangan, tingkat produksi, umur tambang, metode pertambangan serta biaya pengupasan lapisan tanah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Faktor lingkungan antara lain; topografi daerah, kondisi geologi, kondisi sosial budaya dan tersedianya tenaga kerja terdidik dan terampil.

Daftar Pustaka

- B. Kuncoro Prasongko, 1996, "Model Pengendapan Batubara Untuk Menunjang Eksplorasi dan Perencanaan Penambangan", Program Studi Rekayasa Pertambangan Bidang Khusus Eksplorasi Sumberdaya Bumi Program Pascasarjana ITB, 1996.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2013.** Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka. Jakarta
- Kuncoro Prasongko, B., 2002, Aplikasi Model Pengendapan Batubara, BTM (Buletin Teknologi Mineral) no. 15, UPN "Veteran" Yogyakarta
- Katosudjono W, 1994. Lingkungan pertambangan dan reklamasi, Direktorat Pertambangan Umum. Jakarta : Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
- Nurhakim, 2004. "Buku Panduan Kuliah Lapangan II Edisi ke – 2", Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru
- Prodjotumarto Partanto, 1993. Tambang Terbuka ITB, Bandung
- Stermole & Stermole, 1996. *Economic Evaluation and Investment Decision Methods (9th Edition)*
- Sutoyo. Sujatmika. 2014. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 29 Biaya Pengupasan Tahap Produksi Untuk Tambang Terbuka. *Proposal Penelitian Hibah Bersaing*. Kemenristek & Dikti RI.
- Sutoyo. Sujatmika. 2015. Biaya Produksi Tambang Terbuka. Journal of Economic & Social. LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
- <http://www.tambang.co.id/glencore-memangkas-produksi-batu-bara-4336/> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://aspindoimsa.or.id/asset/uploads/files/Keputusan%20Dirjen%20Minerba%20No.%20479%20K%20tahun%202014.pdf> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://marwanminer.blogspot.com/2010/02/tambang-terbuka.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://dapurtambang.blogspot.com/2014/07/metode-tambang-terbuka-dan-tambang-dalam.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://moa-desu.blogspot.com/2014/03/tambang-terbuka.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://www.tambang.co.id/glencore-memangkas-produksi-batu-bara-4336/> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://morrislawrence1991.blogspot.com/2014/12/perbedaan-psak-33-revisi-2011-dan-isak.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)

PENGUNGKAPAN ASET KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN MENURUT PSAK 60 DI INDONESIA (EVALUASI ATAS PSAK 50 & PSAK 55)¹⁰

Oleh:

Sri Luna Murdianingrum, FE Akuntansi UPNVY

Marita, FE Akuntansi UPNVY

ABSTRACT

This writing discusses the Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) 60. This study is limited into the measure of time from 2010 until today, focuses on standard governing the presentation and disclosure of financial instruments. This standard is very influential on the Indonesian banking disclose details of financial assets and the impairment of assets in the financial statements. So, this study aimed to describe the level of compliance of banks in Indonesia to implement SFAS. This writing uses the method of data collecting from any sources

Keywords : Banking, Financial asset, Impairment, PSAK 50 and 60

A. Latar Belakang

Instrumen keuangan merupakan kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya (IAS). Instrumen keuangan perusahaan akan terlihat di dalam laporan keuangan entitas, oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap instrumen keuangan yang dapat memberikan informasi yang menggambarkan kinerja entitas dan bermanfaat bagi para *stockholder*, *stackholder* maupun pengguna kepentingan lainnya, sesuai dengan Wolk, dkk (2000); Murdianingrum dan Marita (2014). Informasi yang terdapat pada nilai-nilai instrumen keuangan yang disajikan merupakan bagian yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga pada proses penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan harus sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku. Instrumen keuangan merupakan hal yang penting dan memiliki dampak bagi kemajuan pembangunan nasional dan perekonomian internasional, hal ini sesuai dengan Worldbank (2006).

Seperti yang diketahui, bahwa setiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda yang dapat mempersulit para pengguna laporan keuangan dalam memahami isi

¹⁰ Artikel ilmiah ini merupakan hasil penelitian Hibah Bersaing 2015 yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti RI. Tim peneliti menghaturkan terima kasih mendalam atas pendanaan ini kepada Kemenristek Dikti RI dan LPPM UPNVY yang memfasilitasi.

Tim peneliti menghaturkan terima kasih kepada Dr. Sri Suryaningsum, M.Si. (UPNVY) dan Dr. Bambang Jatmika, M.Si. (UMY) atas telaah dan diskusi mendalam mengenai perbankan dan IFRS, serta Sandy Ari Pratama, S.E. asisten penelitian ini.

dari laporan entitas. Hal ini membuat *International Accounting Standards Board* (IASB) menerbitkan standar akuntansi internasional yang dapat diteraokan oleh setiap negara yaitu *Internasional Financial Reporting Standard* (IFRS). Oleh karena itu setiap negara mulai melakukan konvergensi dari standar akuntansi yang dimiliki masing masing negara dengan IFRS. Tidak ketinggalan pula dengan Indonesia, yang saat ini juga sedang melakukan harmonisasi antara PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) agar sesuai dengan standar yang diterapkan Internasional. Salah satunya adalah PSAK 50 (revisi 2006) yang berisi tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan yang kemudian ditahun 2010 IAI merevisi lagi PSAK 50 menjadi PSAK 50 yang menjelaskan tentang penyajian instrumen keuangan dan PSAK 60 yang menjelaskan tentang pengungkapan instrumen keuangan. Kedua standar tersebut mengacu pada IAS (*International Accounting Standard*) yang telah diterapkan oleh seluruh perusahaan perbankan di Indonesia.

Hal ini menarik diangkat karena dalam PSAK 60, menjelaskan tentang pengungkapan instrumen keuangan yang dimiliki entitas. Hal ini sangat penting karena dengan adanya pengungkapan oleh entitas, maka dapat dilihat kinerja yang dimiliki entitas maupun kekayaan yang dimilikinya.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam tulisan ini mencakup beberapa pengertian dan cara cara penerapan PSAK 60. Dikutip dari IAI, tujuan dari pemisahan PSAK 60 dari PSAK 50 adalah agar dalam pembahasan pengungkapan instrumen keuangan yang dimiliki entitas dapat dilakukan lebih luas dan lebih mendalam.

Perkembangan Sektor Perbankan di Indonesia

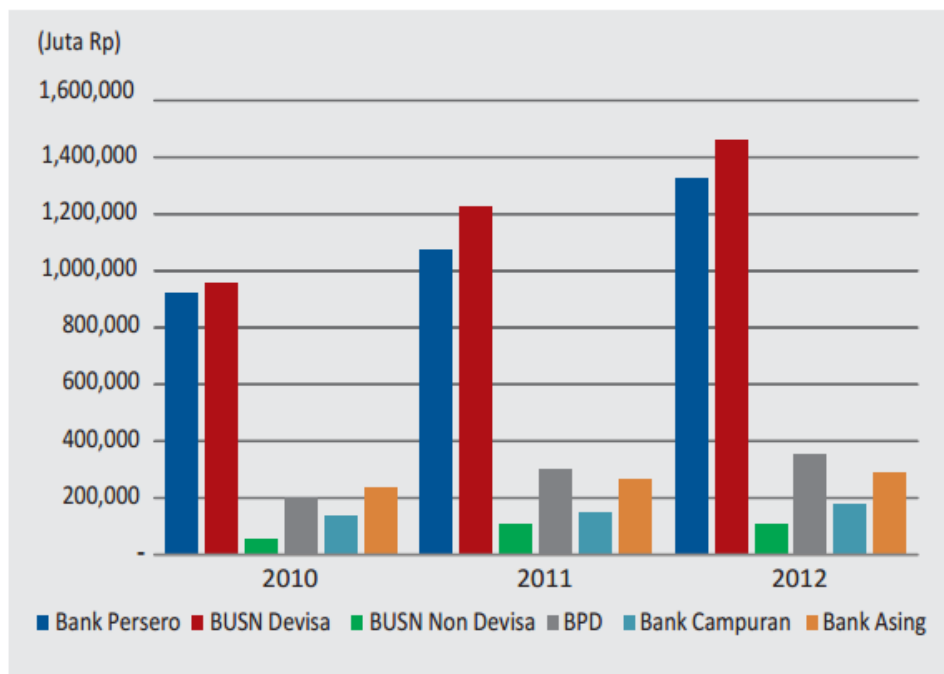
Jika dilihat tiga tahun sebelumnya, perusahaan perbankan dinilai cukup mampu dalam mempertahankan kinerja positifnya meski menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di tengah tingginya volatilitas perekonomian global, perbankan berhasil memperkuat peranannya dalam sistem keuangan Indonesia, antara lain dengan meningkatnya aspek kelembagaan. Menurut Halim Alamsyah, deputy gubernur Bank Indonesia 2013 dan Suryaningsum, 2015 bahwa penyebaran kantor bank di Indonesia 74% masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatra.

Perkembangan jumlah Bank dan Kantor Cabang

Kelompok Bank	2010	2011	2012
Bank Persero			
Jumlah Bank	4	4	4
Jumlah Kantor	4189	4362	5363
Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) - Devisa			
Jumlah Bank	36	36	36
Jumlah Kantor	6608	7209	7647
Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) - Non Devisa			
Jumlah Bank	31	30	30
Jumlah Kantor	1131	1288	1447
BPD			
Jumlah Bank	26	26	26
Jumlah Kantor	1413	1472	1712
Bank Campuran			
Jumlah Bank	15	14	14
Jumlah Kantor	263	260	263
Bank Asing			
Jumlah Bank	10	10	10
Jumlah Kantor	233	206	193
Total			
Jumlah Bank	122	120	120
Jumlah Kantor	13837	14797	16625
Jumlah Bank Umum Konvensional	111	109	109
Jumlah Bank Umum Syariah	11	11	11

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Secara umum, seluruh kelompok Bank mengalami kenaikan Aset dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2012. Kenaikan aset tertinggi secara nominal tercatat pada kelompok Bank Persero dan Bank BUSN (Bank Umum Swasta Nasional)



Tujuan PSAK 60

Tujuan dari PSAK 60 adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi:

- a. Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas; dan
- b. Sifat dari luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut.

Perbedaan PSAK 50 (Revisi 2006) dengan PSAK 60

Perbedaan PSAK 50 (Revisi 2006) dengan PSAK 60 yang telah dikonversi dengan IFRS. PSAK 60 merupakan pecahan dari PSAK 50 (Revisi 2006) yang sebelumnya membahas tentang instrumen keuangan: penyajian dan pengungkapan. Setelah konversi IFRS, PSAK 50 (Revisi 2010) mengatur tentang Instrumen Keuangan: Penyajian. Dan PSAK 60 mengatur tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Dengan dilakukannya konversi IFRS ini, maka ada beberapa bagian dalam PSAK 50 (revisi 2006) yang berubah. Hal-hal yang berubah antara lain :

A. Ruang Lingkup

1. Dalam Ruang lingkup PSAK 60 mencakup kontrak untuk pertimbangan kontinjensi dalam penggabungan usaha. Hal ini disebabkan karena dalam PSAK 22 (revisi 2010): *Kombinasi Bisnis*, pertimbangan kontinjensi dalam penggabungan usaha diukur dalam nilai wajar. Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) Kontrak untuk pertimbangan kontinjensi dalam penggabungan usaha bukan merupakan ruang lingkup PSAK 50 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan : Penyajian*.
2. Perbedaan yang kedua dari instrument Ruang lingkup adalah pada PSAK 60 Tidak mencakup ruang lingkup atas instrumen ekuitas tentang *puttable instrument* seperti yang diatur dalam PSAK 50 (revisi 2010). Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak mengatur mengenai pengungkapan *puttable instrument*.
3. Perbedaan yang ketiga dari pembahasan Ruang lingkup adalah pada PSAK 60 Berlaku untuk instrument keuangan yang diakui seperti aset keuangan dan liabilitas keuangan serta instrumen keuangan yang tidak diakui seperti komitmen perjanjian. Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak mengatur mengenai hal tersebut.

B. Signifikansi instrument keuangan untuk posisi dan kinerja keuangan.

Pada PSAK 60 Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrument keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak terdapat pembahasan mengenai persyaratan tersebut.

C. Laporan Posisi Keuangan kategori asset dan liabilitas keuangan.

Pada PSAK 60 Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan nilai tercatat untuk setiap kategori instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, hal ini sesuai dengan Emanuella (2012). Sedangkan Pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak terdapat pembahasan mengenai persyaratan tersebut.

D. Aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan.

Pada PSAK 60 Mengatur hal-hal yang perlu diungkapkan jika entitas menetapkan suatu instrument keuangan berupa:

1. pinjaman yang diberikandan piutang untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
2. liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan keuangan. Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak terdapat persyaratan tersebut.

E. Reklasifikasi

Pada PSAK 60 Mensyaratkan entitas mengungkapkan jumlah reklasifikasi ke dan dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi. Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) hanya mensyaratkan untuk mengungkapkan alasan reklasifikasi.

F. Penyisihan Kerugian Kredit

Pada PSAK 60 Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan rekonsiliasi perubahan pos penurunan nilai selama periode berjalan untuk setiap kelompok aset keuangan. Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak terdapat persyaratan tersebut.

G. Laporan Laba rugi komperhensif pos-pos penghasil, beban, keuntungan atau kerugian.

Di dalam PSAK 60 Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pos pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam laporan laba rugi komperhensif atau catatan atas laporan keuangan, yaitu:

1. Laba atau rugi neto aset keuangan atau liabilitas keuangan
2. Total pendapatan bunga dan total beban bunga.
3. Pendapatan dan beban imbalan dari aset atau liabilitas keuangan dan aktivitas wali amanat
4. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai
5. Jumlah kerugian penurunan nilai.

Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang persyaratan tersebut.

H. Pengungkapan lainnya kebijakan akuntansi.

Didalam peraturan PSAK 60 terdapat penjelasan mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi dan dasar pengukuran sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009) : *Penyajian laporan Keuangan* paragraph 72. seangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak terdapat persyaratan yang mengatur hal tersebut.

I. Nilai Wajar

Di dalam PSAK 60 terdapat pembahasan peraturan mengenai Sehubungan dengan nilai wajar, hal-hal yang perlu diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan tiga level hirarki nilai wajar.
2. Jika ada perbedaan nilai wajar saat pengakuan awal dengan jumlah yang ditentukan menggunakan teknik penilaian pada tanggal itu, maka mengungkapkan:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk pengakuan perbedaan
 - b. Agregat perbedaan yang diakui dan rekonsiliasi perubahan saldo perbedaan.
3. Sedangkan dalam PSAK 50 (revisi 2006) hal ini tidak diatur.

J. Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan

Dalam PSAK 60, mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi untuk mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan. Sedangkan dalam PSAK 50 (revisi 2006) tidak terdapat persyaratan mengenai hal ini.

K. Pengungkapan Kualitatif

Dalam PSAK 60, hal yang diungkapkan adalah:

1. eksposur risiko dan bagaimana risiko timbul
 2. tujuan, kebijakan, proses pengelolaan risiko dan metode untuk mengukur risiko
 3. setiap perubahan (1) dan (2) dari periode sebelumnya
- Sedangkan hal ini tidak diungkapkan dalam PSAK 50 (revisi 2006)

L. Pengungkapan Kualitatif Resiko Kredit

Dalam PSAK 60, Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan:

1. jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit
2. uraian agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan perikatan kredit

3. informasi kualitas kredit aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai
 4. jumlah tercatat aset keuangan telah jatuh tempo atau penurunan nilai setelah negosiasi.
Sedangkan dalam PSAK 50 (Revisi 2006) Hanya mengungkapkan informasi eksposur risiko kredit, termasuk jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit.
- M. Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit – Aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai.
Dalam PSAK 60 Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan:
1. analisa umur aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai
 2. analisa dan factor penurunan nilai
 3. jumlah (1) dan (2), uraian agunan dan peningkatan perikatan kredit.
Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak terdapat penjelasan mengenai Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit – Aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai.
- N. Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit Agunan dan peningkatan kualitas kredit lainnya yang diperoleh.
Didalam PSAK 60 Ketika memperoleh aset melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan, mengungkapkan:
1. jenis dan jumlah tercatat aset yang diperoleh
 2. kebijakan pelepasan aset ketika aset tidak siap dikonversi.
Sedangkan pada PSAK 50 (Revisi 2006) tidak ada persyaratan yang membahas tentang Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit Agunan dan peningkatan kualitas kredit lainnya yang diperoleh.
- O. Pengungkapan Kuantitatif – Risiko Likuiditas
Berdasarkan PSAK 60, suatu entitas harus mengungkapkan:
1. analisa jatuh tempo untuk non-derivatif liabilitas keuangan
 2. analisa jatuh tempo untuk derivatif liabilitas keuangan
 3. uraian pengelolaan risiko likuiditas melekat pada (a) dan (b)
Tetapi dalam PSAK 50 (revisi 2006) hal ini tidak diatur.
- P. Pengungkapan Kuantitatif – Risiko Pasar – Analisa Sensitivitas
PSAK 60 Mengungkapkan:
- a. analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar
 - b. asumsi dan metode yang digunakan dalam analisa sensitivitas
 - c. perubahan asumsi dan metode analisa sensitivitas
Sedangkan dalam PSAK 50 (revisi 2006) hal ini tidak diungkapkan.
- Q. Pengungkapan Kuantitatif - Risiko Pasar Lainnya
PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan fakta dan alasan jika entitas tidak dapat merepresentasikan analisa sensitivitas, sedangkan dalam PSAK 50 (revisi 2006) hal ini tidak diatur

PSAK 60 Pada Perbankan

Dalam PSAK 60 dijelaskan bahwa perusahaan diwajibkan menggunakan penjelasan tentang instrumen keuangan, hal ini sesuai dengan Murdianingrum dan Marita (2014).. Tabel

di bawah ini menjelaskan pengungkapan kebijakan instrumen keuangan pada catatan atas laporan keuangan oleh perbankan:

Pengungkapan Kebijakan Instrumen Keuangan di Perbankan Periode 2010 sampai dengan 2012

No.	Poin Pengungkapan	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kategori instrumen keuangan	30	100%	30	100%	30	100%
2	Pengakuan Awal	20	66.67%	21	70%	21	70%
3	Pengukuran setelah pengakuan awal	12	40%	15	50%	15	50%
4	Saling hapus instrumen	26	86.67%	27	90%	27	90%
5	Pengukuran nilai wajar	21	70%	23	77%	22	73%
6	Biaya perolehan diamortisasi/ Suku bunga efektif	17	56.67%	22	73%	20	67%
7	Penurunan Nilai	30	100%	30	100%	30	100%
8	Reklasifikasi	25	83.33%	27	90%	26	87%
9	Penghentian Pengakuan	30	100%	30	100%	30	100%
10	Penjelasan Kebutuhan Instrumen keuangan tambahan	10	33.33%	10	33%	15	50%

Sumber: BEI, 2014

Berdasarkan tabel di atas, semua perbankan telah melakukan pengungkapan mengenai katagori instrumen keuangan melalui laporan keuangan. Sedangkan pada poin penjelasan kebutuhan instrumen keuangan tambahan, perbankan mengungkapkannya paling sedikit. Hal ini bisa jadi dikarenakan transaksi yang dilakukan perbankan terkait dengan instrumen keuangan tambahan jarang karena pengungkapan melalui catatan atas laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dapat dilihat dalam tabel diatas pengungkapan kebijakan atas instrumen keuangan lainnya cukup tinggi, diaatas 50%. Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan memahami penyajian atas laporan keuangan.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan ini adalah, sektor perbankan di Indonesia telah melakukan pengungkapan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu PSAK 60. Dengan penerapan PSAK 60 pada perusahaan perbankan, diharapkan laporan keuangan entitas dapat digunakan tidak hanya di dalam negeri, tetapi dapat digunakan internasional karena telah sesuai dengan standar yang ditetapkan internasional. Berdasarkan dari tulisan ini, implikasi terapan bagi sektor perbankan adalah untuk tetap meningkatkan penyajian dan pengungkapan terkait kebijakan instrumen keuangan.

Daftar Pustaka

- Bragg, Steven M. 2012. Panduan IFRS (edisi revisi). Terjemahan Thomas Sumarsan. Jakarta : Indeks
- Emanuela. 2012. Analisis Penerapan PSAK 50 Dan 55 (Revisi 2006) Atas Impairment Piutang Pada Perusahaan Multifinance. Skripsi program S1 Universitas Indonesia. Diunduh pada tanggal 6 Mei 2015.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 60 (revisi 2010). Undang Undang Republik Indonesia.
- Murdianingrum, Sri Luna. Marita. 2014. Pengaruh Dampak Penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan. Proposal Hibah Bersaing 2014. Kemenristek Dikti RI.
- Murdianingrum, Sri Luna. Marita. 2015. **PENGUNGKAPAN ASET KEUANGAN DAN IMPAIRMENT PADA SEKTOR PERBANKAN MENURUT PSAK 60 DI INDONESIA. Proses Terbit edisi Perdana Eksos Juli 2015.**
- Suryaningsum, Sri. Sakti, Kaharuddinsyah Leon. Negara, Hari Kusuma. 2014. *Perbankan Syariah*. Gosyen Publishing.
- Suryaningsum, Sri. 2015. *Perbankan Syariah & Perbankan Komersial*. LPPM UPNVYK Press.
- Worldbank. 2006. A Decade of Measuring the Quality of Governance. The International Bank for Reconstruction and Development. The Worldbank, Washington.
- Wolk, Harry I., Michael G. Tearney, dan James L Dodd. 2000. *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. South-Western College Publishing.

www.bi.go.id diakses pada tanggal 7 Mei 2015

www.idx.co.id diakses pada tanggal 7 Mei 2015

www.wikipedia.co.id/slash/instrumen.keuangan _diakses pada tanggal 6 Mei 2015